

20102 Identifikasi Data

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, perlu dilakukan identifikasi data agar data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan dapat digunakan dengan baik. Salah satu langkah identifikasi data di DKPPP Kab. Temanggung, melalui:

1. Form Survei Kebutuhan Data yang ada di Website DKPPP. Apabila terdapat permohonan informasi data baru, segera ditindaklanjuti oleh bidang terkait dan terhubung dengan pemohon data melalui kontak yang diinputkan melalui formulir.
2. Permohonan data langsung oleh instansi lain ataupun masyarakat
3. Forum Data
 - a. Forum data yang diadakan oleh Penyelenggara SDI Tingkat Kabupaten, yang salah satu hasilnya yaitu menghasilkan dokumen perencanaan tingkat kabupaten RKPD
 - b. Forum data yang diadakan oleh DKPPP untuk pengumpulan data

Form Survei Kebutuhan Data pada Website DKPPP:

https://dkppp.temanggungkab.go.id/frontend/menu_k/46

SURVEI KEBUTUHAN DATA
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kab. Temanggung

**FORM KEBUTUHAN DATA STATISTIK
DKPP KAB. TEMANGGUNG**

Formulir ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan data statistik di DKPPP Kab. Temanggung oleh pengguna yang terdiri dari 2 bagian yaitu Informasi Pribadi dan Informasi Kebutuhan Data.

erisazain@gmail.com [Switch account](#)

* Indicates required question

Email *

Hasil Survei Kebutuhan Data:

FORM KEBUTUHAN DATA STATISTIK DKPPP KAB. TEMANGGUNG (Responses)

Timestamp	Email Address	Nama	Instansi	Instansi	Apakah Anda menggunakan Data Statistik ur	Untuk keperluan apa Anda menggunakan Dat	Jenis Data apa yang Anda butuhkan?	Jika ada Data lain yang Anda butuhkan, sebut	Alamat e-mail	No. WhatsApp	TINDAK LANJUT
20/2/2025 16:21:58	garm@gmail.com	Erista Miftakhul Jannah	Mahasiswa	SMA	Ya	sebagai sumber pengetahuan	Pertanian	Data jumlah produksi cabai dan harga cabai		21	Selesai
15/3/2025 09:37:29	gix@gmail.com	Yogi Api	Umum	-	Ya	Mengolah dan memberikan saran berdasarkan Da	Pertanian	Mohon informasi untuk luas tanam, luas panen		93	Selesai
5/11/2025 13:31:01	hy@gmail.com	MAHENDRA ADHI	Umum	Umum	Ya	Mengolah dan memberikan saran berdasarkan Da	Perikanan	Data banyak benih ikan di temanggung berdasar		79	Selesai
4/1/2026 14:11:34	roji@gmail.com	TRI WIBOWO	Swasta lainnya	Swasta	Ya	sebagai sumber pengetahuan	Ketahanan Pangan	Tinggak ketahanann pangan di Kab. Temanggung		50	Eskalasi Bidang Terki



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI HARGA
DAN KETERSEDIAAN KOMODITAS CABAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH**

NOMOR : 100.2.2.3/12/VIII/2024
NOMOR : 415.4/26/19/PKS/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (12-08-2024) kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. JAKA BUDI SANTOSA : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soeharso No.45 Purwokerto Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bupati Banyumas Nomor: 100.2.2.3/10/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JOKO BUDI NURYANTO : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Suyoto Nomor 7 Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Khusus dari Bupati Temanggung Nomor: 415.4/569/2024 tanggal 8 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pertanian di Kabupaten Banyumas;
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pertanian di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor: 136.3/26/X/2022 dan Nomor: 415.4/033/01.1/KB/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Harga dan Ketersediaan Komoditas Cabai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara PARA PIHAK, yang memuat hak dan kewajiban.
2. Komoditas Cabai adalah merupakan salah satu komoditas sayur unggulan termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Pengendalian Inflasi adalah suatu kebijakan yang mencakup 4 (empat) komponen, antara lain keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

- (2) Tujuan PKS ini disusun agar pelaksanaan pemanfaatan data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai dapat terwujud guna mendukung PARA PIHAK dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 3

OBJEK

Objek PKS ini adalah data harga dan ketersediaan komoditas cabai (cabai rawit merah, cabai besar dan cabai merah keriting) di wilayah PARA PIHAK yang bersumber dari pemantauan di tingkat produsen dan pasar.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup PKS meliputi:
- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi harga cabai di tingkat produsen dan pasar;
 - b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ketersediaan komoditas cabai di tingkat produsen;
 - c. evaluasi pelaksanaan PKS;
 - d. kegiatan lain yang berhubungan dengan pengendalian inflasi.
- (2) Data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan asli yang belum diolah dan dikelola serta dalam penguasaan PARA PIHAK untuk mendukung PARA PIHAK dalam upaya Pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK memiliki hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dan memanfaatkan data dan/atau informasi harga cabai di tingkat produsen dan pasar;
 - b. mendapatkan dan memanfaatkan data dan/atau informasi ketersediaan komoditas cabai di tingkat produsen;
 - c. mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) PARA PIHAK memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menyampaikan data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai di tingkat produsen dan pasar;
 - b. melaksanakan pemanfaatan data dan/atau informasi harga dan ketersediaan komoditas cabai dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 - c. menginformasikan kegiatan PARA PIHAK dalam upaya Pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK, dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK dan/atau beberapa PIHAK berniat memperpanjang PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan PKS ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan PKS ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan PKS ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara langsung membatalkan PKS ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan antara PARA PIHAK dalam PKS ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Banyumas
U.p. : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
Alamat : Jalan Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto
Nomor Telepon : (0281) 641069
Nomor Faksimile : (0281) 636931
 - b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Temanggung
U.p. : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. Suyoto No. 7, Temanggung
Nomor Telepon : (0293) 491043
Nomor Faksimile : (0293) 491007, 491990
Email : Pertanian.dkppptmg@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK setelah terjadinya perubahan korespondensi dimaksud.

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam PKS ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam PKS ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



JOKO BUDI NURYANTO

PIHAK KESATU,



JAKA BUDI SANTOSA



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 496 1389 Faximili (0293) 496 1995
Surat Elektronik: kominfo@temanggungkab.go.id laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id

Nomor : B/3/048/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Undangan

Temanggung, 9 Januari 2025

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
(terlampir)
2. Kepala Kantor/Lembaga/
Instansi Vertikal se-
Kabupaten Temanggung

di -

TEMANGGUNG

Dalam rangka penyusunan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan hormat kami mohon kesediaan Saudara untuk menunjuk satu orang personil guna menjadi anggota Tim Pengumpul Data Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sesuai dengan format terlampir. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar tim pengumpul data tahun sebelumnya.

Selanjutnya kami mohon personil yang ditunjuk untuk dapat hadir pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Lantai 4 Dinkominfo Temanggung
Acara : Rapat Forum Data Statistik Sektoral Kabupaten
Temanggung Tahun 2025
Keterangan : Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
085182377147 (Erisa Zainina)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997021006

Tim Pengumpul Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung:

NO	NAMA	INSTANSI
1	-	Inspektorat
2	Nani Kartika	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3	Rahma Asitta Zatin	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4	Alvianita Kusuma Admaja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Dhuri Adnan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Murni	Dinas Kesehatan
7	Amallia Eka Putri Kusuma	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
8	Siti Kusmiyati	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Ali Masyhadi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Dany Ahmad Hanafif	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
11	Tamara Agrita Lestari	Dinas Perhubungan
12	Hendratina Rokhmah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
13	Wahyudi	DPPPAPPKB
14	Khusni Zaki Zamani	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
15	Ario Purba Supardjo	Dinas Sosial
16	Jatmika Shafari	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
17	Muhammad Nur Amin	DINKOPAG
18	Sudaryadi	DINPERMADES
19	Nanik Puji Rahayu	RSUD Kabupaten Temanggung
20	Ika Erlina Adi Setyowati	Sekretariat DPRD
21	Yohan Andriyanto	BPBD
22	Lipli Arizon	Sentra Terpadu Kartini Temanggung
23	Umi Nur Aspiatiningsih	Kantor Kementerian Agama
24	Arip Widiyanto	KPP Pratama Temanggung
25	Iqfa Kholifatun Nadiroh	Pengadilan Agama
26	Arief Hartanto	Pengadilan Negeri
27	Adam Jatikusumo Bayu Aji	Polres Temanggung
28	Octavia Ayu Hardiyanti	PPSDSN "Penganthi" Temanggung
29	Alfi Artiani	Rumah Tahanan Negara Temanggung
30	Hani Afridaning Tiyas	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
31	Heru Siswanto	Perhutani BKPH Temanggung
32	Arif Fahroji	PD. Bhumi Phala Wisata
33	Wahyu Aji Disnanto	PDAM Temanggung
34	Tatang Festiawan	PT. PLN (Persero) ULP Temanggung
35	Gin Rinayanti	PMI Temanggung
36	Oktaviano Prihutama	PT. PLN (Persero) ULP Parakan
37	Pentarina Intan Laksmiawati	PT. Pos Indonesia Cabang Temanggung
38	Adil Permata Hati	RS PKU Muhammadiyah
39	Margareth Sunaring Eka P	RSK Ngesti Waluyo
40	Siwi Asmarani	RSU Gunung Sawo

BIODATA TIM PENGUMPUL DATA
KEGIATAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NAMA	
NIP	
PANGKAT/GOL	
JABATAN	
OPD/INSTANSI	
NOMOR HP	
EMAIL	

KEPALA DINAS

.....

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 496 1389 Faximili (0293) 496 1995
Surat Elektronik: kominfo@temanggungkab.go.id laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id

Nomor : B/2/048/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Temanggung, 9 Januari 2025

Kepada:

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Temanggung

di -

TEMANGGUNG

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk
menugaskan 2 (dua) personil Seksi Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Temanggung pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Lantai 4 Dinkominfo Temanggung
Acara : Rapat Forum Data Statistik Sektorl Kabupaten
Temanggung Tahun 2025

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan
bantuannya kami sampaikan terima kasih.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997021006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 496 1389 Faximili (0293) 496 1995
Surat Elektronik: kominfo@temanggungkab.go.id laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id

Nomor : B/4/048/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Temanggung, 9 Januari 2025

Kepada:

Yth. Kepala BAPPEDA Temanggung
di -

TEMANGGUNG

Dengan hormat, berkaitan dengan kedudukan BAPPEDA Kabupaten Temanggung selaku Sekretariat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, dengan ini kami mohon bantuan menugaskan personil yang menangani SDI untuk hadir pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Lantai 4 Dinkominfo Temanggung
Acara : Rapat Forum Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Keterangan : Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 085182377147 (Erisa Zainina)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997021006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 496 1389 Faximili (0293) 496 1995
Surat Elektronik: kominfo@temanggungkab.go.id laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN
FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025
NOMOR : 048 / 3 / 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, disepakati hasil pembahasan Daftar Data dan Daftar Data Prioritas dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dihadiri oleh Walidata, Sekretariat SDI, Pembina Data, serta Produsen Data.

Memperhatikan, mendengarkan, dan mempertimbangkan :

1. Paparan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku Walidata;
2. Paparan dari Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung selaku Sekretariat SDI yang disampaikan oleh Perencana Ahli Muda Bappeda ;
3. Paparan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Statistisi Ahli Muda selaku Pembina Data
4. Tanggapan dan saran dari seluruh Produsen Data Kabupaten Temanggung sebagai peserta forum.

MENYEPAKATI :

- PERTAMA** : Daftar Data dan Daftar Data Prioritas berupa data statistik dan data geospasial yang mengacu pada Data Prioritas Nasional, Data Prioritas Provinsi Jawa Tengah, Data E-Walidata SIPD RI, IUP, serta data lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Produsen Data dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yakni jumlah daftar data sebanyak 4.824 data dan data prioritas sebanyak 314 data. Selanjutnya dari daftar data dan data prioritas hasil kesepakatan perlu disahkan melalui Surat Keputusan;
- KEDUA** : Kegiatan guna pelaksanaan rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2025;
- KETIGA** : Kode Referensi atau Data Induk yang digunakan oleh produsen data dalam melakukan penyelenggaraan data masih sesuai dengan Kesepakatan Forum SDI Tahun 2024 yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau;
- KEEMPAT** : Timeline untuk penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 sebagai berikut :
- a. Proses Input Data : 15 – 31 Januari 2025
 - b. Pengecekan Data : 14 Januari - Februari 2025

- c. Desk Verifikasi dan Validasi : 4 – 6 Februari 2025
- d. Pengolahan dan Editing Data : 6 – 28 Februari 2025
- e. Unggah Data Final : 3 Maret 2025
- f. Cetak Buku : 3 – 25 Maret 2025
- g. Rilis Publikasi : 25 atau 26 Maret 2025;

KELIMA : Dokumentasi dari kegiatan forum ini berupa Undangan, Notulensi, Berita Acara, Presensi, Materi, serta Dokumentasi Gambar dapat diakses oleh seluruh peserta rapat melalui link <https://s.id/DokForumSDI2025>.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mewakili Peserta Rapat Forum SDI :

No	Nama	Penyelenggara SDI	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Lisa Puspitasari, S.Sos	Walidata SDI Kabupaten Temanggung	Dinkominfo	
2.	Fika Hidayah L,ST	Sekretariat SDI Kabupaten Temanggung	BAPPEDA Kabupaten Temanggung	
3.	Triyono Aristanto, S.ST	Pembina Data Statistik SDI Kabupaten Temanggung	BPS Kabupaten Temanggung	
4.	Ali Masyhadi, A.Md.	Produsen Data SDI Kabupaten Temanggung	DPMPTSP	
5.	Desy Anggraeni	Produsen Data SDI Kabupaten Temanggung	PT. Pos Indonesia Cabang Temanggung	

Dokumentasi Forum SDI Tahun 2025 Kab. Temanggung

https://kominfo.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/11020





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216 Telepon (0293)4961389
Faximili 4961995 Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id Laman :
www.kominfo.temanggungkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Tempat : Aula Dinkominfo Temanggung
Dimulai Jam : 08:30:00 WIB s.d. Selesai
Acara : Forum Data SDI Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
1	FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T	Perencana Ahli Muda	081227027505	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
2	LISA PUSPITASARI, S.Sos	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	08156856241	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3	GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.S.i	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	081328109239	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
4	RIZKI FITRIANY, S.Kom	PRANATA KOMPUTER MAHIR	085743423279	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
5	LUGAS NUR JATMONO, S.T.	Sandiman Pertama	082167557283	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
6	AIMAN NUR AGUSTIN, ST	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	081328741150	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
7	SUPRIYATI, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	082114844808	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
8	AKHMAD SAFIYUDIN, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	085729542123	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
9	TRI LISTYA, S.A.P.	Operator Sandi dan Telekomunikasi	081328384228	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
10	HANDOYO, S.T.	SANDIMAN MUDA	08122640455	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
11	ERISA ZAININA JANAH, S.Stat.	Statistisi Pertama	085520942203	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
12	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA	081328069046	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
13	SUDARYADI, S.A.P	Analisis Manajemen Perkantoran	085292577430	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
14	ALI MASYHADI, A.Md	PRANATA KOMPUTER MAHIR	085727455135	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
15	SITI KUSMIYATI	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	085878222230	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
16	TRIYONO ARISTANTO	Prakom Ahli Muda	08156582935	BPS Kab Temanggung	
17	Herman susilo	Stat muda	085729298885	Bps kab temanggung	
18	MUHAMMAD NUR AMIN, A.Md.Ak.	Pengelola Keuangan	089668854801	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
19	DHURI ADNAN, S.T	Pranata Komputer Mahir	081578874069	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
20	JATMIKA SHAFARI	Pengadministrasi Keuangan	085842062733	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
21	Fatmawati Isnaini	Pelaksana analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan	081539257858	Kementerian Agama Kabupaten Temanggung	
22	RUSNANI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	085643430800	DINAS SOSIAL	
23	Restu Handayani	Staf Tata Usaha dan Personalia	085727995729	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	
24	Siwi Asmarani	Staf admin	0895413593660	Rsu gunung sawo	
25	RAHMA ASITTA ZATIN, A.Md.Ak.	Pengelola Program dan Laporan	089671887874	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
26	HERU SISWANTO	Kepala Urusan Teknik Kehutanan	085229385757	PERHUTANI	
27	KHUSNI ZAKI ZAMANI, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	085741997408	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	
28	YOHAN ANDRIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	085743315727	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
29	Octania Ayu Hardiyanti, S.Tr.Sos.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	085320696136	PPSDSN Penganthi Temanggung	
30	DEWI ASTUTI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	088227738155	PPSDSN PENGANTHI TEMANGGUNG	

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
31	IKA ERLINA ADISETYOWATI, SE,M.Si	KABAG UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	08156866340	SEKRETARIAT DPRD	
32	NANI KARTIKA, A.Md	PRANATA KOMPUTER MAHIR	085228796770	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
33	DANY AHMAD HANAFIF, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	082323866695	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
34	TAMARA AGRITA LESTARI, A.Md.	Arsiparis Terampil	0895363623327	DINAS PERHUBUNGAN	
35	WAHYUDI	Pengadministrasi Umum	081578756789	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
36	Iqfa Kholifatun Nadiroh	Jurusita Pengganti	082312970841	Pengadilan Agama Temanggung	
37	ALVIANITA KUSUMA ADMAJA, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	085641118920	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
38	Desy tri anggraeni	Spv pelayanan	085641957895	Kantor pos temanggung	
39	Arip Widiyanto	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	08124670176	KPP Pratama Temanggung	
40	ARI SAPUTRA, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	082242284363	INSPEKTORAT	
41	Arif fahroji	Staff	088232505004	PD Bhimi phala wisata	

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
42	Oktaviano Prihutama	Team Leader	081269686087	PLN Temanggung	
43	tatang Festiyawan	TL PPA	081332421869	PLN Parakan	
44	ALEX KUSBIYANTO, S.E.	Analisis Kebijakan Muda	081 392 607 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

PPTK / Pejabat

Lisa Puspitasari, S.Sos.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025



Jl. Jendral Ahmad Yani No 32 Temanggung
Telepon (0293) 491004 Faksimili (0293) 491040 491801



info@temanggungkab.go.id



Pemkab Temanggung



www.temanggungkab.go.id



pemkabtmg



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR xxii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 LATAR BELAKANG I-1

1.2 PROSES PENYUSUNAN..... I-3

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-8

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-11

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN..... I-12

1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD I-13

**BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... II-1**

2.1 KONDISI UMUM DAERAH II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-1

2.1.1.1 Aspek Geografi..... II-1

2.1.1.2 Kondisi Demografi..... II-14

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-22

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi..... II-22

2.1.2.2 Struktur Ekonomi..... II-30

2.1.2.3 PDRB Perkapita II-34

2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..... II-37

2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan II-48

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia II-56

2.1.2.7 Ketimpangan II-64

2.1.2.8 Aspek Seni Budaya dan Olahraga II-68

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II-70

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar II-70

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar II-89

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II-144

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... II-152

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-158

2.1.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-173
2.1.3.7	Unsur Kewilayahan.....	II-176
2.1.3.8	Unsur Pemerintahan Umum	II-182
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-184
2.1.5	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)	II-197
2.1.6	Penyelenggaraan Pemantauan dan Pengendalian Pemerintah Daerah.....	II-197
2.2	EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-200
2.2.1	Evaluasi Kinerja Utama.....	II-200
2.2.2	Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-201
2.2.3	Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-224
2.2.4	Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan	II-245
2.2.5	Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..	II-253
2.2.6	Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..	II-258
2.2.7	Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-266
2.2.8	Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan.....	II-268
2.2.9	Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum	II-274
2.2.10	Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	II-276
2.2.11	Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-291
2.2.12	Evaluasi Kinerja Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)	II-293
2.3	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	II-288
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-288
2.3.1.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-288
2.3.1.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-289
2.3.2	Isu Strategis	II-302
2.4	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH.....	II-311
2.4.1	Kinerja Prioritas Nasional (PN) RKPD 2024 di Daerah	II-311
2.4.2	Intervensi Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2024	II-316
2.5	INOVASI DAERAH.....	II-319

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III-1

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH III-1

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional III-1

3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-4

3.1.3 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah III-6

3.1.4 Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah..... III-7

3.1.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung III-9

3.1.6 Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung.. III-10

3.1.6.1 Pertumbuhan Ekonomi III-11

3.1.6.2 Struktur Ekonomi III-13

3.1.6.3 PDRB Per Kapita III-16

3.1.6.4 Inflasi..... III-17

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-19

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-22

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah..... III-32

3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah III-40

3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah . III-41

3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah III-42

3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga..... III-42

3.2.2.5 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Seluruh Perangkat Daerah III-43

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah III-43

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... III-44

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan..... III-44

3.3 OPINI BPK-RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..... III-48

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 VISI DAN MISI RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEMANGGUNG 2005-2025 IV-2

4.1.1 Visi IV-2

4.1.2 Misi IV-4

4.2 VISI DAN MISI RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEMANGGUNG 2025-2045..... IV-6

4.2.1	Visi	IV-6
4.2.2	Misi.....	IV-6
4.3	TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.....	IV-8
4.3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Daerah Tahun 2024-2026	IV-8
4.3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	IV-12
4.4	TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	IV-17
4.4.1	Tema Pembangunan Tahun 2025	IV-17
4.4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-18
4.5	ARAH KEBIJAKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2045	IV-74
4.6	KONTRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019 PADA TAHUN 2025	IV-79
4.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA TAHUN 2025.....	IV-80
4.8	SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET SDGs KABUPATEN TEMANGGUNG	IV-82
4.9	SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENANGANAN STUNTING KABUPATEN TEMANGGUNG.....	IV-84
4.10	DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	IV-86
4.11	SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN TEMANGGUNG	IV-90
4.12	FASILITASI PERUBAHAN IKLIM.....	IV-93
4.13	SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	IV-96
4.14	KEBIJAKAN DAN STRATEGI HASIL MUSRENBANG RKPD 2025	IV-102
4.15	PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.....	IV-111
4.16	PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV-112

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 RENCANA KERJA DAERAH.....	V-1
5.1.1 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 Kabupaten Temanggung Terhadap Prioritas Nasional (PN)	V-2
5.1.1.1 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 terhadap Arah Kebijakan RKP Tahun 2025	V-2
5.1.1.1.1 Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	V-4
5.1.1.1.2 Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan, Keamanan Negara, dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	V-9
5.1.1.1.3 Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
5.1.1.1.4 Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	V-38
5.1.1.1.5 Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi	V-61
5.1.1.1.6 Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.....	V-67
5.1.1.1.7 Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta	

memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .. V-73

5.1.1.1.8 Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur V- 85

5.1.1.2 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025..... V-90

5.1.3 Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) V-119

5.1.4 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah..... V-136

5.1.5 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Satu Data Indonesia..... V-165

5.2 PENDANAAN DAERAH V-165

5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang..... V-166

5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang..... V-187

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH..... VI-1

6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH..... VI-3

6.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... VI-6

6.4 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAERAH VI-27

6.5 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH VI-34

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kelas Kemiringan per Kecamatan di Kabupaten Temang- Gung.....	II-2
Tabel 2.2	Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung .	II-6
Tabel 2.3	Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian.....	II-7
Tabel 2.4	Jenis Geologi Kabupaten Temanggung Tiap Kecamatan....	II-8
Tabel 2.5	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	II-9
Tabel 2.6	Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	II-11
Tabel 2.7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	II-14
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023	II-15
Tabel 2.9	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2023.....	II-16
Tabel 2.10	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023	II-17
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Tahun 2019 – 2023 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2019 – 2023	II-18
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2023	II-20
Tabel 2.13	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2023.....	II-20
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2023	II-21
Tabel 2.15	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2019-2023	II-22
Tabel 2.16	Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	II-23
Tabel 2.17	Pertumbuhan Lapangan Usaha Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023....	II-24
Tabel 2.18	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmang- gung Tahun 2019-2023.....	II-27
Tabel 2.19	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan.....	II-28
Tabel 2.20	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-29
Tabel 2.21	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen)	II-30
Tabel 2.22	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten	

	Temanggung (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2023.....	II-31
Tabel 2.23	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berla- ku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (milyar rupiah) Tahun 2019-2023	II-33
Tabel 2.24	Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)	II-34
Tabel 2.25	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023	II-34
Tabel 2.26	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan Rata- rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung...	II-35
Tabel 2.27	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya	II-38
Tabel 2.28	Perbandingan TPT Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023	II-39
Tabel 2.29	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelang- manggung Tahun 2019-2023	II-40
Tabel 2.30	Perbandingan TPT Daerah dengan Target RKP Kewilaya- han	II-41
Tabel 2.31	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-42
Tabel 2.32	Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-43
Tabel 2.33	Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Pengang- gur Selama 5 Tahun.....	II-44
Tabel 2.34	Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	II-45
Tabel 2.35	Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023.....	II-46
Tabel 2.36	Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional Tahun 2019-2023	II-46
Tabel 2.37	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Ke- miskinan) dengan Target RKPD	II-49
Tabel 2.38	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKP Kewilayahan	II-49
Tabel 2.39	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capai- an Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-50
Tabel 2.40	Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023	II-50
Tabel 2.41	Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin	

	Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Capaian Nasional ...	II-51
Tabel 2.42	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-52
Tabel 2.43	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional	II-52
Tabel 2.44	Perbandingan Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Capaian Nasional Tahun 2019-2023.....	II-53
Tabel 2.45	Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Perbandingan Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-54
Tabel 2.46	Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2019-2023	II-55
Tabel 2.47	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-56
Tabel 2.48	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH, RLS, HLS, Pengeluaran per Kapita Daerah dengan Target RKPD	II-57
Tabel 2.49	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya	II-57
Tabel 2.50	Perbandingan Pertumbuhan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-57
Tabel 2.51	Perbandingan AHH dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-59
Tabel 2.52	Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2.53	Perbandingan HLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-60
Tabel 2.54	Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Capaian Rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-60
Tabel 2.55	Perbandingan RLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-61
Tabel 2.56	Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-62
Tabel 2.57	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-63
Tabel 2.58	Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun	

	2019-2023.....	II-63
Tabel 2.59	Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2023.....	II-65
Tabel 2.60	Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya.....	II-65
Tabel 2.61	Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Capaian Nasional Tahun 2019-2023	II-65
Tabel 2.62	Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II-66
Tabel 2.63	Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-67
Tabel 2.64	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2019-2023.....	II-67
Tabel 2.65	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini.....	II-68
Tabel 2.66	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung.....	II-69
Tabel 2.67	Indek Pembangunan Olahraga.....	II-70
Tabel 2.68	APK dan APM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-70
Tabel 2.69	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-71
Tabel 2.70	Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-71
Tabel 2.71	Persentase Satuan PNF Terakreditasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-72
Tabel 2.72	Gambaran Urusan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023	II-73
Tabel 2.73	Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-80
Tabel 2.74	Gambaran Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-81
Tabel 2.75	Gambaran Urusan Perumahan di Kabupaten Temanggung	II-82
Tabel 2.76	Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-84
Tabel 2.77	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Temanggung	II-86
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung.....	II-88
Tabel 2.79	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-91
Tabel 2.80	Persentase Peserta Pelatihan Menjadi Wirausaha Baru Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-91
Tabel 2.81	Daftar Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten	

	Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-92
Tabel 2.82	Persentase Tenaga Kerja Formal Tahun 2019-2023	II-92
Tabel 2.83	Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-93
Tabel 2.84	Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-94
Tabel 2.85	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB Tahun 2019-2023	II-94
Tabel 2.86	Persentase Peserta Pelatihan Produktivitas Kewirausahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya di Kabupaten Temang- Gung Tahun 2019-2023	II-95
Tabel 2.87	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temang- Gung Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.88	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.89	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerin- tah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.90	Rasio PD yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.91	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-98
Tabel 2.92	Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-98
Tabel 2.93	Persentase Terbentuknya Kecamatan Layak Anak Tahun 2019-2023	II-99
Tabel 2.94	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-100
Tabel 2.95	Gambaran Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-101
Tabel 2.96	Gambaran Urusan Pertanahan di Kabupaten Temanggung	II-102
Tabel 2.97	Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH	II-102
Tabel 2.98	Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-103
Tabel 2.99	IKLH Kabupaten Temanggung dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-103
Tabel 2.100	Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-104
Tabel 2.101	Tabel Jakstrada dan Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023	II-105
Tabel 2.102	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 dan 2023	II-107
Tabel 2.103	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2019-2023	II-108
Tabel 2.104	Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023	II-108
Tabel 2.105	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-109
Tabel 2.106	Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-109

Tabel 2.107	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023	II-110
Tabel 2.108	Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-110
Tabel 2.109	Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non-Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-111
Tabel 2.110	Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Non-Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-111
Tabel 2.111	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-112
Tabel 2.112	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-113
Tabel 2.113	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	II-113
Tabel 2.114	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-113
Tabel 2.115	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-114
Tabel 2.116	Persentase Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-114
Tabel 2.117	Persentase Desa Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2019-2023.....	II-115
Tabel 2.118	Persentase Desa yang Menetapkan Penyusunan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023	II-115
Tabel 2.119	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan APBDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023	II-116
Tabel 2.120	Persentase Jumlah Desa yang Menerapkan Siskeudes Tahun 2019-2023	II-116
Tabel 2.121	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu Tahun 2019-2023	II-117
Tabel 2.122	Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu Tahun 2019-2023	II-118
Tabel 2.123	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa Tahun 2019-2023	II-118
Tabel 2.124	Persentase Desa yang Tertib Mengelola Aset Desa Tahun 2019-2023	II-119
Tabel 2.125	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif Tahun 2019-2023	II-119
Tabel 2.126	Peringkat (Ranking) BUMDesa.....	II-120
Tabel 2.127	Persentase BUMDesa yang Aktif Tahun 2019-2023	II-120
Tabel 2.128	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif Tahun 2019-2023	II-121
Tabel 2.129	Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapan	II-121
Tabel 2.130	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023	II-122
Tabel 2.131	Gambaran Urusan Perhubungan di Kabupaten	

	Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-123
Tabel 2.132	Nilai Indek Tingkat Kematangan SPBE	II-126
Tabel 2.133	Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 .	II-126
Tabel 2.134	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temang- gung Tahun 2019-2023.....	II-127
Tabel 2.135	Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temang- gung Tahun 2019-2023.....	II-128
Tabel 2.136	Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-129
Tabel 2.137	Persentase Kepatuhan LPP Terhadap Norma Siaran	II-129
Tabel 2.138	Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-130
Tabel 2.139	Persentase Ketersediaan Jaringan Intranet Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-131
Tabel 2.140	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi di Kabupa- ten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-132
Tabel 2.141	Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-134
Tabel 2.142	Indikator Urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-135
Tabel 2.143	Capaian Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-136
Tabel 2.144	Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-138
Tabel 2.145	Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-139
Tabel 2.146	Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-140
Tabel 2.147	Gambaran Urusan Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-141
Tabel 2.148	Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-141
Tabel 2.149	Gambaran Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temang- gung Tahun 2019-2023.....	II-142
Tabel 2.150	Gambaran Urusan Perpustakaan di Kabupaten Temang- gung Tahun 2019-2023.....	II-143
Tabel 2.151	Gambaran Urusan Kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-144
Tabel 2.152	Gambaran Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-145
Tabel 2.153	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-146
Tabel 2.154	Gambaran Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-147
Tabel 2.155	Gambaran Urusan Perdagangan di Kabupaten Temang- gung Tahun 2019-2023.....	II-150
Tabel 2.156	Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temang- gung Tahun 2019-2023.....	II-151
Tabel 2.157	Nilai EKPPD Tahun 2019-2023	II-152

Tabel 2.158	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019-2023	II-153
Tabel 2.159	Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-154
Tabel 2.160	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	II-154
Tabel 2.161	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023	II-154
Tabel 2.162	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-155
Tabel 2.163	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-156
Tabel 2.164	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-157
Tabel 2.165	Skor Survei Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI	II-158
Tabel 2.166	Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2019-2023	II-158
Tabel 2.167	Gambaran Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023	II-159
Tabel 2.168	Gambaran Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023	II-160
Tabel 2.169	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-160
Tabel 2.170	Program pada RPJMD yang Tidak Dilaksanakan di RKPD 2023	II-161
Tabel 2.171	Program pada Perubahan RKPD diluar Perubahan RPJMD	II-162
Tabel 2.172	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023	II-162
Tabel 2.173	Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapa- tan Daerah	II-163
Tabel 2.174	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-163
Tabel 2.175	Tanggal dan Nomor Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2024	II-163
Tabel 2.176	Gambaran Urusan Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-164
Tabel 2.177	Kondisi SiLPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-166
Tabel 2.178	Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-166
Tabel 2.179	Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2022 Dibanding- kan dengan Persentase Pengukuran	II-166
Tabel 2.180	Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-167
Tabel 2.181	Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan sesuai Jenjang Jabatan	II-168
Tabel 2.182	Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Teknis/Fung- sional sesuai Jenjang Jabatan	II-169
Tabel 2.183	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-170
Tabel 2.184	Persentase Hasil Krenova yang Dikembangkan di Kabupa- ten Temanggung Tahun 2019-2023	II-171
Tabel 2.185	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temang-	

	gung Tahun 2019-2023.....	II-173
Tabel 2.186	Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-174
Tabel 2.187	Persandingan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023	II-174
Tabel 2.188	Gambaran Urusan Pengawasan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-174
Tabel 2.189	Rekapitulasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022	II-175
Tabel 2.190	Capaian Rata-Rata IKM di Kecamatan Tahun 2019-2023 ..	II-176
Tabel 2.191	Capaian Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tahun 2019-2023	II-177
Tabel 2.192	Capaian Persentase Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2019-2023	II-178
Tabel 2.193	Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Tahun 2019-2023	II-178
Tabel 2.194	Capaian Sarpras Lokal Kelurahan Kondisi Layak Tahun 2019-2023	II-179
Tabel 2.195	Capaian Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif Tahun 2019-2023	II-179
Tabel 2.196	Capaian Penanganan Laporan Kejadian Tahun 2019-2023	II-180
Tabel 2.197	Capaian Tempat Ibadah Kondisi Baik Tahun 2019-2023 ..	II-180
Tabel 2.198	Capaian Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan Tahun 2019-2023	II-181
Tabel 2.199	Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2019-2023	II-181
Tabel 2.200	Capaian Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan Tahun 2019-2023	II-182
Tabel 2.201	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Tahun 2019-2023	II-183
Tabel 2.202	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2019-2023	II-183
Tabel 2.203	Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2023	II-184
Tabel 2.204	Persentase Jumlah Sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2023	II-184
Tabel 2.205	Angka Konsumsi Rumah Tangga Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-187
Tabel 2.206	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Bahan Makanan dan Non-Bahan Makanan Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-188
Tabel 2.207	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 Triwulan IV	II-188
Tabel 2.208	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-188
Tabel 2.209	Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung Tahun	

	2019-2023	II-189
Tabel 2.210	Perkembangan Angka Kriminalitas Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 Triwulan IV.....	II-189
Tabel 2.211	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 Triwulan IV ...	II-192
Tabel 2.212	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-193
Tabel 2.213	Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-193
Tabel 2.214	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-193
Tabel 2.215	Indeks Kemudahan Berusaha Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-195
Tabel 2.216	Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik Kabupaten Temanggung.....	II-195
Tabel 2.217	Simbol dan Status Capaian Kinerja RPJMD.....	II-200
Tabel 2.218	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	II-201
Tabel 2.219	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2023	II-205
Tabel 2.220	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2023	II-210
Tabel 2.221	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023.....	II-217
Tabel 2.222	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023	II-219
Tabel 2.223	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.....	II-220
Tabel 2.224	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya Penanggulangan Bencana Tahun 2023	II-222
Tabel 2.225	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2023	II-224
Tabel 2.226	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2023	II-227
Tabel 2.227	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023	II-229
Tabel 2.228	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2023.....	II-230
Tabel 2.229	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2023	II-231
Tabel 2.230	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023.....	II-232
Tabel 2.231	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023	II-234
Tabel 2.232	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.....	II-235
Tabel 2.233	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023	II-237

Tabel 2.234	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2023.....	II-239
Tabel 2.235	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	II-241
Tabel 2.236	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.....	II-242
Tabel 2.237	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2023	II-243
Tabel 2.238	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2023	II-244
Tabel 2.239	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2023	II-245
Tabel 2.240	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2023	II-245
Tabel 2.241	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2023	II-246
Tabel 2.242	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2023.....	II-247
Tabel 2.243	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2023	II-247
Tabel 2.244	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	II-248
Tabel 2.245	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2023	II-249
Tabel 2.246	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2023	II-250
Tabel 2.247	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2023.....	II-254
Tabel 2.248	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2023	II-255
Tabel 2.249	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2023	II-256
Tabel 2.250	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2023	II-256
Tabel 2.251	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2023	II-260
Tabel 2.252	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2023	II-261
Tabel 2.253	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2023	II-263
Tabel 2.254	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2023	II-266
Tabel 2.255	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023	II-267
Tabel 2.256	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023	II-268
Tabel 2.257	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023	II-269
Tabel 2.258	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan	

	Tahun 2023	II-271
Tabel 2.259	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023	II-277
Tabel 2.260	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023	II-280
Tabel 2.261	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023	II-281
Tabel 2.262	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023	II-281
Tabel 2.263	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023	II-282
Tabel 2.264	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023.....	II-283
Tabel 2.265	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan pilihan Tahun 2023	II-284
Tabel 2.266	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023	II-285
Tabel 2.267	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2023	II-286
Tabel 2.268	Capaian sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023	II-287
Tabel 2.269	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah unsur Penunjang urusan pemerintahan Tahun 2023	II-287
Tabel 2.270	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023	II-288
Tabel 2.271	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023	II-288
Tabel 2.272	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Kewilayahan Tahun 2023	II-289
Tabel 2.273	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur kewilayahan Tahun 2023.....	II-289
Tabel 2.274	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023.....	II-290
Tabel 2.275	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023.....	II-291
Tabel 2.276	Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Temanggung Tahun 2023.....	II-291
Tabel 2.277	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	II-291

Tabel 2.278	Capaian Indikator SDGs Tahun 2023.....	II-293
Tabel 2.279	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan di Daerah dengan Nasional.....	II-311
Tabel 2.280	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	II-312
Tabel 2.281	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	II-312
Tabel 2.282	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	II-314
Tabel 2.283	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.....	II-315
Tabel 2.284	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	II-316
Tabel 2.285	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	II-316
Tabel 2.286	Intervensi Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal.....	II-317
Tabel 2.287	Intervensi Daerah dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan	II-318
Tabel 2.288	Intervensi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Berkualitas.....	II-318
Tabel 2.289	Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024	II-323
Tabel 2.290	Krenova dan Penjaringan Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 2022	II-324
Tabel 2.291	Nama Program di RKPD dan Renja yang Mendukung Program Unggulan	II-361
Tabel 2.292	Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Unggulan.....	II-362
Tabel 2.293	Identifikasi Kekuatan, Peluang, Ancaman dan Tantangan	II-369
Tabel 2.294	Masalah dan Tindak Lanjut.....	II-371
Tabel 2.295	Hasil Pelaksanaan Program Unggulan	II-372
Tabel 2.296	Outcome Langsung Program Unggulan pada Komoditas Kopi dan Domba	II-372
Tabel 2.297	Capaian PDRB Kabupaten Temanggung.....	II-372
Tabel 2.298	Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2024	II-374
Tabel 2.299	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019	II-374
Tabel 2.300	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020	II-377
Tabel 2.301	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-379
Tabel 2.302	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung	

	Tahun 2022	II-380
Tabel 2.303	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-383
Tabel 2.304	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-391
Tabel 3.1	Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	III-5
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025	III-8
Tabel 3.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Eko- mi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2025	III-12
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK Tahun 2018-2023	III-13
Tabel 3.5	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Te- manggung Tahun 2018-2023	III-16
Tabel 3.6	Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasio- nal	III-18
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung.....	III-28
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020....	III-36
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Tahun 2021-2023, APBD 2024 dan Proyeksi 2025 Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ...	III-37
Tabel 3.10	Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah.....	III-40
Tabel 3.11	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	III-41
Tabel 3.12	Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah.....	III-42
Tabel 3.13	Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah.....	III-42
Tabel 3.14	Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja.....	III-43
Tabel 3.15	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung	III-46
Tabel 4.1	Keterkaitan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	IV-10
Tabel 4.2	Keselaran Target Indikator Makro RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	IV-12
Tabel 4.3	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	IV-17
Tabel 4.4	Prioritas dan Fokus Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	IV-26
Tabel 4.5	Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025.....	IV-28
Tabel 4.6	Persandingan antara Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung ..	IV-30
Tabel 4.7	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2025	IV-32

Tabel 4.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-38
Tabel 4.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.	IV-41
Tabel 4.10	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025	IV-59
Tabel 4.11	Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	IV-62
Tabel 4.12	Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	IV-77
Tabel 4.13	Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025	IV-82
Tabel 4.14	Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting	IV-84
Tabel 4.15	Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	IV-87
Tabel 4.16	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-90
Tabel 4.17	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	IV-93
Tabel 4.18	Ketersediaan Komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung	IV-97
Tabel 4.19	Sasaran, Prioritas Daerah dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-98
Tabel 4.20	Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2025 Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	IV-102
Tabel 5.1	Rekapitulasi Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Arah Kebijakan dalam RKP 2025	V-2
Tabel 5.2	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).....	V-4
Tabel 5.3	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	V-9
Tabel 5.4	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	

	Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	V-32
Tabel 5.5	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas ..	V-38
Tabel 5.6	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	V-61
Tabel 5.7	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	V-67
Tabel 5.8	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	V-73
Tabel 5.9	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8 : Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur	V-85
Tabel 5.10	Dukungan Program Daerah dalam RKD Tahun 2025-2026 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2025.....	V-90
Tabel 5.11	Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	V-91
Tabel 5.12	Dukungan Program Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial	V-95
Tabel 5.13	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	V-104
Tabel 5.14	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Reformasi Birokrasi.....	V-111
Tabel 5.15	Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2025 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).....	V-120
Tabel 5.16	Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2025 Daerah	V-136

Tabel 5.17	Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2025.....	V-137
Tabel 5.18	Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan	V-140
Tabel 5.19	Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025	V-147
Tabel 5.20	Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender	V-148
Tabel 5.21	Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah.....	V-157
Tabel 5.22	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung	V-158
Tabel 5.23	Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	V-159
Tabel 5.24	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2025.....	V-160
Tabel 5.25	Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 .	V-163
Tabel 5.26	Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025	V-164
Tabel 5.27	Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia...	V-165
Tabel 5.28	Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang	V-187
Tabel 5.29	Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program	V-190
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Menjabarkan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	VI-2
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	VI-3
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2025	VI-7
Tabel 6.4	Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah	VI-27
Tabel 6.5	Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah	VI-35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan RKPD Tahun 2025.....	I-2
Gambar 1.2	Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	I-3
Gambar 1.3	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan....	I-12
Gambar 2.1	Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah	II-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Temanggung	II-4
Gambar 2.3	Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung	II-5
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung.....	II-7
Gambar 2.5	Peta Geologi Kabupaten Temanggung	II-9
Gambar 2.6	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung.....	II-10
Gambar 2.7	Gambaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Temang- gung Tahun 2024	II-16
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-17
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan atau Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2019-2023	II-18
Gambar 2.10	Grafik Piramida Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	II-19
Gambar 2.11	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023.....	II-23
Gambar 2.12	Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Kabupaten Temanggung	II-26
Gambar 2.13	Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023	II-27
Gambar 2.14	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-29
Gambar 2.15	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023.....	II-36
Gambar 2.16	Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023	II-36
Gambar 2.17	Perbandingan TPT dengan Target RKPD Tahun 2019-2023.....	II-37
Gambar 2.18	Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-38
Gambar 2.19	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengemba- ngan Gelangmanggung Tahun 2019-2023.....	II-39
Gambar 2.20	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan	

	Gelangmanggung Tahun 2019-2023.....	II-40
Gambar 2.21	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2023	II-41
Gambar 2.22	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-44
Gambar 2.23	Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023.....	II-45
Gambar 2.24	Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dengan Capaian Nasional	II-47
Gambar 2.25	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023....	II-48
Gambar 2.26	Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-51
Gambar 2.27	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-100
Gambar 2.28	Total Pencapaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2023.....	II-105
Gambar 2.29	Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2019-2023 dengan Program RKPD Tahun 2023	II-161
Gambar 2.30	Progres Nilai PDSD Kabupaten Temanggung.....	II-185
Gambar 2.31	Progres Nilai Aspek PDSD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.....	II-186
Gambar 2.32	Perkembangan Pelanggan Listrik di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-189
Gambar 2.33	Capaian Indikator Kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2023.....	II-276
Gambar 2.34	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023	II-277
Gambar 2.35	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023	II-277
Gambar 2.36	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023	II-278
Gambar 2.37	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023	II-279
Gambar 2.38	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023	II-280
Gambar 2.39	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan pemerintahan Pilihan Tahun 2023	II-281
Gambar 2.40	Capaian Indikator Kinerja Program Unsur pendukung Urusan pemerintahan Tahun 2023.....	II-282
Gambar 2.41	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2023	II-283
Gambar 2.42	Capaian Indikator Kinerja Program Unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2023	II-284

Gambar 2.43	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023.....	II-284
Gambar 2.44	Capaian Indikator Kinerja Program unsur pengawasan urusan pemerintahan Tahun 2023	II-285
Gambar 2.45	Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur Kewilayahan Tahun 2023.....	II-286
Gambar 2.46	Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Kewilayahan Tahun 2023.....	II-286
Gambar 2.47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur pemerintahan umum	II-287
Gambar 2.48	Capaian Indikator Kinerja Program unsur pemerintahan umum Tahun 2023	II-287
Gambar 3.1	Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	III-15
Gambar 3.2	Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	III-15
Gambar 3.3	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	III-24
Gambar 3.4	Pendapatan Kabupaten Temanggung.....	III-27
Gambar 3.5	Belanja Daerah Kabupaten Temanggung	III-40
Gambar 4.1	Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-1
Gambar 4.2	Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-25
Gambar 4.3	Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Penentuan Prioritas Pembangunan	IV-26
Gambar 4.4	Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan RPD.....	IV-27

1.1 LATAR BELAKANG

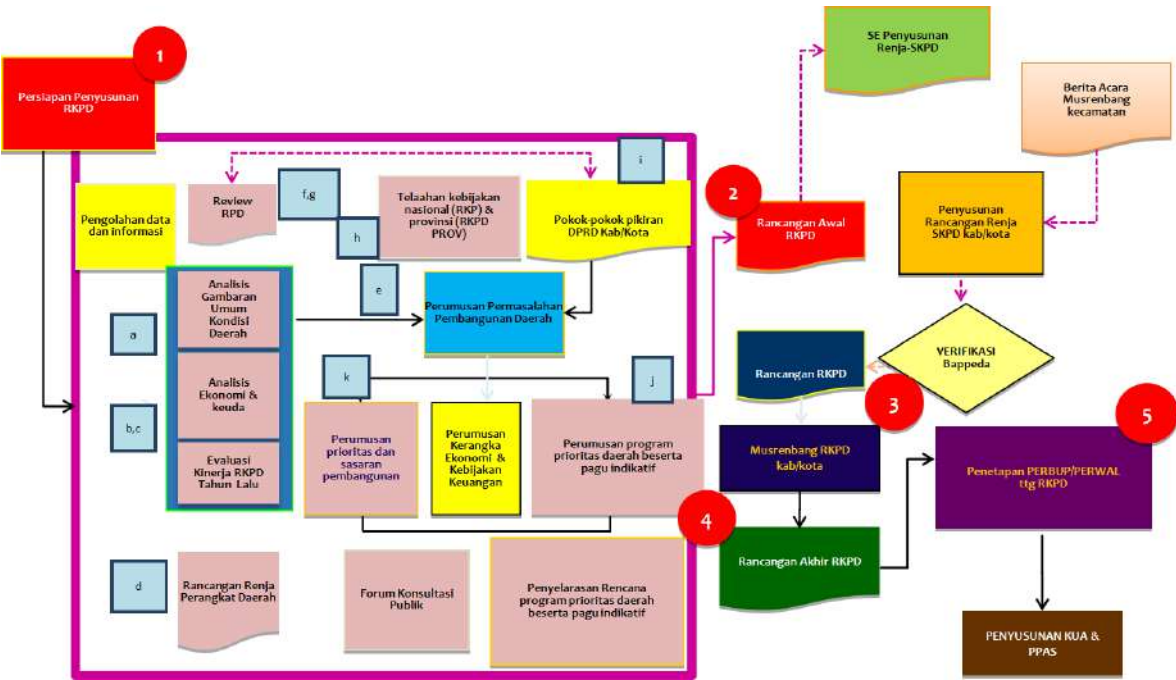
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025, merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 yaitu “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, pada saat belum tersedia RPJMD, maka penyusunan RKPD akan mengacu pada RPJPD. Namun, sesuai dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada aspirasi yang disampaikan oleh daerah, RPJPD yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD karena penyusunannya belum mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menjadi dasar penyusunan RPD, yang nantinya menjadi pedoman penyusunan RKPD.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan salah satu tahap dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang harus realistis dan mampu dicapai sebagai target serta mampu menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada.

Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dilakukan dengan menerapkan pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom-up*, serta dilakukan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan

perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2025. Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dijelaskan pada gambar berikut ini



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD Tahun 2025

Proses rencana penyusunan RKPD Tahun 2025 yang mengikuti Alur penyusunan sebagaimana pada Gambar 1.1 di atas. Proses penyusunan secara alur waktu perencanaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 1.2
Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

1.2 PROSES PENYUSUNAN

Secara umum tahapan dan proses penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal RKPD

Perumusan dan Penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada bulan Desember 2023. Rancangan awal RKPD Tahun 2025 berisikan panduan dan koridor perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan pendekatan perencanaan teknokratik.

2. Musrenbang RKPD di Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025 di kelurahan dilaksanakan pada tanggal 23-26 Oktober 2023. Peserta Musrenbang RKPD pada 23 kelurahan rata-rata diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri lurah dan perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan,

kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kelurahan, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, pengurus partai politik tingkat kelurahan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan jalannya musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang, dengan tujuan mengetahui dan menilai pelaksanaan musrenbang RKPD di kelurahan apa sudah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan format penilaian yang terdapat pada lampiran Form L15 dari Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Metode evaluasi yang digunakan dengan pemberian bobot penilaian terhadap aspek waktu pelaksanaan dan administrasi pendukungnya, persentase kehadiran dari berbagai unsur yang diundang beserta lampirannya, proses pelaksanaan dan hasilnya. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan pelaksanaan musrenbang terbaik, yang akan diberikan hadiah berdasarkan peringkat pertama, kedua dan ketiga dengan besaran hadiah sesuai kemampuan daerah berupa tambahan pagu indikatif kelurahan.

3. Konsultasi Publik Rancangan Awal

Konsultasi publik yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023 merupakan forum konsultasi yang diikuti oleh perangkat daerah dan perwakilan masyarakat, LSM, Lembaga Non Pemerintahan, Forum Anak, Forum Lansia, dan *stakeholders* lain yang turut dalam proses perencanaan pembangunan. Forum ini ditayangkan secara *live streaming* oleh TV Temanggung guna menjangkau masukan dan saran dari peserta forum yang selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan RPJPD Tahun 2025-2045. Acara ini dilanjutkan dengan Pemberian Piagam Penghargaan Bupati Temanggung terhadap 15 tokoh yang telah berkontribusi terhadap capaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah sejak tahun 2019 hingga tahun 2023.

4. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di kecamatan berlangsung antara tanggal 8-11 Januari 2024. Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan rata-rata diikuti oleh terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan unsur staf kecamatan, pengurus partai politik tingkat kecamatan dan/atau anggota DPRD daerah pemilihan setempat, delegasi dari Desa dan/atau Kelurahan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kecamatan, perwakilan kelompok profesi Tingkat Kecamatan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, perwakilan unsur pendidikan/akademisi.

Sebagaimana Musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda juga mengirimkan Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD di kecamatan, dengan menggunakan format yang terdapat pada lampiran Form C12 dari Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan dengan memberikan bobot penilaian terhadap aspek waktu pelaksanaan dan administrasi pendukungnya, persentase kehadiran dari berbagai unsur yang diundang beserta lampirannya, proses pelaksanaan dan hasilnya. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan pelaksanaan Musrenbang RKPD terbaik, yang akan diberikan hadiah berdasarkan peringkat pertama, kedua dan ketiga dengan besaran hadiah sesuai kemampuan daerah berupa tambahan pagu indikatif kecamatan.

5. Forum Internal Perangkat Daerah

Forum Internal PD dilaksanakan pada tanggal 22-26 Januari 2024 dengan peserta internal PD dan *stakeholder* terkait untuk mensinergikan kegiatan pada perangkat daerah yang dibahas oleh internal PD sebelum dibawa ke forum PD.

6. Desk Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

Desk Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan pada 12 Februari 2024 diikuti oleh kecamatan pengusul dan Perangkat Daerah (PD) pengampu hasil Musrenbang RKPD dengan maksud untuk melakukan Sinkronisasi Hasil Musrenbang RKPD baik dari Nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kewenangan, Volume dan Harga Satuan, serta Teknis Pelaksanaannya. Selanjutnya hasil desk

menjadi acuan kecamatan dalam menginput usulan ke aplikasi SIPD sesuai hasil desk bersama PD pengampu.

7. Forum Khusus dengan Perangkat Daerah

Forum Khusus dengan PD dilaksanakan pada hari Senin, 13 Februari 2024. Pelaksanaannya dibagi menjadi 3 forum yaitu forum khusus anak, forum penanggulangan kemiskinan dan stunting, dan forum ekonomi kreatif. Forum khusus ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari perwakilan anak, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, penyandang penyakit yang rentan penolakan sosial, pemerhati kemiskinan, komite ekonomi kreatif, PD dan *stakeholder* terkait untuk menghasilkan keputusan mengenai kebutuhan kelompok masyarakat tertentu yang dapat diakomodir dan yang tidak dapat diakomodir oleh PD.

8. Desk Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Klinik Perencanaan

Desk Rancangan Renja PD dilaksanakan minggu ketiga Februari 2024 dengan mengundang Perangkat Daerah dan tim verifikator dari Bappeda yang bertujuan untuk menyelaraskan rencana kerja perangkat daerah terutama lokus dan anggaran kegiatan yang diusulkan dengan hasil Musrenbang kecamatan dan kelurahan serta pokok-pokok pikiran DPRD, dan juga pencermatan serta penyelarasan lebih mendalam bagi perangkat daerah yang mempunyai amanat SPM dan SDG's. Desk rancangan Renja juga melihat kesesuaian dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terutama dari sisi tujuan dan sasaran yang diwujudkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Selanjutnya perencanaan yang bersifat *Top-down planning* ini akan menjadi muatan rancangan RKPD. Jika dipandang perlu maka perangkat daerah dapat memanfaatkan klinik perencanaan Bappeda untuk asistensi lebih dalam atas rencana kerja mereka. Hasil desk yang juga menampung usulan PD terhadap kebutuhan mendesak yang belum terakomodir dalam pagu indikatif yang diberikan, selanjutnya ditampung dan disampaikan oleh bidang sektoral kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Temanggung, untuk memperoleh persetujuan TAPD sesuai kemampuan keuangan daerah.

9. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada 21 Februari 2024 dan pelaksanaannya dibagi kedalam 2 (dua) bidang. Bidang pertama yaitu Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan di Aula Progo

Bappeda dan diikuti oleh 97 peserta. Bidang kedua yaitu Bidang Pemerintahan dan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur yang dilaksanakan di Aula Sumbing Sindoro dan diikuti oleh 83 peserta. Hasil dari kegiatan ini adalah pembicaraan tentang isu strategis dan permasalahan pembangunan, rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Wilayah, Provinsi, dan Nasional, daftar usulan kegiatan yang belum diakomodir (*long list*) dalam rancangan RKPD.

10. Musrenbang RKPD di Kabupaten

Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan pada 7 Maret 2024 dengan mengundang Forkompimda, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Delegasi Kecamatan, Kepala Instansi Vertikal, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten, perwakilan kelompok profesi tingkat kabupaten, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan antara lain perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan sekolah, pengurus partai politik tingkat kabupaten, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, unsur pengusaha/Investor, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat tertentu. Kegiatan Musrenbang Kabupaten akan ditayangkan secara *live streaming* oleh TV Temanggung, guna menjaring banyaknya masukan dan saran dari peserta guna menjadi masukan dalam penyusunan rancangan RKPD. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan isu strategis dan permasalahan pembangunan, kesepakatan prioritas program dan kegiatan, tanggapan atas masukan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2025.

Pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung juga akan diumumkan Penerima Penghargaan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025 di kelurahan dan kecamatan. Masing-masing penghargaan diberikan untuk 3 (tiga) kelurahan dan 3 (tiga) kecamatan terbaik berdasarkan SK Bupati.

11. Penyusunan Rancangan RKPD pasca Musrenbang

Tahapan pasca musrenbang RKPD untuk memperbaiki rancangan RKPD dengan masukan dan saran yang ada juga untuk

memberi kesempatan perangkat daerah untuk memastikan lokasi kegiatan yang direncanakan.

12. *Reviu* Inspektorat

Dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dilakukan *reviu* oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung. *Reviu* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk sinkronisasi antara Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Daerah untuk Perencanaan Tahun 2025 di Kabupaten Temanggung.

13. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Hasil dari semua proses yang dilakukan kemudian dirangkum menjadi rancangan Akhir RKPD yang berisi narasi lengkap dari Rancangan Peraturan Bupati, pendahuluan sampai dengan penutup termasuk matriks rencana program dan kegiatan beserta anggarannya.

14. Asistensi RKPD dari Provinsi Jawa Tengah

Rancangan Akhir RKPD sebelum ditetapkan harus mendapatkan asistensi/fasilitasi oleh Provinsi Jawa Tengah pada Minggu IV Bulan Mei 2023 melalui Surat Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang disampaikan kepada Kabupaten/Kota dengan mengirimkan surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi beserta kelengkapannya. Asistensi ini bertujuan untuk sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten.

15. Penetapan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada bulan Juni 2024.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

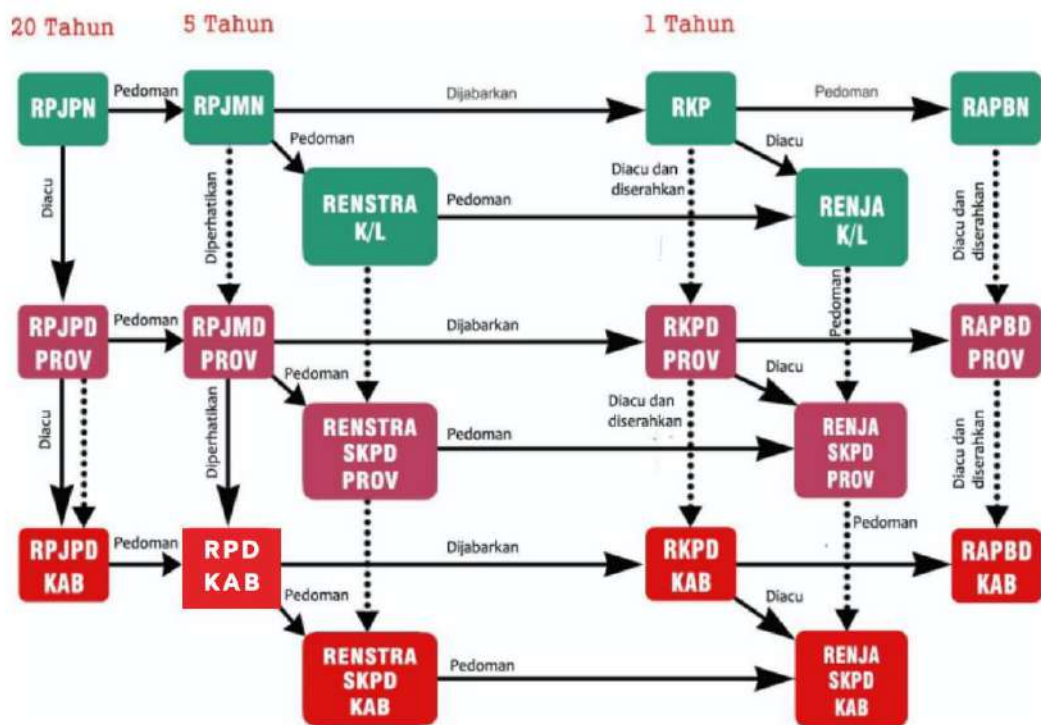
- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026; dan
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, dokumen perencanaan sektoral yang ada serta merujuk juga pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan level pemerintahan desa. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 1.3
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Dokumen RKPD dalam kaitannya dengan dokumen sektoral seperti SPM, SDGs, Reformasi Birokrasi dan dokumen sektoral lainnya juga mengacu kepada dokumen-dokumen tersebut yang dituangkan dalam penyajian capaian-capaian indikator SPM maupun indikator yang berhubungan dengan SDGs dan Reformasi Birokrasi.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan adalah sebagai berikut.

1. Pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan arah, acuan, dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Proses Penyusunan, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Ringkasan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan dilihat dari kondisi perekonomian global dan nasional, kondisi perekonomian Jawa Tengah, dan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB Perkapita serta inflasi.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang Indikator Tujuan, Indikator Sasaran per Misi dengan Urusan/Bidang dan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat: rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirumuskan dari indikator tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator sasaran yang kemudian disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan manfaat Dokumen RKPD.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

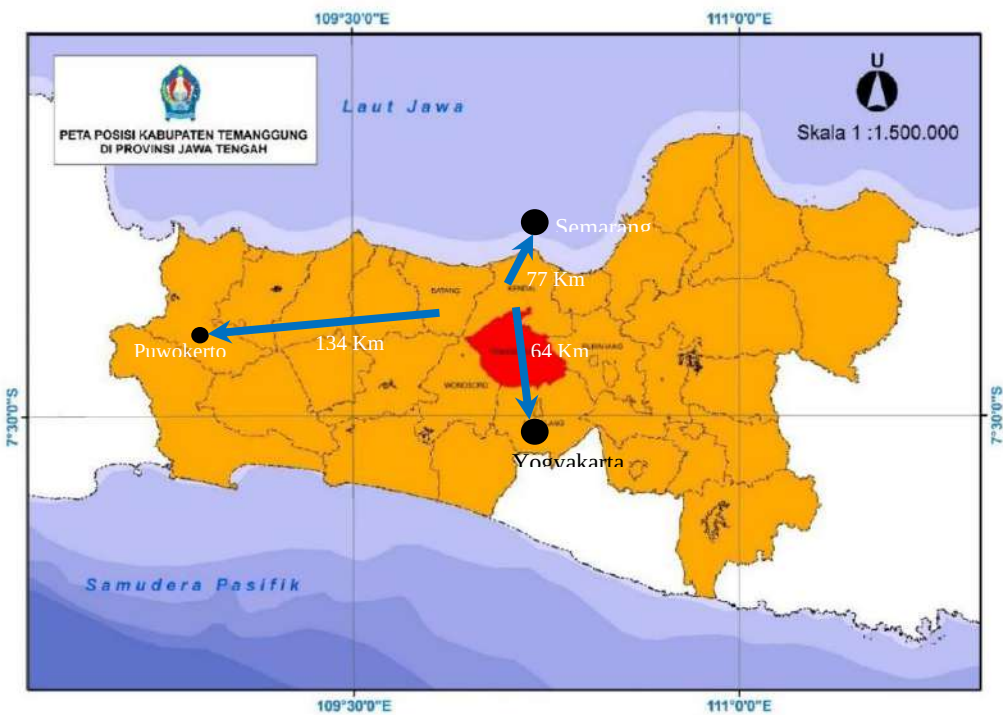
A. Letak dan Kondisi Geografis

1. Posisi Astronomis

Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara koordinat 110°46’23”–110°46’30” Bujur Timur dan 7°32’14”–7°32’35” Lintang Selatan.

2. Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Posisi geografi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.1
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah

3. Topografi / Kemiringan Lahan

Secara Topografi Kabupaten Temanggung termasuk dalam wilayah dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka di bagian

Tenggara, di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh 2 buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 mdpl) dan Gunung Sindoro (3.151 mdpl).

Kabupaten Temanggung memiliki relief yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, dan sangat terjal. Kelas kemiringan Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Kelas Kemiringan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung

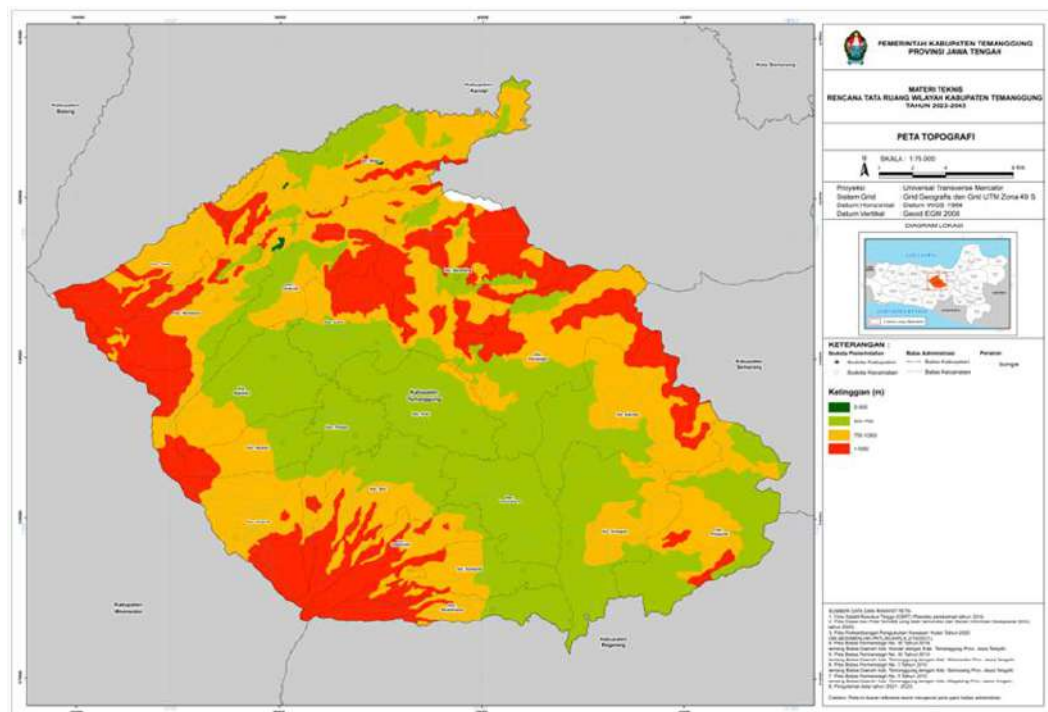
KECAMATAN	KELERENGAN				TOTAL LUAS (Ha)
	> 40 %	0-2 %	15-40 %	2-15 %	
Bansari	304	-	823	910	2.037
Bejen	669	19	4.137	1.783	6.609
Bulu	1.047	-	1.742	1.732	4.521
Candiroto	1.924	32	2.825	1.539	6.320
Gemawang	3.622	-	2.633	909	7.164
Jumo	820	-	612	1.662	3.095
Kaloran	1.043	-	3.121	2.202	6.367
Kandangan	1.823	-	2.771	2.467	7.061
Kedu		-	144	3.573	3.717
Kledung	1.289	-	2.268	148	3.705
Kranggan		-	1.858	3.459	5.317
Ngadirejo	78	-	1.053	2.652	3.783
Parakan	236	-	371	1.746	2.352
Pringsurat	275	-	2.151	3.529	5.955
Selopampang	714	-	569	958	2.240
Temanggung		-		3.229	3.229
Tembarak	446	-	1.052	960	2.457
Tlogomulyo	1.213	-	1.169	263	2.646
Tretep	1.462	-	2.072	-	3.534
Wonoboyo	1.950	-	1.699	725	4.374
TOTAL LUAS (Ha)	18.915	51	33.070	34.448	86.483

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Dari tabel diatas letak kemiringan wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi empat kelas kelerengan sebagai berikut:

- 1) Kelas lereng I (kemiringan 0 – 2 %) seluas 50,93 Ha dengan penyebarannya di sebagian Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Bejen.
- 2) Kelas lereng II (kemiringan 2 – 15%) seluas 34.448,15 Ha dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Bulu, Kecamatan Parakan, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Jumo, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Kedu, dan Kecamatan Bejen.
- 3) Kelas lereng III (kemiringan 15 – 40%) seluas 33.069,55 Ha dengan penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kedu, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Bejen, Kecamatan Parakan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Kledung.
- 4) Kelas lereng IV (kelerengan > 40%) seluas 18.914,78 Ha dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, Kecamatan Bejen, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Tretep, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Gemawang.

Peta topografi Kabupaten Temanggung dapat disajikan pada gambar berikut.

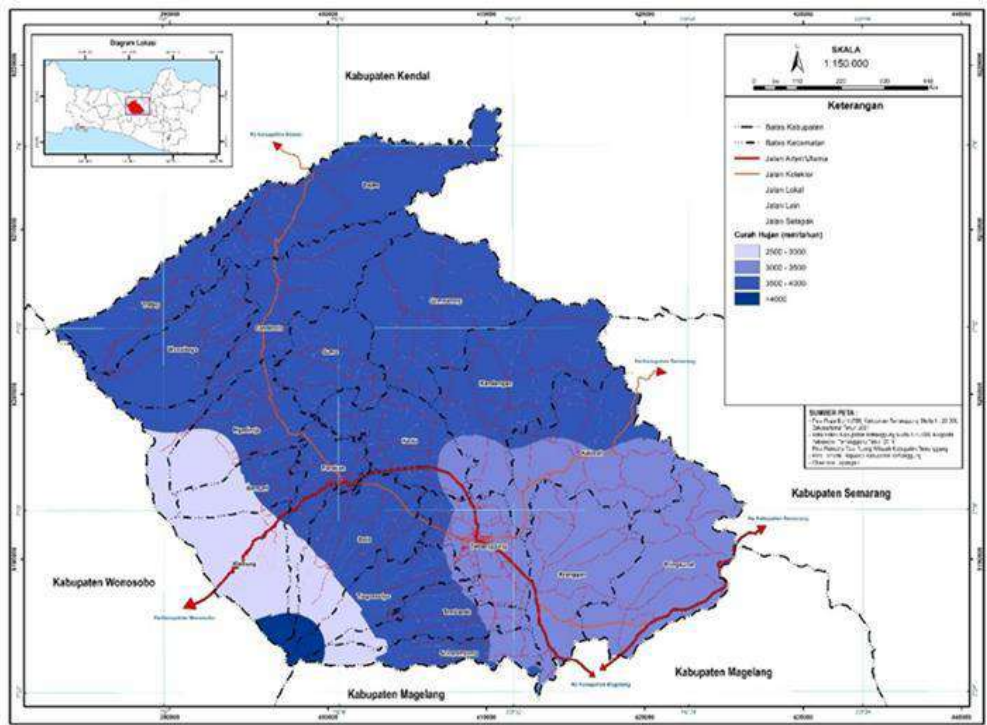


Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Temanggung

4. Klimatologi

Kabupaten Temanggung memiliki sifat iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau antara Bulan April sampai dengan September dan musim penghujan antara Bulan Oktober sampai dengan Maret dengan curah hujan tahunan pada umumnya tinggi. Daerah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin dimana udara pegunungan berkisar antara 20°C - 30°C. Berdasarkan data curah hujan Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan tertinggi berada di Kecamatan Kledung yang memiliki curah hujan >4.000 mm/tahun. Sedangkan wilayah yang mempunyai curah hujan terendah di Kabupaten Temanggung memiliki curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun yaitu pada Kecamatan Ngadirejo, Bulu, Kledung, Tlogomulyo, Selopampang, Tembarak, Bansari, dan Candiroto. Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.3
Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung

5. Jenis Tanah

Pada wilayah Kabupaten Temanggung memiliki lahan seluas Lahan seluas 86.483 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi latosol merah kekuningan yakni seluas 31.979,81 Ha (36,98%), latosol coklat seluas 28.915,25 Ha (33,43%), regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 Ha (14,01%), latosol coklat kemerahan seluas 8.559,87 Ha (9,90%), regasol kuning seluas 2.856,40 Ha (3,30%) dan andasol seluas 2.052,14 Ha (2,37%). Jenis tanah Latosol Coklat membentang dari arah barat laut ke tenggara, Latosol Coklat Kemerahan membentang di bagian timur ke tenggara, sedangkan Latosol Merah Kekuningan membentang di bagian timur dan barat dan termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang agak peka terhadap erosi. Sementara itu, jenis tanah Regosol membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal. Jenis tanah Andosol ditemui pada sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat dan jenis tanah ini termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang peka terhadap erosi.

Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran aluvial dan kaki gunung api. Dataran aluvial dan kaki gunung api sendiri memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara yang berasal dari material erupsi gunung api yang mengandung berbagai mineral. Kemampuan tanah dari dataran ini mampu mengalirkan air dengan baik. Tekstur tanah berupa pasir memiliki ruang antar pori yang

menjadi lokasi untuk cadangan air tanah sehingga ketersediaannya tetap terjaga. Tanah aluvium memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan mengalirkan air. Jenis tanah Kabupaten Temanggung dibedakan menjadi 6 jenis tanah secara rinci disajikan pada tabel berikut.

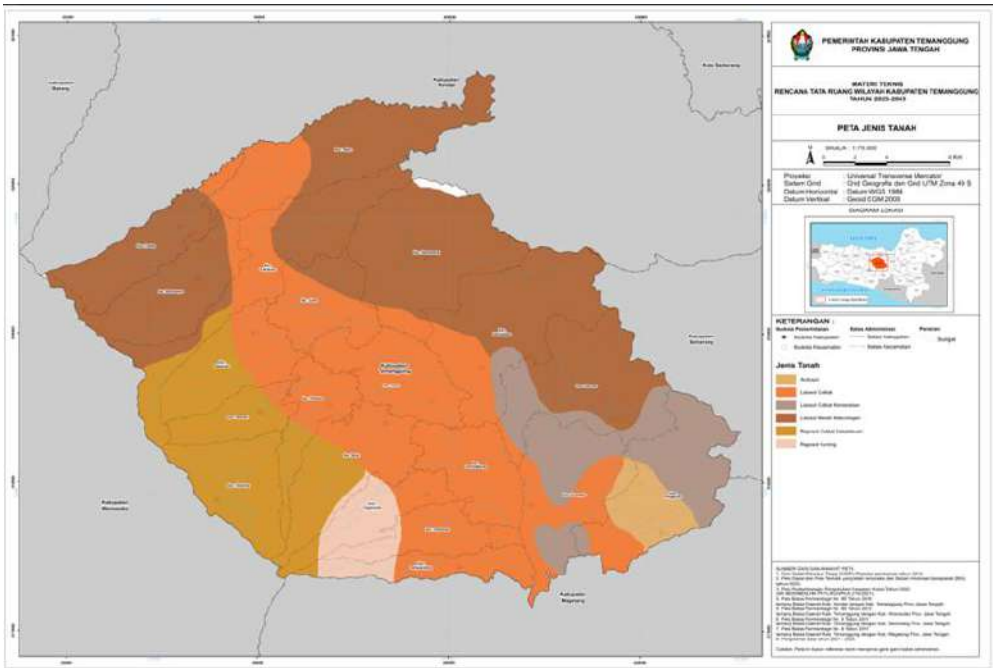
Tabel 2.2
Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Andosol	Latosol Coklat	Latosol Coklat Kemarahan	Latosol Merah Kekuningan	Regosol Coklat Kekelabuan	Regosol Kuning	TOTAL (Ha)
Bansari	-	289	-	-	1.748	-	2.037
Bejen	-	2.158	-	4.451	-	-	6.609
Bulu	-	2.153	-	-	2.180	187	4.521
Candiroto	-	1.611	-	3.580	1.129	-	6.320
Gemawang	-	495	-	6.669	-	-	7.164
Jumo	-	2.257	-	838	-	-	3.095
Kaloran	-	162	1.983	4.222	-	-	6.367
Kandangan	-	1.678	436	4.947	-	-	7.061
Kedu	-	3.717	-	-	-	-	3.717
Kledung	-		-	-	3.705	-	3.705
Kranggan	253	2.256	2.808	-		-	5.317
Ngadirejo	-	1.631	-	-	2.152	-	3.783
Parakan	-	1.560	-	-	792	-	2.352
Pringsurat	1.799	822	3.333	-		-	5.955
Selopampang	-	1.551	-	-	88	602	2.240
Temanggung	-	3.229	-	-			3.229
Tembarak	-	1.897	-	-	0	561	2.457
Tlogomulyo	-	813	-	-	326	1.507	2.646
Tretep	-	302	-	3.232	-	-	3.534
Wonoboyo	-	335	-	4.040	-	-	4.374
TOTAL (Ha)	2.052	28.915	8.560	31.980	12.120	2.856	86.483

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Sebagian besar jenis tanah yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu latosol merah kekuningan yakni seluas 31.979,81 Ha (36,98%), latosol coklat seluas 28.915,25 Ha (33,43%), regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 Ha (14,01%), latasol coklat kemrahan seluas 8.559,87 Ha (9,90%), regasol kuning seluas 2.856,40 Ha (3,30%) dan andasol seluas 2.052,14 Ha (2,37%).

Peta sebaran jenis tanah di Kabupaten Temanggung tersaji pada gambar berikut.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung

6. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400- >1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 wilayah ketinggian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0– 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500– 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750– 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000–1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250– 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		86,483	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2024

7. Geologi

Jenis Geologi Kabupaten Temanggung terdiri dari 11 batuan diantaranya adalah 1) Batuan Gunung Api Gilipetung, 2) Batuan Gunung

Api Jembangan, 3) Batuan Gunung Api Merbabu, 4) Batuan Gunung Api Sindoro, 5) Batuan Gunung Api Sindoro Lama, 6) Batuan Gunung Api Sumbing, 7) Endapan Kerucut Gunung Berapi, 8) Formasi Kali Getas, 9) Formasi Kerek, 10) Formasi Pernyataan, 11) lava Gunung Sumbing.

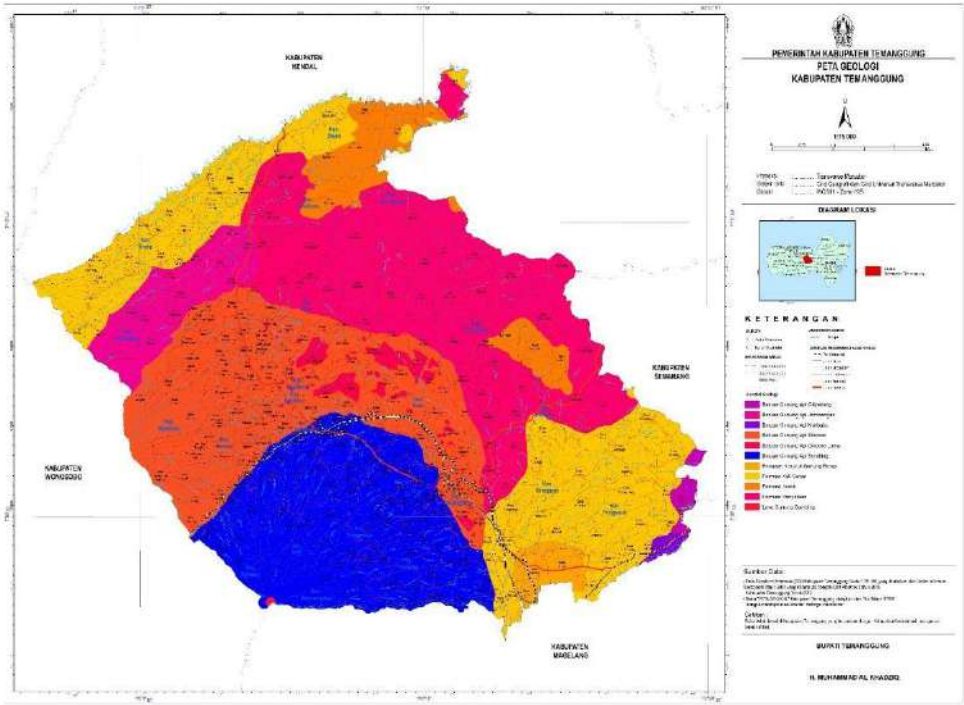
Secara rinci Jenis Geologi kabupaten Temanggung tiap Kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jenis Geologi Kabupaten Temanggung Tiap Kecamatan

KECAMATAN	Batuan Gunung Api Gilipetung	Batuan Gunung Api Jembangan	Batuan Gunung Api Merbabu	Batuan Gunung Api Sindoro	Batuan Gunung Api Sindoro Lama	Batuan Gunung Api Sumbing	Endapan Kerucut Gunung Berapi	Formasi Kali Getas	Formasi Kerek	Formasi Pernyataan	Lava Gunung Sumbing	TOTAL LUAS (Ha)
Bansari				2.037								2.037
Bejen								3.087	2.168	1.354		6.609
Bulu				2		4.519						4.521
Candiroto		1.229		1.968				48	871	2.205		6.320
Gemawang				234	40				69	6.821		7.164
Jumo				1.612	52					1.432		3.095
Kaloran				124				1.381	915	3.948		6.367
Kandangan				1.235	276				334	5.216		7.061
Kedu				2.715	815	188						3.717
Kledung				1.817		1.888						3.705
Kranggan							799	3.824		694		5.317
Ngadirejo				3.783								3.783
Parakan				1.105	94	1.154						2.352
Pringsurat	471		271				569	4.644				5.955
Selopampang						2.034		206			0	2.240
Temanggung				1.467	85	1.339		210		128		3.229
Tembarak						2.382		75				2.457
Tlogomulyo						2.621					25	2.646
Tretep		12						3.522				3.534
Wonoboyo		3.116		196				1.063				4.374
TOTAL LUAS (Ha)	471	4.356	271	18.295	1.361	16.124	1.368	18.059	4.357	21.797	25	86.483

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Peta Geologi Kabupaten Temanggung dapat disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 86.483 ha yang terletak di antara 7°32'14" - 7°32'35" Lintang Selatan dan 110°46'23" - 110°46'30" Bujur Timur. Secara administrasi terdiri dari 20 kecamatan 266 desa dan 23 kelurahan.

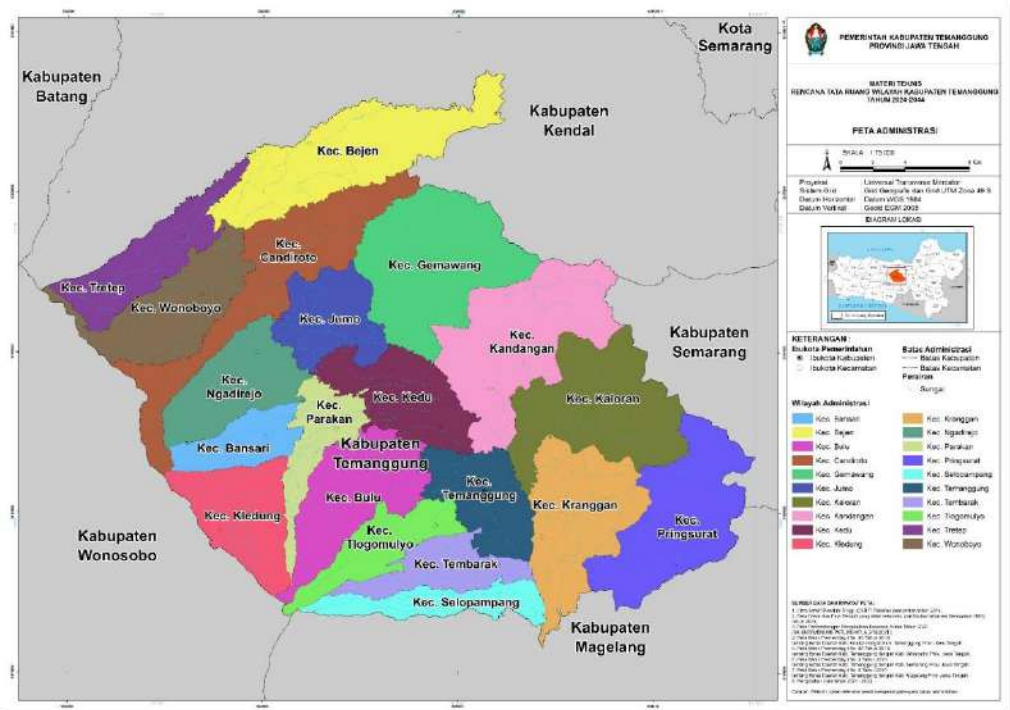
Wilayah Kabupaten Temanggung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Batas wilayah dengan kecamatan dan desa secara terinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan	- Desa Bejen, Desa Selosabrang, Desa Petung, Desa Duren, dan Desa Ngaliyan di Kecamatan Bejen. - Desa Canggal di Kecamatan Candiroto. - Desa Muncar dan Desa Karangseneng di Kecamatan Gemawang. - Desa Margolelo dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan.
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kandangan, Kaloran, Pringsurat	- Desa Tlogopucang dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan. - Desa Kaloran, Desa Kalimanggis, dan Desa Getas di Kecamatan Kaloran. - Desa Wonokerso, Desa Soborejo, dan Desa Klepu di Kecamatan Pringsurat
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Pringsurat, Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Bulu	- Desa Soropadan, Desa Kupan, Desa Kebumen, Desa Pringsurat, dan Desa Rejosari di Kecamatan Pringsurat. - Desa Nguwet, Desa Pare, dan Desa Bengkal di Kecamatan Kranggan. - Desa Bagusan, Desa Kebonagung, Desa Gambasan, Desa Salamrejo, Desa Selopampang, dan Desa Tanggulanom di Kecamatan Selopampang. - Desa Losari dan Desa Pagersari di Kecamatan Tlogomulyo
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Candiroto, Wonoboyo	- Desa Batarsari dan Desa Kledung di Kecamatan Kledung. - Desa Canggal di Kecamatan Candiroto. - Desa Cemoro di Kecamatan Wonoboyo.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Peta wilayah administrasi Kabupaten Temanggung dapat disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2024

Gambar 2.6
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung secara terinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	Bulu	4.528	19	0	84	302	0	0	84	302
2	Tembarak	2.457	13	0	67	224	0	0	67	224
3	Temanggung	3.223	6	19	20	87	119	541	139	628
4	Pringsurat	5.955	14	0	113	364	0	0	113	364
5	Kaloran	6.367	14	0	111	416	0	0	111	416
6	Kandangan	7.061	16	0	101	378	0	0	101	378
7	Kedu	3.714	14	0	108	424	0	0	108	424
8	Parakan	2.355	14	2	50	239	27	120	77	359
9	Ngadirejo	3.783	19	1	97	396	3	30	100	426
10	Jumo	3.095	13	0	60	273	0	0	60	273
11	Tretep	3.534	11	0	25	141	0	0	25	141
12	Candiroto	6.321	14	0	74	275	0	0	74	275
13	Kranggan	5.317	12	1	97	358	7	29	104	387
14	Tlogomulyo	2.645	12	0	47	156	0	0	47	156
15	Selopampang	2.240	12	0	46	128	0	0	46	128
16	Bansari	2.037	13	0	46	189	0	0	46	189
17	Kledung	3.705	13	0	38	160	0	0	38	160
18	Bejen	6.609	14	0	51	170	0	0	51	170
19	Wonoboyo	4.373	13	0	53	209	0	0	53	209
20	Gemawang	7.164	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		86.483	266	23	1.350	5.201	156	720	1.506	5.921

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Gemawang dengan luas 7.164 ha atau setara dengan 8,28% dari total luas

wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bansari dengan luas 2.037 ha (2,35%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 desa dan 19 Kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 desa.

C. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang terletak di bagian Tengah Provinsi Jawa Tengah dengan keuntungan lokasi strategis yang berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km) dan Purwokerto (134 km). Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung). Kawasan ini di dukung oleh potensi pariwisata yaitu pelestarian Kawasan Borobudur sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi-Merbabu-Telomoyo dan Gunung Sindoro-Sumbing. Kabupaten Temanggung dengan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pendukung pengembangan wilayah koridor Borobudur-Dieng dan Gelangmanggung serta Kawasan perkotaan Muntilan-Mungkid-Kota Magelang-Temanggung. Selain itu pengembangan wilayah dilakukan Upaya peningkatan pada sektor pertanian dan kehutanan, pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

Iklim di Kabupaten Temanggung cenderung sejuk dan lembab, dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata bekeisar 20-25°C, yang mendukung pertanian.

Potensi komoditas utama pada Kabupaten Temanggung berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Selain tiga sektor tersebut, Kabupaten Temanggung juga memiliki sektor potensial yang juga berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian daerah yaitu sektor pariwisata. Salah satu komoditas utama di Kabupaten Temanggung yaitu sektor pengolahan meliputi industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau.

Keunggulan Kabupaten Temanggung pada sektor pertanian khususnya hortikultura adalah bawang putih, bawang merah dan cabai. Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2021 telah mengembangkan bawang putih lokal yang mempunyai umbi yang cukup besar atau suing lebih besar dengan jumlah rata-rata 5-10 siung, diberi nama varietas Geol Temanggung Agrihorti (GTA). Pada Tahun 2022 Kementerian Pertanian pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian bernomor 1899/PVL/2022 telah mematenkan varietas GTA. Umur panen bawang putih varietas GTA adalah 106 hari dengan hasil ubinan berdasarkan pengukuran mencapai 12,8 – 15 ton/ha. Diharapkan Kabupaten Temanggung dapat mendukung budidaya dan swasembada bawang putih di Indonesia.

Pada Tahun 2021 melalui program dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung menjadi salah satu Lokasi lahan *Food Estate* atau lumbung pangan. Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 yaitu masing-masing seluas 400 hektar, dan pada Tahun 2024 dikembangkan 200 hektar, sehingga total menjadi 1000 hektar. Jenis tanaman yang ditanam salah satunya adalah bawang merah, food estate berada di Kawasan Embung Bansari yang mampu menghasilkan bawang merah sebanyak 15,7 ton per hektar di Tahun 2022.

Produk hortikultura Tahun 2023 yang terdapat di Kabupaten Temanggung adalah cabai rawit dan cabai besar. Cabai rawit luas lahan panen 6.664,50 hektare, total produksi 506.502 kuintal dengan produktivitas 76 kuintal/hektare. Cabai besar dengan luas panen 3.521 hektare, total produksi sebesar 272.971,20 kuintal dengan produktivitas 77,53 kuintal/hektare.

Produk perkebunan Kabupaten Temanggung yang unggul adalah tembakau dan kopi. Tembakau srintil merupakan tembakau berkualitas terbaik di dunia yang ditanam dengan kearifan lokal berasal dari varietas asli Temanggung yaitu varietas Kemloko 1 dan Kemloko 2 ditanam dengan ketinggian di atas 800 mdpl dan tidak bisa dihasilkan di daerah lain hanya bisa di hasilkan di desa Legoksari, Losari, Pagergunung, Pagersari, Tlilir, Wonosari, Bansari, Wonotirto, banaran, Gandu, Gedegan dan Kemloko. Selain tembakau Srintil, tembakau Kabupaten Temanggung menjadi salah satu supplier pabrik rokok terbesar di Indonesia. Total produksi tembakau

pada Tahun 2023 sebesar 9.685,73 Kuintal/ha dengan luas panen 14.764 kuintal/ha dan produktifitas 6,56 kuintal/ha.

Produk unggulan perkebunan yang lain adalah kopi robusta dan kopi arabika, yang mempunyai citra rasa yang berbeda dengan daerah lain. Temanggung menjadi produsen kopi terbesar di Jawa Tengah. Produksi kopi Robusta Tahun 2023 sebesar 84.769 Kuintal/ha, luas panen 12.972,20 kuintal/ha dan produktivitas 5,75 kuintal/ha dan untuk Total produksi kopi Arabika pada Tahun 2023 sebesar 9.924,34 kuintal/ha, luas panen 1.724,95 kuintal/ha dan produktivitas 6,53 kuintal/ha.

Kabupaten Temanggung kaya akan budaya dengan berbagai tradisi seperti sadranan gunung, sadranan kali, Ruwat Rigen dan masih banyak lagi budaya di Kabupaten Temanggung, sedangkan seni tari tradisional Kabupaten Temanggung sangat banyak ragamnya diantaranya kuda lumping, lengger, sandul, warokan, kubro siswo, topeng ireng dan cengklungan.

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Temanggung memiliki destinasi wisata berupa kawasan Jumprit yang menjadi lokasi pengambilan air suci pada hari raya Waisak dan situs Liyangan yang merupakan situs peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Selain itu, Temanggung juga menjadi daerah perlintasan bagi wisatawan dari arah Semarang dan Yogyakarta yang ingin mengunjungi Borobudur serta kawasan wisata Dieng yang terletak di Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Tahun 2023 berfokus mengembangkan wisata alam. Terdapat lima kecamatan yang potensi alamnya dapat diangkat ke kancah nasional hingga internasional, yakni Kecamatan Kledung, Ngadirejo, Tretep, Bejen, dan Wonoboyo.

2.1.1.2 Kondisi Demografi

A. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Sebaran penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, dan faktor kebudayaan dan teknologi. Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 adalah 808.446 jiwa yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, 266 (dua ratus enam puluh enam) desa, dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan Tahun 2023 secara terinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	Kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1	Bulu	4.528	45,28	49.751	1098,74	10,99
2	Tembarak	2.457	24,57	32.023	1303,34	13,03
3	Temanggung	3.223	32,23	84.294	2615,39	26,15
4	Pringsurat	5.955	59,55	53.618	900,39	9,00
5	Kaloran	6.367	63,67	46.325	727,58	7,28
6	Kandangan	7.061	70,61	53.603	759,14	7,59
7	Kedu	3.714	37,14	60.479	1628,41	16,28
8	Parakan	2.355	23,55	54.158	2299,70	23,00
9	Ngadirejo	3.783	37,83	57.495	1519,83	15,20
10	Jumo	3.095	30,95	30.376	981,45	9,81
11	Tretep	3.534	35,34	21.714	614,43	6,14
12	Candiroto	6.321	63,21	33.127	524,08	5,24
13	Kranggan	5.317	53,17	50.764	954,75	9,55
14	Tlogomulyo	2.645	26,45	23.698	895,95	8,96
15	Selopampang	2.240	22,4	20.873	931,83	9,32
16	Bansari	2.037	20,37	24.498	1202,65	12,03
17	Kledung	3.705	37,05	28.463	768,23	7,68
18	Bejen	6.609	66,09	22.010	333,03	3,33
19	Wonoboyo	4.373	43,73	27.022	617,93	6,18
20	Gemawang	7.164	71,64	34.155	476,76	4,77
Jumlah		86.483	86.483	808.446	1057,68	10,58

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Pada Tahun 2023 kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Temanggung. Jumlah penduduk Kecamatan Temanggung sebanyak 84.294 jiwa dimana mencakup 10,426% dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Selopampang dengan jumlah penduduk sebanyak 20.959 jiwa atau 61,11% dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Temanggung.

Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.615,39 jiwa/km², diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.299,70 jiwa/km², Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1,628,41 jiwa/km² dan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah 1.057,68 jiwa/km². Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara terinci disajikan pada tabel berikut.

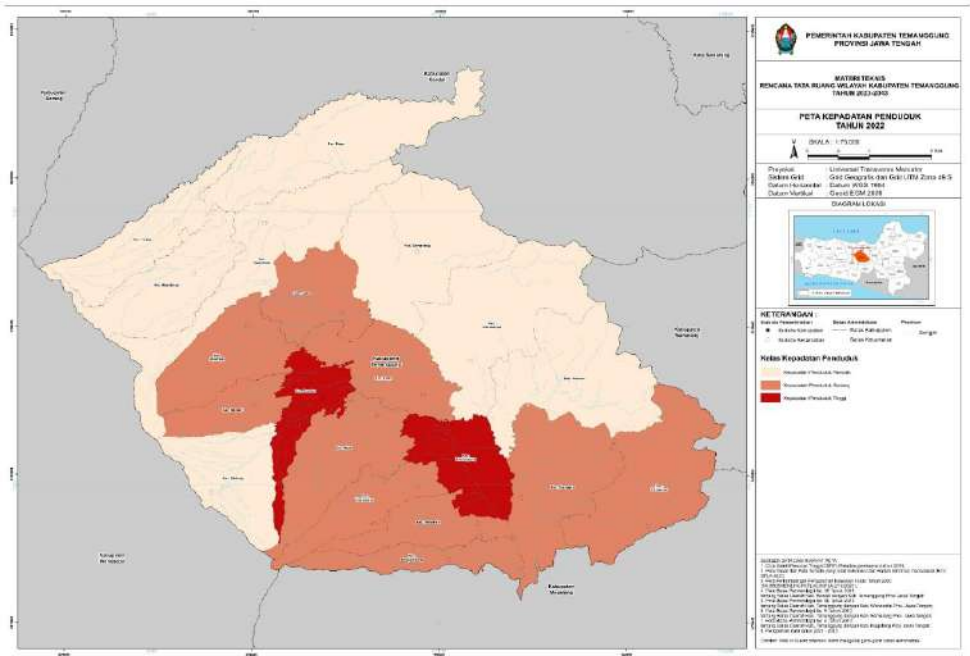
Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bulu	48.785	48.613	49.005	49.385	49.751
2.	Tembarak	31.107	31.142	31.443	31.737	32.023
3.	Temanggung	83.157	82.704	83.256	83.786	84.294
4.	Pringsurat	52.122	52.067	52.596	53.113	53.618
5.	Kaloran	45.631	44.942	45.413	45.874	46.325
6.	Kandangan	52.160	52.003	52.548	53.081	53.603
7.	Kedu	58.889	58.986	59.499	59.997	60.479
8.	Parakan	53.588	53.177	53.519	53.846	54.158
9.	Ngadirejo	56.233	55.990	56.505	57.007	57.495
10.	Jumo	30.002	29.756	29.971	30.177	30.376
11.	Tretep	20.906	21.171	21.357	21.538	21.714
12.	Candiroto	32.621	32.421	32.665	32.900	33.127
13.	Kranggan	48.465	49.078	49.650	50.212	50.764
14.	Tlogomulyo	22.710	23.207	23.377	23.541	23.698
15.	Selopampang	19.986	20.189	20.421	20.649	20.873
16.	Bansari	23.984	23.908	24.111	24.307	24.498
17.	Kledung	27.606	27.577	27.878	28.174	28.463
18.	Bejen	21.278	21.341	21.569	21.792	22.010
19.	Wonoboyo	26.172	26.329	26.567	26.798	27.022
20.	Gemawang	33.274	33.427	33.679	33.921	34.155
	JUMLAH	783.550	788.028	795.029	801.835	808.446

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Jumlah di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 dengan jumlah penduduk 783.550 jiwa bertambah menjadi 808.446 jiwa pada Tahun 2023, naik sejumlah 33.933 jiwa. Gambaran penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung di 20 kecamatan disajikan pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.7
Gambaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jumlah penduduk terbesar pada akhir Tahun 2023 adalah di Kecamatan Temanggung. Hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung.

Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

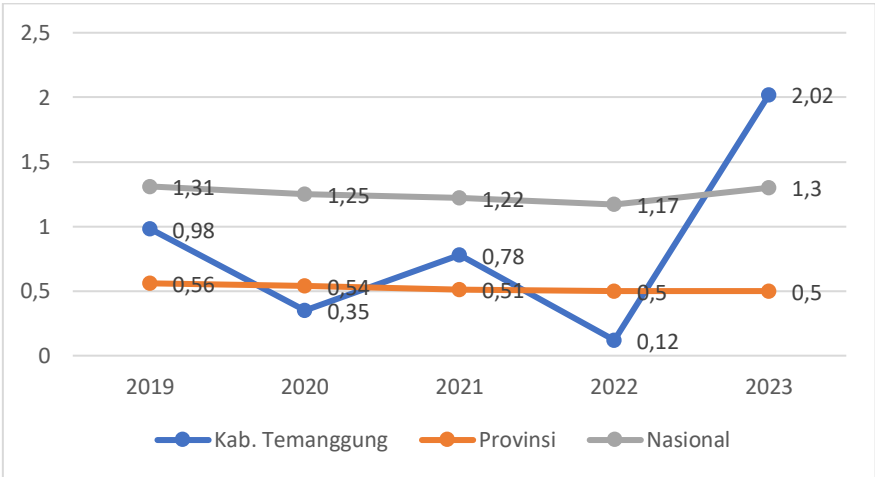
Tabel 2.9
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2023

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Kepadatan Penduduk Tahun 2023 (Jiwa/Km ²)
Kota Magelang	18,12	127.675	7.046,082
Kab. Magelang	1.102,93	1.312.573	1.190,078
Kab. Temanggung	864,83	808.446	934,80
Rata-rata			3.056,99

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2024

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung adalah 3.056,99 jiwa/km². Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.046,082 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung, dengan kepadatan 934,80 jiwa/km².

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023, SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2023 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023, secara rinci disajikan pada tabel berikut.

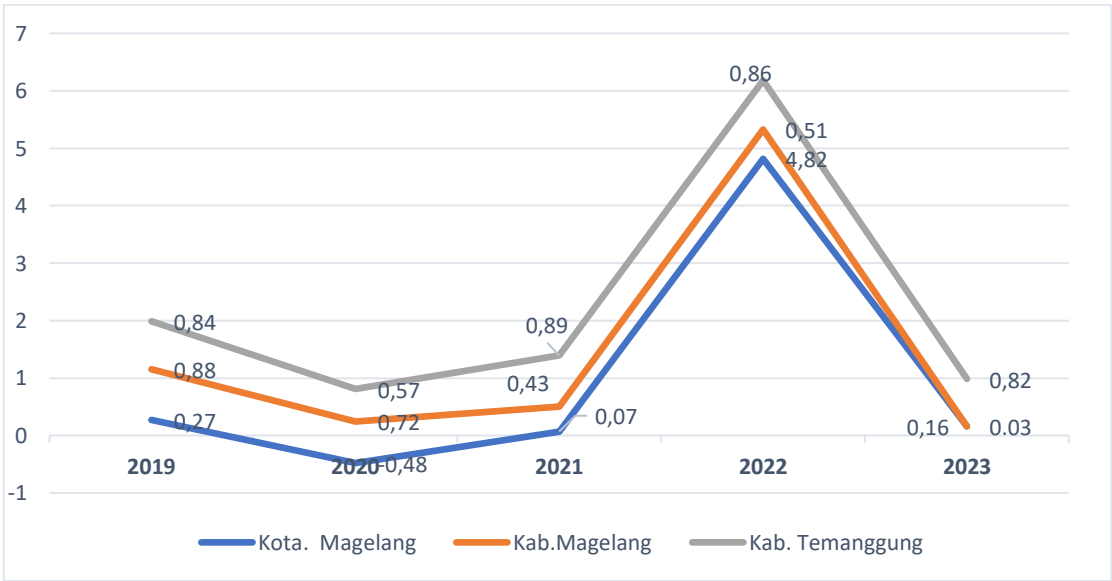
Tabel 2.10
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota. Magelang	122.111	121.526	121.610	127.466	127.675	0,27	-0,48	0,07	4,82	0,16
Kab. Magelang	1.290.591	1.299.859	1.305.512	1.312.175	1.312.573	0,88	0,72	0,43	0,51	0,03
Kab. Temanggung	783.550	791.264	794.403	799.764	808.446	0,84	0,57	0,89	0,86	0,82
Rata-rata	732.084	737.550	740.508	746.468	749.565	0,66	0,60	0,58	0,87	0,32
Rata-rata 5 tahun						0,61				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Data Diolah.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada pengembangan wilayah Gelangmanggung Tahun 2019-2023 adalah 0,61%, secara kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung melebihi rata-rata jika dibandingkan rata-rata penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung.

Laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Gelangmanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Tahun 2019 – 2023 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan
Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Bulu	48.785	48.613	49.005	49.385	49.751	-0,35	0,81	0,78	0,74
2	Tembarak	31.107	31.142	31.443	31.737	32.023	0,11	0,97	0,94	0,90
3	Temanggung	83.157	82.704	83.256	83.786	84.294	-0,54	0,67	0,64	0,61
4	Pringsurat	52.122	52.067	52.596	53.113	53.618	-0,11	1,02	0,98	0,95
5	Kaloran	45.631	44.942	45.413	45.874	46.325	-1,51	1,05	1,02	0,98
6	Kandangan	52.160	52.003	52.548	53.081	53.603	-0,30	1,05	1,01	0,98
7	Kedu	58.889	58.986	59.499	59.997	60.479	0,16	0,87	0,84	0,80
8	Parakan	53.588	53.177	53.519	53.846	54.158	-0,77	0,64	0,61	0,58
9	Ngadirejo	56.233	55.990	56.505	57.007	57.495	-0,43	0,92	0,89	0,86
10	Jumo	30.002	29.756	29.971	30.177	30.376	-0,82	0,72	0,69	0,66
11	Tretep	20.906	21.171	21.357	21.538	21.714	1,27	0,88	0,85	0,82
12	Candiroto	32.621	32.421	32.665	32.900	33.127	-0,61	0,75	0,72	0,69
13	Kranggan	48.465	49.078	49.650	50.212	50.764	1,26	1,17	1,13	1,10
14	Tlogomulyo	22.710	23.207	23.377	23.541	23.698	2,19	0,73	0,70	0,67
15	Selopampang	19.986	20.189	20.421	20.649	20.873	1,02	1,15	1,12	1,08
16	Bansari	23.984	23.908	24.111	24.307	24.498	-0,32	0,85	0,81	0,79
17	Kledung	27.606	27.577	27.878	28.174	28.463	-0,11	1,09	1,06	1,03
18	Bejen	21.278	21.341	21.569	21.792	22.010	0,30	1,07	1,03	1,00
19	Wonobooyo	26.172	26.329	26.567	26.798	27.022	0,60	0,90	0,87	0,84
20	Gemawang	33.274	33.427	33.679	33.921	34.155	0,46	0,75	0,72	0,69
Jumlah/rata-rata		783.550	788.028	795.029	801.835	808.446	0,57	0,89	0,86	0,82

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah.

Meskipun jumlah penduduk total Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 cenderung bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2023 di tiap kecamatan cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk tinggi di Kecamatan Kranggan sebesar 1,10 % atau bertambah 552 jiwa.

B. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.10
Grafik Piramida Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

No.	Kelompok Usia	Jumlah	%
1	0 – 4	57.804	7,15
2	5 – 9	56.386	6,97
3	10 – 14	58.805	7,27
4	15 – 19	59.448	7,35
5	20 – 24	58.662	7,26
6	25 – 29	58.172	7,20
7	30 – 34	58.706	7,26
8	35 – 39	56.889	7,04
9	40 – 44	55.739	6,89
10	45 – 49	58.230	7,20
11	50 – 54	57.128	7,07
12	55 – 59	52.513	6,50
13	60 – 64	42.862	5,30
14	65 – 69	34.032	4,21
15	70 – 74	22.610	2,80
16	> 75	20.460	2,53
Jumlah		808.446	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Kelompok umur paling terbanyak di Kabupaten Temanggung adalah penduduk usia 15-19 tahun dengan jumlah 59.448 jiwa atau setara dengan 7,35% dari total penduduk Kabupaten Temanggung, berikutnya kelompok usia 10-14 tahun, dengan jumlah 58.805 jiwa atau setara dengan 7,27%.

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebanyak 808.446 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 406,100 jiwa (50,23%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 402.346 jiwa (49,77%) di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,08% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101%.

Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	% Laki-laki	Perempuan	% Perempuan	Kecamatan	%	
1	Bulu	25.378	51,01%	24.373	48,99%	49.751	6,15%	104%
2	Tembarak	16.293	50,88%	15.730	49,12%	32.023	3,96%	104%
3	Temanggung	41.783	49,57%	42.511	50,43%	84.294	10,43%	98%
4	Pringsurat	26.684	49,77%	26.934	50,23%	53.618	6,63%	99%
5	Kaloran	23.192	50,06%	23.133	49,94%	46.325	5,73%	100%
6	Kandangan	27.009	50,39%	26.594	49,61%	53.603	6,63%	102%
7	Kedu	30.573	50,55%	29.906	49,45%	60.479	7,48%	102%
8	Parakan	27.126	50,09%	27.032	49,91%	54.158	6,70%	100%
9	Ngadirejo	29.020	50,47%	28.475	49,53%	57.495	7,11%	102%
10	Jumo	15.267	50,26%	15.109	49,74%	30.376	3,76%	101%
11	Tretep	11.056	50,92%	10.658	49,08%	21.714	2,69%	104%
12	Candiroto	16.590	50,08%	16.537	49,92%	33.127	4,10%	100%
13	Kranggan	25.125	49,49%	25.639	50,51%	50.764	6,28%	98%
14	Tlogomulyo	12.046	50,83%	11.652	49,17%	23.698	2,93%	103%
15	Selopampang	10.204	48,89%	10.669	51,11%	20.873	2,58%	96%
16	Bansari	12.305	50,23%	12.193	49,77%	24.498	3,03%	101%
17	Kledung	14.438	50,73%	14.025	49,27%	28.463	3,52%	103%
18	Bejen	11.035	50,14%	10.975	49,86%	22.010	2,72%	101%
19	Wonobooyo	13.711	50,74%	13.311	49,26%	27.022	3,34%	103%
20	Gemawang	17.265	50,55%	16.890	49,45%	34.155	4,22%	102%
Jumlah		406.100	50,23%	402.346	49,77%	808.446	100,00%	101%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari keahlian, kemampuannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		Strata III	Strata II	DIV/ Strata I	DIII	DI/ DII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ belum tamat SD	Tidak/ Belum sekolah	
1	Bulu	2	58	1.115	409	140	5.006	6.090	9.710	14.667	12.704	49.901
2	Tembarak	6	26	716	171	116	3.446	4.876	6.707	5.295	10.523	31.882
3	Temanggung	11	462	6.320	2.013	637	17.984	10.875	15.177	11.177	19.363	84.019
4	Pringsurat	3	48	1.141	317	169	7.461	10.651	12.045	4.177	17.179	53.191
5	Kaloran	1	24	881	248	197	4.694	7.063	10.127	5.248	18.050	46.533
6	Kandangan	5	38	1.006	313	223	5.132	6.993	10.067	6.701	23.040	53.518
7	Kedu	2	81	1.758	569	290	7.128	7.579	12.173	13.751	16.863	60.194
8	Parakan	11	122	2.190	792	292	8.821	7.119	9.040	9.252	16.525	54.164
9	Ngadirejo	1	33	1.436	515	256	6.939	10.486	15.848	9.926	12.688	58.128
10	Jumo	2	19	694	236	161	2.991	4.361	6.880	5.462	9.929	30.735
11	Tretep	1	6	140	48	43	770	2.856	5.937	4.656	7.281	21.738
12	Candiroto	2	17	827	331	200	3.433	4.427	8.215	9.291	6.937	33.680
13	Kranggan	3	62	1.392	401	212	7.513	9.224	8.592	7.473	15.290	50.162
14	Tlogomulyo	3	10	333	125	46	2.079	3.689	5.817	4.683	6.685	23.470
15	Selopampang	2	10	470	134	73	2.560	3.257	5.576	3.460	5.221	20.763
16	Bansari	0	14	442	141	62	2.234	3.891	5.198	9.062	3.720	24.764
17	Kledung	1	10	246	95	37	1.899	3.826	6.903	4.225	11.160	28.402
18	Bejen	1	14	330	133	86	2.271	3.793	6.121	2.527	6.486	21.762
19	Wonobooyo	2	10	350	105	81	1.898	4.542	8.278	3.671	8.211	27.148
20	Gemawang	1	15	381	131	89	2.162	4.151	7.783	7.237	12.344	34.294
Jumlah		60	1.079	22.168	7.227	3.410	96.421	119.749	176.194	141.941	240.197	808.446
Persentase (%)		0,007	0,133	2,742	0,894	0,422	11,927	14,812	21,794	17,557	29,711	100,000

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2024, Data diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Temanggung didominasi kategori tidak/belum sekolah sebesar 29,711%, disusul dengan jenjang tamat SD sebesar 21,794%. Untuk tamatan jenjang perguruan tinggi masih relatif kecil yaitu 2,742%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan adalah karena mahal nya biaya pendidikan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami perubahan fluktuatif seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2016-2019, namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 dan 2022, perkembangan ekonomi sudah semakin membaik pasca pandemi Covid-19, dimana capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,20 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,34 persen.

Sementara itu, pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sebesar 5,00 persen yang mengalami perlambatan dibanding Tahun 2022. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun
Sebelumnya Tahun 2019-2023

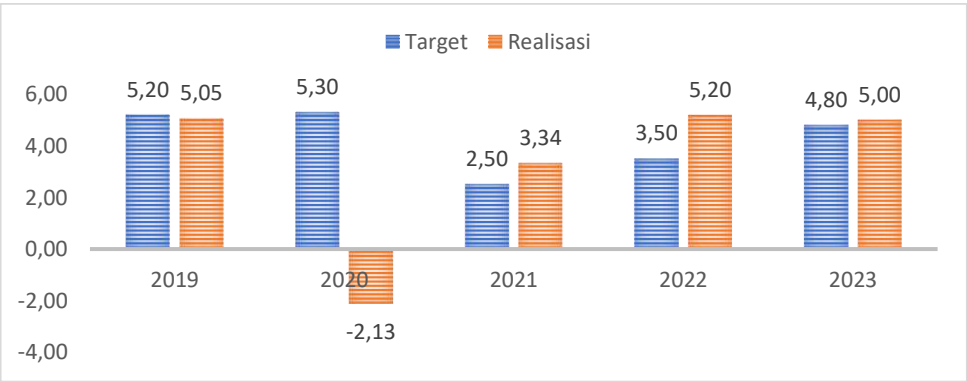
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung			
	Target	Realisasi	Perubahan	Kinerja Pencapaian Target RKPD
2019	5,2	5,05	-0,08	100%
2020	5,3	-2,13	-7,18	100%
2021	2,5	3,34	5,47	100%
2022	3,5	5,2	1,86	100%
2023	4,8	5	0,2	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah.

Pada periode Tahun 2019-2020 perubahan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi negatif (<0) akibat pandemi covid-19 dengan puncak penurunan terendah mencapai -7,18 pada Tahun 2020. Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 mulai terlihat pada Tahun 2021 dengan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan arah positif (>0) mencapai 5,47 menjadi 3,34 persen. Perubahan pertumbuhan ekonomi juga berlanjut pada kondisi terkini pada Tahun 2022 dengan perubahan positif mencapai

1,86 menjadi 5,20 persen, dan melambat -0,2 menjadi 5,00 persen.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKPD pada tahun 2023 telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD yang mana dari target yang ditetapkan sebesar 4,80% telah dapat tercapai sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir jika dibandingkan dengan target secara rinci disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.11
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023

Guna mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.269,02	3.331,08	3.358,51	3.456,66	3.500,84
B	Pertambangan dan Penggalian	116,31	118,76	126,77	121,77	125,574
C	Industri Pengolahan	3.971,38	3.947,19	4.025,97	4.069,85	4.245,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,70	14,10	14,78	15,56	16,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,74	13,00	13,73	13,76	14,36
F	Konstruksi	764,99	749,62	806,12	836,12	901,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.445,11	3.314,95	3.559,94	3.712,94	3.928,94
H	Transportasi dan Pergudangan	771,94	533,79	548,56	907,26	978,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267,28	249,09	264,11	303,84	341,79
J	Informasi dan Komunikasi	332,03	378,99	401,67	410,67	456,86

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	466,12	475,46	491,70	494,23	508,6
L	Real Estate	134,95	134,87	137,94	145,94	158,14
M,N	Jasa Perusahaan	58,37	54,68	56,33	59,51	64,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	402,52	396,03	395,00	401,33	421,83
P	Jasa Pendidikan	669,62	668,34	671,96	682,91	730,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178,40	192,22	193,28	198,27	214,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	339,57	318,57	321,56	356,76	388,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14.483,26	15.214,06	15.387,93	16.187,37	16.997,53

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Nilai PDRB Temanggung Tahun 2023 atas dasar harga konstan sebesar 16,98 triliun rupiah, naik dari Tahun 2022 yang sebesar 15,38 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Temanggung mulai bangkit kembali pasca pandemi covid-19. Salah satu sektor yang berkontribusi cukup tinggi terhadap nilai PDRB di Kabupaten Temanggung adalah sektor industri pengolahan yang masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 25,92 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,32 persen. Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Pertumbuhan lapangan usaha Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

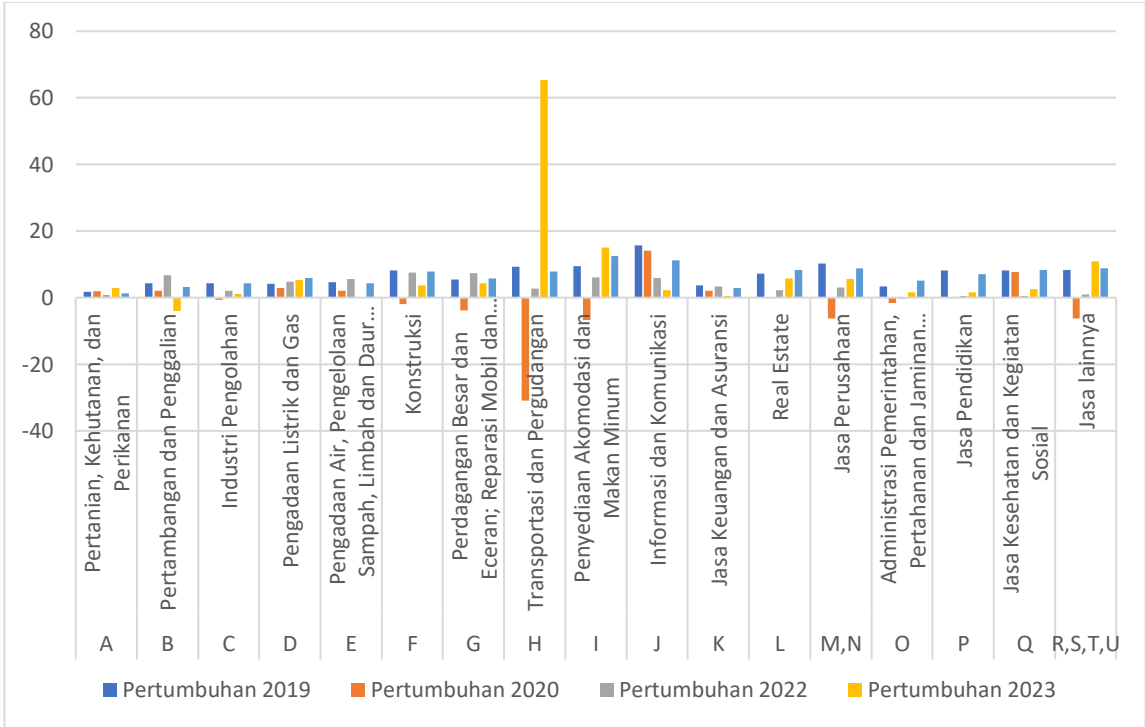
Tabel 2.17
Pertumbuhan Lapangan Usaha Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)
Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	Pertumbuhan 2019	Pertumbuhan 2020	Pertumbuhan 2021	Pertumbuhan 2022	Pertumbuhan 2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	1,9	0,82	2,92	1,28
B	Pertambangan dan Penggalian	4,24	2,11	6,74	-3,94	3,12
C	Industri Pengolahan	4,39	-0,61	2	1,09	4,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,18	2,92	4,82	5,28	5,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,68	2,04	5,62	0,22	4,36
F	Konstruksi	8,15	-2,01	7,54	3,72	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	-3,78	7,39	4,3	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	9,29	-30,85	2,77	65,39	7,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,41	-6,81	6,03	15,04	12,49
J	Informasi dan Komunikasi	15,69	14,14	5,98	2,24	11,25

Kategori	Uraian	Pertumbuhan 2019	Pertumbuhan 2020	Pertumbuhan 2021	Pertumbuhan 2022	Pertumbuhan 2023
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	2	3,42	0,51	2,91
L	Real Estate	7,21	-0,06	2,28	5,8	8,36
M,N	Jasa Perusahaan	10,22	-6,32	3,02	5,65	8,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	-1,61	-0,26	1,6	5,11
P	Jasa Pendidikan	8,16	-0,19	0,54	1,63	6,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,21	7,75	0,55	2,59	8,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,33	-6,18	0,96	10,95	8,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,85	-2,13	3,34	5,2	5

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan harga konstan 2010 pada tabel di atas nilai PDRB Temanggung pada Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,20% dan melambat pada Tahun 2023 menjadi 5,00%. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif dimana 10 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5-10%, sedangkan lapangan usaha lainnya tercatat kurang dari 5% (<5%). Pertumbuhan lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.12
Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Kabupaten Temanggung

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melakukan langkah-langkah strategis seperti dengan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat yaitu perbaikan jalan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi untuk memperlancar distribusi barang dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga roda perekonomian dapat terpacu dan biaya pengangkutan lebih efisien. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan penguatan peranan UMKM, peningkatan lapangan kerja dan investasi, serta peningkatan daya saing ekonomi.

Selain Kabupaten Temanggung, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh wilayah setara. Berikut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dapat disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.13
Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian pada wilayah pengembangan Gelangmanggung menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2020 akibat pandemi covid-19, dan mulai mengalami peningkatan pada Tahun 2021-2022, kemudian melambat di Tahun 2023 dengan capaian 5

% dibawah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang dan lebih rendah dari rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung yaitu 5,16%

Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung yang selama 5 tahun terakhir secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	2019		2020		2021		2022		2023	
	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.
Kota Magelang	5,44	5,44	-2,45	-7,89	3,2	5,65	5,77	2,57	5,45	-0,32
Kabupaten Magelang	5,30	5,30	-1,68	-6,98	3,48	5,16	5,46	1,98	5,04	-0,42
Kabupaten Temanggung	5,05	5,05	-2,13	-7,18	3,34	5,47	5,20	1,86	5,00	-0,20
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	5,26	5,26	-2,09	-7,35	3,35	5,43	5,48	2,14	5,16	-0,31
JAWA TENGAH	5,36	5,36	-2,65	-8,01	3,32	5,97	5,31	1,99	4,98	-0,33
NASIONAL	5,02	5,02	-2,07	-7,09	3,69	5,76	5,72	2,03	5,04	-0,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Data Diolah.

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi covid-19 dan kondisi terkini pada periode Tahun 2019-2023 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dengan nilai negatif (<0) yang mana perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sedikit lebih baik dibandingkan capaian wilayah yang setara yakni -7,18, sedangkan rata-rata wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan mencapai -7,35.

Sedangkan pada kondisi terkini, perkembangan perekonomian semakin membaik, ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung maupun wilayah setara yang berada di kawasan Gelangmanggung. Pada kondisi terkini Tahun 2023 perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung melambat dibandingkan Tahun 2022 dengan perubahan -0,20, tetapi masih relatif bagus jika dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah yang setara pada wilayah Gelangmanggung.

Selain perbandingan dengan wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung juga dibandingkan dengan target RKP Kewilayahan, capaian nasional dan provinsi Tahun 2025. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel berikut.

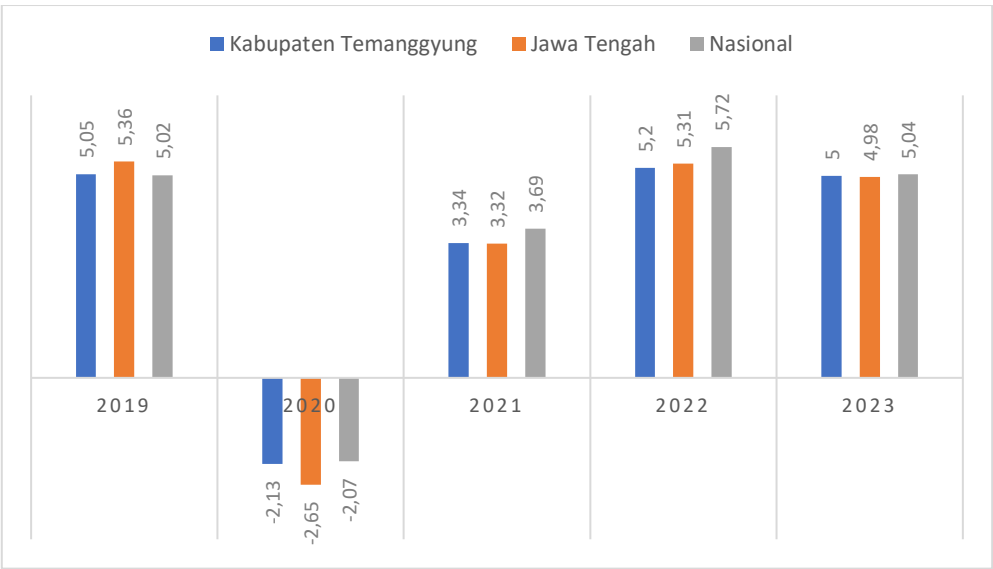
Tabel 2.19

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Jawa Tengah Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2023	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Pertumbuhan Ekonomi	4,90-5,60	5	100%

* Permendagri Nomer 12 Tahun 2024
 ** BPS Kabupaten Temanggyng Tahun 2024
 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Tahun 2023, perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKP Kewilayahan telah tercapai 100%. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024

Gambar 2.14

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Berdasarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah secara umum menunjukkan kondisi yang sama, yang mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekomoni Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional melambat bila dibandingkan angka Tahun 2022.

Adapun secara lebih rinci, perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dan provinsi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Wilayah	2019		2020		2021		2022		2023	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
KAB TEMANGGUNG	5,05	-0,08	-2,13	-7,18	3,34	5,47	5,20	1,86	5,00	-0,02
JAWA TENGAH	5,36	0,06	-2,65	-8,01	3,32	5,97	5,31	1,99	4,98	-0,33
NASIONAL	5,02	-0,15	-2,07	-7,09	3,69	5,76	5,72	2,03	5,04	-0,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024, Data Diolah.

Berdasarkan perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini, capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kecenderungan perubahan pertumbuhan ekonomi pada periode Tahun 2019-2020 memiliki persamaan yakni menurun pada posisi <0 sebagai akibat dari pandemi covid-19. Sedangkan setelah pandemi dan kondisi terkini, perubahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan ke arah positif (>0) yang mana perubahan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 melambat -0,02 sedangkan pada Tingkat provinsi nasional juga melambat. Melambatkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2020 menurut lapangan usaha di Kabupaten Temanggung disebabkan menurunnya lapangan usaha pertanian dari 2,92% menjadi 1,28% dan sektor jasa lainnya dari 10,95% menjadi 8,83%.

Berdasarkan pembagian wilayah di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong Kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor maka dilakukan percepatan Pembangunan di wilayah pengembangan Gelangmanggung. Prioritas pengembangan wilayah Gelangmanggung untuk tahun 2025 diarahkan untuk capaian sasaran pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, dan IPM. Pengembangannya antara lain untuk melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia yang dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi-Merbabu-Telomoyo dan Gunung Sindoro-Sumbing. Kabupaten Temanggung menjadi Kawasan pendukung pengembangan wilayah koridor Borobudur-Dieng.

2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Distribusi ekonomi untuk menggambarkan struktur perekonomian dihitung dari nilai PDRB menurut harga berlaku. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023
(Persen)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,36	24,42	23,91	23,41	22,94
B	Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,90	0,93	0,84	0,82
C	Industri Pengolahan	27,21	27,46	27,11	26,19	25,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi	5,12	5,06	5,37	5,45	5,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,62	20,14	20,90	20,79	20,95
H	Transportasi dan Pergudangan	4,36	3,15	3,18	5,08	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	1,53	1,58	1,73	1,77
J	Informasi dan Komunikasi	1,48	1,70	1,72	1,61	1,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,21	3,29	3,40	3,40	3,29
L	Real Estate	0,76	0,77	0,76	0,75	0,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,38	0,76	0,38	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,69	2,70	2,54	2,42	2,40
P	Jasa Pendidikan	4,97	5,10	4,94	4,62	4,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,32	1,27	1,21	1,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,02	1,93	1,87	1,98	2,04
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber:BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 yang paling dominan adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,92%, diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,94% dilanjutkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,95%.

Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung (Milyar Rupiah)
Tahun 2019-2023

Kategori Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	1,86	0,86	2,92	1,28
B. Pertambangan dan Penggalian	4,24	2,11	6,75	-3,94	3,12
C. Industri Pengolahan	4,39	-0,62	2,00	1,09	4,32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,22	2,87	4,84	5,26	5,86
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	2,02	5,62	0,22	4,36
F. Konstruksi	8,15	-2,01	7,54	3,72	7,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	-3,79	7,40	4,30	5,82
H. Transportasi dan Pergudangan	9,29	-30,59	2,37	65,39	7,90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,41	-6,81	6,03	15,04	12,49
J. Informasi dan Komunikasi	15,69	14,14	5,98	2,24	11,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	2,01	3,42	0,51	2,91
L. Real Estate	7,21	-0,10	2,32	5,80	8,36
M,N. Jasa Perusahaan	10,21	-6,32	3,01	5,65	8,82
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	-1,61	-0,26	1,60	5,11
P. Jasa Pendidikan	8,16	-0,19	0,54	1,63	6,96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,22	7,70	0,59	2,59	8,32
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,33	-6,22	0,98	10,95	8,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,05	-2,13	3,34	5,20	5,00

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat pada Tahun 2023 Kabupaten Temanggung melambat, walaupun ada penurunan pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, akan tetapi ada lapangan usaha pendukung yang capaiannya meningkat diantaranya adalah:

1. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 4,32% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,09%
2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami peningkatan sebesar 4,36% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,22%
3. Konstruksi mengalami peningkatan sebesar 7,77% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,72%
4. Sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan sebesar 11,25% dari tahun sebelumnya sebesar 2,24%
5. Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami peningkatan sebesar 2,91% dari tahun sebelumnya sebesar 0,51%

- Real Estate mengalami peningkatan sebesar 8,36% dari tahun sebelumnya sebesar 5,80%
- Jasa Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 8,82% dari tahun sebelumnya sebesar 5,65%
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami peningkatan sebesar 5,11% dari tahun sebelumnya sebesar 1,60%
- Jasa Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 6,96% dari tahun sebelumnya sebesar 1,63%
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial meningkat 8,32% dari tahun sebelumnya sebesar 2,59%.

Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (milyar rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.057,41	5.263,68	5.411,36	5.789,18	6.174,02
B	Pertambangan dan Penggalian	186,80	194,99	210,32	208,32	221,12
C	Industri Pengolahan	5.889,85	5.920,28	6.134,63	6.476,56	6.974,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,16	16,54	17,21	18,20	19,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,31	16,51	17,61	17,91	18,88
F	Konstruksi	1.107,96	1.090,85	1.214,05	1.347,25	1.516,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.464,46	4.341,92	4.730,06	5.141,96	5.637,46
H	Transportasi dan Pergudangan	943,70	679,50	718,50	1 256,77	1.477,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350,65	329,87	356,76	427,39	475,63
J	Informasi dan Komunikasi	320,72	366,50	388,56	398,56	444,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	694,55	708,79	769,23	841,11	884,52
L	Real Estate	164,70	165,41	171,05	184,41	201,91
M,N	Jasa Perusahaan	85,10	81,44	84,89	93,62	106,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	582,67	582,67	574,17	599,52	645,12
P	Jasa Pendidikan	1075,52	1.075,52	1.118,47	1 143,37	1.234,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	255,95	283,38	287,61	299,99	332,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	437,48	415,39	423,32	489,22	549,22
	PDRB	21.648,99	21.577,05	22.627,79	24.733,34	26.912,32

Sumber:BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Pada Tahun 2023, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor yang menjadi penyokong Perdagangan Kabupaten Temanggung (77 persen), Sektor Industri Pengolahan disokong oleh Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan 72 dan Sejenisnya sebesar 48,27 persen dan Sektor Pertanian disangga oleh Sektor Hortikultura sebesar 33,99 persen dan Sektor Tanaman Pangan sebesar 21,55 persen. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2023 mencapai 26.912,32 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 2.178,98 milyar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mencapai 24.733,34 milyar rupiah. Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah menurut lapangan usaha dengan target RKPD Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah dengan Target RKPD
Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)

Tahun	Target PDRB ADHB	Realisasi PDRB ADHB	Target PDRB ADHK*	Realisasi PDRB ADHK
2019	21.500.000	21.648.988,07	15.000.000	15.214.058,87
2020	21.700.000	21.557.077,14	15.000.000	14.890.755,46
2021	22.500.000	22.627.791,48	15.000.000	15.387.930,44
2022	24.000.000	24.733.342,71	16.000.000	16.187.374,83
2023	29.000.000	26.912.324,20	17.000.000	16.997.526,83

Sumber: BPS Kab. Temanggung, 2024, *Target Bappeda Kab. Temanggung

Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020 lebih rendah dari target yang ditetapkan, dimana banyak sektor yang tidak tumbuh secara normal karena terdampak pandemi Covid-19. Namun pada Tahun 2022 dan 2023 realisasi PDRB Kabupaten Temanggung telah melebihi target yang telah ditetapkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat pasca pandemi covid-19.

2.1.2.3 PDRB per Kapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	20.600.000,00	28.173.930	6,63	14.600.000,00	19.799.530	4,66
2020	21.200.000,00	27.325.870	-3,01	14.800.000,00	18.875.600	-4,67
2021	22.000.000,00	28.484.021	4,24	15.050.000,00	19.370.430	2,62
2022	23.000.000,00	30.938.180	8,62	15.600.000,00	20.248.290	4,53
2023	29.570.000,00	33.290.000	7,60	20.010.000,00	21.020.000	3,81

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Data Diolah.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung lebih baik daripada target daerah. Walaupun pada Tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB per Kapita baik ADHB maupun ADHK, namun capaian PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung tetap konsisten melampaui target daerah yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita ADHB Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

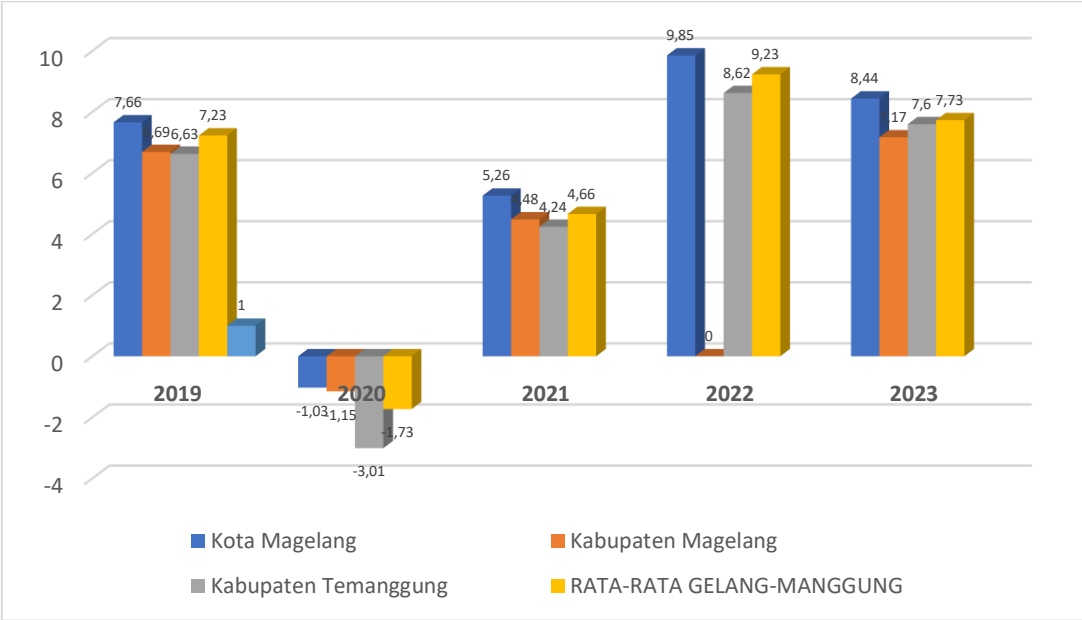
Kabupaten / Kota	2019		2020		2021		2022		2023	
	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Kota Magelang	72.446.920,00	7,66	71.702.030,00	-1,03	75.476.930,00	5,26	82.914.310,00	9,85	89.911.880,00	8,44
Kabupaten Magelang	25.297.155,13	6,69	25.297.155,13	-1,15	26.124.724,57	4,48	26.124.724,57	9,21	30.571.677,86	7,17
Kabupaten Temanggung	28.173.930,00	6,83	27.325.870,00	-3,01	28.484.021,00	4,24	30.938.180,00	8,62	33.290.000,00	7,60
RATA-RATA GELANG-MANGGUNG	41.972.668,38	7,23	41.344.528,31	-1,73	43.361.891,86	4,66	46.659.071,52	9,23	48.925.329,29	7,73
Jawa Tengah	39.388.000,00	7,09	36.965.000,00	-1,96	38.568.000,00	4,46	41.946.000,00	9,02	45.199.000.00	7,50

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 Tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita ADHK pada wilayah

Gelangmanggung mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi dampak yang terjadi di Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan wilayah yang setara dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Temanggung yang lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah setara. Pada Tahun 2021 yang merupakan pasca pandemi, pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung juga menunjukkan capaian yang cukup baik dibandingkan rata-rata wilayah Gelangmanggung dengan pertumbuhan sebesar 7,73%. Akan tetapi pada kondisi terkini, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian wilayah setara sebesar 7,60%. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan bergerak pada sektor primer (pertanian).

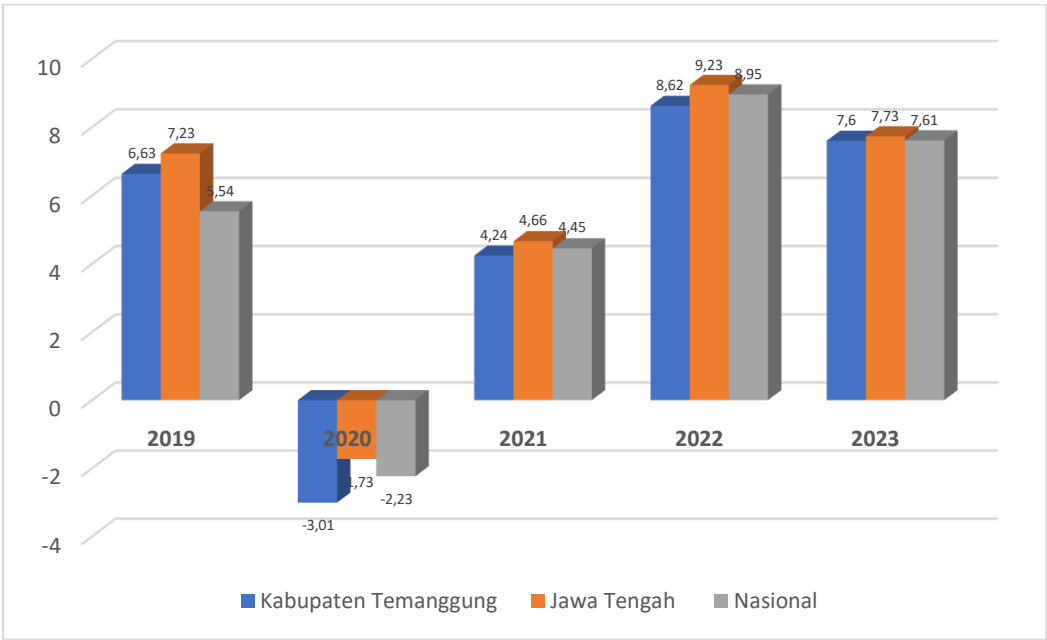
Berikut adalah gambar Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHK pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.15
Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2019-2023 tersaji pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.16

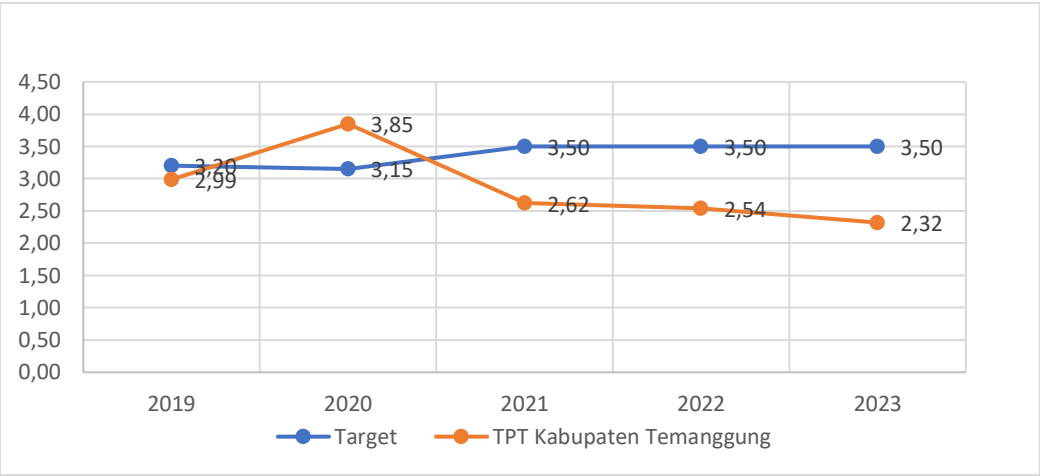
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Pertumbuhan PDRB Perkapita antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung bergerak secara fluktuatif. Pada periode Tahun 2019-2020, kondisi pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung masih berada dalam *range* pertumbuhan provinsi dan nasional dimana Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan nasional namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Pada masa pasca pandemi covid-19 Tahun 2021, Kabupaten Temanggung berhasil bangkit yang dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Akan tetapi, pada Tahun 2023 pertumbuhan PDRB Perkapita berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah untuk mendorong pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat.

2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

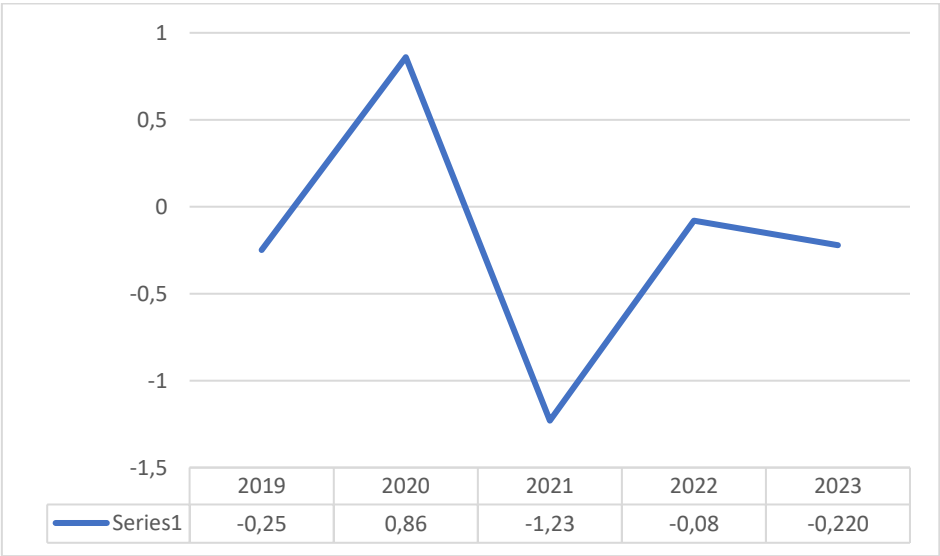
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan target RKPD yang telah ditentukan Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.17
Perbandingan TPT dengan Target Daerah RKPD Tahun 2019-2023

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKPD sudah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD. Pada Tahun 2020, tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sempat lebih tinggi dibandingkan target yang disebabkan oleh pandemi covid-19, namun pada tahun selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan target daerah serta tingkat perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ≤ 0 sebagaimana grafik dan tabel berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.18
Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

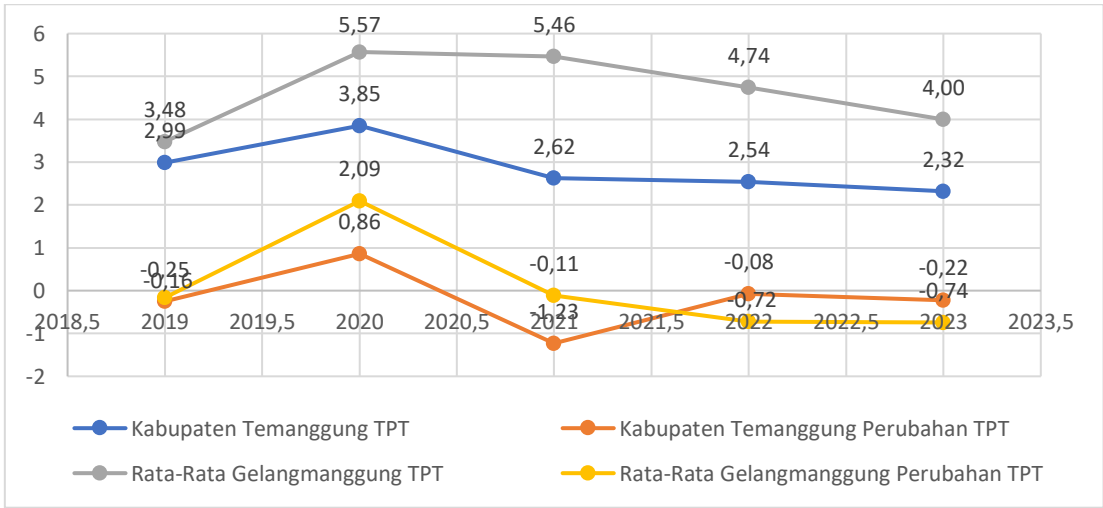
Tabel 2.27
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan
Capaian Tahun Sebelumnya

Tahun	Target RKPD	TPT Kabupaten Temanggung	Perubahan TPT Kabupaten Temanggung	Kinerja Pencapaian Target RKPD
2019	3,20	2,99	-0.25	100%
2020	3,15	3,85	0.86	99,28%
2021	3,50	2,62	-1.23	100%
2022	3,50	2,54	-0.08	100%
2023	3,50	2,32	-0,22	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. Ditinjau dari perubahan TPT, ada kondisi sebelum Covid-19 perubahan TPT Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif yang mana pada Tahun 2019 perubahan TPT sempat mengalami penurunan namun pada Tahun 2020 mengalami lonjakan akibat banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Sedangkan pada kondisi terkini yakni pada Tahun 2022 dan 2023, tingkat perubahan TPT Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai ≤ 0 yang berarti tenaga kerja yang tidak termanfaatkan semakin berkurang dan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada pada sektor pertanian dan industri padat karya.

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung, perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara pada periode 2019-2023 tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provisis Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.19
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata
Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Tabel perbandingan tingkat penganggurana terbuka (TPT) daerah rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023 secara rinci tersaji pada tabel dibawah berikut.

Tabel 2.28
Perbandingan Perubahan TPT Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2019	2,99	-0,25	3,35	-0,16
2020	3,85	0,86	5,22	2,09
2021	2,62	-1,23	5,05	-0,11
2022	2,54	-0,08	4,74	-0,72
2023	2,32	-0,22	4,19	-0,74

Sumber: BPS Provinis Jawa Tengah Tahun 2024

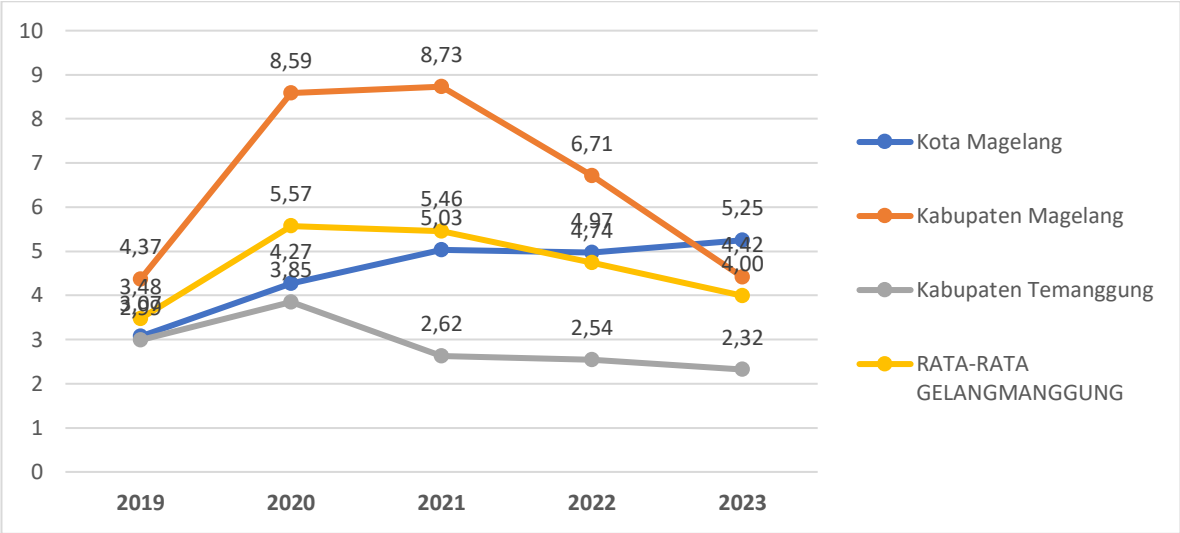
Secara umum TPT dan Perubahan Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara (Gelangmanggung). Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -1.23 pada Tahun 2021 dan - 0,22 pada Tahun 2023. Pada Tahun 2020 yang merupakan puncak pandemi covid-19, TPT Kabupaten Temanggung maupun Gelangmanggung menunjukkan kenaikan, namun jika dicermati lebih rinci perubahan TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara (Gelangmanggung). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar<3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai >4%. Secara rinci, TPT Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Gelangmanggung tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	TPT				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	3,07	4,27	5,03	4,97	5,25
Kabupaten Magelang	4,37	8,59	8,73	6,71	4,42
Kabupaten Temanggung	2,99	3,85	2,62	2,54	2,32
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	3,48	5,57	5,46	4,74	4,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023 tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.20
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

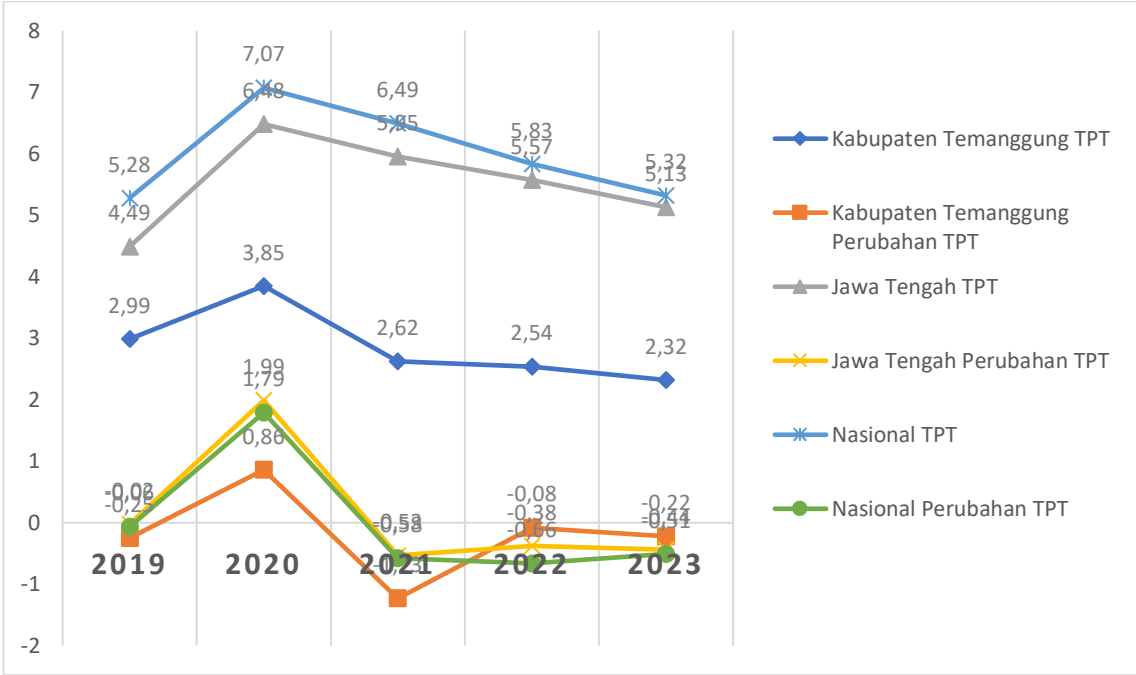
Selain dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara, perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dari perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKP Kewilayahan yang telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.30
Perbandingan TPT Daerah dengan target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2023	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,42-4,81	2,32	100%

* Permendagri Nomer 12 Tahun 2024
** BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Adapun perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian Nasional Tahun 2019-2023 tersaji pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024

Gambar 2.21

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2023

Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung		Jawa Tengah		Nasional	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2019	2,99	-0,25	4,49	-0,02	5,28	-0,06
2020	3,85	0,86	6,48	1,99	7,07	1,79
2021	2,62	-1,23	5,95	-0,53	6,49	-0,58
2022	2,54	-0,08	5,57	-0,38	5,83	-0,66
2023	2,32	-0,22	5,13	-0,44	5,32	-0,51

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024

Secara umum selama 5 tahun terakhir, perbandingan perubahan TPT daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini lebih baik dari nasional maupun provinsi. Walaupun pada masa pandemi covid-19 perubahan TPT mengalami peningkatan, namun perubahan TPT di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan perubahan sebesar 0,86 pada Tahun 2020. Pada kondisi terkini, perubahan TPT Kabupaten Temanggung juga menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi dengan penurunan sebesar -1,23 pada Tahun 2021 dan -0,22 pada Tahun 2023. Selain dari perubahannya, TPT di Kabupaten Temanggung juga jauh lebih rendah dibandingkan Jawa

Tengah dan Nasional dengan TPT terendah pada tahun 2023 sebesar 2,32 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 5,13 dan 5,32. Hal ini karena sektor pertanian terutama pada komoditas tembakau dan industri pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja.

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang telah dilaksanakan daerah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini karena beberapa sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam memproduksi.

Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32

Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

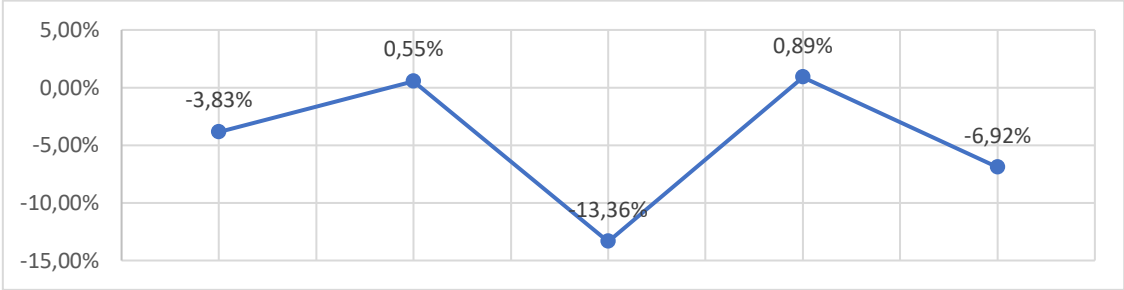
Tahun	Kabupaten Temanggung			Jawa Tengah			Nasional		
	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE
2019	2,99	-0,25	5,05	4,49	-0,02	5,40	5,28	-0,06	5,02
2020	3,85	0,86	-2,13	6,48	1,99	-2,65	7,07	1,79	-2,07
2021	2,62	-1,23	3,34	5,95	-0,53	3,32	6,49	-0,58	3,69
2022	2,54	-0,08	5,20	5,57	-0,38	5,31	5,83	-0,66	5,72
2023	2,32	-0,22	5,00	5,13	-0,44	4,98	5,83	-0,51	5,04

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pada kondisi pasca pandemi dan terkini pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sudah menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan penurunan perubahan TPT. Secara umum dampak pandemi terhadap TPT di Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Hal tersebut disebabkan dari sisi pertumbuhan jumlah perkerja, dampak covid-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang menjadi sektor utama di Kabupaten Temanggung dengan tren yang tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian,

industri, dan jasa) mengalami kontraksi. Adapun faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung yakni karena adanya sumber daya alam yang berlimpah khususnya pada sektor pertanian tembakau maupun industri pengolahan kayu serta sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyerapan angkatan kerja dapat optimal.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran. Adapun tingkat pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber : Bappeda, data diolah Tahun 2024

Gambar 2.22
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

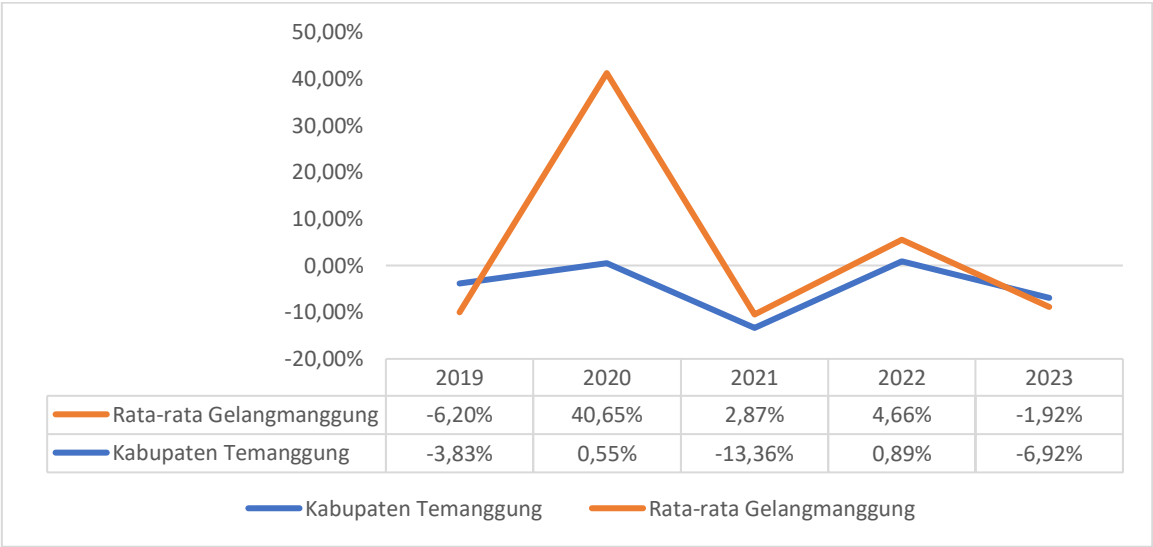
Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Adapun rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir <0 dengan nilai sebesar -4,53%. Adapun rincian pertumbuhan dan perubahan jumlah pengangguran di Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33			
Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur selama 5 Tahun			
Tahun	Kabupaten Temanggung		
	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan (%)	Perubahan
2019	13.681	-3,83	-545
2020	13.756	0,55	75
2021	11.918	-13,36	-1.838
2022	12.024	0,89	106
2023	11.192	-6,92	-832
Rata-rata 5 tahun	12.541	-4,53	-606,8

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pada Tahun 2019 dan 2023, perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mengalami sedikit peningkatan karena adanya PHK pada sektor jasa padat karya. Akan tetapi pada kondisi terkini jumlah penganggur mengalami penurunan yang signifikan dengan adanya tambahan serapan tenaga kerja. Rata-rata tingkat perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir <0 dengan pengurangan sebanyak 606,8 orang. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya jumlah pengangguran diantaranya penciptaan lapangan kerja baru, perluasan kerja di sektor informal, peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kewirausahaan, memperkuat sistem informasi pasar kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung jauh lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.23
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian wilayah yang setara secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34
Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Tahun	Kabupaten Temanggung	Rata-Rata Capaian Gelangmanggung
2019	-3.83%	4,14%
2020	0.55%	33,43%
2021	-13.36%	7,86%
2022	0.89%	1,31%
2023	-6,92%	-10,00%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara. Pada Tahun 2021 perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan signifikan mencapai - 13,36%, sedangkan kondisi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung masih mengalami peningkatan sebesar 7,86%. Pada Tahun 2023 juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mencapai 6,92% dan lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah setara yang mencapai 10%.

Adapun secara rinci jumlah penganggur Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Pengembangan secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.35
Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Jumlah Penganggur (Orang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	2.769	5.699	5.769	4.487	3.632
Kabupaten Magelang	22.922	33.080	38.976	40.895	36.841
Kabupaten Temanggung	13.681	13.756	11.918	12.024	11.192
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	13.124	17.512	18.888	19.135	17.222

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Selain dibandingkan dengan wilayah setara, jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung juga dapat dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

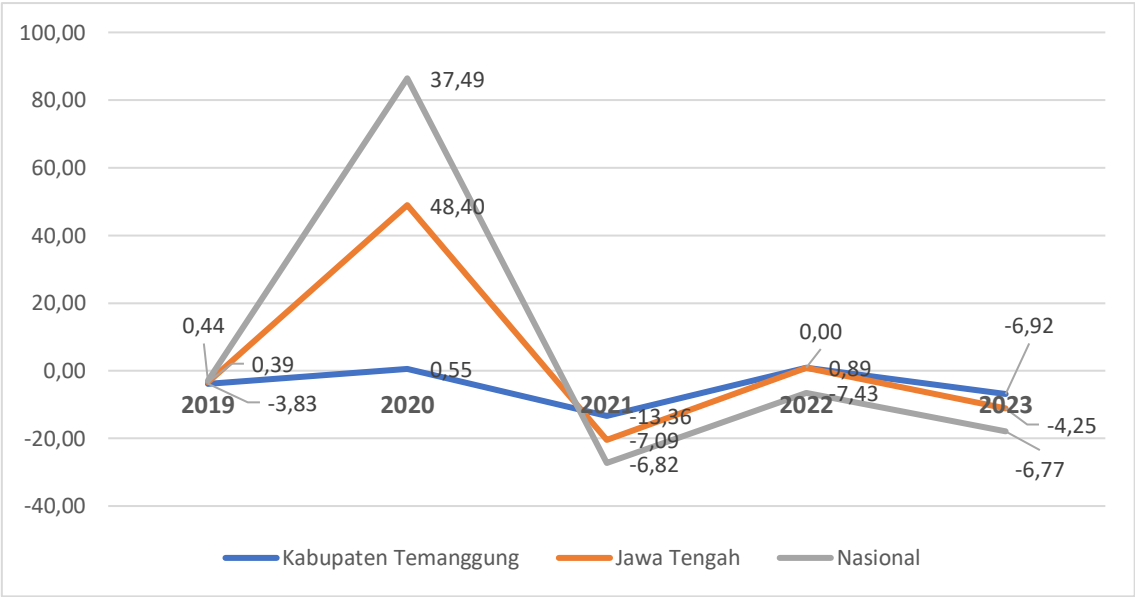
Tabel 2.36
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2019	-3,83%	0,39%	0,44%
2020	0,55%	48,40%	37,49%
2021	-13,36%	-7,09%	-6,82%
2022	0,89%	0,00%	-7,43%
2023	-6,92%	-4,25%	-6,77%
Rata-rata	-4,53%	7,49%	3,38%

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional maupun provinsi. Ditinjau dari rata-rata selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung <0 dengan nilai sebesar -4.53% sedangkan pada tingkat provinsi maupun nasional mencapai >3%.

Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

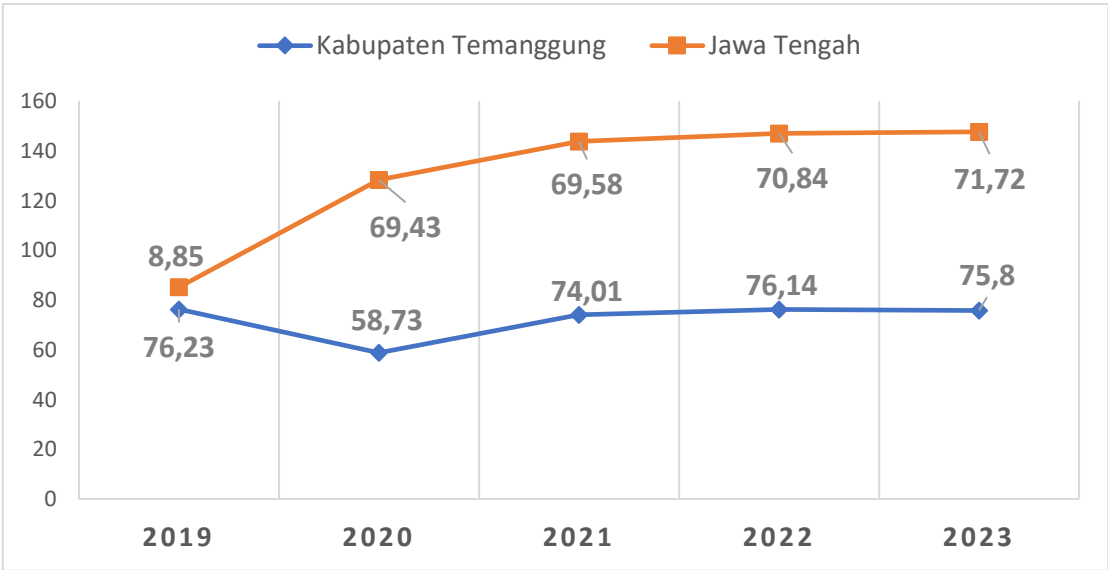
Gambar 2.24
Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dengan Capaian Nasional

Perbandingan perubahan jumlah penganggur daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini lebih baik dari nasional maupun provinsi. Perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari capaian nasional. Tahun 2020 lebih rendah yakni hanya sebesar 0,55%, sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pertumbuhan jumlah penganggur meningkat secara signifikan mencapai >35% dari kondisi sebelumnya. Adapun pada kondisi pasca pandemi terlihat bahwa pemulihan ekonomi semakin membaik yang salah satunya ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan jumlah penganggur baik pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Pada Tahun 2023 penurunan pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional dan provinsi dengan pengurangan mencapai -6,92%, sedangkan secara provinsi dan nasional secara berturut-turut hanya

mencapai -4,25% dan -6,77%. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Temanggung.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja (TPAK) memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Akan tetapi, peningkatan TPAK juga dapat menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah pengangguran pada kondisi dimana rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh penduduk usia kerja yang tidak bekerja.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.25
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Pada periode 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah, TPAK Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai yang lebih tinggi kecuali pada Tahun 2020 saat pandemi melanda. Tingginya TPAK Kabupaten Temanggung ini menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Di sisi lain, tingginya TPAK tidak selalu menggambarkan penduduk yang aktif bekerja

karena adanya peralihan menjadi ibu rumah tangga maupun penambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa.

2.1.2.5 **Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Terkait masalah kemiskinan tersebut, salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah penyediaan data yang akurat.

A. **Persentase Penduduk Miskin (PO)**

Potret kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat dari tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan targer RKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Kemiskinan) dengan Target RKPD

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2019	9,36	9,42	81.223	72.570
2020	8,85	9,96	76.798	77.330
2021	10,36	10,17	72.372	79.100
2022	10,00	9,33	80.126	73.040
2023	9,80	9,26	75.495	72.960

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Data Diolah.

Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 9,42% pada Tahun 2019 menjadi 9,26% pada Tahun 2023. Pada Tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Temanggung meningkat pada capaian angka 10,17% sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Dilihat dari jumlah penduduk, berbanding lurus dengan persentase penduduk miskin yang meningkat, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan mencapai angka 9,26% lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Temanggung.

Perbandingan Tingkat kemiskinan daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dari perbandingan Tingkat Kemiskinan daerah dengan target RKP Kewilayahan yang telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan (Jawa-Bali) Tahun 2022*	Realisasi Capaian Tahun 2023	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Tingkat Kemiskinan	10,27-11,42	9,26	100%

* Perpres 85 Tahun 2021 tentang RKP Tahun 2022

** BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2022

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan capaian sebelumnya Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Temanggung		Jawa Tengah	Nasional
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2019	9,36	9,42	10,8	9,22
2020	8,85	9,96	11,41	10,19
2021	10,36	10,17	11,79	9,71
2022	10	9,33	10,93	9,57
2023	9,8	9,26	10,77	9,36

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 lebih baik dibandingkan provinsi juga capaian nasional. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan.

Sedangkan perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

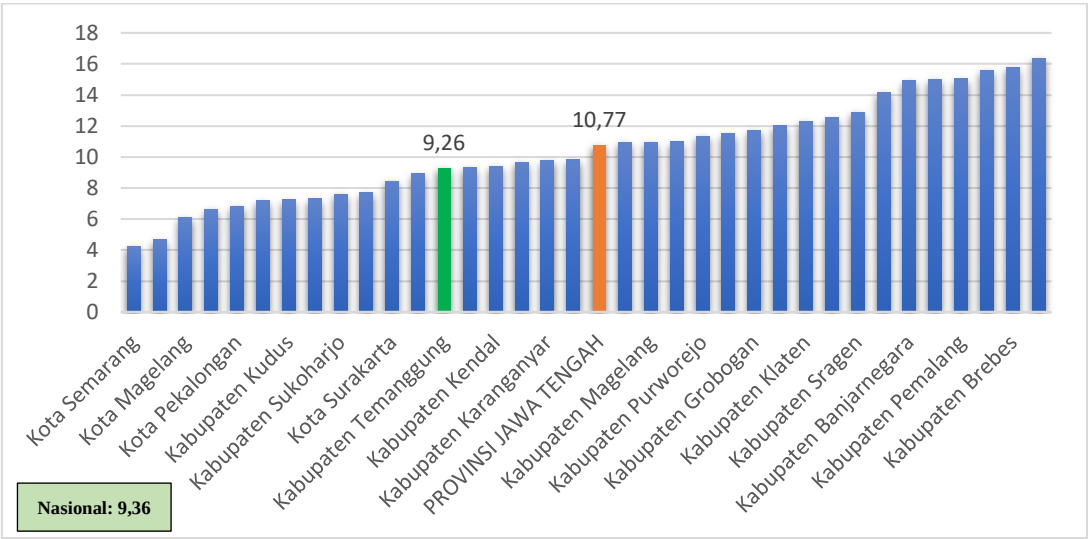
Tabel 2.40
Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan (%) Penduduk Miskin				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Magelang	10,67	11,27	11,91	11,09	10,96	-0.56	0.6	0.64	-0.82	-0,13
Kota Magelang	7,46	7,58	7,75	7,10	6,11	-0.41	0.12	0.17	-0.65	-0,99
Kabupaten Temanggung	9,42	9,96	10,17	9,33	9,26	-0.45	0.54	0.21	-0.84	-0,77

Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan (%) Penduduk Miskin				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	9,18	9,60	9,94	9,17	8,78	-0,19	0,20	0,21	-0,27	0,40
JAWA TENGAH	10,80	11,41	11,79	10,93	10,77	-0,52	0,61	0,38	-0,86	-0,16
NASIONAL	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36	-0,44	0,97	-0,48	-0,14	-0,21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024, Data Diolah.

Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 pada wilayah pengembangan Gelangmanggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada wilayah pengembangan Gelangmanggung lebih baik dari kabupaten yang lain. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke-13 dibandingkan kabupaten/kota lain dapat tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.26

Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Gambaran kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada kondisi terkini serta perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Perbandingan Perubahan Pencapaian Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Capaian Nasional

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2019	9,42	-0,45	9,18	-0,47	10,80	-0,52	9,22	-0,60
2020	9,96	0,54	9,60	0,42	11,41	0,61	10,19	0,97
2021	10,17	0,21	9,94	0,43	11,79	0,38	9,71	-0,48
2022	9,33	-0,84	9,17	-0,77	10,93	-0,86	9,57	-0,14
2023	9,26	-0,07	8,78	-0,40	10,77	-0,16	9,36	-0,21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024, Data Diolah.

Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional juga berimbas pada progres perbaikan kemiskinan ditunjukkan dengan data pada Tahun 2023, kemiskinan Kabupaten Temanggung maupun rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah serta nasional mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Pembahasan tentang kemiskinan tidak terlepas dari pembahasan mengenai penduduk miskin. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya di Kabupaten Temanggung, wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)						Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Magelang	143,40	137,40	146,34	154,91	145,33	144,49	-4,18	6,51	5,86	-6,18	-0,58
Kota Magelang	9,60	9,10	9,27	9,44	8,65	7,45	-5,21	1,87	1,83	-8,37	-13,87
Kabupaten Temanggung	75,40	72,60	77,33	79,09	73,04	72,96	-3,71	6,52	2,28	-7,65	-0,11
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	76,13	73,03	77,65	81,15	75,67	74,97	-4,37	4,97	3,32	-7,40	-4,85
JAWA TENGAH	3.897,20	3.743,23	3.980,90	4.109,75	3.831,44	3.791,50	-3,95	6,35	3,24	-6,77	-1,04
NASIONAL	25.674,58	24.785,87	27.549,69	26.503,65	26.363,27	25.900,00	-3,46	11,15	-3,80	-0,53	-1,76

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024, Data Diolah.

Perbandingan perubahan jumlah penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung sebelum pandemi Covid-19 Kabupaten Temanggung menempati urutan kedua setelah Kota Magelang. Dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dan mengalami peningkatan cukup tinggi pada Tahun 2020-2021. Pada Tahun 2023, penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang lebih dari rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, provinsi maupun nasional

Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2019	72,60	-2,80	73,03	-3,10	3.743,23	-153,97	24.785,87	-888,71
2020	77,33	4,73	77,65	4,62	3.980,9	237,67	27.549,69	2763,82
2021	79,09	1,76	81,15	3,50	4.109,75	128,85	26.503,65	-1046,04
2022	73,04	-6,05	75,67	-5,48	3.831,44	-278,31	26.363,27	-140,38
2023	72,96	-0,08	74,97	-0,70	3.791,5	-39,94	25.900,00	-463,27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024, Data Diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19 puncaknya di Tahun 2021 yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Temanggung. Tahun 2023 Kabupaten Temanggung memiliki capaian yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan. Perbandingan rasio perubahan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian nasional Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	Tingkat Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi		Tingkat Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2019	9,42	-0,45	5,05	-0,08	9,22	-0,44	5,02	-0,15
2020	9,96	0,54	-2,13	-7,18	10,19	0,97	-2,07	-7,09
2021	10,17	0,21	3,34	5,47	9,71	-0,48	3,70	5,77
2022	9,33	-0,84	5,20	1,86	9,57	-0,14	5,31	1,61
2023	9,26	-0,07	5,00	-0,20	9,36	-0,21	5,04	-0,27

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung dan BPS RI Tahun 2024, Data Diolah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 turun mengindikasikan capaian positif dengan penurunan sebesar -0,07, kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang baik pada menurunnya angka kemiskinan. Pada tingkat nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berkorelasi positif terhadap penurunan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian penurunan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Temanggung menunjukkan hasil yang lebih baik dari capaian nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan kebijakan dalam percepatan pemulihan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa persentase dan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga memperhatikan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Semakin kecil P1 maupun P2 semakin baik karena menunjukkan semakin kecilnya kedalaman dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin baik terhadap Garis Kemiskinan maupun di antara penduduk miskin itu sendiri.

B. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan dan perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan perbandingan perubahan indeks kedalaman kemiskinan dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	0,99	1,12	0,85	0,47	0,74	-0,08	0,13	-0,27	-0,38	0,27
Kabupaten Magelang	0,98	1,23	1,63	1,66	1,73	-0,57	0,25	0,40	0,03	0,07
Kabupaten Temanggung	0,51	0,86	1,57	1,06	0,99	-0,85	0,35	0,71	-0,51	-0,07
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,83	1,07	1,35	1,06	1,15	-0,50	0,24	0,28	-0,29	0,09
JAWA TENGAH	1,53	1,72	1,91	1,77	1,75	-0,32	0,19	0,19	-0,14	-0,02
NASIONAL	1,50	1,75	1,67	1,56	1,53	-0,13	0,25	-0,08	-0,11	-0,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024, Data Diolah.

Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan capaian nasional menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi. Pada Tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Indeks Kedalaman

Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 berfluktuasi dan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kemiskinan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Temanggung. Namun setelah itu, kembali menurun pada Tahun 2023 seiring dengan pemulihan pasca pandemi yang melanda. Jika dilihat lebih rinci, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 selalu berada di bawah angka rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

C. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator yang juga perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	0,19	0,23	0,15	0,06	0,12	-0,02	0,04	-0,08	-0,09	0,06
Kabupaten Magelang	0,17	0,20	0,35	0,41	0,41	-0,17	0,03	0,15	0,06	0,00
Kabupaten Temanggung	0,05	0,11	0,39	0,19	0,17	-0,24	0,06	0,28	-0,2	-0,02
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,14	0,18	0,30	0,22	0,23	-0,14	0,04	0,12	-0,01	0,01
JAWA TENGAH	0,30	0,34	0,45	0,42	0,42	-0,15	0,04	0,11	-0,03	0,00
NASIONAL	0,36	0,47	0,42	0,38	0,38	-0,05	0,11	-0,05	-0,04	0,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024, Data Diolah.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan pada Tahun 2023 sebesar 0,17 menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,19 pada Tahun 2022. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021 sama seperti

Indeks Kedalaman Kemiskinan di mana pandemi Covid-19 ikut memperparah kondisi kemiskinan yang terjadi di daerah. Kondisi kemiskinan menunjukkan perbaikan pada Tahun 2023 ditunjukkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menurun seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dan kesehatan pasca pandemi. Jika dilihat lebih rinci, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 selalu berada di bawah angka rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Temanggung dapat dikatakan masih lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Dalam mendukung pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Temanggung memanfaatkan Satu Data Regsosek melalui integrasi data sosial dan ekonomi berbasis NIK untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan ketepatan target. Kabupaten Temanggung telah mengajukan kepemilikan akun Regsosek aplikasi SEPAKAT kepada Kementerian Bappenas melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor: B/1/050.13/I/2025. Dengan menggunakan Regsosek SEPAKAT diharapkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat sesuai sasaran.

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	68,83	69,57	69,88	70,77	71,33
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,48	75,58	75,64	75,7	75,77
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,13	12,14	12,08	12,55	12,61
	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,15	7,24	6,94	7,41	7,50
C	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.489	9.343	9.142	9.773	10.108

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥ 80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM < 60). Berdasarkan status tersebut, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 termasuk pada kategori tinggi dengan nilai 71,33. Dilihat pada tabel di atas, capaian IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan dari 68,83 pada Tahun 2019 menjadi 71,33 pada Tahun 2023, serta mengalami peningkatan status dari kategori Sedang (2019-2021) menjadi kategori Tinggi (2023). Peningkatan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 turut dipengaruhi peningkatan komponen-komponen pembentuk IPM yang terdiri dari Usia Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di mana seluruh komponen tersebut juga mengalami peningkatan.

Perbandingan target dan realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH, RLS, HLS, Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Target RKPD

No	Variabel	Temanggung			Jawa Tengah	Nasional
		Target	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	70,49	71,33	100%	73,39	74,39
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,53	75,77	100%	74,69	73,93
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,49	12,61	100%	12,85	13,15
C	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,80	7,50	96,15%	8,01	8,77
D	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.715	10.108	100%	11.835	11.899

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI dan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten

Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Capaian IPM Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan capaian nasional juga masih berada di bawah capaian nasional. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan capaian tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.49

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Kabupaten/ Kota	IPM						Pertumbuhan IPM (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Temanggung	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33	1,061	0,01	0,45	1,27	0,79

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Data Diolah.

Apabila melihat nilai capaian IPM Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan capaian IPM atau IPM daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan capaian nasional secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50

Perbandingan Pertumbuhan IPM Dearah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	IPM					Pertumbuhan IPM (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	78,8	78,99	79,43	80,39	81,17	14,02	0,24	0,56	1,21	0,97
Kabupaten Magelang	69,87	69,87	70,12	70,85	71,45	-10,78	0,00	0,36	1,04	0,85
Kabupaten Temanggung	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33	1,06	0,01	0,45	1,27	0,79
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	72,74	72,81	73,14	74,00	74,65	1,43	0,08	0,46	1,17	0,87
JAWA TENGAH	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39	0,86	0,20	0,40	0,87	0,82
NASIONAL	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39	0,74	0,03	0,49	0,86	2,03

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung selama Tahun 2019-2023 cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung tergolong moderat. Pertumbuhan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 menunjukkan progres yang semakin membaik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, progres tersebut juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Meski menunjukkan progres yang positif, capaian IPM Kabupaten Temanggung, capaian IPM masih berada di bawah capaian rata-rata pada wilayah

pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah maupun nasional, sehingga Kabupaten Temanggung masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan standar untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu daerah dari sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sektor kesehatan direpresentasikan dengan indikator usia harapan hidup saat lahir, sektor pendidikan direpresentasikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta sektor ekonomi direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Komponen dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) yaitu :

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. AHH merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dibandingkan dengan target RKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Perbandingan AHH dengan Target RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	AHH (Angka Harapan Hidup)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2019	75,45	75,48	100%
2020	75,47	75,58	100%
2021	75,49	75,64	100%
2022	75,51	75,70	100%
2023	75,53	75,77	100%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

AHH di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 telah mencapai 75,77 dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan komponen dalam Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) pada indikator Capaian dan pertumbuhan AHH Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan kabupaten/kota wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional secara terinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)					Pertumbuhan AHH				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	73,56	73,72	73,88	74,03	74,2	0,09	0,16	0,16	0,15	0,23
Kabupaten Magelang	76,75	76,85	76,93	77,02	77,22	0,03	0,10	0,08	0,09	0,26
Kabupaten Temanggung	75,48	75,58	75,64	75,7	75,77	0,01	0,10	0,06	0,06	0,09
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	75,26	75,38	75,48	75,58	75,73	0,04	0,12	0,10	0,10	0,19
JAWA TENGAH	74,23	74,37	74,47	74,57	74,69	0,05	0,14	0,10	0,10	0,16
NASIONAL	71,34	71,47	71,57	71,85	73,93	0,14	0,13	0,10	0,28	2,89

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Tren AHH Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019-2023 menunjukkan capaian yang bagus karena terus meningkat. Peningkatan capaian tersebut mengindikasikan perbaikan pembangunan pada bidang kesehatan. Jika dilihat perbandingan capaian Kabupaten Temanggnng dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, indikator Usia Harapan Hidup Saat Lahir memiliki capaian yang lebih baik. Namun jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, Kabupaten Temanggung memiliki progres yang tidak cukup baik meskipun mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya.

B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perbandingan HLS Kabupaten Temanggung dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Perbandingan HLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2019	12,21	12,13	99,34%
2020	12,28	12,14	98,89%
2021	12,35	12,32	99,76%
2022	12,42	12,55	100%
2023	12,49	12,61	100%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

mencapai 12,61 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada Tahun 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,61 tahun (Diploma I) lebih baik dari capaian Tahun 2020 (12,14). Capaian HLS Temanggung pada Tahun 2023 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah (12,85) dan Nasional (13,15).

Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Capaian Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	HLS (Tahun)					Pertumbuhan HLS				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	12,53	12,54	12,55	12,58	12,61	0,05	0,01	0,01	0,03	0,24
Kabupaten Magelang	13,81	14,14	14,15	14,31	14,4	0,01	0,33	0,01	0,16	0,63
Kabupaten Temanggung	12,13	12,14	12,32	12,55	12,61	0,05	0,01	0,18	0,23	0,48
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	12,82	12,94	13,01	13,15	13,21	0,04	0,12	0,07	0,14	0,45
JAWA TENGAH	12,68	12,7	12,77	12,81	12,85	0,05	0,02	0,07	0,04	0,31
NASIONAL	12,95	12,98	13,08	13,1	13,15	0,04	0,03	0,10	0,02	0,38

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Capaian HLS Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan. HLS Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebesar 12,61, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun yang masing jenjang pendidikan pada Tahun 2023 diharapkan dapat bersekolah hingga 12,61 tahun atau setara Diploma I. Dilihat berdasarkan pertumbuhannya, progres HLS Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang positif terutama setelah pandemi Covid-19. jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, capaian HLS Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawah capaian tersebut, oleh karena itu pembangunan di sektor pendidikan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

C. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Perbandingan RLS Kabupaten Temanggung dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.55

Perbandingan RLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2019	7,20	7,15	99,30%
2020	7,35	7,24	98,50%
2021	7,50	7,25	96,67%
2022	7,65	7,41	96,86%
2023	7,80	7,50	96,15%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 mencapai 7,5 naik 1,21 poin dibandingkan capaian tahun 2022. Ini artinya rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung di bawah capaian Jawa Tengah (8,01) dan capaian Nasional (8,77). Dan ini diasumsikan menjadi salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2019-2023.

Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56

Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	RLS (Tahun)					Pertumbuhan RLS				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	7,77	7,78	7,79	7,81	7,82	0,2	0,01	0,01	0,02	0,13
Kabupaten Magelang	10,33	10,39	10,62	10,94	11,2	0,02	0,06	0,23	0,32	2,38
Kabupaten Temanggung	7,15	7,24	7,25	7,41	7,5	0,21	0,09	0,01	0,16	1,21
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	8,42	8,47	8,55	8,72	8,84	0,14	0,05	0,08	0,17	1,24
JAWA TENGAH	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01	0,18	0,16	0,06	0,18	1,01
NASIONAL	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77	0,17	0,14	0,06	0,15	0,92

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Capaian RLS Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. RLS Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebesar 7,5, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung telah menempuh pendidikan selama 7,5 tahun atau setara dengan telah mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII). Pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan karena jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional di

mana capaian Kabupaten Temanggung termasuk rendah.

Faktor penghambat Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Temanggung di antaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kultur sosial budaya masyarakat. Upaya tindak lanjut nya adalah penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dengan menambah dan meningkatkan sarana pelayanan pendidikan dan tenaga pendidik yang berkompetensi untuk meningkatkan capaian RLS sekaligus HLS.

D. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

Perbandingan pengeluaran per kapita dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Pengeluaran Per Kapita		
	Target	Realisasi	Kinerja
2019	9.489.000	9.489.000	100%
2020	9.343.000	9.343.000	100%
2021	9.408.000	9.408.000	100%
2022	9.773.000	9.773.000	100%
2023	10.108.000	10.108.000	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.108.000,00, lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp.11.835.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 11.899.000,00.

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Pengeluaran per kapita dapat menggambarkan tingkat kemapanan seseorang. Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta

perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp)					Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	9.387	9.301	9.440	10.011	10.493	4,01	-0,92	1,49	6,05	4,81
Kabupaten Magelang	12.514	12.210	12.349	12.816	13.175	4,34	-2,43	1,14	3,78	2,80
Kabupaten Temanggung	9.489	9.343	9.408	9.773	10.108	3,80	-1,54	0,70	3,88	3,43
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	10.463	10.285	10.399	10.867	11.259	4,05	-1,63	1,11	4,57	3,68
JAWA TENGAH	11.102	10.930	11.034	11.377	11.835	3,02	-1,55	0,95	3,11	4,03
NASIONAL	11.299	11.013	11.156	11.479	11.890	2,17	-2,53	1,30	2,90	3,58

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2019 hingga 2022 meskipun pada Tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada Tahun 2023 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Temanggung telah mencapai 10.108 Ribu Rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, capaian Kabupaten Temanggung masih berada di bawah bahkan paling rendah di antara kabupaten/kota yang ada pada wilayah pengembangan Gelangmanggung. Selain itu jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawahnya.

2.1.2.7 Ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah

dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. Ketimpangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator Rasio Gini dan/atau Distribusi Pengeluaran Menurut Bank Dunia.

A. Rasio Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1, dimana semakin tinggi nilai Rasio Gini menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Perubahan Rasio Gini juga merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk.

Rasio Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2023 telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD. Adapun perbandingan Rasio Gini daerah dengan target RKPD selama periode Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Kinerja
2020	NA	0,382	100%
2021	0,382	0,374	100%
2022	0,374	0,370	100%
2023	0,363	0,359	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Perkembangan nilai Rasio Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Kabupaten / Kota	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	0,405	0,452	0,427	0,419
Kabupaten Magelang	0,370	0,384	0,363	0,358
Kabupaten Temanggung	0,382	0,374	0,370	0,359
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,386	0,403	0,387	0,379
JAWA TENGAH	0,362	0,372	0,374	0,369
NASIONAL	0,385	0,381	0,381	0,388

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Nilai Rasio Gini Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2023 menunjukkan penurunan. Nilai Rasio Gini yang terus menurun mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan dalam periode tersebut. Penurunan nilai Rasio Gini juga dapat diartikan bahwa

distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Pada Tahun 2023 nilai Rasio Gini Kabupaten Temanggung adalah sebesar 0,359 yang berada pada kategori sedang/moderat.

Perbandingan nilai Rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Temanggung dan nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan
2019	n.a	n.a	5,05	-0,08	na	n.a	5,02	-0,15
2020	0,382	n.a	-2,13	-7,18	0,385	n.a	-2,07	-7,09
2021	0,374	-0,008	3,34	5,47	0,381	-0,004	3,70	5,77
2022	0,370	-0,004	5,20	1,86	0,381	0,00	5,31	1,61
2023	0,359	-0,013	5,00	-0,20	0,388	0,007	5,04	-0,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang digambarkan menggunakan Rasio Gini, dapat diukur dengan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita yang mana kedua hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian penduduk di suatu wilayah. Dilihat dari tabel di atas, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung berkorelasi positif terhadap penurunan ketimpangan (Rasio Gini). Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	0,382	n.a	0,386	n.a	0,385	n.a
2021	0,374	-0,008	0,403	-0,008	0,381	-0,004
2022	0,370	-0,004	0,387	-0,004	0,381	0,000
2023	0,359	-0,011	0,379	-0,011	0,388	0,007

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Gini Kabupaten Temanggung mencatatkan nilai sebesar 0,359. Setelah tahun 2020 atau pasca pandemi Covid-19, nilai Rasio Gini mengalami penurunan seiring dengan kondisi perekonomian yang berangsur pulih sehingga pemerataan pendapatan juga dapat meningkat. Jika dibandingkan dengan rata-rata Purwomanggung dan nasional, Rasio Gini Kabupaten Temanggung

memiliki nilai yang lebih kecil meskipun berada pada kategori yang sama yaitu kategori ketimpangan sedang

B. Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia

Selain Rasio Gini, ukuran lain yang sering digunakan sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk adalah “distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia” yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- 1. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%
- 2. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
- 3. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%

Berikut gambaran distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dari Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2019	n.a	18,39	0,05
2020	n.a	17,54	-0,85
2021	18,30	18,78	1,24
2022	18,50	18,46	-0,32
2023	18,70	19,52	1,06

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung termasuk kategori rendah (*low inequality*). Pada Tahun 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,52%, kondisi tersebut menurun jika dibandingkan kondisi Tahun 2022 sebesar 18,46%. Perkembangan distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung menurut kriteria Bank Dunia dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 berfluktuasi dan menurun cukup tajam pada Tahun 2020, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan. Jika dibandingkan dengan target sebagaimana ditetapkan

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, kondisi Tahun 2023 telah mencapai target.

Perbandingan Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, wilayah Pengembangan Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia					Perubahan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	15,17	16,26	14,9	16,24	16,07	-1,12	1,09	-1,36	1,34	-0,17
Kabupaten Magelang	17,71	18,57	18,01	18,82	19,03	-0,81	0,86	-0,56	0,81	0,21
Kabupaten Temanggung	18,39	17,54	18,78	18,46	19,52	0,05	-0,85	1,24	-0,32	1,06
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	17,09	17,46	17,23	17,84	18,21	-0,63	0,37	-0,23	0,61	0,37
JAWA TENGAH	18,71	18,53	18,34	18,51	18,74	0,81	-0,18	-0,19	0,17	0,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, data diolah

Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 capaiannya 19,52% dapat diartikan distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk kelompok berpenghasilan rendah berkurang 1,06. Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi angka Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 masih berada di bawah, meskipun kondisi di Kabupaten Temanggung menunjukkan ketimpangan yang rendah atau pemerataannya tinggi.

Perbandingan kondisi Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung kondisi terkini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		JAWA TENGAH	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2019	18,39	0,05	17,09	-0,63	18,71	0,81
2020	17,54	-0,85	17,46	0,37	18,53	-0,81
2021	18,78	1,24	17,23	-0,23	18,34	-0,19
2022	18,46	-0,32	17,84	0,61	18,51	0,17
2023	19,52	1,06	18,21	0,37	18,74	0,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, data diolah

Kondisi ketimpangan di Kabupaten temanggung dilihat berdasarkan distribusi pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia pada masa Covid-19 yaitu Tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Gangguan kesehatan serta perekonomian yang berkontraksi membawa pengaruh yang signifikan tidak hanya pada peningkatan kemiskinan tetapi juga berdampak pada ketimpangan yang meningkat. Namun, setelah Tahun 2020, kondisi ketimpangan menunjukkan perbaikan pada Tahun 2021 dengan peningkatan pemerataan yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan Jawa Tengah, kondisi ketimpangan menunjukkan belum adanya perbaikan pada Tahun 2021, namun mulai membaik pada Tahun 2023. Kebijakan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi terbukti memberikan dampak yang positif terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan pemerataan yang lebih baik.

2.1.2.8 Aspek Seni Budaya dan Olahraga

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK merupakan instrumen disusun Kemendikbud bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini diperlukan untuk mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, IPK bukan mengukur nilai budaya, tetapi lebih memotret pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut. Dengan mengetahui pencapaian pembangunan kebudayaan, maka setiap pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan agar dapat menaikkan pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah masing-masing. Gambaran capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Temanggung sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n.a.	n.a.	3,31	3,67	3,67

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah

timbulnya berbagai penyakit. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat. Program yang telah dilaksanakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk berolahraga salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan Senam PORPI (Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia) Kabupaten Temanggung yang mengambil tempat di Pasar Curug Titang.

Sedangkan untuk mengukur kemajuan pembangunan digunakan indek pembangunan olahraga (*Sport Development Index*). Indek pembangunan olahraga adalah istilah baru dalam olahraga Indonesia. Ini semacam metode pengukuran yang diklaim sebagai alternatif baru untuk megukur kemajuan pembangunan olahraga yang meliputi sembilan dimensi (variabel) yaitu ruang terbuka olahraga, sumberdaya manusia olahraga, partisipasi masyarakat, kebugaran, performa, kesehatan, literasi fisik, perkembangan performa, dan ekonomi. Pembangunan olahraga di suatu daerah tentunya memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga secara umum di Indonesia. Gambaran capaian kinerja keolahragaan di Kabupaten Temanggung sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Indeks Pembangunan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	n.a	n.a	3,31	2,97	2,97

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dan sebagai salah satu target yang menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dasar. Indikator untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian realisasi kinerja APK dan APM semua jenjang pendidikan di Kabupaten Temanggung periode Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel

berikut:

Tabel 2.68
APK dan APM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APK PAUD 0-6 th (%)	37,53	38,27	40,31	39,59	48,11
APK PAUD 4-6 th (%)	73,99	74,16	72,07	75,18	70,81
APK SD/MI (%)	106,89	106,86	98,07	100,45	165,08
APK SMP/MTs (%)	97,26	98,17	98,56	95,35	159,33
APM SD/MI (%)	96,97	97,62	91,24	94,12	104,62
APM SMP/MTs (%)	84,52	85,25	77,18	79,77	134,35

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Selama tiga tahun (2019-2021) berturut-turut, APK PAUD 0-6 tahun di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren meningkat, capaian tersebut pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 39,59%. Penurunan tersebut dikarenakan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berusia 0-6 tahun sebesar 10,4% dari Tahun 2021 akan tetapi kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan siswa yang bersekolah di jenjang PAUD pada tahun 2022 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 7,8%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 48,11%, namun jumlah penduduk usia 0-6 tahun menurun menjadi 64.662 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, di tingkat Sekolah Dasar (SD) Terdapat selisih antara APM dan APK SD/MI. Hal tersebut kemungkinan disebabkan banyaknya anak di bawah usia 7 tahun yang telah memasuki Sekolah Dasar, sementara penegakan aturan usia minimal masuk SD baru diterapkan secara efektif di Tahun 2017.

Kesenjangan APK dan APM juga ditemukan di jenjang pendidikan SMP/MTs sederajat di Tahun 2023. Rendahnya APM SMP Sederajat diantaranya disebabkan karena terdapat anak usia 13-15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang pendidikan menengah, dan adanya anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah.

Realisasi kinerja pada indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar menunjukkan kecenderungan tetap, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat	0,29	0,21	0,37	0,29	0,21

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD menunjukkan tren penurunan sejak Tahun 2019, namun berbanding terbalik

dengan APS jenjang SMP sederajat yang awalnya mengalami penurunan namun naik pada Tahun 2021, dan kembali turun pada Tahun 2022 dan tahun 2023 APS SMP menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan APS SD berdasarkan Profil Pendidikan Tahun 2022, sebagian besar siswa SMP/MTs mengalami putus sekolah di kelas 7 dan didominasi oleh siswa laki-laki. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya APS pada siswa SD/MI dan SMP/MTs umumnya adalah faktor motivasi anak, perhatian/persepsi orang tua siswa, memiliki kebutuhan khusus (anak berkebutuhan khusus), budaya, dan faktor ekonomi orang tua siswa.

Berdasarkan Surat Mendikbudristek Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, hasil capaian realisasi kinerja literasi dan numerasi pendidikan Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Indikator	Jenjang	Capaian	Target
Skor Kemampuan Numerasi	SD	49.50	44.57
Skor Kemampuan Numerasi	SMP	66.49	72.88
Skor Kemampuan Literasi	SD	65.51	61.15
Skor Kemampuan Literasi	SMP	76.52	73.58

Sumber : Lampiran Surat Mendikbudristek 2024

Capaian Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung dari 4 indikator terdapat 3 indikator yang sudah memenuhi target, yaitu Skor Kemampuan Numerasi SD dan Skor Kemampuan Literasi SD dan SMP, sedangkan terdapat 1 indikator capaiannya belum memenuhi target yaitu Skor Kemampuan Numerasi SMP. Beberapa faktor yang menyebabkan capaian Skor kemampuan Numerasi SMP lebih rendah dari target yaitu Data peta kebutuhan PTK dalam memaksimalkan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan numerasi siswa, maka perlu diketahui pemetaan jumlah PTK yang tersedia dan yang dibutuhkan, kualitas pembelajaran konten pembelajaran mampu meningkatkan numerasi siswa terutama jika konten pembelajaran tnjih paersebut berasal dari guru berkualitas, Reflesi dari perbaikan pembelajaran perlu dilakukan secara berklanutan melalui komunitas belajar sebagai wadah bagi PTK untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya.

Pada Tahun 2023 persentase PNF Terakreditasi menunjukkan kenaikan namun masih jauh dari angka 100%. Persentase Satuan Pendidikan Nonformal (satuN PNF) Terakreditasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Persentase Satuan PNF Terakreditasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Satuan PNF Terakreditasi	15	18	19	19	19
2	Jumlah Satuan PNF	54	61	59	59	59
3	Persentase	27,78	29,51	32,20	32,20	32,20

Sumber: Bidang PPNF, Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Satuan PNF Terakreditasi yang pada tahun 2018 berjumlah 13 meningkat menjadi 19 pada Tahun 2022, dan Satuan PNF pada Tahun 2018 berjumlah 54 meningkat menjadi 59 pada Tahun 2022.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Indikator aspek kesehatan yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang kesejahteraan sosial adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa).

AKI, AKB, dan AKBa di Kabupaten Temanggung selama periode 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Di Tahun 2020 angka kematian untuk ibu, dan bayi mengalami peningkatan, dimana peningkatan tertinggi terjadi untuk kematian ibu. Kondisi tersebut disebabkan oleh hampir seluruh fasilitas kesehatan tidak dapat menyediakan layanan kesehatan secara optimal karena persebaran covid-19. Selain itu, masyarakat juga cenderung enggan untuk mengakses sebagian besar layanan kesehatan tersebut karena khawatir tertular. Kondisi tersebut menunjukkan penyediaan layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil serta deteksi dan penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan belum optimal.

Gambaran capaian kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Temanggung periode Tahun 2019 - 2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.72
Gambaran Urusan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,48	75,58	75,64	75,70	75,77
2	Indeks Kinerja RSUD	%	70,7	69,05	93	95	95
3	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	85,27	95,83	174,38	75,32	44,96
4	Angka kematian bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	12,51	12,65	12,72	13,23	13,04
5	Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,27	0,18	0,18	0,31	0,22
6	Prosentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	89,14	97,72	100	100	90,22
7	Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	96,15	96,15	100	100	100
8	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	99,22	98,41	97,73	98,72	99,02
9	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
	sesuai standar						
10	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100
12	Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100
13	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	99,09	100
14	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100
15	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	9,00	9,77	9,54	9,15	9,2
16	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,67	80,40	81,64	92,95	100
17	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	14,68	13,90	14,05	15,60	16,1
18	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	30,95	84,92	82,05	100
19	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	86,60	51,81	69,25	89,07	100
20	Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,25	62,64	89,52	83,22	100
21	Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas)	%	36,06	38,09	33,83	55,32	45,5
22	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	40	40	40	40	100
23	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	22,63	19,99	30,97	84,78	100
24	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,91	77,37	92,50	100	100
25	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,86	83,06	100	100	100
26	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	72,11	38,19	67,88	95,65	100
27	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	%	68,41	74,42	73,49	87,03	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
	standar						
28	Persentase Penanganan KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100
29	Angka Kesakitan kasus malaria (API)	maks per 1.000 penduduk	0,008	0	0,0005	0,0002	0,0002
30	Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	maks per 100.000 penduduk	37,62	51,13	3,75	3,62	2,09
31	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	Maks per 100.000 penduduk	0,1	0,38	0	0,125	0,0004
32	Persentase Desa/kelurahan UCI	%	98,96	99,31	99,31	99,65	100
33	Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak	% minimal	95,6	95,75	81,16	97,05	99,85
34	Prevalensi gizi kurang (underweigh) pada anak balita (0-60 bulan)	% maksimal	3,35	3,79	3,10	4,21	4,03
35	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	20,40	14,23	13,13	13,03	9,84
36	Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	86,03	74,15	84,02	82,33	87,42
37	Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	15,72	14,18	13,64	13,44	11,41
38	Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100
39	Persentase rumah sehat	%	80,10	83,75	82,16	87,42	100
40	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100
41	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	51,13	50,73	55,90	56,35	56,99
42	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	97,06	100	100	100	100
43	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	n.a	n.a	19,23	100	100
44	Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	n.a	n.a	80,77	100	100
45	Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional	%	n.a	n.a	100	100	100
46	Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100
47	Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	n.a	n.a	100	100	100
48	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	89,15	92,92	94,42	94,96	96

Sumber: Dinkes Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Angka Harapan Hidup selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Derajat Kesehatan

masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang tergolong cukup tinggi, dan mengalami kenaikan sebesar 0,07 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

Pada Tahun 2021 Angka Kematian Ibu meningkat secara drastis yaitu sebesar 174,38% per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebanyak 17 kematian dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar 95,83 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi penyebab kematian ibu tertinggi di Tahun 2021 yakni 9 orang (52,94%). Kasus kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Temanggung disebabkan mayoritas karena ibu hamil memiliki riwayat penyakit dan kurang optimalnya kunjungan nifas. Pada Tahun 2023, angka kematian ibu mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding Tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 44,96.

Angka kematian bayi pada Tahun 2019-2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana tersebut pada tabel di atas. Dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 AKB mengalami peningkatan dari 12,51 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 13,04 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil.

Untuk Tahun 2023 jumlah kematian bayi sebanyak 116 kematian yang tersebar di seluruh Kecamatan dan wilayah Puskesmas. Mayoritas penyebab kematian adalah BBLR, asfiksia dan kelainan kongenital.

Persentase balita gizi buruk cenderung fluktuatif, angka ini selalu ada di bawah 10%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di

bawah target nasional yaitu kurang dari 0,5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Sedangkan untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat pada Tahun 2019-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 90,22% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 100%, akan tetapi jika dilihat pada target RPJMD perubahan 2018-2023 tercapai 100%.

Untuk data capaian Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar Tahun 2023 digunakan standar berdasarkan Rencana Aksi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 – 2024, Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) yaitu Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar merupakan Puskesmas dengan capaian pemenuhan SPA lebih dari 60% dan pada Tahun 2023 telah mencapai 100%.

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan belum bisa 100% karena proses perencanaan dan pengadaan obat di Kabupaten Temanggung dilakukan setahun sekali di awal tahun sehingga dimungkinkan terjadi perubahan dalam kebutuhan dalam bulan-bulan terakhir yang disebabkan karena perubahan dari segi jumlah pasien yang berobat (metode konsumsi) dan jenis penyakit yang muncul (metode epidemiologi) sehingga tidak bisa tepat 100%. Selain jenis penyakit yang muncul bervariasi faktor lain yang menyebabkan ketersediaan obat belum mencapai angka 100% adalah keterlambatan pengiriman obat, ketidaksesuaian tanggal kedaluwarsa dengan pemesanan, dan belum semua obat masuk ke *e-catalog* serta sisanya masih proses tender cepat.

Indikator cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan dengan target 100% setiap tahunnya atau dengan kata lain semua bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2021 seluruh bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 100%. Pada Tahun 2022 angka capaiannya hanya 99,09%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti kelengkapan sarana dan prasarana penanganan kegawatdaruratan penyakit pada bayi, pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal, dan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus kegawatdaruratan. Dan pada Tahun 2023 capainnya naik menjadi 100% dari tahun sebelumnya.

Semua balita di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 telah

mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar 100%, yang merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan bagi masyarakat khususnya balita (0-60 bulan). Indikator cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 80,40% disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan posyandu dibatasi yang mengakibatkan pelayanan tidak maksimal. Pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 100% atau terdapat 43.520 balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

Tahun 2021 dengan adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar tidak maksimal sehingga hanya mencapai 84,92%. Pada Tahun 2022, persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sudah mencapai 82,05% dan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 100%.

Persentase warga negara Indonesia usia 15-59 dan usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan indikator SPM Bidang kesehatan dimana targetnya adalah 100% yang artinya bahwa semua warga negara usia 15-59 tahun dan 60 tahun ke atas wajib mendapatkan skrining kesehatan. Dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 belum semua sasaran mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, hal ini dikarenakan yang mendapatkan skrining kesehatan baru sasaran yang datang ke fasilitas kesehatan yang dilayani skrining kesehatan, sedangkan yang tidak mengunjungi fasilitas kesehatan belum mendapatkan skrining kesehatan, di tahun 2020 dengan adanya pandemic Covid-19 membuat warga enggan untuk pergi ke fasilitas Kesehatan untuk memeriksakan dirinya. Akan tetapi pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 warga negara usia 15-59 dan 60 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar terus mengalami peningkatan hingga sampai dengan Tahun 2023 telah tercapai 100%

Untuk data pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dan DM baru dapat diperoleh mulai Tahun 2017 karena pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan baru diimplementasikan mulai Tahun 2017. Jumlah penderita hipertensi dan DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar masih sangat kecil pada awalnya, dikarenakan data yang diperoleh hanya berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama belum termasuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Swasta, namun seiring bertambahnya waktu telah tercapai pelayanan 100% pada Tahun 2023.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat dilaksanakan berdasarkan

Permenkes tentang SPM Bidang Kesehatan dan dimulai Tahun 2018 dengan capaian belum memenuhi target 100% yaitu hanya 69,36%. Indikator persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada tahun 2023 capaiannya sebesar 100%, capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti telah dilaksanakan deteksi dini khususnya di lingkungan sekolah dan masyarakat, pengobatan yang dilakukan telah sesuai standar, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, mengadakan bimtek kepada puskesmas terkait capaian kinerja, dan adanya advokasi terhadap para *stakeholder* di tingkat kabupaten.

Indikator persentase orang terduga TBC merupakan salah satu indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan dimana targetnya sebesar 100% yang artinya semua orang terduga TB wajib menerima pemeriksaan penunjang TB sesuai standar. Jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang TB ditemukan dan tercatat Tahun 2023 adalah sebanyak 8.577 orang dengan capaian yang meningkat sebesar 100% dari target 100%.

Dari Tahun 2019-2023 semua kejadian Luar Biasa (KLB) di lakukan Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan < 24 jam atau 100% dapat ditanggulangi. Bila dilihat dari Tahun 2020 dan 2021 jumlah frekuensi KLB menurun dari 4 kejadian menjadi 3 kejadian, hal didorong oleh adanya kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di masing-masih wilayah puskesmas, dimana bila ada kenaikan kasus penyakit menular di wilayah kerjanya segera ditindaklanjuti dengan penanganan untuk mencegah peningkatan atau penyebaran kasus penyakit tersebut. Pada tahun 2023 juga terjadi penurunan terdapat 11 KLB yang terjadi yaitu KLB difteri, diare, keracunan makanan, campak, pertusis yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, namun dapat ditangani karena Dinas Kesehatan memiliki tenaga epidemiologi yang memadai sehingga melakukan PE (Penyelidikan Epidemiologi) dengan optimal.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 terdapat 2 (dua) kasus malaria di wilayah kerja puskesmas Traji dan Puskesmas Kedu dimana masih di bawah target <1 per 1.000 penduduk dikarenakan Kabupaten Temanggung bukan merupakan daerah endemis malaria dan kewaspadaan dini tetap berlanjut agar tidak muncul kasus malaria.

Penyakit DBD masih menjadi permasalahan kesehatan prioritas di Kabupaten Temanggung, Angka Kesakitan (*Incident rate/IR*) DBD di

Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar 3,75 per 100.000 penduduk, angka ini jauh dibawah target yang ditetapkan (<20 per 100.000 penduduk). Bila dibandingkan pada Tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena dalam penegakan diagnosa DBD pada tahun 2021 didasarkan pada standar WHO Tahun 2011 yang dilaporkan dalam format pencatatan pelaporan E-DBD Tronik. Pada Tahun 2022 nilai IR DBD per 100.000 penduduk sebesar 3,62 dan Tahun 2023 nilai IR DBD per 100.000 penduduk menurun sebesar 2,09.

Selama Tahun 2019-2023 capaian desa UCI tercapai 100% dikarenakan melakukan advokasi secara berkelanjutan kepada semua desa/kelurahan untuk melaksanakan imunisasi. Kemudian untuk persentase anak umur 1 tahun yang mendapat imunisasi campak dari Tahun 2019-2023 fluktuatif walaupun sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 99,85%. Imunisasi Campak merupakan indikator bahwa anak usia 1 tahun sudah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Persentase rumah sehat dari tahun ke tahun fluktuatif. Untuk Tahun 2021 rumah sehat menurun menjadi 82,16% walaupun telah melebihi target sebesar 81% sedangkan pada Tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%, hal tersebut didukung dengan adanya upaya pembinaan bagi rumah yang belum memiliki kategori sehat. Kegiatan untuk meningkatkan cakupan rumah sehat juga didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh sektor terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup.

Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah tangga) starta utama Tahun 2023 capaian masih 96%. Capaian tersebut telah melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 83,09%. Petugas telah melakukan pendataan terkait data PHBS dan melakukan upaya peningkatan kerjasama dengan kader posyandu dalam kegiatan pendataan di masing masing desa se-Kabupaten Temanggung.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kinerja aspek fasilitasi dan infrastruktur wilayah di Kabupaten Temanggung pada indikator persentase infrastruktur kondisi baik diukur dengan 4 komponen yaitu Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi, persentase jaringan irigasi kondisi baik, persentase jalan kondisi mantap, dan persentase jembatan dalam kondisi baik. Perkembangan kinerja 4 komponen ini disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Komponen	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase infrastruktur kondisi baik (%)	81,17	82,37	83,70	83,79	84,71
Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum (%)	86,73	93,90	94,52	95,32	95,95
Persentase jaringan irigasi kondisi baik (%)	57,41	59,97	58,11	58,83	59,36
Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	89,14	83,33	89,29	88,15	89,16
Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	92,28	92,87	92,88	92,88	94,36

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik pada Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada Tahun 2023 telah mencapai 84,71% melebihi target 84,00%.

Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 adalah 95,95% atau sebanyak 260.833 rumah tangga yang berakses minum layak dari 271.854 rumah tangga yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari ketersediaan air minum layak, Kabupaten Temanggung telah memenuhi standar pelayanan minimal air minum.

Cakupan daerah irigasi kondisi baik pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022. Jumlah daerah irigasi kondisi baik sebanyak 342,5 unit dari jumlah daerah irigasi sebanyak 577 unit atau seluas 10.0512,17 Ha dari 17.708,78 Ha pada Tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 daerah irigasi dalam kondisi baik tercapai sebanyak 339,5 unit atau seluas 10.417,61 Ha.

Indikator program persentase jalan kondisi mantap pada Tahun 2023 tercapai 89,16%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2018-2023 sebesar 84,85%. Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 579,972 Km dari keseluruhan panjang jalan kabupaten yaitu 650.476 Km. Sedangkan panjang jalan yang rusak atau tidak mantap sepanjang 70,504 Km. Kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat.

Persentase jembatan kabupaten kondisi baik pada Tahun 2022 tercapai sebesar 92,88% atau sebanyak 313 unit jembatan dalam kondisi baik dari 337 unit jembatan di Kabupaten Temanggung. Capain jembatan kabupaten dalam kondisi baik dari Tahun 2019- 2023 ada peningkatan. Pada Tahun 2023 meningkat 1,48% dari capaian Tahun 2022, hal tersebut didukung dari sub kegiatan pengembangan jembatan, sub kegiatan penggantian jembatan ddan sub kegiatan pemeliharaan rutin jembatan.

Selanjutnya capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Gambaran Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Sat	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	81,17	82,37	83,70	83,79	84,54
2	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai tata ruang	%	87,70	89,20	88,54	88,56	89,56
3	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	n.a	91,89	95,29	97,97	98,32
4	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	%	57,41	59,97	58,11	58,83	59,36
5	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	%	86,73	93,90	94,52	95,32	95,95
7	Persentase pelayanan drainase skala Kawasan/kota	%	46,14	46,59	22,54	69,04	69,21
8	Persentase desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	%	n.a	n.a	100	100	100
9	Prosentase Gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	n.a	63.10	86.82	86.82	86,82

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2024

Meski fluktuatif tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum cukup baik dan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ketahun.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan

Penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Gambaran capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.75
Gambaran Urusan Perumahan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase	%	n.a	98,71	98,99	98,99	99,12

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	perumahan dan permukiman layak huni						
2	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,67	8,12	6,5	5,25	4,50
3	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	90,19	92,38	82,68	88,11	94,39
3	Persentase Rumah Layak Huni	%	88,38	90,24	91,15	94,75	95,50
4	Persentase Kawasan kumuh perkotaan	%	11,93	7,09	5,55	4,86	4,86
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n,a	100	100	100	100
6	Prosentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh fasilitas rumah layak huni	%	n,a	100	100	100	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan realisasi capaian kinerja sampai Tahun 2023, yang menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) mengalami penurunan sebesar 4,50% atau secara jumlah sebanyak 9.828 unit rumah tidak layak huni. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Temanggung dengan stakeholder terkait meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH serta melakukan pendataan lebih intensif dengan pihak terkait untuk keakuratan data jumlah rumah di Kabupaten Temanggung meliputi rumah layak huni dan tidak layak huni.

Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak selama 5 (lima) tahun meningkat 186.290 yang sejalan dengan pertambahan jumlah rumah tangga menjadi 225.325 unit. Keberhasilan jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak didukung oleh program nasional 100-0-100.

Persentase rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan, sampai dengan Tahun 2023 jumlah rumah layak huni sebanyak 208.691 unit

dari 218.519 unit rumah di Kabupaten Temanggung atau secara persentase sebesar 95,50%. Kegiatan penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni pada Tahun 2023 dilaksanakan dari berbagai sumber dana dengan jumlah 1.593 unit yang terdiri dari BSPS 808 unit, bankeupemdes 677 unit, Basnas 4 unit, Ruspun 24 unit dan APBD 80 unit.

Luasan kawasan kumuh perkotaan mengalami penurunan sehingga capaian sampai dengan Tahun 2023 dapat diketahui sebesar 121,41 Ha atau secara persentase 4,86% dengan pengurangan luasan kumuh yang dilaksanakan pada Tahun 2022 seluas 17,114 Ha.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian target sasaran Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, program-program dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh Satpol PP dan Damkar dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 8 (delapan) indikator program.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh BPBD dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 9 (sembilan) indikator program. Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Rasa Aman	angka	4,23	4,36	4,48	4,55	4,55
2	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	100	100
3	Rasio Linmas per RT	rasio	1,38	1,38	1,42	1,42	1,6
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	n.a	n.a	100	100	100
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	42,86	55,56	76,67	60,00	49
7	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Angka	n.a	n.a	310	468	545

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
8	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	35,9	35,19	32,14	80,00	96,36
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	42,5	55,5	47,72	43,75	38,93
10	Indeks Resiko Bencana	Angka	144,51	214,81	251,07	174,59	236,83
11	Cakupan desa tangguh bencana	%	10,47	6,67	7,04	11,98	11,98
13	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	90	100	100	100
15	Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100
16	Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	66,19	65,73	67,74	100	100
17	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100
18	Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100
19	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n.a	n.a	100	100	100
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n.a	n.a	100	100	100
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	n.a	n.a	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan kecuali capaian kinerja Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang turun dari angka 60% menjadi 49% pada Tahun 2023 dan capaian Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menurun menjadi 38,93% pada Tahun 2023. Meskipun terlihat mengalami penurunan kinerja akan tetapi dari jumlah kasus kebakaran yang tertangani di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika Tahun 2022 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani 15 menit adalah 21 dan jumlah jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK 35. Pada Tahun 2023 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani 15 menit adalah 44 dari 131 kasus kebakaran dan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK 90. Hal ini merupakan perhatian bagi

pemerintah daerah mengingat lokasi pos pemadam kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran. Sedangkan pada capaian Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menurun akan tetapi jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam dan penyelamat meningkat hingga 51 dari jumlah kejadian 131 dibanding tahun sebelumnya sebesar 28 dari jumlah kejadian 64.

Indikator kinerja cakupan penanganan bencana kebakaran mampu di pertahankan sampai dengan Tahun 2023 mengingat topologi Kabupaten Temanggung yang pegunungan dengan wilayah yang luas. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) merupakan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dimana dengan terbentuknya beberapa pos diharapkan dapat diberikan bantuan untuk penanggulangan bencana kebakaran dengan sesegera mungkin (tingkat Response Time 15 menit). Dalam 5 tahun terakhir kasus yang tertangani di WMK berfluktuatif . Meskipun demikian jumlah kasus kebakaran yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat dan kerjasama pemerintah daerah dalam meminimalisir kejadian kebakaran dilaksanakan dengan baik.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya, Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab. Selanjutnya, untuk pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati Tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan di Tahun 2018 penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati baru mencakup perda reklame dan Perda PGOT, Penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati penyelesaiannya melaksanakan sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (*preventif non yustisial*).

Tahun 2022 strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi Bupati agar setiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar Perda sehingga meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran, semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100 %). Selain penegakan Perda K4/reklame juga terdapat pelanggaran Perda PGOT yaitu anak punk yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Mayoritas anak punk tersebut berasal dari luar

Kabupaten Temanggung. Pada bulan februari 2021 tim Penegakan Perda Satpol PP berhasil menutup aktifitas galian C di desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung dan permasalahan sewa penggunaan lahan Pemda di perumahan Madureso Temanggung Tahun 2021. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Rawan Bencana	n.a	n.a	217	217	217
Total		n.a	n.a	n.a	217	217
2	Desa tangguh bencana	n.a	n.a	18	26	26
3	Pelatihan, simulasi, informasi	n.a	n.a	94	237	237
4	EWS	n.a	n.a	85	85	85
5	Plank evakuasi	n.a	n.a	45	46	46
Total		n.a	n.a	n.a	242	394
6	Kejadian Bencana alam	n.a	n.a	280	317	430
7	Kejadian Bencana Non Alam	n.a	n.a	0	0	0
Total		n.a	n.a	280	317	430
IRBI		n.a	n.a	251,07	174,59	236,83

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Indeks Resiko Bencana mulai diberlakukan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 setelah RPJMD perubahan. Target nilai IRBI Tahun 2023 adalah 192,08 dan sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai 236,83% dari target sehingga tercapai 100%. Namun terdapat perbedaan hasil perhitungan nilai IRBI dari sumber BNPB pada Tahun 2023 sebesar 236,83 dengan kelas risiko tinggi. Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yaitu dengan adanya peningkatan pembentukan Destana.

Dengan adanya program pembentukan Destana cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Capaian destana pada Tahun 2023 masih diangka 11,98% dikarenakan belum ada penambahan desa tangguh bencana dan telah melebihi target yang ditentukan yaitu 10,47%.

Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana pada Tahun 2023 mencapai angka 100%. Jika dilihat dari Tahun 2019 -2022 jumlah mitigasi bencana tiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini didukung partisipasi pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kemampuan TRC BPBD Kabupaten Temanggung. Pada Tahun 2023 capaian masih sama dengan

Tahun 2022 dikarekanakan pada Tahun 2023 belum ada penambahan mitigasi bencana di desa/daerah rawan bencana.

Kabupaten Temanggung memiliki beberapa jenis potensi bencana yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah antara lain banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dari beberapa jenis bencana tersebut, bencana banjir dan kekeringan memberikan dampak yang paling luas dibandingkan bencana lainnya.

Kajian risiko bencana akan disusun secara bertahap selama dua tahun yaitu 2023 dan 2024. Pada Tahun 2023 akan disusun Peta Risiko Bencana, sedangkan pada tahun 2024 akan disusun Kajian Risiko Bencana Kabupaten Temanggung.

6. **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial, Gambaran penanganan PMKS di Kabupaten Temanggung periode Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Sat.	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	47,31	84,12	116,70	64,30	65,29
2	Cakupan pemberdayaan PSKS perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kab/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	%	100	100	100	100	100
4	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
5	Persentase warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
6	Persentase warga lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
7	Persentase warga gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
8	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi pemerlu pelayanan sosial diluar panti	%	1,31	2,20	4,22	11,58	8.82
9	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	0	100	100	100

No	Indikator	Sat.	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
10	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	54	63	98,78	100	100
11	Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	78,44	91,11	100
12	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	n,a	n,a	63,72	100	100
13	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	46	83	100	61,70	65,29
14	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
15	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mampu melaksanakan kewajiban pelayanan dasar masyarakat dalam bidang sosial melalui penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditandai dengan capaian kinerja dalam penanganan masalah sosial yang telah memenuhi target. Selain itu Kabupaten Temanggung telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/000251 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 untuk menjamin perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

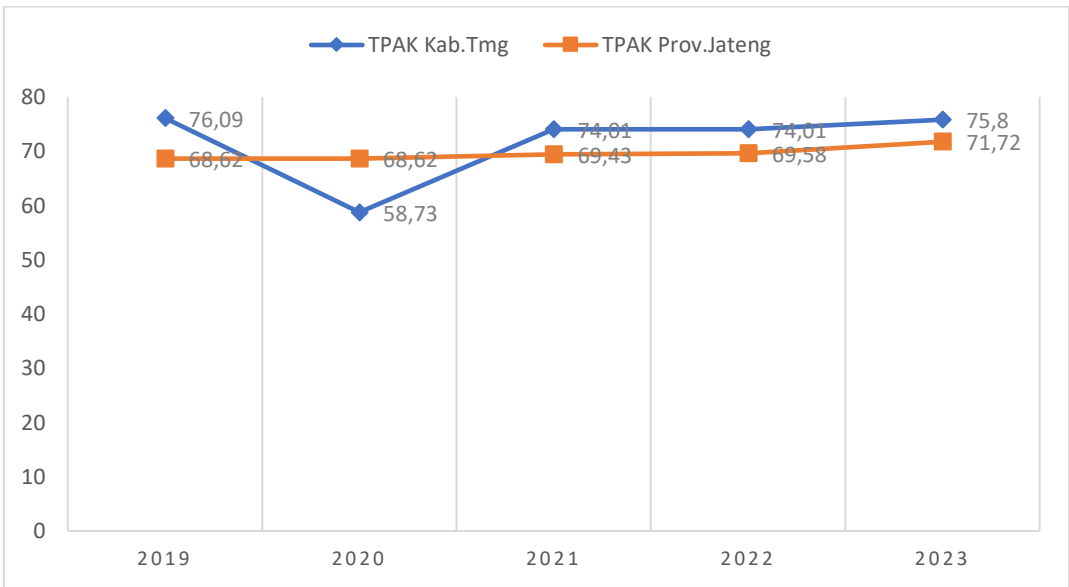
Pada indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Tahun 2023 mencapai angka 65,29%. Indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar terdapat peningkatan capaian dibandingkan Tahun 2022 yang awalnya 64,30% menjadi 65,28% pada Tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapat kenaikan jumlah DT PPFM sebesar 24,51% dibandingkan Tahun 2021. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid yang mempengaruhi berbagai sektor , salah satunya adalah sektor tenaga kerja. Dimana beberapa pabrik di kabupaten Temanggung menjadi gulung tikar. Selain kedua hal tersebut, capaian Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 8,82 %.

2.1.3.2 **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

1) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

TPAK tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.27

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Sepanjang 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 ke 2020 TPAK Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, hal ini tersebut dikarenakan adanya pandemi covid. Akan tetapi setelah Tahun 2021 TPAK Kabupaten Temanggung semakin meningkat hingga Tahun 2022. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,79%. Faktor yang mempengaruhi TPAK dari berkurang dan bertambahnya angkatan kerja, diantaranya yang beralih ke ibu rumah tangga, mendapat tambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa, dimana ibu rumah tangga dan mahasiswa merupakan usia kerja tetapi bukan angkatan kerja. Faktor pendorong dalam capaian indikator TPAK yaitu adanya keinginan masyarakat untuk bekerja di usia kerja. Sedangkan untuk faktor penghambat tidak tercapainya TPAK yaitu menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di

sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung. Upaya pencapaian target kinerja Tahun 2023 adalah meningkatkan wirausaha baru dengan meningkatkan kompetensi SDM.

2) Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pemerintah dalam memberikan pelatihan kerja terhadap animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	240	320	112	80	464
2	Jumlah pendaftar pelatihan	352	545	322	112	641
3	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	68,18	58,72	34,78	71,43	72,39

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun 2023 tercapai 72,39 % akan tetapi telah melebihi target Tahun 2023 yaitu 65 % sehingga capaian kinerjanya 100%. Faktor pendorong persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah meningkatnya jumlah pencari kerja di sektor non formal.

3) Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di titik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja, Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja, Kemudian diharapkan lulusan peserta pelatihan dapat membuka usaha sendiri ataupun bekerja. Persentase Peserta Pelatihan Menjadi Wirausaha Baru Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Persentase Peserta Pelatihan Menjadi Wirausaha Baru Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	240	320	112	80	140

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja	93	61	59	35	90
3	Persentase	38,75	19,06	52,68	43,75	64,29

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja pada Tahun 2023 mencapai angka sebesar 64,29%, naik sebesar 20,54% dari Tahun 2022 dengan capaian sebesar 43,75%. Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi di Kabupaten Temanggung di anggarakan dengan DBHCHT namun hanya ada 2 (jenis) pelatihan yaitu pelatihan digital marketing dan kuliner kreatif yang diikuti oleh 140 orang dan 90 orang diantaranya telah menjadi wirausaha baru.

4) Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Pencari kerja yang terdaftar difasilitasi penempatan dengan sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), Serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 terlihat fluktuatif, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dengan ketrampilan dan latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar. Daftar pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Daftar Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	2,357	602	1,749	773	679
2	Pencari Kerja terdaftar	3,406	1,088	2,242	1442	800
3	Persentase	69,2	55,33	78,01	53,61	84,88

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena besar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena ar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Pada Tahun 2023 persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 84,88% atau mengalami kenaikan sebesar 31,27%. Faktor pendorong dalam pencapaian target ini adalah adanya penguatan jejaring dengan HRD

Perusahaan retail untuk bersedia rekrutmen di Temanggung.

5) Persentase Tenaga Kerja formal

Tenaga kerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum. Persentase tenaga kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Persentase Tenaga Kerja Formal Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja formal	139.942	139.942	83.003	129.788	116.970
2	Jumlah tenaga kerja total	441.632	441.632	343.400	443.009	471.459
3	Persentase Tenaga Kerja Formal (%)	31,69	31,69	24,17	29,30	24,81

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2022 jumlah tenaga formal mengalami kenaikan dari 83.003 menjadi 129.788. Selain itu jumlah tenaga kerja total juga mengalami kenaikan dari 343.400 menjadi 443.009, sehingga mengakibatkan presentase tenaga kerja formal mengalami kenaikan menjadi 29,30%. Untuk Tahun 2023 persentase mengalami penurunan menjadi 24,81% karena terjadi penurunan pada jumlah tenaga kerja formal sebanyak 12.818 namun tenaga kerja total meningkat sebanyak 28.450. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja formal adalah memberikan pelatihan peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan kerja formal.

6) Persentase Perusahaan yang Telah Membayarkan Upah Sesuai UMK

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. UMK Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.027.569,32,-. Diharapkan semua perusahaan informal di Kabupaten Temanggung semuanya telah membayar tenaga kerjanya dengan upah yang besarnya memenuhi UMK Tahun 2023.

Tabel 2.83
Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan	397	397	119	119	114
2	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK	71	84	82	91	93
3	Persentase	17,88	21,16	68,91	76,47	81,58

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang membayar upah sesuai UMK meningkat sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Sejak Tahun 2019, Dinperinaker berupaya keras untuk mendapatkan data dengan mengadakan kunjungan langsung ke perusahaan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pada Tahun 2021 terdapat penurunan jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan yang dimaksud merupakan perusahaan terkecuali mikro dan kecil sehingga dihasilkan data sebanyak 119. Dari 119 perusahaan sejumlah 91 perusahaan telah membayar upah sesuai UMK. Perhitungan tersebut menerapkan PP No.36 Tahun 2021 pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa : Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 35, dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Pada Tahun 2023 perusahaan yang membayar upah sesuai UMK meningkat menjadi 93 perusahaan namun jumlah perusahaan di Kabupaten Temanggung menjadi 114 perusahaan dikarenakan adanya Perusahaan yang telah berhenti beroperasi sehingga presentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK sebesar 81,58%.

7) Persentase Perusahaan Yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial

Sarana hubungan industrial yang dihitung adalah (a) Perjanjian kerja bersama/perjanjian kerja yang berpedoman pada peraturan perusahaan bagi perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja; (b) Serikat Pekerja; (c) LKS Bipartit; dan (d) Kepesertaan BPJS. Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 2.84
Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan	397	397	119	119	114
2	Jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	15	15	18	66	81
3	Persentase	3,78	3,78	15,13	55,46	71,05

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2023 jumlah perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial sebanyak 81 perusahaan dengan persentase sebesar 71,05% lebih banyak jika dibandingkan Tahun 2022 yaitu 66 perusahaan dengan persentasi 55,46% mengalami peningkatan sebesar 15,59%.

8) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Perselisihan hubungan industrial yang dimediasi adalah perselisihan

hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara berjenjang.

Namun demikian Disnaker Kabupaten Temanggung hanya dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai pada tahap mediasi dengan Perjanjian Bersama. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2019-2023 fluktuatif mengikuti jumlah perselisihan yang terjadi tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus yang dicatatkan	3	14	17	14	20
2	Jumlah kasus yang terselesaikan dengan PB	2	13	14	15	20
3	Persentase	66,67	92,86	82,35	93,33	100,00

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat penyelesaiannya naik. Kemudian pada Tahun 2021 ada 17 kasus yang masuk dengan 14 kasus berhasil diselesaikan dengan PB. Untuk Tahun 2022 ada 15 kasus yang masuk dengan 14 kasus yang telah diselesaikan. Namun pada tahun 2023 terdapat 20 (dua puluh) kasus perselisihan yang tercatat dan seluruh kasus telah berhasil diselesaikan dengan PB. Dengan demikian presentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama pada Tahun 2023 sebesar 100%.

9) Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Berkembang

Peningkatan produktivitas kewirausahaan dilakukan dengan kegiatan pelatihan skill personal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dari wirausaha rintisan menjadi berkembang. Presentase Peserta Pelatihan Produktivitas Kewirausahaan yang Meningkat Produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Presentase Peserta Pelatihan Produktivitas Kewirausahaan yang Meningkat Produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas)	5	5	27	25	95
2	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	25	25	50	48	140

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase	20,00	20,00	54,00	52,08	67,86

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pelatihan produktivitas bagi wirausaha baru pada Tahun 2021 berjumlah 50 orang, dari jumlah tersebut 27 orang peserta diantaranya telah meningkat produktivitasnya. Tahun 2022 berjumlah 48 orang, 25 orang telah meningkat produktivitasnya. Tahun 2023 persentase peserta pelatihan produktivitas kewirausahaan mengalami peningkatan menjadi 67,86% dengan diikuti oleh 140 peserta pelatihan dan 95 peserta diantaranya yang meningkat produktivitasnya.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,10	95,31	95,74	95,71	95,99

Sumber: DPPPAPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Capaian kinerja IPG dari Tahun 2019-2023 mengalami kenaikan berdasarkan data dari Kementrian PP dan PA Tahun 2023 capaian IPG Kabupaten Temanggung sebesar 95,99 atau terdapat peningkatan capaian sebesar 0,28 dibandingkan dengan Tahun 2022.

2) Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menyesuaikan kebutuhan pemulihan dari bentuk kekerasan yang mereka alami. Presentase perempuan dan anak korban kekerasan Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.88

Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	48	42	11	22	13
2	Jumlah perempuan dan Anak	551,996	509,853	506,308	516,213	514,578
3	Persentase	0,0094	0,008	0,002	0,0043	0,0025

Sumber: DPPAPKKB Kabupaten Temanggung, Polres Temanggung, 2024

Pada tahun 2023 ada 13 kasus yang melapor atau 0,0025 dari jumlah perempuan dan anak sebanyak 514.578. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2023 tercapai 100% dari target 0,004. Adapun kasus tersebut diantaranya adalah kasus KDRT sebanyak 3 kasus, perbuatan tidak menyenangkan terdapat 3 kasus, pemerkosaan terdapat 2 kasus, penelantaran terdapat 1 kasus, pelecehan seksual terdapat 3 kasus, dan kekerasan fisik terdapat 2 kasus.

3) Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah. Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	3.711	3.536	3.349	5.026	5.313
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	196.675	174.643	187.543	185.816	219.154
3	Persentase (%)	1,89	2,02	1,79	2,70	2,42

Sumber : DPPAPKKB Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Temanggung kurun waktu Tahun 2020-2023 fluktuatif, capaian terkecil pada Tahun 2021 dengan persentase 1,79%, dan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan pada Tahun 2022, dan mengalami penurunan Kembali di Tahun 2023 menjadi 2,42%. Hal ini disebabkan karena partisipasi Perempuan dalam Lembaga pemerintah dipengaruhi oleh seleksi dan banyaknya pegawai Perempuan yang purna tugas.

4) Rasio Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD

Dengan mengintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah/statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan.

Tabel 2.90
Rasio PD yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	20	21	38	46	46
2	Jumlah PD	46	46	46	46	46
3	Persentase (%)	43,48	45,65	82,61	100,00	100,00

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Capaian pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 terkait dengan rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsive gender telah mencapai 100%. Faktor pendorongnya adalah adanya bimbingan teknis yang mendorong Perangkat Daerah untuk menyusun ARG.

5) Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang melapor dan ditangani	16	24	5	3	5
2	Jumlah anak perempuan	111.545	113.700	114.319	107.733	105.447
3	Persentase	0,014	0,021	0,004	0,003	0,005

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kekerasan terhadap anak perempuan terus menurun dari Tahun 2019-2022, sedangkan di Tahun 2023 mengalami peningkatan kasus.

Adapun kasus yang menimpa perempuan dan anak perempuan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebesar 5 kasus. Hal ini

dilatarbelakangi oleh keterbatasan dan kemampuan pemdampingan petugas.

6) Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan gerakan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan bersama-sama. Yakni, antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa sayang ibu dan bayi	82	82	91	115	289
2	Jumlah desa	266	266	289	289	289
3	Persentase	30,83	30,83	31,49	39,79	100,00

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tahun 2019-2023 capaian kinerja terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2023 jumlah GSIB di Temanggung sebanyak 289 desa/kelurahan atau tercapoai 100% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak di Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI, diantaranya adalah dengan integrasi kegiatan yang ada ditingkat desa, yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD/Forum.

7) Persentase Terbentuknya Kecamatan Layak Anak

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga.
 2. Pengasuhan alternatif.
 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.
 5. Perlindungan khusus.
- Persentase terbentuknya Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Persentase terbentuknya Kecamatan Layak Anak Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	8	12	16	16	16
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20
3	Persentase	40	60	80	80	80

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase kecamatan dan kelurahan layak anak semakin meningkat dan sudah mencapai 80%. Hingga tahun 2023 hanya 4 kecamatan yang belum berpredikat kecamatan layak anak yaitu Kecamatan Tretep, Wonobojo, Kledung, Bejen. Kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator desa/kelurahan layak anak. Dengan adanya indikator tersebut akan kita temukan beberapa hambatan dan masalah yang pada dasarnya merupakan temuan yang harus di selesaikan.

8) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	196,675	174,643	174,643	190,121	202.533
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	296,141	307,055	307,055	304,068	253.372
Persentase		66,41	56,87	56,87	62,52	79,93

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung mengalami kondisi yang fluktuatif. Berdasarkan angka capaian kinerja pada Tahun 2020 dan 2021 capaiannya sama yaitu 56,87%. Namun pada Tahun 2022 dan 2023 capaian kinerja partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan capaian

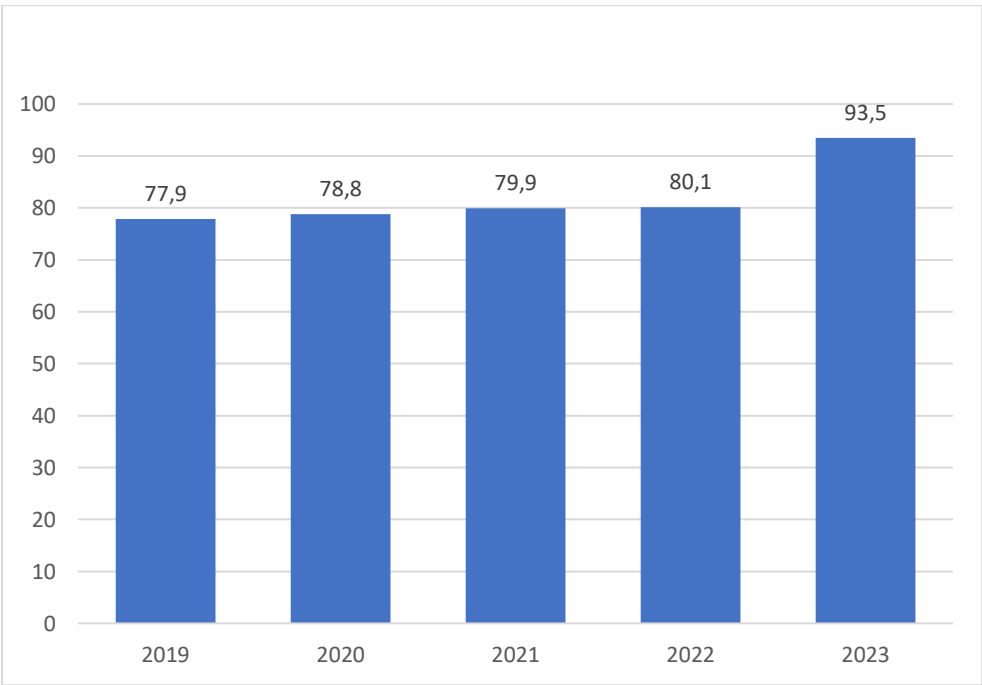
yaitu menjadi 79,93%.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1) Skor Pola Pangan Harapan

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Realisasi Skor PPH di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019-2023 tersaji pada gambar berikut ini.



Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.26
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas, skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2018 skor PPH menurun dari tahun 2017 karena perubahan metode penghitungan. Tahun 2018-2023 mengalami peningkatan dari 72,8 menjadi 93,5. Capaian Tahun 2023 naik menjadi 93,5 atau sudah tercapai 100% dari target 78,3. Peningkatan ketersediaan pangan untuk menutupi defisit konsumsi pada dasarnya dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dalam negeri (intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi maupun rehabilitasi) dan impor. Pengembangan komoditas sayuran dan buah hendaknya diarahkan pada pola jenis buah dan sayuran yang berbasis sumberdaya lokal seperti pisang, jeruk, pepaya serta sayuran

hijau dan kacang-kacangan serta kelompok sayuran yang relatif tidak tergantung musim, mudah dibudidayakan dan daya terima masyarakat cukup tinggi terhadap komoditas tersebut. Berikut ini gambaran Bidang Pangan di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel beriku.

Tabel 2.95
Gambaran Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio ketersediaan pangan	%	na	na	147,06	122,54	133,42
2	Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	na	17,3	28,03	32,53	27,68
3	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	na	17,3	56,0	58	58
4	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	na	na	100	100	100

Sumber: DKPPP Temanggung, 2024

Rasio ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi bersih beras serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai Tahun 2023 rasio ketersediaan pangan telah tercapai 100%.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel bahan pangan segar asal tumbuhan dan semua sampel yang diujikan selama Tahun 2019-2023 dengan status aman.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga dan untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan pangan strategis adalah dengan adanya Gerakan Pangan Murah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Pertanahan Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023 disajikan tabel berikut.

Tabel 2.96
Gambaran Urusan Pertanahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui mulai tahun 2019 sampai dengan tahun

2023 capaian indikator program persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan dapat terealisasi 100%, Tahun 2023 sebanyak 18 (delapan belas) permasalahan pertanahan telah terfasilitasi 100%. Faktor pendorong capaian indikator ini adanya koordinasi yang baik antar instansi Perangkat Daerah untuk menghindari konflik sosial pertanahan dengan memfasilitasi penyelesaian pertanahan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup terukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan komponennya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Klasifikasi dan rentang nilai IKLH disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Klasifikasi Dan Rentang Nilai IKLH

Klasifikasi	Rentang Nilai
Sangat Baik	90 -100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber: Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020-2024 KLHK

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan perhitungan rumus lama dan baru disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	IKLH	69,65	65,61	69,51	69,86	74,83
1	IKU	81,96	83,65	80,89	83,82	85,10
2	IKA	51,11	41,11	54,45	52,22	64,07
3	IKL	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
	Perhitungan rumus lama	Perhitungan rumus baru				
	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$				

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Sedangkan IKLH Kabupaten Temanggung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.99
IKLH Kabupaten Temanggung dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Tahun	Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
1	2019	789,508	870,65	81,96	51,11	74,33	69,65
2	2020	794,055	870,65	83,65	41,11	74,33	65,61
3	2021	762,980	870,65	80,89	54,45	74,33	69,51
4	2022	801,267	870,65	83,82	52,22	74,33	69,86
5	2023	799.764	870,65	85,10	64,07	74,33	74,83

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Terdapat beberapa nilai IKLH tahun 2023 apabila di bandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya merupakan capaian tertinggi. Hal ini dipengaruhi karena adanya peningkatan kualitas air maupun udara di Kabupaten Temanggung, akan tetapi masih terdapat kendala atau hambatan diantaranya hasil uji kualitas air tidak bisa langsung diketahui, melalui Pengujian di Laboratorium terlebih dahulu hingga keluar sertifikat hasil uji.

Sedangkan capaian IKLH tahun 2023 berdasarkan Surat Setditjen PPKL Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 terdapat konversi dalam perhitungan IKLH. Sehingga terdapat perbedaan capaian terkait dengan IKLH dan komponen penyusunnya. Untuk nilai IKU berdasarkan hasil konversi yaitu sebesar 84,60, nilai IKA sebesar 73,77, nilai IKL sebesar 58,89, dan untuk capaian IKLH hasil konversi adalah sebesar 75,12.

Berikut ini adalah gambaran bidang lingkungan hidup Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.100
Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

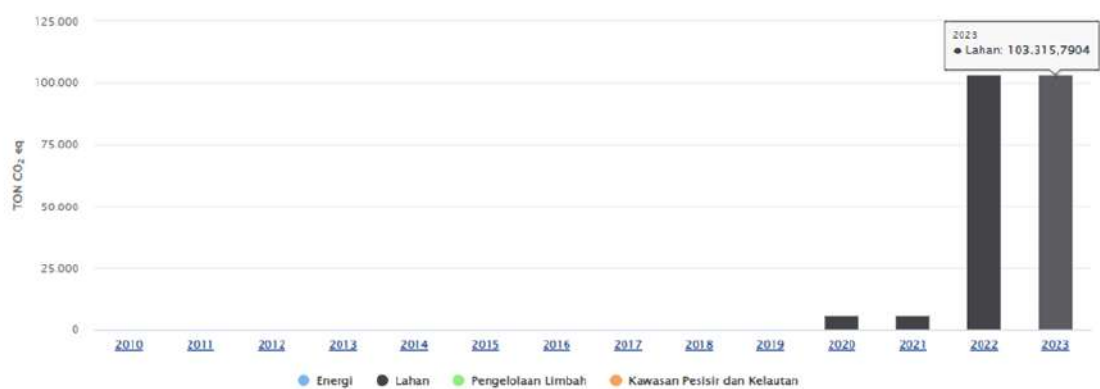
No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	61,4	31,36	100	100	100
2	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	na	na	0	100	100
3	Indeks Kualitas Air	Angka	51,1	41,11	54,5	52,22	64,07
4	Indeks Kualitas Udara	Angka	81,96	83,65	80,9	83,82	85,10
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,3	74,33	74,3	74,3	74,33
6	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,17	0,17	0,1	1,75	2,46
7	Cakupan RTH Publik	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
8	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	na	na	0	100	100
9	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	41,6	14,71	100	100	100
10	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	26,47	26,48	27,3	27,87	27,87
11	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	-	-	82,4	84,62	178
12	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
13	Persentase sampah yang tertangani	%	31,96	24,23	32,00	59,06	61,30
14	Cakupan layanan persampahan	%	47,06	45,33	53,63	61,25	68,51

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung telah menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2051 sejumlah 1 (satu) dokumen. Dokumen RPPLH merupakan upaya perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu mulai Tahun 2022 s.d Tahun 2052 di Kabupaten Temanggung. Faktor penghambatnya adalah dokumen RPPLH belum di Perda-kan sedangkan tindaklanjutnya adanya fasilitasi penyusunan Naskah Akademis RPPLH oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023.

Adapun dukungan dan kontribusi Kabupaten Temanggung dalam upaya pencapaian Pembangunan Rendah Karbon. Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data yang dilaporkan pada platform AKSARA dari periode 2010-2023 menunjukkan terdapat 4 total kegiatan aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 103.314,79 Ton CO2EQ. Total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi Kabupaten Temanggung 2010-2023 sebagai berikut.



Gambar 2.27
Total Pencapaian Penurunan Emisi dan Intensitas
Emis Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2023

Proporsi penurunan emisi bersih berdasarkan pelaporan Rencana Aksi Daerah dari semua sektor Pembangunan utama dibagi menjadi sektor energi, transportasi, hutan dan lahan, pertanian, pesisir laut, industry dan persampahan. Pada periode 2021 dan 2021 sektor yang memberikan kontribusi penurunan emisi di Kabupaten Temanggung didominasi oleh sektor pertanian.

Capaian persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup pada tahun 2023 sudah mencapai target, dari 1 usaha/kegiatan yang mengajukan persetujuan lingkungan sudah dapat dilakukan penilaian dan diterbitkan persetujuan, sehingga tercapai sebesar 100%. Target Jakstrada dan Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.101
Target Jakstrada dan Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pengelolaan Sampah (%)					
	a. Target	100	97	98	99	99
	b. Realisasi		24,32	32	59,06	61,30
2.	Pengurangan Sampah (%)					
	a. Target	20	22	24	26	27
		35,342,81	39,199,77	43,114,05	37,973,09	49.287,35
	b. Realisasi		0,09	10,03	27,73	30,06
			164,00	18,256,30	40,499,26	44.305,18
3.	Penanganan Sampah (%)					
	a. Target	80	75	7	73	72
		141,371,25	133,635,59	132,934,98	106,616,77	131.432,94
	b. Realisasi	31,96	24,23	21,97	31,33	31,24%
		154,74	44,003,97	40,112,11	45,764,61	46.030,71

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Mengacu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Sratategi Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada Penanganan Pengelolaan Sampah) yang mentargetkan pengelolaan sampah tahun 2023 sebesar 99% dari seluruh timbulan sampah yang terdiri dari persentase pengurangan dan penanganan, maka Tahun 2023 pengelolaan sampah baru mencapai 61,30%. Pengurangan sampah sebesar 44.305,18 ton atau 30,06% dari total timbulan sampah. Apabila dibandingkan dengan target Jakstrada, pengurangan sampah telah melebihi target yaitu 111,33%. Proporsi penurunan emisi bersih berdasarkan pelaporan Rencana Aksi Daerah dari semua sektor Pembangunan utama dibagi menjadi sektor energi, transportasi, hutan dan lahan, pertanian, pesisir laut, industry dan persampahan. Pada periode 2021 dan 2021 sektor yang memberikan kontribusi penurunan emisi di Kabupaten Temanggung didominasi oleh sektor pertanian. Selain itu dalam pengelolaan sampah didukung regulasi pengelolaan sampah berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 21 (dua puluh satu) desa. Jumlah desa dan kelurahan terlayani oleh Pemerintah Daerah sebanyak 142 desa/kelurahan atau bertambah satu desa jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan untuk desa/kelurahan yang terlayani oleh swasta/mandiri sebanyak 56 desa/kelurahan atau terdapat peningkatan sebanyak 20 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 198 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 68,51% dari total jumlah desa/kelurahan. Faktor pendorong cakupan pelayanan persampahan adalah adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan pihak swasta dan Pemerintah Desa/kelurahan dalam pelayanan persampahan dari hulu dan hilir tersedia sampai tingkat kecamatan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.2/298 Tahun 2020 tentang Fasilitator Persampahan Tingkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Temanggung Masa Bhakti 2020-2024 dan Dewan Persampahan di tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.2/38 Tahun 2020 tentang Dewan Persampahan Kabupaten Temanggung Masa Bhakti 2020-2024.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1) Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu:

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. KTP-el;
- c. Akta Kelahiran;
- d. Akta perkawinan;
- e. Akta Kematian;
- f. Surat keterangan Pindah.

Dengan dasar diatas maka untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kartu Keluarga (KK)	n.a	n.a	83,88	85,28	85,97
2	KTP-el	n.a	n.a	84,12	83,60	85,29
3	Akta Kelahiran	n.a	n.a	83,22	85,14	86,14
4	Akta Perkawinan	n.a	n.a	83,52	83,33	85,59
5	Akta Kematian	n.a	n.a	84,78	85,13	86,60
6	Surat Keterangan Pindah	n.a	n.a	83,52	86,58	86,98
	Rata-Rata nilai IKM	n.a	n.a	83,84	84,84	86,095

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Dari data di atas nilai IKM baru dihitung mulai Tahun 2021, capaian kinerja dari Tahun 2022-2023 mengalami kenaikan. Kenaikan nilai IKM diantaranya pada pelayanan akta kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian.

2) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi

kependudukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.103
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	257,391	257,772	266,270	269,212	272.755
2	Jumlah KK	263,885	262,643	270,220	269,219	272.937
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)	97,54	98,15	98,53	99,99	99.93

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan kartu keluarga dari Tahun 2019-2023 terus meningkat. Jumlah kepemilikan KK s/d tahun 2023 adalah 272.755 dari jumlah Jumlah KK 272.937 jadi pada tahun 2023 terdapat 182 kartu keluarga yang belum dicetak.

3) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik

Wajib Kartu Identitas Anak (KIA) adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. Persentase Kepemilikan KIA bisa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia > 17tahun yang ber-KTP (jiwa)	589.079	499.679	597.354	600.882	614.258
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	591.955	594.852	599.276	605.188	615.343
	Persentase (%)	99,51	84	99,68	99,29	99,82

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Dari tabel diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP dari Tahun 2019-2023 naik sementara pada Tahun 2020 menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga untuk pelayanan perekaman KTP-el sempat berhenti. Pada tahun 2021 pelayanan sudah berangsur kembali normal sehingga presentase kepemilikan KTP-el pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus naik. Jumlah wajib KTP-el yang belum mempunyai KTP-el terbanyak berada di Kecamatan Kedu yaitu 111 jiwa.

4) Persentase kepemilikan KIA

Wajib Kartu Identitas Anak (KIA) adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. Persentase Kepemilikan KIA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.105
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	117,231	132,497	179,382	100,409	165.059
2	Jumlah wajib KIA	221,911	232,772	252,351	201,731	196.309
	Persentase Kepemilikan KIA	52,83	56,92	65,02	49,77	84.08

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kepemilikan KIA dari tahun 2019-2023 naik. Capaian KIA di Tahun 2023 sebesar 84,21 %. untuk meningkatkan kepemilikan KIA Dinas terus mengembangkan Inovasi pelayanan yang sudah ada diantaranya melalui Jemput Bola Pelayanan KIA ke Koordinator Wilayah Dindikpora dan PPAI kabupaten Temanggung, inovasi pelayanan BUNDAKU (ibu melahirkan dapat akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) baru. Di Kabupaten Temanggung jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 31.250 anak atau sebanyak 15,92%.

5) Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Surat Keterangan Penduduk Pindah dan Datang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana Dindikcapil untuk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya guna masuk menjadi penduduk di Kabupaten Temanggung dan pindah ke luar Kabupaten/Provinsi. Batasan waktu pelayanan surat pindah datang tepat waktu yaitu 7 hari, Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.106
Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu di Kabupaten
Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	9,176	13,494	18,722	15,325	16.604
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	9,176	13,494	18,722	15,325	16.604
	Persentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa presentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu tercapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat Waktu yaitu satu hari jadi sesuai Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/85 Tahun 2022 tentang Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

6) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Capaian kinerja pada Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.107
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepemilikan Akta Kelahiran	530.737	551.910	556.084	590.887	632.245
2	Jumlah penduduk	791.264	795.556	800.429	801.267	811.615
	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran	67,07	69,37	70,02	73,74	77,90

Sumber : Kepemilikan dokumen tahun 2023 PDAK-Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta kelahiran naik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran serta perubahan regulasi pemerintah pusat yang mempermudah beberapa syarat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kepemilikan akta kelahiran terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah jiwa pada Tahun 2023 yang belum memiliki akta kelahiran adalah sebanyak 179.370 jiwa.

7) Persentase Penerbitan Akta Kematian

Capaian persentase penerbitan akta kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penerbitan akta kematian	8.666	5.023	8.194	5.676	7.955
2	Jumlah pemohon akta kematian	8.666	5.023	8.194	5.676	7.955
3	Persentase penerbitan akta kematian	100	100	100	100	100

Sumber : PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2024

Pada Tahun 2021 penerbitan Akta Kematian meningkat karena adanya semua kasus kematian yang disebabkan oleh covid-19 di catatkan kematiannya di Dindukcapil. Sedangkan untuk Tahun 2022 jumlah pendaftar akta kematian lebih turun. Data pendaftar akta kematian tahun

2023 adalah 7.955 kematian.

8) Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu adalah 3 hari. Semua permohonan pencatatan perkawinan telah diterbitkan akta perkawinannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	133	151	200	137	126
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	133	151	200	137	126
	Cakupan pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100	100	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari daftar tabel di atas dapat dilihat bahwa permohonan akta perkawinan yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perkawinannya dan tidak ada permohonan pencatatan perkawinan yang tidak diterbitkan akta perkawinannya.

9) Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu adalah 4 hari. Perceraian yang dicatat hanya bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama. Hingga saat ini tidak ada permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraianya sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	32	40	42	24	28

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	32	40	42	24	28
	Presentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100	100	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

10) Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan, Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang berhak menerima hak akses data kependudukan yaitu lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan badan. Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.111
Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	21	21	26	26	26
2	Jumlah per angkat daerah pengguna data kependudukan	21	21	31	30	30
	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100	100	83,87	86,67	86,67

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 terdapat 26 OPD dan BHI yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 30 OPD dan BHI di Kabupaten Temanggung.

11) Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah inisiatif terobosan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan membahagiakan masyarakat. Capaian inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,	Jumlah inovasi layanan	20	29	19	20	23
2	Jenis Layanan	31	31	24	24	24
	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	64,52	93,55	79,16	83,33	83.33

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 060/047/2021 tanggal 7 Juni 2021 terdapat 24 jenis pelayanan dengan jumlah inovasi di Tahun 2023 sebanyak 23 inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penambahan Inovasi pelayanan yang di laksanakan Dinas Dukcapil pada Tahun 2023 adalah Pelayanan Kecamatan Penyangga yaitu pelayanan adminduk di tiga Kecamatan yang ditunjuk sebagai kecamatan penyangga yaitu Kecamatan Parakan, Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Kandangan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

Klasifikasi status desa berdasarkan rentang nilai pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.113

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Status Desa	Rentang Nilai
Mandiri	IDM> 0,8155
Maju	0,7072 <IDM< 0,8155
Berkembang	0,5989<IDM< 0,7072
Tertinggal	0,4907<IDM< 0,5989
Sangat tertinggal	IDM< 0,4907

Sumber : Kementrian Desa PDTT Tahun 2020

Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 didajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.114

Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata nilai IDM	0,67	0,68	0,69	0,72	0,74

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan capaian dari angka Tahun 2021, sehingga predikat desa berkembang menjadi desa maju pada Tahun 2022. Sedangkan untuk capaian rata-rata IDM tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,74%. Kenaikan rata-rata IDM Kabupaten Temanggung disebabkan karena kenaikan indeks komposit sosial pada indikator akses pendidikan PAUD dan penyelenggaraan pendidikan non formal serta indeks komposit lingkungan pada indikator pencegahan pencemaran air, tanah dan udara, pada indikator potensi rawan bencana melalui kegiatan

penyediaan mitigasi dan penanggulangan bencana.

2) Persentase Desa yang Berpredikat Mandiri

Persentase desa yang berpredikat Mandiri/Maju di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel pada berikut.

Tabel 2.115
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Mandiri	0	10	15	26	55
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	0	3,76	5,64	9,77	20,68

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Terdapat peningkatan yang signifikan desa dengan status mandiri dari yang semula Tahun 2022 sebanyak 26 desa menjadi 55 desa atau sebesar 20,68% di Tahun 2023. Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3) Persentase Desa yang Berklasifikasi Swasembada

Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional. Persentase Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Persentase Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa/Kelurahan	58	58	81	81	111
Jumlah Desa/Kelurahan	289	266	266	266	266
Persentase	20,07	21,80	30,45	30,45	41,73

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan terkait desa yang berklasifikasi swasembada. Capaian pada Tahun 2023 sudah tercapai sebesar 41,73% atau sebanyak 111 desa. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya Permendagri nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk peningkatan desa/kelurahan swasembada di Temanggung yaitu melakukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri.

4) Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

Berikut ini capaian persentase desa cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.117
Persentase Desa Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Cepat Berkembang	58	40	95	116	116
Jumlah Desa dan kelurahan	289	266	266	266	266
Persentase	20,06	15,03	35,71	43,61	43,61

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase desa yang cepat berkembang di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 masih sama dengan capaian Tahun 2022. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan desa cepat berkembang sejumlah 116 desa dan desa berkembang ada 150.

5) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kemlompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Persentase Desa yang Menyelesaikan Penyusunan RPKDesa Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Persentase Desa yang Menyelesaikan Penyusunan RPKDesa Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	117	205	256	266	256
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	43,98	77,07	96,24	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan

mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2019-2023, capaian Tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100% atau sebanyak 266 desa telah menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya Adanya Perbup Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

- 6) Persentase Jumlah Desa Yang Menyelesaikan Penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan APBDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.119
Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan APBDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	228	224	266	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	85,71	84,21	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai 100%, dikarekan adanya Permendagri nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

- 7) Persentase Desa yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Sesuai Aturan

Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes berbasis aplikasi ini dilaksanakan di 266 desa se-Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.120
Persentase Desa yang Menerapkan Siskeudes Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	266	266	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase desa yang menerapkan siskeudes mulai tahun 2019-2023

sudah mencapai 100%, hal tersebut didukung dengan adanya pengadaan server dan aplikasi yang sudah digunakan untuk mendukung penerapan pengelolaan keuangan desa secara *online*. Selain itu, desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, personil desa/kaur keuangan yang terampil IT, kesesuai kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keaungan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.

8) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Persentase Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDesa tepat waktu Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.121
Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan APBDes tepat waktu	266	266	256	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	100	100	96,24	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes mencapai 100%. Hal ini didukung dengan adanya Perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa.

9) Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu

Pemerintah desa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota, Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu Tahun 2019-2023 disajikan

pada tabel berikut.

Tabel 2.122
Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah desa yang tertib administrasi	234	264	266	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	87,97	86,84	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Capaian kinerja pada laporan administrasi desa yang tepat waktu pada Tahun 2019-2023 semakin meningkat. Capaian pada Tahun 2023 100 %.

10)Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi. Jumlah aparatur desa yang disiplin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.123
Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	36	18	0	0	0
jumlah kepala desa dan perangkat desa	266	266	266	266	266
Persentase	13,53	6,77	0	0	0

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Tingkat disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa meningkat dari Tahun 2019-2020 dan mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat. Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa Tahun 2023 menunjukkan tidak ada Kepala Desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin yang dikasuskan sampai ke ranah hukum.

11)Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Aset

Pengertian aset desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 11 yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Aset Desa Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.124
Persentase Desa yang Tertib Mengelola Aset Desa Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah desa yang tertib mengelola asset	191	212	264	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	71,80	79,69	99,24	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas pada Tahun 2023 sudah ada laporan in put aplikasi SIPADES secara *online*, dalam pengelolaan asset semua pengelola memahami alur tentang pencatatan, ketidaklancaran dalam pembuatan laporan akhir tahun dan laporan asset rutin dilakukan tiap bulan, hal itu karena telah dilakukan upaya adanya pendampingan dan sosialisasi pada saat in put aplikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset dan pelaporannya

12)Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif

LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat, LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP, PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kriteria LKD yang aktif adalah:

- Kepengurusan (SK Kepala Desa);
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel);
- Ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes).

Capaian kinerja persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.125
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif Tahun 2019-2023

No	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah LKD aktif			8,639	8,639	8,639
	Rukun Tetangga (RT)	5,178	5,201	5,201	5,201	5,201
	Rukun Warga (RW)	1,348	1,350	1,350	1,350	1,350
	TP, PKK	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289
	Posyandu	289	578	1489	1489	1489
2	Jumlah LKD			8,639	8,639	8,639
	Rukun Tetangga (RT)	5,178	5,201	5,201	5,201	5,201
	Rukun Warga (RW)	1,348	1,350	1,350	1,350	1,350
	TP, PKK	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289

No	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	2019	2020	2021	2022	2023
	Posyandu	289	578	1489	1489	1489
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

13)Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif

Berikut merupakan pemeringkatan Badan Usahan Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama:

Tabel 2.126
Peringkat (Ranking) BUMDesa

Status Desa	Jumlah Skor
Maju	>= 85 - 100
Berkembang	>= 70 -85
Pemula	>= 55 - 70
Perintis	<55

Sumber: Kepmendes Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Formula Pemeringkatan BUMDesa/ BUMDesma

Capaian kinerja persentase BUMDesa yang aktif Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.127
Persentase BUMDesa yang Aktif Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2028
Jumlah BUMDesa yang aktif	163	163	227	257	258
Jumlah BUMDesa	266	266	266	266	266
Persentase BUMDesa yang aktif	61,28	61,28	85,34	96,62	96,99

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase BUMDesa yang aktif pada Tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Namun, di Kabupaten Temanggung pemeringkatan BUMDes masih didasarkan pada BUMDesa yang aktif, pada Tahun 2023 dengan klasifikasi tingkat dasar ada 82 desa, tingat tumbuh 153 desa, tingkat Berkembang 20 desa dan Tingkat Maju 3 desa. Hal ini didukung dengan adanya Perda nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, dan adanya Forum BUMDesa.

14)Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif

Lembaga ekonomi masyarakat desa terdiri dari UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa dan CPPD seluruhnya aktif karena selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi setiap tahunnya. Capaian Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.128					
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif Tahun 2019-2023					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif	118	118	118	118	118
- UP2K-PKK	30	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29
Jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa	118	118	118	118	118
- UP2K-PKK	30	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa dan CPPD seluruhnya aktif karena selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.

15)Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan

Pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.129					
Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan Tahun 2019-2023					
URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kawasan yang dikembangkan	1	1	1	1	1
Jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Perbup	1	1	1	1	1
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Upaya pemberdayaan berupa fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan perdesaan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2019-2023. Arah pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan pada tahun Tahun 2021 berfokus di Kecamatan Bansari dengan konsep pengembangan Eduwisata Bansari. Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, serta adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama, Sedangkan pada Tahun 2022 pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Eduwisata Pertanian di Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 desa yaitu Desa Ngropoh, Desa Purwosari, Desa Kramat, Desa Sanggrahan, dan Desa Pendowo. Pada Tahun 2023 jumlah pemberdayaan kawasan masih melanjutkan Tahun 2022 yaitu Kawasan Kranggan.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Temanggung periode 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.130
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,98	0,98	0,54	0,54
2	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	%	11,44	13,76	12,99	11,47	8,60
4	Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	1,52	2,16	1,02	2,45	1,02
5	Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	%	29,43	21,32	9,80	6,67	14,10
6	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	83,03	82,61	75,29	76,58	80,14
7	Persentase kepesertaan KB aktif	%	77,50	74,71	75,29	76,58	80,14
8	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	48,02	45,38	45,21	45,03	45,77
9	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	29,82	33,85	33,85	33,85	51,94
10	Indek Pembangunan Keluarga	%	0,00	0,00	55,97	55,97	58,19

Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan serta Surat Mendagri Nomor 470/3376/SJ dan 470/3375/SJ tanggal 5 Juni 2020 untuk menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) pada Tahun 2023 sudah melakukan penyusunan dokumen GDPK.

Pelaksanaan GDPK tercantum dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana, Pelaksanaan GDPK diselenggarakan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikut sertakan peran masyarakat. Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim

koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

Indikator persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Temanggung belum mencapai target yang ditetapkan. PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP, dan MOW). Capaian peserta KB berdasar hasil laporan dari SIMANTAP KON KB sampai tahun 2023, tercapai 47.176 atau 45,77% dari peserta KB sebanyak 103.082 PUS. Penurunan tersebut disebabkan karena masih tingginya rumor kegagalan IUD di masyarakat, dukungan anggaran pencabutan implan rendah berakibat peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB lagi menjadi PUS *drop out*, masih rendahnya animo masyarakat tdalam pelayanan KB MOW dan MOP, peserta KB MKJP dari MOW dan MOP sudah banyak yang *drop out*, dan meningkatnya kemandirian menggunakan alat kontrasepsi suntik.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Gambaran urusan perhubungan di Kabupaten Temanggung periode 2019-2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.131							
Gambaran Urusan Perhubungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023							
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Presentase penurunan angka kecelakaan	%	0,30	5,79	1,62	1,64	1,67
2	Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	33,82	34,78	35,27	41,06	41,55
3	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	95,45	97,27	98,18	98,18	100
4	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	102,21	83,60	96,28	99,56	99,63
5	Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	25	25	25	50	50
6	Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	12,5	25	37,5	50	62,50
7	Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22
8	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
9	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	85,71	100	100	100	100
10	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100
11	Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%	31,68	31,69	31,69	32,08	32,49
12	Rasio ijin trayek	angka	0,0781	0,07783	0,07697	0,02336	0,07712
13	Jumlah uji KIR angkutan umum	angka	1466	1331	1.043	985	811
14	Jumlah terminal bus	angka	8	8	8	8	8
15	Persentase layanan angkutan darat	%	0,0205	0,0737	0,0956	0,0243	0,0193

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
16	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	100	100	100	100	100
17	Pemasangan rambu-rambu	%	62,75	64,55	66,09	66,17	66,69
18	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	angka	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06
19	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	jiwa	4.953.879	1.253.673	830.977	3.385.970	4.252.716
20	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	jiwa	6.345.857	1.997.427	1.453.391	4.381.964	6.120.310

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel tersebut urusan pemerintahan bidang perhubungan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian dalam bidang perhubungan diharapkan dapat menunjang Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai Misi ke 2 Kabupaten Temanggung yaitu Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.

Dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perhubungan secara bertahap mulai melengkapi data-data capaian dimaksud, dimana capaian hingga tahun 2021¹ antara lain:

- a. Rasio konektivitas transportasi Kabupaten Temanggung sebesar 80%;
- b. Rasio kejadian kecelakaan transportasi Kabupaten Temanggung sebesar 62%;
- c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 84%;
- d. *On time performance* layanan transportasi sebesar 78%; dan
- e. Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 68%.

Pada tahun 2023 tercatat sejumlah 294 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yaitu sebesar 1,67%. Adapun indikator menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dapat tercapai adanya faktor pendorong sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun faktor terhambatnya belum sinerginya para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang

¹ Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Tahun 2023 prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai mengalami peningkatan capaian yaitu sebesar 41,55%. Hal ini didorong dengan adanya kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2019 s.d. 2023 terdapat jumlah trayek di Kabupaten Temanggung dengan total trayek sebanyak 45 trayek sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2022 jumlah trayek yang terlayani angkutan umum sebanyak 45 trayek. Kondisi pada tahun 2023 ini jumlah trayek yang terlayani angkutan umum sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 45 trayek atau telah mencapai 100%.

Pada Tahun 2023 persentase penerangan jalan di Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 32,49%. Panjang jalan kabupaten sebagaimana surat keputusan Bupati Temanggung Nomer 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten total 650.476 Km atau 650.476.000 m. Dengan jarak ideal antar PJU adalah 50 m maka perkiraan total kebutuhan PJU pada ruas jalan kabupaten sebesar 13009,52 dengan jarak ideal 50 m.

Rasio Ijin Trayek sangat dipengaruhi oleh banyaknya Ijin Trayek yang dikeluarkan apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Penduduk, sehingga dari tabel diatas pada kurun Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi rasio ijin trayek. Jumlah ijin trayek akan bertambah ketika terdapat jalur – jalur trayek angkutan umum baru, yang terlayani oleh angkutan umum. Untuk Tahun 2023 terdapat pengurangan armada sebanyak 1 unit di trayek Temanggung-Kandangan-Malebo-Braman karena kendaraan menjadi plat hitam, sehingga besaran rasio trayek yaitu sebesar 0,07712.

Jumlah uji KIR angkutan umum cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2019 s.d. 2023, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya penurunan jumlah angkutan umum setiap tahunnya, mutasi keluar kendaraan, dan sebagian besar disebabkan pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji berkala serta balik nama truk umum (plat kuning) menjadi plat hitam. Namun, untuk persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan Temanggung berdasarkan kendaraan wajib uji aktif setiap tahunnya adalah 100%.

Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Ketersediaan anggaran untuk pengadaan rambu lalu lintas, mendorong peningkatan jumlah rambu lalu lintas yang dapat di pasang. Pada Tahun 2020-2022 jumlah pemasangan rambu lalu lintas meningkat hal ini disebabkan karena kegiatan pengadaan rambu lalu lintas tahun 2020-2022 telah dilaksanakan. Pada Tahun 2023 jumlah presentase Pemasangan rambu-rambu mengalami peningkatan sebanyak 66,69% karena bertambahnya Pemasangan rambu sebanyak 1.778.

Tren rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu 2019-2023 di Temanggung cenderung stabil. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan panjang jalan kabupaten yang konstan, begitu pula dengan jumlah armada angkutan umum yang cenderung lambat pertumbuhannya. Secara umum bahwa rata – rata setiap 1 Km Panjang Jalan Kabupaten dilalui oleh 1 Angkutan Umum. Akan tetapi dalam hal ini belum semua jaringan jalan kabupaten telah dilalui angkutan umum.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

1) Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.132
Nilai Indek Tingkat Kematangan SPBE

Nilai Indeks	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – < 4,2	Sangat baik
2,6 – < 3,5	Baik
1,8 – < 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,82	3,61	2,78	3,12	3,12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu

strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun 2023 masih menggunakan angka capaian Tahun 2022 yaitu sebesar 3,12. Hal ini dikarenakan nilai evaluasi SPBE Tahun 2023 baru dapat disajikan pada Triwulan I tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE.

2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.134
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80,03	95,5	89,56	88,33	97,25
2	Kategori	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai KIP Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Pada Tahun 2023 nilai KIP mengalami kenaikan mencapai 97,25% dengan kategori Menuju Informatif. Capaian tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di

Pemkab Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua stakeholder.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan SDM pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

3) Persentase PPID Badan Publik yang Aktif

Melalui PPID masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.135						
Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023						
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	38	45	50	62	80
2	Jumlah PPID badan publik	355	341	341	341	341
3	Persentase PPID badan publik yang aktif (%)	10,7	13,20	14,66	18,18	23,46

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif dari Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh keaktifan dari PPID utama Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pendampingan, pembinaan dan jemput bola kepada PPID pembantu. Pendampingan diwujudkan dengan monev rutin terkait kelengkapan kelembagaan dan data PPID pelaksana yang dilaksanakan tiap triwulan. Pembinaan dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola PPID Pelaksana, meliputi bimtek, workshop, dan pelatihan. Secara lebih rinci, keaktifan PPID.

Untuk mengetahui aktivitas penyebaran informasi PPID Pembantu, Dinkominfo Kabupaten Temanggung membuat aplikasi Simonev PPID yang dapat diakses pada alamat https://simonev.temanggungkab.go.id/frontend/detail_simonev.

Berdasarkan data Simonev PPID diketahui bahwa seluruh Perangkat Daerah telah melaporkan data dan kegiatannya kepada PPID Kabupaten Temanggung. Disamping melalui sistem aplikasi, Perangkat Daerah juga menyusun laporan PPID Pembantu kepada PPID Kabupaten Temanggung.

4) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Capaian Kinerja Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.136
Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	5	5	7	9	71
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	32	32	32	32	90
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	15,63	15,63	21,88	28,13	78,89

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dari Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada triwulan Tahun 2023 terdapat 90 KIM yang aktif karena ada pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat baru yang ada di Kabupaten Temanggung. Capaian indikator kinerja Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif adalah 78.89 % atau 100% dari target yang ditetapkan di Tahun 2023 sebesar 30%.

Faktor pendorong capaian indikator tersebut diantaranya adalah semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi. Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung secara berkala monitoring dan evaluasi serta membina dan mendampingi dalam meningkatkan kualitas materi yang diunggah di media social. Kelompok Informasi Masyarakat berperan aktif dalam menjalankan tugas sebagai kelompok yang mempunyai peran sebagai fasilitator, mitra Pemerintah Daerah juga sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, sebagai pelancar arus informasi serta sebagai terminal informasi bagi masyarakat desa, meskipun kegiatan tersebut belum semuanya terdokumentasi dengan rapi.

5) Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran

Persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%, artinya setiap ada pengaduan selalu dapat ditindaklanjuti. Persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Persentase Kepatuhan LPP Terhadap Norma Siaran Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang patuh	8	8	8	8	8
2	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	8	8	8	8	8
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%,

artinya setiap ada pengaduan selalu dapat ditindak lanjuti dan tidak ditemukan pelanggaran kode etik atau norma siaran.

Faktor pendorong ketercapaian indikator ini adalah pemahaman dan kepatuhan merata insan penyiaran terhadap P3 (Pedoman Program Siaran) dan SPS (Standar Program Siaran).

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal.

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinas Kominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Kominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat ringan terkait konten siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan

6) Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Ruang publik (area publik) adalah kawasan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Lokasi area publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo. Sampai dengan akhir tahun 2023 ini tercatat ada 60 area publik yang menjadi urusan Dinkominfo dalam pemenuhan kebutuhan akses internet. Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi jaringan internet publik dari Dinkominfo dengan kecepatan 2 mbps dedicated mulai Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet	41	44	44	48	60
2	Jumlah area publik	60	60	60	60	60
3	Persentase ketersediaan akses internet publik	68,3	73,33	73,33	80,00	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2023 semua area publik di Kabupaten Temanggung sudah terfasilitasi wifi publik. Dengan demikian target ketersediaan akses internet area publik di Tahun 2023 telah tercapai 100%. Faktor pendorong ketercapaian indikator tersebut terdiri atas faktor teknis dan non teknis. Secara teknis beberapa hal yang mendorong capaian indikator adalah ketercukupan *bandwidth* untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah sehingga secara beban *bandwidth* cenderung stabil dan tercukupi; tersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik seperti puskesmas seharusnya bisa menjadi salah satu pendukung tercapainya indikator ketersediaan akses internet publik. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui *landing page* / *login page* jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.

Adapun capaian persentase ketersediaan jaringan intranet dari Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.139

Persentase Ketersediaan Jaringan Intranet Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	OPD pengguna jaringan intranet	317	324	348	323	384
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	395	395	395	384	384
3	Ketersediaan jaringan intranet	80,25	82,03	88,10	84,11	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Ketersediaan jaringan intranet sejak Tahun 2019-2022 cenderung meningkat bahkan pada Tahun 2023 mencapai 100%, hal tersebut karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Server VPN sudah aktif sehingga semua klien baik yang secara fisik terhubung maupun tidak bisa menggunakan jaringan intra pemerintah daerah. Jumlah yang sudah terhubung secara fisik 325 sisanya menggunakan jaringan VPN (Virtual Private Network) berdasarkan permintaan sesuai kebutuhan.

Adapun faktor pendorong ketercapaian indikator ini adalah adanya Peraturan Daerah nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan jaringan intranet untuk proses bisnis Pemerintah Kabupaten Temanggung; telah tersedia repeater di beberapa lokasi yang dapat mendukung koneksi jaringan ke kantor-kantor pemerintah desa tersebut; dari sisi kemampuan dan occupancy kapasitas alat masih mencukupi untuk mengcover beban trafik internet maupun intranet kantor- kantor Pemerintah Desa tersebut; dan telah diaktifkan jaringan VPN (*Virtual Private Network*) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra

Pemanfaatan VPN (*Virtual Private Network*) menjadi pilihan terakhir untuk meng-cover kebutuhan jaringan intra bagi Kantor Pemerintah yang tidak terhubung secara langsung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten. Jika VPN telah efektif berlaku untuk kebutuhan jaringan tertutup, maka secara keseluruhan kantor Pemerintahan telah tersedia jaringan intranet.

7) Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Tingkat laporan Perangkat dari terintegrasi pada sistem informasi, yang merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Realisasi persentase sistem informasi yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.140
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	61	82	87	53	54
2	Jumlah sitem informasi	461	507	512	101	105
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	13,23	16,17	16,99	52,48	51,43

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase sistem informasi yang terintegrasi pada Tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mempetahankan capaian indikator kinerja ini adalah melakukan pembangunan jaringan

berbasis fiber optik untuk integrasi jaringan seluruh Perangkat Daerah acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Dalam hal perencanaan pembangunan, pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem *e-planning*. *E-planning* yang dibangun secara mandiri digunakan mulai Tahun 2019 untuk penyusunan RKPD Tahun 2020 dan 2021. Untuk penyusunan RKPD Tahun 2022 sampai sekarang menggunakan *e-planning* dari Kemendagri yang terintegrasi dalam SIPD RI. Penggunaan *e-planning* lebih bertujuan untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, dimulai dari dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Dalam proses perencanaan menggunakan SIPD RI, setiap sub kegiatan di *tagging* dengan prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program daerah mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional

Pada aspek pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menggunakan sistem *e-budgetting*. *E-budgetting* yang dibangun secara mandiri digunakan mulai Tahun 2019 untuk penyusunan APBD Tahun 2020 dan 2021. Untuk penyusunan APBD Tahun 2022 sampai sekarang menggunakan sistem *e-budgetting* dari Kemendagri yang terintegrasi dalam SIPD RI. Dalam sistem *e-budgetting* tersebut sudah terintegrasi dengan e-ASB yaitu standar yang digunakan untuk menentukan anggaran belanja daerah yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan. Penggunaan *e-budgetting* juga telah terkoneksi dengan *e-planning* dengan tujuan untuk lebih menjamin konsistensi program dan sub kegiatan dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran.

Selain *e-planning* dan *e-budgetting*, pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah menerapkan *e-procurement*. *E-procurement* adalah suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang bertujuan untuk menjamin transparansi, mudah diakses informasinya dan memberikan rasa keadilan dalam pelaksanaannya. Sedangkan sistem aplikasi yang digunakan adalah menggunakan website yang disediakan oleh LKPP yang terdiri dari SIRUP dan LPSE yang saling terkoneksi. SIRUP sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat rencana pengadaan barang dan jasa secara elektronik sedangkan LPSE merupakan sistem pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dengan penggunaan sistem SIRUP dan LPSE ini, semua kegiatan pengadaan barang dan jasa terpublikasikan

secara transparan mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaannya. Informasi APBD Kabupaten Temanggung dapat diakses secara online oleh semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, yaitu melalui menu PPID yang tersedia di semua perangkat daerah di Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Nasional untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menggunakan aplikasi lkpp.bigbox.co.id dalam melakukan pengadaan barang/Jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung. Untuk memaksimalkan upaya pemerintah daerah tersebut, maka dibuatlah Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dicantumkan dalam SK bupati Nomor 530/60 Tahun 2022 dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Temanggung.

Selain itu dalam monitoring realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan AMEL (Aplikasi Monitoring Realisasi Anggaran) melalui perspektif pelaksanaan pengadaan berbasis web, sehingga data lebih akurat dan *real time*, dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan serta pembayaran. Penggunaan AMEL diharapkan dapat mempercepat dan mengendalikan pelaksanaan anggaran melalui perspektif pengadaan.

Pada lingkup pengawasan P3DN, Inspektorat dalam hal ini dibantu oleh Inspektur Pembantu IV *me-review* atas *sampling* terhadap paket pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pengadaan Barang/Jasa.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di Kabupaten Temanggung didukung dengan aplikasi KRISNA SELARAS yang merupakan integrasi sistem dari tiga Kementrian yaitu Bappenas, Kemenkeu dan Kemenpan RB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja kegiatan yang bersumber dari DAK. Dalam proses perencanaan penentuan lokpri Kabupaten Temanggung memperhatikan prioritas nasional baik untuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dalam mengelola DAK dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan dan monitoring evaluasi (monev), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda melalui forum Sekretariat Bersama Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 051/000427 Tahun 2022 Tentang Sekretariat Bersama Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Verifikasi Usulan

Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Temanggung. Forum tersebut digunakan untuk melakukan koordinasi baik dari pengusulan hingga pelaporan DAK antara Bappeda dengan PD terkait.

Untuk memaksimalkan *output* dan *outcome* pendanaan DAK, Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan *matching program* dengan penggunaan dana melalui APBD yang dimasukkan dalam pendanaan Perangkat Daerah pengampu yang termuat dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) masing-masing kegiatan. Untuk pengelolaan yang akuntabel pelaksanaan DAK diselesaikan pada satu tahun anggaran dan berakhir pada 31 Desember. Capaian *Output* DAK Tahun 2024 mencapai 99,90% dengan realisasi anggaran 94,20%. Capaian *output* yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengelolaan DAK dengan efektif untuk mencapai target. Laporan *Immediate Outcome* (IO) DAK Tahun 2023 telah dilaporkan melalui surat Bupati Nomor P/452/050/21/VII/2024 yang juga diupload dalam aplikasi KRISNA SELARAS.

8) Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Sistem informasi yang berfungsi optimal adalah sistem informasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik secara sistem, pengelolaan, maupun penggunaannya. Capaian sistem informasi yang berfungsi optimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.141
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	185	265	267	72	82
2	Jumlah sistem informasi	461	507	512	101	105
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	40,13	52,27	52,15	71,29	78,10

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Perubahan jumlah sistem informasi menyesuaikan dengan hasil evaluasi aplikasi yang pada dasarnya adalah duplikasi atas satu aplikasi

menjadi beberapa aplikasi sesuai jumlah lembaga pengguna. Hal ini sama dengan penyesuaian pada indikator sistem informasi yang terintegrasi.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator kinerja bidang urusan koperasi, UKM dan perdagangan di Kabupaten Temanggung periode Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.142
Indikator Urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Koperasi Sehat	%	8,72	5,95	7,35	15,09	28,18
2	Prosentase usaha mikro yang naik kelas	%	n.a	0,012	0,035	0,0148	0,0207
3	Persentase koperasi aktif	%	12,99	13,81	22,86	27,47	28,82
4	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	24,97	21	3,98	100	43,98
5	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	na	na	57,35	89,14	80,65
6	Prosentase usaha mikro aktif	%	na	32,20	33,07	100,00	100,00
7	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	0	0	0,93	1,40	1,58

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab, Temanggung Tahu 2024

Jumlah koperasi sehat (dengan nilai Sehat dan Cukup Sehat) di Tahun 2023 adalah 31 koperasi. Pemeriksaan kesehatan untuk Tahun 2023 berdasarkan laporan Rapat Anggota Tahunan tutup buku Tahun 2022. Adapun pelaksanaannya, dilakukan sesuai dengan instansi dan jabatan yang berwenang.

Usaha mikro yang naik kelas Tahun 2023 sebesar 0,0266 % dari target. Perhitungan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana kriteria Usaha Mikro naik kelas ke Usaha Kecil adalah beromset Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pertahun.

Persentase penambahan nilai aset koperasi pada Tahun 2023 sebesar 7,35%. Perhitungan penambahan nilai aset koperasi tersebut berdasarkan pada nilai aset koperasi aktif dan melaporkan RAT selama 3 tahun terakhir.

Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2023 sebesar 82,90% menurun dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan Minat koperasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan masih rendah.

Persentase penambahan nilai aset koperasi pada Tahun 2023 tercapai sebesar 43,98%. Perhitungan penambahan nilai aset koperasi tersebut berdasarkan pada nilai aset koperasi aktif dan melaporkan RAT selama 3 tahun terakhir. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Persentase Usaha Mikro aktif di Kabupaten Temanggung mulai tahun 2022 hingga tahun 2023 adalah sebesar 100%. Mengalami peningkatan dibanding Tahun 2021 karena pelaku usaha sudah bisa bangkit menjalankan produksinya kembali dengan adanya kegiatan UMKM di berbagai event dan program Bantuan Presiden bagi Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 dan 2021 sehingga bisa menambah modal usaha para pelaku UMKM untuk bangkit dan memulai kembali usahanya.Data UMKM aktif diperoleh dari pendataan Sistem Informasi Data Tunggal Tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi SIDT KU MKM data sampai dengan bulan Desember 2022.

12. **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Perekonomian daerah dapat menjadi modal pembangunan daerah serta mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomi secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Capaian Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.143
Capaian Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	n.a	n.a	78	82	82
2	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	375,6	1,245,66	1,496,68	1,836,01	2000,79
3	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	18,75	28,13	28,13	28,13	28,13
4	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	0	44,19	100,00	100,00
5	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	60	60	60	100	100
6	Persentase pelayanan perizinan online	%	46,2	98,48	98,35	98,09	100
7	Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	100	100	100
8	Persentase perizinan yang	%	81,21	96,20	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	diterbitkan Tepat waktu						
9	Persentase kesesuaian Pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	93,37	93,53	100	100
10	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
11	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kab, Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 tidak dapat ditampilkan Indeks Kemudahan Berusaha dikarenakan memang tidak pernah dilakukan pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha, Indeks Kemudahan Berusaha merupakan indikator baru, dan baru dapat dilaksanakan pengukuran pada triwulan 4 Tahun 2021 dengan hasil yang diperoleh adalah 78, angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023 target Indeks Kemudahan Berusaha masih menggunakan capaian Tahun 2022 yaitu sebesar 82, hal ini disebabkan karena Indeks Kemudahan Berusaha masih dalam proses pengukuran.

Dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Pada Tahun 2023 nilai investasi PMA sebesar 719,70 lebih besar dibandingkanga Tahun 20202. Hal tersebut merupakan upaya bersama pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melakukan kemudahan akses berinvestasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

Kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan Tahun 2020 telah terlaksana 9 kajian. Pada Tahun 2021 dan 2022 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM dan adanya refokusing anggaran. Sedangkan pada Tahun 2020 dilaksanakan 9 Kajian Teknis Potensi Investasi yaitu potensi investasi terkait bawang putih, Bukit Wagir Bawang, Curug Surodipo, Kawasan Wisata Bejen Tretep Wonobojo, Bukit Kembang Arum, UMKM Desa Bansari, Rest Area Pringsurat, Pengembangan Kawasan Kledung.

Kegiatan pelayanan perizinan *online* pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan *online* dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi *Sicantik Cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara

online. Sedangkan dari tahun 2021 kegiatan perizinan secara *online* sudah terlayani langsung oleh sistem.

Pada Tahun 2023 data perizinan online sebanyak dengan capaian sebesar 100%, lebih baik dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 dengan capaian 98,09% hal ini disebabkan perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi *sicantik cloud*. Disamping itu capaian persentase permohonan izin bebas calo dari Tahun 2019-2023 telah tercapai 100 % dikarenakan perizinana sudah dilakukan secara online.

Capaian pada perizinan yang diterbitkan tepat waktu dari Tahun 2019-2023 terus meningkat, pada Tahun 2023 capaiannya 100% dari 13.781 pemohon perizinan yang dilayani.

Capaian Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan pada Tahun 2023 telah tercapai 100% dengan jumlah pengaduan 3 pengaduan, hal ini didoreng dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan. Sedangkan untung capaian Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan pada tahun 2023 tidak ada jumlah gugatan hukum yang masuk pada Dinas Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung.

13. **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Indikator yang mendukung bidang kepemudaan dan olahraga diantaranya adalah:

1. **Indek Pembangunan Pemuda (IPP)**

Penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda bekerja sama dengan pihak ketiga menggunakan 5 variabel/komponen data, dan 14 subvariabel data. Capaian IPP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.144						
Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023						
No	Variabel	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Dasar	3,50	3,00	4,00	4,00	4,00
2	Lapangan kerja dan kesempatan kerja	2,50	2,50	3,00	3,50	3,50
3	Partisipasi dan kepemimpinan	3,33	3,67	4,00	4,00	4,00
4	Gender dan diskriminasi	3,67	4,67	4,67	4,67	4,67
5	Kesehatan dan kesejahteraan	3,75	3,50	3,25	3,75	3,75
	Rata-rata	3,35	3,57	3,78	3,98	3,98

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas disajikan hasil perhitungan 14 sub variabel data Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2022,

hasil kerjasama Bappeda Kabupaten Temanggung dengan P5 Undip. Capaian IPP pada Tahun 2023 masih menggunakan capaian Tahun 2022. Faktor penghambat dari penghitungan IPP yaitu belum tersedianya data yang akurat dan valid tentang data kepemudaan, sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan penyusunan data base tentang kegiatan kepemudaan, informasi data kepemudaan.

2. Indeks Pembangunan Olahraga IPO)

Indek pembangunan olahraga (*Sport Development Index*) adalah metode pengukuran yang diklaim sebagai alternatif baru untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga yang meliputi sembilan dimensi (variabel) yaitu ruang terbuka olahraga, sumberdaya manusia olahraga, partisipasi masyarakat, kebugaran, performa, kesehatan, literasi fisik, perkembangan performa, dan ekonomi. Pembangunan olahraga di suatu daerah tentunya memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga secara umum di Indonesia.

Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.145							
Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023							
No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n,a	n,a	3,31	2,97	2,97

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2023 sebesar 2,97 masih jauh dengan target yaitu 3,41. Rendahnya capaian kinerja yaitu masih adanya keterbatasan sarana dan prasaran yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, tidak terdatanya atlit temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti. Sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu pembibitan atlit dari usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, peningkatan kualitas sarpras pendukung olahraga, penerimaan atlit temanggung ke turnamen dan kejuaraan yang memiliki penghargaan dan terdatanya atlit perprestasi di kabupaten temanggung melalui informasi atlet yang akurat.

3. Indikator Program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja program pada urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.146
Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Tahun 2019-2023							
No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	62,96	96,43	93,10	93,10	93,10
2	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	54,31	56,06	100	96,43	96,43
3	Persentase prestasi olahraga	%	46,51	54,29	21,62	70	70
4	Persentase atlet berprestasi	%	70,43	63,66	46,81	83,19	83,19
5	Persentase gugus depan yang aktif	%	n,a	n,a	80,61	100	100

Sumber: Dindikpora Kab, Temanggung Tahun 2024

Capaian kinerja pada indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dari Tahun 2021-2023 sebesar 93,10% disebabkan oleh tidak bertambahnya jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi yang aktif, salah satu faktornya adalah kurangnya pelibatan organisasi pemuda dan perlunya peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, begitu pula pada capaian kinerja persentase pelatih olahraga bersertifikat masih sama capaian pada Tahun 2023 dikarenakan proses sertifikasi olahraga yang berjenjang dan membutuhkan waktu yang lama.

Capaian kinerja pada Persentase prestasi olah raga, Persentase atlet berprestasi pada Tahun 2023 masih sama capaian dengan Tahun 2022, salah satunya penyebabnya adalah minimnya event olahraga prestasi yang tersedia. Sedangkan untuk capaian kinerja Persentase gugus depan yang aktif capaian kinerja sudah 100%.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah, karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Gambaran urusan statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.147
Gambaran Urusan Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Data makro yang tersedia	-	5	5	7	5	5
2	Kebutuhan data makro	-	5	5	7	5	5
3	Cakupan ketersediaan data makro daerah Berusaha	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa cakupan ketersediaan data makro pada Tahun 2023 telah tercapai 100%. pada Tahun 2023 ini terdapat 5 (lima) data makro daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Ketimpangan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Indeks Ketimpangan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia merupakan perhitungan yang dilakukan di tahun berikutnya karena merupakan indikator makro yang dihitung periode satu.

15. **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Dalam menyelenggarakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan, mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan kesediaan. Untuk mendapatkan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan keamanan informasi dilakukan melalui evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI), dengan tujuan mengetahui kekurangan manajemen keamanan sistem informasi di pemerintahan dan merumuskan rekomendasi perbaikannya. Hal ini terbukti dengan telah disahkan Peraturan Presiden no. 82 tahun 2022 Tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang menjadi pedoman untuk tata Kelola keamanan informasi di Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja pada tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.148
Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan risiko keamanan informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	3	4	7	4	2
2	Jumlah sistem elektronik	461	507	512	100	104
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	0,65	0,79	1,37	4,00	1,92

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung Tahun 2024

Tingkat kesiapan penilaian/ pengelolaan resiko keamanan informasi Tahun 2019, capaian pada Tahun 2023 tercapai 1,92%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan Security Assessment melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan mandiri.

Faktor Pendorong Pencapaian target Pengelolaan resiko keamanan informasi adalah adanya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Assessment Keamanan Informasi di kabupaten Temanggung dengan Anggaran dari BSSN dan Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kerawanan keamanan informasi adalah dengan cara mengurangi aplikasi yang tidak terpakai untuk dinonaktifkan sehingga dapat mengurangi celah kerawanan terhadap data center yang ada.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja Bidang Kebudayaan selama periode Tahun 2019-2023 terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.149
Gambaran Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	n,a	n,a	3,31	3,67	3,67
2	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	0	0	125,61	125,61	125,61
3	Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	45,16	18,63	28,98	31,71	47,14
4	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	0,03	2,64	2,64	6,61	7,05
5	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	3,63	3,63	3,63	5,18	5,18

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Capaian kinerja IPK Tahun 2023 masih sama dengan Tahun 2022 yaitu 3,67 % dikarenakan baru proses perhitungan. Sedangkan untuk Persentase kelompok Budaya yang produktif baru dihitung pada Tahun 2021-2023 sebesar 125,61%. Capaian Persentase kelompok kesenian yang produktif yang di hitung capaiannya adalah kelompok seni yang terfasilitasi mulai Tahun 2019 Sedangkan pada Tahun 2023 terdapat penambahan 175 kelompok budaya sehingga presentase kelompok seni budaya yang produktif mengalami kenaikan dari Tahun 2022 yaitu dari 31,71 menjadi 47,14% di Tahun 2023. Capain kinerja pada pelestarian Sejarah lokal meningkat dari 6,61% di Tahun 2022 menjadi 7,05% di Tahun 2023. Sedangkan capaian pelestarian cagar budaya masih sama di Tahun 2022 yaitu 5,18% dikarenakan jumlah cagar budaya yang dilestarikan hanya 10 tidak bertambah di Tahun 2023.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja perpustakaan selama periode Tahun 2019-2023 pada masing-masing indikator menunjukkan fluktuasi. Gambaran kinerja perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Gambaran Urusan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peminjam di Perpustakaan	%	77,78	78,88	75,38	86,13	83,43
2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	20,57	-6,51	-60,70	1009,05	41,79
3	Persentase Perpustakaan yang aktif	%	36,83	39,41	39,46	97,68	56,68
4	Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	n,a	n,a	0,039	99,12	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase Peminjam Perpustakaan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dan mencapai mencapai 86,13% dari target sebesar 80%. Sedangkan pada Tahun 2023 mencapai 83,43% lebih rendah dari capaian Tahun 2022 dikarenakan koleksi yang dimiliki tidak update sehingga kurang menarik bagi pemustaka, akan tetapi capaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

Indikator persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan pada Tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena dalam rumus perhitungan persentase, pembanding di dalam perhitungan menggunakan indikator pengunjung tahun lalu sehingga mengakibatkan persentase pertumbuhan jumlah pengunjung yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 hanya mencapai 41,79%. Diperlukan upaya dan penanganan lebih lanjut agar supaya jumlah pengunjung lebih meningkat adalah sosialisasi Si Petak lebih menyeluruh kepada seluruh perpustakaan, menambah kegiatan pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan, menambah kegiatan untuk meningkatkan minat baca, mengadakan kerja sama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan, memperbanyak inovasi kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan sehingga masyarakat lebih berminat untuk mengunjungi perpustakaan tidak hanya untuk membaca tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi.

Indikator pertumbuhan perpustakaan aktif pada Tahun 2023 mengalami penurunan capaian dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu tercapai sebesar 56,68%. Sedangkan upaya yang dilakukan berupa Mengadakan sosialisasi Si

Petak, menambah kegiatan pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan, menambah kegiatan untuk meningkatkan minat baca, mengadakan kerja sama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan, memperbanyak kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan. Sedangkan pada cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan pada Tahun 2023 telah tercapai 100% lebih baik dari Tahun 2022.

18. **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja urusan kearsipan diukur melalui penghitungan Indeks manajemen kearsipan yang diperoleh dari hasil audit kearsipan eksternal yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap Dinas Kearsipan dan Kabupaten Temanggung dan audit kearsipan internal yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung. Secara keseluruhan gambaran capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.151							
Gambaran Urusan Kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023							
No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Manajemen Kearsipan	angka	65,44	65,44	54,03	62,46	72,76
2	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	25,87	30,52	32,56	34,30	36,05
3	Persentase Arsip Vital Konvensional yang Dialihmediakan	%	n,a	10	20	40,08	50,08

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 telah mengalami kenaikan sebesar 72,76% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 62,46%. Hal ini menunjukkan pengelolaan kearsipan semakin membaik setelah mengalami penurunan akibat pandemi covid yang menurunkan kinerja sektor di Temanggung. Capaian Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku semua Perangkat Daerah dan Kecamatan telah melaksanakan arsip secara baku sehingga target persentase pengelolaan arsip secara baku telah mencapai target 100%. Arsip vital konvensional yang dialihmediakan sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai 100% yaitu 2.454 dokumen sertifikat tanah dari total 4.900 dokumen atau sebanyak 50,08% dari target 50%.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Temanggung terdiri dari budidaya perikanan dalam kolam yaitu ikan nila, ikan lele dan ikan mas, Perkembangan kinerja urusan perikanan selama periode lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Gambaran kinerja urusan perikanan di Kabupaten Temanggung periode Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Gambaran Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22,96	23,34	24,34	24,34	24,39
2	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m2	3,61	3,82	4,05	5,40	6,20
3	Produktivitas Ikan Lele	Kg/m2	9,63	10,52	10,76	12,60	13,08
4	Produktivitas Ikan Mas	Kg/m2	5,42	5,53	5,62	5,80	6,00
5	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	n,a	n,a	12,48	43,58	36,70
6	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	n,a	n,a	222	100	45,00
7	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	n,a	n,a	100	100	100

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan mengalami kondisi yang fluktuatif. Indikator yang mengalami penurunan adalah sebagai berikut :

- a. Persentase nelayan perairan umum yang terbina mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi dimaksud dan hanya bisa dilaksanakan pada saat penebaran benih ikan di perairan umum;
- b. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan mengalami penurunan dikarenakan Keterbatasan ketersediaan benih untuk ditebar di perairan umum.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Temanggung memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan didukung oleh keberagaman daya tarik wisata yang ada yaitu alam, budaya dan buatan. Capaian kinerja urusan Pariwisata di kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.153
Capaian kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,62	0,50	1,53	1,53	1,53
2	Persentase obyek wisata	%	25,00	30,56	32,29	34,00	42,00

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	yang berkembang						
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	12,30	-64,85	12,62	80,96	26,78
4	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1
5	Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	6,39	6,57	7,27	8,65	12,03
6	Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	6,39	89,47	80,95	73,91	60,71
7	Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	6,39	na	6,32	9,90	9,91

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan capaian kinerja urusan pariwisata mengalami kondisi yang fluktuatif. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada Tahun 2023 masih menggunakan capaian Tahun 2022 sebesar 1,53%. Untuk capaian persentase obyek wisata yang berkembang mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 42 % jika dibandingkan Tahun 2022 yang hanya 34%, dikarenakan adanya pembinaan pengelolaan destinasi dan adanya stimulan bantuan keuangan dari Kabupaten, Propinsi, maupun pusat. Capaian indikator Lama tinggal wisatawan hanya 1 (satu) hari, hal ini disebabkan karena data yang dihimpun dari hotel baik bintang maupun non bintang yang ada di Kabupaten Temanggung bila di rata-rata hanya 1 hari. Pertumbuhan jumlah wisatawan dari Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan pada Tahun 2022 dikarenakan kurangnya promosi yang intens dan SDM yang berkualitas dalam pengelolaan destinasi wisata.

Persentase peningkatan desa wisata capaian pada Tahun 2023 sebesar 12,03% lebih baik jika dibandingkan Tahun 2022 hanya 8,65% disebabkan karena animo dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat keberadaan Desa Wisata meningkat. Pada Tahun 2023 jumlah desa wisata bertambah sebanyak 5 desa wisata sedangkan desa yang naik klarifikasi masih tetap dengan Tahun 2022 yaitu 17 desa. Sedangkan pada indikator Persentase desa wisata naik klasifikasi capaian pada Tahun 2023 sebesar 60,71% menurun dibandingkan capaian pada Tahun 2022 sebesar 73,91% dikarenakan mekanisme assesment desa wisata dilakukan setiap 4 tahun sekali sesuai perundang undangan, yang mengakibatkan jumal Deswita naik klasifikasi hanya 4 tahun sekali. Pada capaian kinerja persentase peningkatan pelaku Ekraft pada Tahun 2023 sebesar 9,91% naik jika dibandingkan Tahun 2022, hal ini disebabkan telah dibentuknya komite Ekraf di tingkat Kabupaten.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Sektor pertanian menjadi tumpuan mata pencaharian mayoritas

penduduk Kabupaten Temanggung dan sebagai penyedia bahan pangan masyarakat, sehingga urusan bidang pertanian ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Gambaran kinerja urusan pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.154

Gambaran Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat ketersediaan energy perkapita (standard nasional 2400)	kkal/kapita/hari	2.576	2.271	2.934	3.198	3.113
2	Tingkat ketersediaan protein perkapita (standard nasional 63)	kkal/kapita/hari	130,02	124,99	62,59*	83,19	76,75
3	Tingkat Ketersediaan lemak perkapita (Standart nasional 37, minimal 25% dari tingkat konsumsi protein)	kkal/kapita/hari	na	na	79	64,66	63,63
4	Peningkatan produktifitas Padi	kwintal/ha	59	59	63,15	63,15	63,46
5	Peningkatan produktifitas Jagung	kwintal/ha	49	45	46,10	46	46
6	Peningkatan produktifitas Ubi Kayu	kwintal/ha	339,80	329,12	329,12	340	339,96
7	Produktivitas Bawang Putih	kwintal/ha	79,6	65,84	65,1	69,16	71,41
8	Produktivitas Bawang Merah	kwintal/ha	80,15	73,60	71,40	81	76,65
9	Produktivitas Cabai Rawit	kwintal/ha	55	69,97	69,87	76,36	76
10	Produktivitas Cabai Besar	kwintal/ha	69,50	72,10	70,57	79,04	77,53
11	Produktivitas Tembakau	kwintal/ha	6,80	6,78	6,88	6,68	6,56
12	Produktivitas Kopi Robusta	kwintal/ha	7,25	6,79	7,15	6,93	6,53
13	Produktivitas Kopi Arabika	kwintal/ha	7	6,2	6,11	5,9	5,75
14	Produktifitas Cengkeh	kwintal/ha	2,45	3,06	2,32	4,17	2,83
15	Produktifitas Vanili	kwintal/ha	2,95	2,09	2,93	3,03	2,96
16	Produktivitas ternak sapi (data RPH dan qurban)	Kg/Ekor	177,60	176,95	177,20	177,40	177,60
17	Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,71	13,68	13,69	13,70	13,71
18	Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,71	13,68	13,69	13,70	13,71
19	Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
20	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,88	10,88	10,26	10,35	10,88
21	Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
22	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76,55	76,55	76,64	79,15	79,15
23	Persentase penanganan penyakit hewan	%	90	na	96,68	100	97,26
24	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	84,29	82,96	100	82,10
25	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	40,25	na	41,20	41,45	40,30
26	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	0,67	0,81	1,03	1,48

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Ketersediaan Energi per Kapita di kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No,65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2,400 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2,100 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku. Penurunan capaian kesediaan energi per Kapita pada Tahun 2023 dikarenakan tingkat produksi sumber energi dipengaruhi oleh iklim, budaya masyarakat, pola konsumsi.

Ketersediaan protein per kapita di kabupaten Temanggung cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif. Penurunan terbesar terjadi pada Tahun 2021 yang disebabkan menurunnya ketersediaan protein nabati akibat luas tanam pangan sereal (padi dan jagung) berkurang dan adanya serangan hama, Pada sektor ketersediaan protein hewani, berkurangnya ketersediaan disebabkan penurunan produksi ikan, ternak serta penurunan produksi telur.

Ketersediaan lemak perkapita mengalami penurunan dikarenakan tingkat produksi lemak dipengaruhi oleh iklim, budaya masyarakat, pola konsumsi.

Produktifitas Ubi Kayu mengalami penurunan dikarenakan adanya serangan hama penyakit tanaman, tanaman rusak karena kondisi cuaca/iklim dan sarpras pertanian yang perlu ditingkatkan (benih, pupuk, ketersediaan air).

Produktivitas tanaman pangan (padi dan bawang putih) cenderung meningkat di Tahun 2023, peningkatan ini didorong oleh berbagai bentuk kegiatan fasilitasi pemerintah guna meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan benih unggul serta gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu.

Produktivitas beberapa jenis tanaman hortikultura pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding Tahun 2022, terutama pada komoditas tanaman bawang merah dan cabai. Hal ini dikarenakan factor cuaca terutama curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan serangan penyakit pada tanaman hortikultura.

Rata-rata produktivitas tanaman perkebunan di kabupaten Temanggung cenderung terjadi fluktuasi. Pada komoditas tembakau terjadi

penurunan produktifitas dibanding tahun sebelumnya. Tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanam, saat panen maupun pasca panen. Selain itu, di Tahun 2020 mengalami penurunan luasan karena pengaruh isu pabrik rokok mengurangi pembelian tembakau serta informasi harga beli tembakau yang belum pasti. Produktifitas tanaman kopi mengalami kondisi fluktuasi pada tiap tahunnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produktifitas kopi diantaranya melalui pengembangan kopi dengan benih unggul yang berkualitas, peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan dengan benih entres yang berkualitas dan bersertifikat, pelatihan budidaya, pemeliharaan dan pemangkasan kopi yang efektif dengan bimbingan lapang oleh penyuluh maupun sekolah lapang bagi kelompok tani. Produktifitas tanaman cengkeh juga mengalami kondisi yang fluktuatif, hal ini disebabkan banyaknya tanaman cengkeh yang mati karena serangan penyakit PBKc. Beberapa upaya telah dilakukan diantaranya melalui pelatihan pemanfaatan agensia hayati dalam penanggulangan penyakit PBKc serta bantuan pengadaan bibit tanaman cengkeh sebagai upaya penanaman baru tanaman yang mati. Mekanisasi pertanian berperan penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Penanganan penyakit hewan pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim.

Pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas.

Pengendalian bencana pertanian juga mengalami penurunan karena terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT.

Kelembagaan petani juga merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan, Data 2021 kenaikan kelas kelompok sebesar 0,81% atau 22 kelompok tani dan pada tahun 2023 masih tercapai sebanyak 28 kelompok (1,03%) dari total kelompok tani yang terdaftar 2,709 karena masih menggunakan capaian tahun 2022. Peningkatan kualitas kelompok tani didorong oleh pembinaan dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas petani, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok tani/Gapoktan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani melalui sekolah lapang, Selain peningkatan kualitas kelompok tani, dalam aspek pengarahan

kelembagaan petani menjadi korporasi telah dilakukan yang ditandai dengan pendirian “Koperasi Tawon Sindoro Sumbing” di Kecamatan Bansari sebagai salah satu penunjang program food estate di Kabupaten Temanggung.

Produktivitas ternak potong di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, walaupun rata-rata kenaikannya tidak cukup signifikan. Hal ini disebabkan populasi ternak di Kabupaten Temanggung cenderung pada posisi yang stagnan.

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: cacingan, gangguan reproduksi, demam tiga hari/BEF, Newcastle Disease, Avian Influenza, Kembung, Malnutrisi, Toxoplasmosis, Diare, Fraktur, Luka, Scabies, dan lain-lain.

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Sektor perdagangan menyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung, Pasar daerah merupakan salah satu penggerak sektor perdagangan di Kabupaten Temanggung. Dalam perkembangannya pasar daerah menghadapi persaingan dengan pasar modern yang mulai merebak, maka dari itu diperlukan peningkatan layanan pengelolaan pasar daerah dengan fokus kepada penyediaan sarana prasarana pasar, kebersihan pasar hingga ketertiban para pedagangnya, Kabupaten Temanggung memiliki 6 (enam) pasar daerah yaitu pasar Temanggung, pasar Parakan, pasar Ngadirejo, pasar Candiroto, pasar Kranggan/Agro dan pasar Pingit. Gambaran urusan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.155
Gambaran Urusan Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	20,35	20,14	20,14	20,14	20,79
2	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik	%	54	50	50	66,67	83,33
3	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	28,55	29,12	29,59	62,28	70,34
4	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	70,05	98,71	64,45	105,58	90,73
5	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,7	18,46	13,17	53,27	60,88
6	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	%	66,57	66,30	69,32	98,08	74,79
7	Kontribusi nilai ekspor	%	58,90	20,42	32,09	27,80	86,17

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	terhadap PDRB sector perdagangan						
8	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	7,98	39,90	79,02	101,12	95,82

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan pada Tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Capaian kinerja urusan perdagangan Tahun 2023 pada kinerja persentase pasar daerah dalam kondisi baik sebesar 83,33%, persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang 70,34%, realisasi pendapatan pasar telah mencapai 90,73 % yang terdiri dari pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dan pendapatan dari sewa Barang milik Daerah (BMD). Sedangkan kinerja persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya Tahun 2023 sebesar 74,79% yang diperoleh dari 4 (empat) pasar daerah yaitu pasar Temanggung, pasar Parakan, pasar Ngadirejo dan pasar Kranggan. Capaian indikator ini Tahun 2023 menurun dibandingkan Tahun 2022 dikarenakan tidak ada petugas khusus yang melakukan pemantauan harga. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan sebesar 60,88%, Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB sektor perdagangan 2022–2023 mengalami kenaikan. Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena banyak anak timbangan yang tidak di tera ulang.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian kinerja bidang perindustrian pada Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.156
Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	27,21	27,47	27,47	27,47	26,19
2	Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	n,a	n,a	18,46	64,62	70,46
3	Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	n,a	n,a	2,09	9,92	12,29

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Capaiannya kinerja pada kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Tahun 2023 sebesar 26,19% menurun dibanding Tahun 2022 yaitu 27,47% karena adanya penurunan jumlah industri pengolahan kayu di Kabupaten

Temanggung dimana industri tersebut merupakan salah satu sektor industri utama di Kabupaten Temanggung.

Sedangkan capaian persentase IKM pada Tahun 2023 menjadi 70,46 % jika dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 64,62%. Faktor pendorong dalam pencapaian indikator ini adalah adanya fasilitasi dari pemerintah yang dibutuhkan oleh IKM antara lain kegiatan P3DN, sertifikasi TKDN, pelatihan-pelatihan bagi IKM, fasilitasi SNI, sertifikasi halal, pameran produk IKM. Selain itu adanya kesadaran IKM untuk melakukan peningkatan sumber daya IKM itu sendiri dalam rangka mengembangkan usahanya. Upaya pencapaian target kinerja tahun 2023 yaitu dengan melakukan monitoring dan pembinaan IKM yang terfasilitasi.

Pada capaian kinerja Tahun 2023 Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai terdapat 440 IKM tembakau yang dibina dari jumlah total IKM tembakau , sehingga persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai sebesar 12,29%. Faktor pendorong dalam pencapaian indikator ini adalah adanya fasilitasi pelatihan bagi IKM tembakau dalam rangka pembinaan industri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM pelaku IKM Tembakau.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Sekretariat Daerah

- 1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.157
Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai	3,35	3,35	3,05	3,43	3,43
2	Kategori	ST	ST	Sedang	Tinggi	Tinggi
3	Kepmendagri	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 29 April 2023	Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023
4	Tingkat	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berada pada posisi nilai diatas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten Temanggung berkinerja tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya, SAKIP diimplementasikan secara Self Assesment oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%).

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sampai 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.158
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Nilai	Kategori
1	2019	60,16	B
2	2020	62,11	B
3	2021	63,84	B
4	2022	64,73	B
5	2023	65,17	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sampai Tahun 2023 cenderung meningkat dari 60,16 menjadi 65,17 dengan kategori B.

3) Indeks Reformasi Birokrasi

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Nilai
1	2019	62,76
2	2020	62,70

No.	Tahun	Nilai
3	2021	63,42
4	2022	64,61
5	2023	69,05

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Selain penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri juga telah dilakukan penilaian dari Kementrian PAN dan RB di Tahun 2023 dengan hasil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah **69,05** dengan kategori **"B"** terinci sebagai berikut:

Tabel 2.160
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Komponen	Nilai
1	RB General	62,13
2	RB Tematik	6,92
3	Total Nilai	69,05
4	Total Bobot RB General	100
5	Bobot RB General Penyesuaian	100
6	RB General Penyesuaian	62,13
Index RB		69,05

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

4) Kompetensi Penyelenggara Pelayanan Publik

Untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Bagian Organisasi Setda setiap tahun telah melaksanakan survey PPID di seluruh Perangkat Daerah yang memiliki layanan langsung kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2.161
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Tahun	Nilai
1	2019	79,95
2	2020	80,41
3	2021	82,06
4	2022	83,41
5	2023	84,97

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019-2023 menyatakan bahwa kinerja unit pelayanan dapat dikategorikan “baik”, dengan nilai yang tiap tahun naik, menandakan bahwa unit pelayanan selalu melaksanakan rekomendasi dan perbaikan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2023, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap Pelayanan Publik

yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.162
Nilai Mutu Pelayanan Berdasarkan Rata-Rata Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88,65	A (Sangat Baik)
2	Dinas Kesehatan	92,75	A (Sangat Baik)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,26	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	81,86	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	76,61	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	92,51	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,83	B (Baik)
8	Dinas Sosial	85,86	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	79,18	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	76,98	B (Baik)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,79	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87,66	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	85,20	B (Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	79,90	B (Baik)
15	RSUD	86,69	B (Baik)
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88,13	B (Baik)
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	84,76	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,26	B (Baik)
19	Bagian PBJ	82,18	B (Baik)
20	Kecamatan Temanggung	85,98	B (Baik)
21	Kecamatan Kranggan	82,08	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	85,78	B (Baik)
23	Kecamatan Kandungan	86,97	B (Baik)
24	Kecamatan Kaloran	84,00	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	88,70	A (Sangat Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	84,76	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	88,01	B (baik)
28	Kecamatan Selopampang	85,41	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,88	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	84,02	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	82,55	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	84,22	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	85,99	B (Baik)
34	Kecamatan Gemawang	84,04	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	87,36	B (Baik)
36	Kecamatan Candioto	84,28	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	86,20	B (Baik)
38	Kecamatan Wonobojo	84,88	B (Baik)
39	Kecamatan Tretep	85,30	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	85,65	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,50	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	82,54	B (Baik)
43	Puskesmas Pare	90,03	A (Sangat Baik)
44	Puskesmas Pringsurat	84,17	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	90,88	A (Sangat Baik)
46	Puskesmas Kaloran	82,08	B (Baik)
47	Puskesmas Tepusen	84,46	B (Baik)
48	Puskesmas Kandungan	85,76	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	92,8	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	79,28	B (Baik)
51	Puskesmas Kedu	79,75	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	85,94	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	90,69	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	90,37	B (Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,90	A (Sangat Baik)

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
56	Puskesmas Parakan	84,30	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	84,62	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	78,65	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	81,74	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	82,91	B (Baik)
61	Puskesmas Banjarsari	81,95	B (Baik)
62	Puskesmas Candioto	78,29	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	79,46	B (Baik)
64	Puskesmas Wonobooyo	86,27	B (Baik)
65	Puskesmas Tretep	86,06	B (Baik)
Nilai Rata-rata IKM Tahun 2023		84,97	B (Baik)

Sumber: Bag, Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Perangkat Daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki beberapa tugas yaitu membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif. Pelaksanaan tugas telah diwadahi oleh unsure dalam perangkat daerah tersebut bertanggung jawab kepada Bupati melalui proses pengintegrasian dan sinkronisasi darit ujian dan kegiatan sebagai pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah dalam mencapai visi misi pemerintahan daerah melalui koordinator yaitu Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maka perangkat daerah yang memiliki tupoksi pelayanan masyarakat secara langsung melakukan survey kepuasan masyarakat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal PelayananTerpadu Satu Pintu, dan Kecamatan.

Tabel 2.163
Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Uraian	Nilai	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,80	A
2	Prosedur Pelayanan	3,68	A
3	Jangka Waktu Pelayanan	3,59	A
4	Tarif Pelayanan	3,89	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,79	A
6	Kompetensi Pelayanan	3,77	A
7	Perilaku Pelaksana	3,86	A
8	Penangan Pengaduan	3,74	A
9	Sarana Prasarana	3,72	A

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan dinyatakan Baik. Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah tarif pelayanan yang mendapatkan nilai 3,89. Dan unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah unsur Jangka

waktu pelayanan. Tindak lanjut dari hasil survey kepuasan masyarakat meningkatkan dan mensinergikan komitmen pegawai dalam melayani masyarakat.

Tabel 2.164
Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Investasi
Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Uraian	Nilai	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,25	B
2	Prosedur Pelayanan	3,22	B
3	Jangka Waktu Pelayanan	3,19	B
4	Tarif Pelayanan	3,78	A
5	ProdukSpesifikasi JenisLayanan	3,17	B
6	Kompetensi Pelayanan	3,29	B
7	Perilaku Pelaksana	3,38	A
8	Penangan Pengaduan	3,95	A
9	Sarana Prasarana	3,35	A

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Secara umum pelayanan investasi pada Dinas Penanaman Modal dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat pengguna layanan. Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Penanganan Pengaduan dengan nilai 3,95. Sedangkan unsure pelayanan yang mendapatkan nilai terendah adalah produk spesifikasi jenis layanan dengan nilai 3,17. Untuk menindaklanjuti penilaian masyarakat terhadap persyaratan pelayanan yang masih rendah Dinas Penanaman Modal akan melakukan penyerdehanan dalam prosedur pelayanan dan mempercepat proses perizinan dengan bekerjasama dengan Perangkat Dinas Teknis terkait untuk menempatkan staf yang ditunju kberjaga di Front Office Dinas Penanaman Modal. Percepatan pelayanan saat ini didukung dengan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sehingga akan mempermudah proses pengesahan Kepala Dinas. Selain itu dengan dokumen yang berbentuk softfile diharapkan dapat memudahkan distribusi dokumen kepada pemohon tanpa perlu datang kekantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain itu dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, Pemerintah Daerah menggunakan kriteria yang ditetapkan Ombusdman RI. Berdasarkan SK Ketua Ombusdman RI Nomor 418 Tahun 2023 Kabupaten Temanggung memperoleh nilai 87,77 dengan kategori B, opini kualitas tinggi dan zonasi hijau Tahun 2023.

- 5) Skor survei kepatuhan pelayanan publik Ombusdman RI Kabupaten Temanggung baru menghitung kepatuhan pelayanan publik Ombusdman RI dari Tahun 2021. Skor survei kepatuhan pelayanan publik Ombusdma Tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.165
Skor Survei Kepatuhan Pelayanan Publik Ombusdman RI

Tahun	Nilai	Zona	Kategori	Opini
2019	n.a	n.a	n.a	n.a
2020	n.a	n.a	n.a	n.a
2021	71,23	ZONA KUNING	C	Kualitas Sedang
2022	84,56	ZONA HIJAU	B	Kualitas Tinggi
2023	87,77	ZONA HIJAU	B	Kualitas Tinggi

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Capaian skor survei kepatuhan pelayanan publik Ombusdman RI Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 dengan nilai 87,77 pada zona hijau, katagori B dan kualitas tinggi lebih baik jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

1) Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati, Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.166
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	19	19	16	16	19
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	26	21	20	18	19
	% RAPERDA yang disahkan tepat waktu	73,08	90,48	80,00	88,89	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu fluktuatif, Pada Tahun 2023 jumlah PERDA yang ditetapkan sebanyak 19 RAPERDA dari yang diajukan sebanyak 19 PERDA.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib, Perencanaan pembangunan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Guna memastikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan

Pemerintah Pusat, maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah berkualitas serta mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan. Gambaran kinerja sasaran urusan perencanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.167
Gambaran Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	n.a	n.a	4,5	4,5	4,5
2	Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah	%	98,48	86,60	92,35	98,66	98,96
3	Manajemen Risiko Indeks	Level	n.a	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Tahun 2023 masih sama dengan capaian kinerja Tahun 2022. Capaian Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2023 tercapai sebesar 98,96%. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 98,66%.

Indikator Manajemen risiko indeks merupakan indikator baru yang tertuang dalam perubahan RPJMD sehingga nilai indikator tersebut di Tahun 2019 belum dihitung. Capaian kinerja Manajemen risiko indeks pada Tahun 2023 pada level 2.

Capaian kinerja program urusan perencanaan Tahun 2019-2023 Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.168
Gambaran Kinerja Program Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tepat Waktu	%	100	94,81	87,22	100	100
3	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap	%	96,12	96,55	100	91,94	93,65

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam						
4	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	%	95,10	94,92	100	95,74	95,83
5	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	93,53	96,82	100	90,54	90,91
6	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra	%	93,50	96,43	100	98,80	90,91

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

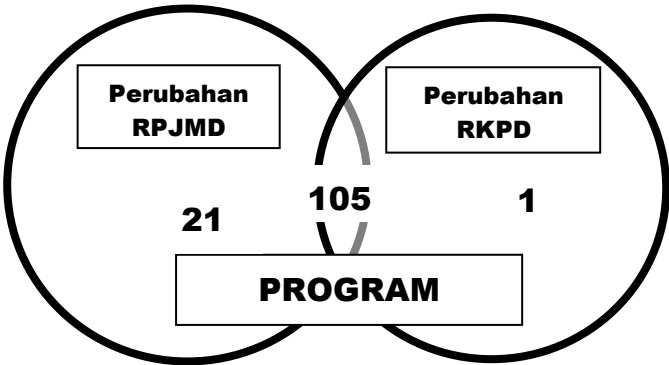
Setiap tahun pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada di dalam RPJMD. Tingkat konsistensi program pembangunan di kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.169
Tingkat Konsistensi Program Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Program Pembangunan dalam RKPD sesuai dengan RPJMD	121	124	120	111	105
2.	Jumlah Program Pembangunan dalam RPJMD	125	125	126	126	126
3.	Persentase (%)	96,8	99,2	95,2	88,10	83,33

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Kesesuaian program RPJMD dan RKPD sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Sumber Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.28
Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2019-2023 dengan Program RKPD Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 yang sesuai dengan

RKPD Tahun 2023 sebanyak 105 program. Program pada RPJMD yang tidak dilaksanakan di RKPD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.170
Program Pada RPJMD yang Tidak Dilaksanakan di RKPD Tahun 2023

No	Program Perubahan RPJMD Tidak Dilaksanakan di PerubahanRKPD	PD Pengampu
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DPRKPLH
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan PenyuluhanLingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DPRKPLH
4	Program PenangananPengaduanLingkungan Hidup	DPRKPLH
5	Program PenyelesaianSengketa Tanah Garapan	DPRKPLH
6	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban TindakKekerasan	DINSOS
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DINPERINAKER
8	Program Pengawasan dan PemeriksaanKoperasi	DINKOPDAG
9	Program pengembangan UMKM	DINKOPDAG
10	Program Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi	DINKOPDAG
11	Program Perlindungan Perempuan	DPPKBPPPA
12	Program PenangananKerawanan Pangan	DKPPP
13	Program PeningkatanDiversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
14	Program PengelolaanSumber Daya Ekonomi UntukKedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPPP
15	Program PengawasanSumberdayaKelautan dan Perikanan	DKPPP
16	Program PencacatanSipil	DINDUKCAPIL
17	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DINPERMADES
18	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DINBUDPAR
19	Program pembinaansejarah	DINBUDPAR
20	Program Perlindungan dan PenyelamatanArsip	DINPUSIP
21	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Data Diolah.

Dari 21 program RPJMD yang tidak dilaksanakan di RKPD, karena keterbatasan keuangan Pemerintah Daerah untuk membiayai program tersebut. Untuk program pada perubahan RKPD yang berada diluar perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.171
Program pada Perubahan RKPD diluar Perubahan RPJMD

No	Program Perubahan RKPD Diluar Perubahan RPJMD	PD Pengampu
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Data Diolah

2. Keuangan

1) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar

dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.172
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Opini LKPD (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir Tahun 2019- 2023 memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka skor tertinggi dengan bobot 15. Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

2) Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan

Persentase dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019-2023 di Kabupaten Temanggung disajiakna pada tabel berikut.

Tabel 2.173
Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Persentase
2019	278.306.408.650	1.840.953.306.303	15,12
2020	307.456.823.576	1.830.815.032.558	16,79
2021	364.099.510.273	1.950.257.238.731	18,67
2022	308.726.486.721	1.849.550.699.127	16,69
2023	351.823.679.260	2.005.427.452.487	17,54

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pendapatan asli daerah Tahun 2023 tercapai sebesar 17,54% dari realisasi pendapatan daerah. Lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2022 hal tersebut disebabkan pada Tahun 2023 mulai bertambahnya usaha lokal penyumbang Pendapatan Asli Daerah.

3) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi. Nilai indeks pengelolaan keungan daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.174
Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IPKD	70,00	68,16	69,52	62,74	68,08

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2023 sebesar 68,08 %. Capaian IPKD mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 yang tercapai sebesar 62,74%. Hal tersebut disebabkan karena penurunan nilai dalam 2 dimensi dari 5 dimensi yang menjadi indikator penilaian yaitu Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dimensi Kondisi Keuangan Daerah. Dalam proses penginputan data Tim IPKD yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah masih dalam proses mempelajari cara terbaru dalam menginput data.

4) Ketepatan Waktu dalam Pengesahan APBD

Dalam kurun waktu 5 tahun penetapan dan pengesahan APBD Kabupaten Temanggung selalu tepat waktu sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.175
Tanggal dan Nomor Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2024

Tahun Anggaran	Tanggal Perda	Nomor Perda
2019	28 Desember 2018	12 Tahun 2018
2020	16 Desember 2019	14 Tahun 2019
2021	28 Desember 2020	25 Tahun 2020
2022	28 Desember 2021	11 Tahun 2021
2023	27 Desember 2022	16 Tahun 2022
2024	28 Desember 2023	11 Tahun 2023
2025	23 Desember 2024	18 Tahun 2024

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Gambaran capaian kinerja program pada urusan keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.176
Gambaran Urusan Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Sat	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	97,83	96,49	99,77	99,73	100
2	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100	100	100	100	100
3	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	0,57	0,86	100	42,86	100
4	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
5	Persentase realisasi keuangan	%	94,57	93,68	89,00	90,55	94,70
6	Persentase laporan keuangan perangkat	%	95,74	85,11	89,13	95,65	100

No	Indikator	Sat	2019	2020	2021	2022	2023
	daerah yang akuntabel						
7	Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95	81,55	84,52	100	100
9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,55	78,75	78,83	88,21	94,33
10	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,14	1,053	0,70	1,94	0,85
11	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
12	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100
13	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	98,91	100	103,54	98,74	101,47
14	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sejak Tahun 2022 Kabupaten Temanggung sudah menggunakan electronic- Analisis Standar Biaya (ASB) yang sudah terintegrasi dengan aplikasi perencanaan SIPD-Kemendagri terutama kegiatan fisik yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Electronic – Analisis Standar Biaya (e-ASB) membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan plafon anggaran menjadi lebih objektif, meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien untuk semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

Dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak lupa melibatkan stakeholder terkait dalam hal ini adalah masyarakat. Perencanaan yang baik tidak hanya yang bersifat top down melainkan juga bersifat *bottom up* untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat umum. Untuk mendukung perencanaan tersebut Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya termasuk dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam perbup tersebut menjelaskan bahwa Pengguna SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) terdiri dari Perangkat Daerah, Anggota DPRD, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

SIPD adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang memuat pengelolaan

informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Masyarakat melalui admin Daerah membuat “akun masyarakat” yang berwenang untuk menambah, merubah, dan menghapus usulan kegiatan dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu untuk mendukung keuangan yang transparan dan akuntabel pemerintah Kabupaten Temanggung telah membuat Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam Peraturan Bupati tersebut terdapat lampiran yang menjelaskan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang dapat masyarakat akses melalui internet melalui laman <https://ppid.temanggungkab.go.id/>.

Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak Tahun 2023 menurun dibanding Tahun disebabkan oleh sudah tidak dilaksanakannya pendataan massal PBB-P2 serta kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran objek baru PBB-P2. Selain itu petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas untuk melaksanakan pendataan objek pajak. Dan target jumlah pajak akan meningkat seiring dengan aktifitas perekonomian di masyarakat. Proporsi besaran silpa Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.177
Proporsi Besaran SILPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

No	Tahun	APBD	SILPA	%
1	2019	1.969.512.901.837	123.395.072.830	6,27
2	2020	1.955.541.334.850	162.448.209.105	8,31
3	2021	1.993.303.970.309	254.248.460.087	12,76
4	2022	2.163.271.983.090	180.406.907.044	8,33
5	2023	2.156.455.999.239	143.407.757.117	6,65
6	2024	2.202.443.373.410	99.533.115.228	4,52

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel tersebut menggambarkan pengelolaan keuangan dan program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan SILPA Kabupaten Temanggung yang sudah dibawah 30% setiap tahunnya.

3. Kepegawaian

Bidang kepegawaian diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.

1) Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.178
Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kualifikasi	10,34	10,82	11,907	12,39	20,98
2.	Kompetensi	11,48	9,15	9,343	12,73	13,6
3.	Kinerja	25,07	25,09	25	23,01	24,97
4.	Disiplin	4,95	4,97	4,997	5	5
TOTAL		51,74	50,03	51,247	53,13	64,55

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa meskipun masih tetap berada dalam kategori sangat redah namun terjadi peningkatan angka Indeks Profesionalitas ASN. Untuk mengetahui penyebab masih rendahnya angka Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung di Tahun 2023. Pencapaian skor dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 sebagaimana disajikan tabel berikut.

Tabel 2.179
Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2023 Dibandingkan dengan
Persentase Pengukuran

Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan pembulatan)
Kualifikasi	25% (0,25)	20,98	83,92%
Kompetensi	40% (0,40)	13,60	34%
Kinerja	30% (0,30)	24,97	83,23%
Disiplin	5% (0,05)	5	100%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pencapaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terlihat bahwa pencapaian skor paling rendah terlihat pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 34%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 Indeks Profesionalitas sebesar 64,55 lebih tinggi dari target yang direncanakan yaitu 50,09. Nilai IP ASN yang melebihi target tersebut disebabkan oleh sudah terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai (P2KP) dan data

kompetensi pegawai (sertifikat diklat) yang merupakan bagian dari dimensi penilaian IP ASN.

2) Indeks Sistem Merit

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi sipinter yang dilakukan setiap tahun di akhir tahun. Hasil indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit. Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor, Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN, Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi riil sub aspek pada tiap-tiap instansi, Hasil Pengukuran mandiri penilaian Sistem Merit yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.180
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penilaian Sistem Merit	n.a	218	113	200	258
2.	Indeks Sistem Merit	n.a	0,52	0,259	0,482	0,62

Sumber : Download Aplikasi sipinter, *=Penilaian mandiri

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil penilaian atau skor indeks sistem merit pada tahun 2021 sangat jauh menurun capaian skornya dibandingkan capaian Tahun 2020. Hal ini disebabkan pada Tahun 2020 penilaian Sistem Merit dilakukan secara mandiri lewat aplikasi **Sipinter**, namun penilaian mandiri yang kita laksanakan belum mendapatkan verifikasi atau penilaian dari KASN.

Pada tahun 2023 capaian kinerja sasaran indeks sistem merit menggunakan hasil penilaian sistem merit dari KASN, dengan nilai yang diperoleh sebesar 258 atau indeks sebesar 0,62 dan kategori Baik.

Nilai Indeks Merit Sistem Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 berdasarkan penilaian KASN pada setiap aspek diantaranya yaitu pada aspek Perencanaan Kebutuhan mendapat nilai 37,5, aspek Pengadaan mendapat nilai 40, aspek Pengembangan Karier mendapat nilai 45, aspek Promosi dan Mutasimen dapat nilai 30, aspek Manajemen Kinerja mendapat nilai 50, aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin mendapat nilai 27,5, aspek Perlindungan dan Pelayanan mendapat nilai 12, aspek

Sistem Informasi mendapat nilai 16, sehingga total dari keseluruhan aspek berjumlah 258 poin.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang Memenuhi Kompetensi Diklat Kepemimpinan. Caapaian kinerja penjabat yang telah lulus diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.181
Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan sesuai Jenjang Jabatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pejabat yang telah lulus diklat PIM	240	169	157	141	177
2	Jumlah pejabat	633	624	626	481	482
3	Persentase pejabat yang memenuhi kompetensi diklat PIM (%)	37,91	27,08	25,08	30,13	36,72

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase jumlah pejabat yang telah lulus diklat kepemimpinan sampai dengan Tahun 2023 tercapai 36,72% lebih dari target tahun ini sebesar 35%, capaian tersebut merupakan capaian akhir Tahun 2023. Pencapaian target indikator ini dari Tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif baik dari jumlah pejabat maupun dari jumlah pejabat yang mengikuti diklat. Jumlah pejabat mengalami perubahan naik atau turun setiap tahun dikarenakan antara lain adanya perubahan SOTK, adanya mutasi dan pensiun pejabat serta kebijakan pengisian jabatan yang kosong.

Sementara itu, untuk jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan mengalami penurunan di Tahun 2020-2023 dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal ini antara lain disebabkan pertama, ketersediaan anggaran yang berbeda dan fluktuatif dari tahun ke tahun, selain itu adanya keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial (BPSDMD Provinsi Jawa Tengah) serta karena adanya proses manajemen kepegawaian yaitu adanya pejabat yang pensiun, promosi maupun mutasi, promosi jabatan berdampak pada pengurangan jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan (pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada eselon sebelumnya tidak ikut dihitung lagi jika yang bersangkutan promosi ke eselon yang lebih tinggi) dan penambahan jumlah pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan (pejabat baru yang promosi ke eselon lebih tinggi).

- 2) Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Diklat Teknis dan Fungsional
- Pada Tahun 2021 pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri dilaksanakan secara kolaborasi antar perangkat daerah (Bintek Smart City). Capaian kinerja pejabat yang telah lulus diklat teknis/fungsional sesuai jenjang jabatan Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.182
Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Teknis/Fungsional
Sesuai Jenjang Jabatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	325	462	861	1,047	1.878
2	Jumlah PNS	6,670	6,280	5,910	6,347	59.298
3	Persentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	4,87	7,36	14,57	16,50	31,67

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase jumlah pejabat yang telah lulus diklat teknis/fungsional Tahun 2023 tercapai 31,67% lebih dari target tahun ini sebesar 18%. Pencapaian ini sebagian besar karena adanya MOOC dan didukung dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu dilaksanakannya bimtek smart city Tahun 2021 secara mandiri dengan kolaborasi antar perangkat daerah.

5. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota, sehingga Bappeda juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung yang berbasis kelitbangan sesuai Perbub yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan

kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten, oleh sebab itu salah satu indikator kinerja program yang dibebankan kepada bidang litbang adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian hasil dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.183
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Pengkajian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemanfaatan hasil kelitbangan	19	3	6	8	1
2	Jumlah hasil kelitbangan	10	3	6	8	1
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan Laporan Akhir Analisis Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, bahwa jumlah hasil penelitian dan pengkajian di Kabupaten Temanggung meliputi 1 indeks yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks tersebut dimanfaatkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung target RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan dan kelitbangan daerah mampu mengarahkan stakeholder untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan daerah dengan berdasar hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada.

2) Persentase hasil Krenova yang dikembangkan

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menumbuhkembangkan inovasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, menciptakan iklim kondusif di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Kabupaten/Kota. Upaya menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak Tahun 2012. Selanjutnya upaya dan langkah-langkah pengembangan dan stimulasi kepada para inventor/inovator dilaksanakan melalui : (a) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; (b) Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada masyarakat luas agar bermanfaat dalam

bentuk penyertaan Pameran; (c) Pelatihan hilirisasi teknologi / inkubator bisnis; (d) Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari Kemenristekdikti. Capaian kinerja hasil Krenova yang dikembangkan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.184
Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan dKabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Krenova yang dikembangkan	4	5	10	10	16
2	Hasil Krenova terjaring	6	5	10	10	16
3	Persentase	66,67	100	100	100	100

Sumber :Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Persentase Inovasi Daerah yang dikembangkan pada Tahun 2023 sebanyak 16 inovasi. Inovasi tersebut didefinisikan sebagai inovasi yang memiliki keunggulan, spesifikasi khusus yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan, serta memiliki dampak yang luas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,16 inovasi tersebut meliputi :

- 1) Inventor MASKUPIS “ Masker Kulit Pisang”
- 2) Inventor Dessert “PUPPI” Puding Pelepah Pisang Alternatif Pengobatan Anemia Defisiensi Besi (PUTIK "puding cantik")
- 3) Inventor Mentelsi " Permen telang penurunan hipertensi "
- 4) Inventor Siwangi Bumbon Pawon (Inovasi Bawang Merah dari Biji) (SMK N 1 Temanggung)
- 5) Inventor Pengembangan Alat Peraga Palabil Pecahan Berbantuan Aplikasi Java dalam Pemahaman Konsep Dan Operasi Hitung Pecahan di Sekolah Dasar (Choirul Azizah)
- 6) Inventor Implementasi Lipan Penta untuk Meningkatkan Hasil Belajar Murid Materi Pengolahan Data Melalui Penerapan Pembelajaran Realistic Mathematics Education di Sekolah Dasar (Choirul Azizah)
- 7) Inventor Metode Agapie untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung (Choirul Azizah)
- 8) Inventor Pesawat Swayasa Aerotek XI (Aerotek)
- 9) Inventor Pemanfaatan Bunga Putri Malu Carmyosa (SMP N 2 Kedu)
- 10) Inventor Wayang Kardus Pada Komunitas Dongeng Kuy: Aksi Gen Z Melestarikan Budaya Dongeng Sebagai Transformasi Nasionalisme Sejak Dini di Era Digital yang Ramah Anak dan Lingkungan (Sovi Puji

Utami)

- 11) Inventor Molen Listrik (Baryono)
- 12) Inventor Creative Ice Cream Ginger Lime (Tim Kedai Citiis)
- 13) Inventor Traktor Amfibi (SMA N Candirotto)
- 14) Inventor Pemanfaatan Sel Surya Untuk Cadangan Listrik (SMA N Candirotto)
- 15) Inventor Agridaya Smart Farm Inovasi Teknologi Pengairan, Pengelolaan Hama dan Pemupukan Modern sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian Kabupaten Temanggung
- 16) Inventor Sobat Bima (DPUPR Temanggung)

Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2012 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas, Jumlah peserta cenderung naik setiap tahun, berkat berbagai upaya sosialisasi dan publikasi ke berbagai sekolah, media elektronik, sosial media maupun lewat koordinasi dengan para P3MD (pendamping desa) sebagai pihak yang diharapkan dapat menjaring karya-karya inovasi di tingkat desa, Selanjutnya para pemenang KRENOVA dikirim ke lomba Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa penghargaan yang di raih Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemenang krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- a) Mesin Perajang Rumput dan Pembuat Ceriping pemenang harapan Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
- b) Antiseptik Daun Jambu (*Guava Leaf Antiseptic*) pemenang harapan Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, serta mendapatkan hibah pendanaan dari Kemenristekdikti melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);
- c) Mesin Sangan Kopi juara utama Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, hibah pendanaan dari Kemenristekdikti melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);
- d) Inovasi Pewarna Alam Shibiru menjadi Juara Dua lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- e) Minyak Kopi Terapi Herbal untuk Kesehatan menjadi pemenang utama peringkat 9 Lomba Kreativitas dan inovasi masyarakat (Krenova) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

- f) Ijuk Ukir Ranjau Binatang pemenang Harapan 4 Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Inspektorat Daerah

1) Indeks Persepsi Anti Korupsi

Capaian kinerja pada nilai indeks persepsi anti korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.185
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,92	3,92	3,61	4,06	4,06

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2024

Pada Tahun 2023 hasil penilaian IPAK Kabupaten Temanggung dari Kementerian PAN dan RB adalah 4,06. Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai IPAK Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, tanggal 6 Desember 2022 mencapai 81,22 turun 4,71 dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2021. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,061(nilai konversi) turun 0,239 dari tahun lalu. Namun demikian target nilai 3,95 pada Tahun 2023 sudah tercapai.

2) Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian kinerja level penilaian SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.186
Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Level SPIP	3,045	3,045	3,045	3,008	3,000

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2024

Level SPIP Tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, meskipun masih berada pada level 3 dengan ketogori terdefinisi. Adapun kenaikan dan penurunan nilai SPIP disajikan pada tabel

Tabel 2.187
Persandingan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi
Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023

No	Komponen Penilaian	Skor		+/-
		2022	2023	
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,008	3,000	0,008
2	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,797	2,934	0,137
3	Nilai Indeks Efektivitas pengendalian Korupsi (IEPK)	2,920	2.910	0,010

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian baseline pelaksanaan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, nilai maturitas SPIP Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai 3,000. Terdapat penurunan nilai dari sebelumnya yaitu 3,008. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan baru dengan skala nilai dan parameter yang berbedatercantum dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalain Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian program pada urusan pengawasan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.188
Gambaran Urusan Pengawasan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	n.a	35,21	80,28	95,77
3	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	n.a	n.a	12,37	38,17	49,82
4	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	n.a	n.a	15,46	91,17	98,11
5	Nilai maturitas SPIP	Angka	3,045	3,045	3,045	3,008	3,000
6	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	40	100	100	100
7	Persentase Tindak Lanjut Aduan <i>Whistle Blowing</i> , Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
8	Nilai Survey Penilaian Integritas	%	n.a	n.a	78,70	77,37	77,37
9	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n.a	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dalam melaksanakan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu Laporan Kinerja, Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (semua perangkat daerah), Reviu LPPD, Reviu Renja dan RKPD, RPJMD dan Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.189
Rekapitulasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	LHE	LKE	Nilai AKIP 2022	Nilai AKIP 2023	Predikat Tahun 2023
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	V	V	80,07	82,45	A
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	V	73,45	74,00	BB
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	V	70,52	73,25	BB
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	V	V	72,20	72,70	BB
5	Setda Temanggung (Bagian Umum)	V	V	69,20	72,10	B
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	V	68,07	71,40	B
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	V	V	67,25	70,85	B
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	V	V	68,59	70,75	B
9	Dinas Kesehatan	V	V	75,20	70,20	BB
10	Sekretariat DPRD	V	V	64,95	69,85	B
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V	V	67,93	69,35	B
12	Kecamatan Kedu	V	V	68,18	69,25	B
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V	V	64,25	69,15	B
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	V	V	67,28	69,10	B
15	Dinas Sosial	V	V	66,96	68,90	B
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	V	V	63,54	68,75	B
17	Dinas Penanaman Modal	V	V	67,91	68,65	B
18	Kecamatan Parakan	V	V	62,86	68,60	B
19	Kecamatan Wonoboyo	V	V	73,66	68,60	BB
20	Kecamatan Pringsurat	V	V	61,01	68,55	B
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	V	V	64,47	68,45	B
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V	V	65,81	68,10	B
23	Kecamatan Bulu	V	V	65,42	68,20	B
24	Kecamatan Kaloran	V	V	63,54	68,15	B
25	Kecamatan Kledung	V	V	69,28	67,85	B
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V	V	63,87	67,70	B
27	Kecamatan Gemawang	V	V	65,61	67,70	B
28	Kecamatan Kandangan	V	V	61,32	67,10	B
29	Kecamatan Bejen	V	V	62,97	67,10	B
30	Kecamatan Selopampang	V	V	65,47	67,05	B
31	Kecamatan Jumo	V	V	66,28	66,95	B
32	Kecamatan Tretep	V	V	63,36	65,75	B

No.	Perangkat Daerah	LHE	LKE	Nilai AKIP 2022	Nilai AKIP 2023	Predikat Tahun 2023
33	Kecamatan Bansari	V	V	65,25	65,15	B
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	V	69,82	69,91	B
35	Dinas Perhubungan	V	V	64,25	70,50	B
36	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	V	V	66,92	67,18	B
37	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	V	V	68,78	69,10	B
38	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	V	V	66,93	70,75	B
39	Inspektorat	V	V	70,22	73,20	BB
40	Kecamatan Temanggung	V	V	63,21	64,98	B
41	Kecamatan Tembarak	V	V	61,18	65,58	B
42	Kecamatan Candirototo	V	V	65,96	66,60	B
43	Kecamatan Ngadirejo	V	V	66,30	66,80	B
44	Kecamatan Kranggan	V	V	65,47	67,35	B
45	Kecamatan Tlogomulyo	V	V	63,09	65,58	B
46	RSUD	V	V	65,47	67,95	B

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel tersebut nilai AKIP Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 rata-rata mendapatkan nilai B (Baik).

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Fungsi Kecamatan

- 1) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
- Capaian kinerja pada Indeks Kepuasan Masyarakat 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.190
Capaian Rata-Rata IKM pada 20 Kecamatan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	81,68	82,58	85,20	85,32	85,98
2	Tembarak	84,33	84,83	85,75	87,50	88,01
3	Pringsurat	82,66	82,58	83,00	76,67	85,78
4	Kaloran	82,66	82,58	83,00	83,50	98,96
5	Parakan	71,83	85,97	81,02	81,02	84,05
6	Bulu	82,90	82,53	84,90	86,70	86,88
7	Kedu	81,00	83,00	88,39	89,52	88,70
8	Kandangan	82,66	82,58	85,97	84,41	86,97
9	Candirototo	71,83	81,25	87,38	84,87	84,28
10	Ngadirejo	85,11	81,08	88,40	89,32	85,99
11	Jumo	81,08	90,52	90,52	85,75	85,75
12	Wonoboyo	84,00	84,19	84,22	84,44	84,44
13	Kranggan	71,83	71,83	83,07	84,38	82,54
14	Bejen	71,83	78,19	84,08	85,50	86,20
15	Kledung	n,a	79,95	81,46	82,50	82,55
16	Bansari	n,a	82,95	79,91	82,00	84,22
17	Tlogomulyo	79,53	83,06	83,06	83,84	84,76
18	Selopampang	n,a	82,41	80,71	87,49	87,49
19	Gemawang	n,a	81,50	82,33	83,50	84,04
20	Tretep	71,83	83,47	83,47	83,99	85,30

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Kecamatan Kedu, Candirototo dan Ngadirejo capaiannya menurun dibanding tahun sebelumnya karena sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan terbatas sehingga masyarakat menilai lebih rendah dari tahun sebelumnya

- 2) Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan

Capaian kinerja pada kepemilikan KTP-EL 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.191
Capaian Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	99,90	102,91	96,69	100,52	99,90
2	Tembarak	99,41	99,34	99,56	98,63	102,85
3	Pringsurat	97,24	95,63	99,72	99,68	102,78
4	Kaloran	99,36	99,34	98,11	99,64	103,83
5	Parakan	105,79	101,13	97,56	97,56	102,96
6	Bulu	98,90	99,76	96,48	100,12	103,03
7	Kedu	94,28	99,41	99,68	96,80	100,54
8	Kandangan	96,73	95,31	99,76	98,86	105,23
9	Candiroto	103,43	104,84	96,96	100,43	102,47
10	Ngadirejo	100,41	100,40	98,32	98,79	103,93
11	Jumo	100,76	100,13	97,77	100,95	103,58
12	Wonoboyo	95,84	99,24	99,57	99,20	104,20
13	Kranggan	101,77	100,72	97,40	101,38	103,78
14	Bejen	89,94	99,38	99,48	99,45	100
15	Kledung	102,02	104,06	98,09	100,47	102,59
16	Bansari	97,83	99,70	99,78	98,81	100
17	Tlogomulyo	98,85	96,01	99,72	98,80	104,03
18	Selopampang	96,83	96,28	99,61	98,76	102,94
19	Gemawang	98,21	100,26	97,14	100,50	103,63
20	Tretep	95,00	100,16	100,57	97,02	103,13

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Persentase kepemilikan KTP El di Kecamatan Temanggung pada Tahun 2023 lebih rendah dari Tahun 2022 karena kurangnya kesadaran masyarakat akan tertibnya administrasi kependudukan.

3) Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Capaian kinerja pada Realisasi penerimaan PBB 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.192
Capaian Persentase Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	93,22	93,89	93,44	93,14	91,93
2	Tembarak	100	100	100	99,96	99,85
3	Pringsurat	99,24	96,98	99,67	96,47	98,19
4	Kaloran	100	100	96,68	99,09	100
5	Parakan	97,73	91,49	97,89	97,37	98,43
6	Bulu	100	100	100	100	97,58
7	Kedu	97,32	100	100	100	99,53
8	Kandangan	100	100	99,10	95,77	96,35
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	97,69	100	99,23	98,28
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	97,63	95,63	96,93	95,39	93,63
14	Bejen	100	100	100	100	99,89
15	Kledung	100	100	100	97,92	100

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Pada Tahun 2023 realisasi penerimaan PBB di beberapa Kecamatan menurun dari tahun sebelumnya karena ada sebagian wajib pajak yang berdomisili diluar kecamatan sehingga menghambat dalam penagihan. SPT (identitas WP) yang tidak jelas karena sertifikat masih menjadi tanggungan pengembang perumahan. Selain itu di beberapa perumahan terdapat SPT yang alamatnya tidak jelas, sehingga sulit dilacak.

- 4) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
- Capaian kinerja pada jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.193
Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa
Tepat Waktu Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	100	66,67	100	100	100
2	Tembarak	100	84,62	100	100	100
3	Pringsurat	7,14	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	84,00	100	100	100	100
7	Kedu	0	100	100	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	100
9	Candiroto	100	71,43	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	92,31	100	100	100	100
13	Kranggan	100	91,67	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	92,31	100	100
16	Bansari	0	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	75,00	91,67	100	100
18	Selopampang	16,67	83,33	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Pada Tahun 2023 capaian kinerja pada indikator jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu 20 kecamatan tercapai 100%.

- 5) Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak
- Capaian kinerja pada sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak 4 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.194
Capaian Sarpras Lokal Kelurahan Kondisi Layak Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	73,42	54,49	68,69	65,48	85,45
2	Parakan	86,30	90,79	90,79	90,79	90,79
3	Ngadirejo	100	100	100	100	100
4	Kranggan	100	100	85,71	90,14	97,18

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Capaian kinerja 4 kecamatan pada indikator persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak Tahun 2019-2023 meningkat hal disebabkan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah pada pembangunan sarpras lokal kelurahan.

6) Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif

Capaian kinerja pada lembaga mesyarakat kelurahan yang aktif 4 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.195
Capaian Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	100	100	93,37	92,49	100
2	Parakan	99,00	99,26	98,73	98,73	100
3	Ngadirejo	100	100	100	100	100
4	Kranggan	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Capaian kinerja pada 4 kecamatan Tahun 2023 tercapai 100% disebabkan adanya hubungan yang harmonis antar pemerintah, lembaga dan masyarakat dan penambahan insetif dari dana kelembagaan.

7) Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Capaian kinerja pada penanganan laporan kejadian 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.196
Capaian Penanganan Laporan Kejadian Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	100	100	95,24	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	100	100	100	100	100
8	Kandangan	0	100	100	100	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	n,a	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	90,91	100	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	n,a	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	0	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Capaian kinerja pada 20 kecataman Tahun 2023 tercapai 100% disebabkan sudah dibentuknya desa tangguh bencana disemua kecamatan.

8) Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik

Capaian kinerja pada tempat ibadah kondisi baik 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.197
Capaian Tempat Ibadah Kondisi Baik Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	94,33	95,02	90,32	90,43	90,43
2	Tembarak	74,42	74,42	86,90	93,15	94,52
3	Pringsurat	97,14	96,85	96,85	96,85	100
4	Kaloran	100	96,53	96,53	96,53	100
5	Parakan	94,24	97,41	100	100	100
6	Bulu	93,06	85,44	85,44	85,44	85,44
7	Kedu	92,05	92,79	91,95	94,92	94,92
8	Kandangan	55,10	90,20	87,34	87,35	87,35
9	Candiroto	97,69	97,69	87,71	87,71	87,71
10	Ngadirejo	99,13	98,71	98,73	98,73	100
11	Jumo	93,70	98,03	98,03	98,03	98,03
12	Wonoboyo	98,55	99,28	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	87,04	85,45	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	83,33	83,33	100	100	100
17	Tlogomulyo	90,91	94,37	94,37	94,37	94,37
18	Selopampang	71,58	80,68	80,68	80,68	80,68
19	Gemawang	84,15	84,15	100	100	100
20	Tretep	100	92,47	92,47	93,15	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Capaian kinerja dari 20 kecataman pada Tahun 2023 tercapai 100% ada 11 kecamatan disebabkan adanya swadaya masyarakat untuk pemeliharaan tempat Ibadah dan aktifnya kepengurusan tempat ibadah.

9) Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan

Capaian kinerja pada pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.198
Capaian Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	0	0	0	0	0
2	Tembarak	0,63	0,63	0	0,60	0
3	Pringsurat	0	0	0	0	0
4	Kaloran	0	0	0	0	0
5	Parakan	0	0	0	0	0
6	Bulu	0	0,4	0	0	0
7	Kedu	0	0	0	1,38	0
8	Kandangan	0	0,48	0	0	0
9	Candiroto	0	0	0	0	0
10	Ngadirejo	0	0	0	0	0
11	Jumo	0	1,30	0	0	0

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
12	Wonobojo	0,76	0	0,68	0	0
13	Kranggan	0	0	0,51	0	0
14	Bejen	0,65	0,65	0	0	0
15	Kledung	0,72	0	0	0	0
16	Bansari	0	2,92	0	0	0
17	Tlogomulyo	0	0,71	0	0	0
18	Selopampang	0	0	0	0	0
19	Gemawang	0	0	0	0	0
20	Tretep	0	0	0	0	0

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Capaian kinerja pada indikator pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan di 20 kecataman Tahun 2023 tercapai 0 pelanggaran atau tercapai 100% disebabkan kesadaran yang tinggi kapala desa dan perangkat dan didukung adanya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa dan adanya penegakan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

10) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu

Capaian kinerja pada jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.199
Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	100	100	100	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	0	100	100	100	100
7	Kedu	50	100	100	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonobojo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	91,67	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Capaian kinerja pada persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu 20 kecataman pada Tahun 2023 tercapai 100%, hal ini disebabkan adanya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan

Capaian kinerja persentase sekolah yang medapatkan pemahaman kebangsaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.200
Capaian Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	0	0	0	52	56
2	Jumlah keseluruhan sekolah yang ada	80	80	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	0	0	0	65	70

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2019-2021 belum dilaksanakan kegiatan pada tingkat sekolah dikarenakan fokus pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa. Pada Tahun 2022 dan 2023 telah dilaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah dan diikuti oleh pelajar SMP dari 50 SMP di Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan di Gedung Juang, SMP 2 Temanggung dan di SMP 1 Tlogomulyo sehingga tercapai 70% melebihi target RPJMD Tahun 2023 sebesar 62%.

2. Cakupan Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan.

Capaian kinerja pada desa/kelurahan yang mendapatkan pemahamam wawasan kebangsaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.201
Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	3	0	14	169	230
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	1,03	0	4,8	58,48	79,58

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2020 tidak ada sosialisasi wawasan kebangsaan di desa/kelurahan karena anggaran di refocusing. Kegiatan dilaksanakan kembali pada Tahun 2023 di 230 kelurahan/desa di Kecamatan Temanggung dengan persentase capaian 79,58% lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Cakupan Terbentuknya FKUB di Kecamatan

Capaian kinerja pada cakupan terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.202
Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah FKUB di kecamatan	0	0	0	20	20
2	Jumlah kecamatan di kab, Temanggung	20	20	20	20	20
3	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%)	0	0	0	100	100

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di kecamatan hanya dilakukan 1 kali di masing-masing kecamatan pada Tahun 2022 sehingga pada Tahun 2023 tercapai sebesar 100%.

4. Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Capaian kinerja pada persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.203
Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	1	183	106	32	230
2	Jumlah keseluruhan Desa / Kelurahan yang ada	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0,35	63,32	36,68	11,1	79,58

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2023 capaian kinerja sebesar 79,58% lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sosialisasi pencegahan narkoba dilaksanakan dengan kegiatan Deklarasi Anti Narkoba kepada seluruh jajaran Kepala Desa di Kabupaten Temanggung, Sosialisasi dilaksanakan di Desa Ngropoh Kranggan dan Menggoro Tembarak.

5. Cakupan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Temanggung. Jumlah Sekolah yang menjadi target pembinaan adalah 80 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta. Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.204
Persentase jumlah sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0	0	0	30	56
2	Jumlah sekolah yang ada	80	80	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0	0	0	38	70

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 70% lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 38%. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi Anti Narkoba dengan melibatkan Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas serta Kejuruan. Ada 29 Sekolah Menengah Pertama yang mengikuti sosialisasi pada bulan April, Kemudian pada bulan Mei dilaksanakan Sosialisasi Anti Narkoba di Tuk Budoyo pada 10 Sekolah Menengah Atas.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Dalam rangka mendorong Pemetaan Daya Saing Nasional dan peningkatan daya saing daerah, ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat perlu untuk dipahami oleh Pemerintah Daerah terkait dengan kondisi daya saing pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Daya daing ini dapat dimanfaatkan sebagai instrument evaluasi dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada daya saing.

Pengukuran aspek daya saing daerah melalui pengukuran Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kabupaten Temanggung yang didasarkan pada empat aspek yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek pasar/*market*, aspek sumber daya manusia/*human capital*, dan aspek penguat/*enabling environment*.

Berdasarkan hasil pengukuran daya saing daerah, progres capaian Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020

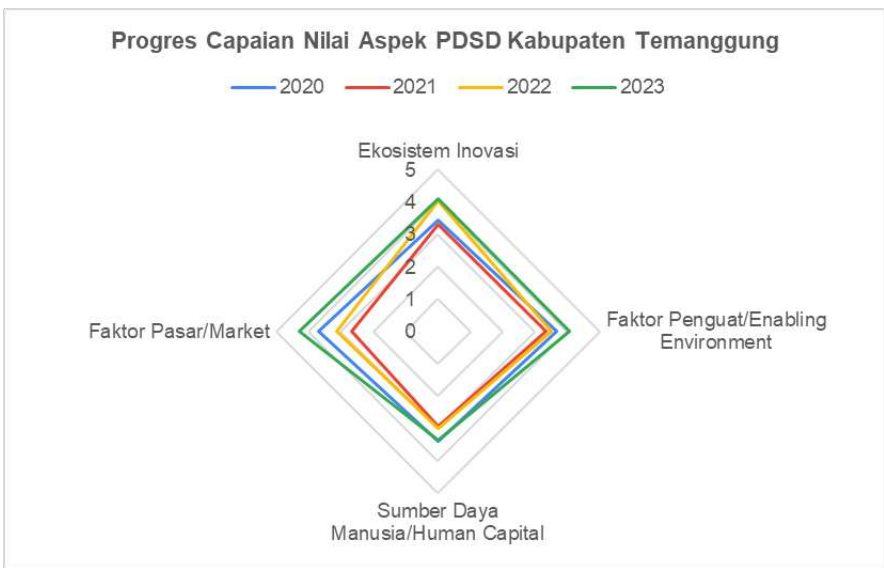
sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Laporan PDSD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.29
Progres Nilai PDSD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan gambar diatas, pada Tahun 2020 nilai PDSD Kabupaten Temanggung 3,553 dan nilainya turun pada Tahun 2021 karena dampak Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor khususnya aspek pasar. Selanjutnya pada Tahun 2022 dan 2023 capaian nilai PDSD Kabupaten Temanggung kembali meningkat dimana Tahun 2023 nilai PDSD mencapai 3,952 dengan progres kenaikan sebesar 11,22% dibandingkan Tahun 2020. Progres capaian nilai aspek PDSD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Laporan PDSD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.30
Progres Nilai Aspek PDSD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023

Berdasarkan gambar di atas, progres capaian berdasarkan aspek dalam kurun waktu Tahun 2020-2023 aspek pasar merupakan aspek yang memiliki fluktuasi progres yang cukup besar dibanding aspek lainnya

dengan progress sebesar 15,74%. Pada Tahun 2021, capaian aspek pasar mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Setelah Tahun 2021, capaian aspek pasar terus meningkat hingga pada Tahun 2023 dapat melampaui capaian pada Tahun 2020. Namun secara keseluruhan, setiap aspek mengalami peningkatan dan menunjukkan progres yang semakin membaik.

Meningkatnya capaian nilai PDSD pada Tahun 2023 dipengaruhi sejumlah faktor. Peningkatan daya saing Kabupaten Temanggung dilihat dari komponen aspek menunjukkan bahwa aspek pasar merupakan aspek yang berkontribusi paling besar dalam peningkatan capaian PDSD. Aspek pasar memiliki progres paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa produk-produk industri semakin kompetitif, hal ini dapat dilihat semakin menguatnya pola kemitraan di antara perusahaan maupun membaiknya kelembagaan baik pelaku usaha pertanian, asosiasi pedagang dan UMKM. Selain itu, semakin terbukanya akses keuangan bagi dunia usaha maupun UMKM menjadikan aspek pasar menjadi pengungkit daya saing Kabupaten Temanggung. Apabila dilihat dari stabilitas pasar juga didukung oleh regulasi Pemda yang mendorong efisiensi pasar serta menekan laju inflasi daerah (terdapat regulasi ≥ 16 sektor usaha). Berdasarkan data dari pengukuran daya saing, ukuran pasar Kabupaten Temanggung meningkat didukung oleh pesatnya pertumbuhan nilai ekspor. Aspek pasar sendiri juga didukung oleh kondisi tenaga kerja usia produktif dan terdidik yang bergerak aktif dalam angkatan kerja yang tersebar di antara banyak instansi/lembaga maupun perusahaan.

Beberapa indikator yang dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah selain ditunjukkan dengan nilai PDSD diatas antara lain:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tiap Bulan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi banyaknya jumlah anggota rumah tangga, Angka konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.205
Angka Konsumsi Rumah Tangga Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	15.585,59	15.586,21	16.168,80	17.669,40	19.401,68

Sumber: Temanggung Dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah

Pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah.

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk, Pengeluaran dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (sandang, papan, kesehatan, pendidikan). Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Temanggung selama dua tahun terakhir hampir sama. Konsumsi non makanan relatif lebih banyak dibanding konsumsi makanan, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung semakin baik.

Distribusi persentase pengeluaran penduduk Kabupaten Temanggung menurut kelompok bahan makanan dan non bahan makanan disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.206
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Bahan Makanan dan Non Bahan Makanan Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Non Makanan	51,70	52,69	51,38	52,56	51,02
Makanan	48,30	47,31	48,62	47,44	48,98

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

2. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 1,05 Km untuk setiap 1,000 kendaraan bermotor. Sampai pada Tahun 2023, ketersediaan prasarana jalan di Kabupaten Temanggung memadai sehingga dapat menunjang aktivitas lalu lintas kendaraan di Kabupaten Temanggung. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.207

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 Triwulan IV					
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan (Km)	650,467	650,467	650,467	650,467	650,467
Jumlah kendaraan (unit)	618	618	616	614	613
Ratio (Km/1000 kendaraan)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

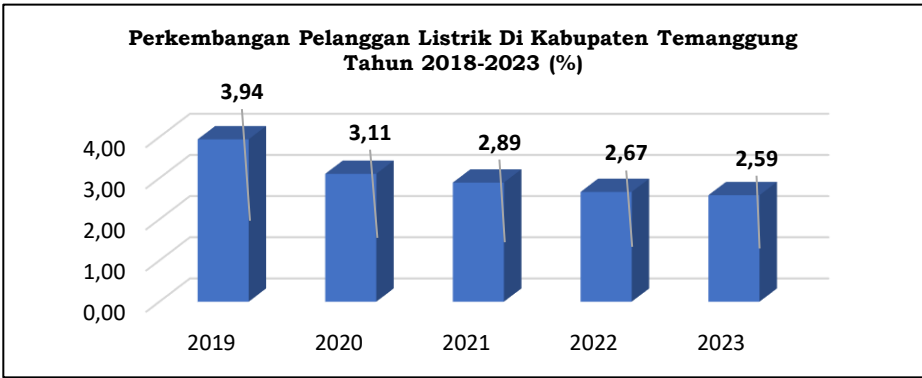
3. Perkembangan Pelanggan Listrik

Jumlah pelanggan listrik adalah banyaknya pelanggan di suatu daerah yang memakai fasilitas listrik, Data yang digunakan adalah data pelanggan PLN di Kabupaten Temanggung. Perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah pelanggan listrik di Tahun 2022 mencapai 240.996 pelanggan, sedangkan pada Tahun 2023 jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung meningkat menjadi 247.229 pelanggan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.208 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023					
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan	221.265	228.137	234.737	240.996	247.229

Sumber: Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

Perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.31
Perkembangan Pelanggan Listrik Di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

4. Perkembangan Hotel

Kabupaten Temanggung dengan sumber daya alamnya yang menonjol dapat menjadi modal untuk pengembangan pariwisata. Dukungan infrastruktur yang mendukung obyek wisata terutama adalah jasa akomodasi. Perkembangan hotel di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sejak tahun 2019, Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah bahwa hingga saat ini terdapat 17 hotel yang terdiri

dari 15 (lima belas) hotel non bintang dan 2 (dua) hotel bintang. Peningkatan jumlah hotel di Kabupaten Temanggung memberikan efek positif, diantaranya menampung tenaga kerja sekitar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan kemajuan industri pariwisata. Jumlah hotel di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disejikan pada tabel berikut.

Tabel 2.209
Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Hotel	14	17	17	17	17

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2024

5. Angka Kriminalitas

Berikut ini disajikan perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Tabel 2.210
Perkembangan Angka Kriminalitas Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus Narkoba	22	27	26	33	29
2	Jumlah kasus Pembunuhan	1	3	2	2	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	0	6	10	6	7
4	Jumlah kasus Penganiayaan	0	17	0	6	13
5	Jumlah kasus Pencurian	40	62	30	28	34
6	Jumlah kasus Penipuan	0	4	10	9	11
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	3	1	1	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal	66	127	79	84	98
9	Jumlah Penduduk	791,26	795,55	800,27	807,44	864,83
10	Angka Kriminalitas (%)	8,34	15,96	9,87	10,48	10,87

Sumber: Polres Temanggung, BNN, 2024

Angka Kriminalitas Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 fluktuatif paling rendah pada Tahun 2019 sebesar 8,34%. Pada Tahun 2023 capaian sebesar 10,87% didonimasi oleh kasus pencurian, persentase Tahun 2023 lebih besar dibandingkan Tahun 2022. Untuk meningkatkan keamanan di Kabupaten Temanggung perlu ditingkatkan kerjasama multi pihak semakin rendah angka kriminalitas, maka tingkat keamanan di Kabupaten Temanggung semakin baik, dengan demikian mendorong iklim berinvestasi yang kondusif di Kabupaten Temanggung.

6. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

a. Pajak Daerah

Berikut merupakan jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Temanggung:

- 1) Pajak hotel;

- 2) Pajak restoran dan sejenisnya;
- 3) Pajak rumah makan dan sejenisnya;
- 4) Pajak kantin dan sejenisnya;
- 5) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya;
- 6) Pajak permainan billiar dan bowling;
- 7) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- 8) Pajak reklame kain;
- 9) Pajak reklame selebaran;
- 10) Pajak penerangan jalan sumber lain;
- 11) Pajak parkir;
- 12) Pajak air tanah;
- 13) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- 14) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

b. Retribusi Daerah

Berikut merupakan jenis retribusi daerah di Kabupaten Temanggung:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat;
- 4) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 5) Retribusi Pelataran ;
- 6) Retribusi Kios;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- 9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 10) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
- 11) Retribusi Penyewaan Bangunan;
- 12) Retribusi Pemakaian Ruangan;
- 13) Retribusi Pemakaian Alat;
- 14) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan;
- 15) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
- 16) Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal;
- 17) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
- 18) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan;

- 19) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan;
- 20) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- 21) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- 22) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar Rp 47.887.604.813 naik menjadi Rp52,832,020,942,00 di tahun 2021 Pajak daerah didominasi oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan, Sedangkan retribusi daerah tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dimana penerimaan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp16,189,001,249,00 dan terendah di tahun 2020 sebesar Rp8,436,170,882,00. Retribusi terbanyak pada retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar. Adapun Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Kabupaten Temanggung disajikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.211
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1)	Pajak Daerah	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.020.942	58.425.439.009	74.947.290.400
	Pajak Hotel	253.504.852	170.636.594	165.229.973	160.983.816	220.000.000
	Pajak Restoran	1.873.169.859	1.916.160.155	2.125.018.457	1.651.644.422	2.432.290.400
	Pajak Hiburan	131.081.750	39.936.150	14.158.750	78.310.150	75.000.000
	Pajak Reklame	542.925.078	519.430.836	832.726.326	515.450.117	750.000.000
	Pajak Penerangan Jalan	17.577.126.015	15.932.617.325	17.219.779.238	15.727.797.110	21.000.000.000
	Pajak BPHTB	19.014.475.009	16.156.615.814	16.472.087.860	15.938.739.936	24.000.000.000
	Pajak Air Tanah	188.164.850	272.188.236	311.626.105	259.907.791	320.000.000
	Pajak Parkir	112.142.925	114.054.600	101.799.300	94.690.933	150.000.000
	Pajak Bumi dan Bangunan	13.597.151.854	12.765.965.103	15.589.594.933	23.997.914.734	26.000.000.000
	Tungakan Pajak PBB	134.351.854	-	-	-	-
2)	Retribusi Daerah	16.189.001.249	8.436.170.882	9.400.033.763	6.827.327.510	10.849.288.000
	Retribusi Jasa Umum	7.642.891.349	5.719.411.972	6.835.412.583	5.137.116.885	7.333.500.000
	Retribusi Jasa Usaha	1.675.887.900	1.162.596.760	1.077.724.500	970.705.050	1.514.200.000
	Retribusi Perizinan Tertentu	6.870.222.000	1.554.162.150	1.486.896.680	719.505.575	2.001.588.000

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Pasca pandemi covid-19 pertumbuhan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang berpengaruh terhadap kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

7. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha merupakan peraturan daerah yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan usaha antara lain sebagai berikut:

- 1) Perda No. 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- 2) Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- 3) Perda No. 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
- 4) Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- 5) Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Perda No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha;
- 7) Perda No. 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.212
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perda	5	5	5	7	7

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dengan bertambahnya Peraturan Daerah di Kabupaten Temanggung yang mendukung iklim berusaha, pada Tahun 2021 sejumlah 5 Perda menjadi 7 Perda pada Tahun 2022, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung konsisten dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada berbagai sektor. Pelaku Usaha di Kabupaten Temanggung diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kualitas Tenaga Kerja

Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kualitas tenaga kerja semakin tinggi dan sebaliknya. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan terlihat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga produktif dalam bekerja dan menggambarkan sebagai tenaga kerja yang berkualitas.

Tabel 2.213
Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah lulusan Perguruan	35,296	29,928	30,586	22,276	33.362

	Tinggi					
2.	Jumlah Penduduk	791.264	795.556	800.276	807.440	808.446
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,045	0,038	0,038	0,026	0,041

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

9. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.214
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Usia<15 tahun	176.538	177.988	178.179	166.385	171.202
2.	Jumlah Penduduk usia>64 tahun	67.615	64.267	67.131	79.244	99.633
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	244.153	242.247	245.310	245.629	270.835
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	547.111	553.309	555.119	561.811	540.963
5.	Rasio ketergantungan	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
6.	Persentase	44,62	43,79	44,19	43,72	50,07

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Angka ketergantungan pada Tahun 2023 sebesar 50,07% naik dari Tahun 2022 sebesar 43,72%. Semakin naik angka ketergantungan mengandung arti semakin naik pula beban tanggungan bagi kelompok usia produktif dalam menanggung kelompok usia non produktif. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Temanggung setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Temanggung relatif sama yaitu setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif. Dari peta persebaran *dependency ratio* bahwa di semua Kecamatan merata sama yaitu 2:1 hanya selisih dua angka di belakang koma.

Bila selisih dua angka di belakang koma dipetakan terlihat bahwa Kecamatan Bejen memiliki *dependency ratio* lebih tinggi dari kecamatan yang lain dan ada 4 (empat) kecamatan yang memiliki *dependency ratio* lebih rendah yaitu Kecamatan Kandangan, Kledung, Tembarak dan Selopampang.

Persentase ketergantungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

mencapai angka 50,07% yang bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 50 penduduk usia non produktif. Peluang melimpahnya usia produktif di Kabupaten Temanggung agar dimanfaatkan bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing.

10. Iklim Investasi

Perekonomi secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi, Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan ke-3 RPJMD Kabupaten Temanggung 2019-2023. Peningkatan tersebut dapat ditingkatkan melalui intervensi pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha, “Kemudahan berusaha” adalah salah satu faktor yang akan mendorong peningkatan investasi. Sedangkan gambaran iklim investasi di Kabupaten Temanggung berdasarkan perhitungan Indeks Kemudahan Berusaha sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.215
Indeks Kemudahan Berusaha Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Indeks Kemudahan Berusaha
1	2019	n.a.
2	2020	n.a.
3	2021	78
4	2022	82
5	2023	82

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 202

11. Fasilitas Wilayah Infrastruktur

Fasilitas wilayah infrastruktur merupakan gambaran ketersediaan fasilitas fisik wilayah sebagai akses distribusi barang dan jasa, penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Dalam rangka mengukur ketersediaan fasilitas infrastruktur tersebut, digunakan indikator penilaian pesersentase infrastruktur wilayah kondisi baik, Indikator ini disusun dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak, Gambaran ketersediaan fasilitas infrastruktur wilayah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.216
Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik Kabupaten Temanggung

Komponen	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan (%)	81,17	82,37	83,70	83,79	84,54
a.Rumah tangga berakses air minum layak (%)	86,73	93,90	94,52	95,32	95,95
b. Jaringan Irigasi dlm kondisi baik (%)	57,41	59,97	58,11	58,83	59,36
c. Jalan kondisi baik (%)	89,14	83,33	89,29	88,15	80,16
d.Jembatan kondisi baik (%)	91,39	92,28	92,88	92,88	94,36

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2024

2.1.5 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)

Implementasi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu data Indonesia Kabupaten Temanggung dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 atas peraturan Bupati Temnggung nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Penunjukan walidata definitif tertuang pada Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Temanggung berpedoman pada SOP diantaranya adalah :

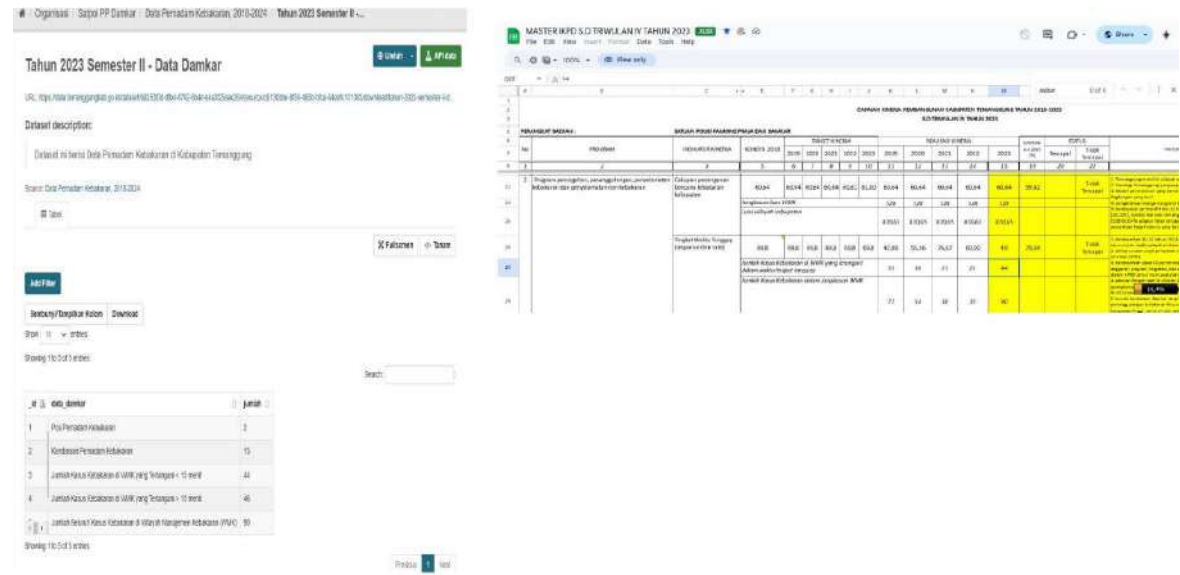
1. SOP Analisis Data Statistik Sektoral;
2. SOP Diseminasi Data Statistik Sektoral
3. SOP Penyelenggaran Statistik Sektoral
4. SOP Forum Data;
5. SOP Penyelenggaraan SDI;
6. SOP Verval Data Statistik Sektoral
7. Dan SOP Lainnya.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 2 (dua) kali penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia yaitu pada tanggal 10 Oktober 2023 dan 13 November 2023. Forum SDI salah satunya digunakan untuk membahas dan menetapkan kode referensi atau data induk yang akan digunakan. Untuk Rencana Aksi Satu Data Indonesia telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024. Tersedianya daftar data prioritas tertuang pada Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor 050/004.1/2023 tentang data prioritas statistik sektoral, standar data, dan meta data Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Dimana Data prioritas yang releva telah terakomodir 100% dalam daftar data daerah

Kabupaten Temanggung telah memiliki akun penyelenggara SDI pada

portal SDI pusat. Portal data daerah melalui *data.temanggungkab.go.id* telah terintegrasi dengan pada portal SDI pusat yaitu *data.go.id*.

Pemanfaatan data pada Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, baik dalam hal pelaksanaan, evaluasi, maupun pengendalian. Pemanfaatan data SDI untuk perencanaan Pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan, memudahkan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, mendorong keterbukaan dan transparansi data, dan memungkinkan digunakan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.



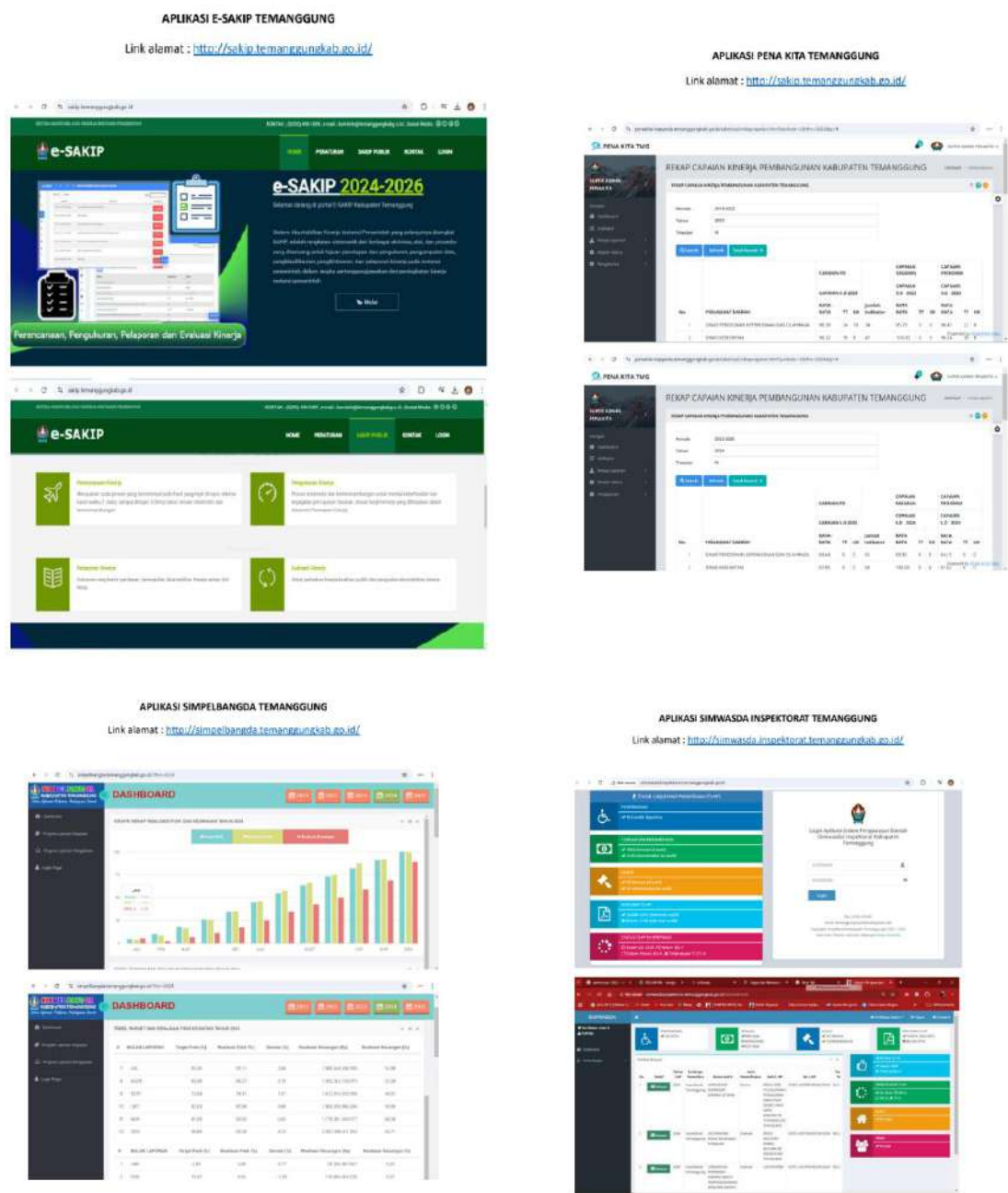
Gambar 2.28
Contoh Pemanfaatan Data Untuk Perencanaan Pembangunan

2.1.6 Penyelenggaraan Pemantauan dan Pengendalian Pemerintah Daerah

Pemantauan dan Evaluasi dan pengendalian (monev dal) pemerintah daerah dilakukan melalui berbagai forum diantaranya dengan desk capaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan setiap Triwulanan dan forum monev yang melibatkan berbagai jabatan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 048/001/2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Serta untuk menurunkan kemiskinan terdapat forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 080/346 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 080/101 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung.

Selain itu , untuk mendukung pelaksanaan monev dal yang terintegrasi di

Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa sistem diantaranya E-Sakip, Pena Kita untuk capaian kinerja pembangunan daerah, Simpelbangda, Simwasda untuk pengendalian pengawasan, Ekinerja dan si Monev -kip. Sistem yang tersedia dapat diakses oleh internal dan *stakeholders* terkait serta melibatkan Perangkat Daerah dalam pengisian dan pelaksanaannya. Pelaksanaan monev dal dilaksanakan secara triwulan, semesteran dan tahunan oleh tim monev dal dan *stakeholders* yang terlibat.



Gambar 2.29
Pemanfaatan Sistem Montoring Evaluasi dan Pengendalian
Pemerintah Dearah di Kabupaten Temanggung

Aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai tupoksi berada pada Inspektorat Kabupaten Temanggung. APIP mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/70/2024 Tentang Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaiannya bertambah/ berkembang. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Temanggung diperkuat dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/56 Tahun 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu wujud pelaksanaan SPIP terintegrasi di Kabupaten Temanggung adalah penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 700/028 Tahun 2024 Tentang Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2024-2026. Selain itu penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) beserta kegiatan monitoring dan evaluasinya dan pada tiap Perangkat Daerah juga menyusun dokumen RTP strategis dan RTP operasional Perangkat Daerah beserta monitoring dan evaluasinya. Regulasi yang menjadi pedoman pengendalian di Kabupaten Temanggung tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan SK SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan monev dal yang akuntabel maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan insentif maupun disinsentif bagi perangkat daerah, diantaranya dengan adanya Rapor Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah yang menjelaskan capaian kinerja yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan harapan untuk tahun berikutnya akan meningkatkan kinerja pencapaian target dan disinsentif terkait pengelolaan penganggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Insentif / Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung salah satunya diambil dari pelaksanaan (penginputan data) melalui sistem monev dal daerah yang telah digunakan.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja misi pada tahun N-2, N-1 terhadap target RPJMD 2019-2023 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi, Simbol penanda yang digunakan disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.217
Simbol dan Status Capaian Kinerja RPJMD

Simbol	Status capaian kinerja RPJMD
	Telah tercapai (100)
	Upaya Keras (0 sampai dengan 99,99)

2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2019-2023, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 8 indikator kinerja utama sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.218
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023	Cap, RPJMD s.d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi			
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	Angka	70,49	70,77	70,49	71,33	100	100	
		Angka Kemiskinan*	%	9,80	9,33	9,80	9,26	100	100	
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi*	%	4,8	5,20	4,8	5,20	100	100	
		Pendapatan Perkapita*	Jutaan rupiah	29,57	30,93	29,57	30,93	100	100	
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)*	%	3,50	2,54	3,50	2,32	100	100	
		Ketimpan	%	18,70	18,46	18,70	19,52	100	100	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPKD 2023	Cap, RPJMD s.d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi			
		gan Pendapatan*								
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi*	Angka	65	64,61	65	65,17	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	Angka	82	83,41	82	84,97	100	100	
	RATA - RATA							100	100	

Sumber: *) BPS kabupaten Temanggung,
 **) Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung
 BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Pada Tahun 2023 capaian indikator kinerja utama RPJMD s.d. 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Penjelasan terkait peningkatan kinerja dari indikator kinerja utama (8 indikator), sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana angka ini mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. IPM pada tahun 2023 sebesar 71,33 meningkat dari pada Tahun 2022 yaitu 79,49 capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RPKD 2023 dan target Perubahan RPJMD 2019-2023. Akan tetapi, IPM Kabupaten Temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah dan Nasional.

Pencapaian IPM ini dipengaruhi oleh 4 (empat) komponen yang memerlukan perhatian untuk dapat ditingkatkan kembali, Angka Harapan Hidup (AHH) yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat perlu didukung peningkatan asupan gizi yang baik serta perawatan terhadap kesehatan. Selain itu, komponen angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sangat berkaitan erat dengan peningkatan dimensi pengetahuan serta komponen Pengeluaran per Kapita yang berkaitan erat dengan dimensi hidup layak dengan ditunjukan melalui kemampuan daya beli masyarakat atau angka konsumsi rumah tangga yang dapat menggambarkan peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Hal ini didukung dari

indikator perhitungan IPM tersebut yaitu Angka Harapan Hidup di Kabupaten yang cukup baik sebesar 75,77 yang lebih tinggi daripada capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,69, capaian Harapan Lama Sekolah masih dapat tumbuh menguat dengan capaian 12,61 dan Rata-Rata Lama Sekolah dapat meningkat mencapai angka 7,5, serta pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali menjadi 10.108 ribu rupiah/tahun).

Dalam pengukuran kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun dimana pertumbuhan IPM ini menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya, dan semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Berdasarkan masing-masing data komponen IPM, dapat disimpulkan bahwa dari capaian dimensi pengetahuan terutama pada capaian RLS yang masih harus berupaya keras untuk mencapai angka optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa RLS Kabupaten Temanggung dalam posisi paling rendah apabila dibandingkan dengan pengembangan Gelangmanggung.

2. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mencapai 72.960 lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk miskin Tahun 2021 yang tercatat sebesar 79,09 ribu orang. Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 9,26% lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dengan angka 10,77% dimana indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 relatif lebih kecil dengan angka 0,19% dari pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,75%, untuk capaian indeks keparahan kemiskinan Tahun 2023 relatif lebih kecil dengan angka 0,17% lebih baik daripada Provinsi Jawa Tengah yaitu 0,42%².

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang moderat tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi 5%³. melambat -0,02 sedangkan pada Tingkat provinsi nasional juga melambat. Melambatkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2020 menurut lapangan usaha di Kabupaten Temanggung disebabkan menurunnya lapangan

²Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

³Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, "Kabupaten Temanggung dalam Angka 2024".

usaha pertanian dari 2,92% menjadi 1,28% dan sektor jasa lainnya dari 10,95% menjadi 8,83%.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi didasarkan atas aktivitas ekonomi pada masing-masing sektor atau lapangan usaha. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu sektor pertanian, industri manufaktur dan perdagangan. Sementara itu faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung adalah investasi baik itu investasi fisik maupun investasi modal manusia berupa pendidikan. Pertumbuhan ekonomi bisa naik dengan meningkatkan produktivitas pada setiap sektor perekonomian di Kabupaten Temanggung.

4. Pendapatan per Kapita

Angka ini menggambarkan pendapatan per individu penduduk per tahun yang dihitung dari PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk, Pada Tahun 2023 sebesar 33.290 juta rupiah. Kabupaten Temanggung juga membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah untuk mendorong pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada kurun lima tahun terakhir, TPT Kabupaten Kabupaten Temanggung tergolong rendah (<3%) serta pencapaian TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan pencapaian TPT Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, TPT pada Tahun 2023 sebesar 2,32 (dari 100 penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung terdapat 2-3 orang pengangguran) ⁴. Meskipun demikian, hal tersebut tidak akan mengendorkan semangat kinerja Kabupaten Temanggung untuk dapat mengurangi pengangguran.

6. Ketimpangan Pendapatan

Pada Tahun 2023 dengan angka 18,52 menjadi 18,78 termasuk katagori rendah. Ketimpangan pendapatan tersebut diukur dari distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total keseluruhan pendapatan seluruh penduduk dikali 100%. Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap terus berupaya melaksanakan strategi untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk menanggulangi terjadinya ketimpangan.

⁴Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

7. Indeks Reformasi Birokrasi

Pada Tahun 2023, capaian indeks reformasi birokrasi dengan angka 69,05 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 yaitu 64,61. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Pencapaian Tahun 2023 perlu ditingkatkan lagi dengan strategi peningkatan kapasitas, manajemen, dan kinerja Pemerintah Daerah serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, serta peningkatan kapaistas manajemen dan kinerja Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terlihat meningkat pada tahun 2023 dengan 84,97 berkatagori B atau baik jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yaitu 83,41. Pengukuran IKM ini menggunakan survei kepuasan masyarakat secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sudah menggunakan hasil pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan. Guna peningkatan indeks kepuasan masyarakat maka perlu adanya inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi maupun peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pelayan publik (Pemerintah).

2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pendidikan diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui 2 indikator kinerja sasaran dan 29 indikator kinerja program sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.219
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 s.d TW IV (%)	Cap. RPJM D s.d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	Terpenuhi ya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahu n	7,80	7,41	7,80	7,5	96,15	96,15	
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tah un	12,49	12,55	12,49	12,61	100	100	
	RATA-RATA							98,08	98,08	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentas e APK SD Sederajat	%	105,05	100,45	105,05	165,08	100	100	
		Rasio APK Perempua n/Laki- laki SD/SDLB /MI/ Paket A	%	0,965	0,974	0,965	1,033	100	100	
		Persentas e APM SD Sederajat	%	98,30	94,12	98,30	104,62	100	100	
		Rasio APM Perempua n/Laki- laki SD/SDLB /MI/Pake t A	angk a	0,975	0,987	0,975	1,020	100	100	
		Persentas e ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,50	89,49	79,50	94,88	100	100	
		Persentas e SD terakredit asi minimal B	%	96,97	98,16	96,97	98,85	100	100	
		Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	
		Angka putus sekolah SD sederajat	%	0,03	0,03	0,03	0,0157	100	100	
		Persentas e Pendidika n SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,90	61,22	53,90	54,87	100	100	
		Persentas e APK SMP Sederajat	%	98,59	95,35	98,59	159,33	100	100	
		Rasio APK Perempua n/Kali- laki SMP/SMP LB/MTs/	%	1	1,003	1	1,043	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 s.d TW IV (%)	Cap. RPJMD s.d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Paket B								
		Persentase APM SMP sederajat	%	88	79,77	88	134,35	100	100	●
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMP LB/ MTs/ Paket B	%	1,055	1,056	1,055	0,926	100	100	●
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,50	97,60	98,50	91,12	92,51	92,51	▼
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	95,17	94,14	95,17	94,35	99,14	99,14	▼
		Prosentase SMP terakreditasi minimal B	%	97,20	86,75	97,20	85,71	88,18	88,18	▼
		Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	100	●
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,20	0,29	0,20	0,21	97,43	97,43	▼
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,21	65,53	63,21	55,95	88,51	88,51	▼
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar(SD/ MI, SMP/MTs)	%	100	95,55	100	118,86	100	100	●
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	76,60	75,18	76,60	70,81	92,44	92,44	▼

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 s.d TW IV (%)	Cap. RPJMD s.d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	40,41	39,59	40,41	48,11	100	100	●
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	94,74	100	118,83	100	100	●
		Persentase TK terakreditasi minimal B	%	51	60,30	51	52,08	100	100	●
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	47,47	48,29	47,47	82,40	100	100	●
		Persentase Angka Melek Huruf usia ≥ 15 tahun	%	98,64	98,59	98,64	98,72	100	100	●
		Persentase angka kelulusan Pendidikan kesetaraan	%	97,19	87,88	97,19	100	100	100	●
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	100	27,48	100	51,95	51,95	51,95	▼
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	%	15,80	8,52	15,80	8,13	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 s.d TW IV (%)	Cap. RPJM D s.d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	RATA-RATA							96,48	96,48	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 96,48% dengan status upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut :

- Pada indikator sasaran yaitu indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS), faktor penghambatnya adalah Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- Pada indikator program yaitu Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat, faktor penghambatnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, pandemi covid-19; penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan lewat perbaikan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan layanan pendidikan Non Formal, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- Pada indikator program yaitu Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik, faktor penghambatnya adalah kondisi sarpras di beberapa sekolah tidak sesuai dengan data ada di Dapodik, Terjadinya bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pendataan kondisi sarpras yang sesuai dengan kondisi di sekolah dan alternatif penganggaran disesuaikan dengan persyaratan sumber dana tersebut, penetapan standar prosedur apabila terjadi kondisi bencana alam dan keadaan darurat lainnya.
- Pada indikator program yaitu Persentase SMP terakreditasi minimal B, faktor penghambatnya adalah keterbatasan kuota pelaksanaan

akreditasi; keterbatasan anggaran pelaksanaan akreditasi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pengelolaan anggaran sekolah yang ditujukan pada pelaksanaan akreditasi, usulan penambahan kuota akreditasi.

- e. Pada indikator program yaitu Angka putus sekolah SMP sederajat, faktor penghambatnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan lewat perbaikan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan layanan pendidikan Non Formal, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- f. Pada indikator program yaitu Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik faktor penghambatnya adalah Keterbatasan kuota program PPG, persyaratan kelengkapan dalam mengikuti program PPG. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengusulkan penambahan kuota program PPG.
- g. Pada indikator program yaitu Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun), faktor penghambatnya adalah pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, serta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.
- h. Pada indikator program yaitu Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan, faktor penghambatnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, keterbatasan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga kesetaraan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kampanye Gerakan Kembali Ke Sekolah, Pendataan AUSTS dan Kebijakan tindaklanjutnya, penataan layanan pendidikan kesetaraan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah layanan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 44 indikator kinerja program, dan RSUD ada 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.220
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tah un	75,53	75,70	75,53	75,70	100	100	
		Indeks Kinerja RSUD	%	80	93	80	93	100	100	
RATA – RATA								100	100	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu	%	67,5	75,32	67,5	44,36	100	100	
		Angka kematian bayi (AKB)	%	12	13,23	12	13,04	91,35	91,35	
		Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,5	0,31	0,5	0,22	100	100	
		Prosentas e rumah tangga yang memiliki jamban	%	83,84	100	83,84	90,22	100	100	
		Persentas e Puskesma s yang sarprasny a sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentas e ketersedia an obat sesuai kebutuha n	%	98	98,72	98	99,02	100	100	
		Cakupan ibu hamil mendapat kan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan ibu bersalin mendapat kan	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		elayanan persalina n kesehatan sesuai standar								
		Cakupan pertolong an persalina n oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompeten si kebidana n	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentas e pertolong an persalina n di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentas e bayi baru lahir mendapat kan elayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan Neonatal dengan Komplika si yang ditangani	%	72	100	72	100	100	100	●
		Angka Kematian Neonatal per 1,000 Kelahiran Hidup	%	7	9,15	7	9,22	68,33	68,33	▼
		Cakupan elayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	92,95	100	100	100	100	●
		Angka Kematian Balita	%	13,6	15,60	13,6	16,10	81,82	81,82	▼
		Persentas e anak pada usia pendidika n dasar yang mendapat kan elayanan kesehatan	%	100	82,05	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		sesuai standar								
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s,d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	89,07	100	100	100	100	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	83,22	100	100	100	100	
		Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas)	%	43,5	55,32	43,5	45,45	100	100	
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	53,85	40,00	53,85	100,00	100	100	
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	84,78	100	100	100	100	
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapat	%	100	123,45	100	100	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		kan pelayanan kesehatan sesuai standar								
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	104	100	100	100	100	●
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	95,65	100	100	100	100	●
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	87,03	100	100	100	100	●
		Persentase Penanganan KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100	100	●
		Angka penemuan kasus malaria	%	1	0,0025	1	0,0002	100	100	●
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	20	3,62	20	2,09	100	100	●
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	%	1	0,125	1	0,0004	100	100	●
		Persentase Desa/kecamatan UCI	%	100	99,65	100	100	100	100	●
		Persentase anak umur 1 tahun	%	95	97,05	95	99,85	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		diimunisasi campak								
		Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita (0-60 bulan)	%	15,5	3,41	15,5	5,07	100	100	●
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	%	27	13,03	27	10	100	100	●
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	80	82,33	80	87,57	100	100	●
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	20	13,44	20	2,83	100	100	●
		Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase rumah sehat	%	82	87,42	82	85,99	100	100	●
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	●
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	62	100	62	100	100	100	●
		Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	77	96,15	77	100	100	100	●
		Pengawasan makanan minuman di pasar	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		tradisiona l								
		Persentas e sarana pelayanan mendapat kan ijin kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	100	100	100	100	100	100	
5	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang kesehatan	Persentas e Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	83,09	94,96	83,09	96,28	100	100	
6	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentas e pemenuh an kebutuha n sarana dan prasarana rumah sakit	%	54	56,35	54	56,99	100	100	
RATA-RATA								99,34	99,34	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 pada indikator sasaran telah tercapai 100% dengan status telah tercapai. Capaian indikator kinerja program pada RKPD dan RPJMD 2023 sebesar 99,34% dengan status upaya keras.

Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut :

- a. Pada indikator kinerja program Angka kematian bayi (AKB), faktor penghambatnya adalah kelengkapan sarana prasarana penanganan kegawatdarutan asfiksi atau penyakit pada bayi dan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus

kegawadaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan; sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi serta kualitas kunjungan neonatal dan pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melaksanakan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir; perbaikan serta peningkatan kualitas, mutu dan komitmen dalam pelaksanaan kunjungan neonatal dan pelaksanaan manajemen laktasi (IMD); peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan balita yaitu dengan melakukan pengamatan/pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin setiap bulan.

- b. Pada indikator kinerja program Angka Kematian Neonatal per 1,000 Kelahiran Hidup, faktor penghambatnya adalah kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal serta pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Dalam kelengkapan sarana prasarana masih belum semua Puskesmas memiliki sarana prasarana penanganan kegawatdaruratan terutama asfiksi atau penyakit pada bayi yang optimal. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawadaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan juga perlu ditingkatkan. Perbaikan sistem sangat diperukan terutam terkait sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi.
- c. Pada indikator kinerja program Angka Kematian Balita, faktor penghambatnya adalah risiko kehamilan tinggi dan adanya infeksi pada bayi, kurangnya pendidikan pola asuh balita dan pemantauan tumbuh kembang balita. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pedeteksian faktor risiko kehamilan secara rutin dan berkala; peningkatan dan pengelolaan pendidikan pola asuh terhadap bayi dan balita serta pendidikan/ pelatihan/

pemberdayaan kegiatan deteksi faktor risiko pada bayi dan balita oleh keluarga.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.221
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84	83,79	84	84,71	100	1000	
		Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai rencana tata ruang	%	89,50	88,56	89,50	89,56	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1,	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D,I)	%	97	97,97	97	98,32	100	100	
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59,32	58,83	59,32	59,36	100	100	
2,	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	90	95,32	90	95,95	100	100	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	
4,	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	50	69,04	50	69,21	100	100	
5,	Program Pengembangan Pemukiman	Persentase desa terfasilitasi kegiatan bankeu/hibah	%	100	100	100	100	100	100	
6,	Program Penataan Bangunan	Persentase gedung Pemerintah kondisi Baik	%	80	86,82	80	86,82	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	Gedung									
7,	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan nya	Persentase trotoar kondisi baik	%	62	73,93	62	66,66	100	100	●
8,	Program Penyelengga raan Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	%	85	88,15	85	89,16	100	100	●
		Persentase jembatan Kabupaten kondisi baik	%	93,73	92,88	93,73	94,36	100	100	●
9,	Program Pengemban gan Jasa Konstruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90	100	90	100	100	100	●
1 0	Program Penyelengga raan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	88,1	88,56	88,1	89,56	100	100	●
Rata-Rata								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.222
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatny a pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Perumahan dan Pemukiman Layak Huni	%	97,97	98,99	97,97	99,12	100	100	●
Rata-Rata								100	100	●
1	Program Pengembanga n Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5	5,25	5	4,50	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	86,8	88,11	86,8	94,99	100	100	
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	89,42	94,75	89,42	95,50	100	100	
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	18,25	4,86	18,25	4,86	100	100	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	
Rata-Rata								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.223
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi i Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indek Rasa Aman	Ang ka	4,44	4,55	4,44	4,55	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisas i Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
RATA-RATA								100	100	
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	100	100	100	
		Rasio Linmas per RT	rasio	1,62	1,42	1,62	1,627	100	100	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100	
2	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	61	60,64	61	60,64	99,42	99,42	
		Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>)	%	69,8	60	69,8	49	70,04	70,04	
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	angka	44	468	43	137	100	100	
		Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	44	80	43	96	100	100	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	43,75	100	39	38,93	38,93	
RATA-RATA								88,55	88,55	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian indikator program tahun 2023 sebesar 88,55% berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator

tersebut yaitu :

- a. Pada indikator program yaitu indikator cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten, faktor penghambatnya adalah 1). Wilayah Temanggung yang luas dengan topografi pegunungan, perbukitan dan Lembah. 2). Model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil; 3). Pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah; dan 4). Berdasarkan Permen PUPR Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, 1 WMK meliputi 176 km² (20,21%), kondisi real di Kabupaten Temanggung sudah memiliki 3 WMK (528/60,64%). Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan sarpras, kompetensi pegawai, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*), faktor penghambatnya diantaranya adalah 1). Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dan jalan yang berliku, naik turun atau gelombang yang dapat membahayakan keselamatan orang yang ada didalam kendaraan maupun yang berada di sekitar kendaraan damkar, 2). Kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian, 3). Kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yang terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yang berbeda agar proses pemadaman dapat cepat, efektif dan efisien, 4). Kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yang tidak memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yang berkerumun di lokasi kebakaran untuk mengambil foto atau menonton yang menghambat pergerakan anggota dan kendaraan damkar dalam proses pemadaman, 5). Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dan efisien contohnya, selang yang bocor di beberapa titik, nozel yg

semprotannya tidak sempurna, dll. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran dan menambah pos pemadam di Kawasan.

- c. Pada indikator program yaitu indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, faktor penghambat diantaranya adalah 1). Wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, 2). Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran, 3). Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candirotto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi, 4). Terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air (*groundtank*) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakarandan memenuhi kebutuhan sarana sumber air (*groundtank*) di Pos Damkar.

Sementara itu, capaian Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana yang diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran, dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.224
Capaian Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi
Lainnya Penanggulangan Bencana Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatn ya kapasitas kelembagaa n penanggula ngan bencana	Indek Resiko Bencana	ang ka	192,08	174,5 9	192,0 8	236,83	76,70	76,70	
RATA-RATA								76,70	76,70	
1	Program Penanggula ngan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	10,47	11,98	10,47	11,98	100	100	
		Persentase tertangani nya pemulihan sementara kerusakan fisik	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana								
		Persentase Tertangani nya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	86,4	109,2 2	86,4	109,22	100	100	
		Persentase tertangani nya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase tertangani nya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		korban bencana								
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 76,70% dengan status Upaya keras. Capaian indikator program tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator sasaran yaitu indikator Indeks Risiko Bencana, faktor penghambatnya adalah banyaknya desa di kabupaten temanggung yang mengalami dampak kekeringan air bersih pada tahun 2023, dikarenakan musim kemarau yang cukup panjang, sehingga kejadian bencana pada akhir tahun 2023 ini cukup signifikan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan pelatihan dan sosialisasi mitigasi bencana khususnya terhadap masyarakat di desa rawan bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial diimplementasikan oleh Dinas Sosial dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.225
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sosial (PMKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	64,30	63	65,29	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial		1,22	11,58	1,22	4,80	100	100	●
4	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	85	100	85	100	100	100	●
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	95	91,11	95	100,34	100	100	●
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,2	100	10,2	100	100	100	●
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	61,70	48	65,29	100	100	●
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	●
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	●
	RATA-RATA							100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan

RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.226
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	Meningkat nya investasi sektor riil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,1	74,01	76,1	75,8	99,61	99,61	▼
Rata - Rata								99,61	99,61	▼
1	Program Penempata n Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatka n	%	65	53,61	65	84,88	100	100	●
		Tingkat setengah penganggur an	%	5,7	4,57	5,7	4,40	100	100	●
		Persentase Tenaga Kerja formal	%	31	29,30	31	24,81	80,03	80,03	▼
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivit as Tenaga Kerja	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	45	43,75	45	64,29	100	100	●
		Persentase pencari kerja mendapatk an pelatihan berbasis kompetensi	%	65	71,43	65	72,39	100	100	●
		Persentase peserta pelatihan kewirausah aan yang menjadi wirausaha berkemban g	%	45	52,08	45	67,86	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
3	Program Hubungan Industrial	Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	%	79	84,89	79	90,83	100	100	
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	58	76,47	58	81,58	100	100	
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	45	55,46	45	71,05	100	100	
		Persentase perselisihan hubungan industri di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	93,33	100	100	100	100	
RATA-RATA								98,00	98,00	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 99,61% berstatus upaya keras. Capaian kinerja RKPD dan RPJMD pada indikator program tahun 2023 sebesar 98,00% berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator sasaran yaitu indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), faktor penghambat karena menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan wirausaha baru dengan peningkatan kompetensi SDM dan memperluas kesempatan kerja.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase Tenaga Kerja formal, faktor penghambat karena terjadi penurunan pada jumlah tenaga kerja formal disebabkan rendahnya daya saing industri dan

berkembangnya sektor industri informal seperti teknologi informasi, ekonomi digital dan jasa transportasi daring. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan lapangan kerja formal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mulai dari segi pendidikan, keterampilan dan sertifikasi.

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.227
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,65	95,71	95,65	95,99	100	100	
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,004	0,0043	0,004	0,0025	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,34	2,70	2,34	2,42	100	100	
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	45,71	100	45,71	100	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
2	Program Perlindungan Perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,011	0,003	0,011	0,005	100	100	●
		Persentase perempuan korban kekerasan	%	0,011	0,004	0,011	0,0017	100	100	●
3	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	62,28	39,79	62,28	100	100	100	●
		Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%	100	100	100	100	100	100	●
4	Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	60	80	60	80	100	100	●
5	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan	%	0,011	0,0048	0,011	0,0035	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Pangan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.228
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisa si s.d TW IV			
1	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	78,30	80,10	78,30	93,50	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●
1	Program Pengelolaan	Rasio ketersediaan	%	100	122,54	100	136,11	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisa si s.d TW IV			
	Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	pangan								
2,	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	27,68	32,53	27,68	27,68	100	100	●
3,	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	56	58,00	56	58,00	100	100	●
4,	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	100	90	98,82	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanahan diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.229
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisas i Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Targe t	Realisas i sd TW IV			
1,	Program Penyeles aian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesai an fasilitasi pertanaha n	%	100	100	100	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah).

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.230
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisa si s.d TW IV			
1	Meningkatny a kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup (IKLH)	%	70,53	69,86	70,53	74,83	100	100	
RATA - RATA								100	100	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindung an dan pengelolaa n lingkungan hidup	%	62,73	100	62,73	100	100	100	
		Persentase persetujua n pernyataan kesanggup an pengelolaa n dan pemantaua n lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkunga n Hidup	%	100	100	100	100	100	100	
3	Program Pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Angk a	46	52,22	46	64,07	100	100	
		Indeks kualitas udara	Angk a	86	83,82	86	85,10	98,95	98,95	
4	Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33	74,33	74,33	74,33	100	100	
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Tmg	%	0,067	1,75	0,067	2,46	100	100	
		Cakupan RTH Publik	%	0,07	1,10	0,07	1,10	100	100	
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki persetujua n teknis pengelolaa n limbah B3	%	100	100	100	100	100	100	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Pembinaan dan Pengawasa	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisa si s.d TW IV			
	terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	n Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup								
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	%	26,88	27,87	26,88	27,87	100	100	
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	66,67	84,62	66,67	178	100	100	
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	
10	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	38,2	59,06	38,2	61,62	100	100	
		Cakupan layanan persampahan	%	55	61,25	55	68,51	100	100	
RATA-RATA								99,93	99,93	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 99,93% berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator program yaitu indikator Indeks Kualitas Udara, faktor penghambatnya adalah Pengambilan titik sampel dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu pada kawasan perkantoran, perindustrian, permukiman, dan transportasi. Berdasarkan hasil laboratorium(1), perhitungan pada kawasan perindustrian mengalami kenaikan NO2 dari 10,73 µg/Nm3 menjadi 15,18 µg/Nm3 yang disebabkan karena perlakuan dalam operasional boiler pabrik industri tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan Pengambilan sampel dilakukan pada musim kemarau yang secara tidak langsung

mempengaruhi kondisi partikel udara. Musim kemarau tahun ini lebih awal apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain itu kondisi suhu yang lebih panas dan lebih kering akan berdampak pada kondisi lingkungan antara lain debu yang berterbangan terbawa angin yang mempengaruhi kualitas udara. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan pergeseran titik sampling uji kualitas udara di sekitar area titik sampling sebelumnya.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.231
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD Tahun 2023 s,d TW IV	Cap, RPMJD s,d 2023	Status Cap,
						Targe t	Realis asi s,d, TW IV			
1	Meningkatny a kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat(IKM) pelayanan kependuduk an dan pencatatan sipil	Angk a	80	84,84	80	86,09 5	100	100	
Rata - Rata								100	100	
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,4	99,99	97,4	99,93	100	100	
		Persentase kepemilikan KTP el	%	99	99,29	99	99,82	100	100	
		Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	72	78,76	72	84,21	100	100	
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
2	Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	75	73,18	75	77,90	100	100	
		Persentase penerbitan akta kematian	%	99	100	99	100	100	100	
		Cakupan pelayanan akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD Tahun 2023 s,d TW IV	Cap, RPMJD s,d 2023	Status Cap,
						Targe t	Realis asi s,d, TW IV			
		tepat waktu								
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependuduk an	Persentase kerjasama pemanfaata n data kependuduk an	%	60	86,67	60	86,67	100	100	
		Persentase inovasi pelayanan kependuduk an dan pencatatan sipil	%	90	83,33	90	95,83	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.232
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,71	0,72	0,71	0,74	100	100	
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	6,39	9,77	6,39	20,68	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program penataan Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	40	30,45	40	41,73	100	100	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan	%	37	43,61	37	43,61	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Indek Pembangunan Desa								
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	100	90	100	100	100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	100	90	100	100	100	
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	85	100	85	100	100	100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	85	100	85	100	100	100	
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	0	10	0,37	100	100	
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	85	100	85	100	100	100	
3	Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakata n desa/keluraha n yang aktif	%	35	100	35	100	100	100	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	32	96,62	32	96,99	100	100	
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	100	10	100	100	100	
RATA - RATA								100	100	

Sumber:BAPPEDA Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar

100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.233
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Targe t	Realis asi s.d TW IV			
1	Terkendali nya laju pertumbuh an penduduk	Laju Pertumbu han Penduduk (LPP)	%	0,80	0,54	0,81	0,54	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program pengendali an penduduk dan informasi keluarga	Persentas e Penyediaa n Data Mikro Keluarga di Desa/Kel urahan	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentas e pasangan usia subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi / unmetnee d	%	9,17	11,47	9,17	8,60	100	100	
		Persentas e Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,04	2,45	2,04	1,02	100	100	
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15- 19 th (ASFR 15- 19 th)	%	26,3	6,67	26,3	14,10	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realis asi s.d TW IV			
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB	presentas e PUS yang memiliki pengetah uan dan pemaham an tentang semua jenis metode kontrasep si modern	%	76,21	76,58	76,5 8	80,14	100	100	●
		Persentas e kepeserta an KB aktif	%	76,21	76,58	76,5 8	80,14	100	100	●
		Persentas e keberhasi lan pemakaia n metode kontrasep si jangka panjang	%	49,19	45,03	49,1 9	45,77	93,04	93,04	▼
		Persentas e kampung KB yang memenuh i Indeks Desa Membang un (IDM)	%	33,9	33,85	33,9	52,71	100	100	●
3	Program Pemberday aan dan Peningkata n Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembang unan Keluarga	%	50	55,97	50	58,19	100	100	●
RATA-RATA								99,23	99,23	▼

Sumber:BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD sebesar 100% berstatus telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 99,23% berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator program yaitu indikator Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang, faktor penghambat (1) Wilayah tertentu cenderung ke KB mandiri / non MKJP : Tretep, Wonobojo, Kledung, Bansari, Tembarak (2) Masih adanya bidan yang mempromosikan alat kontrasepsi suntik dibandingkan dengan MKJP (3)

PUS yang menikah diusia dini belum siap untuk ber-KB (4) Masih adanya PUS yang trauma menggunakan alat kontrasepsi MKJP , karena efek dari rumor penggunaannya (5) Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi MKJP (6) karena pasangannya bekerja diluar daerah sehingga tidak mau ber KB. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adanya (1) adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana), Sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelyanan KB MKJP (2) semua balai KB (20 kecamatan) menjadi pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) (3) memberikan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) kepada calon akseptor maupun akseptor (4) pelayanan rutin di 37 fasilitas kesehatan (26 puskesmas, 4 Rumah Sakit, 5 Bidan Praktek Mandiri, 2 Balai Pengobatan) (5) pelayanan dalam rangka momentum strategis (pendekatan pelayanan) secara gratis (6) peningkatan pelayanan KB MKJP di PMB/Praktek Bidan Mandiri.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang perhubungan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.234
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2023

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPDPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,61	1,64	1,61	1,67	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1,	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	%	38,65	41,06	38,65	41,55	100	100	
		Persentase potensi titik parkir	%	100	100	100	100	100	100	

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		yang tertangani								
		Presentase kendaraan bermotor yang laik jalan	%	99,5	99,56	99,5	99,63	100	100	●
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	50	50	50	50	100	100	●
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	62,5	50	62,5	62,5	100	100	●
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	65,22	60,87	65,22	65,22	100	100	●
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	87,18	100	87,18	100	100	100	●
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	85,71	100	100	100	100	●
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan Kabupaten	%	14,26	32,08	14,26	32,49	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja

program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.235
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran / Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2022	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d, TW IV			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,0	3,12	3,0	3,12	100	100	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,00	88,33	96,00	97,25	100	100	
RATA -RATA								100	100	
1,	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20	18,18	20	23,46	100	100	
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30	28,13	30	53,57	100	100	
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	
2,	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	84,11	100	100	100	100	
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50	52,48	50	51,43	100	100	
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	60	71,29	60	78,10	100	100	
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100	80,00	100	100	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.236
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Persentase Koperasi sehat	%	10,71	15,09	10,71	28,18	100	100	
		Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	0,015	0,0148	0,015	0,0207	100	100	
RATA - RATA								100	100	
1,	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	22	27,47	22	28,82	100	100	
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	30	110,11	30	43,98	100	100	
3	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pembinaan , pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	75	89,14	75	80,65	100	100	
4	Program Pemberdayaan usaha menengah , usaha kecil dan usaha mikro UKM	Persentase usaha mikro aktif	%	35	100	35	100	100	100	
		Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	1,07	1,40	1,07	1,58	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan

bidang penanaman modal diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.237
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	65	82	65	82	100	100	
Rata - Rata								100	100	
1,	Program Pengembangan Iklim penanaman modal	Nilai realisasi investasi	Milyar	625	1836,01	625	2000,79	100	100	
		Persentase sedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	10	28,13	100	100	
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih	%	100	100	100	100	100	100	
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang unggulan	%	100	60	100	100	100	100	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,09	100	100	100	100	
		Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	47	100	100	100	100	
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	95	100	100	100	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.238
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Targe t	Realisa si sd TW IV			
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,56	3,98	3,56	3,98	100	100	
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		3,41	2,97	3,41	2,97	87,10	87,10	
RATA-RATA								93,55	93,55	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76	93,10	80,76	93,10	100	100	
2	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	%	35,40	96,00	35,40	96,43	100	100	
		Persentase prestasi olahraga	%	59,00	70,00	59,00	70,00	100	100	
		Persentase atlet berprestasi	%	21,00	40,91	21,00	83,19	100	100	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	92,89	100	92,89	100	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 93,55% berstatus upaya keras. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator sasaran yaitu inikator Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), faktor penghambat adanya keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, tidak terdatanya atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan Pembibitan atlet dari usia

dini, peningkatan kompetensi pelatih, peningkatan kualitas sarpras pendukung olahraga, penerimaan atlit temanggung ke turnamen dan kejuaraan yang memiliki penghargaan dan terdatanya atlit perprestasi di kabupaten temanggung melalui informasi atlit yang akurat.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Statistik diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.239
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1,	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100	100	100	100	100	100	
Rata - rata								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Persandian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.240
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d.TW IV			
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	%	1	4	1	1,92	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 1 (satu) Indikator kinerja Sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja program daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.241
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Kebudayaan Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3,51	3,67	3,51	3,67	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program pengelolaan kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	80,64	125,61	80,64	125,95	100	100	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	32,16	31,71	32,16	47,17	100	100	
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	6,73	6,61	6,73	7,05	100	100	
4	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	5,18	5,18	5,18	5,18	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan diimplementasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.242
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkat nya budaya literasi masyarak at	Persentase peminjam di perpustak aan	%	82	86,13	80	83,43	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program pengelolaa n dan pengemba ngan perpustak aan	Persentase pertumbu han jumlah pengunju ng perpustak aan	%	40	1009,0 5	40	41,79	100	100	
		Persentase perpustak aan yang aktif	%	35,62	97,68	35,62	56,58	100	100	
		Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggu ng dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	100	99,12	100	100,01	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan diimplementasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 2 (dua) indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.243
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realis asi s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajeme	Indeks Manajeme n Kearsipan	Angk a	67	62,46	67	72,76	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realis asi s.d TW IV			
	n pemerinta han									
Rata - Rata								100	100	
1	Program pengelolaa n dan pelestaria n arsip daerah	Persentase Pengelolaa n Arsip Secara Baku	%	31,98	34,30	31,98	36,05	100	100	
		Persentase arsip vital konvensio nal yang dialihmedi akan	%	50	40,08	50	50,08	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber:BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Evaluasi kinerja urusan pemerintahan pilihan antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perikanan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.244
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
1		Tingkat konsumsi ikan	kg/ kap /th	21,34	24,34	21,34	24,39	100	100	
RATA - RATA								100	100	
1,	Program pengelolaa n perikanan budidaya	Produktiv itas Ikan Nila	Kg/ m2	6,20	5,40	6,20	6,20	100	100	
		Produktiv itas Ikan Lele	Kg/ m2	13,8	12,60	13,8	13,80	100	100	
		Produktiv itas Ikan Mas	Kg/ m2	6	5,80	6	6,00	100	100	

No	Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
2,	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30	43,58	30	36,70	100	100	●
3,	Program pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi pennebaraan benih ikan	%	33	100	33	45	100	100	●
3,	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	100	100	100	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang pariwisata diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.245
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD 2023 s.d TW IV	Cap, RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,65	1,53	1,65	1,53	92,73	92,73	▼
RATA-RATA								92,73	92,73	▼
1,	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	41,66	34	41,66	42	100	100	●
		Pertumbuhan jumlah wisatawan	%	21	80,96	21	26,78	100	100	●
		Lama tinggal	%	1	1	1	1	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD 2023 s.d TW IV	Cap, RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Targe t	Realisa si s.d TW IV			
		wisatawan								
2	Program Pengemba ngan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkata n desa wisata	%	11,76	8,65	11,7 6	12,03	100	100	
		Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	5	73,91	5	60,71	100	100	
		Persentase Peningkata n Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	9,90	2	9,91	100	100	
Rata-Rata								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 92,73% berstatus Upaya keras. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator sasaran yaitu Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, faktor penghambat perhitungan dilakukan oleh BPS. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara intensif ke BPS.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan 3 indikator kinerja sasaran dan 23 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.246
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1		Tingkat ketersediaa n energi perkapita		2935	3198	2935	3113	100	100	●
		Tingkat ketersediaa n protein perkapita		103,8	83,19	103,8	76,65	73,94	73,94	▼
		Tingkat ketersediaa n lemak perkapita		37,50	64,66	37,50	63,63	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
RATA - RATA								91,31	91,31	▼
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produktivitas Padi	kwin tal/ ha	63,3	63,15	63,3	63,46	100	100	●
		Peningkatan Produktivitas Jagung	kwin tal/ ha	46	46,10	46	46,10	100	100	●
		Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu	kwin tal/ ha	339,8	340,00	339,8	339,96	100	100	●
		Produktivitas bawang putih	kwin tal/ ha	79,6	69,16	79,6	71,41	89,71	89,71	▼
		Produktivitas bawang merah	kwin tal/ ha	80,15	81	80,15	76,65	95,63	95,63	▼
		Produktivitas cabai rawit	kwin tal/ ha	55,00	76,36	55,00	76	100	100	●
		Produktivitas cabai besar	kwin tal/ ha	69,5	79,04	69,5	77,53	100	100	●
		Prokduktivitas tembakau	kwin tal/ ha	6,8	6,68	6,8	6,56	96,48	96,48	▼
		Produktivitas kopi robusta	kwin tal/ ha	7,25	6,93	7,25	6,53	90,13	90,13	▼
		Produktivitas kopi arabika	kwin tal/ ha	7	5,90	7	5,75	82,19	82,19	▼
		Produktifitas Cengkeh	kwin tal/ ha	2,45	4,17	2,45	2,83	100	100	●
		Produktivitas Vanili	kwin tal/ ha	2,95	3,02	2,95	2,96	100	100	●
		Produktivitas ternak sapi	Kg/ Ekor	177,60	177,40	177,60	177,60	100	100	●
		Produktivitas ternak domba	Kg/ Ekor	13,71	13,70	13,71	13,71	100	100	●
		Produktivitas ternak kambing	Kg/ Ekor	13,71	13,70	13,71	13,71	100	100	●
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/ Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	100	100	●
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/ Ekor	10,88	10,35	10,88	10,88	100	100	●
		Produktivitas ternak ayam buraas	Kg/ Ekor	0,7	0,70	0,7	0,70	100	100	●
2,	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76,55	79,15	76,55	79,15	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
3,	Program Pengendali an Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyaraka t Veteriner	Persentase Penangana n penyakit hewan	%	90	100	90	97,26	100	100	
		Persentase peningkata n pengawasa n produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	100	70	82,10	100	100	
4,	Program Pengendali an dan Penanggul angan Bancana Pertanian	Persentase pengendalia n bencana pertanian	%	40,30	41,45	40,30	40,30	100	100	
5,	Program Penyuluha n Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	1,03	0,98	1,48	100	100	
RATA-RATA								98,01	98,01	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 91,31% berstatus Upaya keras. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 98,01% berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- Pada Indikator sasaran yaitu indikator tingkat ketersediaan protein perkapita, faktor penghambat dikarenakan tingkat produksi bahan pangan sumber protein dipengaruhi oleh iklim, budaya masyarakat, pola konsumsi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan peningkatan produksi bahan pangan sumber protein yang beragam melalui pengembangan sumber daya lokal yaitu pangan lokal yang menjadi sumber protein dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan rumah tangga.
- Pada beberapa indikator program yaitu pada indikator program produktivitas bawang putih dan produktivitas bawang merah faktor penghambat adanya fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, harga saprodi yang terus naik, adanya serangan hama

penyakit, cuaca ekstrim, ditambah dengan kebijakan impor yang kadang kurang berpihak kepada petani kecil. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah produktivitas bawang merah dan produktivitas bawang putih adalah dengan menjamin harga komoditas, melalui kerjasama semua pihak baik petani pemerintah maupun swasta, sedangkan pada indikator kinerja program produktivitas cabai rawit dan produktivitas cabai besar yaitu dengan terus mengupayakan peningkatan ilmu budidaya atau *Good Agricultural Practices* (GAP), pasca panen atau *Good Handling Practices* (GHP), PPHT dengan teknologi yang ada dan terus berkembang.

- c. Pada indikator program Produktivitas tembakau, faktor penghambat diantaranya karena *Good Agricultural Practices* (GAP) belum diterapkan, budidaya belum efisien, iklim (Cuaca dan Angin) tidak mendukung, *Good Handling Practices* (GHP) belum diterapkan, mutu belum optimal, dan tata niaga yang semrawut, Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah dengan melakukan efisiensi dalam budidaya, meningkatkan produktifitas, meningkatkan kualitas dan mitigasi iklim.
- d. Pada indikator program yaitu indikator Produktivitas kopi robusta, faktor penghambat di karena kondisi tanaman yang sebagian sudah tua dan tidak produktif perlu peremajaan, kurangnya kegiatan untuk peningkatan produksi, serta mengalami serangan hama penyakit. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah dengan melakukan peremajaan tanaman kopi, dukungan serta fasilitasi kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Kopi, Sosialisasi *Good Agricultural Practices* (GAP), penerapan *Good Handling Practices* (GHP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP).
- e. Pada indikator program yaitu indikator Produktivitas kopi arabika, faktor penghambat yaitu kurangnya dukungan kegiatan dan kesadaran petani untuk melakukan konservasi lahan di Lereng Susi Prau. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah mengembangkan penanaman kopi arabika di Lereng Susi Prau dengan dukungan serta fasilitasi kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Kopi, Sosialisasi *Good Agricultural Practices* (GAP), penerapan *Good Handling Practices* (GHP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP).

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1,		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20	20,14	20	20,79	100	100	
Rata - Rata								100	100	
1,	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	67	66,67	67	83,33	100	100	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	70	62,28	70	70,34	100	100	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	90	105,58	90	90,73	100	100	
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	34	53,27	34	60,88	100	100	
2,	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	68,41	98,08	68,41	74,79	100	100	
3,	Program Pengembangan ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB Sektor Perdagangan	%	2,56	27,80	2,56	86,17	100	100	
4,	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	unit	95	101,12	95	95,82	100	100	
Rata-Rata								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan

RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.248
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Targe t Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Targe t	Realisa si s.d TW IV			
1	Meningka tnya investasi sektor riil	Kontribus i sektor perindust rian Terhadap PDRB	%	27	27,47	27	26,19	97	97	
Rata-Rata								97	97	
1,	Program Perencana an dan Pengemba ngan Industri	Persentas e IKM industri yang berbasis pada komodita s unggulan daerah	%	35	64,62	35	70,46	100	100	
2,	Program Pengemda lian ijin usaha industry Kab/Kota	Prosentas e pembinaa n industri penghasil cukai	%	5,3	9,92	5,3	12,29	100	100	
Rata-Rata								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 97% berstatus Upaya keras. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator sasaran yaitu indikator Persentase Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB masih rendah yang disebabkan oleh penurunan jumlah industri pengolahan kayu di Kabupaten Temanggung dimana industri tersebut merupakan salah satu sektor industri utama di Kabupaten Temanggung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap industri kecil menengah agar IKM

dapat mengembangkan usahanya.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.249
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	
Rata - rata								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (data diolah)

Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai.

2.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Evaluasi kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan antara lain:

1. Fungsi Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum urusan pemerintahan fungsi Sekretariat Daerah diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 21 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.250
Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2022 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,5	3,35	3,5	3,43	98	98	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%	25	100	25	100	100	100	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	BB	B	BB	B	93,10	93,10	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2022 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Pemerintah (AKIP)								
RATA-RATA								97,03	97,03	▼
1	Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	90	90,95	90	91,55	100	100	●
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	30	60	30	41,67	100	100	●
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	90	100	90	100	100	100	●
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%	75	100	75	100	100	100	●
2,	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	80	50	80	83,33	100	100	●
		Persentase pelaksanaan	%	100	100	100	99,81	99,81	99,81	▼

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2022 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu								
3,	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	100	100	100	
		persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100	96,51	100	127,44	100	100	
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	95	99,37	95	99,89	100	100	
4,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP		74,5	100	74,5	100	100	100	
		Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2022 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
RATA-RATA								99,99	99,99	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 97,03% berstatus upaya keras. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 99,99% berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator sasaran yaitu indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), faktor penghambatnya adalah Surat Edaran dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan LPPD tahun 2022 dikeluarkan oleh Kemendagri mendekati batas pengumpulan data LPPD, dan terdapat beberapa perubahan rumus Indikator Kinerja Kunci karena menyesuaikan dengan SE dan juknis terbaru, sehingga membutuhkan waktu untu perbaikan data Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah melakukan koordinasi dengan Bappeda, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, melakukan koordinasi dengan OPD untuk melakukan pengumpulan data dukung lebih awal.
- b. Pada indikator sasaran yaitu indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), faktor penghambatnya adalah (a) Dokumen perencanaan belum sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (b) Target yang cenderung tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (c) Belum ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi AKIP dari APIP Pemda (d) belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, memperbaiki perencanaan kinerja dan menyinkronkan sasaran Bupati sampai dengan sasaran kinerja pegawai.
- c. Pada indikator program yaitu indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, faktor penghambat yaitu Proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat ,

Pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kejadian kahar (bencana alam/banjir), penyelesaian pekerjaan akan dilaksanakan pada Tahun 2024 setelah musim penghujan selesai (sekitar bulan April), dan perangkat dinas terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah Perencanaan diusahakan N-1 dan meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan juga pembinaan terhadap konsultan pengawas.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum fungsi Sekretariat DPRD yang diimplementasikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.251
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Sasaran /Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2022 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Persentase RAPER DA yang disahkan tepat waktu	%	91,50	88,89	91,50	100	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	27,78	26,67	47	100	100	
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58	88,15	58	90,38	100	100	
		RATA-RATA						100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Evaluasi kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan antara lain:

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran fungsi penunjang perencanaan pembangunan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 4 indikator kinerja sasaran, dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.252
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisas i Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisas i s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajeme n pemerinta han	Indeks Perencanaa n Pembangun an Daerah	%	4,2	4,5	4,2	4,5	100	100	
		Persentase Ketercapaia n Kinerja Pembangun an Daerah	%	90	98,66	90	98,96	100	100	
		Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2	Level 3	Level 2	Level 2	100	100	
Rata-Rata								100	100	
1 ,	Program perencana an, evaluasi, dan informasi pembang unan daerah	Persentase penyusun an dokumen perencana an pembangu nan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase tersusunn ya laporan evaluasi pembangu nan daerah tepat waktu	%	95	100	95	100	100	100	
2 ,	Program Koordina si dan Sinkronis asi Perencan aan	Tingkat konsistens i kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangu nan manusia	%	90	90,54	90	90,91	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisas i Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisas i s.d TW IV			
		Tingkat konsistens i kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerinta han dan kesejahter aan rakyat	%	90	98,80	90	90,91	100	100	
		Tingkat konsistens i kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi	%	90	91,94	90	93,65	100	100	
		Tingkat konsistens i kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruk tur	%	90	95,74	90	95,83	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan Fungsi penunjang keuangan diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan 2 indikator kinerja sasaran, dan 14 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.253
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2023

No	Sasaran / program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap, RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	16,29	15	17,54	100	100	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		79,5	62,74	79,5	68,08	85,64	85,64	
RATA-RATA								92,82	92,82	
1,	Program pengelolaan Keuangan daerah (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	99,73	100	100	100	100	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	100	89,96	100	100	100	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	42,86	100	100	100	100	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase realisasi keuangan	%	93	90,55	93	94,70	100	100	
		Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	90	95,65	90	100	100	100	
		Opini BPK atas LKPD	%	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	

No	Sasaran / program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap, RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1	100	88,1	100	100	100	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1	88,21	99,1	94,33	95,19	95,19	
3,	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27	1,94	1,27	0,85	67,12	67,12	
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95	98,74	95	101,47	100	100	
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95	100	95	100	100	100	
		RATA-RATA							97,30	97,30

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 92,82% berstatus Upaya keras. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 97,30% berstatus Upaya keras. Berikut

faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator sasaran yaitu indikator Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) faktor penghambanya yaitu Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam hal ini BPKPAD selaku fasilitator untuk menyajikan data dalam lingkup Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, tidak memiliki kewenangan mandiri secara kedinasan dalam menentukan capaian kinerja karena data yang disajikan bersumber dari semua OPD dan merupakan hasil konsolidasi kinerja keuangan seluruh OPD di Kabupaten Temanggung. Secara makro IPKD merupakan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi indikator kinerja BPKPAD secara mandiri. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah dengan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah.
 - b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, faktor penghambat dikarenakan beberapa aset belum termanfaatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan aset Pemda. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pemanfaatan barang milik daerah.
 - c. Pada indikator program yaitu indikator Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak, faktor penghambat dikarenakan secara keseluruhan, penurunan Indikator peningkatan jumlah objek pajak disebabkan oleh sudah tidak dilaksanakannya pendataan massal PBB-P2 serta kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran objek baru PBB-P2. Selain itu petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas untuk melaksanakan pendataan objek pajak. Dan target jumlah pajak akan meningkat seiring dengan aktifitas perekonomian di masyarakat.. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah Peningkatan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM petugas untuk kegiatan pendataan baru dan intensifikasi pendataan objek pajak daerah.
3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran kepegawaian diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan

2 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.254
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajeme n pemerinta han	Indeks Profesionalism e ASN	Angk a	50,09	53,13	50,09	64,54	100	100	
		<i>Indeks Merit System</i>	Angk a	0,61	0,482	0,61	0,62	100	100	
Rata-rata								100	100	
1	Program Kepegawai an Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	%	80	86,51	80	89,42	100	100	
		Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	%	48	42,09	48	41,91	87,31	87,31	
		<i>Persentase pelanggaran disiplin ASN</i>	%	0,2	0,02	0,2	0,18	100	100	
		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90	14,29	90	71,43	79,37	79,37	
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95	100	95	100	100	100	
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100	100	100	100	100	100	
RATA-RATA								96,29	96,29	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 96,29% berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator program yaitu indikator Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas, faktor penghambat adalah Keterbatasan SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan dan berkurangnya jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan fungsional karena kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan ke jabatan fungsional. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah Menambah kuota peserta diklatpim dan peningkatan kompetensi khususnya bagi ASN perempuan.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN, faktor penghambat dikarenakan Terjadinya kasus pada akhir triwulan IV sehingga pada bulan tersebut masih dilakukan tahapan tahapan penyelesaian kasus. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah memaksimalkan dan mengupayakan penyelesaian kasus di triwulan berkenaan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran pendidikan dan pelatihan diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.255
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi i s.d TW IV			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi	%	35	30,13	35	36,72	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Diklat Kepemimpinan								
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	%	18	16,50	18	31,67	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.256
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1,		Indeks Inovasi Daerah	predikat	Sangat inovatif	Inovatif	Sangat inovatif	Sangat Inovatif	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●
1,	Program penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan	%	65	100	65	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar

100% dengan status telah tercapai.

2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja pengawasan diimplementasikan oleh Inspektorat dengan 1 satu indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.257
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD Tahun s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
1	Meningkatn ya kualitas manajemen pemerintah an	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	An gk a	3,95	4,06	3,95	4,06	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program Penyelengg araan Pengawasa n	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100	100	100	100	100	100	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelengga raan pemerintah n daerah pada tahap perencanaa n, pelaksanaan , pelaporan dan evaluasi	%	46	80,28	46	95,77	100	100	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaa n, akuntabilita s keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23	38,17	23	49,82	100	100	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelengga raan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48	91,17	48	98,11	100	100	
2	Program Perumusan Kebijakan,	Nilai maturitas SPIP	An gk a	3,3	3,008	3,3	3,000	90,91	90,91	

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD ahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD Tahun s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60	100	60	100	100	100	
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan , dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	100	
		Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	81,97	77,37	81,97	77,37	94,39	94,39	
		Prosentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
RATA-RATA								98,36	98,36	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 98,36% berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator program yaitu indikator Nilai maturitas SPIP, faktor penghambat tersebut antara lain: (1) Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP; (2) Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain: (1) Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat

- belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP; (2) Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian; (3) Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (2x setahun); (4) Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Nilai Survey Penilaian Integritas, faktor penghambat adalah adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu berkoordinasi dengan BKPSDM mengenai informasi kepegawaian yang paling update sesaat sebelum survei dilaksanakan agar populasi sample tepat.

2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Capaian Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Kecamatan diimplementasikan Kecamatan dengan 1 indikator sasaran kinerja daerah dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.258
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1,	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	84,00	84,56	84,00	86,14	99,83	99,83	▼
		1. Temanggung	%	84,00	85,32	84,00	85,981	100	100	
		2. Tembarak	%	84,00	87,5	84,00	88,01	100	100	
		3. Pringsurat	%	84,00	76,67	84,00	85,78	100	100	
		4. Kaloran	%	84,00	83,50	84,00	98,96	100	100	
		5. Parakan	%	84,00	81,02	84,00	84,05	100	100	
		6. Bulu	%	84,00	86,7	84,00	86,88	100	100	
		7. Kedu	%	84,00	89,52	84,00	88,70	100	100	
		8. Kandangan	%	84,00	84,41	84,00	86,97	100	100	
		9. Candiroto	%	84,00	84,87	84,00	84,28	100	100	
		10. Ngadirejo	%	84,00	89,32	84,00	85,99	100	100	
		11. Jumo	%	84,00	85,75	84,00	85,75	100	100	
		12. Wonoboyo	%	84,00	84,44	84,00	84,44	100	100	
		13. Kranggan	%	84,00	84,38	84,00	82,54	98,26	98,26	
		14. Bejen	%	84,00	85,50	84,00	86,20	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat, t,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		15. Kledung	%	84,00	82,50	84,00	82,55	98,27	98,27	
		16. Bansari	%	84,00	82,00	84,00	84,22	100	100	
		17. Tlogomulyo	%	84,00	83,84	84,00	84,76	100	100	
		18. Selopampang	%	84,00	87,49	84,00	87,49	100	100	
		19. Gemawang	%	84,00	83,50	84,00	84,04	100	100	
		20. Tretep	%	84,00	83,99	84,00	85,30	100	100	
Rata - Rata								99,83	99,83	▼
1,	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah dan pelayanan an Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	98,87	100	102,77	100	100	●
		1. Temanggung		100	100,5 ₂	100	99,9	100	100	
		2. Tembarak		100	98,63	100	102,85	100	100	
		3. Pringsurat		100	99,68	100	102,78	100	100	
		4. Kaloran		100	99,64	100	103,83	100	100	
		5. Parakan		100	97,56	100	102,96	100	100	
		6. Bulu		100	100,1 ₂	100	103,03	100	100	
		7. Kedu		100	96,80	100	100,54	100	100	
		8. Kandangan		100	98,86	100	105,23	100	100	
		9. Candiroto		100	100,4 ₃	100	102,47	100	100	
		10. Ngadirejo		100	98,79	100	103,93	100	100	
		11. Jumo		100	100,9 ₅	100	103,58	100	100	
		12. Wonobojo		100	99,20	100	104,2	100	100	
		13. Kranggan		100	101,3 ₈	100	103,78	100	100	
		14. Bejen		100	99,45	100	100	100	100	
		15. Kledung		100	100,4 ₇	100	102,59	100	100	
		16. Bansari		100	98,81	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	98,80	100	104,03	100	100	
		18. Selopampang		100	98,76	100	102,94	100	100	
		19. Gemawang		100	100,5 ₀	100	103,63	100	100	
		20. Tretep		100	97,02	100	103,13	100	100	
2,		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	98,72	100	98,683	98,68 ₃	98,683	▼
		1. Temanggung		100	93,14	100	91,93	91,93	91,93	
		2. Tembarak		100	99,96	100	99,85	99,85	99,85	
		3. Pringsurat		100	96,47	100	98,19	98,19	98,19	
		4. Kaloran		100	99,09	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	97,37	100	98,43	98,43	98,43	
		6. Bulu		100	100	100	97,58	97,58	97,58	
		7. Kedu		100	100	100	99,53	99,53	99,53	
	8. Kandangan		100	95,77	100	96,35	96,35	96,35		

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		9. Candiroto		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	99,23	100	98,28	98,28	98,28	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonobojo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	95,39	100	93,63	93,63	93,63	
		14. Bejen		100	100	100	99,89	99,89	99,89	
		15. Kledung		100	97,92	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
3,	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP- Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		1. Temanggung		100	100	100	100	100	100	
		2. Tembarak		100	100	100	100	100	100	
		3. Pringsurat		100	100	100	100	100	100	
		4. Kaloran		100	100	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	100	100	100	100	100	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	
		7. Kedu		100	100	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	100	100	100	
		9. Candiroto		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonobojo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
		14. Bejen		100	100	100	100	100	100	
		15. Kledung		100	100	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	100	86,60	100	93,355	93,355	93,355	
		1. Temanggung		100	65,48	100	85,45	85,45	85,45	
		2. Parakan		100	90,79	100	90,79	90,79	90,79	
		3. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		4. Kranggan		100	90,14	100	97,18	97,18	97,18	
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	98,18	100	100	100	100	
		1. Temanggung		100	92,49	100	100	100	100	
		2. Parakan		100	98,73	100	100	100	100	
		3. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		4. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
4,	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	
		1. Temanggung		100	100	100	100	100	100	
		2. Tembarak		100	100	100	100	100	100	
		3. Pringsurat		100	100	100	100	100	100	
		4. Kaloran		100	100	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	100	100	100	100	100	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	
		7. Kedu		100	100	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	100	100	100	
		9. Candiroto		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonoboyo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
		14. Bejen		100	100	100	100	100	100	
		15. Kledung		100	100	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
5,	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	94,87	80	95,27	100	100	
		1. Temanggung		80	90,43	80	90,43	100	100	
		2. Tembarak		80	93,15	80	93,15	100	100	
		3. Pringsurat		80	96,85	80	96,85	100	100	
		4. Kaloran		80	96,53	80	96,53	100	100	
		5. Parakan		80	100	80	100	100	100	
		6. Bulu		80	85,44	80	85,44	100	100	
		7. Kedu		80	94,92	80	94,92	100	100	
		8. Kandangan		80	87,35	80	87,35	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		9.Candiroto		80	87,71	80	87,71	100	100	
		10.Ngadirejo		80	98,73	80	100	100	100	
		11.Jumo		80	98,03	80	98,03	100	100	
		12.Wonoboyo		80	100	80	100	100	100	
		13.Kranggan		80	100	80	100	100	100	
		14.Bejen		80	100	80	100	100	100	
		15.Kledung		80	100	80	100	100	100	
		16.Bansari		80	100	80	100	100	100	
		17.Tlogomulyo		80	94,37	80	94,37	100	100	
		18.Selopampang		80	80,68	80	80,68	100	100	
		19.Gemawang		80	100	80	100	100	100	
		20.Tretep		80	93,15	80	100	100	100	
6,	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	0,10	1	0	100	100	
		1. Temanggung		1	0	1	0	100	100	
		2. Tembarak		1	0,6	1	0	100	100	
		3. Pringsurat		1	0	1	0	100	100	
		4. Kaloran		1	0	1	0	100	100	
		5. Parakan		1	0	1	0	100	100	
		6. Bulu		1	0	1	0	100	100	
		7. Kedu		1	1,38	1	0	100	100	
		8. Kandangan		1	0	1	0	100	100	
		9. Candiroto		1	0	1	0	100	100	
		10. Ngadirejo		1	0	1	0	100	100	
		11. Jumo		1	0	1	0	100	100	
		12. Wonoboyo		1	0	1	0	100	100	
		13. Kranggan		1	0	1	0	100	100	
		14. Bejen		1	0	1	0	100	100	
		15. Kledung		1	0	1	0	100	100	
		16. Bansari		1	0	1	0	100	100	
		17. Tlogomulyo		1	0	1	0	100	100	
		18. Selopampang		1	0	1	0	100	100	
		19. Gemawang		1	0	1	0	100	100	
		20. Tretep		1	0	1	0	100	100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		1. Temanggung		100	100	100	100	100	100	
		2. Tembarak		100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		3. Pringsurat		100	100	100	100	100	100	
		4. Kaloran		100	100	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	100	100	100	100	100	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	
		7. Kedu		100	100	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	100	100	100	
		9. Candiroto		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonobojo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
		14. Bejen		100	100	100	100	100	100	
		15. Kledung		100	100	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
RATA-RATA								99,18	99,18	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 99,83% berstatus Upaya keras. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 99,18% berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator Sasaran yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, faktor penghambat dikarenakan kurangnya pelatihan dan bimtek bagi pegawai kecamatan khususnya staf *front office* sehingga dalam pelayanan kurang maksimal. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan bagi pegawai kecamatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerja pelayanan.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase realisasi penerimaan PBB, faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja program tersebut antara lain (1) Wajib Pajak terbiasa membayar menjelang jatuh tempo; (2) Masih adanya SPPT yang bermasalah, adanya keterlambatan penyampaian SPPT karena Wajib

- Pajak berada di luar kota, dan Wajib Pajak tidak ditemukan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan tertib administrasi PBB dengan melakukan monitoring secara berkala ke desa-desa dan sosialisasi kepada warga masyarakat.
- c. Pada indikator program yaitu indikator Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak, faktor penghambat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengusulkan masih kurang selain itu kelengkapan data masih belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan update data setiap tiga bulan sekali dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan data secara lengkap sesuai kondisi di lapangan sehingga dalam melakukan pengusulan kebutuhan sarpras di kelurahan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Capaian Kinerja pemerintahan Umum diimplementasikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 1 indikator kinerja sasaran, dan 10 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.259
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023

No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
1	Meningkat nya nilai kehidupa n bermasyar a kat dan wawasan kebangsa an	Indeks Gotong Royong	Ang ka	4,22	4,33	4,22	4,33	100	100	
		Indeks toleransi	ang ka	4,19	4,5	4,19	4,5	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program Penguata n Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa an	Persentase sekolah yang mendapat kan pemahaman kebangsaan	%	62	65	62	70	100	100	
		Cakupan desa/ kelurahan yang mendapat kan pembinaan	%	10	58,48	10	79,58	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		wawasan kebangsaan								
2	Program Peningkat an Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidika n Melalui Pendidika n Politik dan Pengemba ngan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang mengguna kan hak pilihnya	%	87	87,21	87	87,21	100	100	
		Persentase keterwakila n perempuan di lembaga politik	%	30	32,73	30	32,73	100	100	
		Persentase keterwakila n perempuan di DPRD	%	30	33,33	30	33,33	100	100	
3	Program Pemberda yaan dan Pengawa san Organisas i Kemasyar a katan	Cakupan terbentuk nya FKUB di Kecamatan	%	100	0	100	100	100	100	
4	Program Pembinaa n dan Pembangu nan Ketahana n Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertangani nya konflik seni, budaya, agama, kemasyara katan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	
5	Program Peningkat an Kewaspa daan Nasional dan Peningkat an Kualitas dan Fasilitasi Penangan an Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertangani nya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan desa/kelu rahan yang mendapat kan pembinaan pencegahan penyalahgu naan narkoba	%	10	11,07	10	79,58	100	100	
		Cakupan sekolah yang mendapat kan pembinaan pencegahan penyalahgu naan narkoba	%	35	38	35	70	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap	
						Target	Realisas i s.d TW IV				
RATA-RATA									100	100	

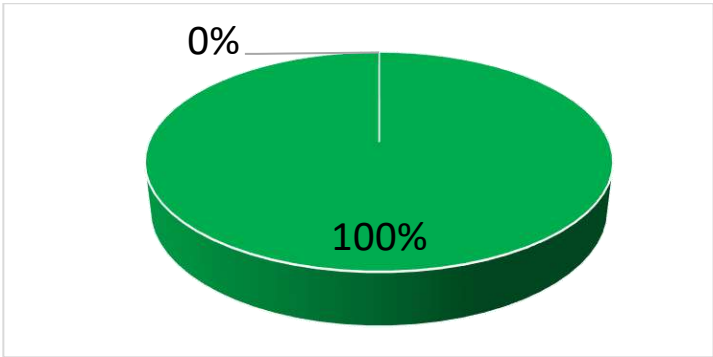
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran RKPD dan RPJMD tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% dengan status telah tercapai.

2.2.10 Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi kinerja program penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 diketahui bahwa pada setiap misi ada beberapa program dengan status Telah Tercapai dan Upaya Keras sebagaimana berikut :

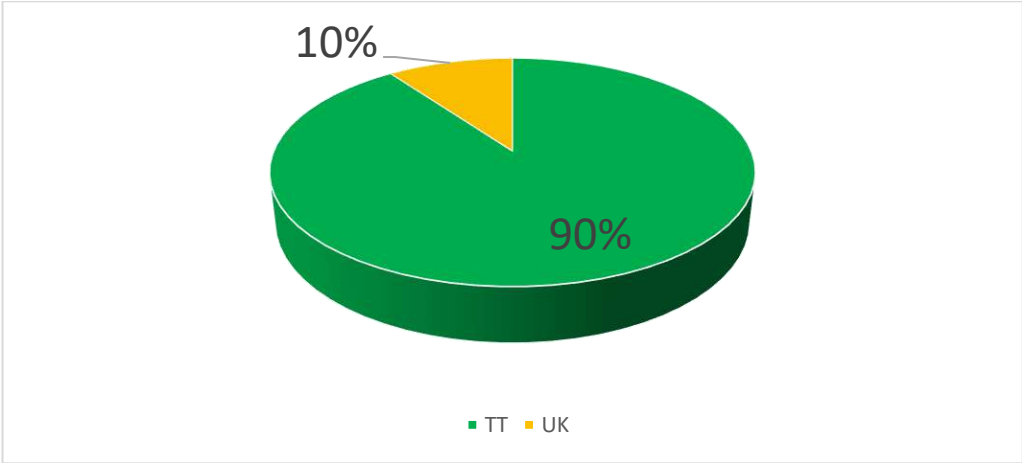
1. Capaian indikator tujuan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ada 8 indikator dengan status Telah Tercapai sejumlah 8 indikator (100%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.32
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Sampai dengan Tahun 2023

2. Capaian indikator sasaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Tahun 2023 ada 10 indikator sasaran, dengan status Telah Tercapai sejumlah 9 indikator (90%) dan 1 indikator dengan status Upaya Keras (10%) sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.33
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023

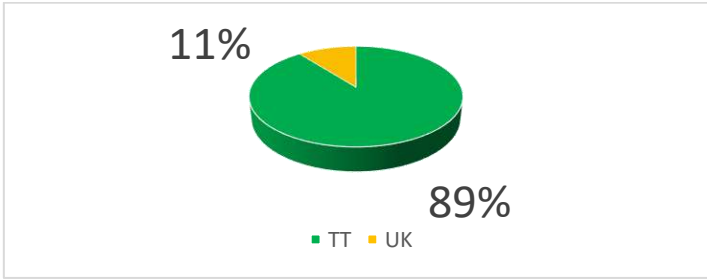
Rincian capaian sasaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.260
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023

NO	Urusan / Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	99,76	9	1	10
1	Bidang Pendidikan	98,08	1	1	2
2	Bidang Kesehatan – Dinkes	100	1	0	1
3	Bidang Kesehatan - RSUD	100	1	0	1
4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	2	0	2
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	1	0	1
6	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar	100	1	0	1
7	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD	100	1	0	1
8	Bidang Sosial	100	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Dari 123 indikator kinerja program yang mendukung urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Tahun 2023 terdapat 110 indikator dengan status Telah Tercapai (89%) dan 13 indikator dengan status perlu Upaya Keras (11%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.34
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023

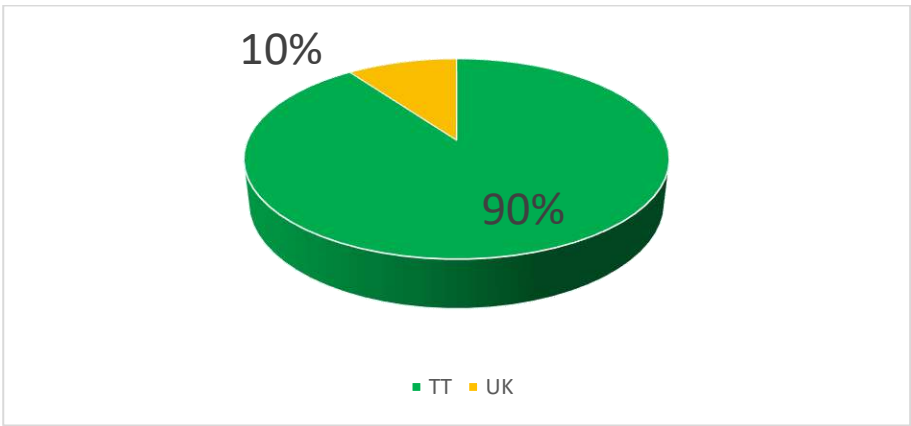
Rincian capaian program perbidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.261
Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan
Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023

No	Urusan / Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	97,97	110	13	123
1	Bidang Pendidikan	96,48	22	7	29
2	Bidang Kesehatan – Dinkes	98,73	41	3	44
3	Bidang Kesehatan - RSUD	100,00	2	0	2
4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	11	0	11
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	6	0	6
6	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar	88,55	5	3	8
7	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD	100	9	0	9
8	Bidang Sosial	100	14	0	14

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

3. Capaian indikator sasaran yang mendukung Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Tahun 2023 ada 20 indikator sasaran, dengan status telah tercapai sejumlah 18 indikator (90%) dan status Upaya Keras ada 2 indikator (10%) sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini;



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.35
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Uruses Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023

Rincian capaian sasaran Uruses Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

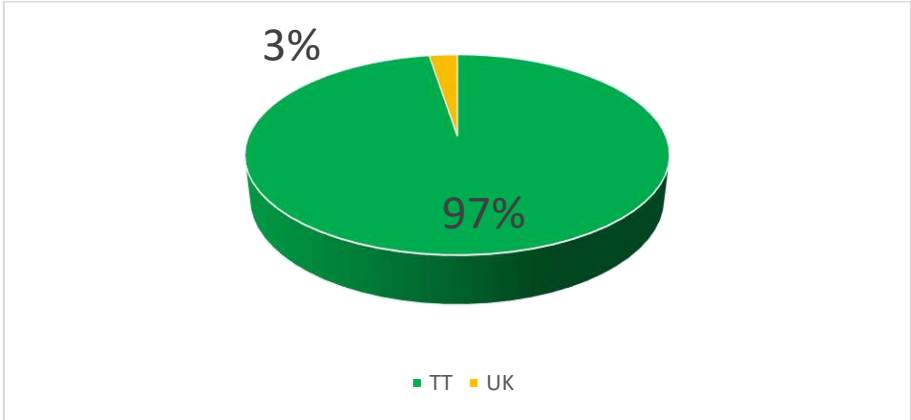
Tabel 2.262
Capaian Sasaran Penyelenggaran Pemerintah Daerah Uruses Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Uruses Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		18	2	20

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
1	Bidang Tenaga Kerja	99,61	0	1	1
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	100,00	2	0	2
3	Bidang Pangan	100,00	1	0	1
4	Bidang Pertanahan	-	-	-	-
5	Bidang Lingkungan Hidup	100,00	1	0	1
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	1	0	1
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	2	0	2
8	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	100,00	1	0	1
9	Bidang Perhubungan	100,00	1	0	1
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	100,00	2	0	2
11	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	100,00	2	0	2
12	Bidang Penanaman Modal	100,00	1	0	1
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	93,55	1	1	2
14	Bidang Statistik	-	-	-	-
15	Bidang Persandian	-	-	-	-
16	Bidang Kebudayaan	100,00	1	0	1
17	Bidang Perpustakaan	100,00	1	0	1
18	Bidang Kearsipan	100,00	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Dari 117 indikator program yang mendukung Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Tahun 2023 terdapat 114 indikator program berstatus Telah Tercapai (97%) dan 3 indikator berstatus Upaya Keras (3%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.36
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023

Rincian capaian program per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

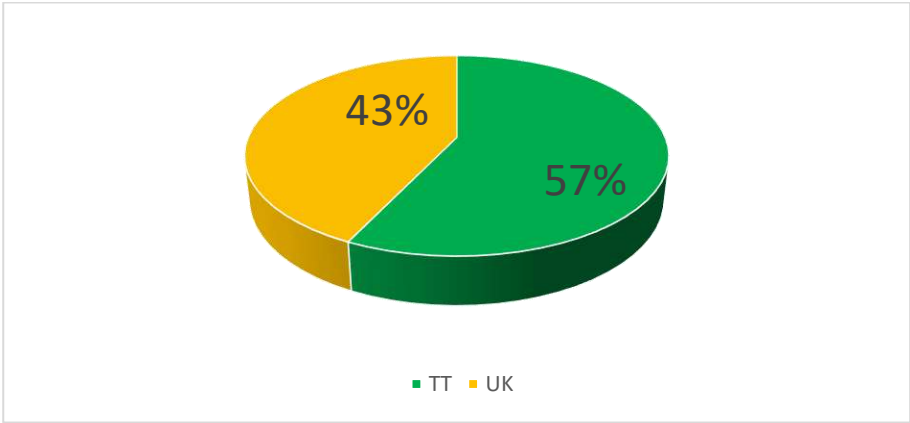
Tabel 2.263
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	99,84	114	3	117
1	Bidang Tenaga Kerja	98,00	9	1	10

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	100,00	8	0	8
3	Bidang Pangan	100,00	4	0	4
4	Bidang Pertanahan	100,00	1	0	1
5	Bidang Lingkungan Hidup	99,93	13	1	14
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	10	0	10
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	13	0	13
8	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	99,23	8	1	9
9	Bidang Perhubungan	100,00	10	0	10
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	100	7	0	7
11	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	100	5	0	5
12	Bidang Penanaman Modal	100,00	10	0	10
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	100,00	5	0	5
14	Bidang Statistik	100,00	1	0	1
15	Bidang Persandian	100,00	1	0	1
16	Bidang Kebudayaan	100,00	4	0	4
17	Bidang Perpustakaan	100,00	3	0	3
18	Bidang Kearsipan	100,00	2	0	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

4. Capaian indikator sasaran yang mendukung urusan pemerintahan pilihan pada Tahun 2023 ada 7 indikator. Terdapat 4 indikator dengan status Telah Tercapai (57%) dan 3 indikator dengan status Upaya Keras (43%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.37

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023

Rincian capaian sasaran urusan pemerintahan pilihan per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

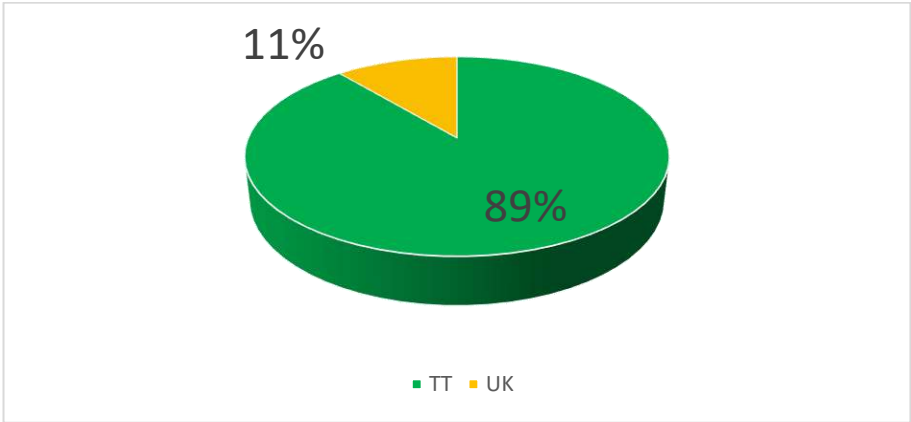
Tabel 2.264
Capaian Sasaran Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Pilihan		4	3	7
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	100,00	1	0	1
2	Bidang Pariwisata	92,73	0	1	1
3	Bidang Pertanian	91,31	2	1	3
4	Bidang Perdagangan	100,00	1	0	1

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
5	Bidang Perindustrian	97,00	0	1	1
6	Bidang Transmigrasi	-	-	-	-

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Dari 45 indikator program yang mendukung urusan pemerintahan pilihan di Tahun 2023 terdapat 40 indikator Telah Tercapai (89%) dan 5 indikator dengan status Upaya Keras (11%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.38
Capaian Indikator Kinerja Program urusan pemerintahan pilihan Tahun 2023

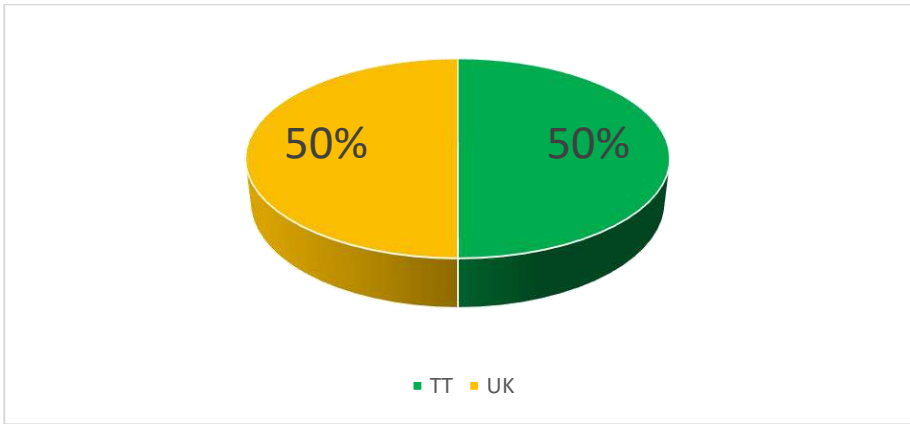
Rincian capaian program per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.265
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Pilihan	88,89	40	5	45
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	100,00	6	0	6
2	Bidang Pariwisata	100,00	6	0	6
3	Bidang Pertanian	98,01	18	5	23
4	Bidang Perdagangan	100,00	7	0	7
5	Bidang Perindustrian	100,00	2	0	2
6	Bidang Transmigrasi	100,00	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

- Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur pendukung urusan pemerintahan pada Tahun 2023 ada 4 indikator. Terdapat 2 indikator dengan status Telah Tercapai (50%) dan 2 indikator dengan status Upaya Keras (50%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pendukung
Urusan Pemerintahan Tahun 2023

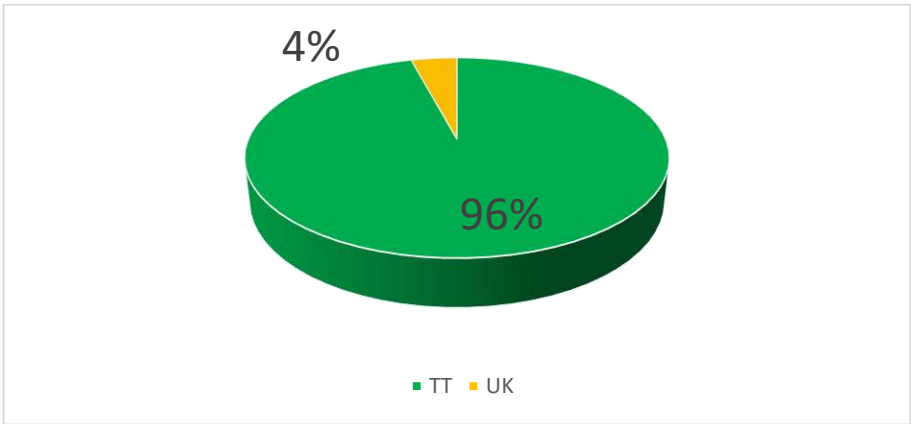
Rincian capaian sasaran unsur pendukung urusan pemerintahan per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.266
Capaian Sasaran Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur pendukung urusan pemerintahan	98,52	2	2	4
1	Sekretariat Daerah	97,03	1	2	3
2	Sekretariat DPRD	100,00	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Dari 24 indikator program yang mendukung Unsur pendukung urusan pemerintahan di Tahun 2023 IV terdapat 23 indikator Telah Tercapai (96%) dan 1 indikator dengan status Upaya Keras (4%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.40
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur pendukung
Urusan Pemerintahan Tahun 2023

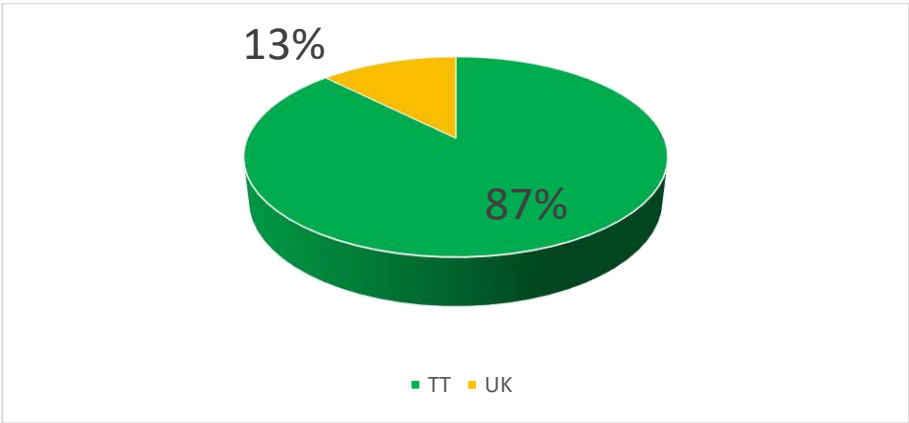
Rincian capaian program per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.267
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur pendukung urusan pemerintahan	99,99	23	1	24
1	Sekretariat Daerah	99,99	20	1	21
2	Sekretariat DPRD	100,00	3	0	3

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

6. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur penunjang urusan pemerintahan pada Tahun 2023 ada 8 indikator. Terdapat 7 indikator dengan status Telah Tercapai (87%) dan 1 indikator dengan status Upaya Keras (13%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur penunjang
urusan pemerintahan Tahun 2023

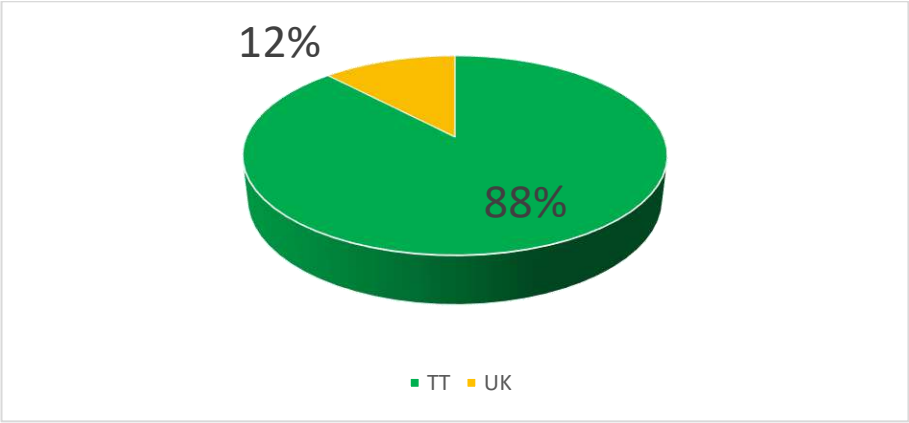
Rincian capaian sasaran unsur pendukung unsur penunjang urusan pemerintahan per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.268
Capaian sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur penunjang urusan pemerintahan		7	1	8
1	Perencanaan	100,00	3	0	3
2	Keuangan	92,82	1	1	2
3	Kepegawaian	100,00	2	0	2
4	Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
5	Penelitian dan Pengembangan	100,00	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Dari 33 indikator program yang mendukung unsur penunjang urusan pemerintahan di Tahun 2023 terdapat 29 indikator Telah Tercapai (88%) dan 4 indikator perlu Upaya Keras (12%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.42
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan Tahun 2023

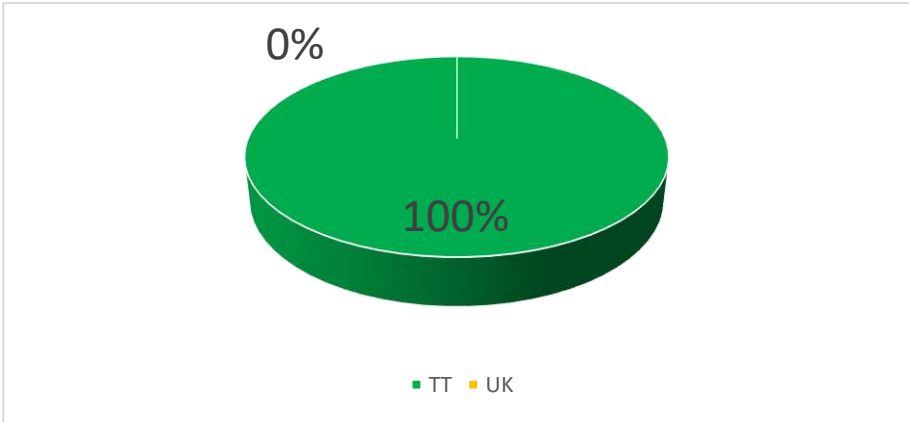
Rincian capaian program per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.269
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur penunjang urusan pemerintahan		29	4	33
1	Perencanaan	100,00	6	0	6
2	Keuangan	97,30	12	2	14
3	Kepegawaian	96,29	7	2	9
4	Pendidikan dan Pelatihan	100,00	2	0	2
5	Penelitian dan Pengembangan	100,00	2	0	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

7. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur pengawasan urusan pemerintahan pada Tahun 2023 ada 1 indikator dengan status Telah Tercapai (100%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.43
Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur pengawasan
Urusan Pemerintahan Tahun 2023

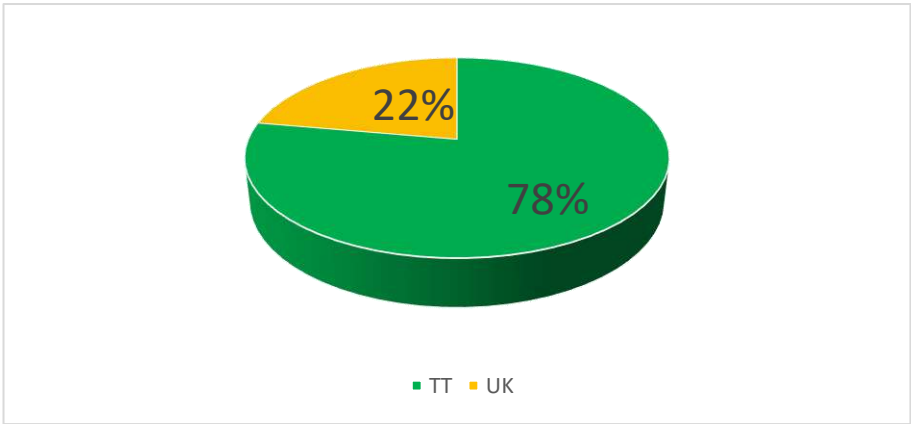
Rincian capaian sasaran unsur pengawasan urusan pemerintahan per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.270
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur pengawasan urusan pemerintahan		1	0	1
1	Inspektorat Daerah	100,00	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Dari 9 indikator program yang mendukung unsur pengawasan urusan pemerintahan di Tahun 2023 terdapat 7 indikator Telah Tercapai (78%) dan 2 indikator Upaya Keras (22%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.44
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Pengawasan
Urusan Pemerintahan Tahun 2023

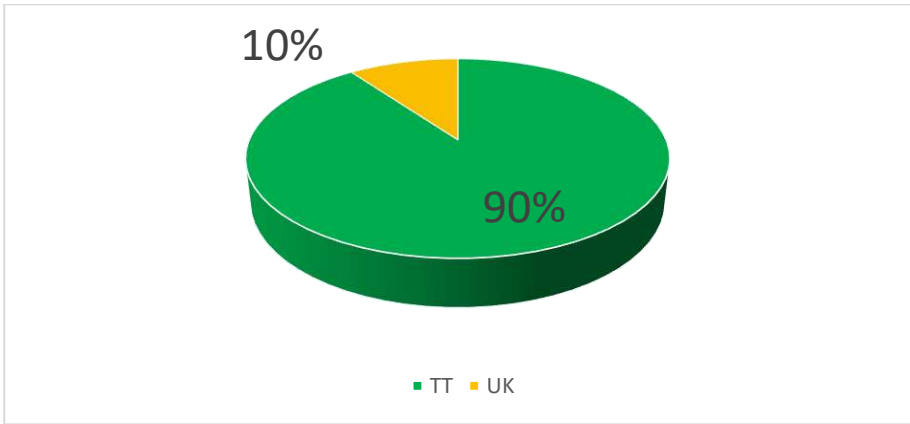
Rincian capaian program per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.271
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur pengawasan urusan pemerintahan		7	2	9
1	Inspektorat Daerah	98,36	7	2	9

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

8. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur kewilayahan pada Tahun 2023 ada ada 18 Indikator dengan status Telah Tercapai (90%) dan 2 indikator dengan status Upaya Keras (10%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.45
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Kewilayahan
Tahun 2023

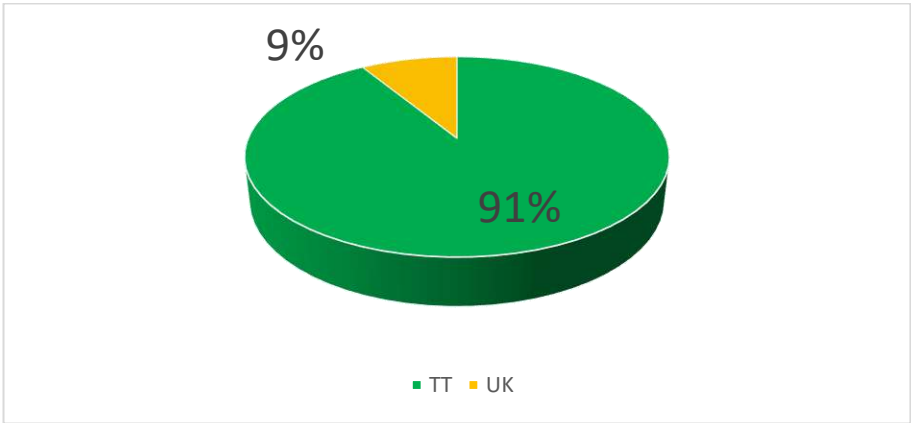
Rincian capaian sasaran unsur kewilayahan per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.272
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur Kewilayahan Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur kewilayahan		18	2	20
1	Kecamatan	99,83	18	2	20

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Dari 148 indikator program yang mendukung Unsur kewilayahan di Tahun 2023 terdapat 135 indikator berstatus Telah Tercapai (91%) dan 13 indikator berstatus Upaya Keras (9%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.46
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur kewilayahan
Tahun 2023

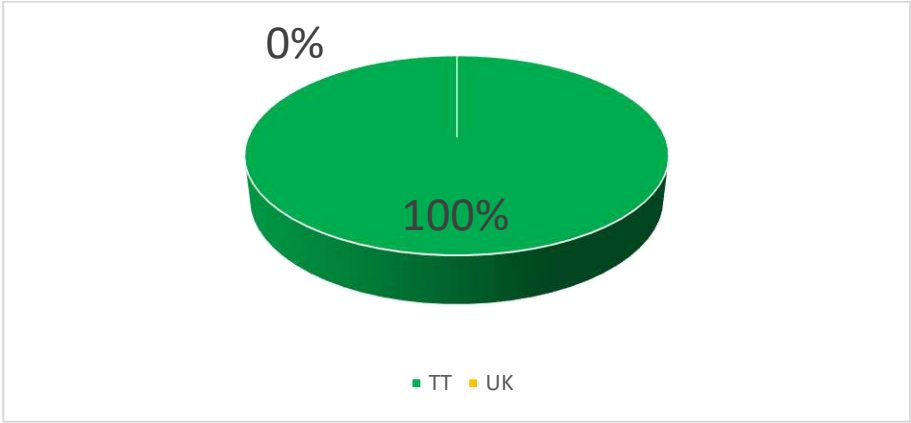
Rincian capaian program per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.273
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur kewilayahan Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur kewilayahan		135	13	148
1	Kecamatan	99,18	135	13	148

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

9. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur pemerintahan umum pada Tahun 2023 ada 2 indikator dengan status Telah Tercapai (100%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.47
Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur pemerintahan umum Tahun 2023

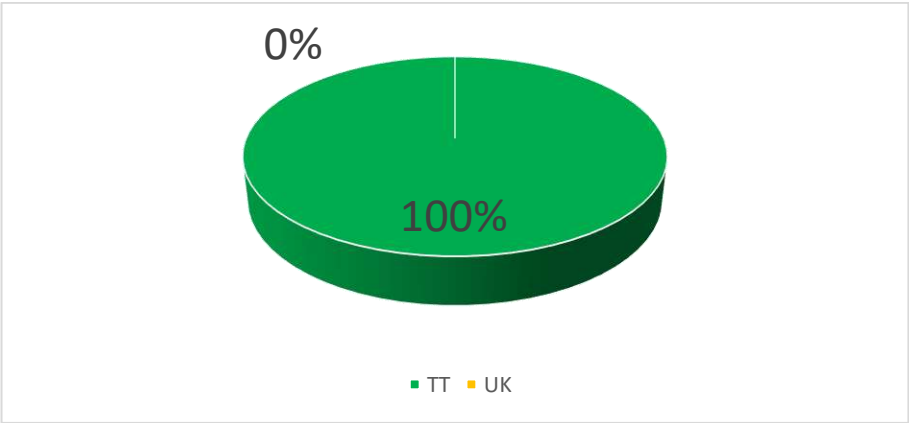
Rincian capaian sasaran unsur pemerintahan umum per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.274
Capaian Sasaran Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur Pemerintahan Umum		2	0	2
1	Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik	100,00	2	0	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Dari 10 indikator program yang mendukung unsur pemerintahan umum di Tahun 2023 terdapat 10 indikator dengan status Telah Tercapai (100%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.48
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum
Tahun 2023

Rincian capaian program per bidang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.275
Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur Pemerintahan Umum		10	0	10
1	Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik	100,00	10	0	10

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Temanggung diukur dari ketercapaian program pembangunan daerah. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 memuat 8 indikator tujuan, 72 indikator sasaran dan 510 indikator program. Hasil evaluasi pencapaian target kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.276
Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Temanggung
Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Indikator	Jumlah	Status Capaian	Persentase
1	Indikator Tujuan	8	Telah Tercapai	100%
		0	Upaya Keras	0%
2	Indikator Sasaran	61	Telah Tercapai	84,72%
		11	Upaya Keras	15,28%
3	Indikator Program	469	Telah Tercapai	91,96%
		41	Upaya Keras	8,04%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

2.2.11 Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.277
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung tahun 2023

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	n.a	98,36	92,88	95,55	100
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	n.a	91,17	81,35	94,74	100
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n.a	35,42	25,52	27,48	100
		Capaian SPM Bidang Pendidikan		n.a	74,98	66,58	72,59	100
2.	KESEHATAN	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	99,09	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,67	80,4	81,64	92,95	100
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan	%	100	6,19	84,92	82,05	100

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
		pelayanan kesehatan sesuai standar						
		Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	86,6	51,81	69,25	89,07	100
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,25	62,64	89,52	83,22	100
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	22,63	19,99	30,97	84,78	100
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,91	77,37	92,5	100	100
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,86	83,06	100	104	100
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	72,11	38,19	67,88	95,65	100
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	68,41	74,42	73,49	87,03	100
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,25	62,64	89,52	83,22	100
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	22,63	19,99	30,97	84,78	100
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,91	77,37	92,5	123,45	100
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,25	62,64	89,52	83,22	100
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	22,63	19,99	30,97	84,78	100
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,91	77,37	92,5	123,45	100
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,86	83,06	102,63	104	100
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	72,11	38,19	67,88	95,65	100
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	68,41	74,42	73,49	87,03	100
		Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan				77,30	62,37	79,05
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	86,7	93,9	94,52	95,32	100
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	n.a	n.a	92,38	100	100
Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				86,7	93,9	93,45	97,66	100
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n.a	n.a	100	100	100
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi	%	n.a	100	100	100	100

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
		akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni						
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman				n.a	100	100	100	100
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n.a	n.a	100	100	100
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	n.a	n.a	100	100	99,19
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n.a	n.a	100	100	100
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana	%	n.a	n.a	100	100	100
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	n.a	n.a	47,73	43,75	98,25
Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				n.a	n.a	89,546	88,75	99,488
6	SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial				100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda 2024, data diolah

2.2.12 Evaluasi Kinerja Indikator Sustainable Development Goals (SDG`s)

Laporan capaian SDG`s dibuat tiap tahun dengan Desk per semester melibatkan Perangkat daerah dan stakeholder terkait. Berikut laporan SDG`s Tahun 2023 Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.278
Capaian Indiktor SDG`s Tahun 2023

N O	PILAR	GOAL		JUMLAH				PERANGKAT DAERAH	STATUS CAPAIAN			
				INDIKATOR	TERISI	N A	tdk terisi					tida k ada
1	I. PILAR SOSIAL	1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan	24	23	1	0	Dinsos, BPS, Dinkes, DPPPAPPKB, DPUPR, DPRKPLH, Dindikpora, Dindukcapil, BPBD, BPAPKAD, Dinperinaker	16	3	4	0
		2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7	7	0	0	Dinkes, DKPPP	7	0	0	0
		3	Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	28	22	6	0	Dinkes, BPS, BNN, Polres, DPPPAPPKB,	16	0	6	0

N O	PILAR	GOAL		JUMLAH				PERANGKAT DAERAH	STATUS CAPAIAN			
				INDIKATOR	TERISI	N A	tdk terisi					tida k ada
		4	Menjamin Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Mempromosikan Belajar Sepanjang Hayat	11	8	3	0	Dindikpora, BPS	6	0	2	0
		5	Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memperdayakan Kaum Perempuan	10	8	2	0	DPPPAPPKB, BPS, KESBANGPOL	8	0	0	0
		JUMLAH		80	68	12	0		53	3	12	0
2	II. PILAR EKONOMI	7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yg Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yg Produktif & Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yg Layak Untuk Semua	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif & Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	10	9	1	0	BPS, DISNAKER, DINDIKPORA, DINBUDPAR	3	6	0	0
		9	Membangun Infrastruktur Yg Tangguh , Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	3	2	1	0	BPS	0	2	0	0
		10	Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara	6	4	2	0	BPS, DINPERMADES, BAG. HUKUM, DISNAKER	2	2	0	0
		17	Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara	9	5	4	0	BPAPKAD, BPS, BAPPEDA, DINDUKCAPIL	4	0	1	0
		JUMLAH		28	20	8	0		9	10	1	0
3	III. PILAR LINGKUNGAN	6	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	12	7	5	0	DPUPR, BPS, DINKES, DPRKPLH	6	1	0	0
		11	Menjadikan Kota Dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh Dan Berkelanjutan	12	9	3	0	DPRKPLH, DINBUDPAR, BPBD, DPRKPLH, POLRES, BPS	5	1	3	0
		12	Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkenajutan	3	0	3	0	DPRKPLH	0	0	0	0
		13	Mengatasi Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	2	2	0	0	BPBD	1	0	1	0
		14	Melakukan Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera Dan Maritim Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		15	Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		JUMLAH		29	18	11	0		12	2	4	0
4	IV. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	16	Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Kokoh	18	14	4	0	POLRES, BAG. HUKUM, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN AGAMA, BPAPKAD, BAG. ORTALA, BAG. PBJ, DINDUKCAPIL, KESBANGPOL, DPPPAPPKB,	10	1	3	0
		JUMLAH		18	14	4	0		10	1	3	0
		JUMLAH INDIKATOR		155	120	35	0		84	16	20	0

Sumber : Bappeda 2024, data diolah

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Ditinjau

dari keterkaitan permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi, seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di antaranya:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung;
2. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung;
3. Masih adanya kasus gizi buruk;
4. Masih tingginya kasus kematian ibu;
5. Masih adanya kasus kematian bayi dan balita;
6. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal;
7. Perlunya peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung;
8. Masih tingginya lahan potensial kritis;
9. Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup,
10. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan mempunyai pengaruh penting terhadap kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih mempunyai permasalahan dan tantangan untuk penanganannya, di antaranya:

- a) Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung tahun 2023 yaitu sebesar 7,50;
- b) Masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP Sederajat;
- c) Masih terdapat fasilitas pendidikan ruang kelas dalam kondisi kurang baik;
- d) Masih terdapat SMP yang belum terakreditasi minimal. Terjadi penurunan persentase SMP yang terakreditasi minimal selama tiga

tahun terakhir yaitu pada Tahun 2021 tercapai sebesar 88,75%, tahun 2022 tercapai sebesar 86,75% dan Tahun 2023 tercapai sebesar 85,71%, hal ini terjadi disebabkan karena persepsi yang kurang tepat bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi merupakan tanggung jawab pimpinan, dan semakin baik jenjang akreditasi semakin sulit mengakses bantuan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, masih ada keterbatasan kuota dan anggaran pelaksanaan akreditasi;

- e) Masih terdapat penduduk lulusan SMP yang belum memiliki sertifikat Pendidikan sebesar 55,95%;
- f) Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan pada penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah, pada tahun 2023 yaitu sebesar 51,95%;
- g) Menurunnya persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) dari 75,18% pada tahun 2022 menjadi 70,81% di Tahun 2023.

2) Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan memiliki faktor strategis juga dalam pembangunan manusia yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat, Pembangunan kesehatan tersebut sesuai siklus kehidupan manusia. Upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Temanggung masih menemui berbagai permasalahan dan tantangan diantaranya:

- a) Masih ditemukan kasus kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) pada Tahun 2023 yaitu sebesar 13,04% yang disebabkan belum optimalnya kelengkapan sarana prasarana penanganan kegawatdarutan asfiksi atau penyakit pada bayi dan kapasitas, belum optimalnya keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawadaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan, belum optimalnya sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi serta kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal dan pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal;
- b) Masih tingginya Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup) dimana pada Tahun 2023 mencapai angka sebesar 16,10%, yang disebabkan karena faktor risiko yang dialami oleh ibu pada saat kehamilan dan balita dengan infeksi meningitis, kelainan jantung, sesak nafas serta kurangnya pendidikan pola asuh balita dan pemantauan tumbuh kembang balita;
- c) Masih tingginya Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2023 yaitu sebesar 9,22%, hal ini disebabkan karena

kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal dan pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal, belum lengkapnya sarana prasarana penanganan kegawatdaruratan asfiksia atau penyakit pada bayi, belum optimalnya kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan, serta belum optimalnya sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi.

- d) Masih ditemukannya kasus Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk Penyakit tidak menular disebabkan oleh masih terdapat pola pikir masyarakat terkait kunjungan ke pelayanan kesehatan yang dilakukan hanya saat sakit serta adanya rekapitulasi data kasus hipertensi dari fasilitas kesehatan swasta yang belum melaporkan kepada Dinas Kesehatan, adanya perubahan prevalensi penderita hipertensi berdasarkan Riskesdas Tahun 2018 terkait sasaran hipertensi yaitu 35,5% dari total penduduk usia > 15 tahun juga menjadi salah satu hambatan dalam capaian indikator ini serta dalam pelaporan data by name by address dari faskes swasta belum optimal karena laporan belum rutin dilakukan sehingga evaluasi masih belum berjalan optimal. Sedangkan faktor penyebab kasus Penyakit Menular antara lain Masyarakat beranggapan bahwa TBC bisa diobati secara mandiri, Kesadaran populasi berisiko HIV/AIDS untuk tes HIV masih belum optimal, belum adanya regulasi/kebijakan Pemda tentang Pemeriksaan Triple Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) wajib bagi ibu hamil untuk pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA), Tidak optimalnya deteksi dini pada kelompok rentan / potensial wabah serta adanya perbedaan data dan perbedaan persepsi kriteria DBD berdasarkan WHO dengan persepsi di masyarakat yang menyebabkan penanganan DBD kurang optimal.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan dan tantangan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

- a) Masih adanya resiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu baru 69,21% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase;
- b) Masih diperlukannya upaya untuk menjaga trotoar dalam kondisi baik. Hingga Tahun 2023 capaian trotoar dalam kondisi baik baru 66,66%;

- c) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman. Hingga tahun 2023, akses air minum baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 95,95%.
- 4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Permasalahan yang perlu diatasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya :
- a) Masih adanya RTLH di Kabupaten Temanggung sampai akhir tahun 2023 sebanyak 9.828 unit atau 4,5% dari total 218.519 unit rumah;
- b) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman. Hingga Tahun 2023, sanitasi baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 94.39%.
- 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan di Kabupaten Temanggung masih terdapat permasalahan yang perlu perhatian di antaranya:
- a) Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran dengan capaian Tahun 2023 sebesar 60,64%, hal ini disebabkan karena Temanggung memiliki wilayah yang luas dengan topologi pegunungan dan memiliki model permukiman yang berkerumun dengan jalan lingkungan yang sempit sehingga terkadang sulit dalam menjangkau lokasi kebakaran, pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah, dan sarana prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum sesuai jangkauan wilayah
- b) Rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu masih sebesar 39% pada Tahun 2023 yang disebabkan karena wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, dan jalan sempit, serta minimnya sarana prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi dan masih terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing-masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran.
- 6) Bidang Sosial
- Pembangunan di bidang sosial untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup manusia maupun masyarakat melalui upaya-upaya menuju kesejahteraan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan untuk diperhatikan yaitu:
- a) Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2023

berdasarkan data dari BPS mencapai angka sebesar 9,26%;

- b) Belum optimalnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mana pada Tahun 2021 mencapai angka 100%. Namun, pada Tahun 2022 angka capaian turun menjadi 64,30% dan di Tahun 2023 naik menjadi 65,29%.

7) Bidang Penanggulangan Bencana

Permasalahan yang dihadapi pada bidang penanggulangan bencana yaitu masih diperlukan peningkatan penanganan bencana untuk mencapai target risiko bencana, cakupan desa tangguh bencana, desa mitigasi terhadap desa rawan bencana.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan di bidang tenaga kerja menjadi penting karena perlu adanya perhatian terhadap penduduk usia kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan maupun kompetensi tenaga kerja sehingga Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan antara lain:

- a) Masih adanya pengangguran yang ditunjukkan dengan angka TPT sebesar 2,32% pada Tahun 2023 yang disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja serta menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung;
- b) Masih adanya tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan karena terbatasnya skill yang dimiliki;
- c) Masih kurangnya peluang kerja formal di Kabupaten temanggung.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, sedangkan pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, dimana pembangunan ini sinergi dari seluruh pihak, Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dan tantangan sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan karena keterbatasan perempuan dalam memahami potensi diri yang ada dan kuatnya budaya patriatri dimana laki laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan;

- b) Masih kurangnya persentase keterwakilan perempuan di Lembaga pemerintahan.

3) Bidang Pangan

Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan menjadi tujuan dalam pembangunan di bidang pangan, Dalam mewujudkan hal tersebut, masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a) Masih diperlukan upaya-upaya untuk tetap mencukupi ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung karena ada jeda masa panen sehingga perlu penyimpanan hasil panen di Gudang cadangan pangan;
- b) Masih rendahnya persentase kelompok tani yang naik kelas, capaian Tahun 2023 hanya 40% hal ini disebabkan oleh Sebagian kelompok tani yang tidak aktif;
- c) Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah karena masyarakat sudah terbiasa makan makanan yang berasal dari beras sehingga diperlukan pemahaman yang terus menerus kepada masyarakat terkait pentingnya diversifikasi pangan termasuk dibutuhkan sentuhan inovasi teknologi yang mampu menghasilkan bahan pangan lokal tertentu.

4) Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting untuk mencegah kerusakan lingkungan, di mana dalam pelaksanaan pembangunannya terdapat beberapa permasalahan di antaranya:

- a) Masih tingginya lahan potensial kritis yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung yaitu seluas 10,28 Ha pada Tahun 2023 dengan penanganan yang baru mencapai 2,46% dari luas lahan kritis yang ada, hal ini disebabkan tingginya alih fungsi lahan yang tidak semestinya (lahan tanaman keras ditanami tanaman semusim).);
- b) Adanya fenomena perubahan iklim yang berpotensi memberikan dampak merugikan tidak hanya pada sektor lingkungan tetapi juga sektor lainnya seperti kesehatan, bencana, kebakaran, polusi, penurunan debit mata air, penurunan kualitas dan produktifitas pertanian, dan lain sebagainya;
- c) Terjadinya penurunan kualitas air sebagai dampak berkembangnya industri;
- d) Diperlukan evaluasi dalam pengukuran kualitas udara yang lebih akurat melalui pemanfaatan teknologi dan alat ukur yang tepat.

5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

- a) Belum maksimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Perlunya peningkatan kepemilikan KIA, hingga tahun 2023 persentasenya sebesar 84,21%;
- c) Perlunya peningkatan kepemilikan Akte Kelahiran, hingga tahun 2023 persentasenya baru 77,90%.

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat berperan dalam pembangunan daerah, namun demikian masih ada permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Diperlukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada, hal ini mengingat peran penting desa dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini sumber daya pengelola yang masih rendah serta potensi desa masih dipandang rendah dan belum mampu menopang hidup sehingga pengembangan unit-unit usaha di desa masih perlu upaya keras agar menarik untuk dikembangkan.
- b) Belum seluruh desa berpredikat mandiri dengan capaian Tahun 2023 baru sebesar 20,68%.

7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain:

- a) Masih adanya sasaran unmetneed pada tahun 2023 sebesar 8,60% atau 11.059 pasangan dari jumlah total 128.622 pasangan usia subur yang disebabkan karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya keluarga berencana.
- b) Belum maksimalnya persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 52,71% atau hanya 68 kampung KB dari 129 desa yang memenuhi IDM. Hal ini disebabkan karena potensi kader dalam mendukung program masih belum maksimal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kampung KB.

8) Bidang Perhubungan

Bidang perhubungan juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, namun masih ditemukan beberapa permasalahan

sektor perhubungan di antaranya masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan karena terlalu banyaknya lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Permasalahan terkait sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu masih banyak ruas jalan kabupaten yang belum didukung perlengkapan jalan seperti Lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas, guardrail atau pagar pengaman jalan yang memadai terutama di ruas jalan akses menuju tempat pariwisata. Permasalahan lain yang ditemukan di antaranya masih tingginya tingkat kejadian laka lantas yang salah satunya potensi disebabkan dengan adanya kendaraan bermotor yang tidak layak jalan. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas tahun 2023 sebanyak 294 kejadian. Selain itu masih adanya terminal tipe C dalam kondisi kurang baik, Terminal tipe C dengan kondisi kurang baik yaitu terminal Candirot, namun akan dilaksanakan rehab pada kurun Tahun 2020-2023.

9) Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan dalam rangka pembangunan daerah, meskipun demikian, usaha tersebut masih menemui tantangan dan permasalahan di antaranya adalah

- a) Masih diperlukan pengoptimalan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat karena masih ada *blank spot* di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b) Masih adanya PPID Badan Publik yang tidak aktif khususnya PPID Pembantu, salah satunya disebabkan karena keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID. Persentase PPID Badan Publik yang tidak aktif pada Tahun 2023 sebesar 23,46%.

10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan UKM mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pendistribusian hasil pembangunan. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan beserta tantangan yang dihadapi Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a) Masih terdapat koperasi tidak sehat yang memerlukan pengawasan;
- b) Terdapat banyak Usaha Kecil dan Menengah muncul namun tidak naik kelas karena standar omset yang meningkat berdasarkan UU Cipta Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
- c) Masih diperlukan penguatan dalam pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif;
- d) Perlunya peningkatan pemberian dukungan fasilitasi pengembangan usaha bagi usaha mikro.

11) Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan dan tantangan yang masih ditemukan pada pembangunan di bidang penanaman modal yaitu masih rendahnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) karena rendahnya minat terhadap lokasi yang ditawarkan.

12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kualitas dan kapasitas kepemudaan memiliki pengaruh yang cukup penting bagi pembangunan serta meningkatkan prestasi keolahragaan, meski demikian beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah masih minimnya prestasi bidang Kepemudaan dan Olahraga karena kurangnya kapasitas SDM, keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, tidak terdatanya atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti.

13) Bidang Statistik

Permasalahan pembangunan di bidang statistik berkaitan erat dengan cakupan ketersediaan data makro daerah, di antaranya:

- a) Masih adanya dualisme data statistik yang berasal dari kegiatan sektoral yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan data statistik yang sama yang dikelola BPS dari kegiatan statistik dasar;
- b) Perlu peningkatan pengelolaan data statistik sektoral;
- c) Perlu peningkatan validitas data produsen;
- d) Perlunya peningkatan koordinasi dalam pengumpulan data dari produsen data di luar Pemkab Temanggung (karena keterbatasan kewenangan produsen data dalam diseminasi data statistik).

14) Bidang Persandian

Permasalahan pembangunan di bidang persandian, antara lain :

- a) Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah yang disebabkan karena untuk melaksanakan pentest terhadap sistem atau aplikasi Pemerintah Daerah masih terdapat keterbatasan kemampuan SDM Persandian dan Keamanan informasi yang dapat mengoperasikan program dan kegiatan;
- b) Belum optimalnya jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan.

15) Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:

- a) Perkembangan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya belum berbanding lurus dengan penyelenggaraan event seni dan budaya serta

kualitas SDM yang belum merata menyebabkan masih ditemukan kelompok kesenian yang tidak produktif;

- b) Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung karena penggalian dan pendokumentasian sejarah lokal di Kabupaten belum terlaksana dengan baik serta semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali sejarah lokal Temanggung.

16) Bidang Perpustakaan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di bidang perpustakaan diantaranya:

- a) Masih kurangnya upaya pembudayaan Gemar Membaca di kalangan masyarakat;
- b) Perlu adanya peningkatan upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Kabupaten Temanggung.

17) Bidang Kearsipan

Dalam penyelenggaraan kearsipan masih ditemukan permasalahan yaitu diperlukan peningkatan perbaikan dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan indeks manajemen kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan masih mempunyai permasalahan yang masih dihadapi yaitu:

- a) Perlu peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum;
- b) Masih perlunya peningkatan swasembada pada ikan konsumsi;
- c) Masih perlunya peningkatan pembinaan nelayan perairan umum.

2) Bidang Pertanian

Pembangunan di bidang pertanian mempunyai peranan penting karena sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, Permasalahan yang dihadapi pada bidang pertanian:

- a) Penurunan luas panen tanaman pangan disebabkan adanya peralihan komoditas dan peralihan peruntukan lahan;
- b) Penurunan produksi tanaman pangan disebabkan karena penurunan luas panen, perubahan iklim yang ekstrem, serta serangan hama dan penyakit tanaman;
- c) Penurunan produktivitas tanaman pangan yang berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah produksi dan luas panen;
- d) Penurunan produktivitas hasil peternakan;
- e) Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT mengakibatkan ketidakmampuan dalam pengendalian bencana

pertanian.

3) Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, sumber pendapatan daerah, pemberdayaan UKM, dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan, Namun demikian, masih dihadapkan dengan permasalahan di antaranya:

- a) Kurangnya perencanaan pada saat pembangunan maupun pengembangan destinasi menyebabkan perkembangan objek wisata kurang optimal;
- b) Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata yang disebabkan karena kurangnya pembinaan serta pendampingan dimulai dari perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata, serta kurangnya peningkatan intensitas pembinaan atau pendampingan desa wisata;
- c) Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan ekonomi kreatif pendukung wisata serta keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dan belum tersedia aturan secara detail yang mengatur tentang pelaku ekraf.

4) Bidang Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi di bidang perdagangan di antaranya:

- a) Kualitas sarana dan prasarana pasar belum kompetitif untuk bersaing dengan pasar modern karena masih dalam kondisi kurang baik;
- b) Ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan masih kurang karena kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati zona dagang;
- c) Diperlukan perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas.

5) Bidang Perindustrian

Pembangunan di bidang perindustrian masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

- a) Masih terdapat IKM Unggulan Daerah yang belum mendapatkan fasilitasi;
- b) Belum optimalnya pembinaan industri penghasil cukai dikarenakan adanya penyesuaian terhadap landasan hukum terkait anggaran DBHCHT.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah antara lain:

- a) Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- b) Dokumentasi perundangan melalui JDIH belum berjalan dengan efektif;
- c) Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi;
- d) Diperlukan peningkatkan kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah;
- e) Diperlukan perbaikan dan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- f) Masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terhambat sehingga tidak selesai tepat waktu;
- g) Masih terdapat BUMD yang belum mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP;
- h) Diperlukan pengoptimalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan yang dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan;
- i) Diperlukan pengoptimalan dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan;
- j) Perlunya peningkatan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2) Fungsi Sekretariat DPRD

Beberapa permasalahan yang ada pada fungsi Sekretariat DPRD antara lain:

- a) Pengesahan Raperda yang tepat waktu cenderung menurun karena membutuhkan waktu penyusunan yang lebih lama termasuk proses pembahasan dan harmonisasi;
- b) Masih rendahnya jumlah Perda Inisiatif dibandingkan dengan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif;
- c) Diperlukan pengoptimalan pelaksanaan kegiatan aspirasi sesuai dengan yang direncanakan.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, Dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a) Perlunya peningkatan keoptimalan persentase ketercapaian kinerja

- pembangunan daerah;
 - b) Perlunya peningkatan konsistensi kegiatan rencana pembangunan;
 - c) Perlunya peningkatan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.
- 2) Keuangan
- Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:
- a) Perlu peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah (IKPD);
 - b) Perlunya peningkatan pemahaman SDM dalam pemanfaatan aset daerah;
 - c) Perlu peningkatan anggaran dan kapasitas SDM untuk pendataan baru dan intensifikasi pendataan objek pajak daerah.
- 3) Kepegawaian
- Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di bidang kepegawaian antara lain:
- a) Perlu penerapan sistem merit secara optimal dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Temanggung;
 - b) Perlunya peningkatan keterwakilan jumlah perempuan dalam JPT, JA, dan JP dalam rangka pengarusutamaan gender;
 - c) Perlunya optimalisasi pelaksanaan updating data kepegawaian.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
- Permasalahan yang ditemukan pada bidang pendidikan dan pelatihan yaitu masih rendahnya capaian peningkatan kompetensi pengembangan ASN yang diukur melalui kinerja persentase kompetensi diklat kepemimpinan dimana jumlah pejabat yang telah lulus diklat kepemimpinan.
- 5) Penelitian dan Pengembangan.
- Pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan dihadapkan dengan permasalahan belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- 1) Fungsi Inspektorat Daerah
- Penerapan sistem pengawasan masih dihadapkan permasalahan antara lain:
- a) Diperlukan upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi;
 - b) Perlu peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c) Perlu peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja.

7. Unsur Kewilayahan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait unsur kewilayahan (Kecamatan), antara lain :

- a) Masih terdapat sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi kurang baik;
- b) Perlu pengoptimalan kualitas layanan publik di kecamatan;
- c) Perlunya upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran PBB tepat waktu.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terkait Kesatuan Bangsa dan Politik di antaranya diperlukan peningkatan cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Sumber perumusan isu strategis Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun berdasarkan:

- 1) Permasalahan pembangunan dalam RPD
- 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD
- 3) Arah kebijakan RPD, dan
- 4) Arah kebijakan RKP

Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Penurunan Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996).

Capaian angka kemiskinan kabupaten temanggung Tahun 2023 sebesar 9,26 dengan jumlah penduduk miskin 72,96 ribu jiwa, Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,99, kemiskinan ekstrim 0,96 dengan 7.510 jiwa dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,17.

Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada Tahun 2024 diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

2. Penurunan Stunting

Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14% dan angka *prevalensi wasting* pada balita menjadi 7% sampai dengan Tahun 2024. Angka stunting di Kabupaten Temanggung turun dari 28% menjadi 11,59%. Stunting dapat disebabkan karena banyak faktor, di antaranya adalah kesehatan ibu yang kurang bagus serta pemenuhan gizi yang baik dan cukup bagi anak. Oleh karena itu penanganan stunting memerlukan keterlibatan dan kontribusi semua stakeholder khususnya dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Di sisi lain, pemenuhan hak anak seutuhnya untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing menjadi tantangan pembangunan yang harus diperhatikan.

3. Kualitas pembangunan manusia

Kualitas pembangunan manusia dapat diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dilihat dari tiga dimensi yaitu Pendidikan, kesehatan dan ekonomi, Dimensi pendidikan ditunjukkan dengan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, Data Tahun 2023. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian pada angka 7,50 tahun dan belum mencapai target Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 12 Tahun. Oleh karena itu, mewujudkan kesempatan belajar yang merata bagi seluruh anak usia sekolah perlu menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat terutama dalam hal penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, peningkatan angka partisipasi anak sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Manusia yang berkualitas, tidak hanya dilihat dari pendidikan tetapi juga derajat kesehatannya. Oleh karena itu mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik perlu terus menjadi perhatian seluruh pihak terutama kesehatan ibu, bayi dan anak.

Pembangunan manusia yang berkualitas harus sejalan dengan perwujudan manusia yang berdaya saing. Sumber daya manusia yang berdaya saing dapat ditinjau dari sisi ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan tidak adanya gap ketersediaan tenaga kerja (*demand*) dengan lapangan kerja

(supply). Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan angka 2,32% untuk tingkat pengangguran terbuka. Meski demikian, capaian tersebut menunjukkan masih ada sebagian angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan kerja. Di sisi lain, terjadinya bonus demografi menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan pembangunan daerah.

4. Percepatan Pemulihan Ekonomi

Momentum pemulihan ekonomi Tahun 2022 seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik, menjadi landasan untuk mendorong akselerasi ekonomi guna mengembalikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Meski perekonomian Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, namun seiring dengan sistem kesehatan yang semakin membaik untuk penanganan pandemi Covid-19 serta vaksinasi yang semakin merata, percepatan pemulihan ekonomi menjadi perhatian pemerintah daerah untuk pembangunan pasca pandemi Covid-19. Sejumlah tantangan ke depan akan dihadapi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi Kabupaten Temanggung, seperti rendahnya investasi, tingginya inflasi dan kurangnya pemakaian produk dalam negeri serta keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana kewilayahan diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

5. Tata Kelola pemerintahan yang baik

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur.

Menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 pemerintah daerah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yaitu digitalisasi pelayanan publik di semua sektor, baik di tingkat kabupaten, kecamatan serta desa/kelurahan. Digitalisasi pelayanan publik diimplementasikan dengan mengusung sistem kerja berbasis *information, communication, dan technology* (ICT) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel, tanpa batas waktu dan *excellent*. Sebagai kelembagaan di era modern, maka efisiensi dan efektivitas kerja dengan memangkas biaya

dan waktu; meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Menghadapi tantangan era disrupsi, maka pemerintah daerah harus mampu melakukan pelayanan berbasis digital namun tidak meninggalkan sisi kemanusiaan terutama pelayanan yang bersifat langsung berinteraksi dengan masyarakat. Tuntutan masyarakat di era ini adalah adanya pemerintah yang lebih dekat, hadir dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya sehingga terwujud kepuasan masyarakat.

Kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini antara lain karena keterbatasan kualitas SDM aparatur sehingga mempengaruhi kualitas kinerja pemerintahan. Perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain digitalisasi administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten.

Isu strategis daerah juga menjadi acuan dan prioritas pembangunan pada janji tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD, di mana dalam penyusunan rencana pembangunannya seiring dengan tahapan perencanaan pembangunan dan berdasarkan permasalahan yang ada, pelibatan Kepala Daerah dan DPRD ada dalam tahapan perencanaan pembangunan sehingga mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

2.4 KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Kinerja Prioritas Nasional (PN) RKPD 2024 di Daerah

Tabel 2.279										
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan di Daerah dengan Nasional										
No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
1	PN 1:									
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan									
	S.1.1. Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan									
	1.1. Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional (%)	11,2	12,2	12,3	13,2	-	-	-	-	-
	1.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,3	87,2	92,9	94,1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78.8	79,7	80,1	93,5
	1.3. Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan WPP)	11	11	11		Tingkat konsumsi ikan	23,34	24,34	24,34	24,39
	S.1.2. Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi									
	2.1. Rasio kewirausahaan nasional (%)	2,93	2,89	2,86	3,04	Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	-	18,46	64,62	70,46

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
	2.2. Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	1,77	1,84	2,25		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	24,42	23,91	23,42	22,94
	2.3. Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	0,73	5,45	2,79		-	-	-	-	-
	2.4. Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	-2,93	3,39	4,89		-	-	-	-	-
	2.5. Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	19,87	19,24	18,34		Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	27,47	27,47	27,47	26,19
	2.6. Nilai devisa pariwisata (miliar US\$)	3,6	0,55	7,04	14,63					
	2.7. Kontribusi PDB pariwisata(%)	2,24	2,4	3,6	3,6	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,5	1,53	1,53	1,53
	2.8. Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	-0,3	2,6	4,25	4,55	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	55,33	78,01	53,61	84,88
	2.9 Pertumbuhan investasi(PMTB) (%)	-4,9	3,8	3,9	4,4	Pertumbuhan realisasi investasi	n.a	n.a	n.a	n.a
	2.10 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	2,91	35,18	16,45		-	-	-	-	-
	2.11. Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-8,4	18	16,3		-	-	-	-	-
	2.12. Tingkat inflasi umum (%)	1,68	1,87	5,51	2,61	Inflasi	1,9	2,18	5,63	2,89
	2.13 Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	8,33	9,12	10,39	9,12	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

Tabel 2.280
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
2	PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan									
	S.2.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)									
	1.1. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)KTI (%/tahun)	-0,82	4,9	6,21		Bukan Kewenangan Daerah				
	1.2. IPM KTI (nilai min-maks)	60,44 - 76,24	60,62- 76,88	61,39 - 77,44		Bukan Kewenangan Daerah				
	1.3. Persentase penduduk miskin KTI (%)	11,99	11,62	11,58		Bukan Kewenangan Daerah				
	S.2.2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)									
	2.1. Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/Tahun)	-2,3	3,4	5,14	5,05	Pertumbuhan Ekonomi	-2,13	3,34	5,2	5
	2.2. IPM KBI (nilai min-maks)	69,69 - 80,77	69,90- 81,11	70,45 - 81,65	71,15 - 82,46	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	69,57	69,88	70,77	71,33
	2.3. Persentase penduduk miskin KBI (%)	9,74	9,23	9,06		Angka Kemiskinan	9,96	10,17	9,33	9,26

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

Tabel 2.281
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
3	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing									
	S.3.1.Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan									
	1.1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,4	2,24	2,14		-	-	-	-	-
	1.2. Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	99,11	99,21	99,37		Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	84	99,68	99,29	99,82
	S.3.2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk									
	S.3.2.1. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):									

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
	2.1. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	82,07	86,96	91,77		-	-	-	-	-
	2.2. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,1	64,31	66,88		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	83	111,9	61,7	65,29
	S.3.2.2 Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	3,8	3,5	2,5		Tingkat kemiskinan ekstrem (%)		2,07	0,96	0,33
S.3.3. Terpenuhi layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan										
	3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	189	n.a	n.a		Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	95,83	174,38	75,32	44,96
	3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 100.000 kelahiran hidup)	16,85	n.a	n.a		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 100.000 kelahiran hidup)	12,65	12,72	13,23	13,04
	3.3. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	70	65,8	63,17		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	n.a	n.a	n.a	n.a
	3.4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,1	24,37	21,6		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14,23	13,13	13,03	11,59
	3.5. Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	8,08	7,08	7,7		-	-	-	-	-
	3.6. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	301	354	354		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	38,19	67,88	95,65	100
	3.7. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	320	347	372		Angka Penemuan kasus malaria (API)	0	0,005	0,0025	0,0002
	3.8. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kab/kota)	416	421	403		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	0,38	0	0,125	0,0004
	3.9. Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8	21,8	21,8		-	-	-	-	-
	3.10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1	9,1	9,1		-	-	-	-	-
	3.11. Nilai rata-rata hasil PISA:					-	-	-	-	-
	3.11.1 Membaca	n.a	n.a	n.a		-	-	-	-	-
	3.11.2. Matematika	n.a	n.a	n.a		-	-	-	-	-
	3.11.3 Sains	n.a	n.a	n.a		-	-	-	-	-
	3.12. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,9	8,97	9,08		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,24	7,25	7,41	7,5
	3.13. Harapan lama sekolah (tahun)	12,98	13,08	13,1		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,14	12,32	12,55	12,61
S.3.4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda										
	4.1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,89	61,38	69,87		Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	60	80	80	80
	4.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,06	91,27	91,63		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,62	95,31	95,71	95,99
	4.3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,67	51	53,33	60,59	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,57	3,78	3,98	3,98

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
	S.3.5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan									
	5.1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	31,85	35,83	40,07	41,31	-	-	-	-	-
	S.3.6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing									
	6.1. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	44,35	45,69	44,57		-	-	-	-	-
	6.2. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,02	40,39	40,49	62,13	Persentase Tenaga Kerja formal	31,69	24,17	29,3	24,81
	6.3. Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university					Tidak menjadi kewenangan				
	6.3.1. Top 200	0	0	0		Tidak menjadi kewenangan				
	6.3.2. Top 300	1	1	1		Tidak menjadi kewenangan				
	6.3.3. Top 500	2	2	2		Tidak menjadi kewenangan				
	6.4 Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	85	87	75		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif / 72,42	Sangat Inovatif / 72,42	Inovatif	Sangat Inovatif / 72,42
	6.5. Peringkat pada Olympic Games	n.a	55	n.a		-	-	-	-	-
	6.6 Peringkat pada Paralympic Games	n.a	41	n.a		-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

Tabel 2.282
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
4	PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan									
	S.4.1 Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya									
	1.1. Indeks Capaian Revolusi Mental	69,57	70,47	71,96		Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	0	0	65	70
	1.2. Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	75,53	72,93	75,2		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	n.a	n.a	n.a	n.a
	S.4.2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan									
	2.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,65	51,9	59,71			n.a	3,31	3,67	3,67
	S.4.3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial									
	3.1. Indeks Pembangunan Masyarakat	0,62	0,63	0,64	62,85	Indeks Toleransi	4	4,5	4,5	4,5
	S.4.4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat									
	4.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	67,46	72,39	73,09	76,02	Indeks Toleransi	0,83	4,33	4,33	4,33
	S.4.5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa									
	5.1. Indeks Pembangunan Keluarga	53,94	54,01	56,07	61,43	Indeks Pembangunan Keluarga	0	55,97	55,97	58,19
	5.2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	20,7	20,7	21		Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	21,32	9,8	6,67	14,1
	S.4.6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif									
	6.1. Nilai Budaya Literasi	61,63	54,29	65,70		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

Tabel 2.283
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
5	PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar									
	S.5.1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar									
	1.1. Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	59,54	60,9	60,66		Persentase rumah layak huni	90,24	91,15	94,75	95,5
	1.2. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	59	60	62		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	5,79	1,62	1,64	1,67
	1.3. Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif %)	0	0	0,06		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	91,89	95,29	97,97	98,32
	1.4. Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif %)	65,34	66,81	67,67		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	93,9	94,52	95,32	95,95
	S.5.2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar									
	2.1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 km)	2,16	2,2	2,09		Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				
	2.2.Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	24	25	26	30	Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				
	2.3. Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	82,83	90,36	91,37		Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				
	2.4. Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara (%)	86	87	74,51		Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				
	S.5.3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan									
	3.1. Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)		Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				
	3.2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	63,24	64,65	63,45		Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				
	S.5.4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan									
	4.1. Rasio elektrifikasi (%)	99,2	99,45	99,63	99,79	Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				
	4.2. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	1.089	1.123	1.173	1.337 kWh/kapita	Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				
	4.3. Penurunan emisi GRK sektor energi (Juta ton)	64,4	69,5	91,5		Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				
	S.5.5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK									
	5.1. Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)(%)	97,5	96,99	96,97		Tidak menjadi kewenangan Kabupaten				

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

Tabel 2.284
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
6	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim									
	S.6.1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup									
	1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,27	71,45	72,42	72,54	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,61	69,51	69,86	74,83
	S.6.2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim									
	2.1. Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	0,37	0,43	0,9		-	-	-	-	-
	S.6.3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline									
	3.1. Persentase penurunan emisi GRK (%)					-	-	-	-	-
	3.1.1. Kumulatif	26,44	27,07	26,87	27,82	-	-	-	-	-
	3.1.2. Tahunan	39,55	32,97	26,7	35,53	-	-	-	-	-
	3.2. Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	39,01	31 ,42	28,49	27,82	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

Tabel 2.285
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 7 Memperkuat Stabtlitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
7	PN 7 : Memperkuat Stabtlitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik									
	S.7.1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal									
	1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	73,66	74,12	80,41	79,51	-	-	-	-	-
	1.2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	70,4	77,23	79,71	85,5	-	-	-	-	-
	S.7.2. Optimalnya kebijakan luar negeri									
	2.1. Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	96,58	112,06	4,98		-	-	-	-	-
	S.7.3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap									
	3.1. Indeks Pembangunan Hukum	0,54	0,6	0,56	0,66	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,41	82,06	83,41	84,97
	S.7.4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
	4.1. Indeks Pelayanan Publik Nasional	3,8	3,79	3,93	3,78	-	-	-	-	-
	S.7.5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia									
	5.1. Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)	100	100	100	100	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

2.4.2 Intervensi Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Perekonomian Indonesia mampu bertahan dengan baik dan stabil ditengah tantangan ekonomi global yang cukup kuat seperti perlambatan ekonomi, inflasi yang tinggi dan ketidak pastian

geopolitik. Hal tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Kabupaten Temanggung menerapkan ekonomi yang berbasis potensi lokal dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Intervensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai berikut:

Tabel 2.286
Intervensi Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

N o	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
1	Pasarku Gandem : Pasar yang kreatif, inovatif dan inklusif tanpa meninggalkan budaya lokal. GANDEM diambil dari Bahasa Jawa yang memiliki arti SANGAT MEMUASKAN	Dinkopdag	Pengembangan UMKM	50.000.000	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) : - 2022 : 30,93 - 2023 : 33,29 PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah) : - 2022 : 5.141,96 - 2023: 5.637,46 PDRB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah) : - 2022 : 5.791,78 - 2023 : 6.174,02
			Pemberdayaan UMKM	25.000.000	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.161.303.300	
		Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	523.500.000	
		DKPPP	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.007.101.143	
		DPUPR	Pengelolaan Sumber daya Air	10.234.706.800	
		Dinbudpar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	567.925.000	
JUMLAH				29.569.536.243	

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

b. Penurunan Kemiskinan

Kebijakan Tranformasi ekonomi yang inklusif diharapkan mampu memberikan manfaat aktivitas ekonomi dan pembangunan bagi setiap lapisan masyarakat , termasuk kelompok rentan. Selain itu penurunan kemiskinan diharapkan tidak hanya sekedar menurunkan angka kemiskinan akan tetapi juga dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan sebagai salah stau langkah dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan kesejahteraan yang merata. Hal tersebut dapat berhasil, apabila dalam implementasin ya terjadi kerjasama dan kolaborasi yang konsisten oleh semua stakeholder terkait termasuk pemerintah daerah. Berikut intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam penurunan kemiskinan.

Tabel 2.287
Intervensi Daerah dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
2	- Pasar Pagi Gemawang - Sirkus UMKM (Sirkulasi UMKM)	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan	189.348.476.380	TPT : - 2022: 2,54 - 2023 : 2,32 Angka Kemiskinan : - 2022 : 9,33 - 2023 : 9,26
		Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	249.485.207.909	
		DPUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.645.297.000	
		DPRKPLH	Program Pengembangan Perumahan	962.076.200	
			Program Kawasan Permukiman	6.597.124.790	
		Dinsos	Program Rehabilitasi Sosial	874.667.400	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	21.783.062.415	
		JUMLAH			

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

c. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Untuk mendukung ketercapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan salah satunya adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga menjadikan kualitas Sumber daya menjadi prioritas pertama dengan harapan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mendukung transformasi dengan inovasi dan beradaptasi pada perubahan global untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, berpendidikan dan berdaya. Berikut adalah intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia :

Tabel 2.288
Intervensi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Berkualitas

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
3	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas berkarakter dan berdaya	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan	189.348.476.380	UHH: -2022 : 75,70 - 2023 : 75,77 - 2024 : 75,94 RLS - 2022 : 12,55 - 2023 : 12,61 - 2024: 12,62 TPT : - 2022: 2,54 - 2023 : 2,32 - 2024 : 2,35
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	200.000.000	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.070.000.000	
		Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	249.485.207.909	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.327.703.000	

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	445.344.000	
		DPUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.645.297.000	
		DPRKPLH	Program Kawasan Permukiman	6.597.124.790	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	442955150	
		Dinsos	Program Pemberdayaan Sosial	190.000.000	
			Program Rehabilitasi Sosial	874.667.400	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	21.783.062.415	
		BPBD	Program Penanganan Bencana	1.770.000.000	
		DPPAPPKB	Program Pengendalian Penduduk	423.256.000	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.301.754.000	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.273.400.000	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	35.000.000	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	10.000.000	
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	35.000.000	
			Program Perlindungan Perempuan	75.000.000	
			Program Perlindungan Khusus Anak	95.000.000	
		Dindukcapil	Program Pendaftaran Penduduk	750.000.000	
		Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	523.500.000	
		Dinhub	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.865.464.000	
		Dinkominfo	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.243.331.100	
		Dinbudpar	Program Pengembangan Kebudayaan	10.855.000.000	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	154.250.000	
		Dinpusip	Program Pembinaan Perpustakaan	1.181.189.000	
			Program Pembinaan Perpustakaan	1.181.189.000	
		Dinperinaker	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	800.000.000	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	440.000.000	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	210.000.000	
		Dinkopdag	Program Pengembangan UMKM	50.000.000	
		Bappeda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	353.999.400	
		BKPSDM	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	609.000.000	
		JUMLAH		534.645.170.544	

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

2.5 INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan berorientasi untuk kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Inovasi dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan inovasi dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang inovasinya berhasil diterapkan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun masyarakat.

Pemerintahan pada era saat ini memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan kebijakan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui inovasi, mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan inovasi di Kabupaten Temanggung dalam mendukung program-program pemerintah maupun mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di masyarakat, Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, diterbitkanlah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mempunyai inovasi-

inovasi terbaiknya melalui ajang lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova). Selanjutnya para pemenang lomba krenova tingkat Kabupaten akan mengikuti lomba Krenova tingkat Provinsi dan mendapatkan uang pembinaan serta fasilitas HAKI (Hak Kekayaan Intelektual berupa paten, hak cipta).

Melalui kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Temanggung berhasil menghimpun dan melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah sehingga memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif, dengan nilai Indeks Inovasi daerah 80,87

Penerapan inovasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dicantumkan di dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program dan Kegiatan. Kreativitas dan inovasi (krenova) yang tercatat dalam dokumen RKPD sampai dengan bulan Maret 2024, berjumlah 826 krenova yang terdiri dari 228 krenova yang berasal dari masyarakat, 576 krenova yang berasal dari Perangkat Daerah, dan 22 krenova berasal dari penjangkaran masyarakat.

Berdasarkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2025 yaitu Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu Mewujudkan SumberDaya Manusia yang Kompetitif dan Inovatif, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan inovasi yang sesuai dengan kearifan lokal daerah dengan nama **“BUMI MUTIARA”**. Adapun ruang lingkup inovasi tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan komoditas unggulan hulu-hilir kopi, penerapan pertanian pintar, kolaborasi, penerapan teknologi serta kemitraan. Inovasi Bumi Mutiara berfokus pada pengembangan pertanian komoditas kopi yang menjadi salah satu komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Temanggung yang didukung dengan pengembangan sektor peternakan komoditas domba melalui model pengembangan sistem pertanian terpadu. Seiring dengan permintaan kopi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, produsen diharapkan dapat meningkatkan produksi untuk mencukupi permintaan tersebut. Dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas kopi yang dihasilkan, langkah strategis diambil oleh DKPPP Kabupaten Temanggung melalui Kebun Bibit Kopi di Medari (Kecamatan Ngadirejo) dengan memberikan transformasi pengetahuan kepada para petani kopi, mengoptimalkan kebun bibit kopi sebagai penyedia bibit dan

mengupayakan bantuan bibit tanaman kopi untuk mencukupi kebutuhan tanaman sehingga kedepannya jumlah hasil produksi kopi menjadi lebih optimal. Melalui Kebun Bibit Kopi tersebut telah dilakukan pengembangan bibit kopi dengan metode stek berakar, yaitu metode perbanyakan tanaman kopi dengan cara stek untuk menghasilkan tanaman kopi baru dengan mengurangi ketergantungan pada biji kopi namun tetap mendapatkan benih kopi berkualitas. Adapun keunggulan dari inovasi tersebut antara lain: efektivitas pertumbuhan, kualitas bibit, keunggulan produktivitas, efisiensi waktu dan biaya, ketahanan terhadap hama dan penyakit, adaptasi terhadap iklim dan lingkungan, keberlanjutan dan dampak lingkungan, skalabilitas untuk produksi massal.

Model pengembangan pertanian terpadu dalam inovasi Bumi Mutiara tidak hanya berfokus pada kopi tetapi juga pada pengembangan ternak domba yang mendukung produksi kopi. Pengembangan pertanian terpadu yang mengkombinasikan kegiatan budidaya kopi dengan peternakan domba dalam hal penyediaan pupuk dari limbah kotoran domba serta penyediaan pakan domba melalui limbah kulit kopi. Melalui hubungan yang saling menguntungkan (*symbiosis mutualisme*) tersebut diharapkan selain dapat mempengaruhi produktivitas yang lebih baik namun juga dapat mewujudkan kemandirian petani dalam pengelolaan lahan pertaniannya.

Tabel 2.289
Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
1	MUSRENBANG KITA BEDA RKPD Tahun 2019	Pemerataan Pembangunan Wilayah Kompetisi Perencanaan Pembangunan dalam Musrenbang lebih Hidup, karena didukung dengan anggaran Tematik Mengurangi permasalahan kemiskinan, Pengangguran, kesehatan dll, dapat diatasi secara bersama-sama (linsek)	Adanya Semangat Baru dalam kompetisi Perencanaan Pembangunan Adanya Inovasi Perencanaan Pembangunan Tematik Kecamatan, Penyelesaian permasalahan Kemiskinan, Pengangguran dan Pembangunan bisa merata di 20 Kecamatan	Inventor : BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial
2	IKAT RAJUT (Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan) RKPD Tahun 2020	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam ikut berpartisipasi penanggulangan kemiskinan Semua Elemen masyarakat, pemerintah dan Stakeholder dapat bekerja bersama dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung	Penurunan Kemiskinan dapat teratasi lebih cepat Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan sesuai dengan harapan	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial
3	MUSTIKA DESA (Masyarakat Unggul Sejahtera dengan Tani Pekarangan, Konservasi dan Desa Bebas Sampah) RKPD Tahun 2021	Tumbuhnya Petani Pekarang di Semua Desa dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung Terjadinya gerakan pelestarian lingkungan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan	Peningkatan Ekonomi masyarakat Tumbuhnya UMKM Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan	Inventor : BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSPL/CSR
4	KABAR PENTING DESAKU (Kerja Bareng Penanggulangan Stunting, Desa Bebas Sampah dan Konservasi Lingkungan Hidup) RKPD Tahun 2022	Penanganan stunting dapat dilaksanakan secara bersama-sama Terjadinya Peningkatan gerakan pelestarian lingkungan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan	Terjadi Penurunan angka Stunting Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSPL/CSR
5	GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan untuk Peningkatan Kesehatan , Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat) RKPD Tahun 2023	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Terbukanya lapangan kerja baru Tertanganinya Lahan Kritis Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pelestarian lingkungan Peningkatan kesehatan masyarakat	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSPL/CSR

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
6	BUMI MUTIARA RKPD Tahun 2024	menggerakkan pengembangan sektor Pertanian, perdagangan, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dengan menciptakan akses serta kesempatan luas sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Meningkatkan produksi pertanian komoditas kopi Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DKPPP,FTJLS, Mitra Usaha

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 2.290
KRENOVA dan Penjaringan Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 2023

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
1,	SUMBING SINDORO INNOVATIVE (SUSI) AWARD KABUPATEN TEMANGGUNG	1. Upaya meningkatkan Inovasi Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung, 2. Memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan masyarakat; 3. Mendorong masyarakat untuk selalu berinovasi dalam usaha dan produksi dalam meningkatkan perekonomiannya,	Meningkatkan Antusias Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat dalam melaksanakan inovasi	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR
2,	BUMI MUTIARA	1. Meningkatkan pengunjung Pasar 2. Pasar lebih tertib dan bersih 3. Meningkatkan penjualan produk UMKM	1. Meningkatkan produksi pertanian komoditas kopi 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani dan Komunitas lainnya,
3,	KUDA KEPANG EMAS (Kearifan Unggulan Daerah Sebagai Kekuatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat)	1. Ragam unggulan daerah semakin dikenal 2. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 3. Produktifitas unggulan daerah semakin memasyarakat 4. Terbukanya lapangan kerja baru	1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 2. Penurunan pengangguran 3. Meningkatkan daya saing daerah	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani dan Komunitas lainnya,
4,	WAYANG KEDU	1. Melestarikan Budaya Wayang Asli Daerah 2. Meningkatkan Rasa Cinta masyarakat terhadap kesenian wayang kedu 3. Wayang Kedu semakin dikenal	1. Diakuinya Wayang Kedu sebagai warisan budaya tak benda dari Kabupaten Temanggung 2. Meningkatkan percaya diri bagi pelaku kesenian wayang kedu	DINBUDPAR, BAPPEDA, DINPERMADES, Kecamatan, Pemdes, Komunitas Seni
5,	SIJADINTERTIB (Aplikasi Perjalanan Dinas Tertib)	1. Meningkatkan tertib administrasi 2. Mempermudah bagi anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas	1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam SPJ 2. Meningkatkan kepercayaan publik	DPRD, SEKWAN, DPPKAD, BAPPEDA

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
6,	POKIRMESRA (Pokok-Pokok Pikiran DPRD Mewujudkan Aspirasi Masyarakat)	- Mempermudah dalam mewujudkan Aspirasi Masyarakat - Pelayanan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD lebih efektif dan efisien	- Pemantauan Aspirasi Masyarakat terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD lebih mudah dipantau - Meningkatkan kepercayaan masyarakat	DPRD, BAPPEDA, DPPKAD, ORMAS, Komunitas, Masyarakat
7,	PEMURNIAN JARAN KEPANG	- Melestarikan jaran kepang asli Temanggung - Jaran kepang Temanggung menjadi salah satu media pariwisata yang juga bisa menghasilkan manfaat ekonomis, - Mempermudah dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku budaya terutama jaran kepang,	- Jaran kepang khas Temanggung menjadi budaya yang semakin dicintai masyarakat - Jaran Kepang Temanggung menjadi edukasi pembelajaran mata pelajaran kearifan lokal di SD dan SMP Se Kabupaten Temanggung	DINBUDPAR, BAPPEDA, DINDIKPORA, DINPERMADES, Komunitas Seni
8	GENDHIS EMAS (Gerakan Desa Harapan Berinisiatif untuk Masyarakat Sejahtera)	- Membantu pemetaan potensi lokal untuk menentukan arah dan model pengembangan yang tepat - Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	- meningkatkan perekonomian di wilayah - adanya kebijakan yang bisa diterapkan dan dikembangkan - meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia - Pemerataan Pembangunan wilayah	DPRD, Bupati, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Komunitas, TJSLP
9	OPTIMALISASI PENERAPAN BUDAYA KERJA 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat Dan Rajin) Dengan Media Promosi Vipol (Vidio, Poster Dan Leaflet) Pada Petugas Kesehatan Di Ruang Tulip RSUD Kabupaten Temanggung	- Memudahkan staff ruang untuk melakukan sosialisasi tentang budaya kerja 5R, - Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, - Terwujudnya Rumah Sakit yang terpercaya sebagai pusat Layanan dan Pendidikan	- Budaya kerja lebih efektif, efisien, dan aman - Kurangnya risiko penularan infeksi antar petugas Kesehatan, pasien, dan pengunjung - Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik di bidang kesehatan,	Dinkes, RSUD, Tenaga Kesehatan, Masyarakat secara umum
10	Optimalisasi Layanan Penerbitan Identitas Penduduk Secara Online Dengan Google Form Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung	- Bermanfaat sebagai backup data apabila fisik dokumen BAST tercecer atau hilang, - Memudahkan petugas dalam menerima rekam data permohonan E-KTP dari operator SIAK di kecamatan, - Memberikan alternatif pelayanan selain dengan pelayanan secara konvensional,	- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, - Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan online penerbitan identitas penduduk, - Tingkat kepuasan masyarakat naik terhadap pelayanan penerbitan identitas penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung - Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terluar mudah mendapat akses layanan	Dukcapil, Kecamatan, Desa, Masyarakat secara umum, Ahli IT, Media Massa & Wartawan
11	Optimalisasi Budaya Discharge Planning Dengan Menggunakan Video Project Di Ruang Wijaya	Sebagai pengingat dalam bekerja sehari-hari dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien,	- Pencapaian fungsi Kesehatan pasien maksimal - Pemahaman pasien dan keluarga tentang masalah kesehatan dan kemungkinan	Dinkes, Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Klinik Umum, Rumah Sakit, Media Masa, Ahli IT, Masyarakat secara umum,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Kusuma I RSUD Kabupaten Temanggung	- Menjamin ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan Profesionalisme - Meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang optimalisasi budaya Discharge Plannnng sesuai Panduan dan SPO yang ada di RSUD Kabuaten Temanggung, - Meningkatkan pengetahuan keluarga dan pasien di rumah setelah perawatan di Rumah Sakit,	- adanya komplikasi dari penyakitnya dan hal-hal yang perlu pembatasan yang akan diberlakukan pada pasien di rumah, - Kemampuan pasien dan keluarga untuk merawat dan memenuhi kebutuhan pasien dan memberikan lingkungan yang aman untuk pasien di rumah,	
12	Optimalisasi Pelayanan Perpustakaan Menggunakan Aplikasi Slims 9 Bulian Di SMP NEGERI 3 Bulu Kabupaten Temanggung	- Perpustakaan SMPN 3 Bulu bisa secara optimal memanfaatkan teknologi dan menggunakan platform sosial media sebagai sarana promosi perpustakaan, - Memudahkan pelayanan keperpustakaan dan lebih efektif dari sebelumnya	- Kemudahan pelayanan peminjaman dan pengembalian bahan Pustaka kepada pemustaka, - Kinerja dan produktifitas pegawai lebih maksimal,	Dindikpora, Dinpusip, Lembaga Pendidikan, Pustakawan / Pemustaka, Pelajar
13	Peningkatan Pengolahan Dan Analisis Data Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Melalui Mapping Dan Trend Penyakit Untuk Meningkatkan Kewaspadaan Dini Klb Bagi Pemangku Kepentingan Di Wilayah Kerja Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung	- Menjadi acuan untuk bidan desa dalam pelaporan pelaporan dan pengumpulan data penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB), - SDM pelayanan kesehatan yang inovatif, - Puskesmas yang dapat diandalkan oleh Masyarakat	- Sistem kewaspadaan dini optimal sehingga jika terjadi kejadian luar biasa penanganan dapat lebih baik, - Memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan kesehatan di wilayah kerja, - Mempermudah perencanaan program pemberantasan penyakit potensial KLB di Puskesmas Bansari dan kabupaten Temanggung,	Dinkes, Puskesmas, Kecamatan, Dinpermades, Desa, TP-PKK, Tenaga Kesehatan, Masyarakat
14	Optimalisasi Pengarsipan Data Surat Tanda Registrasi (STR) Dan Surat Ijin Praktik (Sip) Menggunakan Media Digital Di Puskesmas Tretap Kabupaten Temanggung	- Arsip surat tertata rapi dan tidak mudah hilang, - Pemamfaatan IT lebih maksimal - Memberikan informasi persyaratan pengurusan STR dan SIP	- Klaim pembayaran BPJS Kesehatan untuk pasien dirawat bisa dicairkan, - Kelengkapan dokumen administrasi tenaga kesehatan sangat dibutuhkan sehingga memudahkan pengurusan kredensialing, - Efisien dan keefektifan mengurus STR dan SIP, sehingga tenaga kesehatan dimudahkan	Dinkes, Puskesmas, BPJS, BKPSDM, Fasyankes & Tenaga Kesehatan
15	Optimalisasi Pencegahan Resiko Jatuh Dengan Sop Wader (Sosialisasi, Pembuatan Media Reminder, Dan Pembuatah Wadah/ Tempat Peletakan Segitiga Pengaman Dan Label Resiko Jatuh) Di Igd Rsud Kabupaten Temanggung	- Bermanfaat untuk perawat, sehingga perawat dapat melakukan pengkajian dan intervensi yang benar, - Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dan meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia - Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan optimal, berkomitmen selalu meningkatkan	- Pemahaman tentang antisipasi jatuh pada pasien resiko jatuh tinggi berkurang, - Berkurang kejadian jatuh akibat informasi antisipasi bagi tenaga kesehatan dan keluarga pasien dengan pemasangan segitiga pengaman dan label resiko jatuh,	Dinkes, RSUD & RSU, Tenaga Medis, Masyarakat umum

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		4. kemampuan sesuai dengan profesi,		
16	Optimalisasi Pembelajaran Matematika Dengan Model Guided Discovery Learning Pada Program Paket B Kelas Vii Di SKB Temanggung	1. Rencana pembelajaran dapat tersusun lebih sistematis sesuai alur pikir dalam menemukan konsep matematika, sehingga akan dapat melatih proses berpikir siswa 2. Menjadi referensi dalam perencanaan pembelajaran matematika yang bisa membuat siswa menjadi lebih aktif, 3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan guna tercapainya tujuan Program PAUD dan Dikmas	1. Pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih optimal, 2. Menaikan semangat belajar siswa dengan hasil ujian yang baik, 3. Hasil AKM yang baik berpengaruh pada akreditasi sekolah (SKB Temanggung)	SKB, Dindikpora, Tenaga Pendidik, Pelajar
17	Optimalisasi Akses Dan Pembaruan Data Berbasis Google Drive Di Upt Laboratorium Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	1. Tersedianya kumpulan data dan dokumen laboratorium sebagai bahan bank data memudahkan bidang lain di DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam memperoleh data dan dokumen laboratorium lingkungan, 2. Memperkuat capaian nilai DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu Berdayaguna dengan berkomitmen tinggi dan memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas	1. Data dan dokumen yang terinventarisasi dengan baik memudahkan ketika pencarian data dibutuhkan, 2. Data tersimpan lebih lama dan aman 3. Mempermudah pelayanan laborat	DPRPKLH, Dinsos, DPUPR, Dinpermades, Labaorat, Penggiat Lingkungan
18	Implementasi Petik Gitar (Pemantau Jentik Tanggi Sekitar) Dengan Sistem G1rlj (Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik) Untuk Mencegah Penyakit Dbd Di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung	1. Memudahkan untuk memetakan penyebaran jentik nyamuk para surveilans 2. Menciptakan natural leader di masyarakat Dan meningkatkan sadar masyarakat akan PSN, 3. Pelaporan yang jelas dan akurat sesuai dengan kriteria PSN	1. Kasus DBD menurun 2. Kualitas lingkungan yang sehat 3. SDM yang sadar Kesehatan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Dinkes, Puskesmas, DPRKPLH, Dinpermades, Kecamatan, Desa, PKK, Karang Taruna, Komunitas Terkait, Masyarakat
19	Optimalisasi Layanan Pemustaka Perpustakaan Dengan Albakarma (Labeling Barcode Warna, E-Book, Dan Promosi Layanan) Di SMP Negeri 3 Temanggung Kabupaten Temanggung	1. Kegiatan pengolahan bahan pustaka menggunakan 53 SLIMS 8 ini dapat memudahkan pemustaka di SMPN 3 Temanggung dalam mencari/mengakses/temu kembali informasi/bahan pustakan yang mereka butuhkan, 2. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas	1. Kemudahan bagi pemustaka maupun pengunjung dalam melakukan pencarian buku yang diinginkan atau dibutuhkan, 2. Anggota perpustakaan sama-sama merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan layanan perpustakaan, 3. Perpustakaan lebih optimal dalam mendukung pembelajaran,	Dindikpora, Dinpusip, Lembaga Pendidikan, Pustakawan, Pelajar
20	Implementasi Aplikasi Senayan Library Management System Untuk Pengolahan Bahan	1. SOP perpustakaan tentang pengolahan bahan pustaka bermanfaat bagi pengelola perpustakaan dalam melaksannakan tugas	1. Layanan yang cepat dan akurat kepada pemusta,	Dindikpora, Dinpusip, Lembaga Pendidikan, Pustakawan, Pelajar

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Pustaka Di Perpustakaan SMP N 2 Wonobojo Satu Atap Kabupaten Temanggung	dan fungsinya sebagai pustakawan pelayanan teknis, 2. Pelayanan keperpustakaan menjadi lebih efisien	2. Keamanan bahan pustaka yang dimiliki lebih terjamin	
21	Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Siswas-P3dn Melalui Media Belajar E-Book Dan Media Digital Sebagai Wadah Pengumpulan Dokumen Pada Inspektorat Kabupaten Temanggung	1. Auditor dapat menentukan konten yang akan digunakan dalam membuat e-book, 2. Instansi memiliki perencanaan yang baik dalam pembuatan e-book penggunaan Aplikasi SISWAS-P3DN, 3. BPKP sebagai pembuat aplikasi dan pengguna sistem informasi mendapatkan hasil yang sesuai,	1. Pelaksanaan reviu P3DN menjadi lebih optimal, 2. Lebih sedikit koreksi atas data yang diinput dalam aplikasi SISWAS-P3DN sehingga pelaksanaan lebih tepat waktu sesuai yang telah ditentukan, 3. Pemerintah Kabupaten Temanggung terhindar dari sanksi	Inspektorat, Bappeda, BPKPAD, Pemda Temanggung,
22	Peningkatan Pelayanan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Melalui Rumah Digital Di Kabupaten Temanggung	1. Sebagai bahan referensi bersama dalam menentukan langkah atau menjawab pertanyaan dari para Pelaku Usaha terkait SPP-IRT, 2. Mengumpulkan data dari sumber terpercaya sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan media, 3. Memperoleh solusi yang dibutuhkan pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait layanan SPP-IRT,	1. Pengurusan SPP-IRT oleh pelaku usaha lebih mudah dimengerti sehingga pemenuhan komitmen sesuai system OSS-RBA dapat lebih optimal, 2. Peningkatan jumlah produk lokal Temanggung berizin SPP-IRT dan kemananan pangan yang baik sebelum diedarkan ke masyarakat,	DPMPSTS, Dinkopdag, Dinpermades, PKK, Kelompok Usaha, Penggiat UMKM, Masyarakat Secara Umum
23	Optimalisasi Temu Kembali Informasi Menggunakan Sistem Otomasi Slims Di Perpustakaan SMP Negeri 3 Kedu Kabupaten Temanggung	1. Mengetahui prosedur pengolahan buku hingga siap untuk dilayankan di Perpustakaan SMP Negeri 3 Kedu, 2. Menjadi pelengkap kelengkapan sekolah sehingga dapat menunjang dalam hal penilaian sekolah,	1. layanan perpustakaan dapat berjalan dengan efisien dan optimal, 2. pemanfaatan koleksi yang dimiliki perpustakaan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin 3. Peningkatan angka kunjungan perpustakaan	Dindikpora, Dinpusip, Pustakawan, Guru, Pelajar
24	Optimalisasi Pengelolaan Perpustakaan Menggunakan "Senayan Library Management System" Versi 8 Di SMP Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung	mempermudah rekan petugas perpustakaan untuk melakukan pengolahan bahan pustaka, sekolah mampu memenuhi standar pengelolaan sesuai standar nasional pendidikan,	Absensi pengunjung, peminjaman buku, dan pengembalian buku dilayani lebih efektif proses temu kembali buku di perpustakaan lebih mudah	Dindikpora, Dinpusip, Pustakawan, Guru, Pelajar
25	Optimalisasi Digitalisasi Pemetaan Vaksinasi Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Dengan Aplikasi Arc Gis Di Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung	1. Medik Veteriner dapat mengetahui data capaian vaksinasi PMK, sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah evaluasi terhadap kegiatan vaksinasi, 2. Petugas vaksinasi menjadi paham persentase vaksinasi yang telah tercapai, sehingga dapat disusun rencana kerja selanjutnya pada pelaksanaan vaksinasi,	1. Status vaksinasi tiap dusun menjadi mudah untuk di monitoring, 2. kesehatan ternak baik sehingga berefek pada kenaikan ekonomi peternak,	DKPPP, Puskesmas, Peternak, Dinkopdag, Dokter Hewan, Masyarakat Secara umum

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		3. Setelah diketahui data capaian vaksinasi, maka instansi dapat merencanakan program selanjutnya yang berkaitan dengan monitoring vaksinasi,		
26	Optimalisasi Pembelajaran PPKN Dengan Problem Based Learning Pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket B SPNF SKB Temanggung	1. Materi pembelajaran yang berhubungan langsung dengan peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik, 2. bermanfaat sebagai bahan referensi dalam penyusunan rencana pembelajaran yang lebih efektif dan efisien,	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pelajar sesuai amanat Undang-Undang tidak dapat terlaksana, 2. Sanggar kegiatan belajar memiliki peserta didik bersemangat, dan kegiatan pembelajaran berlangsung optimal, 3. Program pendidikan kesetaraan dapat berfungsi sebagai Pendidikan alternatif dan pelengkap pendidikan formal,	SKB, Dindikpora, Dinsos, Kesbangpol, Guru, Pelajar
27	Optimalisasi Informasi Pengolahan Limbah Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik Vermikompos Pada Desa Binaan Di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selompampang, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung	1. Bermanfaat pada kegiatan penyuluhan khususnya untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan penyuluhan 2. Petani mendapatkan perhatian dari Penyuluh dengan memperhatikan kegiatan penunjang demi meningkatkan pengetahuan petani 3. Instansi mendapatkan referensi pretest dan posttest untuk dapat diterapkan pada kegiatan lain yang sejalan dengan kegiatan pembuatan pupuk organik vermicompos	1. Petani menerima informasi terbaru mengenai dunia pertanian 2. Petani bekerja dengan cara yang baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan, 3. Pada lingkungan, tanah / lahan pertanian akan meningkat kesuburannya,	DKPPP, Dinkopdag, Dinpermades, Kelompok Tani, Bumdes, Kecamatan, Desa, Masyarakat penggiat pertanian, Sosmed, SMK Pertanian
28	Optimalisasi Pengolahan Dan Analisis Data Penyakit Yang Berpotensi Menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Sebagai Kajian Kewaspadaan Dini Di Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung	1. sebagai acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan, 2. sebagai dasar untuk menentukan prioritas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, 3. menjadi sumber informasi terkait dengan kasus penyakit yang menjadi fokus di wilayah kerja	1. adanya peringatan dini terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) 2. mengetahui masalah kesehatan prioritas di Puskesmas Pengolahan data dapat menggambarkan besarnya masalah masing-masing penyakit di Puskesmas, 3. Kegiatan surveilans berjalan optimal	Puskesmas, Dinkes, PKK, Tenaga Kesehatan, Masyarakat secara umum,
29	Optimalisasi Penerapan Operan Jaga Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Unit PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Bermanfaat bagi petugas PSC 119 untuk meningkatkan Kerjasama tim dan meningkatkan mutu pelayanan, mewujudkan pelayanan public yang berkualitas,	1. pelayanan kesehatan dapat berjalan sempurna dan berkesinambungan, 2. Tingkat penyelamatan dan keselamatan pasien meningkat	Dinkes, RSUD, Klinik, Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Masyarakat
30	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Melalui Program UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah) SD Di	1. Meningkatnya kunjungan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung	1. Masyarakat pemeriksaan gigi secara rutin 2. Kasus penyakit gigi dan mulut tertangani dengan baik	Dinkes, Puskesmas, Dindikpora, Lembaga Pendidikan, Pelajar, Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan, Masyarakat, Sosmed

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung	- meningkatnya pengetahuan siswa tentang kesehatan gigi dan mulut - Meningkatnya derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat Bulu Kabupaten Temanggung	Peningkatan Kesehatan gigi & mulut masyarakat secara umum	
31	Optimalisasi Penggunaan Tracer (Out Guide) Di UPTD Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung	- memudahkan rekan sejawat dalam proses pelacakan dokumen rekam medis, - Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu	- Pelayanan kesehatan lebih baik - Dokumen rekam medis tersusun dengan rapi dan lebih optimal	Puskesmas, Dinkes, Tenaga Kesehatan
32	Upaya Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Informed Consent Melalui Sosialisasi Pada Petugas Di Ruang UGD Dan Video Edukasi Kepada Pasien Di Puskesmas Tepusen Kabupaten Temanggung	- meningkatkan pengetahuan lebih kepada pasien dan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan, - tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	- pemberian informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan - terdapat perlindungan hukum bagi petugas medis terhadap akibat yang tidak terduga	Dinkes, Puskesmas, RSUD, Klinik, BKPSDM, Tenaga Kesehatan, Ahli IT, Sosmed, Pasien / Masyarakat
33	Pembuatan Pelayanan IVA Mobile Untuk Meningkatkan Cakupan Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung	- program IVA Mobile mempermudah bidan dalam mendeteksi kanker serviks 77 dan meningkatkan kunjungan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) - IVA Mobile dapat membantu wanita usia subur dalam mendeteksi dini kanker serviks dan memudahkan,	- meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan deteksi dini kanker serviks - Kesadaran perempuan akan kanker serviks meningkat - Mengurangi Angka kematian perempuan akibat kanker serviks	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
34	Optimalisasi Ketepatan Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Sekolah Menggunakan "SIAP BOS" (Sistem Aplikasi Pertanggung Jawaban BOS) Di Smp Negeri 1 Pringsurat Kabupaten Temanggung	- pembuatan laporan SPJ BOS dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu, - meningkatkan pelaporan penggunaan dana secara tertib, rapi, teratur, transparan, dan akuntabel dapat dilihat di laporan keuangan,	- Pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih baik - Dana yang dapat digunakan dengan baik berdasarkan dari pelaporan BOS yang baik,	Dindikpora, Sekolah & Lembaga Pendidikan, BPKPAD, BKPSDM, Perbankan, Tenaga Pendidik
35	Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Terpadu Dengan Pemberian Stempel "ANC TERPADU" Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Rejosari Kabupaten Temanggung Tahun 2022	- meningkatkan kualitas pelayanan Antenatal Care (ANC) Terpadu karena adanya pedoman pelayanan ANC Terpadu, - menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata, - melakukan segala tindakan sesuai dengan prosedur,	Masyarakat merasa puas berobat ke Puskesmas SPO yang sesuai dengan ketentuan dan terpercaya	Dinkes, Puskesmas, Bidan, Tenaga Kesehatan
36	Optimalisasi Sistem Keamanan Web Application Melalui Kegiatan Penetration Testing Di Dinas	kualitas penetration testing akan lebih baik dari sebelumnya	- nilai Indeks KAMI yang akan naik - Berkurangnya kejahatan siber	Kominfo, BKPSDM, Ahli IT, ASN

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung	- tools akan berjalan lebih optimal dan menghasilkan naiknya kualitas kegiatan - Laporan hasil kegiatan penetration testing akan lebih baik	Tata Kelola pemerintahan lebih efektif dan aman	
37	Terbentuknya KCM (Kawasan Cerdas Merokok) Sebagai Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Merokok Usia < 18 Tahun Di Desa Jlegong Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung	- memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan merokok usia <18 tahun, - media KIE untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat,	- Menurunkan Kasus merokok pada usia <18 tahun - Menurunkan tingkat kerugian negara karena beban penyakit akibat rokok - SDM berkualitas, produktif dan sehat untuk memaksimalkan bonus demografi dan mendukung Indonesia Emas 2045	Dinkes, Puskesmas, RSUD, Klinik Terpadu, Dinsos, Dindikpora, Kesbangpol, Dinbudpar, Kecamatan, Desa, DPPPAPPKB, Duta Genre, Duta BNN, Duta Wisata, Kecamatan, Desa, Aktivis Sosial, Lembaga Pendidikan, Pelajar, Masyarakat
38	Optimalisasi Pembelajaran Ekonomi Dengan Problem Based Learning Pada Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C SPNF SKB Temanggung	- pendidik menjadi lebih fokus dalam merancang kegiatan pembelajaran, - Pembelajaran menjadi lebih dekat dan mudah diterima, - sebagai bahan referensi dalam perencanaan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien,	- peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai amanat Undang – Undang - Pendidikan kesetaraan berfungsi menjadi pendidikan alternatif dan saling melengkapi dengan pendidikan formal, - Warga belajar berkeinginan tinggi untuk datang dalam kegiatan pembelajaran,	Dindikpora, SKB, Dinsos, Tenaga Pendidik, LKB, Masyarakat
39	Optimalisasi Pelayanan Perijinan Pelaksanaan Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB) Di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	- membuat pelayanan perijinan di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung lebih baik dan terarah, - menambah pengetahuan PSM mengenai Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), - pelaksanaan kegiatan PUB akan lebih akuntabel, transparan, dan berguna untuk masyarakat yang membutuhkan	- Memudahkan organisasi sosial atau masyarakat yang akan mengakses perijinan PUB, - organisasi sosial atau masyarakat melakukan perijinan saat melakukan kegiatan PUB sehingga kegiatan lebih terarah dan jelas, - Terdapat data rekap administrasi peserta yang melakukan Perijinan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	Dinsos, Organisasi / komunitas Sosial, LSM, Masyarakat, Sosmed, Media Masa
40	Optimalisasi Proses Pembangunan Aplikasi Android Melalui E-Book Dan Template Project Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung	- pembuatan aplikasi android tidak memakan waktu lama dan penggunaannya relative lebih mudah, - Programmer lebih mengerti tentang tata cara penggunaan template project dan instalasi Flutter, - mendapat bantuan langsung apabila terjadi kendala dalam pembuatan aplikasi android,	- Programmer Dinkominfo bisa mendapatkan aplikasi android dari sebuah aplikasi web yang sudah ada, - Memudahkan pengguna membuka website untuk membuka aplikasi website, - kepuasan masyarakat dan OPD lain terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang meningkat	Dinkominfo, Bappeda, BKPSDM, Programmer, Ahli IT
41	Optimalisasi Pelayanan Informasi Obat Pada Sediaan Khusus Dengan Leaflet Dan Konten Media Sosial Di Puskesmas	Memudahkan tenaga kefarmasian dalam melakukan kegiatan pelayanan informasi obat,	pasien memahami mengenai informasi obat sediaan khusus yang diterimanya yang nantinya juga berpengaruh pada keberhasilan terapi,	Dinkes, RSUD, Puskesmas, Klinik Umum, Apotik, Apoteker, Masyarakat

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung	2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Tepusen, 3. Mendapatkan informasi obat dari sumber yang akurat dan mudah dalam memahami cara menggunakan atau pengetahuan mengenai obat yang diterima dengan baik dan benar,	2. tujuan pengobatan tercapai secara optimal,	
42	Optimalisasi Pelaporan IKPD; SPM-Kesehatan Dan Evaluasi Kinerja Melalui Manajemen Laporan Berbasis Google Spreadsheet Di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1. mempermudah monev pelaporan data IKPD, SPM-Kesehatan, dan Evaluasi Kinerja 2. peningkatan pemahaman alur pelaporan data IKPD; SPM-Kesehatan dan Evaluasi Kinerja , 3. dapat dijadikan dasar evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Puskesmas dan Dinas Kesehatan,	1. tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah 2. capaian program nasional dan internasional (SPM dan SDG's) lebih dapat terealisasi dengan baik 3. capaian kinerja Dinas Kesehatan yang baik	Dinkes, Puskesmas, RSUD, Bappeda, Setda
43	Optimalisasi Penerapan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Perioperatif Yang Sesuai SDKI, SLKI Dan SIKI Berdasarkan Regulasi Organisasi Profesi PPNI Di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Temanggung	1. mendapatkan dokumentasi perioperatif yang sesuai dengan panduan dan regulasi yang berlaku di rumah sakit, 2. Sebagai nilai rujukan dalam penyusunan lembar dokumentasi kajian/review spo dan form dokumentasi yang baru 3. mengetahui spo dan form dokumentasi yang sesuai panduan,	1. pelayanan kepada pasien diharap semakin optimal dan professional, 2. Proses dokumentasi keperawatan perioperative lebih optimal dengan standar baru 3. Menghindari perbedaan Tindakan oleh perawat lain 4. Tingkat kepatuhan terhadap organisasi profesi PPNI (Persatuan perawat Nasional Indonesia) yang tinggi	Dinkes, RSUD, Klinik Umum, Puskesmas, BKPSDM, Tenaga Kesehatan
44,	Pelaksanaan Terapi Bermain Untuk Menurunkan Hospitalisasi Pada Pasien Anak Di Bangsal Cempaka 2 RSUD Kabupaten Temanggung	1. pasien anak tidak mengalami traumatic saat proses pengobatannya 2. media pembelajaran yang ada dapat digunakan untuk sosialisasi ulang, 3. mempermudah rekan sejawat Perawat dalam menerapkan asuhan keperawatannya sesuai dengan SPO yang sudah ada, 4. Mutu Ruang Cempaka 2 yang baik berupa evaluasi kepatuhan Perawat Cempaka 2 dalam pelaksanaan terapi bermain,	1. terlaksananya kegiatan terapi bermain pada pasien anak sehingga pasien menjadi lebih tenang , 2. Hospitalitas pada pasien anak oleh Tenaga Kesehatan lebih baik 3. Menghindari traumatic hospital pada pasien anak	Dinkes, RSUD, Puskesmas, Klinik Umum, Tenaga Kesehatan, Psikolog & psikiater, Masyarakat umum
45,	Optimalisasi Pembuatan Dan Pemanfaatan Nitrobacter Untuk Tanaman Padi Pada Kelompok Tani Lambang Bibit Desa	menambah pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sehingga akan mempengaruhi dalam kegiatan berusaha tani, Meningkatkan pemahaman petani dalam kegiatan penyuluhan dan juga merupakan	Meningkatkan kesuburan tanah pertanian Mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia Mendukung program pemerintah, yaitu pertanian ramah lingkungan	DKPPP, DLH, Dinkopdag, Dinpermades, UMKM, Kelompok Tani, Masyarakat Secara umu, komunitas penggiat lingkungan,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Gondangwayang Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung	sumber informasi untuk menambah pengetahuan, sikap, dan ketrampilan,		
46,	Optimalisasi Pencatatan Dan Pengelolaan Data Klien Dengan Memanfaatkan Google-Workspace Di Uptd Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	pencatatan dan pengelolaan data klien semakin menjadi lebih mudah, Data klien akan dapat terdata dengan baik, memperkuat capaian nilai organisasi yaitu Excellence,	Kemudahan akses data klien yang sudah terlayani Terdapat back up data klien jika terjadi kerusakan Data dukung yang dapat diakses secara online guna pemberian layanan sosial lanjutan	Dinsos, UPTD, BKPSDM, Masyarakat
47,	Optimalisasi Pelaporan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	masyarakat akan mengetahui perkembangan harga secara periodik serta mengetahui kenaikan dan penurunan harga di atas batas normal, Menunjang pencapaian kinerja Bidang Perdagangan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya untuk pemantauan harga barang kebutuhan pokok, Mengetahui disparitas harga antar daerah, menyusun bahan masukan kebijakan tentang distribusi kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian inflansi di daerah,	Pemantauan dan pengawasan harga lebih mudah dilaksanakan Adanya publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok kepada masyarakat Penyajian informasi harga kebutuhan pokok yang cepat dan akurat Menaikan kualitas kinerja OPD	Dinkopdag, DKPPP, UPT, Pasar, Pedangang, Ahli IT, Media Masa, Media Sosial, Masyarakat
48,	Optimalisasi Edukasi Tentang Mobilisasi Pada Pasien Pasca Operasi Menggunakan Lembar Balik Di Ruang Nusa Indah RSUD Kabupaten Temanggung	mudah melakukan edukasi dan pasien juga lebih mudah dalam memahami Tersedianya media edukasi bagi perawat memudahkan petugas dan perawat untuk memantau perkembangan mobilisasi pada pasien pasca operasi,	Pengetahuan pasien mengenai mobilisasi pasca Proses pemulihan yang lebih cepat karena pengetahuan pasien yang memadahi Hari perawatan yang lebih pendek dan biaya perawatan lebih efisien Kepuasan pasien & keluarga terhadap pelayanan	Dinkes, RSUD, Klinik, Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Masyarakat
49,	Optimalisasi Pemantauan Jentik Melalui Pemberdayaan Kader Gerakan Satu Rumah Satu Jumentik (G1R1J) Dengan Metode On Job Trainning Koordinator G1R1J Di Wilayah Kerja Puskesmas Temanggung	mendapatkan angka bebas jentik yang lebih akurat Kader G1R1J mendapatkan bekal untuk pelaksanaan dan pemantauan jentik dilapangan pelaksanaan hari G1R1J di desa / kelurahan lebih terpantau, meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan DBD	Nilai Angka Bebas Jentik (ABJ) menggambarkan kondisi yang sebenarnya Peningkatan ABJ yang berbanding terbalik dengan Peningkatan Kasus DBD, sistem kewaspadaan dini penyakit dapat dilaksanakan dengan optimal Angka kasus DBD menurun	Dinkes, Puskesmas, RSUD, Klinik Kesehatan, Kecamatan, Desa, PKK, Karang Taruna, Tenaga Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, DLH, Masyarakat
50,	Optimalisasi Pembuatan Laporan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Berbasis Digital Di Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung	memudahkan petugas UKP untuk melakukan pembuatan laporan setiap bulannya, memudahkan dalam permintaan laporan bulanan sebagai bahan untuk kegiatan lokakarya mini Puskesmas Jumo,	Permintaan data program UKP lebih cepat dan efisien Laporan program UKP berjalan tepat waktu Memudahkan koordinasi antara Petugas UKP dan PJ Program UKP	Dinkes, Puskesmas, Tenaga Kesehatan

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		tersedia laporan yang telah terpusat sebagai bahan untuk melaksanakan laporan Penilaian Kinerja Puskesmas,		
51	Optimalisasi Pendampingan Kepada Keluarga Yang Merokok Melalui Poli Berhenti Merokok Di Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung	mengetahui factor yang menyebabkan seseorang merokok menjadi motivasi untuk mengurangi atau bahkan berhenti merokok	mejadi motivasi untuk mengurangi atau bahkan berhenti merokok Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kesehariannya,	Dinkes, Puskesmas, BNN, PKK, Dinsos, Dindikpora, Kesbangpol, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat umum,
52	Optimalisasi Publikasi Informasi Pada Media Sosial Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Dengan Manajemen Produksi Konten Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung	mengetahui konten apa saja yang akan dipublikasikan kepada masyarakat melihat jadwal publikasi konten media sosial, serta melakukan monitoring, mempermudah dalam melakukan pengecekan proses editing dan design mempermudah pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan,	meningkatkan efektifitas publikasi informasi di masyarakat Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global,	Dinkominfo, Ahli IT, Bappeda, BKPSDM, Media Masa, Sosial Media, Masyarakat
53	KANCING PERMATA (Kampung Cacing Berdaya untuk Masyarakat Sejahtera)	Meningkatkan pemasukan bagi anggota peternak cacing Keberagaman jenis produk UMKM pada masyarakat Sumber pangan alternatif baru	Membuka peluang baru bagi UMKM Sebagai alternatif makanan pengganti dengan gizi bai, sebagai pencegahan stunting di masyarakat	DKPPP, Dinkopdan, Dinpermades, Petani & Peternak, Akademisi, Bappeda, Masyaraat
54	Festival Wiwit mbako	Melestarikan Budaya lokal Khas Temanggung Mempublikasikan Produk Tembakau Temanggung	Meningkatkan nilai Tambah dari kegiatan pertembakauan Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Budaya tradisional yang sudah ada tidak punah	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
55	Festival Petik merah	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas kopi mutu buah tang terpetik hanya yang bagus, sehingga biji kering bermutu baik,	Meningkatkan harga kopi semakin tinggi	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
56	Festival Seribu kupat	Nguri-uri budaya lokal Desa Ngemplak Kandangan Temanggung agar tetap lestari dan	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Menjaga dan melindungi sumber irigasi Lembang Dawuhan silenging Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan, Tercatatnya “GREBEG KUPAT SEWU”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	Budaya tradisional yang sudah ada tidak punah	DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
57	Festival nguleg bawang	Mempublikasikan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu penghasil bawang terbesar di Indonesia Mengangkat produk unggulan Temanggung Meningkatkan harga bawang	Bawang temanggung semakin terkenal Adanya nilai tambah dari bawang Meningkatkan daya beli masyarakat Meningkatkan ekonomi masyarakat	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
58	Festival plabengan	Nguri-uri dan publikasi budaya lokal rejepan Desa Pagergunung Temanggung agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Meningkatkat rasa persatuan dan gotong-royong	Budaya plabengan di Pagergunung menjadi terkenal dan familier Meningkatkan rasa cinta budaya daerah Meningkatkan ekonomi masyarakat	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
59	Festival Seribu Tenong	Nguri-uri budaya lokal Desa Kembangsari Kandangan Temanggung agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “ Festival Seribu Tenong”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Budaya tradisional yang sudah ada tidak punah	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
60	Festival Seribu 1000 penari jaran kepeng	Melakukan regenerasi seni dan juga menjaga jati diri dan harga diri masyarakat Temanggung Sebagai penyambung persaudaraan antara penggiat seni jaran kepeng Mempublikasikan tari jaran kepeng Temanggungan	Tari Jaran Kepang Temanggungan semakin dikenal oleh masyarakat baik dalam daerah maupun luar Temanggung Tari jaran kepeng menjadi pembelajaran kearifan lokal di semua SD dan SMP di Kabupaten Temanggung	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
				PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
61	Festival 1000 tumpeng	Nguri-uri budaya khas Temanggung agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “ Festival Seribu Tumpeng”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temangung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
62	SOBAT BIMA (Solusi Hebat Bina Marga)	masyarakat bisa langsung melaporkan aduan kerusakan jalan melalui nomor WhatsApp 085888777654	masalah kerusakan jalan bisa direspons dengan lebih cepat	DPUPR, GAPENSI, PERTANAHAN, PERBANKAN, MASYARAKAT
63	SIPASDA (Sistem Informasi Pasar Daerah)	Meningkatkan transaksi non tunai Pengendapan dana murah	Penaanganan Retribusi Pasar lebih mudah dan cepat	DINKOPDAG, KOMUNITAS PEDAGANG, PERBANKAN, KOMINFO
64	E-Retribusi Pasar	Menanggulangi keterbatasan SDM Mempermudah Pembayaran Retribusi Pasar	Retribusi dapat berjalan dengan tertib Meningkatkan kepercayaan masyarakat	DINKOPDAG, KOMUNITAS PEDAGANG, PERBANKAN, KOMINFO
65	SEMUT MERAH (Setiap Jumat Minum Tablet Tambah Darah)	Untuk Mendorong Masyarakat Minum Tblet Tambah Darah	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
66	KELAS AYU TING-TING (Ayo Cegah Stunting Sejak Bunting)	Mencegah Stunting	Terjadinya penurunan angka stunting	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
67	GEMAR ASIK (Generasi Remaja Anti Rabi Gasik)	Menanggulangi Pernikahan Dini	Menurunnya angka pernikahan dini	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
68	KURSI BIRU (Kursus Singkat Ibu Menyusui Baru)	Menanggulangi terjadinya Stunting	Penurunan angka stunting	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
69	SUSCANTIN (Kursus Calon Pengantin)	Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada	Calon pengantin mendapat pengetahuan terkait suatu pernikahan,	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		catin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga,	Pengurangan terjadinya perceraian,	Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
70	MAS BAMBANG (Massage Bayi Balita Untuk Stimulasi Tumbuh Kembang)	Mendorong perkembangan dan pertumbuhan balita	Bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Meningkatkan Daya tahan tubuh bayi,	Puskesmas, Dinkes, RSU, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
71	Festival Ruwat Rigen	Nguri-uri budaya khas Temanggung di Kecamatan Kledung agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “ Festival Ruwat Rigen”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
72	Grebeg Mangkukuhan	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Mangkukuhan agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “ Grebeg Mangkukuhan”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
73	Grebeg Parakan	Melestarikan Kota Parakan sebagai Kota Pusaka Mempublikasikan Budaya dan UMKM Temanggung Tercatatnya “ Grebeg”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Kota Parakan semakin dikenal oleh masyarakat luar terkait dengan kota pusaka dan produk UMKM Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
74	Grebeg Mangkuyudo Jumo Temanggung	Nguri-uri budaya khas Temanggung Mangkuyudo Jumo agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Mangkuyudo Jumo”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
				PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
75	Grebeg Agung Liyangan	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Agung Liyangan agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Grebeg Agung Liyangan”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
76	Grebeg Duren Ngropoh	Melestaraikan Durian Kranggan Temanggung Media Publikasi Durian Keranggan dan Budaya Daerah Temanggung	Durian Temanggung Semakin Dikenal Masyarakat Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata Horticultura	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
77	Grebeg Besar Sesaji Puji Jagad Kec, Tlogomulyo	Nguri-uri budaya khas Temanggung Sesaji Puji Jagad agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Sesaji Puji Jagad”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
78	Grebeg Kembang Arum	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Kembang Arum agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Grebeg Kembang Arum”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
79	Grebeg Suran sedekah bumi Traji	Nguri-uri budaya khas Temanggung Suran sedekah bumi Traji agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Suran sedekah bumi Traji”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
80	Grebeg Suro SendangKali Progo	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Agung Liyangan agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Grebeg Agung Liyangan”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
89	Grebeg Suro Paseban Malowopati	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Agung Liyangan agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Grebeg Agung Liyangan”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
90	Layanan SMARTBILITAS (Siap Makaryo Untuk Disabilitas) di Kabupaten Temanggung	Fasilitas/Membantu Disabilitas Siap Kerja	Meningkatkan Disabilitas yang mendapat kesempatan kerja	DINSOS, DINPERINAKER, FTJSLP, BAPPEDA, KOMUNITAS DISABILITAS
91	Budidaya Uceng	memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein, dan bukan pangan Melestarikan ikan uceng	Domestikasi Ikan Uceng berpotensi meningkatkan penghasilan masyarakat Meningkatkan jumlah populasi ikan uceng mendukung keberhasilan pemenuhan gizi masyarakat	DKPPP, DINKOPDAG, Komunitas, Kominfo, Mensos,
92	Budidaya Ikan Nila dengan BIOFLOK	mengurangi penggunaan air dalam budidaya ikan , mengurangi pembuangan air ke lingkungan serta untuk meningkatkan produktivitas ikan lele yang dihasilkan oleh para peternak ikan,	Kualitas air kolam lebih terjaga, pH air lebih stabil, Limbah di dalam kolam jadi sedikit dan lebih ramah lingkungan, Menghemat penggunaan air	BAPPEDA, DKPPP
93	SINTA MERIT (Sistem Informasi Talenta Dan Sistem Merit)	Mempermudah pengambilan keputusan pengembangan karir	ASN mengetahui arah jalur pengembangan karir masing-masing	BKSDM, SEMUA OPD, ASN

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
94	MASKUPIS (Masker Kulit Pisang)	Mencegah penuaan dini, Mengatasi kerutan, Melembapkan kulit wajah, Mengurangi bengkak atau sembab pada mata, Mengurangi lingkaran hitam di bawah mata, Mengurangi peradangan pada jerawat, Menghilangkan rasa gatal pada penderita psoriasis, Memudarkan bekas jerawat,	Membuka lapangan kerja baru Limbah kulit pisang mempunyai nilai tambah	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP
95	Dessert "PUPPI" Puding Pelepeh Pisang Alternatif Pengobatan Anemia Defisiensi Besi	meningkatkan hemoglobin dan zat besi dalam darah, mengurangi kasus anemia di Kabupaten Temanggung sehingga, kasus stunting mengalami penurunan	Membuka peluang usaha baru dengan obat alternatif Meningkatkan kesehatan masyarakat Pemanfaatan limbah pelepah pisang	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP
96	Mentelsi " Permen telang penurunan hipertensi "	Memanfaatkan Tanaman Telang untuk bahan permen Membuka Usaha Baru	Meningkatkan ekonomi masyarakat	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP
97	SIWANGI BUMBON PAWON (Inovasi Bawang Merah dari Biji)	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan masyarakat dalam budidaya bawang merah dari biji, Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani bawang merah, karena dapat menghemat biaya produksi, Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi budidaya bawang merah,	Membuka peluang usaha dan Meningkatkan ekonomi masyarakat	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP
98	Pesawat Aerotek I	Peningkatan kualitas sumber Daya manusia dengan meningkatkan daya saing melalui pendidikan dan edukasi, dengan inovasi kan kreativitas anak Temanggung di bidang industri dan teknologi	Meningkatkan motivasi masyarakat Temanggung untuk selalu berinovasi Adanya Pesawat Sport buatan anak Kabupaten Temanggung Mengangkat Nama baik Temanggung	BAPPEDA, DINPERINAKER, FTJSLP, KOMUNITAS DRONE, KOMINFO, MENSOS
99	Pemanfaatan Bunga Putri Malu Carmyosa	membantu melindungi sel-sel tubuh dari efek buruk radikal bebas, penyebab stres oksidatif meningkatkan kadar testosteron, Testosteron sendiri berkaitan dengan hormon seksual pria	Putri malu yang tadinya gulma menjadi tanaman yang bermanfaat,	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP
100	Ekspresi Budaya Wulan Sunu	1. Menjaga Tari Wulan Sunu sebagai kesenian rakyat Kabupaten Temanggung dari pengaruh budaya asing, sehingga tetap terjaga dan lestari, 2. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur,	1. Sebagai upaya pengenalan Budaya Tari Wulan Sunu yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		3. Tari Wulan Sunu yang unik membuat Kabupaten Temanggung dikenal di Nusanatara bahkan Dunia yang kaya akan budaya dan tradisi, 4. Menjadi wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik, 5. Terdaftar Tari Wulan Sunu sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung	2. Menambah kekayaan seni tari khas Kabupaten Temanggung, 3. Dapat meningkatkan minat dan bakat untuk belajar dan mengembangkan Tari Wulan Sunu	PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
101	Ekspresi Budaya Gatholoco	1. Pelestarian budaya lokal Tari Gatholoco agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, 2. Menjaga dan melindungi Tari Gatholoco, 3. Tercatatnya "Tari Gatholoco":dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	1. Sebagai upaya pengenalan Budaya Tari Gatholoco yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya, 2. Menambah kekayaan seni tari khas Kabupaten Temanggung, 3. Dapat meningkatkan minat dan bakat untuk belajar dan mengembangkan Tari Gatholoco,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
102	Ekspresi Budaya Koncer	1. Menjaga dan melestarikan Tari Tari Koncer sebagai kesenian rakyat Kabupaten Temanggung dari pengaruh budaya modernisasi, sehingga tetap terjaga dan lestari, 2. Bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, 3. Tari Tari Koncer yang unik membuat Kabupaten Temanggung dikenal di Nusanatara bahkan di dunia yang kaya akan budaya dan tradisi, 4. Terdaftar Tari Tari Koncer sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung	1. Tari Koncer tidak punah karena budaya-budaya modern, 2. Menjadi salah satu kekayaan kesenian tak benda Kabupaten Temanggung, 3. Sebagai salah satu atraksi hiburan khas Temanggung yang dapat menjadi, suguhan hiburan, tamu resmi ataupun turis mancanegara maupun domestic 4. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap adanya Tari Koncer	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
103	Ekspresi Budaya Bangilun	1. Menjaga dan melestarikan Tari Tari Bangilun sebagai kesenian rakyat Kabupaten Temanggung dari pengaruh budaya modernisasi, sehingga tetap terjaga dan lestari, 2. Bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur,	1. Tari Bangilun tidak punah karena budaya-budaya modern, 2. Menjadi salah satu kekayaan kesenian tak benda Kabupaten Temanggung, 3. Sebagai atraksi hiburan khas Temanggung yang dapat menjadi suguhan hiburan, tamu resmi ataupun turis mancanegara dan domestic	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		3. Tari Tari Bangilun yang unik membuat Kabupaten Temanggung dikenal di Nusanatara bahkan di dunia yang kaya akan budaya dan tradisi, 4. Terdaftarnya Tari Tari Koncer sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung	4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap adanya Tari Bangilun	PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
104	Ekspresi Budaya Jaran Kepang	Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Jaran Kepang di kemenkumham	Meningkatkan dan menguatkan nilai-nilai seni Jaran Kepang di Masyarakat	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
105	Ekspresi Budaya Anak Sukerta	Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Anak Sukerta di kemenkumham	1. Meningkatkan dan menguatkan nilai-Budaya Anak Sukerta di Masyarakat 2. Menjadi salah satu tujuan wisata	
106	Ekspresi Budaya Ruwat Rigen	Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Ruwat Rigen di kemenkumham	1. Meningkatkan dan menguatkan nilai-Budaya Ruwat Rigen di Masyarakat 2. Menjadi salah satu tujuan wisata	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
107	Ekspresi Budaya Wayang Kedu	1. Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Wayang Kedu di kemenkumham 2. Melestarikan dan melindungi Kesenian wayang asli Temanggung	1. Wayang kedu semakin diminati masyarakat 2. Wayang kedu semakin dikenal oleh masyarakat dalam maupun luar Temanggung	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
108	Ekspresi Budaya Cengklungan	1. Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Cengklungan di kemenkumham 2. Melestarikan dan melindungi Kesenian Cengklungan Temanggung	1. Cengklungan semakin diminati masyarakat 2. Cengklungan semakin dikenal oleh masyarakat dalam maupun luar Temanggung	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
				Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
109	Ekspresi Budaya Prajurititan	1. Menjaga Tari Prajurititan Sebagai Kesenian Rakyat Kabupaten Temanggung Dari Pengaruh Budaya Asing, Sehingga Tetap Terjaga Dan Lestari, 2. Sebagai Bentuk Penghargaan Dan Penghormatan Terhadap Leluhur, 3. Tari Prajurititan Yang Unik Membuat Kabupaten Temanggung Dikenal Di Nusanantara Bahkan Dunia Yang Kaya Akan Budaya Dan Tradisi, 4. Menjadi Wisata Budaya Bagi Turis Mancanegara Maupun Domestik, 5. Terdaftarnya Tari Prajurititan Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung	1. Agar tidak punah karena budaya-budaya modern 2. Menjadi salah satu kekayaan kesenian tak benda Kabupaten Temanggung 3. Sebagai salah satu atraksi hiburan khas daerah	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
110	Ekspresi Budaya Thethek Bengkek	1. Menjaga dan melestarikan Tari Tethek Bengkek sebagai kesenian rakyat Kabupaten Temanggung dari pengaruh budaya modernisasi, sehingga tetap terjaga dan lestari, 2. Bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, 3. Terdaftarnya Tari Tethek Bengkek sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung	1. Tethek Bengkek tetap terjaga di antara pesatnya pertumbuhan budaya modern, 2. Menjadi salah satu kekayaan kesenian tak benda Kabupaten Temanggung, 3. Sebagai salah satu atraksi hiburan khas Temanggung yang dapat menjadi, suguhan hiburan, tamu resmi ataupun turis mancanegara maupun domestic 4. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap adanya Tethek Bengkek	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
111	Ekspresi Budaya Adat Mertitani	Menumbuhkembangkan/membangkitkan nilai-nilai keagamaan, menciptakan rasa aman, tentram dan selamat dalam wujud syukur Kepada Allah SWT Pengolahan Pertanian	1. Meningkatkan dan menguatkan nilai-Budaya merti tani di Masyarakat 2. Menjalin rasa persatuan, kerukunan dan gotong-royong di masyar 3. Menjadi salah satu tujuan wisata	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
112	Ekspresi Budaya Brokohan Sapi	1. Nguri-uri budaya lokal Brokohan Sapi agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi,	1. Sebagai upaya pengenalan Budaya Brokohan Sapi yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		2. Menjaga dan melindungi Brokohan Sapi menjadi budaya lokal, 3. Tercatatnya “Brokohan Sapi”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya, 2. Dapat meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap Budaya Brokohan Sapi 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengembangkan Brokohan Sapi,	Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
113	Ekspresi Budaya Warokan	1. Nguri-uri budaya lokal Tari Warok'an agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, 2. Menjaga dan melindungi Tari Warok'an, 3. Tercatatnya “Tari Warok'an”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	1. Sebagai upaya pengenalan Budaya Tari Warok'an yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya, 2. Dapat meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap Tari Warok'an 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengembangkan Tari Warokan,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
114	Ekspresi Budaya Pisungsong Tuk Sari Bumi Gelang	1. Nguri-uri budaya lokal Desa Tlogomulyo agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, 2. Menjaga dan melindungi sumber mata Air Tuk Sari Tlogomulyo, 3. Tercatatnya “Gelaran Ritual Pisungsong Tuk Sari Bumi Gelang”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	1. Sebagai upaya pengenalan Budaya Desa Tlogomulyo yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya, 2. Meningkatkan rasa kebersamaan, saling andarbeni dan persatuan diantara masyarakat Desa Tlogomulyo, 3. Terpeliharanya Mata Air Tuk Sari	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
115	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Tempong	1. Mengangkat kuliner Tempong khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradidional Tempong” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Tempong sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Tempong merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Tempong di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
116	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Sego Gono	1. Mengangkat kuliner Sego Gono khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradidional Sego Gono” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Sego Gono merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Sego Gono di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		3. Tercatatnya Sego Gono sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,		PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
117	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Balung Kuwuk	1. Mengangkat kuliner Balung Kuwuk khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Balung Kuwuk” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Balung Kuwuk sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Balung Kuwuk merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Balung Kuwuk di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
118	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ndas Borok	1. Mengangkat kuliner Ndas Borok khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ndas Borok” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Ndas Borok sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Ndas Borok merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Ndas Borok di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
119	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Empis-Empis	1. Mengangkat kuliner Empis-empis khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Empis-empis” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Empis-empis sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Empis-empis merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Empis-empis di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
120	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kuliner Bajingan	1. Mengangkat kuliner Bajingan khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Bajingan” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Bajingan sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Bajingan merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Bajingan di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
121	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Angka Wolu	1. Mengangkat kuliner Ongko Wolu khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Ongko Wolu merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ongko Wolu” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Pisang Aroma sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	2. Meningkatkan rasa cinta Ongko Wolu di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
122,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ndog Bulus	1. Mengangkat kuliner nDok Bulus khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional nDok Bulus” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya nDok Bulus sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional nDok Bulus merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta nDok Bulus di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
123,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kue Pelok	1. Mengangkat kuliner Kue Pelok khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kue Pelok” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Kue Pelok sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Kue Pelok merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Kue Pelok di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
124,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Emping Jet	1. Mengangkat kuliner Emping Jet khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Emping Jet” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Emping Jet sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Emping Jet merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Emping Jet di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
125,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ketan Jali	1. Mengangkat kuliner Ketan Jali khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ketan Jali” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Ketan Jali sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Ketan Jali merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Ketan Jali di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
126,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Waroeng Jadoel	1. Mengangkat kuliner Waroeng Jadoel khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Waroeng Jadoel” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Waroeng Jadoel sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Waroeng Jadoel merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Waroeng Jadoel di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
127,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kupat Batoar	1. Mengangkat kuliner Kupat Batoar khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kupat Batoar” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Kupat Batoar oma sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Kupat Batoar merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Kupat Batoar di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
128,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Pipes Kopyor	1. Mengangkat kuliner Pipes Kopyor khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Pipes Kopyor” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Pipes Kopyor sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Pipes Kopyor merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Pipes Kopyor di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
129,	WISATA WALITIS	Melindungi dan menjaga pohon walitis dilereng sumbing yang usianya sudah lebih dari ratusan tahun dikenal dengan pohon purba	1. Pohon walitis menjadi asset peninggalan pohon purba 2. Pohon wakitis sebagai salah satu media edukasi hutan 3. Menjadi salah satu tujuan wisat di Temanggung	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
130,	BAKSO ULEG	1. Mengangkat kuliner Bakso Uleg khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Bakso Uleg” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Bakso Uleg merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Bakso Uleg di masyarakat luas,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		3. Tercatatnya Bakso Uleg sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
131,	BRONGKOS MENGGORO	1. Mengangkat kuliner Brongkos Menggoro khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Brongkos Menggoro” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Brongkos Menggoro sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Brongkos Menggoro merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Brongkos Menggoro di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
132,	Membangun Sinergitas Kinerja Stakeholder Food Estate Holtikultura Untuk Ketersediaan Pangan Nasional Di Kabupaten Temanggung	Meningkatkan produksi pertanian Membangun jejaring pasar	Produksi Pertanian meningkat Adanya penjaminan harga produksi pertanian	DKPPP, BAPPEDA, DINBUDPAR, DINKOPDAG, DINPERINAKER, KECAMATAN, DESA, KELOMPOK TANI, KOMINFO, FTJSLP, AKADEMISI
133,	SENTRA PASAR ENTHO	1. Melestarian Pasar kuliner Entho Parakan, 2. Melalui “Ekspresi Budaya Tradisional Pasr Entho” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Pasar Entho Parakan sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Budaya Tradisional,	1. Melindungi Pasar Entho merupakan identitas pasar parakan Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta belanja di Pasar Entho, 3. Menjadi Pasar Wisata Tradisional	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
134,	LAPAK KITA	Fasilitasi publikasi bagi para petani untuk menyampaikan hasil pertanian dan olahannya Media Pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	DINPERMADES, DINKOPDAG, DINKOMINFO, DKPPP, BAPPEDA, DINBUDPAR, DINDIKPORA, PKK, KECAMATAN, DESA, MEDIA MASA, FTJSLP
135,	TAMASYA SEJAHTERA (Tani Maju Masyarakat Sejahtera)	Meningkatkan Pertanian Di Temanggung	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	DKPPP, DINPERMADES, DINKOPDAG, DINKOMINFO, BAPPEDA, DINBUDPAR, DINDIKPORA, PKK, KECAMATAN, DESA, MEDIA MASA, FTJSLP
136,	KANCING PERMATA (Kampung Cacing Berdaya Pemberdayaan Masyarakat Sejahtera)	Pengembangan Budidaya Cacing di Temanggung	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	DKPPP, DINPERMADES, DINKOPDAG, DINKOMINFO, BAPPEDA, DINBUDPAR, DINDIKPORA, PKK, KECAMATAN, DESA, MEDIA MASA, FTJSLP, AKADEMISI, KELOMPOK TANI

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
137,	GERAKAN BELANJA UMKM TEMANGGUNG	1. Promosi Produk UMKM dalam bentuk paket Lebaran 2. Cinta produk lokal 3. Mengimbau kepada seluruh ASN/non-ASN di lingkungan dinas/instansi yang dipimpinnya untuk berbelanja produk UMKM	1. Meningkatkan ekonomi pelaku UMKM 2. Meningkatnya permintaan produk UMKM 3. Produk UMKM mampu bersaing dipasaran	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani dan Komunitas lainnya,
138,	Klinik PHT Desa Bansari	Meningkatkan pertanian Ramah Lingkungan Agen Pengendalian Hayati Media konseling pertanian	Berkembangnya Pertanian Organik Petani mendapat informasi pertanian lebih mudah	DKPPP, KECAMATAN, DESA, KELOMPOK TANI
139,	Green House Melon dengan Internet Of Things	1. Mampu memaksimalkan produk atau hasil pertanian, 2. Pemanfaatan sumber daya secara efektif, 3. Menangani dan mengendalikan hama menjadi lebih mudah dan efisien, Memaksimalkan operasi produksi dalam bidang pertanian	1. Hasil Pertanian lebih maksimal 2. Harga Buah Melon tinggi 3. Tanaman melon lebih sehat	DKPPP, KECAMATAN, DESA, KELOMPOK TANI
140,	ANTING EMAS (Cegah Stunting dengan Program Inovasi Kesehatan)	membantu mengatasi Balita yang mengalami stunting dan membantu mengurangi angka stunting di Kabupaten Temanggung	Ada kepedulian penanganan stunting secara bersama-sama Menurunkan angka stunting	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
141,	KELANTING (Kelas Balita Stunting)	membantu mengatasi Balita yang mengalami stunting dan membantu mengurangi angka stunting di Kabupaten Temanggung	Ada kepedulian penanganan stunting secara bersama-sama Menurunkan angka stunting	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
142,	POSBINDU MILENIAL Untuk Meningkatkan Upaya Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Pada Remaja Di Wilayah Kerja Puskesmas Wonobojo Kabupaten Temanggung	1. Meningkatkan kesadaran remaja untuk lebih menjaga kesehatan 2. Dapat memantau kondisi kesehatan remaja	1. Mengurangi dan mencegah factor risiko PTM sejak remaja, 2. Meningkatnya kesadran Remaja dalam menghadapi masa Puber; 3. Meningkatkan mutu pelayanan	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
143,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Keripik Kepompong	1. Mengangkat kuliner Kepompong khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kepompong” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Kepompong sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Kepompong merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Kepompong di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
144,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Keripik Stik Tales	1. Mengangkat kuliner Stik Tales khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Stik Tales merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Stik Tales” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Stik Tales sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	2. Meningkatkan rasa cinta Stik Tales di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
145,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Klemet Maron	1. Mengangkat kuliner Klemet Maron khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Klemet Maron” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Klemet Maron sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Klemet Maron merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Klemet Maron di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
146,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Pisang Aroma	1. Mengangkat kuliner Pisang Aroma khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Pisang Aroma” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Pisang Aroma sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Pisang Aroma merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Pisang Aroma di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
147,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional entho cotot	1. Mengangkat kuliner entho cotot khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Entho Cotot” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Entho Cotot sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Entho Cotot merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan Citara entho cotot di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
148,	RAKAI PIKATAN (Gerakan Penghapusan Kemiskinan untuk Terwujudnya Perekonomian Mapan)	1. Percepatan penanganan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, 2. Terbangunnya sinergitas dengan lembaga non pemerintah 3. Meningkatkan citra positif perusahaan, Sebagai media promosi perusahaan 4. Memberikan ruang bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat	Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi masyarakat	BAPPEDA, DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		5. Dapat menjadi sarana promosi dan memberikan semangat / motivasi atas pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta menjadi media kontrol pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi 6. Tumbuhnya saling sinergitas dan gerakan antara masyarakat dan pemerintah		
149,	LINTANG ASMARA (Layanan Informasi Tentang Penjangkaran Aspirasi Masyarakat)	1. Memudahkan masyarakat untuk memberikan usulan pembangunan, 2. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi perencanaan pembangunan 3. Memudahkan Tim Bappeda dalam menghimpun aspirasi masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA, SEMUA OPD, KECAMATAN, DESA, MASYARAKAT
150,	HOME CARE SIMANDA Pelayanan Puskesmas (Siapa Datang Kerumah Anda)	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan lebih mudah dan cepat	DINKES, PUSKESMAS, DESA, POSBINDU
151,	SI PETAK (Sistem Informasi Pendataan Perpustakaan)	efektivitas pendataan dan pengumpulan data semua jenis Perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi target indikator kinerja yang berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Mempermudah system informasi pendataan Perpustakaan di Temanggung	DINPUSIP, DINDIKPORA, DINPERMADES, KOMUNITAS LITERASI, AKADEMISI
152,	LAYANAN KOPI (Layanan Konsultasi Kepustakawanan Dan Literasi)	1. Memudahkan pengelola perpustakaan untuk mengelola dan mengembangkan perpustakaan 2. Meningkatkan Gemar membaca masyarakat 3. Meningkatkan pengetahuan ke[ada masyarakat dibidang literasi	1. Meningkatnya minat masyarakat dalam membaca dan pengetahuan literasi 2. Pelayanan semakin mudah	DINPUSIP, DINDIKPORA, DINPERMADES, KOMUNITAS LITERASI, AKADEMISI
153,	TAMASYA PUSTAKA (Layanan Ekstensi Perpustakaan)	1. Memberi pelayanan langsung ke Masyarakat 2. Meningkatkan daya minat membaca masyarakat 3. Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat	1. Terpenuhinya kebutuhan informasi pemustaka di Kabupaten Temanggung 2. Meningkatnya minat baca masyarakat	DINPUSIP, DINDIKPORA, DINPERMADES, KOMUNITAS LITERASI, AKADEMISI
154,	NASI KEBULI (Nakes Atasi Dengan Kelas Bumil Keliling) Untuk Meningkatkan	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tanda bahaya ibu hamil	1. Penanganan Ibu Hamil lebih cepat tertangani 2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Puskesmas	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Pengetahuan Tanda Bahaya Selama Kehamilan Di Puskesmas Gemawang Kabupaten Temanggung	2. Membuat media informasi terkait tanda bahaya ibu hamil yang lebih menarik		
155,	Optimalisasi Pendamping Kube (Kelompok Usaha Bersama) Di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	1. Peningkatan Kompetensi Pendamping KUBE; 2. Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif; 3. Terbentuknya Pendamping Usaha Ekonomi Produktif; 4. Terlaksananya Bimbingan Teknis	1. Terjadinya Peningkatan SDM Pendamping KUBE 2. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif; 3. Diterbitkannya SK Bupati tentang Pendamping Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama	DINSOS, BAPPEDA, DINPERMADES, DINKOPDAG, DKPPP, DINKOMINFO, KECAMATAN, PKH, RELAWAN, KOMUNITAS MASYARAKAT, DESA, FTJSLP
156,	Membuat Aplikasi E-Damkar Edukasi Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Non Kebakaran Di Kabupaten Temanggung	1. Trerciptannya aplikasi edukasi pencegahan kebakaran dan non kebakaran, 2. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan di bidang Pemadam Kebakaran	Mempercepat Penanggulangan dan penanganan Kebakaran	SATPOL PP DAN DAMKAR, KECAMATAN, DESA, MASYARAKAT, RELAWAN
157,	SIPENDI (Sistem Pengarsipan Digital) Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Ruang Arsip Auditor dan Sekretariat Inspektorat Kab,Temanggung	1. Mempermudah dan mempersingkat pencarian arsip di ruang arsip, 2. Dokumen bisa terekam untuk waktu yang lama dan bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun karyawan 3. Menambah nilai dari bagian kearsipan untuk menunjang pekerjaan yang lebih baik lagi dan berkelanjutan untuk menjadi sistem yang dibutuhkan	1. Membuat arsip lebih tertata dan terstruktur sesuai kategori 2. Ruang penyimpanan arsip menjadi lebih efisien 3. Pencarian arsip menjadi lebih cepat 4. Resiko kerusakan arsip menjadi lebih kecil	INSPEKTORAT, KOMINFO
158,	Sekolah Kebencanaan	1. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana 2. Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Bencana menuju Kabupaten Tangguh Bencana,	1. Penanganan Bencana Lebih Cepat Teratasi 2. Terjadinya Penuruna Risiko Bencana	BPBD, DINPERMADES, KECAMATAN, DESA, RELAWAN, MASYARAKAT,
159,	Edukasi Pada Ibu Hamil Tentang Pentingnya Pemantauan Gerakan Janin Dengan Menggunakan Tabel Perhitungan Gerakan Janin Mandiri (PAGER JARI) di PUSKESMAS Kedu Kabupaten Temanggung	1. pemantauan kesejahteraan janin bisa dilakukan ibu hamil secara mandiri yaitu dengan menghitung gerakan janin, 2. Terciptanya media yang menarik dan mudah dipahami untuk melakukan edukasi mengenai pemantauan gerakan janin,	Pemantauan Janin Lebih Mudah dilaksanakan dan dapat dilaksanakan secara mandiri	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
160,	Pelestarian Sego Jagung Khas Temanggung	1. Mengangkat kuliner Sego Jagung khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Sego Jagung merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		2. Melalui "Pengembangan Sego Jagung Temanggung" mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Sego Jagung sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	2. Meningkatkan rasa cinta Sego Jagung di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
161,	Pelestarian Kuliner Bajingan Khas Temanggung	1. Mengangkat kuliner Bajingan khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui "Pengembangan Bajingan Temanggung" mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Bajingan sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Bajingan merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Bajingan di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
162,	Digitalisasi Sistem PENTOL TANTRI (Pendaftaran Pasien Dengan Sistem Pendaftaran Pasien Online Tanpa Antri) Di Puskesmas Candiroto Kabupaten Temanggung	1. Pasien tidak perlu antri ketika melakukan pendaftaran 2. petugas tidak terburu – buru dalam mempersiapkan berkas rekam medis karena berkas rekam medis sudah disiapkan setelah pasien melakukan pendaftarann online 3. meningkatkan mutu pendidikan	Pendaftaran Pasien lebih mudah dan tidak perlu antri	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
163,	SIP TENAN (Sakit Pinggang Tenang Dan Nyaman) untuk Pelayanan Fisioterapi Pada Kasus Low Back Pain Di Puskesmas Kranggan Kabupaten Temanggung	1. Menambah pengetahuan nakes tentang low back pain 2. Mempermudah pasien dalam proses fisioterapi low back pain 3. Mengatasi keterbatasan alat fisioterapi	1. Meningkatkan pelayanan menjadi lebih berkualitas, 2. Pasien, yaitu merasa lebih nyaman saat dilakukan tindakan pengobatan dan pemeriksaan, karena ada layanan fisioterapi	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
164,	Makanan Kuliner Sawut	1. Mengangkat kuliner Sawut khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, 2. Melalui "Pengembangan Sawut Temanggung" mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3. Tercatatnya Sawut sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Sawut merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Sawut di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
165,	SARBON (Pasar Kebon)	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin; 2. Edukasi peningkatan usaha ekonomi produktif	Percepatan peningkatan ekonomi masyarakat; Kelompok PKH mampu meningkatkan ekonomi secara mandiri	DINSOS, DINKOPDAG, DINPERMADES, BAPPEDA, KECAMATAN DESA, KUBE, PKH, RELAWAN, MASYARAKAT

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
166,	Kos-Kosan Sapi	1. Mempermudah bagi orang yang punya modal ingin berternak tapi tidak punya tempat dan tenaga 2. Membuka lapangan kerja baru 3. Menjadi salah satu tujuan wisata ternak	Meningkatkan ekonomi masyarakat	DKPPP, BAPPEDA, KELOMPOK TANI TERNAK, Mensos
167,	Optimalisasi Edukasi Pemasangan Akses Vaskuler Dengan Menggunakan E-Busavaler (Elektronik Buku Saku Akses Vaskuler) Di Ruang Hemodialisa Rsud Kabupaten Temanggung	1. Peningkatan pengetahuan dalam upaya mengoptimalkan proses hemodialisis serta peningkatan kualitas hidup pasien hemodialisis; 2. Meningkatnya kerjasama antar teman sejawat sehingga menciptakan suasana kerja yang harmonis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien dan keluarga; 3. Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan di ruang hemodialisa dengan tersedianya materi edukasi akses vaskuler hemodialisis; 4. Berkontribusi dalam pencapaian visi misi rumah sakit terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia,	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	DINKES, RSUD, KOMINFO, BAPPEDA, MASYARAKAT
168,	Optimalisasi Penyuluhan Dan Bimbingan Jenjang Karir Bagi Siswa Kelas 9 Smp Di Kabupaten Temanggung	Meningkatkan pemahaman siswa dalam menentukan jenjang karir sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki sehingga siswa dapat menentukan pekerjaan apa yang diharapkan dimasa depan dan jenjang Pendidikan lanjutan untuk mencapai pekerjaan tersebut,	Siswa mengetahui Jenjang karir yang harus dipilih	DINDIKPORA
169,	Optimalisasi Pemanfaatan Akun Belajar.Id (Platform Merdeka Mengajar) Untuk Guru Jenjang Sd Di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung	1. Meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta pemahaman siswa, 2. Mempermudah guru dalam menentukan/menyusun instrumen asesmen siswa, 3. Memaksimalkan implementasi kurikulum merdeka jenjang SD di Kabupaten Temanggung,	Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dan guru mudah dalam menyusun instrument pembelajaran	DINDIKPORA

Sumber: Litbang BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2

2.5.1 Program Unggulan Daerah

1. Pendahuluan

A. Latar belakang

Pertanian memiliki peran besar mendukung ekonomi Kabupaten Temanggung karena kontribusinya besar terhadap PDRB dengan didukung kondisi wilayah yang merupakan daerah agraris dengan suhu udara 18°C–28°C dan curah hujan 1.000–3.100 mm/tahun. Hal mendukung lainnya adalah luas lahan pertanian yang mencapai 57.682,41 ha (66,69%) dari luas wilayah Kabupaten Temanggung yaitu 86.483, 41 ha, yang terdiri dari kawasan hortikultura (14.140,38 Ha), Kawasan perkebunan (25.871,49 Ha) dan Kawasan Tanaman Pangan (17.670,54 Ha). Selain itu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk besar, yaitu 173.992 orang atau 42,48% dari jumlah penduduk Temanggung yang bekerja yaitu 409.555 orang (Buku Statistik Kabupaten Temanggung, 2024).

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 (ST2023), menunjukkan bahwa lima subsektor terbesar di Kabupaten Temanggung berdasarkan jumlah rumah tangga usaha pertanian adalah perkebunan 90.330 unit, hortikultura 80.744 unit, peternakan 58.621 unit, tanaman pangan 45.588 unit, dan kehutanan 37.858 unit. Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar sehingga masing-masing subsektor berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi lokal (BPS Kab.Temanggung, 2024).

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah salah satunya ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi, dimana laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2023 ADHK 2010 sebesar Rp16.997,53 miliar dimana angka tersebut bertambah Rp810,15 miliar dari tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,00 persen. Kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB

pada tahun 2023 ADHK mencapai Rp6.174,02 miliar atau sebesar 22,94%. Subkategori pertanian, peternakan, perkebunan, dan jasa pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 93,74% sehingga tampak bahwa domba dan kopi berperan penting dalam PDRB. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa pertanian mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah (BPS Kab.Temanggung, 2024).

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW dan dikuatkan dengan ditetapkannya Kabupaten Temanggung sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional sesuai dengan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2024, sehingga pembangunan pertanian merupakan salah satu prioritas guna meningkatkan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan dengan didukung kondisi geografis serta keberadaan masyarakat di sektor pertanian dan dikuatkan dengan yang melindungi kawasan pertanian sebagai daya dukung kepentingan nasional terkait ketahanan pangan.

Kabupaten Temanggung pada sektor pertanian memiliki komoditas unggulan yaitu kopi dan domba, yang mempunyai daya saing tinggi baik dalam skala regional/nasional serta berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Kopi dan domba merupakan komoditas lokal yang merakyat sebagai sumber ekonomi dan interaksi sosial secara turun temurun. Pengembangan kopi dan domba di Temanggung tidak terlepas dari peran sosial masyarakat sehingga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk ekonomi kerakyatan. Menurut International Labour Organization (ILO), pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya.

Kopi di Kabupaten Temanggung merupakan komoditas perkebunan yang potensial (Sumarjo et al., 2020) dan merupakan penghasil utama kopi di Jawa Tengah (Risandewi, 2013). Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah luas areal tanaman kopi (robusta dan arabika) di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 seluas 10.574,46 ha mencakup 41,34% dari

luas areal tanaman kopi Jawa Tengah (25.577,03 ha). Produksi kopi Temanggung berkontribusi besar di Jawa Tengah, ditunjukkan dengan produksi kopi arabika 1.087,23 ton yang mencakup 33,34% dari total produksi kopi arabika Jawa Tengah (3.260,53 ton) serta produksi kopi robusta sebesar 9.487,23 ton yang mencakup 42,51% dari total produksi kopi robusta Jawa Tengah (22.316,5 ton). Domba di Kabupaten Temanggung juga merupakan komoditas yang potensial dan berkontribusi terbesar di Jawa Tengah, ditunjukkan dengan populasi domba Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sejumlah 390.000 ekor yang mencakup 16,68% populasi domba di Jawa Tengah sejumlah 2.337.845 ekor (Jawa Tengah Dalam Angka, 2024).

Namun demikian, pengembangan komoditas lokal tersebut belum optimal memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kopi yang belum optimal ditunjukkan dari produktivitas kopi di Kabupaten Temanggung yang baru mencapai 0,72 ton/ha (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023), di mana potensinya rata-rata bisa mencapai 1,5-2 ton/ha dengan potensi tanaman masih bisa ditingkatkan menjadi 2.000-2.500 pohon/ha. Hal ini disebabkan karena kerapatan tanaman kopi belum maksimal dengan rata-rata masih 850 pohon/ha serta umur tanaman yang sudah tua sehingga kondisi tersebut berpengaruh terhadap produksi kopi di Kabupaten Temanggung. Permasalahan terkait domba antara lain pola ternak domba relatif sederhana, kandang belum memadai, pemberian pakan dan pengadaan bibit ala kadarnya, serta pemasaran konvensional.

Selain itu, pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Temanggung juga mengalami beberapa permasalahan lain, yaitu belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja sektor pertanian, capaian produksi, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi, serta adanya perubahan iklim sehingga pemerintah daerah melakukan pengembangan intervensi sektor pertanian melalui program unggulan daerah **“BUMI MUTIARA”** yaitu singkatan dari **“Bersatu Membangun Ekonomi, Masyarakat Unggul, Petani Sejahtera dan Berkelanjutan”** dengan

harapan terwujudnya optimalisasi komoditas kopi dan domba berbasis ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan.

Guna pengembangan dan keberlanjutan program unggulan, pemerintah daerah bersama stakeholders terkait melakukan perencanaan pengembangan komoditas, peningkatan kapasitas SDM dan manajemen usaha, penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai produk, pemasaran yang efektif, pemanfaatan teknologi dan kemitraan/kolaborasi.

B. Keterkaitan program unggulan dengan tema pertumbuhan tinggi berkelanjutan

Pengembangan pertanian di Kabupaten Temanggung melalui program unggulan Bumi Mutiara mendukung tema pembangunan tinggi berkelanjutan, karena sektor ini memainkan peranan penting dalam penyediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung stabilitas sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai sektor penghasil pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian ramah lingkungan dan berdaya saing (ekonomi, sosial, lingkungan). Hal ini menunjukkan bahwa program unggulan sejalan dengan tema pertumbuhan tinggi berkelanjutan.

Program unggulan tersebut direncanakan secara berkesinambungan dan tercantum dalam dokumen perencanaan Kabupaten Temanggung, dan secara eksplisit mendukung pertumbuhan tinggi berkelanjutan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten berupa pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan.

- 2) RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

Arah kebijakan “Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi”, dengan tahapan pada tahun 2025-2029 adalah penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Temanggung, di mana pemerintah daerah memastikan pengelolaan sumber daya dengan efisien, meminimalkan risiko, dan mengoptimalkan hasil ekonomi untuk

mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah berkelanjutan

3) RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Strategi “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”

4) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Prioritas daerah : Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan

5) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Prioritas daerah : Pemulihan ekonomi

6) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Prioritas daerah : Percepatan pertumbuhan ekonomi

C. Relevansi dengan konsep perencanaan berbasis THIS

Pendekatan THIS diimplementasikan dalam perencanaan program unggulan sehingga terwujud perencanaan dan pelaksanaan program unggulan secara lebih terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Secara rinci sebagai berikut :

- 1) **Tematik**, perencanaan program unggulan berbasis tematik, yaitu pada prioritas pembangunan daerah, salah satunya adalah perekonomian daerah dengan pendukung sektor pertanian, dimana komoditas unggulannya antara lain domba dan kopi.
- 2) **Holistik**, perencanaan program unggulan memperhatikan berbagai sektor secara menyeluruh, antara lain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan (mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kualitas tanah/air/ekosistem, dan meningkatkan keanekaragaman hayati), perekonomian (meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian), dan sosial (meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan kohesi sosial, dan memperkuat ketahanan pangan).
- 3) **Integratif**, perencanaan program unggulan dilakukan dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga sehingga terwujud kolaborasi.
- 4) **Spasial**, perencanaan program unggulan mempertimbangkan kondisi geografis yang berupa dataran tinggi dan pegunungan serta iklim yang cocok untuk sektor pertanian yaitu kopi dan domba, serta memperhatikan RTRW dan peta tematik sebaran domba dan kopi.

D. Tujuan dan sasaran

Tujuan program unggulan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian (komoditas kopi dan domba), dengan sasaran :
 - a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian;
 - b) Peningkatan produksi dan kualitas komoditas pertanian;
 - c) Penyediaan dan penyebarluasan bibit unggul;
 - d) Penggunaan bibit unggul dan tahan hama pada tanaman kopi;
 - e) Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian ramah lingkungan;
 - f) Fasilitasi sarana dan prasarana pertanian;
 - g) Mekanisasi pertanian pada tanaman kopi;
 - h) Peningkatan jejaring pemasaran kopi dan domba;
 - i) Pemanfaatan limbah pertanian kopi menjadi pakan ternak domba
- 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian (komoditas kopi dan domba), dengan sasaran :
 - j) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian;
 - k) Penyuluhan dan pendampingan secara intensif;
 - l) Penguatan kelembagaan petani;
 - m) Membangun kerjasama atau kemitraan.
- 3) Mewujudkan pertanian (komoditas domba dan kopi) ramah lingkungan, dengan sasaran :
 - n) Meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
 - o) Optimalisasi pertanian organik
 - p) Penggunaan sumber daya alam secara efisien
 - q) Integrasi tanaman dan peternakan

E. Ruang lingkup program unggulan

Ruang lingkup substansi program unggulan adalah sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan (kopi) dan sub sektor peternakan (domba. Ruang lingkup wilayah program unggulan adalah seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung.

F. Muatan program unggulan dalam dokumen perencanaan.

Program unggulan tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RKPD Kabupaten Temanggung maupun Renja Perangkat Daerah terkait, secara jelas tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.291 Nama Program di RKPD dan Renja yang Mendukung Program Unggulan							
Tahun	Nama Program di RKPD	Nama Kegiatan di RKPD	Alokasi Anggaran Kegiatan dalam RKPD (Rp)	Nama Program di Renja	Nama Kegiatan di Renja	Alokasi Anggaran Kegiatan dalam Renja (Rp)	Target
2023	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	343.538.700	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	676.908.400	Peningkatan produksi kopi dan domba
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.350.000.000		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.350.000.000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Produksi pertanian dan Peternakan	1.709.158.514	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Produksi pertanian dan Peternakan	1.709.158.514	Peningkatan produksi kopi dan domba
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	61.000.000	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	61.000.000	Pelatihan Barista
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	676.908.400	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	469.090.000	Peningkatan produksi kopi dan domba
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.735.000.000		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.735.000.000	
2024	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Produksi pertanian dan Peternakan	845.780.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Produksi pertanian dan Peternakan	845.780.000	Peningkatan produksi kopi dan domba
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	45.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	45.000.000	Pelatihan tematik pertanian
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	35.000.000	Program perencanaan dan pembangunan industri	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	35.000.000	Peningkatan kualitas kemasan
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	61.000.000	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	61.000.000	Pelatihan Barista
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	676.908.400	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	469.090.000	Peningkatan produksi kopi dan domba
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.735.000.000		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.735.000.000	

Tahun	Nama Program di RKPD	Nama Kegiatan di RKPD	Alokasi Anggaran Kegiatan dalam RKPD (Rp)	Nama Program di Renja	Nama Kegiatan di Renja	Alokasi Anggaran Kegiatan dalam Renja (Rp)	Target
2025	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	469.090.000	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	380.174.800	Peningkatan produksi kopi dan domba
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5.660.000.000		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5.660.000.000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Produksi pertanian dan Peternakan	1.429.485.400	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Produksi pertanian dan Peternakan	1.429.485.400	Peningkatan populasi ternak
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	61.000.000	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	61.000.000	Pelatihan Barista

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025.

2. Kerangka Program Unggulan

A. Ringkasan kerangka kerja logis program unggulan

Tabel 2.292

Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Unggulan

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
1. Permasalahan dan penyebab permasalahan	Masalah belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB, dengan penyebab : 1. Belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja sektor pertanian 2. Belum optimalnya capaian produksi sektor pertanian 3. Belum optimalnya pengelolaan usaha sektor pertanian 4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi di sektor pertanian 5. Berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian 6. Peningkatan serangan hama penyakit 7. Belum optimalnya produktivitas setiap luasan tanaman kopi 8. Adanya perubahan iklim	
2. Input	1. Regulasi	Perda, Perbup dan SK Bupati
	2. Alokasi anggaran APBD Kabupaten	1. APBD Kabupaten di DKPPP yang mendukung fasilitasi domba : a) Tahun 2022 : Rp. 2.350.000.000,- b) Tahun 2023 : Rp. 2.735.000.000,- c) Tahun 2024 : Rp. 5.660.000.000,- 2. APBD Kabupaten di DKPPP yang mendukung fasilitasi kopi : a) Tahun 2022 : Rp. 433,542.800,- b) Tahun 2023 : Rp. 508.108.400,- c) Tahun 2024 : Rp. 105.331.400,- 3. APBD Kabupaten di Dinperinaker yang mendukung fasilitas kopi : a) Tahun 2023 : Rp. 61.000.000,- b) Tahun 2024 : Rp. 22.500.000,- dan Rp. 61.000.000,- c) Tahun 2025 : Rp. 61.000.000,- 4. Dana Desa di Kabupaten Temanggung yang mendukung ternak Tahun 2024 : Rp. 1.429.485.400,-
	3. Alokasi anggaran alternatif	Anggaran BAZNAS Temanggung untuk fasilitasi domba : Tahun 2023 : Rp. 707.500.000,- dan Tahun 2024 : Rp. 10.500.000,-
	4. Kelembagaan	Struktur organisasi pelaksana Bumi Mutiara, PD terkait, Lembaga/kelompok
	5. Inisiator dan penanggungjawab	Inisiator : DKPPP Kabupaten Temanggung Penanggungjawab : Bupati Temanggung

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
	6. <i>Stakeholders</i> yang terlibat	Bappeda, DKPPP, Dinpermades, Dinperinaker, Dinkominfo, pelaku usaha, akademisi, BAZNAS, perbankan, komunitas, kelompok, masyarakat dan media
	7. Pemanfaatan teknologi	Jaringan internet, sistem informasi , aplikasi kelompok ternak dan tani (sebagai peserta/anggota terdaftar), media sosial, teknologi pertanian tepat guna, pemuliaan mutu genetik ternak, teknologi pengolahan kopi, <i>smart farming</i>
	8. Sarana dan prasarana yang diperlukan	Kandang komunal, rumah kelola pakan ternak, sarana pengolahan limbah ternak, alat timbang, alat <i>grooming</i> hewan, sarana pengangkutan, kebun bibit kopi, dan laboratorium, rumah produksi
3. Proses	1. SOP (Sumber : DKPPP,2024)	9 SOP terkait domba dan 1 SOP terkait kopi
	2. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan	1. Tahapan perencanaan : a) Hasil identifikasi permasalahan sektor pertanian b) Hasil identifikasi kekuatan, peluang, ancaman dan tantangan c) Strategi kebijakan melalui rencana aksi d) Penguatan kelembagaan dalam bentuk regulasi 2. Tahapan pelaksanaan : a) Kegiatan peningkatan produksi sektor pertanian b) Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
	3. Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut	8 masalah yang dihadapi dan sudah ditindaklanjuti untuk penyelesaian masalah
	4. Pemantauan dan evaluasi	1 dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi
	5. Kunci sukses	5 kunci sukses yaitu komitmen pimpinan, local leader, kolaborasi, kemitraan
4. Output	1. Domba	
	a) Kelompok tani yang terlibat	Tahun 2022 : 210 klp, Tahun 2023 : 307 klp, Tahun 2024 : 337 klp
	b) Ketersediaan bibit	Tahun 2022 : 1.500 ekor, Tahun 2023: 2.000 ekor, Tahun 2024: 4.000 ekor
	c) Jumlah mitra	Tahun 2023 : 14, Tahun 2024 : 43
	d) Jumlah komunitas	Jumlah komunitas pehobi/kontes 150 anggota
	e) Harga jual domba	Harga umum Rp. 55.000/kg, Harga induk Rp. 56.000 - 58.000/kg, Harga dugul/tidak bertanduk Rp. 65.000/kg, Harga bertanduk Rp. 75.000/kg
	f) Pemasaran	Penjualan sejumlah 3.000 – 4.000 ekor per bulan Omset Rp. 3.630.000.000,- s/d 4.840.000.000,-
	g) Kelompok penerima bantuan	Tahun 2022 : 80 kelompok dengan anggaran Rp. 3.120.000.000,- Tahun 2023 : 160 kelompok dengan anggaran Rp. 6.042.500.000,- Tahun 2024 : 57 kelompok dengan anggaran Rp. 2.910.000.000,-
	h) Bentuk event	Kontes domba lokal di Tretep, Candiroto, Bejen, Ngadirejo, Tilir, Kandangan, Kaloran, Kranggan serta Festival Domba Tilir Art
	2. Kopi	
	a) Ketersediaan bibit	Jumlah bibit 10.000 stek berakar, 75.000 entres, 100.000 biji benih Jumlah tanaman sumber bibit/ entres 7.000 pohon
	b) Harga jual kopi	Harga kopi green bean robusta Rp.65.000-70.000/kg , dan arabica : Rp.120.000/kg
	c) Jumlah mitra	50 kelompok tani
	d) Bentuk event	Lomba Barista, Festival Petik Merah, Jumat Ngopi bareng
	e) Jumlah petani kopi	Petani kopi arabika 2.789 orang dan petani kopi robusta: 26.134 orang
	3. Penerima manfaat	
	1) Kelompok penerima bantuan	Tahun 2022 : 80 klp, Tahun 2023 : 160 klp, Tahun 2024 : 57 klp
	2) Kelompok tani terlayani	Tahun 2022 : 210 klp, Tahun 2023 : 307 klp, Tahun 2024 : 337 klp
	3) Pemberdayaan RTM	Tahun 2022 : 5 orang, Tahun 2023 : 20 orang, Tahun 2024 : 30 orang

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
	4)RTM penerima domba (BAZ)	Tahun 2023 : 167 orang, Tahun 2024 : 7 orang
	5)Pemberdayaan pemuda	Tahun 2022 : 20 orang, Tahun 2023 : 35 orang, Tahun 2024 : 52 orang
5. Outcome Langsung	1. Luas areal tanam kopi	Tahun 2023 : 14.959,35 ha (arabika dan robusta)
	2. Produksi kopi	Tahun 2023 : 10.173,31 ton (arabika dan robusta)
	3. Industri hilir berbasis kopi	Tahun 2023 : 524 brand, Tahun 2024 : 600 brand Tahun 2023 : 130 cafe kopi, Tahun 2024 : 140 café kopi
	4. Kawasan agrowisata kopi	Tahun 2024 : 4 lokasi
	5. Jumlah domba	Tahun 2023 : 405.056 ekor
6. Outcome Antara	Peningkatan nilai PDRB	Nilai PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2023 : Rp 26.912,32 miliar Nilai PDRB Sektor Pertanian tahun 2023 : Rp 3.500,84 miliar Kontribusi kategori peternakan tahun 2023 : 19,43% Kontribusi kategori perkebunan tahun 2023 : 17,01%
7. Dampak	Peningkatan ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,0

Sumber : Data diolah Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025.

B. Input

1) Regulasi yang mendukung pelaksanaan Program Unggulan

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

[illegible]

Subscriber: Diapermades 2014

[illegible][illegible]

Journal of Interpersonal Violence 27(10)

[illegible]

Revised: 2017/02/24 Revisi: 2017/02/24

Gambar 2.49
Screenshoot Program Unggulan dalam Renja Dinpermades, DKPPP,
Dinperinaker 2023-2024 dan RKPD 2025

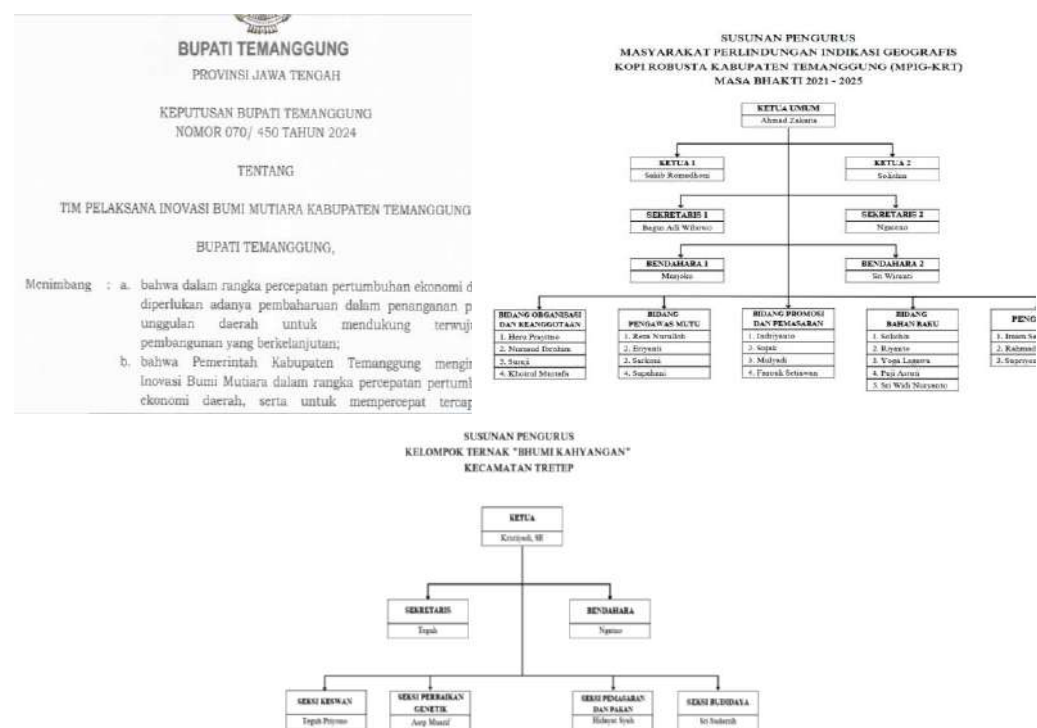
3) Alokasi Anggaran Alternatif

Alokasi anggaran lain dalam implementasi program unggulan adalah anggaran dari BAZNAS Kabupaten Temanggung sebesar Rp.707.500.000 bagi 167 RTM pada tahun 2023 dan Rp.10.500.000 bagi 7 RTM pada tahun 2024 dalam bentuk bantuan ternak.

4) Kelembagaan

Bentuk kelembagaan di tingkat kabupaten tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Bumi Mutiara yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan berkontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perangkat daerah yang terlibat langsung dalam program unggulan adalah DKPPP, Bappeda, Dinas Kominfo, Kebun Dinas Medani, Dinperinaker dan Dinpermades. Bentuk kelembagaan lainnya yang terkait adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, kluster kopi dan masyarakat perlindungan indikasi geografis.

Koordinasi antar lembaga dilakukan melalui berbagai kerjasama, seperti pendampingan, penyuluhan, dan penelitian. Struktur organisasi seperti tercantum dalam gambar berikut.



Gambar 2.50
SK Pelaksana Bumi Mutiara, Lembaga MPIG,
Dan Contoh Lembaga Kelompok Tani

5) Inisiator dan Penanggung Jawab Pelaksana

Inisiator program unggulan adalah perangkat daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan, sedangkan penanggung jawab pelaksana program unggulan adalah Bupati Temanggung

6) Institusi/ stakeholders lain yang terlibat

a) **Pemerintah**, sebagai regulator memiliki peran aktif penyusun kebijakan program unggulan di antaranya regulasi, penganggaran, pengadaan bantuan bibit, pendampingan, fasilitasi penelitian, pelatihan, penyuluhan dan pengembangan varietas komoditas unggul, serta monitoring dan evaluasi. Perangkat daerah yang terlibat adalah Bappeda, DKPPP, DPM, Dinkpdag UMKM, Dinpermades, dan Dinperinaker. Stakeholder penting lainnya adalah UPTD Balai Benih Pertanian Kebun Dinas Medari (memproduksi dan menyebarkan benih bermutu varietas unggul komoditas

pertanian dengan **inovasi stek berakar**), dan Puslit Kopi dan Kakau .

- b) **Masyarakat/komunitas**, memiliki peran sebagai konsumen, pengunjung, pengguna layanan, penerima manfaat, tenaga kerja, penyelenggara event.
- c) **Pelaku usaha**, memiliki peran sebagai sumber alternatif pendanaan, memberikan pelayanan, sponsor kegiatan dan *event*, mitra pemasaran, penyedia sarpras, produsen, distributor, penyedia barang/jasa/layanan dan *offtaker*. Program BNI Optimalisasi ekosistem kopi dengan kementrian/BUMN di Temanggung.
- d) **Akademisi**, berperan dalam penyusunan kajian/penelitian (Politeknik Pembangunan Pertanian, UNDIP, IPB, UNNES, BRIN, UNS), dan kegiatan PKL/KKN (UNDIP, UGM, UNY, UNS, UNTID, INSTIPER, INISNU, UNNES, UIN Salatiga, UNIMUS dan STIKES Ngesti Waluyo.
- e) **Media**, memiliki peran dalam mempublikasikan informasi (Media center, PWI, Temanggung TV, dan media digital lainnya)

7) **Pemanfaatan teknologi**

Teknologi yang dimanfaatkan antara lain *smart farming*, stek berakar kopi, teknik pemuliaan mutu genetik ternak, alat agrikultur dan produksi/hilirisasi, *market place*, jaringan internet desa dan pemanfaatan media elektronik.

8) **Sarana dan prasarana yang diperlukan**

Rumah produksi, kebun bibit, laboratorium, tempat pemotongan domba, kandang komunal, gudang pakan, rumah dan alat pengolahan pupuk kandang, alat transportasi.

C. **Proses**

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP), meliputi:
 - (1) SOP pemeriksaan fisik daging, SOP pemeriksaan reproduksi ternak di RPH, (2) SOP pemeriksaan *post mortem* dan *ante mortem* di RPH, (3) SOP pengelolaan pasar ternak, (4) SOP pemeriksaan kendaraan angkut, (5) SOP penerbitan surat keterangan kesehatan, (6) SOP prosedur pembuatan laporan kelahiran ternak, (7) SOP prosedur pemeriksaan semen beku, dan (8) SOP penjualan bibit kopi dan (9) SOP Kopi (Buku Indikasi Geografis Kopi Kabupaten Temanggung).

(2) Tahapan perencanaan dan pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam perencanaan program unggulan adalah :

1) Mengidentifikasi permasalahan

Permasalahan yang ada antara lain adalah harga jual komoditas domba tidak stabil, harga produksi dan harga jual tidak seimbang, jangkauan pasar masih terbatas, ketersediaan bibit unggul terbatas, luasan lahan kopi belum optimal (kepadatan tanaman kopi belum maksimal) sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi dan biaya produksi.

2) Mengidentifikasi kekuatan, peluang, ancaman dan tantangan

Tabel 2.294	
Identifikasi Kekuatan, Peluang, Ancaman dan Tantangan	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1) Perangkat daerah, Kebun Benih Dinas	1) Lemahnya kelembagaan petani
2) Regulasi (perda, perbup, keputusan bupati)	2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
3) Penyuluh, kelompok tani, gapoktan, komunitas	3) Belum optimalnya pemanfaatan bibit unggul
4) Media lokal	4) Keterbatasan SDM lapangan
5) Kondisi daerah agraris	5) Penggunaan bibit yang kurang berkualitas
6) Banyak penduduk bekerja di sektor pertanian	6) Ketersediaan sarana dan prasarana belum merata
7) Budaya bertani turun temurun dan kearifan lokal	7) Belum optimalnya mekanisasi pertanian
8) Internet pedesaan	8) Pemasaran masih perseorangan (belum kemitraan)
9) Budaya petik merah (kopi)	9) Masih ada petani petik kopi hijau
PELUANG	ANCAMAN
1) Perkembangan teknologi	1) Perubahan iklim dan bencana pertanian
2) Akses internet	2) Serangan hama dan penyakit
3) Peningkatan konsumsi protein hewani	3) Pemotongan domba umur di bawah 1 tahun

3) Menyusun strategi kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan adalah Program Unggulan Daerah yang bernama “**BUMI MUTIARA**”, yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian, meningkatkan kapasitas SDM pertanian, dan mewujudkan pertanian ramah lingkungan dengan tujuan akhir adalah pertumbuhan tinggi berkelanjutan.

4) Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan untuk mendukung keberhasilan proses pelaksanaan program unggulan. Penguatan kelembagaan melalui regulasi (SK Bupati tentang Tim Pelaksana Bumi Mutiara), serta penyuluhan dan

pendampingan oleh perangkat daerah terkait. Penguatan kelembagaan bersama dengan *stakeholder* terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui kerjasama/kemitraan.

5) Komitmen pimpinan

Bentuk komitmen pimpinan salah satunya adalah tercantumnya program unggulan dalam dokumen perencanaan baik jangka pendek/menengah/panjang, dukungan penganggaran (APBD) serta penyusunan regulasi sebagai kepastian hukum.

6) Sosialisasi

Sosialisasi program unggulan dilaksanakan melalui informasi berbasis digital dan dapat diakses melalui media sosial. Sosialisasi bertujuan agar semua elemen di mengetahui program unggulan sehingga bisa ikut mendukung program unggulan.

Tahapan dalam pelaksanaan meliputi :

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian dengan cara :

- a) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian melalui penyuluhan
- b) Melakukan penyuluhan dan pendampingan secara intensif pada kelompok tani
- c) Melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani
- d) Membangun jejaring sehingga terwujud kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain dalam bentuk fasilitasi penelitian/pengembangan produk, peningkatan budidaya, sebaran lokasi pengembangan, pemasaran, bintek, dan branding

2) Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian, dengan cara :

- a) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian
- b) Meningkatkan kualitas budidaya dan pengelolaan usaha sehingga meningkatkan produksi dan kualitas komoditas
- c) Menggunakan bibit unggul dan tahan hama sehingga tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim supaya produksi terjaga baik kuantitas atau kualitas
- d) Memanfaatkan teknologi, peningkatan kapasitas SDM dan pemasaran.

- e) Memfasilitasi sarana dan prasarana pertanian
 - f) Melakukan mekanisasi pertanian
 - g) Membangun jejaring pemasaran sehingga berdampak pada penjualan produk
- 3) Mewujudkan pertanian ramah lingkungan, dengan cara :
- a) Meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
 - b) Optimalisasi pertanian organik
- (3) Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan

Tabel 2.295 Masalah dan Tindak Lanjut	
Masalah yang Dihadapi	Tindak Lanjut
Keterbatasan akses modal	Meningkatkan kerjasama dengan perbankan
Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian	Menjalin kerjasama dengan akademisi
Kurangnya minat generasi muda di sektor pertanian	Memperkenalkan potensi kopi dan domba di lembaga pendidikan
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian	Melaksanakan pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian
Kurangnya produktivitas kopi dan domba	Optimalisasi intensifikasi pertanian
Adanya persaingan dengan kompetitor dari daerah lain	Pemasaran secara terpadu

- (4) Pemantauan dan evaluasi
- Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari unsur BAPPEDA dan perangkat daerah terkait.
- (5) Kunci sukses
- Keberhasilan program unggulan tidak lepas dari adanya komitmen pimpinan, kolaborasi, *local leader*, kluster kopi dan kemitraan.

D. Output

Hasil atau keluaran yang dirasakan langsung dari pelaksanaan program unggulan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 2.296 Hasil Pelaksanaan Program Unggulan	
Komoditas Domba	
1) Kelompok tani yang terlibat	Tahun 2022 : 210 kelompok, Tahun 2023 : 307 kelompok, Tahun 2024 : 337 kelompok
2) Ketersediaan bibit domba	Tahun 2022 : 1.500 ekor , Tahun 2023 : 2.000 ekor, Tahun 2024 : 4.000 ekor
3) Jumlah mitra	Tahun 2022 : - , Tahun 2023 : 14, Tahun 2024 : 43
4) Komunitas	Komunitas pehobi/kontes ada 150 anggota
5) Harga jual domba	Harga umum Rp. 55.000/kg, Harga induk Rp. 56.000-58.000/kg, Harga dugul/tidak bertanduk Rp. 65.000/kg, Harga bertanduk Rp. 75.000/kg Area pemasaran di semua kab/kota wilayah Jawa, Bali, NTT, Sumatera
6) Pemasaran secara terpadu dan menjalin kemitraan dengan pihak lain	Penjualan domba sejumlah 3.000 – 4.000 ekor per bulan Omset penjualan sebesar Rp. 3.630.000.000,- s/d Rp. 840.000.000,- Area pemasaran Temanggung, Kendal, Yogya, Solo, Tegal
7) Kelompok penerima bantuan hibah uang	Tahun 2022 : 80 kelompok dengan anggaran Rp. 3.120.000.000,- Tahun 2023 : 160 kelompok dengan anggaran Rp. 6.042.500.000,- Tahun 2024 : 57 kelompok dengan anggaran Rp. 2.910.000.000,-

	untuk kegiatan pertanian	
8)	Bentuk event yang dilaksanakan di 9 kecamatan	Kontes domba lokal di Tretep, Candirotto, Bejen, Ngadirejo, Tlilir, Kandangan, Kaloran, Kranggan dan <u>Festival</u> Domba Tlilir Art
Komoditas Kopi		
9)	Ketersediaan bibit kopi oleh Balai Benih Pertanian Temanggung	Jumlah bibit 10.000 stek berakar, 75.000 entres, dan 100.000 biji benih Jumlah tanaman sumber bibit/ entres 7.000 pohon
10)	Pemasaran dengan kemitraan	Kopi <i>green bean</i> robusta : Rp. 65.000-70.000/kg, arabica : Rp. 120.000/kg Area pemasaran di semua kab/kota wilayah Jawa, Bali, NTT, Sumatera
11)	Jumlah mitra	50 kelompok tani
12)	Bentuk event	Lomba Barista, Festival Petik Merah, Jumat Ngopi bareng
13)	Jumlah petani kopi	Petani kopi arabika : 2.789 orang, Petani kopi robusta : 26.134 orang
Penerima manfaat		
14)	Kelompok penerima bantuan	Tahun 2022 : 80 kelompok, Tahun 2023 : 160 kelompok, Tahun 2024 : 57 kelompok
15)	Kelompok tani terlayani	Tahun 2022 : 210 kelompok, Tahun 2023 : 307 kelompok, Tahun 2024 : 337 kelompok
16)	Pemberdayaan RTM	Tahun 2024 : 26 orang di Desa Banjarsari Kecamatan Bejen (contoh)
17)	RTM penerima domba (BAZ)	Tahun 2023 : 167 orang, Tahun 2024 : 7 orang
18)	Pemberdayaan pemuda	Tahun 2024 : 37 orang di Desa Banjarsari Kecamatan Bejen (contoh)
19)	Kelompok penerima bantuan	Tahun 2022 : 80 kelompok, Tahun 2023 : 160 kelompok, Tahun 2024 : 57 kelompok
20)	Penduduk bekerja di sektor pertanian	Tahun 2022 : 174.189 orang, Tahun 2023 : 173.992 orang

E. Outcome dan Dampak

1) Outcome Langsung

Tabel 2.297
Outcome Langsung Program Unggulan pada Komoditas Kopi dan Domba

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Luas areal tanam kopi arabika (ha)	1.366,97	1.564,36	1.699,94	1.911,09
Produksi kopi arabika (ton)	887,93	876,19	1.002,2	996,73
Luas areal tanam kopi robusta (ha)	11.506,89	11.724,46	12.877,29	13.048,26
Produksi kopi robusta (ton)	9.761,05	10.434,48	9.774,5	9.176,58
Tumbuhnya iIndustri hilir berbasis kopi	Na	na	524 brand dan 130 café	600 brand dan140 café
Kawasan agrowisata berbasis kopi	-	-	-	4 lokasi
Jumlah domba (ekor)	405.056	406.556	388.327	423.539

2) Outcome Antara

Tabel 2.298
Capaian PDRB Kabupaten Temanggung

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB Kabupaten Temanggung (milliar rupiah)	21.557,08	22.627,79	24.725,44	26.912,32
PDRB ADHK Kabupaten Temanggung (milliar rupiah)	14.890,76	15.387,93	16.187,37	16.997,53
PDRB ADHK Sektor Pertanian (milliar rupiah)	3.329,89	3.358,51	3.456,66	3.500,84
Peranan Kategori Peternakan terhadap PDRB Kab. Temanggung (%)	17,31	18,44	18,46	19,43
Peranan Kategori Perkebunan terhadap PDRB Kab. Temanggung (%)	11,54	17,20	17,14	17,01

3) Dampak

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,00%, dimana kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB termasuk besar yaitu

22,94% sehingga peningkatan PDRB sektor pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktifitas dan distribusi pendapatan sehingga pertanian mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai penyedia pangan dan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Keberlanjutan dan Potensi Replikasi ke Wilayah Lain

A. Strategi Keberlanjutan

Keberlanjutan program unggulan BUMI MUTIARA melalui:

- Meningkatkan keberadaan dan fungsi Kebun Dinas;
- Kaderisasi pelaku program unggulan;
- Beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sesuai kearifan lokal;
- Penguatan kelembagaan sesuai potensi lokal masing-masing wilayah;
- Kolaborasi dengan stakeholders terkait.

B. Potensi Replikasi Ke Wilayah Lain

Program unggulan mempunyai potensi untuk di replikasi karena banyak daerah lain yang berpotensi agraris, sangat besar manfaatnya untuk perekonomian daerah, serta menerapkan keunggulan lokal di daerah masing-masing.

2.6 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Kabupaten Temanggung mempunyai prestasi dan menerima banyak penghargaan baik skala provinsi, nasional maupun internasional dari berbagai bidang lomba/kompetisi. Pencapaian tersebut merupakan apresiasi sekaligus memberikan semangat untuk berkarya dan berprestasi yang lebih baik di masa mendatang. Berikut penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2019-2023.

Tabel 2.299
Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah Penghargaan

		Regional	Nasional	Internasional
1.	2019	10	26	5
2.	2020	8	17	6
3.	2021	15	20	2
4.	2022	34	19	3
5.	2023	38	35	5
6.	2024	8	13	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Daftar penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.300
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Internasional GACC Open di Malaysia	Federasi Catur Malaysia (MAS)	Internasional	Dindikpora
2	Kejuaraan Renang Internasional Thailand Sport School Games	Kementrian Pariwisata dan Olahraga Thailand	Internasional	Dindikpora
3	Kejuaraan Karate Internasional di Surakarta (South East Asean University Karate Championship) Juara II	Rektor Universitas Sebelas Maret	Internasional	Dindikpora
4	Internasional Kejuaraan Sepatu Roda di Surakarta	Walikota Surakarta	Internasional	Dindikpora
5	Kejuaraan Karate Internasional di Surakarta (South East Asean University Karate Championship) Juara III	Rektor Universitas Sebelas Maret	Internasional	Dindikpora
6	Juara II Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Nasional	Bappeda
7	Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Dinpermades
8	Kabupaten Stop BABS/ODF	Menteri Kesehatan	Nasional	Dinas Kesehatan
9	STBM Berkelanjutan Tahun 2019	Menteri Kesehatan	Nasional	Dinas Kesehatan
10	Sanitarian Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100% Tahun 2019	Dirjen Kesmas Kemenkes RI	Nasional	Dinas Kesehatan

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
11	Penghargaan Kabupaten Terbaik Pendataan ERDKK dan Implementasi Kartu Tani 2019 (Kriteria Kecepatan,Komunikasi, &Koordinasi,Kerjasama ,Realisasi Penggunaan kartu Tani)	Kementerian Pertanian	Nasional	Dintanpangan
12	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Nasional	Inspektorat
13	Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan Bidang Perkebunan	Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian	Nasional	Dintanpangan
14	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2019	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
15	BUMD Terbaik di Indonesia Tahun 2019	Top Business	Nasional	PD Bank Pasar Temanggung
16	Top Pembina BUMD 2019	Top Business	Nasional	Bupati Temanggung
17	Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil 2019	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Kabupaten Temanggung
18	Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinpermades
19	Peringkat II kategori Pembina Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Pertanian
20	Juara I Kabupaten Kota Bertransaksi Kartu Tani Terbanyak	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dintanpangan
21	Duta Lingkungan Sehat STBM Kategori Anak Sekolah	Gubernur Jawa Tengah	Regional Peringkat I	Dinas Kesehatan
22	Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional Peringkat II	Dinas Kesehatan
23	Pelaksana Terbaik PHBS Tk Provinsi Jawa tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional (Juara Harapan III)	Dinas Kesehatan
24	Juara II Stand Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DinPerindag Kop dan UMKM

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
25	Juara III Pesona Produk Kriya Dekranasda Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DinPerindag Kop dan UMKM
26	Juara III Penghargaan <i>Central Java's Potensial Investment Challenge (CJPIC)</i>	Keris Jateng	Regional	DPMPTSP
27	Nasional Catur Piala Ketua DPR RI di Jakarta	Ketua DPR Republik Indonesia	Nasional	Dindikpora
28	Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara I	PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Nasional	Dindikpora
29	Nasional Kejuaraan Renang Terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara I	Walikota Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
30	Nasional Wushu Junior di Pangkalpinang	Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia	Nasional	Dindikpora
31	Nasional Wushu Junior di Semarang Juara I	Rektor Universitas Negeri Semarang	Nasional	Dindikpora
32	Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta	Asosiasi Pemersatu Orangtua Siswa Sasana Wushu Indonesia Sinduadi (APASI)	Nasional	Dindikpora
33	Nasional Kemah Budaya di Jakarta	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dindikpora
34	Nasional Kejuaraan Renang terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara II	Walikota Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
35	Nasional Wushu Junior di Semarang Juara II	Rektor Universitas Negeri Semarang	Nasional	Dindikpora
36	Nasional Lomba O2SN Tingkat Nasional di Semarang	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dindikpora
37	Nasional Lemkari Piala Menpora di Jakarta	Menteri Pemuda dan Olahraga	Nasional	Dindikpora
38	Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara II	PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Nasional	Dindikpora
39	Nasional Championship BMX di Temanggung	Gubernur Jawa Tengah	Nasional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
40	Nasional Kejuaraan Renang Antar Sekolah dan Mahasiswa di Yogyakarta	Gubernur AAU Cup	Nasional	Dindikpora
41	Tari Konceran, Juara I Festival Tari Tingkat Provinsi Jateng	Gubernur Jateng	Regional	Dinas Pariwisata

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 (data diolah)

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.301
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
2	Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Nasional	Bappeda
3	IGA (Inovation Government Awaard) Nominasi 10 besar Kabupaten Terfavorit Tingkat Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Nasional	Bappeda
4,	Juara Utama (Drone Semprot Pertanian Otomatis) dan Juara Favorit (Hidroponik Organik) Krenova masyarakat Tingkat Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
5	Juara III Kategori Pasar Anugerah IDSD Tingkat Prov, Jateng	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
6	Pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DPPAPPKB
7	Pemilihan kelompok Bina Keluarga Remaja Mutiara Kasih juara terbaik II	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DPPAPPKB
8	OPINI WTP yang ke 7	BPK RI	Nasional	BPPKAD
9	OPINI WTP yang ke 8	BPK RI	Nasional	BPPKAD
10	Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinpermades
11	Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Pelayanan	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Satpol

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Masyarakat Tahun 2020			
12	Juara 1 Nasional Wushu Online (7 medali emas)	Wushu Indonesia Provinsi Bali	Internasional	Dindikpora
13	Nasional Taekwondo Poomsae virtual juara 1	Taekwondo Indonesia Provinsi Banten	Internasional	Dindikpora
14	Juara 2 Nasional Wushu Online Se Indonesia (3 medali perak)	Wushu Indonesia Provinsi Bali	Internasional	Dindikpora
15	Juara 1 dan 2 Balap sepeda Internasional Sirkuit BMX di Banyuwangi (2 medali emas dan 3 medali perak)	Banyuwangi Internasional BMX	Internasional	Dindikpora
16	Juara 2 Balap Sepeda tingkat Nasional pada PON	PB PON	Nasional	Dindikpora
17	Juara 1 Balap Sepeda pada International Sirkuit BMX di Jakarta	DISPORA Provinsi DKI	Internasional	Dindikpora
18	Juara 3 Wushu pada Wushu Tournamen	Brunei Wushu Federation	Internasional	Dindikpora
19	Juara 3 Sepakbola Putri	Special Olympics Indonesia	Nasional	Dindikpora
20	Juara 1 Renang tingkat Nasional	Akademi angkatan Udara	Nasional	Dindikpora
21	Juara 1 menembak	Yon Armed 13 Kostrad Sukabumi	Nasional	Dindikpora
22	Juara 1 Wushu	UNNES	Nasional	Dindikpora
23	Juara 1 Renang	PARASWIM Indonesia	Nasional	Dindikpora
24	Juara 1 Pencak silat	IPSI Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
25	Juara 1 Tenis	PELTI kabupaten Bogor, Jabar	Nasional	Dindikpora
26	Juara 1 Tenis	PELTI kabupaten Pati, Jateng	Nasional	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (data diolah)

Pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 2 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional untuk kategori Kabupaten Terbaik, Prestasi ini berlanjut pada tahun 2020, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional, Pengumuman disampaikan oleh Kepala Bappenas bersamaaan dengan pelaksanaan Musrebangnas Tahun 2020 secara virtual pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020.

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.302
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I Lomba Penerapan Hygiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan oleh CV, Sumber Gizi Desa Kedu Kec, Kedu tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Juara II Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah tingkat Provinsi Jawa Tengah	Sekda Provinsi Jawa Tengah	Regional	Diperinaker
3	Kategori Kabupaten Inovatif	Kemendagri	Nasional	Bappeda
4	Kota Layak Anak Kategori Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
5	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
6	OPINI WTP yang ke 9	BPK RI	Nasional	BPKPAD
7	Shibiru Pewarna Alam dari tanaman Stobilantes Cusia,	Juara 2 (dua) tingkat Provinsi Jateng	Regional	Bappeda
8	Lift Cor Beton Ekonomis (LCBE)	10 besar tingkat Provinsi Jawa Tengah	Regional	Bappeda
9	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SBM)	Terbaik Pertama di Tingkat Nasional	Nasional	DKK
10	Sekolah Adiwiyata Nasional kepada SMP N 1 Kandangan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Dindikpora
11	Medali Perak bidang Lomba Matematika pada kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SMP tingkat Nasional	Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Nasional	Dindikpora
12	juara 1 (emas) kejuaraan Nasional Championship Karate	Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)	Nasional	Dindikpora
13	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putra	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
14	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putri	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
15	Juara 1 (emas) Taekwondo Championship Menpora	Pengurus Besar Taekwondo Indonesia	Nasional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Cup			
16	Juara 2 (perak) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
17	Juara 2 (perak) tenis lapangan Walikota Tegal Cup XIII tahun 2021	Pengkab PELTI (Persatuan Lawn Tenis Indonesia) Kabupaten Tegal	Nasional	Dindikpora
18	Juara 3 (perunggu) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 (data diolah)

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.303
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	eRTe FM Raih Penghargaan Terbaik Radio Ramah Anak dalam Indonesia Persada,ID Award III Tahun 2022	Wakil Ketua Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Indonesia Persada	Nasional	KOMINFO
2	Temanggung Menerima Penghargaan Indikiasi Geografis Terbanyak se Indoensia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Nasional	BAPPEDA
3	Temanggung Raih penghargaan atlet taekwondo SEA Games	PANITIA SEA GAMES	Nasional	DINDIKPORA
4	KPU Temanggung Dapat Penghargaan Menuju Informatif	Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng	Nasional	KPU
5	Artikel ini telah tayang di TribunJogja,com dengan judul PROFIL Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, Penerima Penghargaan Tribun Inspiring Award	Tribun Inspiring Award	Nasional	KOMINFO
6	Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA)	Nasional	DPPPAPPKB
7	DINDA PUTRI LESTARI, ATLET TAEKWONDO TEMANGGUNG RAIH MEDALI EMAS PON XX PAPUA	Penyelenggara PON XX PAPUA	Nasional	DINDIKPORA
8	Wahyu Jati Atlet Paralympic Asal Temanggung Kejuaraan Dunia Cabang Atletik	Ketua Nasional Paralympic Committe Indonesia	Nasional	DINDIKPORA

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
9	Lomba Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah Bupati Batang Cup 2022	Regional	DINDIKPORA
10	Kontingen Kabupaten Temanggung Raih 3 Medali Dalam Pospeda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	POSPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	Regional	DINDIKPORA
11	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Wali Kota Magelang Cup 2022	Wali Kota Magelang Cup 2022	Regional	DINDIKPORA
12	Empat Santri Ponpes Al Mu'min Raih Prestasi Tingkat Nasional	Penyelenggara Olympiade Ahmad Dahlan (OlympicAD) dan Pekan Taaruf Seni Budaya dan Olahraga (Pentasbora) ke V	Nasional	DINDIKPORA
13	Temanggung raih Olimpiade Sains Nasional 2022	Penyelenggara Olimpiade Sains	Nasional	DINDIKPORA
14	Kompetisi Bahasa Arab Nasional, Chilya `Ainul Jamilah berhasil menjadi Juara Harapan II sebagai wakil Jawa Tengah ke tingkat Nasional	Penyelenggara Olimpiade Bahasa Arab Tingkat Nasional	Regional	DINDIKPORA
15	Bela Rahma Sayida, warga Kabupaten Temanggung berhasil meraih prestasi di tingkat nasional, Ia menjadi juara kedua di ajang Duta Maritim Indonesia 2022	Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo)	Nasional	DINDIKPORA
16	Kontingen dari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara Umum Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) SMP X Tingkat Jawa	Penyelenggara MAPSI Jateng	Regional	DINDIKPORA
17	Alhamdulillah kontingen Kabupaten Temanggung dapat meraih peringkat VII se-Provinsi Jawa Tengah	Penyelenggara Gelaran MTQ XXIX	Regional	DINDIKPORA
18	MTs Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung kembali meraih juara, Kali ini kejuaraan datang dari cabang olahraga (cabor) Panahan Perorangan Putra	Penyelenggara OlympiadicAD dan Pentasbora	Regional	DINDIKPORA
19	MTs Al-Mu'min Muhammadiyah	Penyelenggara OlympiadicAD dan	Regional	DINDIKPORA

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Tembarak meraih penghargaan cabang olahraga (cabor) Judo	Pentasbora		
20	RSUD Temanggung Memperoleh Piagam Penghargaan dari BPJS Cabang Magelang Sebagai Juara 1 Lomba Pelayanan Prima	BPJS Jateng	Regional	DINKES
21	Paduan Suara Dewasa Campuran	PESPARAWI Jawa Tengah	Regional	DINDIKPORA
22	Olimpiade Ma arif Tingkat Provinsi	Penyelenggara Olimpiade Makarif Jawa Tengah	Regional	DINDIKPORA
23	Siswa SMP Ngadirjo Juara Lari Atletik Lari	Popda Jateng	Regional	DINDIKPORA
24	ASN Terinovative (Dwi Sukarme, ST,,MT,)	JAWA POS	Regional	BAPPEDA
25	Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA),	Nasional	DPPPAPPKB
26	Sertifikat Warisan Tak Benda	KEMENDIKBUD	Nasional	DINBUDPAR
27	Kampoeng Pro Iklim Utama Nasional	Kementrian LHK	Nasional	DPRKPLH
28	Inovasi Rasa Mesra Mendapat Penghargaan Human Raights In Southeasty Asia	Human Raights In Southeasty Asia	Nasional	BAPPEDA
29	Ammar Amrullah merupakan salah satu atlit Wushu MI Negeri 1 Temanggung yang meraih medali Emas pada lomba yang dilaksanakan secara virtual oleh Pusaka Tantra pada tanggal 10-15 Mei 2021, Sebagai Juara 1 GS PA Group 5 tingkat nasional	Pusaka Tantra	Nasional	DINDIKPORA
30	Kepala daerah Yang Berkontriutif Nominasi LPM Award	penghargaan oleh LPM Award 2022	Nasional	DINPERMADES
31	Penghargaan Anugrah PDSD Juara 1 Ekosistem Inovasi Jawa Tengah	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
32	Penghargaan Anugrah Innovation Government Award 2022 Kabupaten Temanggung Terinovatif	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	BAPPEDA
33	Penghargaan Krenova Minyak Kopi Herbal 10 besar Utama Tingkat	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Jawa Tengah			
34	PPID Pemkab Temanggung Raih Penghargaan pada KIP Award	KIP Award	Nasional	KOMINFO
35	Bela Rahma Sayida,juara ke dua di ajang Duta Wisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo),	Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo),	Nasional	DINBUDPAR
36	Kurnia Setyo Wulandari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara I Lomba Baca Puisi Kreatif (LBPK) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Gaperto Jepara,	Yayasan Gaperto Jepara,	Nasional	DINDIKPORA

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (data diolah)

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.304
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara 2 Piala Presiden Kontes Kambing PE th 2023 tk Nasional Kelas Pejantan (Kelompok ternak cabe Farm Desa Tretep kecamatan Tretep)	Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)	Nasional	DKP3
2	Juara 3 piala Presiden Kontes Kambing PE th 2021 tingkat Nasional kelas anakan indukan-Kelompok ternak Jalu Farm Desa Kertosari Kecamatan Jumo	Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)	Nasional	DKP3
3	Juara 1 Tembakau varietas Kemloko 4 Festival Tembakau Lembutan Kategori Gunung pada Soropadan Agro Festival II tahun 2023(Bapak Chadik Mubarak) desa Bansari Kecamatan Bansari	Soropadan Agro Expo Festival II tahun 2023	Regional	DKP3
4	Juara 1 Kelompok Tani Ternak Berprestasi tingkat Provinsi Jawa	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DKP3

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	tengah- KTT Taruna Karya Mudha			
5	Juara 1 Tingkat Nasional Penghargaan Mitra Bhakti Usaha - perusahaan yg telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)- PT Shoenary Javanesia Inc Kab Temanggung	Direktorat Jendral Masyarakat Kementrian RI	Nasional	PT Shoenary Javanesia Inc/ Dinkes/ Puskesmas Pare
6	Peringkat ke 4 tingkat Nasional Penghargaan Profil Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023	Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI	Nasional	Dinkes
7	Sertifikasi Akreditasi Paripurna Puskesmas Parakan	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Dinkes/ Puskesmas Parakan
8	Sertifikat Bebas Frambusia-Apresiasi Kepala Daerah berhasil menangani penyebaran Neglected Tropical Disease (NTD)	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	Dinkes
9	Penghargaan kategori Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas terstandarisasi dan sebagai rujukan Nasional tahun 2022- Puskesmas Temanggung	DKPPPAPPKB Provinsi Jateng	Regional	DKPPPAPPKB Tmg/ Dinkes Tmg/ Puskesmas Tmg
10	Sekolah Adiwiyata Mandiri - SMP 6 Temanggung	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
11	Sekolah adiwiyata Nasional - SDN 3 Tuksongo	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
12	Sekolah Adiwiyata Provinsi - SD Muhammadiyah Parakan, MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak, SMP N 1 Kaloran, MTs Ma'arif Jumo	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Regional	DPRKPLH
13	Green Leadership Nirwasita Tantra- Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
14	Green Leadership Nirwasita Tantra- Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
15	Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah- Juara 4 (Kel. Manggong Kec. Ngadirejo)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
16	LOMBA WANA LESTARI- terbaik I Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional dan Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi (An. R. Gravita Eka Purnama)	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
17	Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Utama- 1. Desa Ketitang Kec. Jumo 2. Desa Batusari Kec. Kledung	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Nasional	DPRKPLH
18	Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya- Desa Petarangan Kec. Kledung	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Nasional	DPRKPLH
19	Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional- Fatah Syaifur Rochman	Kementrian Lingkungan Hidup	Nasional	DPRKPLH
20	Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup- Fatah Syaifur Rochman	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
21	Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup- Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran Kecamatan Tembarak	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
22	Juara 1 Kategori Pelestarian Lingkungan Hidup dalam acara Anugerah Penyuluh Agama Islam Award tingkat Jawa Tengah- An Al Imron	Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
23	Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 11 atas Laporan Keuangan tahun 2022 Pemerintah Daerah Kab Temanggung	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI	Nasional	BPKPAD
24	Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Nasional tahun 2023	Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Nasional	Bappeda

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
25	Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jawa Tengah	Nasional	Bappeda
26	Juara terbaik III tingkat Nasional SDG's award	Menteri PPN/ Bappenas	Nasional	Bappeda
27	Juara 1 Tingkat Nasional kategori News Anchor Anugerah Persada. Id Award ke IV – Lembaga penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Erte FM	Persada.Id (Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia)	Nasional	Radio Erte FM/ Dinkominfo
28	Juara 1 dalam Lomba Pertunjukan Rakyat (Petunra) FK Metra Tingkat Jawa tengah	FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional)/ Dinkominfo Provinsi Jateng	Regional	Dinkominfo
29	Desa Anti Korupsi dengan Predikat Istimewa- Desa Tanurejo Kecamatan Bansari	Provinsi Jateng	Regional	Inspektorat/ Dinpermades/ Dinkominfo
30	Opini Kualitas tinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022	Ombudsman Republik Indonesia	Nasional	Ortala
31	Peringkat 4 Penilaian Evaluasi Smart City se Indonesia tahun 2022	Kementrian Kominfo	Nasional	Dinkominfo
32	Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bagian Hukum
33	Medali Emas Cabor Balap Sepeda BMX di ajang Asian Games 2023 di Hangzhou, China (amellya Nur Sifa)	Asian Games	Internasio nal	KONI/ Dindikpora
34	Medali Emas Cabor Catur tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Farah Yumna Budiati (2 emas P dan 2 emas B)	Paragames Kamboja	Internasio nal	Dindikpora
35	Medali Perak Cabor Atletik tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Slamet Wahyu Jati (1 Perak P dan 1 Perak B)	Paragames Kamboja	Internasio nal	Dindikpora
36	Medali Perak Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Intan Anindya	Macau Cina	Internasio nal	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
37	Medali Perunggu Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Genta Ganda Prakoso	Macau Cina	Internasio nal	Dindikpora
38	Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Intan Anindya	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
39	Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Genta Ganda Prakoso	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
40	Medali Perak Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Pandu Dian Saputra	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
41	Medali Perak Cabor Kempo di POPNAS Palembang An. Talin Nabilla Putri	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
42	Medali Emas Cabor Atletik di Lari Trail Run Gunung Gajah An. Diva Setiyawan	Turnamen Jawa Tengah	Regional	Dindikpora
43	Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An Nicholas Arya Naufal putra	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
44	Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An. Diva Setiyawan	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
45	Medali Emas Cabor Atletik tuna runggu di PEPARPEDA Surakarta An. Navilla Ardiana	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
46	Medali Emas Cabor Atletik tuna runggu di PEPARPEDA Surakarta An. Zulaika	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
47	Medali Emas Cabor Judo di POPDA Provinsi An. Dwiki Hepto	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
48	Medali Emas Cabor Kempo di POPDA Provinsi (7)	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
49	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Pandu Dian Saputra	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
50	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
51	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
52	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Intan Anindya	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
53	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. M. Attar Pandu Affandi	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
54	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Indira Ferinza Jasmine	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
55	Medali Emas Cabor Atletik 100 M lari gawang putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
56	Medali Emas Cabor Atletik sapta putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
57	Medali Emas Cabor catur bregu di PORPROV XVI Jateng An. Abdul jalil, M Fidyen, Oka satria	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
58	Medali Emas Cabor judo di PORPROV XVI Jateng An. Dwikie Hepto Januartika	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
59	Medali Emas Cabor kick boxing full contact putri di PORPROV XVI Jateng An. Siska Ayu Valentina	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
60	Medali Emas Cabor Tarung drajat di PORPROV XVI Jateng An. Deni Cahya N	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
61	Medali Emas Cabor Taekwondo di PORPROV XVI Jateng An. Dinda putri lestari	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
62	Medali Emas Cabor Tenis lapangan di PORPROV XVI Jateng An. M Hilmy Abdulrahman	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
63	Medali Emas Cabor Gita Ariesta di PORPROV XVI Jateng An. Gita Ariesta	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
64	RSUD Temanggung penghargaan dalam bidang keselamatan	BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)	Nasional	RSUD Tmg

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	dan keamanan nuklir kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional - Anugerah BAPETEN 2023			
65	RSUD Temanggung sertifikat Akreditasi Rumah Sakit status paripurna	Direktur Utama Lembaga Akreditasi Rumah sakit DHP (LARS-DHP)	Nasional	RSUD Temanggung
66	Krenova Provinsi-Ijuk Ulir Ranjau Binatang-juara Harapan	Bappeda Provinsi Jateng	Regional	Bappeda
67	Olimpiade sains nasional tingkat provinsi (osn-p) jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (smp/mts) tahun 2023 An. M Ridwan Damarjati Wijaya (SMP2 Temanggung)	Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Regional	Dindikpora
68	Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) atau Swasti Saba Kategori Padapa Tahun 2023	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Dinkes
69	Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional Innovation Government Award (IGA) Tahun 2023	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	Bappeda
70	Penghargaan atas tercapainya angka jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95,44 % di Kabupaten Temanggung tahun 2023	BPJS kesehatan	Regional	Dinkes/ Pemkab Temanggung
71	Anugerah Meritokrasi 2023	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Nasional	BKPSDM
72	Pemenuhan Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Regional	PBJ
73	Penghargaan Anugrah PDSD dengan kategori Sangat Tinggi (3,952)	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
74	Penghargaan Anugrah PDSD untuk Dokumen Evaluasi PDSD Terbaik I Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
75	Juara I Medali Emas Olimpiade Pendidikan Agama Islam Nasional ke 2 Zona Jawa Tengah	DPP AGPAII (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia)	Regional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	An Husna Dzakiyyah (SDN I Jampiroso)			
76	Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
77	Badan Publik Pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah kategori informatif (Desa Gilingsari, Kec. Temanggung dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
78	Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Juara 1 dalam Kompetisi Nugraha Karya Desa BRILian Tahun 2023	BRI	Nasional	Pemdes Bansari

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (data diolah)

Pada tahun 2023 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tingkat Nasional, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Pada tahun yang sama Kabupaten Temanggung juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional pada *Innovation Government Award* (IGA) Tahun 2023.

Daftar penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.305
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Regional	Bappeda
2.	Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2024	Bappenas	Nasional	Bappeda
3.	Penghargaan Perpamsi Jateng Award 2024 kategori Platinum Peringkat III Perumda Air Minum Kabupaten Temanggung	Perpamsi Jateng	Regional	PDAM Temanggung
4.	Baznas Award 2024 kategori Kepala	Baznas	Nasional	Pemkab Temanggung

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Daerah yang Mendukung Pengelolaan Zakat Terbaik			
5.	Prima Award kategori Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Nasional	Dindukcapil
6.	Juara Harapan II Tingkat Nasional Firefighter Skill Competition 2024	Kemendagri	Nasional	Satpol PP-Damkar
7.	Penghargaan dari Kemendikbud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mendukung Pemerintah Daerah Mencapai Level Melembaga pada 4 Kategori	Kemendikbud	Nasional	Dindikpora dan Dinbudpar
8.	Juara I Lomba Pawai dalam rangka HUT Satpol, Linmas, dan Damkar di Surakarta	Pemprov Jawa Tengah	Regional	Satpol PP-Damkar/Pemkab Temanggung
9.	Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mendapatkan Opini WTP 12 Kali	BPK Republik Indonesia	Nasional	Pemkab Temanggung
10.	Penandatanganan Naskah Kerja Sama antara Ombudsman RI dengan Pemda dan Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Ombudsman RI	Nasional	Bagian Organisasi
11.	Pemenang Kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Peduli Anak Terbaik Tingkat Nasional pada Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI)	Nasional	Dinkominfo
12.	Penghargaan Anugerah ASN 2023 dan ASN Talent 2024 Tingkat Nasional kategori Best Employee	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)	Nasional	BKPSDM
13.	Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Baik Tingkat Kabupaten se-Indonesia	Indonesian Institute of Public Governance (IIPG)	Nasional	Bagian Organisasi/Pemkab Temanggung
14.	Penghargaan Juara III Jawa Tengah Inspiring <i>Economic Effort Awards</i> kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Jawa Tengah	Pemprov Jawa Tengah	Regional	Pemkab Temanggung
15.	Penghargaan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dan Kelompok Informasi Masyarakat	Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	(KIM) Jawa Tengah Tahun 2024 oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah			
16.	Juara I kategori B dalam Festival Dalang Anak Jawa Tengah Tahun 2024	Disporapar Jawa Tengah	Regional	Dinbudpar
17.	Penghargaan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta atas Penyelesaian Disparitas Data ASN dengan Prosentase Terbanyak	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Regional	BKPSDM
18.	Penghargaan Inovasi Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi Kabupaten Tertinggi yang Memberikan Jaminan Tenaga Kerja Non-Formal	BPJS Ketenagakerjaan	Nasional	Dinas Sosial
19.	Penghargaan 3 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 1 Sekolah Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
20.	Penghargaan dari Ditjen PAUD Dikdasmen kepada SDN Kalirejo Kecamatan Kledung dalam rangka Aksi Nyata Sadar Literasi Numerasi	Ditjen PAUD Dikdasmen	Nasional	SDN Kalirejo
21.	Medali Perunggu pada Kompetisi IMEC and JEO Olympiad di Amity College Prestons Campus Sydney Australia a.n Anantacetta Reugra Abiraya	Amity College Prestons Campus Sydney	Internasional	Dindikpora
22.	Medali Perunggu pada Kompetisi International Round di Royal Lotus Hotel Da Nang Vietnam a.n Anantacetta Reugra Abiraya	International Round	Internasional	Dindikpora
23.	Pemenang Utama Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah	Regional	Pemkab Temanggung

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Pada tahun 2024 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tingkat Nasional, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Pengumuman disampaikan oleh Kepala Bappenas bersamaaan dengan pelaksanaan Musrebangnas Tahun 2024

pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Pada tahun yang sama Kabupaten Temanggung juga mendapatkan penghargaan yaitu sebagai pemenang utama pada lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah.

**DOKUMENTASI KOMPETISI DAN PIAGAM PENGHARGAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**





Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN Tahun 2023



Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023



Penghargaan Baznas Awards Tahun 2024



Penghargaan Juara I Krenova Jateng Tahun 2024



Penghargaan Juara I PPD Tingkat Nasional Tahun 2024



Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2024.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2023 ditengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tinggi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, stabilitas perekonomian yang terjaga, neraca pembayaran yang baik, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran.

Tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global tahun 2023 serta berpotensi masih akan terjadi di Tahun 2024 yang menjadi perhatian antara lain:

1. Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas;
2. Pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan disertai melebarnya divergensi pertumbuhan antar negara (*slower and divergent growth*);
3. Penurunan inflasi yang melambat (*gradual disinflation*);
4. Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama (*higher interest for longer*);
5. Arus modal keluar karena lonjakan yield USD mendorong capital outflow dari *Emerging Market*;
6. Nilai tukar Dollar AS tetap kuat (*strong dollar*);
7. Peningkatan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis (*Geoeconomic fragmentation*);
8. Perubahan iklim (cuaca ekstrem dan bencana).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi baik dari *International Monetary Fund* (IMF), World Bank (WB), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Asian Development Bank (ADB) menunjukkan pelemahan. IMF (rilis Oktober 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 Global/Dunia tumbuh sebesar 2,9 persen, negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,5 persen, Negara Eropa tumbuh sebesar 1,2 persen, Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,2 persen, India tumbuh sebesar 6,3 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen.

World Bank (WB) (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 Global/Dunia tumbuh sebesar 2,4 persen, negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen, negara Eropa tumbuh sebesar 0,7 persen, Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, India tumbuh sebesar 6,4 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 4,9 persen.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (rilis November 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,5 persen, negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen, Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen,

Tiongkok tumbuh sebesar 4,7 persen, India tumbuh sebesar 6,1 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen.

Asian Development Bank (ADB) (rilis September 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 negara Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, Vietnam tumbuh sebesar 6,0 persen, Thailand tumbuh sebesar 3,7 persen, Malaysia tumbuh sebesar 4,9 persen, India tumbuh sebesar 6,7 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen, selanjutnya IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 tumbuh sebesar 3,0 persen, pertumbuhan negara maju sebesar 1,7 persen, pertumbuhan negara berkembang sebesar 3,8 persen.

Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2024. Tanda-tanda membaik (*upside risks*) dapat dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa resiko (*downside risk*) antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo-economic fragmentation; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya *policy space* (fiskal); (5) Peningkatan resiko *debt distress*; (6) Shock akibat perubahan iklim.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen. Kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh di 4,82 persen dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. Aktivitas konsumsi yang tetap kuat ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat.

Selain angka pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, gambaran membaiknya kondisi kualitas ekonomi nasional juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan dan angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka

per Agustus tahun 2023 turun menjadi 5,32 persen dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 5,86 persen. Sedangkan angka kemiskinan nasional juga mengalami perkembangan yang positif per Maret tahun 2023 yaitu turun menjadi sebesar 9,36 persen dibandingkan per September tahun 2022 yaitu 9,57 persen.

Hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah meningkatnya angka inflasi tahun 2023 yang berada pada posisi sebesar 2,61 persen, mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 5,51 persen.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2022 sebesar 5,31 persen (c-to-c). Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada Tahun 2023, kecuali impor yang mengalami kontraksi sebesar 1,65 persen. Komponen Konsumsi LNRT tumbuh tinggi didorong aktivitas persiapan Pemilu baik dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu. Kemudian Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB (Investasi) masih merupakan penyumbang utama PDB pada Tahun 2023 dengan akumulasi kontribusi sebesar 82,51 persen. Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan (18,67 persen), perdagangan (12,94 persen), pertanian (12,53 persen), pertambangan (10,52 persen), dan konstruksi (9,92 persen) melanjutkan tren pertumbuhan positif.

Perekonomian Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh baik dan berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi seperti (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam,

Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) Prompt Manufacturing Index (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansif.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari 5,86 persen pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada maret 2023. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 mencapai 5,05 persen (c-to-c). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) pada tahun 2023. PDB Perkapita 2023 meningkat sebesar 74,96 juta jiwa. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, game changers transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, Super Platform, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.
Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,6
2	Inflasi	%	1,5 - 3,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5-5,0
4	Angka Kemiskinan	%	7,8-8,0

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
5	Rasio Gini	Angka	0,379 –0,382
6	Indeks Modal Manusia (GNI)	Angka	0,56

Sumber: Kementerian Bappenas (Permen PPN Ka Bappenas Nomor 2 Tahun 2024)

3.1.3. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,31 persen (c-to-c). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sedikit melambat pada Tahun 2023 sebesar 4,98 persen (c-to-c), pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut ditengah pelambatan ekonomi global.

Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, jasa Pendidikan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 11,24 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 10,67 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah dan aktivitas Pemilu.

Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi LNRT (7,34 persen), pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,68 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,36 persen). Sementara ekspor Jawa Tengah hanya sebesar 0,87 persen akibat perekonomian di negara mitra dagang yang mengalami perlambatan.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,13 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,57 persen. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,98 persen di tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Sedangkan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 2,89

persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui peningkatan inklusi keuangan, adanya ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022.

3.1.4. Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,80–5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran $2,5 + 1$ persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,28–8,08 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,20–4,60 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 47,60 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80-5,60
2	PDRB per kapita	Juta Rp	48,53-48,66
3	Inflasi	%	2,5 ± 1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42
5	Angka Kemiskinan	%	9,28-8,08
6	Rasio Gini	Angka	0,362

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses

- pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
 - 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,2 persen, namun sedikit melambat pada Tahun 2023 menjadi sebesar 5,0 persen. Namun demikian kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung sebagaimana kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia, diperkirakan akan tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Struktur Perekonomian Kabupaten Temanggung didukung oleh sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Pada tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 12,49 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 11,25 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Temanggung dan aktivitas Pemilu.

Pertumbuhan Ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 2,32 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2,54 persen. Angka kemiskinan juga konsisten menurun, dari sebelumnya 9,33 persen di tahun 2022, turun menjadi 9,26 persen pada tahun 2023. Sedangkan inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan angka ketimpangan Pendapatan membaik, dari sebelumnya 18,46 pada tahun 2022 naik menjadi 19,52 pada tahun 2023.

3.1.6 Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri pengolahan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi di atas, maka perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 5,28 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran

2,5+1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kabupaten Temanggung. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,00-8,70 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 2,30-2,17 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,76 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 33,50 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian target pembangunan ke depan diharapkan dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka menuju angka proyeksi 2,30-2,17 persen, hal ini didukung oleh beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran, diantaranya:

- a. Penciptaan kesempatan kerja baru melalui penumbuhan industri padat karya maupun pengembangan UMKM;
- b. Perluasan kerja di sektor informal;
- c. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja;
- d. Meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat melalui program tenaga kerja mandiri dengan fasilitas dukungan seperti peralatan usaha, pelatihan kerja serta kemudahan akses permodalan;
- e. Memperkuat sistem informasi pasar kerja; dan
- f. Perlindungan sosial bagi pekerja.

3.1.6.1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 berada pada kisaran 5,1-5,5%. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi

global, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,90–5,60%.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2025 ekonomi akan tumbuh dan diharapkan aktivitas perekonomian kembali normal. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2025, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi.

Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2018	5,13	5,31	5,20
2019	5,05	5,36	5,00
2020	-2,13	-2,65	-2,10
2021	3,34	3,33	3,70
2022	5,20	5,31	5,30
2023	5,00	4,98	5,30
2024*	5,27	5,20 - 5,60	5,30 – 5,70
2025*	5,28	4,90 - 5,60	5,1-5,5

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang

fluktuatif, pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dan puncaknya turun sampai posisi -2,13 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 dan tahun 2022 sudah mulai menunjukkan perkembangan yang positif hingga mencapai angka 5,2%. Namun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung tahun 2023 kembali mengalami penurunan dimana pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 turun pada angka 5,00%, begitu juga yang terjadi di Povinsi Jawa Tengah. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih baik lagi diantaranya peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal seperti pertanian yang dapat ditingkatkan dengan cara:

- a. Mendorong minat berusaha di bidang pertanian;
- b. Peningkatan teknologi pertanian;
- c. Mendorong persaingan yang sehat dalam jual beli sektor pertanian;
- d. Pengembangan jenis komoditas agar berhasil guna;
- e. Membuka peluang eskpor ke daerah lain;
- f. Mendorong ekonomi kreatif semakin berkembang
- g. Digitalisasi usaha produk pertanian, dan lain-lain.

3.1.6.2. Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan selama jangka waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.4.

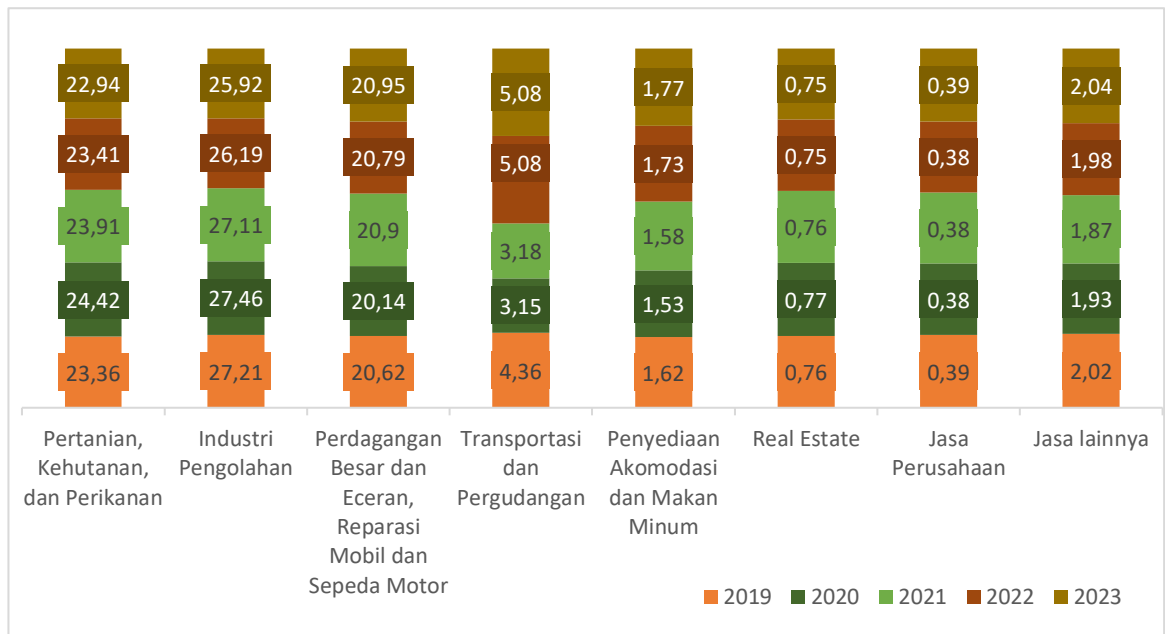
Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK
Tahun 2018-2023

	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.36	1.73	1.86	0.86	2,92	1,82
B	Pertambangan dan Penggalian	3.61	4.24	2.11	6.75	-3.94	3,12
C	Industri Pengolahan	5.63	4.39	-0.62	2.00	1,09	4,32

	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.62	4.22	2.87	4.84	5,26	5,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.67	4.74	2.02	5.62	0,22	4,36
F	Konstruksi	5.79	8.15	-2.01	7.54	3,72	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.79	5.39	-3.79	7.40	4,30	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	4.53	9.29	-30.59	2.37	65,39	7,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.24	9.41	-6.81	6.03	15,04	12,49
J	Informasi dan Komunikasi	11.05	15.69	14.14	5.98	2,24	11,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.17	3.73	2.01	3.42	0,51	2,91
L	Real Estate	4.65	7.21	-0.10	2.32	5,80	8,36
M,N	Jasa Perusahaan	8.77	10.21	-6.32	3.01	5,65	8,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.11	3.41	-1.61	-0.26	1,60	5,11
P	Jasa Pendidikan	5.98	8.16	-0.19	0.54	1,63	6,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.86	8.22	7.70	0.59	2,59	8,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.87	8.33	-6.22	0.98	10,95	8,83
	PDRB	5,13	5,05	-2,13	3,34	5,20	5,00

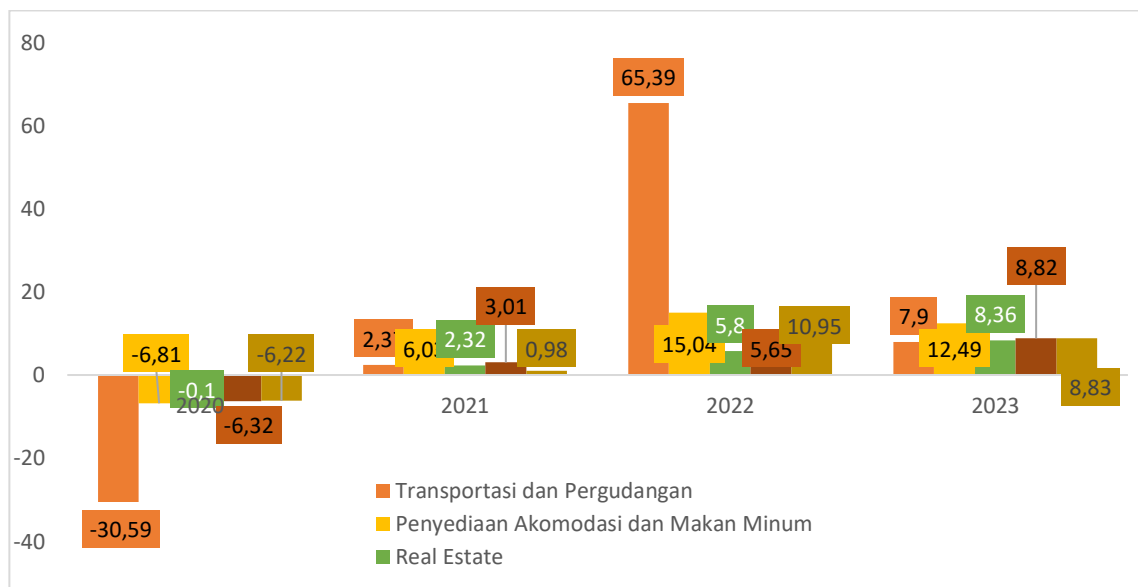
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pendukung utama. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Meskipun 3 sektor tersebut adalah penggerak utama perekonomian Kabupaten Temanggung, akan tetapi 3 sektor tersebut tidak memiliki pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya.



Sumber: BPS Kab Temanggung 2024

Gambar 3.1.
Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kab Temanggung 2024

Gambar 3.2.
Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2018 sedikit bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan

tahun 2018 sampai 2023 yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung. Hal ini didukung dengan pertumbuhan lapangan usaha sektor Transportasi Pergudangan dengan sektor pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 65,39% diikuti oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 15,04% yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun daerah tetangga.

3.1.6.3. PDRB per Kapita

PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB Perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Tabel 3.5.
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023

TAHUN	NILAI (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	26.682.478,77	5,13
2019	28.052.969,06	5,05
2020	27.702.750,00	-2,13
2021	28.484.021,00	3,34
2022	30.930.000,00	5,20
2023	33.290.000,00	5,00

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/ dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada yang dimiliki/ dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2023 PDRB Perkapita mengalami peningkatan dengan pertumbuhannya menjadi 5,00%.

Peningkatan pendapatan perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
- b. Meningkatkan program kewirausahaan / pengembangan UMKM / pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
- e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

3.1.6.4. Inflasi

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel,

sedangkan Kabupaten Temanggung tidak masuk ke dalam daerah sampel sehingga angka inflasi Temanggung mengikuti inflasi Jawa Tengah.

Tabel 3.6.
Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

LOKASI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
Temanggung	2,89	2,66	1,9	2,18	5,63	2,89	3+/-1	3,0 ± 1
Jawa Tengah	2,82	2,81	1,56	1,28	5,63	2,89	3+/-1	3,0 ± 1
Nasional	3,13	2,72	1,9	1,6	5,51	2,61	3+/-1	3,0 ± 1

Keterangan : *Proyeksi | Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Laju inflasi di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi salah satunya dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Pada tahun 2023 inflasi di Tingkat Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino.

Dengan mendasarkan atas data kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung di atas dan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah:

- 1) Meningkatkan investasi berdasarkan potensi daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja;
- 2) Optimalisasi pemakaian produk dalam negeri guna menguatkan potensi produk lokal unggulan daerah;
- 3) Penekanan laju inflasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;

- 4) Pengembangan pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPD tahun 2024-2026. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi;

- b. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;
- c. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
- d. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;
- e. Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat, aspirasi yang berkembang dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 8 arah kebijakan prioritas yaitu:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik”**, dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu:
 - a. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan

- prestasi pemuda dan olahraga, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi;
 - b. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
 - c. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
2. Dukungan implementasi kebijakan nasional pada:
- a. penurunan stunting menjadi 14 persen;
 - b. penurunan angka kemiskinan;
 - c. pengendalian inflasi daerah;

Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPD tahun 2025 melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Daerah di tahun 2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan penerimaan pendapatan tahun 2024. Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang

bersumber dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2025 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan memertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 jenis dan memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, di mana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Temanggung selain Pendapatan BLUD.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Proyeksi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah fungsinya hanya melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi kas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2024.

Gambar 3.3.
Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Temanggung mengalami kondisi yang fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dan naik kembali pada tahun 2025. Pajak daerah didominasi oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. Pertumbuhan Retribusi daerah juga mengalami kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, kemudian naik pada tahun 2021 dan turun kembali pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan dan turun kembali pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 diproyeksikan naik sebesar 2,06%. Retribusi terbanyak pada retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dikatakan belum proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masing sangat rendah. Kontributor terbesar PAD berasal dari sektor Lain-lain PAD yang Sah

yaitu Pendapatan BLUD. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan PAD pada RKPD Tahun 2025 adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:

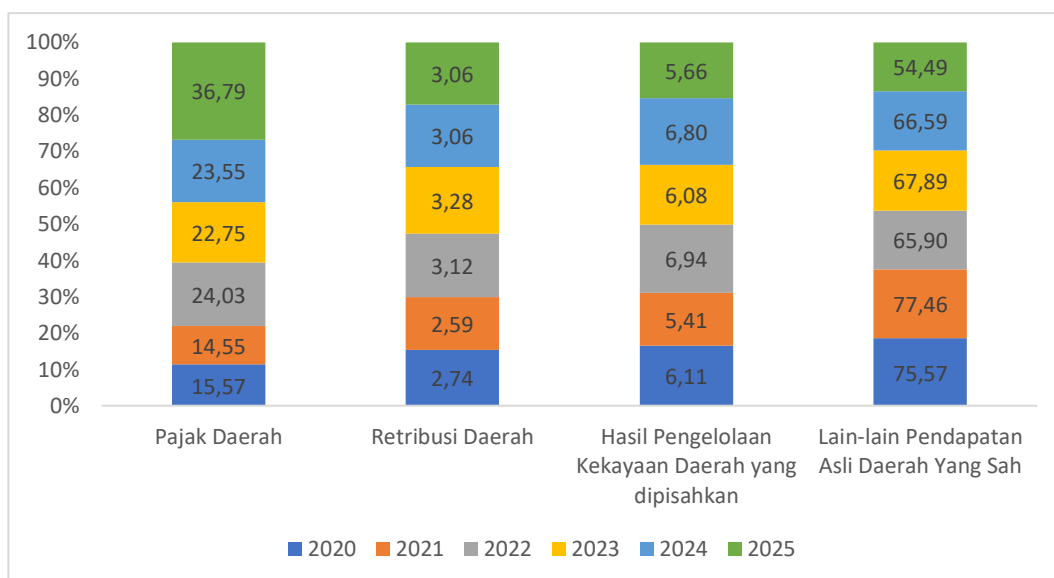
- a. Pertumbuhan objek pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)) diperkirakan sama atau sedikit lebih tinggi dari tahun 2024;
 - b. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah. Digitalisasi penerimaan pendapatan retribusi yang terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan transaksi pembayaran dan pengawasan realisasi pendapatan khususnya pada pendapatan retribusi Los/Kios Pasar;
 - c. Optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu dengan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer diproyeksikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan (DBH dan DAU diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik dan Non Fisik yang bersifat in out, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa diperkirakan sama dengan Tahun Anggaran 2024);
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2024, namun untuk Bantuan Keuangan yang bersifat in out dianggarkan sesuai dengan usulan/hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini belum dapat diproyeksikan dikarenakan:
- a. Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun Anggaran 2025 karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga. Pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga juga belum dapat dipastikan karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga.
 - b. Dana Darurat selama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan;
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak bisa diprediksi karena merupakan dana dari pemerintah yang bersifat insidesial.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah diantaranya alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan pendapatan tertinggi yaitu pada pendapatan transfer. Sedangkan untuk PAD hanya naik sedikit dimana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa pendapatan BLUD menjadi salah satu penyumbang kenaikannya.

Gambar 3.4.
Pendapatan Kabupaten Temanggung



Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD Penetapan 2024	
PENDAPATAN DAERAH	1.878.383.823.682	1.830.846.293.347	1.971.005.990.029	1.895.472.010.883	2.003.870.332.664	1.961.368.868.951	1.946.935.976.641
1 . Pendapatan Asli Daerah	278.313.775.793	307.488.084.365	363.128.342.571	308.693.982.914	350.283.014.437	329.883.442.623	376.195.806.669
a. Pajak Daerah	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.020.942	74.191.559.232	79.677.967.921	76.510.647.700	138.389.282.596
b. Retribusi Daerah	16.189.001.249	8.436.169.882	9.400.033.763	9.643.158.066	11.496.721.044	11.264.340.000	191.392.376.170
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.571.585.064	18.800.858.165	19.633.082.917	21.426.146.839	21.311.076.903	22.109.728.797	21.311.076.903
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	194.129.095.434	232.363.451.505	281.263.204.949	203.433.118.777	237.797.248.569	219.998.726.126	25.103.071.000
2 . Pendapatan Transfer	1.530.401.293.306	1.451.579.818.982	1.537.846.595.458	1.585.778.027.969	1.653.587.318.227	1.631.485.426.328	1.570.740.169.972
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.416.959.014.266	1.350.758.939.773	1.385.928.637.379	1.448.787.218.335	1.517.163.835.087	1.501.341.698.149	1.489.425.840.035
1) Dana Perimbangan	1.133.246.263.266	1.046.565.618.773	1.120.897.599.379	1.223.724.012.200	1.245.317.994.087	1.245.002.504.149	1.250.105.264.035
a) Dana Transfer Umum-DBH	45.213.757.136	52.880.696.555	66.832.564.275	50.975.465.200	75.150.038.079	70.916.484.149	76.020.400.035

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD Penetapan 2024	
b) Dana Transfer Umum-DAU	828.948.502.000	762.027.309.000	753.140.119.000	753.174.275.000	791.039.886.585	820.750.031.000	820.750.031.000
c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	92.570.658.000	55.578.330.000	131.534.286.845	153.727.447.000	109.544.079.906	71.224.680.000	71.223.524.000
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	166.513.346.130	176.079.283.218	169.390.629.259	265.846.825.000	269.583.989.517	282.111.309.000	282.111.309.000
2) Dana Insentif Daerah	41.768.103.000	56.311.496.000	17.149.213.000	2.438.134.000	29.383.259.000	-	-
3) Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
4) Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
5) Dana Desa	241.944.648.000	247.881.825.000	247.881.825.000	245.879.771.000	242.462.582.000	239.320.576.000	239.320.576.000
6) Insentif Fiskal						17.018.618.000	-

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD Penetapan 2024	
b. Transfer antar Daerah	113.442.279.040	100.820.879.209	151.917.958.079	136.990.809.634	136.423.483.140	130.143.728.179	81.314.329.937
1) Pendapatan Bagi Hasil	102.323.566.038	94.165.118.971	114.087.366.818	117.486.242.600	123.749.375.637	130.143.728.179	81.314.329.937
2) Bantuan Keuangan	11.118.713.002	6.655.760.238	37.830.591.261	15.975.000.000	12.674.107.503	0	0
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	69.668.754.583	71.778.390.000	70.031.052.000	1.000.000.000	0	0	0
a. Hibah	0	0	571.300.000	1.000.000.000	0	0	0
b. Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	69.668.754.583	71.778.390.000	69.459.752.000	0	0	0	0

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2024

Dari gambar 3.7 terlihat bahwa komponen pembentuk pendapatan daerah terbesar bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 81,10%, kemudian dari sektor PAD rata-rata sebesar 17,10% dan sisanya berupa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 1,61%. Pada tahun 2023 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan, baik di sektor Pendapatan Asli Daerah maupun dari sektor Pendapatan Transfer. Peningkatan yang tinggi pada proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2025 di komponen pajak daerah adalah adanya pendapatan opsen PKB dan opsen BBNKB. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Sedangkan peningkatan sektor Retribusi Daerah disebabkan pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan BLUD yang semula pada rekening Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke rekening Retribusi Daerah.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran data subyek/obyek sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan dan pelayanan pendapatan asli daerah;
- c. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah;
- e. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;

- g. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain;
- h. Peningkatan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- j. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dengan perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat berjalan efektif.

Mengingat kemampuan pendapatan asli daerah yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Temanggung seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, badan- badan sosial, komunitas, dan organisasi yang ada di Kabupaten Temanggung termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan daerah, serta sumber pembiayaan lain.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Prioritas kebijakan belanja operasi pada RKPD Tahun 2025 ini fokus pada:
 - a. belanja rutin Perangkat Daerah seperti belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa operasional pada program penunjang urusan perangkat daerah;
 - b. belanja hibah kepada kelompok yang menunjang Prioritas Nasional dan capaian kinerja yang masih dalam status upaya keras seperti belanja hibah bibit tanaman produktif, bibit ikan, bibit ternak, dan peralatan pengolahan hasil pertanian;
 - c. belanja bantuan sosial dalam rangka pencapaian target kemiskinan ekstrem pada angka 0 pada tahun 2025 dan penurunan angka stunting melalui bantuan sosial jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan sosial kepada KUBE, dan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni
2. Belanja Modal, adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya dan aset tak berwujud. Prioritas kebijakan belanja modal pada RKPD Tahun 2025 ini fokus pada:

- a. Belanja modal jalan yang mendukung Pengembangan Wilayah gelangmanggung;
 - b. Belanja modal jaringan dan irigasi yang mendukung pemerataan insfrastruktur wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Prioritas kebijakan belanja transfer pada RKPD Tahun 2025 ini fokus pada:
- a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BPJS Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan pemberian insentif bagi Ketua RT/RW;
 - b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan insfrastruktur perdesaan.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk peruntukannya fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai sasaran dan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah;

2. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
3. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
5. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal; dan
6. Melaksanakan program pembangunan daerah yang merupakan aspirasi masyarakat melalui tahapan Musrenbang.

Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, APBD 2024, dan proyeksi Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara lengkap terinci pada tabel 3.9 dan tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020

URAIAN	TAHUN ANGGARAN			
	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020
Belanja Tidak Langsung	1.168.792.735.222	1.138.907.139.719	1.270.761.798.151	1.213.289.339.823
Belanja pegawai	700.110.120.312	676.939.397.280	716.635.962.801	671.072.509.371
Belanja bunga	0	0	0	
Belanja subsidi	0	0	0	
Belanja hibah	62.473.200.000	58.690.565.000	71.157.887.850	68.809.177.692
Belanja bantuan sosial	23.579.612.500	22.228.162.500	8.782.520.000	7.162.252.000
Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa / kelurahan	5.290.146.750	5.259.573.640	6.502.600.000	6.484.504.647
Belanja bantuan keuangan	376.839.655.660	375.789.441.299	411.446.563.600	409.802.732.000
Belanja tidak terduga	500.000.000	0	56.236.263.900	49.956.004.113
Belanja langsung	777.872.643.706	702.126495.551	632.656.988.840	569.915.609.275
Belanja pegawai	108.344.310.197	101.536.316.068	132.227.665.531	122.876.914.568
Belanja barang dan jasa	407.120.036.216	377.340.991.916	384.614.415.039	344.955.640.184
Belanja modal	262.408.297.293	223.249.187.567	115.814.908.270	102.083.054.523
Total Jumlah Belanja	1.946.665.378.928	1.841.033.635.270	1.903.418.786.991	1.783.204.949.098

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel. 3.9
Target dan Realisasi Tahun 2021 - 2023, APBD 2024 dan Proyeksi Tahun 2025
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

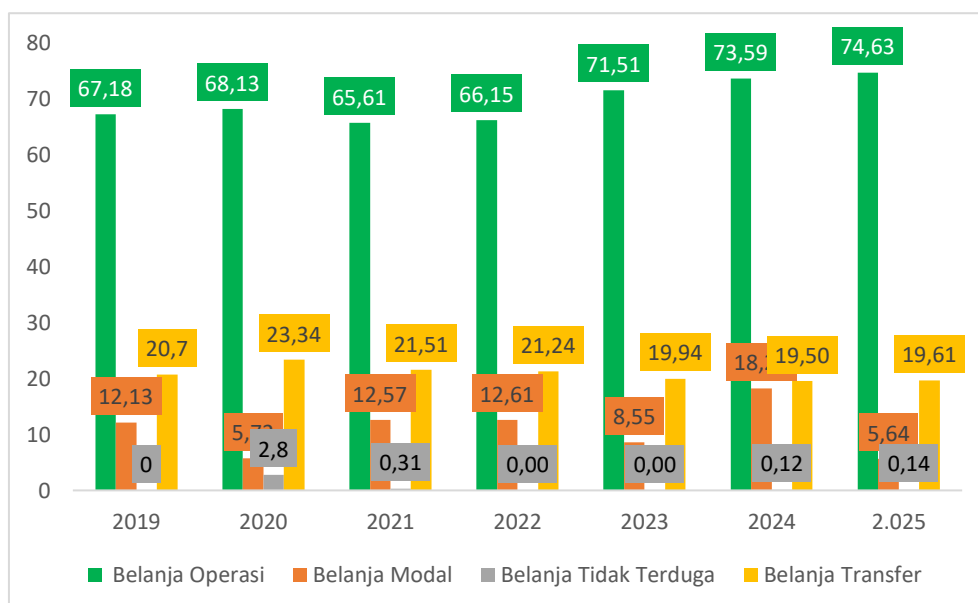
URAIAN	TAHUN ANGGARAN							PROYEKSI 2025
	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	APBD 2024 Penetapan	
BELANJA DAERAH	2.053.340.949.247	1.877.969.167.294	2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	2.156.455.999.239	2.042.295.812.083	2.098.911.972.717	2.076.390.105.919
1. Belanja Operasi	1.373.906.713.450	1.232.194.234.987	1.455.371.245.698	1.295.686.749.508	1.545.029.674.070	1.460.421.030.081	1.549.564.934.300	1.540.590.671.300
a. Belanja Pegawai	717.818.927.664	681.107.527.533	785.276.004.360	710.731.632.791	803.840.649.421	889.665.000.241	891.973.887.571	889.802.050.241
b. Belanja Barang dan Jasa	545.881.225.141	458.561.990.957	575.681.578.758	492.943.591.757	584.018.730.999	500.030.196.074	552.080.765.984	499.861.283.074
c. Belanja Bunga	0	0	0	0	0	-	0	-
d. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	-	0	-
e. Belanja Hibah	92.739.551.295	89.546.728.997	86.988.194.080	85.102.866.541	152.954.275.650	147.097.157.985	111.182.630.126	138.154.757.985
f. Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350	2.977.987.500	7.425.468.500	6.908.658.419	4.216.018.000	12.772.580.000	12.147.203.000	12.772.580.000
2. Belanja Modal	239.836.719.621	235.995.614.408	287.510.501.396	247.089.139.440	202.902.736.362	174.714.127.567	117.183.905.255	116.565.770.255
a. Tanah	9.000.000.000	58.015.740	9.000.000.000	3.908.713.890	1.028.850.000	-	0	-
b. Peralatan dan Mesin	83.896.202.382	75.015.739.240	115.562.797.305	95.059.501.590	61.726.992.797	39.043.136.469	38.311.179.922	39.016.761.469
c. Bangunan dan Gedung	92.585.878.990	83.641.790.248	114.551.721.981	102.564.048.329	54.577.028.997	46.317.439.145	43.104.932.470	46.317.439.145
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.198.762.300	71.894.050.162	42.260.159.121	39.768.985.023	77.837.411.000	28.446.629.250	39.674.426.000	27.854.869.250
e. Aset tetap lainnya	5.792.569.901	5.309.106.018	6.113.272.989	5.766.890.608	7.691.853.568	3.279.550.391	7.609.116.519	3.279.550.391
f. Aset lainnya	321.000.000	76.913.000	22.550.000	21.000.000	40.600.000	97.150.000	46.500.000	97.150.000
3. Belanja Tidak Terduga	8.704.328.802	5.779.500.000	2.000.000.000	0	800.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000

URAIAN	TAHUN ANGGARAN							PROYEKSI 2025
	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	APBD 2024 Penetapan	
4. Belanja Transfer	404.662.493.422	403.999.817.899	418.390.235.996	415.972.520.858	397.911.846.807	407.160.654.435	407.141.266.364	406.731.266.364
a. Belanja Bagi Hasil	5.675.400.000	5.656.124.477	7.951.000.000	7.936.684.862	7.997.804.000	14.988.600.364	8.777.498.770	14.988.600.364
b. Belanja Bantuan Keuangan	398.987.093.422	398.343.693.422	410.439.235.996	408.035.835.996	389.914.042.807	392.152.666.000	391.153.832.355	391.742.666.000

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel 3.8 dan tabel 3.9 dapat dilihat perbandingan data target dengan realisasi belanja daerah Tahun 2019-2023. Pada besaran total belanja, terdapat kenaikan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena atas pertimbangan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rutin, kegiatan prioritas penyelesaian permasalahan pembangunan, penyelesaian kegiatan yang mendukung capaian kinerja yang masih dalam status Upaya keras, dan kegiatan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi belanja Tahun 2025 terbesar pada belanja operasi di mana belanja pegawai menjadi salah satu penyebabnya. Besaran proyeksi belanja pegawai terhadap total belanja operasi tahun 2025 sebesar 57,41 %, hal ini disebabkan karena ada tambahan beban belanja pegawai dari penerimaan CPNS sebanyak 884 orang dan PPPK sebanyak 2.084 orang pada tahun 2022 serta tambahan PPPK sejumlah 389 pada tahun 2024. Belanja modal dan belanja transfer juga mengalami kenaikan. Belanja modal terjadi kenaikan pada belanja bangunan dan gedung serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan karena menyesuaikan pada belanja DAK fisik. Untuk belanja transfer kenaikan terjadi karena penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga masih sama dengan tahun sebelumnya.

Apabila data belanja daerah tersebut dilihat menggunakan grafik batang, maka akan jelas terlihat bahwa belanja operasi merupakan belanja yang paling tinggi dan mencapai lebih dari 50% dari total Belanja daerah selama kurun waktu 4 tahun. Keadaan belanja daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat seperti pada gambar 3.5.



Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.5.
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan gambar 3.5 terlihat bahwa belanja daerah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 7 tahun anggaran didominasi oleh belanja Operasi. Komposisi belanja operasi paling tinggi terjadi yaitu pada tahun anggaran 2025, hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran belanja daerah dipergunakan pemenuhan belanja gaji pegawai. Belanja operasi pada Tahun Anggaran 2025 diprediksi mencapai 74,63% dari total belanja daerah.

3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung dari tahun 2019–2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Persentase
2019	1.236.735.432.764	1.841.033.635.270	67,18
2020	1.214.876.493.815	1.783.204.949.098	68,13
2021	1.232.194.234.987	1.877.969.167.294	65,61
2022	1.295.686.749.508	1.958.748.409.806	66,15

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Persentase
2023	1.460.421.030.081	2.042.295.812.083	71,51
2024	1.567.384.486.681	2.098.911.972.717	74,68
2025	1.549.564.934.300	2.076.390.105.919	74,63

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja operasional Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah rata-rata adalah 69,67%. Persentase belanja operasi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2024 yaitu sebesar 74,68% dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 65,61%.

3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Tabel 3.12
Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase
2019	223.249.187.567	1.841.033.635.270	12,13
2020	102.083.054.523	1.783.204.949.098	5,72
2021	235.995.614.408	1.877.969.167.294	12,57
2022	247.089.139.440	1.958.748.409.806	12,61
2023	174.714.127.567	2.042.295.812.083	8,55
2024	128.746.154.911	2.098.911.972.717	6,13
2025	117.183.905.255	2.076.390.105.919	5,64

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja modal Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata-rata sebesar 9,11%. Persentase belanja modal tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2022 yaitu sebesar 12,61 % dan terendah pada tahun 2025 yaitu sebesar 5,64 %.

3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 3.13
Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Transfer	Belanja Daerah	Persentase
2019	381.049.014.939	1.841.033.635.270	20,70
2020	416.287.236.647	1.783.204.949.098	23,34
2021	403.999.817.899	1.877.969.167.294	21,51
2022	415.972.520.858	1.958.748.409.806	21,24
2023	407.160.654.435	2.042.295.812.083	19,94
2024	399.931.331.125	2.098.911.972.717	19,05
2025	407.141.266.364	2.076.390.105.919	19,61

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja transfer Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 20,72%. Persentase belanja transfer tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2020 yaitu sebesar 23,34% dan terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 19,05%.

3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.14
Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Tidak Terduga	Belanja Daerah	Persentase
2019	0	1.841.033.635.270	0,00
2020	49.956.004.113	1.783.204.949.098	2,80
2021	5.779.500.000	1.877.969.167.294	0,31
2022	0	1.958.748.409.806	0,00
2023	800.000.000	2.042.295.812.083	0,04
2024	2.850.000.000	2.098.911.972.717	0,14
2025	2.850.000.000	2.076.390.105.919	0,14

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja tidak terduga Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 0,48%. Persentase belanja

tidak terduga tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2020 yaitu sebesar 2,80 % dan terendah pada tahun 2019 dan tahun 2022 yaitu sebesar 0%.

3.2.2.5 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Seluruh Perangkat Daerah

Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja seluruh perangkat daerah adalah konsistensi antara belanja pada dokumen RKPD dengan total belanja yang ada di APBD.

Tabel 3.15
Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja

Tahun	Rencana Belanja	Total Belanja	Persentase
2019	1.946.665.378.928	1.841.033.635.270	94,57
2020	1.903.418.451.221	1.783.204.949.098	93,68
2021	2.053.340.949.247	1.877.969.167.294	91,46
2022	2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	90,55
2023	2.156.455.999.239	2.042.295.812.083	94,71
2024	2.098.911.972.717	2.098.911.972.717	100
2025	2.076.390.105.919	2.076.390.105.919	100

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja dari tahun 2019 sampai tahun 2023 tidak lebih dari 100%. Ini berarti bahwa total belanja yang dimuat dalam penetapan APBD tidak semua direalisasikan dalam proses realisasi pelaksanaannya.

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b) Penerimaan pinjaman daerah dilakukan manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.
- c) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Penerimaan Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun Anggaran 2025 dilakukan untuk pembangunan poliklinik RSUD yang akan dimulai pada Tahun 2026.

- b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- c. Pembayaran pokok hutang;
Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.
- d. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Pengeluaran Pembiayaan berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Tabel 3.16
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023*	APBD 2024	
PEMBIAYAAN DAERAH	86.044.884.418	114.804.704.856	161.211.637.352	243.671.402.772	180.203.716.352	137.543.103.766	119.451.731.278
1. Penerimaan Pembiayaan	91.129.078.155	124.692.881.503	162.455.516.962	254.301.081.892	182.011.130.352	137.543.103.766	139.451.731.278
a. SiLPA	85.356.884.193	123.395.072.830	162.448.209.105	254.248.460.087	180.406.907.044	134.088.073.766	139.392.477.970
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	55.857.857	50.489.211	7.307.857,00	52.621.805	59.253.308	0	59.253.308
c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.716.336.105	1.247.319.462	0	0	0	0	0
d. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	1.544.970.000	3.455.030.000	0
2. Pengeluaran Pembiayaan	5.084.193.737	9.888.176.647	1.243.879.610	10.629.679.120	1.807.414.000	0	20.000.000.000
a. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	5.000.000.000	0	0	20.000.000.000
b. Penyertaan Modal Daerah	-	4.171.840.542	0	0	1.807.414.000	0	0

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023*	APBD 2024	
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai c. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.084.193.737	5.716.336.105	1.243.879.610	5.629.679.120	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	86.044.884.418	114.804.704.856	161.211.637.352	243.671.402.772	180.203.716.352	137.543.103.766	119.451.731.278

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 memproyeksikan besaran SiLPA sebesar Rp139.392.477.970,00 lebih besar dibandingkan besaran SiLPA pada APBD Tahun 2024.

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 hanya terdiri dari 2 komponen yaitu Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk rencana pembangunan gedung poliklinik RSUD yang akan dimulai pada Tahun 2026.

Informasi dan data sebagai suatu sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah tertuang dan telah dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD.

3.3 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

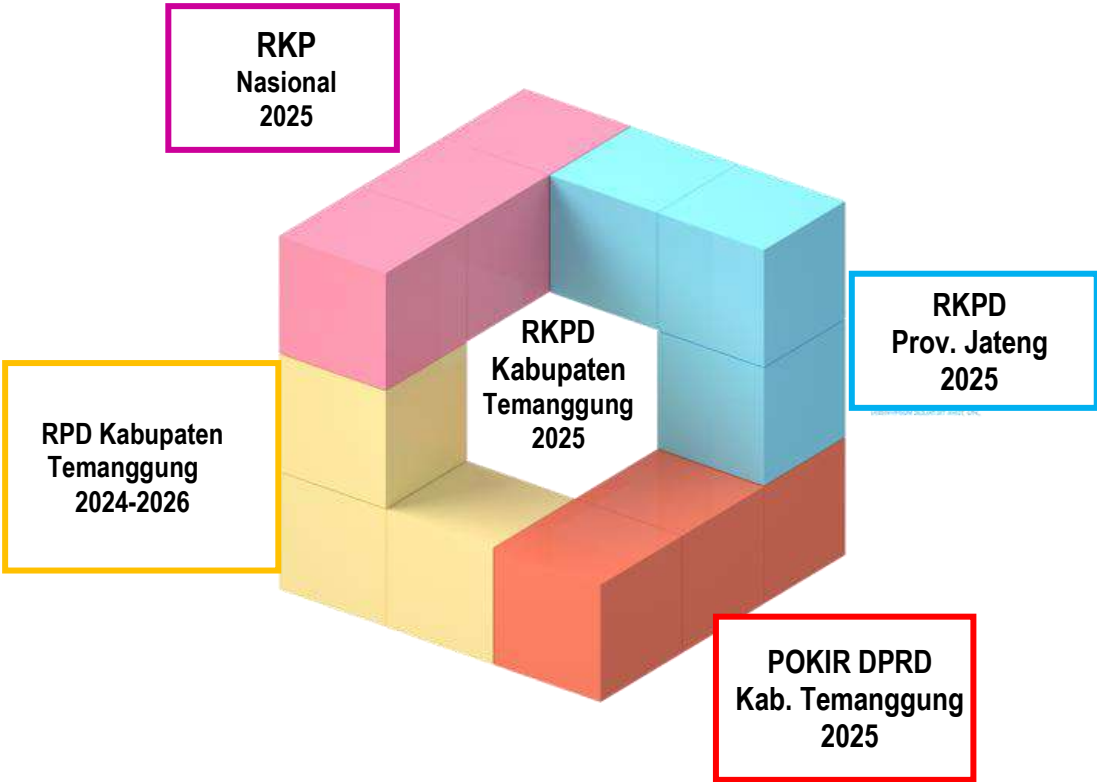
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan prestasi yang bagus karena memperoleh WTP sebanyak 12 kali pada tahun 2012-2023.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan RPD 2024-2026 sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2025. Prioritas Daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 disusun berdasarkan:

- 1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
- 2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- 3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026; dan
- 4. Pokok-pokok pikiran DPRD.

Proses integrasi penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 4.1

Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Secara garis besar substansi bab ini terdiri dari:

- A. Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2005-2025
- B. Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- C. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025;
- D. Kontribusi Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan

- Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2025;
- E. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025;
 - F. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDG's Kabupaten Temanggung;
 - G. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung;
 - H. Dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan;
 - I. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - J. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim;
 - K. Fasilitasi Perubahan Iklim
 - L. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - M. Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD 2025.
- Secara detail diuraikan sebagai berikut.

4.1. VISI DAN MISI RENCANA JANGKA PANJANG PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEMANGGUNG 2005-2025

4.1.1. Visi

Visi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 adalah **“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

Visi pembangunan daerah Tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat. Penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung yaitu:

1. **Temanggung**, diartikan sebagai suatu daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, diartikan bergerak dan meningkat serta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemajuan suatu masyarakat dapat dinilai dari aspek ekonomi yang berpusat pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran, dari aspek sosial yang berpusat pada peningkatan kualitas dan intelektualitas sumber daya manusia, dan dari aspek kependudukan

yang berpusat pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Muara dari suatu kemajuan adalah daerah dan masyarakat yang memiliki Tingkat produktivitas yang tinggi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemampuan keuangan daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia.

3. **Mandiri**, diartikan dalam berdiri sendiri, dapat mengurus atau mengatasi kepentingannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Kemandirian mandiri tidak diartikan sebagai menutup diri, melainkan ditekankan pada masyarakat yang mampu mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk kemajuan daerah, mampu menjadi pusat pertumbuhan baru tanpa mengabaikan pentingnya aspek *networking*. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian daerah adalah peningkatan kontribusi PAD dan nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan.
4. **Aman**, diartikan sebagai keadaan yang bebas dari ketakutan akan bahaya atau hal-hal yang membahayakan. Keamanan suatu daerah berarti suasana daerah yang tidak terancam baik bagi penduduknya maupun bagi wilayahnya, masyarakat dapat beraktifitas tanpa merasakan kecemasan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur faktor keamanan adalah angka kriminalitas dan jumlah konflik vertical dan horizontal, serta penurunan jumlah bencana alam dan kesiapan menghadapinya.
5. **Adil**, diartikan sebagai tiadanya kesenjangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Kondisi keadilan juga ditekankan pada adanya kesamaan perlakuan terhadap setiap anggota masyarakat atau penduduk di segala sektor kehidupan termasuk keadilan dalam memperoleh kepastian dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan adalah angka kesenjangan antar penduduk dan angka kesenjangan antar wilayah serta nilai jaminan sosial masyarakat.
6. **Sejahtera**, diartikan sebagai kondisi kemakmuran suatu masyarakat yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial secara adil dan merata. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita, Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM).

4.1.2. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, dijabarkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM,** yaitu makin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dalam era otonomi daerah, semakin optimalnya aplikasi prinsip-prinsip *good governance*, makin baiknya kondisi kapasitas daerah dalam berbagai aspek seperti kewenangan, kelembagaan, aparatur dan kemampuan keuangan daerah, makin berkembangnya kerjasama pemerintah daerah dengan kelompok usaha dan masyarakat baik pada Tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, makin meningkatnya kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan pemerintah, makin mantap kebijakan dan regulasi di berbagai bidang, khususnya politik dan hukum, makin matangnya kondisi kepemimpinan lokal yang mampu membawa dan menciptakan suasana politik daerah yang demokratis dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, makin tegaknya supremasi hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, makin berkurangnya Tingkat kriminalitas dan konflik menuju daerah yang aman, tertib dan tenteram.
- 2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin** adalah suasana kehidupan perikehidupan bermasyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, tumbuhnya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, menjadi masyarakat yang berkualitas, manusia yang cerdas dan sehat serta masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
- 3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan cluster usaha Tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan**

kemandirian daerah yaitu semakin mantap dan kuatnya kondisi perekonomian daerah yang tumbuh dan ditopang struktur ekonomi berbasis sektor unggulan yang kuat, semakin mantapnya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada sinergitas antara pelaku ekonomi kuat dan lemah, semakin kuatnya peranan sektor basis daerah yang tumbuh dalam model linkage, tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan dan pusat-pusat ekonomi baru pada Tingkat perdesaan berbasis cluster usaha yang terintegrasi.

4. **Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah** yaitu semakin kuatnya kemampuan daerah yang mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pembangunan, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana publik, terutama prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, makin mantapnya pengembangan prasarana dan sarana pada pusat-pusat ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, yang berdampak pada pengurangan Tingkat kesenjangan antar wilayah.
5. **Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenal pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang** adalah makin meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat pelaku pembangunan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pengawalan yang ketat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan fungsi lingkungan hidup, makin mantapnya peranan dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah disertai dengan langkah-langkah yang tegas dan konsisten untuk menegakkan hukum atas pelanggaran aspek sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang.

4.2. VISI DAN MISI RENCANA JANGKA PANJANG PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEMANGGUNG 2025-2045

4.2.1 Visi

Visi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah **“Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045”**.

Visi pembangunan daerah Tahun 2025-2045 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat. Penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung yaitu:

1. Berbudaya dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada pembentukan sistem sosial budaya yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan masyarakat melalui pelestarian nilai budaya, penciptaan masyarakat dengan karakter dan perilaku budaya yang kuat, pelayanan publik yang baik dan cerdas dengan budaya profesional dan berintegritas, serta lingkungan dengan daya dukung memadai, berkelanjutan dan berketahanan.
2. Maju dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada penciptaan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dengan nilai tambah dan rantai nilai lokal yang tinggi, adaptif terhadap perubahan dengan orientasi investasi terhadap pasar, ditunjang dengan teknologi, digital dan konektivitas yang optimal mendukung produktivitas wilayah.
3. Sejahtera dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, didukung oleh sumber daya manusia yang berkembang dan optimal.

4.2.2 Misi

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya

Membentuk masyarakat yang berbudaya merupakan hal mendasar dalam pembangunan daerah. Perkembangan teknologi yang cukup pesat menjadi ancaman luntarnya nilai budaya masyarakat. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya diharapkan akan meningkatkan pembangunan kebudayaan, kualitas keluarga dan kerukunan umat beragama. Dengan membangun dan memelihara masyarakat yang berbudaya, diharapkan dapat menciptakan

lingkungan yang lebih inklusif, kreatif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas membutuhkan komitmen yang kuat dari segenap unsur Pemerintah Daerah, serta dukungan dari masyarakat. Tuntutan agar birokrasi menjadi lebih dinamis dan mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga integritasnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan Lingkungan yang Memiliki Daya Dukung Memadai, Berketahanan dan Berkelanjutan

Merupakan upaya menciptakan kondisi agar ekosistem dan sumber daya alam dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Lingkungan yang berketahanan berarti memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi, seperti perubahan iklim, fluktuasi cuaca, atau gangguan alam lainnya. Lingkungan hidup yang berkelanjutan diwujudkan dengan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan, tidak meningkatkan ketimpangan sosial, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Adaptif dan Berdaya Saing

Peningkatan produktivitas ekonomi daerah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien melalui pengembangan industri, pertanian, pariwisata, dan sektor potensial lainnya dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Perekonomian daerah yang berdaya saing mencakup pengembangan keunggulan kompetitif di sektor-sektor kunci, peningkatan infrastruktur, inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil.

5. Mengembangkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Digital dan Peningkatan Konektivitas Wilayah

Pengembangan pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri,

pariwisata, dan pelayanan publik lainnya. Peningkatan konektivitas wilayah mencakup pembangunan infrastruktur baik jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan.

6. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dilakukan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, kompetensi sumber daya manusia, dan penyerapan tenaga kerja, serta menurunkan ketimpangan ekonomi – sosial.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

4.3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJPD 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tujuan 1 (Pertama) “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya”

Tujuan Pertama adalah “Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang didukung dengan **sasarannya** meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan, meningkatnya toleransi masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak dengan indikator sasaran yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Olahraga, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Toleransi, Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Gender.

2. Tujuan 2 (Kedua) “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan”.

Tujuan Kedua adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang didukung dengan **sasarannya** meningkatnya perekonomian daerah dan meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dengan indikator sasaran yaitu Pendapatan perkapita, Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Infrastruktur, Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan Indeks Rasa Aman.

3. Tujuan 3 (Ketiga) “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Bebas KKN”

Tujuan ketiga adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang didukung dengan **sasarannya** meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi, meningkatnya pengelolaan SDM aparatur, dan meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani dengan indikator sasaran yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Merit System, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Masing-masing tujuan dan sasaran telah diukur dengan indikator tujuan dan sasaran yang secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Bidang
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Angka	72,76	
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,95	Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	Pendidikan
		Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	5,00	Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	3,81	Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	4,66	Perpustakaan dan Kebudayaan
		Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	4,51	Bankesbangpol
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,72	Kesehatan
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,77	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi			%	5,28	
		Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	Ribu Rp	33,50	Koperasi dan UKM, Pangan Kelautan dan Perikanan
			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	19,00	Pertanian, Pangan, Kelautan Perikanan Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Penanaman modal Koperasi Usaha Kecil Menengah
			Angka Kemiskinan	%	9,00-8,70 %	Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,30-2,17 %	Tenaga kerja
		Meningkatnya penyediaan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	75,20	PUPR , Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Bidang
		sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	64,05	Lingkungan Hidup
			Indeks Rasa Aman	Angka	4,69	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi			Predikat	B/>60-70	
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	66	Fungsi Penunjang Perencanaan , Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan , Penunjang Keuanagna , Bidang Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	Indeks Merit System	Angka	0,55	Fungsi Penunjang – Kepegawaian
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Level	B/>60-70	Fungsi Lainnya -Sekretaris Daerah, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Fungsi Lainnya Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B/76,61 – 88,30	Fungsi Lainnya -Sekretaris Daerah

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 memperhatikan target indikator makro dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun penyelarasan target kinerja makro daerah pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Keselarasan Target Indikator Makro RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target	
			RPD 2024-2026 ^{*)}	RPJMN 2020-2024 ^{**)}
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5,28	5,3-5,6
2	Angka kemiskinan	%	9,00-8,70 %	7,0-8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,30-2,17 %	4,5-5,0
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,76	75,54

Sumber : ^{*)} RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

^{**)} Permen PPN Ka Bappenas Nomor 2 Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa target indikator pertumbuhan ekonomi, Angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 selaras dengan target pada RPJMN Tahun 2020-2024.

4.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, maka dirumuskan penyesuaian strategi dan arah kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- a. Strategi untuk mewujudkan tujuan **terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya** adalah:
- 1) Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan;
 - 2) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
 - 3) Peningkatan literasi masyarakat;
 - 4) Peningkatan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - 5) Penurunan konflik di masyarakat;
 - 6) Peningkatkan kesehatan keluarga;
 - 7) Peningkatkan kebijakan *reponsif gender*.
- Sedangkan arah kebijakannya adalah:
- 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai;

- 2) Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 3) Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum;
 - 4) Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan;
 - 5) Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olahraga;
 - 6) Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan;
 - 7) Pembudayaan gemar membaca di masyarakat;
 - 8) Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya;
 - 9) Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebhinekaan kepada masyarakat;
 - 10) Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik;
 - 11) Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas;
 - 12) Peningkatan pelayanan kesehatan primer;
 - 13) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
 - 14) Peningkatan sistem ketahanan kesehatan rujukan;
 - 15) Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan;
 - 16) Peningkatan sumber daya kesehatan;
 - 17) Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak.
- b. Strategi untuk mewujudkan tujuan **meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan** adalah:
- 1) Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan;
 - 2) Meningkatkan nilai usaha perdagangan;
 - 3) Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata;
 - 4) Meningkatkan nilai usaha industri;
 - 5) Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan;
 - 6) Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM;
 - 7) Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - 8) Meningkatkan produksi perikanan;
 - 9) Meningkatkan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - 10) Pertumbuhan penduduk yang terkendali;
- pertumbuhan penduduk yang terkendali diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap, karena akan mengurangi indeks ketergantungan penduduk usia non produktif

terhadap penduduk usia produktif, sehingga akan menaikkan penghasilan dan investasi.

- 11) Pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 12) Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat;
- 13) Meningkatnya kompetensi angkatan kerja;
- 14) Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah;
- 15) Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya;
- 16) Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai kewenangan, yaitu kawasan budidaya untuk industri, produksi, pertanian, dan pariwisata, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- 17) Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat, yang merupakan upaya untuk mewujudkan indeks rasa aman yang tinggi, sehingga sangat mendukung terwujudnya iklim investasi.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

- 1) Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan;
- 2) Peningkatan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan;
- 3) Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan;
- 4) Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan;
- 5) Peningkatan akses pemasaran dan penggunaan produk lokal;
- 6) Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- 7) Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 8) Peningkatan kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan industri;
- 9) Peningkatkan pelayanan dan promosi investasi;
- 10) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- 11) Peningkatan kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- 12) Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 13) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- 14) Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya;
- 15) Peningkatan sertifikasi keamanan pangan;

- 16) Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan;
 - 17) Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - 18) Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan benih ikan;
 - 19) Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
 - 20) Peningkatkan pelayanan dan KIE Keluarga Berencana serta pembangunan keluarga;
 - 21) Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
 - 22) Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes;
 - 23) Peningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - 24) Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah;
 - 25) Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah;
 - 26) Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya;
 - 27) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup;
 - 28) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 29) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup;
 - 30) Peningkatan pengelolaan sampah. Sampah yang dikelola oleh kelompok masyarakat, khususnya bank sampah memberikan dampak terhadap peningkatan penghasilan rumah tangga; dan
 - 31) Peningkatan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
- c. Strategi untuk **mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN** adalah:
- 1) Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah;
 - 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - 3) Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat;
 - 4) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah;
 - 5) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
 - 6) Meningkatkan keterbukaan informasi publik;
 - 7) Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tertinggi;

- 8) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel;
- 9) Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- 10) Meningkatnya pengelolaan kearsipan;
- 11) Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 12) Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual;
- 13) Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum;
- 14) Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi;
- 15) Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi;
- 16) Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 17) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 18) Meningkatnya layanan perhubungan;
- 19) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;
- 2) Peningkatan peran serta *multihelix* dalam perencanaan pembangunan;
- 3) Peningkatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat;
- 4) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- 5) Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi;
- 6) Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit;
- 7) Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah;
- 8) Optimalisasi integrasi layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- 9) Peningkatan kapasitas pengelola layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- 10) Peningkatan tata kelola arsip daerah;
- 11) Pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas dan fokus

pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 yaitu **Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.**

4.4. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.4.1. Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPD tahun 2024-2026 yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.” Adapun keselarasan antara tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2025 tercantum pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tema RKP Nasional Tahun 2025	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024
RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026,
RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Berdasarkan tabel tersebut, tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. **Tema RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025** bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPD 2024-2026 yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.”**

4.4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

a. Prioritas Nasional dalam RKP 2025

Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan 8 Prioritas Nasional (8 PN) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN 1);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2);
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 3);
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4);
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5);
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6);
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN 7);
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN 8).

b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana berikut:

- 1) Prioritas Daerah 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan**

didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas,
dengan fokus pada:

- a) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah melalui:
 - i. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - ii. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - iii. Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste);
 - iv. Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - v. Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - vi. Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - vii. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
 - viii. Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (*circular economy*) secara bertahap sebagai tools untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

- b) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur melalui:
- i. Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - ii. Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - iii. Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, Peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
 - iv. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- d) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi

- e) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.

2) Prioritas Daerah 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
- b) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
- d) Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
- e) Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
- f) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
- g) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
- h) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3) Prioritas Daerah 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:

- a) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara,

peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b) Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c) Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- d) Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer

risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- a) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi.
- b) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2025 diarahkan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif dan Inovatif, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan prioritas pembangunan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan esktrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi;
- 2) Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
- 3) Reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting ketika usulan perencanaan dari Musrenbang

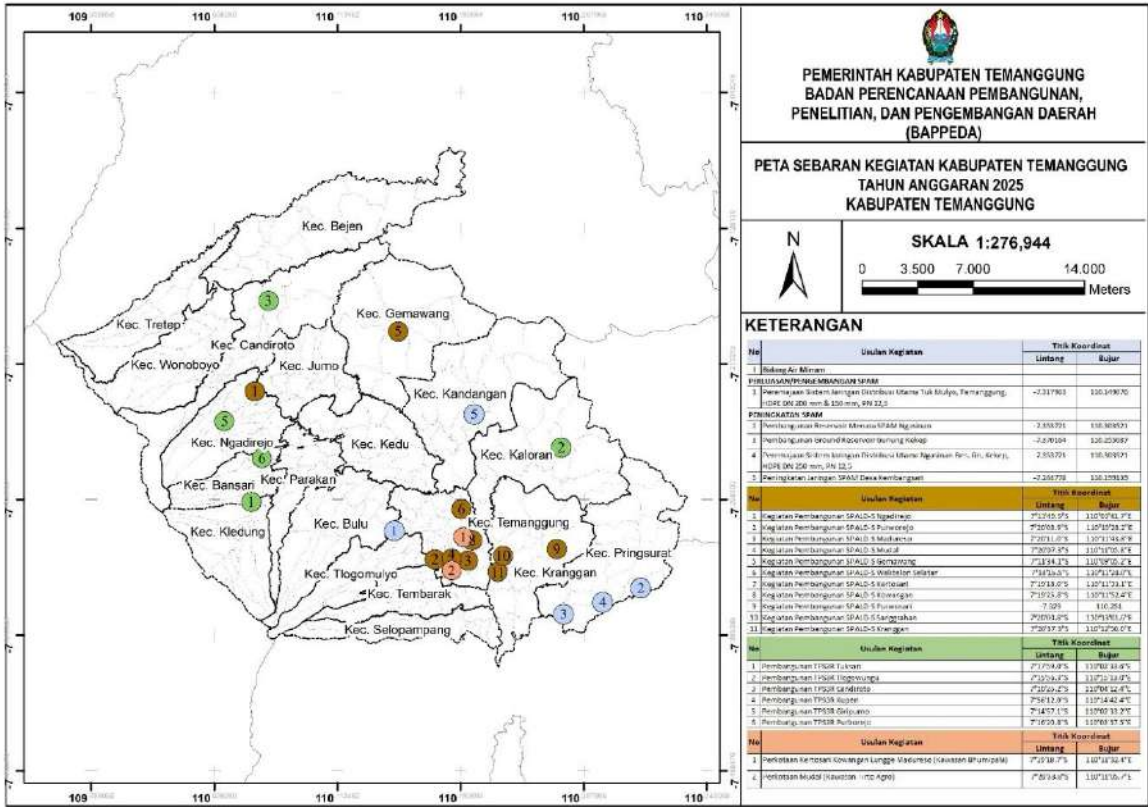
maupun Forum Khusus dengan penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD (aspirasi DPRD) dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 juga disusun dengan menerapkan konsep *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial* (THIS). Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah maupun *stakeholder* non Perangkat Daerah termasuk dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Gambar 4.2
Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Gambar 4.3
Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Penentuan Prioritas Pembangunan

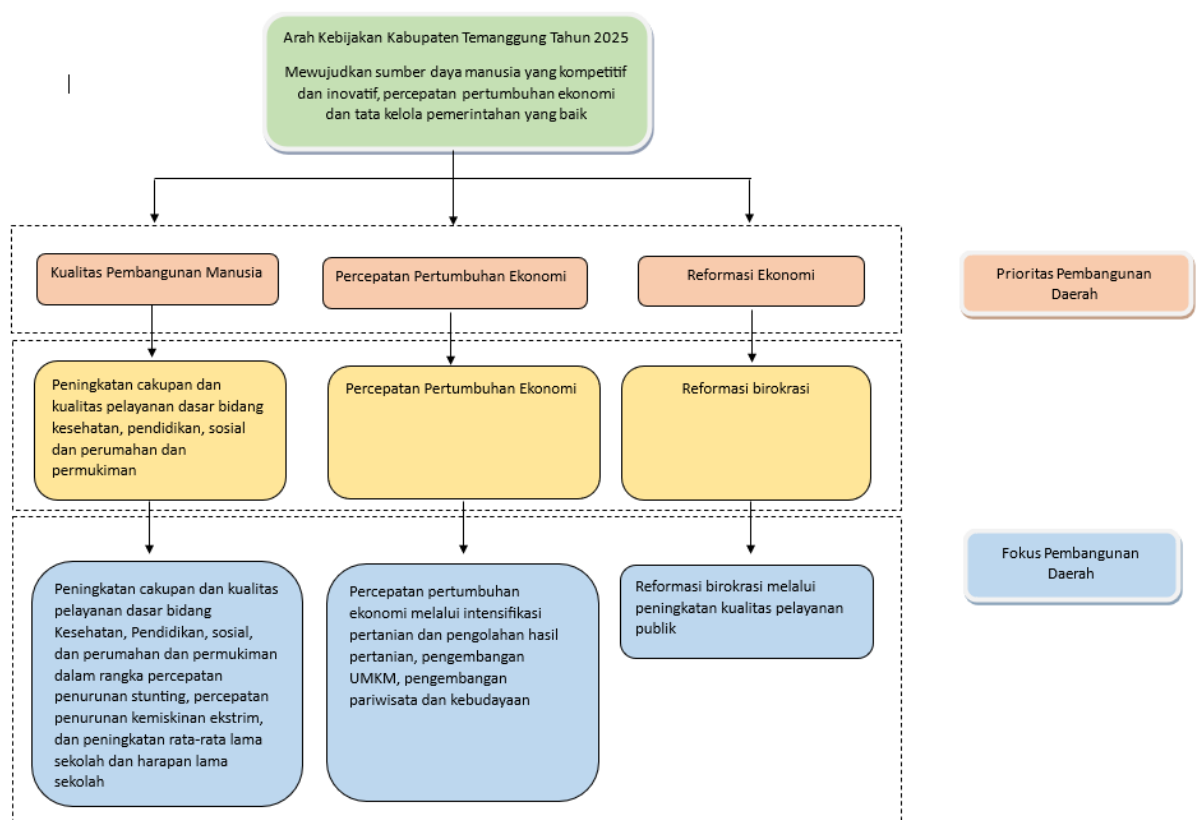
Oleh karena itu, pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prioritas pembangunan sebagaimana berikut:

Tabel 4.4
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi
2	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: RPD Kabupaten Temanggung, 2024

Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPD Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan melalui gambar berikut.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 4.4
Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan RPD

Prioritas pembangunan Kabupaten dalam RKPD Tahun 2025 terkait erat dan selaras dengan arah kebijakan tahun 2025 pada RPD 2024-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 sejumlah 3 prioritas seluruhnya terkait dan mendukung pada penjabaran masing-masing dari arah kebijakan meningkatkan kualitas pembangunan manusia, percepatan ekonomi, dan pemantapan reformasi birokrasi.

Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 dengan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 dapat dilihat pada gambar 4.4 bahwa seluruh prioritas pembangunan daerah mendukung arah kebijakan RPD yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dimana arah kebijakan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas pembangunan daerah.

Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPD, prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah, permasalahan pembangunan, isu strategis Kabupaten Temanggung, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RPJMN

Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung 2025 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RPD dengan prioritas nasional RKP Tahun 2025. Keselarasan antara sasaran pembangunan daerah RPD dengan prioritas nasional RKP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah RPD	Indikator Sasaran
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Indeks Rasa Aman
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
			Angka Kemiskinan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
			Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya perekonomian daerah	Indeks Rasa Aman
			Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
			Angka Kemiskinan
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
			Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi	Indeks Rasa Aman
			Pendapatan Per Kapita
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
			Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
			IPKD
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
		Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indeks Pembangunan Olahraga

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah RPD	Indikator Sasaran
	serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		Presentase Kelompok Kesenian dan Budaya yang Produktif
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan KriteriaBank Dunia
			Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan KriteriaBank Dunia
			Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Indeks Rasa Aman
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi
		Meningkatknya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur
8	memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi
		Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan KriteriaBank Dunia
			Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
			Indeks Pembangunan Olahraga
			Presentase Kelompok Kesenian dan Budaya yang Produktif
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Rasa Aman			
Jumlah PN			8
Jumlah Indikator Sasaran			9
Keterkaitan			100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan prioritas nasional RKP Tahun 2025 sebesar 100%.

2. Keselarasan prioritas pembangunan dengan prioritas nasional RKP

Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung 2025 perlu memperhatikan keselarasan antara prioritas pembangunan dengan prioritas nasional RKP Tahun 2025. Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah RPD dengan prioritas nasional RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Persandingan antara Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Prioritas Nasional RKP	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Pemantapan reformasi birokrasi
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman
		2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman
		2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan reformasi birokrasi
8	memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman
		2. Pemantapan reformasi birokrasi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sejumlah 3 prioritas dengan 8 prioritas nasional RKP Tahun 2025, dimana keseluruhan prioritas pembangunan daerah tersebut selaras dengan 8 prioritas nasional RKP. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keselarasan prioritas pembangunan

daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung dengan prioritas nasional RPJMN sebesar 100%.

3. Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana penjelasan di atas, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025 secara nasional dituangkan ke dalam 8 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan di sasaran pada masing-masing PN. Keterkaitan sasaran indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 dengan sasaran PN RKP 2025 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7

Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2025

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembanguna Gender (IPG)
PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			
1	Asia Power Index (Military Capability)	-	-
2	Asia Power Index (Diplomatic Influence)a)	-	-
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Rasa Aman
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
5	Indeks Ketahanan Energi	-	-
6	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
9	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	-	-
10	Indeks Ekonomi Hijau	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	-	-
12	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
13	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
15	Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	-	-
PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi			
1	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
2	Rasio Kewirausahaan (%)		
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
4	Rasio PDB Pariwisata (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
5	Devisa Pariwisata (miliar USD)	-	-
6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
7	Aset Perbankan/PDB (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
8	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
9	Aset Asuransi/PDB (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
10	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	-	-
11	Total Kredit/PDB (%)	-	-
12	Inklusi Keuangan (%)	-	-
PN 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas			
1	Rata-rata nilai PISA		
2	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Meningkatnya Kualitas pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
3	Harapan lama sekolah (tahun)	Meningkatnya Kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Meningkatnya Kualitas pendidikan Masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)
5	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	-	-
6	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	-	-
7	Peringkat Indeks Inovasi Global	-	-
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
10	Usia Harapan Hidup (tahun)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
11	Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
12	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
14	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
16	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	-	-
17	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
4	Biaya Logistik (% PDB)		
PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan			
1	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Angka Kemiskinan
2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Angka Kemiskinan
3	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	-	-
5	Persentase desa mandiri (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Angka Kemiskinan
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan			
1	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	-	-
2	Indeks Integritas Nasional	-	-
3	Indeks Materi Hukum	-	-
4	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6	Indeks Persepsi Korupsi	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
7	Indeks Pembangunan Hukum	-	-

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
8	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
9	Tingkat Inflasi (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
PN 8 : memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur			
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Persentase kelompok kesenian dan budaya yang produktif
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi
3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	-	-

Sumber: *) Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

**) RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026

BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Sebagaimana telah tercantum pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 bahwa sasaran pembangunan daerah berjumlah 9 sasaran. Sedangkan, sasaran tiap prioritas nasional tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang berjumlah 67 sasaran pembangunan. Melihat kepada penjelasan keterkaitan sasaran pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan dari 9 sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung terkait dan sesuai dengan 45 sasaran prioritas nasional tahun 2025. Terdapat 22 sasaran prioritas nasional yang tidak dapat didukung oleh sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan secara kewilayahan Kabupaten Temanggung berada di wilayah Indonesia bagian barat. Secara persentase tingkat keselarasan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP Tahun 2025 sebesar 100% dikarenakan keseluruhan sasaran RKPD terkait dengan sasaran PN RKP Tahun 2025 meskipun terdapat 1 (satu) sasaran PN yang tidak terkait dikarenakan kewilayahan.

Keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas Kabupaten Temanggung 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;	Percepatan Perumbuhan ekonomi
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;	Percepatan Perumbuhan ekonomi
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;	Percepatan Perumbuhan ekonomi
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;	
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik
8	memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan,

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas Kabupaten Temanggung 2025
	antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang berjumlah 3 prioritas selaras dengan 8 prioritas nasional dan 4 prioritas Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan prioritas nasional RKP tahun 2025 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

4. Konsistensi dengan Permasalahan/Isu Strategis

Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Temanggung memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis yang ada.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah mulai dilibatkan sejak awal, yaitu adanya penggalian masalah dan isu strategis dalam Murenbang RKPD di kelurahan, kecamatan dan kabupaten dengan menghadirkan masyarakat secara langsung. Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung juga memanfaatkan media informasi kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desiminasi inofrmasi dan aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui media tersebut. Bentuk media yang digunakan antara lain melalui media sosial, yang menampilkan link materi , link saran masukan dan lain sebagainya melauai aplikasi Lintang Asmara (<https://linktr.ee/lintangasmaraabappedatmg>) termasuk aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui link tersebut.

Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis,
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas pembangunan manusia	- Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita - Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - Masih adanya fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang belum terakreditasi utama - Masih ditemukan rumah tidak sehat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif	1. Meningkatkan kesehatan keluarga	➤ Transformasi pelayanan kesehatan primer ➤ Transformasi pelayanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem ketahanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem pembiayaan kesehatan ➤ Transformasi sumber daya kesehatan
		- Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 13 tahun - Masih rendahnya angka harapan lama sekolah - Masih adanya anak putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat - Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan pada penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah - Masih rendahnya angka lulusan pada pendidikan kesetaraan - Masih adanya Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) - Masih rendahnya APK PAUD 4-6 tahun - Masih rendahnya satuan PNF yang terakreditasi		2. Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan	➤ Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai ➤ Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ➤ Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum ➤ Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
		- Belum terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak - Masih adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak		3. Meningkatkan kebijakan responsif gender	➤ Peningkatan kapasitas PUD dalam perlindungan Perempuan dan anak

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemahaman terhadap indeks pembangunan keluarga masih lemah			
		- Belum optimalnya keberagaman tingkat konsumsi pangan - Belum optimalnya desa pelaksana program ketahanan pangan - Berkurangnya jumlah lumbung pangan yang aktif - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ika		4. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan	➤ Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ➤ Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan ➤ Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya ➤ Peningkatan sertifikasi keamanan pangan
		- Penyediaan regulasi dan pendokumentasian sejarah lokal dan cagar budaya perlu ditingkatkan - Peningkatan layanan kunjungan perpustakaan masih perlu ditingkatkan baik secara offline maupun online - Belum optimalnya pemanfaatan bahan-bahan literasi berbasis buku fisik maupun yang berbasis teknologi informasi - Penyediaan koleksi nasional masih perlu ditambah		5. Peningkatan Pembangunan literasi Masyarakat 6. Peningkatan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	➤ Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan ➤ Pembudayaan gemar membaca di masyarakat
2	Pembangunan pemuda yang berdaya saing tinggi	Masih adanya masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka	1. Meningkatkan pemberdayaan PPKS	➤ Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama ➤ Optimalisasi fungsi UPTD rumah singgah dalam pelayanan PPKS

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung	percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif	2. Meningkatkan kesehatan keluarga	➤ Transformasi pelayanan kesehatan primer ➤ Transformasi pelayanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem ketahanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem pembiayaan kesehatan ➤ Transformasi sumber daya kesehatan
		- Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 13 tahun - Masih rendahnya angka harapan lama sekolah - Masih adanya anak putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat - Masih terdapat SD dan SMP dengan ruang kelas dalam kondisi kurang baik - Masih terdapat TK, SD dan SMP yang belum terakreditasi minimal - Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan pada penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah - Masih rendahnya angka lulusan pada pendidikan kesetaraan - Masih adanya Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) - Masih rendahnya APK PAUD 4-6 tahun - Masih rendahnya satuan PNF yang terakreditasi - Sebaran SMP sederajat belum merata di semua wilayah		3. Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan	➤ Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai ➤ Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ➤ Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum ➤ Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		Peminatan dalam mengikuti program Sekolah Adiwiyata masih rendah			
		- Belum optimalnya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja - Belum maksimalnya peserta pelatihan menjadi wirausaha baru/wirausaha berkembang - Belum adanya pelatihan yang terintegrasi dengan magang - Masih rendahnya tenaga kerja formal		4. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	➤ Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan pelatihan
		Belum optimalnya pembangunan gender		5. Meningkatkan kebijakan responsif gender	➤ Peningkatan kapasitas PUG dalam perlindungan perempuan dan anak
		- Ketersediaan sarpras olahraga yang sesuai standar dan pelatih yang berkompeten masih terbatas dan belum memadai - Belum optimalnya prestasi atlet daerah di tingkat regional, nasional maupun internasional		6. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	➤ Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olah raga
		Kewirausahaan pemuda masih rendah		7. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	➤ Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi ➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM
		Penyediaan regulasi dan pendokumentasian sejarah lokal dan cagar budaya perlu ditingkatkan		8. Peningkatan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal 9. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	➤ Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan ➤ Pembudayaan gemar membaca di masyarakat

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Peningkatan layanan kunjungan perpustakaan masih perlu ditingkatkan baik secara offline maupun online - Belum optimalnya pemanfaatan bahan-bahan literasi berbasis buku fisik maupun yang berbasis teknologi informasi - Penyediaan koleksi nasional masih perlu ditambah			➤ Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
3	Penanganan stunting	- Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung - Masih adanya kasus gizi buruk - Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita - Masih tingginya Angka Kematian Neonatal per 1,000 kelahiran hidup - Masih adanya balita gizi buruk - Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap jamban sehat - Masih adanya anak usia sekolah dasar yang belum mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar - Masih adanya fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang belum terakreditasi utama - Masih ditemukan rumah tidak sehat - Masih adanya stunting - Masih tingginya angka kelahiran - Masih adanya pasangan usia subur yang tidak ingin ber-KB - Belum optimalnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif	1. Meningkatkan kesehatan keluarga	➤ Transformasi pelayanan kesehatan primer ➤ Transformasi pelayanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem ketahanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem pembiayaan kesehatan ➤ Transformasi sumber daya kesehatan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Perlunya peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung • Masih tingginya lahan potensial kritis • Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup • Masih adanya lahan potensial kritis yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung • Adanya fenomena perubahan iklim yang berpotensi memberikan dampak merugikan		2. Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	➤ Rehabilitasi infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah ➤ Pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan		3. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan	➤ Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ➤ Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan ➤ Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya ➤ Peningkatan sertifikasi keamanan pangan
4	Percepatan Pemulihan Ekonomi	• Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi • Masih adanya kemiskinan di Kabupaten Temanggung	Percepatan pertumbuhan ekonomi	1. Pemberdayaan ekonomi keluarga	➤ Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
		• Masih adanya infrastruktur dalam kondisi kurang baik seperti jembatan dan jaringan irigasi • Risiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun		2. Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	➤ Rehabilitasi infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah ➤ Pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Masih terdapat pengangguran - Belum optimalnya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja - Belum maksimalnya peserta pelatihan menjadi wirausaha baru/wirausaha berkembang - Masih terdapat perusahaan yang belum membayar upah sesuai UMK		3. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	➤ Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan
		Belum maksimalnya penyelesaian dengan perjanjian bersama dalam hal mengatasi perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan		4. Meningkatkan nilai usaha industri	➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
		- Minat koperasi dalam mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pemasaran usaha masih rendah - Masih terdapat usaha mikro aktif yang belum diberikan fasilitas pengembangan usaha		5. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	➤ Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi ➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM
		- Promosi dan publikasi informasi tata cara berizin melalui OSS masih perlu diperluas di seluruh wilayah - Kegiatan promosi investasi kurang intensif - Promosi investasi dan kemudahan berusaha bagi investor perlu terus ditingkatkan		6. Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan	➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
		- Produksi ikan mas menurun karena perubahan permintaan pasar dari ikan mas ke ikan nila sehingga kegiatan budidaya ikan mas bergeser ke ikan nila - Produksi ikan lele menurun karena harga pakan naik sedangkan harga jual rendah - Pembinaan nelayan perairan umum masih belum maksimal		7. Meningkatkan produksi perikanan	➤ Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan ➤ Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan ➤ Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan benih ikanmemelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		karena hanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pennebaran benih ikan di perairan umum Validitas data nelayan perairan umum belum jelas			
		Jumlah BUMDesa yang aktif belum maksimal		8. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat	➤ Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes
		- Banyak objek wisata tidak berkembang karena terbatasnya SDM pengelola dan kurangnya strategi dalam meningkatkan daya tarik - Para wisatawan yang datang lebih banyak mengunjungi tempat hiburan dan kuliner, sedangkan untuk kunjungan ke objek wisata yang bermuatan sejarah dan cagar budaya masih rendah - Rata-rata lama tinggal wisatawan di Temanggung hanya 1 hari karena mereka tidak memiliki urusan lain selain hanya sekadar singgah untuk melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya - Beberapa desa wisata macet di tengah jalan karena belum mampu konsisten dalam mengelola potensi desa - Beberapa desa wisata perlu ditingkatkan kesadarannya dalam menjaga kebersihan lingkungan agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung - Perlu adanya pendataan ulang untuk pelaku ekraf di Temanggung		9. Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata	➤ Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata ➤ Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi yang tiga kali lipat lebih mahal sehingga mempengaruhi biaya produksi yang dikeluarkan petani - Perubahan cuaca/iklim yang tidak menentu berpengaruh pada meningkatnya serangan hama pada tanaman dan penyakit pada ternak sehingga produksi menurun. Hal ini juga berpengaruh pada jadwal tanam		10. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan	- Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan - Peningkatan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan - Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan
		- Kenaikan harga pakan ternak juga mempengaruhi jumlah produksi - Pembinaan kepada industri penghasil cukai perlu ditindaklanjuti, tidak sekadar sosialisasi		11. Meningkatkan nilai usaha industri	Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
5	Penanganan kemiskinan	- Masih adanya masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung - Masih adanya kemiskinan di Kabupaten Temanggung - Belum optimalnya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung - Belum seluruh desa berpredikat mandiri - Masih terdapat desa yang belum berklasifikasi swasembada dan/atau berstatus cepat berkembang	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama	- Meningkatnya pemberdayaan PPKS - Pemberdayaan ekonomi keluarga - Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat - Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	- Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama - Optimalisasi fungsi UPTD rumah singgah dalam pelayanan PPKS - Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) - Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes - Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi - Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Pemberdayaan PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial masih perlu dioptimalkan - Fasilitasi bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar masih perlu ditingkatkan - Keberadaan Rumah Singgah yang belum beroperasi secara optimal karena keterbatasan anggaran - Penyediaan data penduduk miskin yang akurat masih perlu ditingkatkan - Monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran belum optimal - Layanan perlindungan sosial bagi korban bencana belum optimal	sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	5. Meningkatnya pemberdayaan PPKS	- Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama - Optimalisasi fungsi UPTD rumah singgah dalam pelayanan PPKS
		- Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Masih diperlukannya upaya peningkatan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman		6. Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	- Pembangunan, peningkatan, dan Rehabilitasi infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah - Pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah
		Belum optimalnya fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat KUBE		7. Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
		- Masih terdapat pengangguran - Belum optimalnya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja		8. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan
6	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif	- Belum optimalnya penguatan reformasi birokrasi dalam menghadapi globalisasi, revolusi industri 4.0., revolusi society 5.0 dan disruption - Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal	Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan keterbukaan informasi publik 2. Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan secara Elektronik 3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	- Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi - Optimalisasi integrasi layanan Sistem Pemerintahan secara Elektronik - Peningkatan kapasitas pengelola layanan Sistem Pemerintahan secara Elektronik

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Belum optimalnya keterbukaan informasi publik • Belum maksimalnya keberadaan PPID badan publik yang aktif • Penyediaan akses internet publik belum optimal • Belum optimalnya penyediaan data makro daerah • Ketersediaan SDM yang dapat melakukan pentest (pengujian aplikasi) masih perlu ditingkatkan • Pengelolaan risiko dan keamanan sumber daya teknologi informasi di Kabupaten Temanggung perlu terus ditingkatkan • Implementasi Reformasi Birokrasi yang belum optimal • Akuntabilitas kinerja pemerintah masih perlu dioptimalkan			➤ Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah
		• Belum maksimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil • Masih terdapat warga yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (KTP El), Akte Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA) • Tidak semua masyarakat menguasai teknologi dan memiliki smartphone untuk mengakses pelayanan yang bersifat virtual • Masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dokumen kependudukan yang saat ini mulai terintegrasi dan		4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 5. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	➤ Peningkatan kapasitas SDM dan Sarpras pelayanan publik ➤ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras administrasi kependudukan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		berguna untuk urusan lintas instansi			
		- Masih perlunya pembinaan dan pembenahan dalam pengelolaan arsip di setiap Perangkat Daerah - Masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan - Belum optimalnya digitalisasi arsip		6. Meningkatnya pengelolaan kearsipan	➤ Peningkatan tata kelola arsip daerah
		Pendokumentasian produk hukum secara digital belum berjalan optimal serta adanya keterlambatan dalam penyerahan produk hukum dari setiap Perangkat Daerah		7. Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	➤ Peningkatan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
		- Kesiapan aplikasi e-purchasing masih perlu ditingkatkan - Keterlambatan PD dalam mengirimkan laporan keuangan bulanan - Cenderung lambat dalam merespons ketika terdapat kekurangan dokumen pengajuan SP2D, bahkan bersifat pasif dan kurang koordinasi dengan BPKPAD - Terbatasnya SDM di beberapa PD dalam menyelesaikan laporan keuangan di awal waktu yang ditentukan - Keterlambatan penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung - Belum banyaknya pendapatan yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah - Belum semua Wajib Pajak mempunyai kesadaran sendiri untuk		8. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	➤ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan barang milik daerah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		mendaftarkan objeknya, sedangkan petugas dan sumber daya Bidang Pendapatan sangat terbatas • PBB-P2 masih bergantung pada peran aktif wajib pajak dan perangkat desa, sedangkan BPHTB masih bergantung pada peran PPAT/PPATS • Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di setiap Perangkat Daerah perlu dioptimalkan • Penggunaan e-procurement di setiap Perangkat Daerah belum berjalan optimal • Adanya perbedaan antara izin reklame yang diterbitkan oleh DPM dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang ter kirim secara cepat dan otomatis (terintegrasi) tentang pelanggaran izin dan pajak reklame			
		• Keterlambatan pengajuan dan pengesahan draft raperda berpengaruh pada pencapaian target kegiatan di tingkat kabupaten		9. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	➤ Pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		• Masih adanya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Temanggung • Kematangan inovasi yang belum maksimal serta replikasi yang masih rendah • Hasil evaluasi pembangunan belum dimanfaatkan secara sepenuhnya sebagai bahan referensi penyusunan perencanaan		10. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	➤ Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan ➤ Peningkatan peran serta pentahelix dalam perencanaan pembangunan ➤ Peningkatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Belum adanya bentuk unit kerja kelitbangan sesuai aturan Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional • Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti di bidang penelitian dan pengembangan • Belum optimalnya penjangkaran dan pengembangan inovasi baik dari masyarakat atau pemerintah • Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan			
		• Anggaran yang tersedia berbeda-beda setiap tahunnya dan belum bisa memenuhi atau mengimbangi jumlah pejabat yang baru • Adanya keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial (BPSDMD Provinsi Jawa Tengah) • Manajemen kepegawaian belum optimal sehingga masih ada PD yang kekurangan pegawai • Keterlambatan PD dalam menyampaikan usulan pegawai seperti pensiun, dll., mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyelesaian administrasi • Data PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional dari OPD lain belum/tidak dimasukkan • Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti diklat secara mandiri		11. Terwujudnya SDM apratur yang berkinerja tertinggi	➤ Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit
		• Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP		12. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi SPIP kepada Perangkat Daerah • APIP belum dapat mengevaluasi pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia • Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/berkembang			
		• Masih adanya SPPT yang bermasalah, keterlambatan penyampaian SPPT karena Wajib Pajak berada di luar kota atau Wajib Pajak tidak ditemukan, dan keterlambatan pembayaran karena menunggu panen raya		13. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	➤ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras pelayanan publik
		• Kegiatan pemberian pemahaman ideologi, politik, wawasan kebangsaan, dan pencegahan narkoba ke sekolah-sekolah belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Justru sekolah-sekolah di kota malah mendapatkan pembinaan lebih dari satu kali		14. Penurunan konflik di masyarakat	➤ Peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebhinekaan kepada masyarakat ➤ Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik ➤ Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas
7	Peningkatan manajemen kebencanaan	• Masih adanya sampah yang belum tertangani	1. Peningkatan cakupan dan kualitas	1. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya	➤ Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Masih tingginya lahan potensial kritis - Risiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun - Pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam manajemen bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan) masih perlu ditingkatkan - Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) masih perlu diingkatkan - Masih diperlukan penyadaran dan peningkatan kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat - Masih diperlukan peningkatan kemampuan dan kapasitas Tim Reaksi Cepat BPBD - Masih kurangnya jumlah Early Warning System yang dipasang di daerah rawan bencana - Dokumen perencanaan kebencanaan belum tersedia - Layanan perlindungan sosial bagi korban bencana belum optimal - Masih terdapat ketidaksesuaian peruntukan tanah - Belum optimalnya indeks kualitas lingkungan hidup - Belum memiliki Tim Uji Kelayakan pada persetujuan UKL, UPL dan AMDAL	pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 3. Reformasi birokrasi		➤ Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup ➤ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ➤ Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup ➤ Peningkatan pengelolaan sampah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan belum maksimal • Masih adanya lahan kritis • Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup • Penanganan persampahan yang belum optimal • Pelaksanaan pelayanan persampahan yang belum optimal			
		• Belum optimalnya sinergi pemangku kepentingan di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan • Persebaran jumlah Linmas yang merata masih perlu ditingkatkan		2. Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	➤ Peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

5. Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD

Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan.

Dalam rangka memberikan masukan terhadap Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, DPRD Kabupaten Temanggung memberikan sumbangan pokok-pokok pikiran yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung.

DPRD memberikan penekanan khususnya pada isu strategis percepatan penanganan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai target Presiden 0% pada tahun 2025 serta pemulihan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dilakukan secara sinergi antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan masyarakat, maupun sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), di samping itu, juga dilakukan dukungan terhadap pengembangan potensi sumber daya unggulan lokal (hortikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak dan lain-lain) dan peningkatan jejaring pemasaran yang selama ini masih menjadi kendala dari pengembangan potensi unggulan lokal tersebut. Prioritas pembangunan daerah memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Kabupaten Temanggung. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung yang memuat janji tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan
Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN TAHUNAN DPRD
1.	Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif	1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi 2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 3. Percepatan Penanganan Stunting 4. Pengembangan Potensi Sumber Daya Unggulan Lokal (Holtikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak Dan Lain-Lain) 5. Peningkatan Jejaring Pemasaran
2.	Pembangunan pemuda yang berdaya saing tinggi	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif	
3.	Penanganan stunting	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif	
4.	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Percepatan pertumbuhan ekonomi	
5.	Penanganan kemiskinan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	
6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif	Reformasi birokrasi	
7.	Peningkatan manajemen kebencanaan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 3. Reformasi birokrasi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi **program prioritas** sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. Program Peningkatan Kerjasama Desa
9. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Perlindungan Perempuan
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12. Program Pengelolaan Persampahan
13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Program Informasi dan Komunikasi Publik
15. Program Aplikasi Informatika
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
19. Program Pengembangan Kebudayaan
20. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
21. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
22. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
23. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
24. Program Kepegawaian Daerah
25. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Program Penyelenggaraan Pengawasan
27. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
28. Program Peningkatan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
29. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan untuk mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan

sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah mempunyai indikator sasaran dan penanggungjawab (OPD) untuk masing-masing program prioritas, dimana keterkaitannya dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4.11

Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,95	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif	Program Pengelolaan Pendidikan	- Persentase APM PAUD (5-6 tahun) - Persentase APK PAUD (0-6 tahun) - Persentase APK PAUD (4-6 tahun) - Persentase APK PAUD (5-6 tahun) - Persentase Pendidik PAUD - Berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi - Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik - Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak - Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD - Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik - Persentase APM SD Sederajat - Persentase APK SD Sederajat - Angka Putus Sekolah SD Sederajat - Rasio Siswa/Guru SD - Rasio Siswa/Rombel SD - persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 - persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak - persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat - Rasio Jumlah Pengawas SD - Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik - Persentase APM SMP Sederajat - Persentase APK SMP Sederajat	151.865.540.775	Dindikpora	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4)
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,65						

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					• Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat • Angka Putus Sekolah SMP Sederajat • Rasio Siswa/Guru SMP • Rasio Siswa/Rombel SMP • Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 • Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik • Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak • Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat • Rasio Jumlah Pengawas SMP • Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik • Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu • Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 • Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat • Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha • Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)			
Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	4,23	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	260.000.000	Dindikpora	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
	Indeks Pembangunan Olahraga	3,81						

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
								gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,66		Program Pengembangan Kebudayaan	- Persentase kelompok Budaya yang Teregister - Persentase kelompok kesenian yang produktif - Persentase pelestarian Sejarah Lokal - Persentase Pelestarian Cagar Budaya	7.580.000.000	Dinbudpar	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur (PN 8)
Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	4,51	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	700.000.000	Kesbangpol	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN 1) Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur (PN 8)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,72	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kematian Bayi (AKB) - Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar - Prevalensi anemia pada ibu hamil - Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	226.145.645.214	Dinkes	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN 1) Memperkuat pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					• Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan • Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan • persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani • Angka Kematian Neonatal • Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar • Angka Kematian Balita • Prevalensi ballita gizi buruk • Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan) • Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif • Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu • Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar • Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar • Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar <i>Incident Rate</i> DBD (Demam Berdarah Dengue)			sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					- Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan - Persentase rumah sehat - Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan			
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Perlindungan Perempuan	- Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	42.842.200	DPPPAPPKB	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN 1) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4)
				Program Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	45.000.000		
Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	33,50	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Produktivitas padi - Produktivitas jagung - Produktivitas bawang putih - Produktivitas bawang merah - Produktivitas cabai rawit - Produktivitas cabai besar - Produktivitas tembakau - Produktivitas kopi robusta - Produktivitas kopi arabika - Produktivitas ternak sapi - Produktivitas ternak domba - Produktivitas ternak kambing - Produktivitas ternak ayam ras pedaging - Produktivitas ternak ayam petelur - Persentase kelahiran pedet	18.460.436.207	DKPPP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
								yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 3)
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	- Persentase IKM Industri berbasis pada komoditas unggulan - Persentase pembinaan IKM Tembakau Lembutan	343.670.713	Disnaker	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5)
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	- Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan - Lama tinggal wisatawan - Persentase peningkatan desa wisata - Persentase peningkatan pelaku Ekraf	190.000.000	Dinbudpar	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 3)
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan - Persentase perusahaan yang bermitra	7.000.000	DPMPTSP	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5)
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	330.000.000	Dinkopdag	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
								nilai tambah di dalam negeri (PN 5)
	Angka Kemiskinan	9,00-8,70 %	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial - Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota - Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota - Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan - Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	24.340.334.214	Dinsos	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	19	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	15.000.000	Dinpermades	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,30-2,17 %	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	613.000.000	Dinperinaker	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
								ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	75,20	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum - Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	9.081.058.000	DPUPR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
				Program Penyelenggaraan Jalan	- persentase jalan Kondisi Mantap - persentase jembatan dalam kondisi baik - persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	22.697.649.250	DPUPR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2) Membangun dari desa dan dari

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
								bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
				Program Kawasan Permukiman	• persentase rumah layak huni • persentase kawasan kumuh perkotaan • persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) • persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	6.113.909.000	DPUPR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,05	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan Persampahan	• Persentase sampah yang tertangani • Cakupan layanan persampahan	3.525.000.000	DPRKPLH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
	Indeks Rasa Aman	4,69	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	946.000.000	Satpol PP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	66	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu - Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	509.474.400	BAPPEDA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD - Persentase dokumen penganggaran tepat waktu - Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu - Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	410.851.694.364	BKPAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	- Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif - Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	1.029.911.600	Dinkominfo	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo			judi, dan penyelundupan (PN 7)
Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	<i>Indeks Merit System</i>	0,55	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Kepegawaian Daerah	- Cakupan Pengembangan SDM Aparatur - Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	330.762.000	BKPSDM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B/>6 0-70	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi - Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara - Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa - Persentase penanganan aduan masyarakat - Persentase tindak lanjut hasil temuan	628.546.400	Inspektorat	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
				Program Aplikasi Informatika	- Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik - Persentase layanan publik secara elektronik	1.274.889.125	Dinkominfo	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B/>6 0-70		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan - Persentase pelunasan pembayaran PBB tepat waktu	2.010.980.556	Kecamatan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
								pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan - Persentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital	100.848.300	Dindukcapil	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator kinerja program prioritas terkait dengan indikator sasaran prioritas pembangunan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas sebesar 100%.

Sebagaimana tabel di atas pula, dapat terlihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil. Tingkat penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah sebesar 100%.

4.5. ARAH KEBIJAKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2045

Tahun 2025 menjadi landasan dalam kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu perlu penyelarasan kebijakan antara RKPD 2025 dengan RPJPD 2025-2045. Arah kebijakan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RKPD adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Peningkatan peserta didik yang mencapai WAJAR 13 Tahun;
2. Penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS);
3. Penguatan kebijakan dan regulasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. Perluasan dan pengembangan akses beserta sarana dan prasarana layanan pendidikan PAUD;
5. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar secara berkelanjutan;
6. Perluasan pendidikan formal maupun non formal yang inklusif, adaptif dan humanis;
7. Peningkatan revitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya;
8. Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal;
9. Meningkatkan masyarakat yang berbudaya;
10. Kebebasan berpendapat untuk masyarakat.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan;

2. Pengendalian pemanfaatan ruang;
 3. Peningkatan sarana dan prasarana bidang tata ruang;
 4. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat;
 5. Peningkatan kualitas dan perluasan jaringan infrastruktur transportasi.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. Penguatan kemanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran dan bencana;
 2. Peningkatan kapasitas tenaga kemanan dan pemadam kebakaran.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1. Peningkatan pelestarian kawasan lindung;
 2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 3. Pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak melampaui daya dukung dan daya ruang.;
 4. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang menjangkau seluruh wilayah;
 5. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R;
 6. Penerapan *green economy*;
 7. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
1. Peningkatan akses terhadap listrik terutama pada masyarakat yang kurang mampu;
 2. Penguatan dan pemerataan jaringan listrik yang terpadu;
 3. Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian;
 2. Peningkatan kebijakan kemandirian pangan;
 3. Peningkatan pengelolaan pertanian yang modern yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM pertanian;
 4. Penguatan kebijakan yang mendukung keterjangkauan pangan masyarakat ;
 5. Penguatan kebijakan untuk mendukung pertanian yang alami dan meminimalisir pencemaran lingkungan;
 6. Penurunan ahli fungsi lahan pertanian dan mendukung.

- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar layanan perdesaan;
 - 2. Peningkatan konektivitas antar kawasan;
 - 3. Pengembangan dan penguatan desa mandiri melalui ekonomi sektor unggulan;
 - 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - 5. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
 - 1. Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM;
 - 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM;
 - 3. Penguatan kebijakan yang mendukung kelembagaan koperasi;
 - 4. Peningkatan produktivitas BUMD.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
 - 1. Peningkatan konektivitas infrastruktur layak antar destinasi wisata;
 - 2. Peningkatan sarana parasarana yang layak untuk mendukung pariwisata;
 - 3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata;
 - 4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pariwisata yang terintegrasi;
 - 5. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Industri
 - 1. Peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan logistik pendukung industri;
 - 2. pengembangan industri dengan bahan baku lokal;
 - 3. Penguatan kebijakan untuk memudahkan iklim investasi dan industri ;
 - 4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan *green economy*.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1. Optimalisasi digital dalam tata kelola pemerintahan;
 - 2. Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan tepat;
 - 3. Penyederhanaan regulasi yang mendukung pelayanan yang optimum;
 - 4. Penguatan integritas SDM pelayanan publik.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum
 - 1. Penguatan kebijakan untuk mendukung keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - 2. Penguataan lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien;

3. Peningkatan kerjasama dan kolabaris antar daerah ataupun instansi baik secara vertikal maupun horizontal.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Penunjang
 1. Penguatan integritas untuk ASN;
 2. Fasilitasi peningkatan kompetensi ASN;
 3. Penguatan manajemen ASN;
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
 1. Penguatan pengawasan yang independen dan berintegritas.
 2. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.

Tabel 4.12 Keterkaitan arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025		
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Bidang
Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat	1. Penguatan kemandirian dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran dan bencana; 2. Peningkatan kapasitas tenaga kemandirian dan pemadam kebakaran	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	1. Peningkatan konektivitas infrastruktur layak antar destinasi wisata; 2. Peningkatan sarana prasarana yang layak untuk mendukung pariwisata; 3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata; 4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pariwisata yang terintegrasi; 5. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan	Pariwisata
	1. Peningkatan revitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya; 2. Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal; 3. Meningkatnya masyarakat yang berbudaya; 4. Kebebasan berpendapat untuk masyarakat.	Pendidikan
Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung pelayanan publik	1. Perluasan dan pengembangan akses beserta sarana dan prasarana layanan pendidikan PAUD 2. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar secara berkelanjutan	Pendidikan
	1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1. Penguatan kebijakan untuk mendukung keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat; 2. Penguatan lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien; 3. Peningkatan kerjasama dan kolabaris antar daerah ataupun instansi baik secara vertikal maupun horizontal	Pemerintahan Umum
	1. Penguatan integritas untuk ASN; 2. Fasilitasi peningkatan kompetensi ASN; 3. Penguatan manajemen ASN	Penunjang
	1. Penguatan pengawasan yang independen dan berintegritas.	Pengawasan

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Bidang
	2. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.	
Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim	1. Peningkatan sarana dan prasarana bidang tata ruang;	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat;	
	1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran dan bencana;	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	2. Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan pemadam kebakaran	
	1. Peningkatan pelestarian kawasan lindung;	Lingkungan Hidup
	2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;	
	3. Pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak melampaui daya dukung dan daya ruang.;	
	4. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang menjangkau seluruh wilayah;	
	5. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R;	
	6. Penerapan green economy;	
	7. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
	1. Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Energi dan Sumber daya air mineral
Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi	1. Penguatan kebijakan untuk mendukung pertanian yang alami dan meminimalisir pencemaran lingkungan;	Pertanian
	2. Penurunan ahli fungsi lahan pertanian dan mendukung	
	1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian;	Pertanian
	2. Peningkatan kebijakan kemandirian pangan;	
	3. Peningkatan pengelolaan pertanian yang modern yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM pertanian;	
	4. Penguatan kebijakan yang mendukung keterjangkauan pangan masyarakat	
	1. Peningkatan konektivitas infrastruktur layak antar destinasi wisata;	Pariwisata
	2. Peningkatan sarana prasarana yang layak untuk mendukung pariwisata;	
	3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata;	
	4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pariwisata yang terintegrasi;	
	5. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan	
	1. Pengembangan dan penguatan desa mandiri melalui ekonomi sektor unggulan	Pemberdayaan masyarakat dan desa
	1. Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM;	Koperasi dan UMKM
	2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM;	
	3. Penguatan kebijakan yang mendukung kelembagaan koperasi;	
	4. Peningkatan produktivitas BUMD	
	1. Peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan logistik pendukung industri;	Industri
	2. pengembangan industri dengan bahan baku lokal;	

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Bidang
	3. Penguatan kebijakan untuk memudahkan iklim investasi dan industri ; 4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan green economy	
Penguatan akses dan konektivitas wilayah untuk menunjang sistem keterkaitan wilayah	1. Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Peningkatan kualitas dan perluasan jaringan infrastruktur transportasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar layanan perdesaan; 2. Peningkatan konektivitas antar kawasan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1. Optimalisasi digital dalam tata kelola pemerintahan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1. Penguatan dan pemerataan jaringan listrik yang terpadu	Energi dan Sumberdaya Mineral
Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial	1. Peningkatan peserta didik yang mencapai WAJAR 13 Tahun; 2. Penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS); 3. Penguatan kebijakan dan regulasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; 4. Perluasan dan pengembangan akses beserta sarana dan prasarana layanan pendidikan PAUD; 5. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar secara berkelanjutan; 6. Perluasan pendidikan formal maupun non formal yang inklusif, adaptif dan humanis	Pendidikan
	1. Peningkatan akses terhadap listrik terutama pada masyarakat yang kurang mampu; 2. Penguatan dan pemerataan jaringan listrik yang terpadu	Energi dan Sumberdaya Mineral

4.6. KONTRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019 PADA TAHUN 2025

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang. Kabupaten Temanggung masuk dalam percepatan Kawasan Gelangmanggung. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut melalui:

1. Peningkatan sektor ketenagakerjaan, di antaranya melalui:
 - a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan

- jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian) serta pariwisata;
 - b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi
 - c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK
 - d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
2. Pemantapan ketahanan pangan, di antaranya melalui: pembangunan jaringan irigasi usaha tani, Pengembangan *Food Estate* dimana aspek hilirisasi yang sudah dilakukan yaitu peningkatan kapasitas jalan Bansari, pelatihan penyimpanan komoditas, dan pengawalan *oftaker*.
 3. Peningkatan daya saing pariwisata, di antaranya melalui: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi
 4. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, di antaranya melalui:
 - a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
 - b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan
 - c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
 - d. Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM
 5. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, di antaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan.

4.7. PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA TAHUN 2025

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan infrastuktur yang direncanakan tidak sebatas bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat

dan kawasan permukiman, serta perhubungan, tetapi juga bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di DPUPR bertujuan meningkatkan kualitas jalan sehingga memperlancar arus transportasi yang akan berdampak dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di DPRKPLH bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengelolaan air limbah domestik dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam pengelolaan air limbah domestik, upaya dilakukan untuk membangun sistem sanitasi yang efisien guna mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat. Sementara itu, perbaikan RTLH bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi keluarga berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat tinggal di rumah yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan melalui penyediaan penerangan jalan dan sarana prasarana pendukung jalan. Penerangan jalan yang memadai bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan sarpras pendukung jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, halte, dan trotoar, ditujukan untuk memperlancar arus transportasi, memfasilitasi mobilitas pejalan kaki, serta mendukung keseluruhan sistem transportasi agar semakin tertata dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui puskesmas dan diarahkan mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pencegahan stunting.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan bertujuan meningkatkan produktivitas pangan, pertanian, dan perikanan dan diarahkan mendukung prioritas peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pemulihan ekonomi.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dindikpora bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan

diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia.

4.8. SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET SDGS KABUPATEN TEMANGGUNG

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung. Ada satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Tabel 4.13
Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya perekonomian daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya perekonomian daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat - Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Pemantapan reformasi birokrasi
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota	
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	- Meningkatkan perekonomian daerah - Meningkatkan penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	- Meningkatkan kualitas Hidup Perempuan dan Anak - Meningkatkan penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Meningkatkan penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatkan perekonomian daerah - Meningkatkan penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
14	Melakukan konservasi dan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena tidak mempunyai laut	

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
	pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota	
16	Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	Meningkatnya toleransi masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi. - Meningkatkan pengelolaan SDM aparatur - Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

4.9. SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung
PENANGANAN STUNTING KABUPATEN TEMANGGUNG

Pemerintah telah menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional dengan target 14% pada tahun 2024 terlebih lagi capaian stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 di angka 25,1% yang tentunyaaa hal tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan secara nasional. Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
		perumahan dan permukiman		
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
4	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
5	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
6	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DPPPAPPKB
7	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
8	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
9	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
10	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana	DKPPP
11	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam mendukung aksi percepatan penurunan dan penanganan stunting, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memperkuat peran

Tim Percepatan Penurunan Stunting serta Satgas Percepatan Penurunan Stunting (satgas dibentuk dari tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Desa, PKK, Camat, Puskesmas, Babinsa, Babinkamtibmas, pendamping KB, pendamping desa, petugas PLKB, PLD, pendamping PKH, pendamping TKSK, relawan masyarakat dan organisasi masyarakat baik dari Aisyiyah, Muslimat, Ansor, Banser, Pemuda Muhammadiyah, dan GPK) dalam mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sejak tahun 2023 yaitu intervensi spesifik percepatan penurunan stunting melalui sinergitas perangkat daerah diantaranya skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, PMT bagi ibu hamil KEK (berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang), pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi baduta serta tata laksana balita weight faltering dan pemberian PMT gizi kurang, balita gizi buruk dan rujukan balita stunting.

4.10. DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0%, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan 3 strategi yaitu:

- 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan seperti Bantuan Sosial Reguler (PKH dan Sembako), Bantuan Sosial Khusus (BLT DD, BST, *top-up* bansos regular), PBI JKN, Bantuan Siswa Miskin, Iuran Jaminan Sosial, Kartu Jateng Sejahtera, RTLH dan jamban, instalasi dan subsidi listrik, bantuan dan rehabilitasi kelompok berkebutuhan khusus.
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat seperti program padat karya, program vokasi dan Pelatihan, peningkatan akses aset produktif, akses modal dan akses penggunaan

- lahan, peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pemberian modal usaha pada UEP dan KUBE.
- 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti jambanisasi, air minum, dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi tersebut dilakukan dengan peningkatan validitas data yang memanfaatkan infrastruktur teknologi komunikasi dan pendataan secara *bottom up* untuk menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan. Intervensi berbasis individu dan kewilayahan yang dilakukan secara kolaboratif, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Fokus intervensi yang dilakukan adalah pemberian bantuan secara tepat sasaran, peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan wisata dan pemberdayaan produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, hal tersebut ditunjukkan dengan arah kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang juga sebagai penerapan dari 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Penanganan Bencana	BPBD
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
		perumahan dan permukiman		
4.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
5.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINHUB
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
7.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
8.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan UMKM	DINKOPDAG
9.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
10.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER
11.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
12.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Penataan Desa	DINPERMADES
13.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DINPERMADES
14.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
15.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
16.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
17.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
18.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
19.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
20.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
21.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
22.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
23.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
24.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
25.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
26.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (SS)	DPPPAPPKB
27.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINPERMADES
28.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
29.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
30.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga amal zakat, CSR dan TJSLP dalam membantu intervensi percepatan penghapusan kemiskinan.

4.11. SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN TEMANGGUNG

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 4.16
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	PROGRAM	PD PENGAMPU
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Indeks Pembangunan Gender	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPAPPPKB
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPAPPPKB
				Program Perlindungan Perempuan	DPPAPPPKB
				Program Pengendalian Penduduk	DPPAPPPKB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPAPPPKB
				Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, Evaluasi, Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	DINPERMADES
				Program Pengembanagan Lembaga Ekonomi Masyarakat/Desa dan Perberdayaan Kawasan Perdesaan	DINPERMADES
				Program Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	PROGRAM	PD PENGAMPU
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DINKOPDAG
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DINKOPDAG
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	DINKOPDAG
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
				Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
				Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPEDA
				Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM
				Program Penanganan Fakir Miskin	DINSOS
				Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	PROGRAM	PD PENGAMPU
				Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	DINKOMINFO
				Program pemeliharaan Kentetraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR
				Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
				Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
				Pogram Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
				Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	DPRKPLH

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Hal tersebut sangat berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, RPD Kabupaten Temanggung pada tahun 2024-2026 menempatkan pengarustamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim pada tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan pada sasaran meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

Sasaran daerah dalam mendukung pengarustamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim yaitu meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas. Hal tersebut terlihat dari indikator sasaran Indeks Rasa Aman dimana sasaran tersebut didukung dengan

indikator sasaran Perangkat Daerah berupa Indeks Resiko Bencana, Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota, dan Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten.

Sasaran, prioritas daerah, dan program dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan
Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	STRATEGI	PROGRAM
1.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	a. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman b. Pemantapan reformasi birokrasi	a. Meningkatkan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah b. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya c. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai kewenangan	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan c. Program Penanganan Kerawanan Pangan d. Program Pengawasan Keamanan Pangan e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian h. Program Penyuluhan Pertanian i. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner j. Program Perencanaan Lingkungan Hidup k. Program Pengendalian Pencemaran l. Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

4.12. FASILITASI PERUBAHAN IKLIM

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, berikut beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung:

1. Pembangunan Rendah Karbon

Pemerintah menyadari perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat mempengaruhi capaian pembangunan nasional, atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data yang dilaporkan pada *platform* AKSARA dari periode 2010-2023 menunjukkan terdapat 4 total kegiatan aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 103.314,79 Ton CO₂eq.

Kabupaten Temanggung turut berkontribusi dalam upaya pencapaian Pembangunan Rendah Karbon dengan melakukan pelaporan secara rutin pada sistem informasi AKSARA. Hingga tahun 2023 tercatat 11 total kegiatan aksi PRK Perubahan Iklim yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Temanggung dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 111.751,61 Ton CO₂eq. Adapun aksi Pembangunan Rendah Karbon yang dilaksanakan oleh Kabupaten Temanggung tersebar pada 2 (dua) sektor utama yakni pada sektor lahan (pertanian) dengan kontribusi penurunan sebesar 103.355,04 Ton CO₂eq dan pada sektor pengelolaan limbah (persampahan) dengan kontribusi penurunan sebesar 8.396,57 Ton CO₂eq. Berdasarkan capaian tersebut, Kabupaten Temanggung telah memberikan kontribusi sebesar 0,88% pada capaian provinsi dan akan terus bertambah pada tahun berikutnya.

2. Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan

Salah satu upaya Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi lahan kritis yakni dengan melakukan gerakan konservasi penanaman pohon di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau. Berdasarkan hasil inventarisasi lahan kritis yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2017

dapat diketahui bahwa $\pm 12\%$ lahan di Kabupaten Temanggung termasuk dalam kriteria lahan kritis dan lahan sangat kritis. Kondisi lahan kritis dikhawatirkan akan mempengaruhi kesuburan tanah dan produktivitas lahan yang akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, akan muncul ancaman degradasi lahan dan ancaman terhadap ketersediaan air, baik air permukaan maupun mata air. Banyak mata air yang mulai mati dan berkurang debitnya sehingga banyak permintaan bantuan air bersih ke desa-desa dan terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka mengantisipasi penurunan kualitas lingkungan tersebut, mulai tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menanam pohon konservasi sekurangnya ada 500 ribu pohon dan dari non pemerintah 220 ribu pohon. Upaya tersebut mampu mengupayakan penanganan lahan kritis seluas 12,89 Ha dari total luas lahan kritis 7.566,5 Ha. Pada tahun 2022 upaya penanganan lahan kritis dilaksanakan pada lokasi bekas galian c di Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung seluas 8,5 Ha dan kegiatan konservasi dengan metode vegetatif melalui Gerakan Konservasi Tanah dan Air berkelanjutan di 10 Kecamatan di lereng gunung Sumbing, Sindoro dan Prau dengan penanganan lahan kritis seluas 180,27 Ha. Adapun pada tahun 2023, upaya penanganan lahan kritis dilakukan dengan kegiatan pemulihan lahan seluas 5.5 Ha melalui pembentukan kampung alpukat dengan penanaman alpukat sejumlah 2000 pohon di Dusun Ngetuk, Desa Kwadungan Gunung, Kecamatan Kledung yang dilaksanakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman pohon di 11 Kecamatan dengan luas 67,288 Ha. Sehingga, total penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2023 seluas 253,063 Ha.

3. Komitmen Adaptasi Perubahan Iklim melalui Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang rentan terhadap dampak perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat maka pada tahun 2022 melalui fasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Temanggung berkomitmen terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Temanggung sedang menyusun Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. Selain itu, pada tahun 2020 di Temanggung telah dilaksanakan kegiatan Sekolah Lapang mitigasi perubahan iklim yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung.

4.13. SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 juga dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Regulasi SPM Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 yang mengatur berbagai aspek seperti koordinasi antar lembaga, pembiayaan, pengendalian, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM. Dengan peraturan ini, diharapkan standar pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Temanggung memprioritaskan pemenuhan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Pemenuhan SPM juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pelayanan dasar dan memprioritaskan penyediaan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan).

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Ketersediaan komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Ketersediaan Komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung

Komponen SPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018	Komponen SPM Kabupaten Temanggung
Pendidikan	Pendidikan
Kesehatan	Kesehatan
Pekerjaan umum	Pekerjaan umum dan penataan ruang
Perumahan rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Sosial	Sosial

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, keselarasan SPM RPD Kabupaten Temanggung mencapai 100% dengan SPM RPJMN yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.19
Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program pengelolaan pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat - Meningkatkan kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	- Indeks Pembangunan Infrastruktur - Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Pemulihan ekonomi	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Pemulihan ekonomi	Program Kawasan Permukiman.
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			
5	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	- Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas - Meningkatnya toleransi masyarakat	Pemulihan ekonomi	a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum b. Program Penanggulangan Bencana
		Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara			
		Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pemulihan ekonomi	a. Program Pemberdayaan Sosial; b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			c. Program Rehabilitasi Sosial; d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. Program Penanganan Bencana.
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

4.14. KEBIJAKAN DAN STRATEGI HASIL MUSRENBANG RKPD 2025

Dalam perencanaan pembangunan daerah, melalui berbagai tahapan kegiatan, salah satunya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD 2024. Adapun hasil Musrenbang sebagai berikut.

Tabel 4.20
Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2025 Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Bimtek pendidikan pengasuhan, ketrampilan menjadi orang tua, ketrampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, dan penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga	Bimtek pendidikan pengasuhan, ketrampilan menjadi orang tua, ketrampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, dan penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga	DPPPAPPKB	Kelurahan Kranggan
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Terlaksananya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Dinperinaker	Desa Pingit

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
		kebudayaan					
3	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pelatihan dan pengembangan anggrek di wilayah Kelurahan Jampirejo (Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DKPPP	TEMANGGUNG
4	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Pembangunan Gedung UMKM untuk Display dan Pengadaan Sarpras Pendukung UMKM (Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	DINKOPDAG	BANSARI
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan,	Program Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Tersedianya Sarpras Perpustakaan	DINPUSIP	TEMANGGUNG

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman		(pembelian mebeler buku dan PC)			
7	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Revitalisasi Lapangan Jaten (senderan lapagan sebelah timur dan sebelah selatan)	Terlaksanannya revitalisasi Lapangan Jaten	DINDIKPORA	Kel. Madureso
8	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan/Rehab Gedung SD	Meningkatkan kegiatan belajar	DINDIKPORA	Desa Jambu
9	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan lampu jalan ruas jalan Jumo - Ketitang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	DINHUB	JUMO

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan					
10	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan RTLH	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	DPRKPLH	KALORAN
11	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Kebraman – Gemawang	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	GEMAWANG
12	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial,	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan ruas jalan Kacepit- Bumiayu	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	SELOPAMPANG

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	dan perumahan dan permukiman					
13	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Ngimbrang - batas Bansari	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	BULU
14	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Jurang-Salamsari (lanjutan BanGub)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	NGADIREJO
15	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Kalirejo-Bansari	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	KEDU

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	kelola pemerintahan yang baik						
16	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi jalan ruas jalan Bejen – Congkrang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	KLEDUNG
17	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Pingit - Wonokerso (batas kabupaten)	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	DPUPR	BEJEN
18	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyediaan Sarpras Posyandu	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	PRINGSURAT

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	pemerintahan yang baik						
19	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukaan Kalimandang	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUPR	KRANGGAN
20	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Wonobojo - Pringlegi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	WONOBOYO
21	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi jalan ruas jalan Rowoseneng – Sirandu (Batas Kabupaten)	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	DPUPR	KANDANGAN

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
22	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Parakan-Bansari	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	PARAKAN
23	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Candiroto - Plosogaden	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	CANDIROTO
24	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Campurejo – Tretep	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	TRETEP

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
25	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan berkala ruas jalan Karangwuni - Tlogomulyo	Panjang Jalan yang Dipelihara secara berkala	DPUPR	TLOGOMULYO
26	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Menggoro-Kemloko	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	TEMBARAK

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD 2024 sebagaimana tabel di atas, terlihat bahwa terdapat penyelarasan antara arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program dengan usulan kegiatan Musrenbang. Hasil Musrenbang tersebut selanjutnya menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

4.15. PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas. Portal tersebut terhubung dengan Portal Data Daerah yang bisa diakses melalui <https://data.temanggungkab.go.id/>. Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Berdasarkan SK Bupati Temanggung No 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai Walidata yang bertanggung jawab mengadakan Forum Satu Data, termasuk menyelenggarakan forum pengumpulan data statistik sektoral pada tahun 2023 dengan mengundang BPS Kabupaten Temanggung dan perangkat daerah sebagai produsen data.

Selain itu, untuk mengintegrasikan kebijakan pusat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Kabupaten Temanggung telah membuat Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung yang ditetapkan melalui SK Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Walidata berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Temanggung sebagai pembina data, menetapkan data prioritas, standar data, dan metadata. Hal ini dituangkan dalam SK Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor 050/004.1/2023 tentang Data Prioritas Statistik Sektoral, Standar Data, dan Metadata Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai Walidata telah memiliki akun Satu Data Indonesia dengan kode akun 330562. Sementara itu, penyelenggaraan Satu Data Indonesia dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan portal <https://gis.temanggungkab.go.id/> yang merupakan portal Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyediakan data-data sektoral. Data terkait penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di

Kabupaten Temanggung dapat diakses pada tautan berikut <https://s.id/BuktiSDI03>.

4.16. PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam penyelenggaraan pengendalian pemerintahan daerah di Kabupaten Temanggung, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) didukung oleh Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/363 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Program ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024.

Selain APIP, keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga mendukung pengendalian pemerintahan di Kabupaten Temanggung. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP secara berkelanjutan, diperlukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/0000825 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menilai dan memastikan kualitas penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka memperkuat penerapan SPIP dan mencapai tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah. Dukungan regulasi ini diwujudkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Peraturan ini menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola risiko, sehingga manajemen risiko dapat dijalankan secara efektif dan sistematis.

1.1.2 5.1 RENCANA KERJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 serta seiring dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows program*, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tahun 2025 ini ditempuh dengan tema yang diusung dalam RKP 2025 yaitu “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Seiring dengan RKP 2025 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menyelaraskan programnya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas dalam RKP 2025.

5.1.1 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 Kabupaten Temanggung Terhadap Prioritas Nasional (PN)

5.1.1.1 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Arah Kebijakan RKP Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 8 Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP 2025 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut juga mendukung tema RKP 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	13	31.893.177.711	BANKESBANGPOL
				DINSOS
				DPPPAPPKB
				DINKOMINFO
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	24	55.523.698.357	DINKOMINFO
				DKPPP
				DPUPR
				DPRKPLH
				DINKOPDAG
				DINPERINAKER
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	9	613.205.474.764	DPUPR
				DINPERINAKER
				DINKOPDAG
				BPKPAD
				DPUPR
				DINKOMINFO
				DINHUB
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	18	424.397.022.638	DINDIKPORA
				BAPPEDA
				DINPUSIP
				DINKES

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas			DPPAPPKB
				BANKESBANGPOL
				DINSOS
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	15	178.971.628.726	DINPERINAKER
				DINKOMINFO
				DPUPR
				DINHUB
				DPMPTSP
				DINKOPDAG
				DINPERINAKER
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	13	37.261.679.676	DINPERMADES
				DPRKPLH
				DINKOPDAG
				DINSOS
				DINDUKCAPIL
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	17	453.215.735.274	BANKESBANGPOL
				SEKRETARIAT DAERAH
				INSPEKTORAT
				BKPSDM
				DINKOMINFO
				BPKPAD
				DINKOPDAG
				SATPOL PP DAMKAR
8	memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	13	13.909.588.000	BANKESBANGPOL
				DINBUDPAR
				BPBD
				SATPOL PP DAN DAMKAR
				DPRKPLH
JUMLAH			1.808.378.005.146	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

5.1.1.1.1 Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tabel 5.2
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1:
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia							
	Program Pembangunan 1.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 1.1. 1. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 2. Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan							
	Program Pembangunan 1.2. Penguatan Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335		
	Kegiatan Pembangunan 1.2. 1. Penguatan Kebebasan dan Kesetaraan Masyarakat 2. Penguatan Lembaga Demokrasi							
	Program Pembangunan 1.3 Pemantapan Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi	40	%	1.029.911.600	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 1.3 1. Penguatan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 2. Pembangunan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif , Jujur, Objektif dan Sehat Industri		Dinkominfo yang aktif					
			Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%			
			Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90	%			
	Program Pembangunan 1.4 Kepemimpinan Nasional yang Berdasarkan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	20.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 1.4 1. Peningkatan Kualitas kader pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah 2. Peningkatan Semangat Persatuan , Kesatuan dan Kebagsaan pada Generasi Muda	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 1.5 Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarustamaan HAM	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosal (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	640.000.000	Sosial	DINAS SOSIAL
	Kegiatan Pembangunan 1.5 1. Transformasi Pengarustamaan HAM 2. Transformasi Layanan Akses Terhadap Keadilan yang Subtansial Terutama dan Tidak Terbatas bagi kelompok rentan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	20.000.000		
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162		
			Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%			
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214		
			Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%			
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,66	%	10.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPAPPKB
			Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%			
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	45.000.000		
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,0039	%	52.842.200		

JUMLAH

31.893.177.711

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

5.1.1.1.2 Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Tabel 5.3
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2:

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
2	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru							
	Program Pembangunan 2.1 Penguatan Pertahanan Negara							
	Kegiatan Pembangunan 2.1 1. Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan Optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI 2. Memperkuat komponen cadangan 3. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara 4. Memperkuat							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	kapabilitas Badan Pertahanan Siber 5. Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force dalam rangka meningkatkan Efektivitas menjaga kedaulatan NKRI 6. Meningkatkan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar 7. Memperkuat Instrumen Pertahanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 8. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 9. Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Strategis							
	Program Pembangunan 2.2. Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.2 1. Mempercepat Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri 2. Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-Produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri 3. Pembentukan Ekosistem Industri Pertahanan 4. Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend To Invest 5. Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan Alpalhankam							
	Program Pembangunan 2.3. Penguatan Sistem Keamanan Negara							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.3. 1. Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, serta Paham Kebhinekaan di Daerah-Daerah yang Rawan Konflik serta Rentan Isu Separatisme 2. Meningkatkan Sistem Deteksi Dini untuk Memperkuat Sistem Keamanan Negara 3. Memperkuat Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia 4. Memperkuat Instrumen Keamanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 5. Penguatan Sistem Keamanan Negara di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar 6. Pencegahan, Penanganan, dan							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Deradikalisasi Terorisme							
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBAN GPOL
	Program Pembangunan 2.4. Profesionalisme Pelayanan Kepolisian							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.4. 1. Memperkuat Polisi dalam Rangka Sinergi antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 2. Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan 3. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 4. Penguatan Kapabilitas Polri dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum, Pemeliharaan Keamanan, dan Penanganan Kriminalitas 5. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Polri							
	Program Pembangunan 2.5. Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.5 1. Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2. Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut 3. Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, Alki, dan Choke Point 5. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Lembaga Keamanan Laut 6. Pemetaan Batimetri dan Alur Laut							
	Program Pembangunan 2.6 Keamanan Siber, sandi, dan sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	66,7	%	47.000.000	Persandian	DINKOMINFO

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2. 6 1. Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi 2. Pengembangan SDM, Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal 3. Penguatan Kelembagaan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal 4. Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Strategis	Pengamanan Informasi	Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	60	%			
	Program Pembangunan 2.7 Diplomasi Ekonomi							
	Kegiatan Pembangunan 2.7 1. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional 2. Diplomasi Ekonomi yang Adaptif 3. Diplomasi Ekonomi Strategis dengan Mitra Utama 4. Diplomasi Ekonomi dengan Negara Tetangga Perbatasan, Regional, dan Subregional							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	5. Proses Aksesi Indonesia ke OECD							
	Program Pembangunan 2.8 Hubungan Internasional yang Kondusif							
	Kegiatan Pembangunan 2.81. Intensifikasi Penyelesaian Batas Maritim dan Batas Darat serta Penguatan Diplomasi Kedaulatan2. Penguatan Supremasi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Fora dan Organisasi Internasional3. Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Mendorong Perdamaian Dunia4. Intensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, serta Memperjuangkan Warisan Budaya Nasional menjadi Warisan Budaya							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Dunia5. Intensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, Serta Memperjuangkan Warisan Budaya Nasional menjadi Warisan Budaya Dunia							
	Program Pembangunan 2.9 Swasembada Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,3	kg/ m2	235.000.000	Pangan	DKPPP
	Kegiatan Pembangunan 2.9 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah 2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Sumatera Selatan 3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nusa Tenggara Timur 4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)		Produktivitas ikan lele	12,7	kg/ m2			
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	10	%	10.000.000		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,5	Kuintal /ha	18.460.436.207		
			Produktivitas jagung	54,6	Kuintal /ha			
			Produktivitas bawang putih	61	Kuintal /ha			
			Produktivitas bawang merah	69	Kuintal /ha			
			Produktivitas cabai rawit	50,5	Kuintal /ha			
			Produktivitas cabai besar	65,5	Kuintal /ha			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Papua 5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan 6. Pengembangan Lumbung Pangan Nasional 7. Penguatan Cadangan Pangan 8. Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) 9. Pengembangan Pangan Hewani 10. Pengembangan Pangan Nabati 11. Penganekaragaman Konsumsi Pangan 12. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan 13. Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan 14. Penguatan Pangan Lokal 15. Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi 16. Penguatan Satu Data Pangan 17. Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan 18. Stabilisasi Pasokan dan Harga		Produktivitas tembakau	6,2	Kuintal /ha			
			Produktivitas kopi robusta	7,15	Kuintal /ha			
			Produktivitas kopi arabika	6,5	Kuintal /ha			
			Produktivitas ternak sapi	177,5	Kg/Ekor			
			Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor			
			Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor			
			Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor			
			Produktivitas ternak ayam petelur	10,88	Kg/Ekor			
			Persentase kelahiran pedet	56	%			
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	8.047.730.900		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	87	%	651.725.000		
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%			
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1,3	%	260.000.000		
		Program Penanganan Kerawananan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	10.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pangan 19. One Health 20. Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis / Unggulan 21. Pengembangan Korporasi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam (KPN) 22. Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian yang Adaptif dan Inklusif 23. Penguatan Regenerasi Petani 24. Pendayagunaan Praktik Pertanian Berkelanjutan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%		20.000.000		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,52	%	10.000.000		
	Program Pembangunan 2. 10 Swasembada Energi							
	Kegiatan Pembangunan 2.10 1. Peningkatan Penyediaan Energi 2. Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi 3. Penguatan Implementasi Transisi Energi							
	Program Pembangunan 2.11 Swasembada Air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,7	%	9.081.058.000	Pekerjaan dan	DPUPR

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.11 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Air 2. Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan 3. Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%		Penataan Ruang	
	Program Pembangunan 2.12 Pemenuhan Akses Air Minum Aman							
	Kegiatan Pembangunan 2.12 1. Pengembangan Spam Terintegrasi Hulu ke Hilir 2. Pengamanan dan Pengawasan Kualitas Air Minum 3. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan SPAM 4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemenuhan Air Minum							
	Program Pembangunan 2.13 Percepatan Pemenuhan Akses Sanitasi Aman untuk Masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,11	%	316.091.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan	DPRKPLH

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.13 1. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim 2. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan dan Ketahanan Iklim 3. Pengembangan Ekosistem Berbasis Inovasi Penyelenggaraan Sanitasi 4. Penguatan Peran Masyarakat dalam Penyediaan dan Penyelenggaraan Sanitasi yang Aman		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,4	%		Permukiman	
	Program Pembangunan 2.14 Ekonomi Syariah Kegiatan Pembangunan 2.14 1. Industri Halal 2. Ekspor Halal dan Kerja Sama Ekonomi Syariah Internasional 3. Ekosistem UMKM Halal 4. Keuangan Syariah 5. Dana Sosial Syariah	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina		%	2.000.000	Perdagangan	DINKOPDAG

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 2.15 Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
	Kegiatan Pembangunan 2.15 1. Penguatan Ekosistem Infrastruktur Ekonomi Digital 2. Penguatan Ekosistem Industri Digital Lingkup Ekonomi		Persentase layanan publik secara elektronik	100	%			
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27,42	%	674.979.613	Perdagangan	DINKOPDAG
			Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%			
	Program Pembangunan 2.16 Ekonomi Sirkular Industri	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000		DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 2.16 1. Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Perpanjangan Daya Guna 2. Pengembangan Produk Ramah Lingkungan 3. Penguatan Ekosistem Daur Ulang							
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%	10.419.879.000	Pekerjaan dan Penataan Ruang	
	Prioritas Pembangunan 2.17 Pengelolaan	Program Pengelolaan	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	65	%	380.000.000		DPRKPLH

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	Keanekaragaman Hayati (Kehati)						
	Kegiatan Pembangunan 2.17 1. Penguatan Pengelolaan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi 2. Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi 3. Pengurangan Status Keterancaman Spesies dan Ekosistem 4. Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati 5. Peningkatan Pemanfaatan Jasa Ekosistem secara Berkelanjutan 6. Pengembangan Bioprospeksi Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik 7. Pengelolaan Bioteknologi dan Keamanan Hayati (Biosafety)							
	Prioritas Pembangunan 2.18 Peningkatan Kualitas	Program Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Air	53,3	Angka	250.000.000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
	Kegiatan Pembangunan 2.18 1. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air di Sungai dan Danau 2. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Udara di Kab/Kota di Indonesia 3. Peningkatan Pengelolaan Kualitas dan Kesehatan Air Laut 4. Peningkatan Kualitas Laban 5. Penurunan Laju Deforestasi 6. Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut 7. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 8. Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Pengendalian dan Penertiban Penyelesaian Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemanfaatan Ruang 10. Peningkatan		Indeks Kualitas Udara	83,87	Angka			
			Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%			
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30	%	70.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Sarana, Prasarana, dan Kelembagaan dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan di Pusat dan Daerah serta Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang 11. Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Penguatan Instrumen Pencegahan dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	50.000.000		
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%			
	Program Pembangunan 2.19 Penerapan Ekonomi Sirkular dari Sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara Partisipatif (Hulu)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,5	%	3.525.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.19 1. Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Sumber serta Pengumpulan dan Pengangkutan Terpilah Terjadwal 2. Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah		Cakupan layanan persampahan	66,44	%			
	Program Pembangunan 2.20 Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Hilir)							
	Kegiatan Pembangunan 2.20 1. Pengelolaan Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Peningkatan Sampah Terolah di TPST, Konservasi TPA, dan Landfill Mining 3. Reformasi Tata Kelola Persampahan							
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,3	Angka	250.000.000		
			Indeks Kualitas Udara	83,87	Angka			
			persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%			
	Program Pembangunan 2.21 Pembangunan Rendah Karbon							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.21 1. Penurunan Emisi GRK Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan 3. Pencegahan Pengurangan dan Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan 4. Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon 5. Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru 6. Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri 7. Penguatan Aksi Penurunan Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah 8. Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK							
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				70.000.000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
	Program Pembangunan 2.22 Tenaga Kerja Hijau	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	613.000.000	Tenaga Kerja	DINPERINAKER
	Kegiatan Pembangunan 2.22		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah		
	1. Pengembangan Ekosistem Tenaga Kerja Hijau 2. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau 3. Penguatan Peran Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau dan Tenaga Kerja Hijau	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	425.000.000				
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%					
			Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,2	%					
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%					
		Program Hubungan Industrial	Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83,37	%	80.000.000				
			Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%					
			Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%					
			Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%					
	Program Pembangunan 2.23 Pengelolaan Hutan Lestari									
	Kegiatan Pembangunan 2.23 1. Peningkatan Produktivitas Hutan 2. Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri 3. Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari 4. Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari 5. Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan									

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 2.24 Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru							
	Kegiatan Pembangunan 2.24 1. Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru 2. Peningkatan Pengelolaan Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir 3. Pengembangan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam Perikanan dan Kelautan yang Modern, Terintegrasi, dan Berkelanjutan 4. Penguatan Industri Manufaktur Perkapalan dan Bahan Baku Perkapalan 5. Penguatan Sistem Logistik, Transportasi, dan Perdagangan Jalur Perairan 6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau serta Pemanfaatan Jasa Kelautan Berkelanjutan 7. Peningkatan Kapasitas dan							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Biru serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Maritim							

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

5.1.1.1.3 Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Tabel 5.4

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3:

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	Prioritas Nasional: 03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi							
	Program Pembangunan 3.1 Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42,03	%	18.589.072.100	Perhubungan	DINHUB
	Kegiatan Pembangunan 3.1. 1. Penguatan Konektivitas Jalan 2. Penguatan Konektivitas Kereta Api 3. Penguatan Konektivitas Laut 4. Penguatan Konektivitas Udara 5. Penguatan Konektivitas Darat 6. Pengembangan Transportasi Perkotaan 7. Peningkatan Sumber Daya Manusia Transportasi		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	100	%			
			Persentase potensi titik parkir yang tertangani	99,12	%			
			Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%			
				100	%			
			Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,66	%			
			Persentase penerangan jalan di	33,86	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			ruas jalan kabupaten					
			Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64,09	%			
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%	22.697.649.250	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%			
			Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	89,51	%			
	Program Pembangunan 3.2. Penguatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik							
	Kegiatan Pembangunan 3.2 1. Dekarbonisasi dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Termasuk Terbarukan 2. Peningkatan Konektivitas dan Digitalisasi Tenaga Listrik 3. Peningkatan Pemanfaatan Tenaga Listrik 4. Pengembangan Ekosistem Pendorong Transisi Energi Listrik							
	Program Pembangunan 3.3. Penguatan Konektivitas dan Ekosistem Digital	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 3.3. 1. Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran 2. Pengelolaan Sumber Daya TIK 3. Peningkatan Kondusivitas Ruang Digital		Persentase layanan publik secara elektronik	100	%			
	Program Pembangunan 3.4. Pengembangan Pengairan dan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,37	%	9.164.704.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	Kegiatan Pembangunan 3.4 1. Pengembangan Irigasi 2. Pembangunan Bendungan		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97,97	%			
	Program Pembangunan 3.5 Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6,67	%	330.000.000	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DINKOPDAG
	Kegiatan Pembangunan 3.5 1. Pengembangan Koperasi Sektor Produksi 2. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif 3. Pengembangan Kewirausahaan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	48	%	25.000.000		
	Program Pembangunan 3.6 Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	410.851.694.364	Keuangan	BPKPAD
	Kegiatan Pembangunan 3.6 1. Penguatan Peran Perbankan 2. Penguatan Peran Sektor Keuangan		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Nonbank 3. Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%			
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	%			
			Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%			
	Program Pembangunan 3.7 Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,04	%	190.000.000	Pariwisata	DINBUDPAR
	Kegiatan Pembangunan 3.7 1. Penguatan Destinasi Regeneratif Bali		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari			
	2. Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau		Persentase Peningkatan Desa Wisata	14,76	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	3. Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta 4. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen 5. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang 6. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung 7. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba 8. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta• Prambanan 9. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat 10. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo 11. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi 12. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru 13. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai		Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%			
	Program Pembangunan 3.8 Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,96	%	95.000.000	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DINKOPDAG

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 3.8 1. Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif 2. Penguatan Ekosistem Film, Animasi, dan Video 3. Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya 4. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim 5. Penguatan Ekosistem Kuliner							
JUMLAH						613.205.474.764		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah

5.1.1.1.4 Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Tabel 5.5

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4:

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
4	PRIORITAS NASIONAL: 04-MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS							
	Program Pembangunan 4.1 Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,72	%	151.865.540.775	Pendidikan	DINDIKPORA

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 4.1 1. Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Penyaluran Bantuan Pendidikan 4. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 5. Revitalisasi Pendidikan Nonformal 6. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren yang Berkualitas dan Pendidikan Keagamaan Lainnya 7. Pembangunan Sekolah Unggul Terintegrasi 8. Makan Bergizi di Sekolah dan Pesantren		Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44,55	%			
	Program Pembangunan 4.2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,75	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 4.2 1. Penerapan Kurikulum yang Berfokus pada Kompetensi Esensial, Adaptif, dan Kontekstual 2. Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK) 3. Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif 4. Penciptaan Ekosistem Satuan Pendidikan yang Mendukung Penguatan Karakter dan Wellbeing Peserta Didik dan Pendidik 5. Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)		Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90,55	%			
	Program Pembangunan 4.3 Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas		Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan	100	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Konseling/Psikologi					
	Kegiatan Pembangunan 4.3 1. Reformasi LPTK dan Penguatan PPG 2. Restrukturisasi Kewenangan Pengangkatan dan Distribusi Guru 3. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan		persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,99	%			
	Program Pembangunan 4.4 Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan		persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.4 1. Penguatan Manajemen Kepemimpinan		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,03	Angka			
			Persentase ruang kelas TK Negeri	100	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Lembaga Pendidikan 2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu		dalam kondisi baik					
			Persentase APM SD Sederajat	98,7	%			
			Persentase APK SD Sederajat	104,69	%			
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,01	Angka			
			Rasio Siswa/Guru SD	0,061111 1	Angka			
			Rasio Siswa/Rombel SD	0,061111 1	Angka			
			Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%			
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,32	%			
			Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau	100	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Sertifikat Guru Penggerak					
			Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka			
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91,49	%			
			Persentase APM SMP Sederajat	89	%			
			Persentase APK SMP Sederajat	98,77	%			
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,9	%			
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,16	Angka			
			Rasio Siswa/Guru SMP	0,063888 9	Angka			
			Rasio Siswa/Rombel SMP	0,063888 9	Angka			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%			
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,25	%			
			Persentase Kepala SMP memilikikualifika si akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
			Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,08	Angka			
			Persentase ruang kelas SMP Negeri	96,67	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			dalam kondisi baik					
			Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%			
			Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%			
			Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%			
	Program Pembangunan 4.5 Penguatan Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Bidang STEAM							
	Kegiatan Pembangunan 4.5 1. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas 2. Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Merata 3. Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Dosen serta Tenaga Kependidikan 4. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Tinggi							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 4.6 Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja							
	Kegiatan Pembangunan 4.6 1. Penguatan Pendidikan Menengah Vokasi 2. Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi 3. Penguatan Pelatihan Vokasi 4. Penguatan Ekosistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja							
	Program Pembangunan 4.7 Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	606.932.500	Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 4.7 1. Penguatan Kapasitas Iptek dan Inovasi 2. Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi 3. Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi secara Masif di Berbagai Bidang 4. Penguatan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Keunggulan Iptek dan Inovasi Berbasis Kewilayahan dan Berdaya Saing		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%			
	Program Pembangunan 4.8 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)							

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 4.8 1. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya 2. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset Inovasi 3. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga 4. Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)							
	Program Pembangunan 4.9 Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan	0,25	%	1.211.407.950	Perpustakaan	DINPUSIP
	Kegiatan Pembangunan 4.9 1. Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan 2. Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca		Persentase perpustakaan yang aktif	35	%			
	Program Pembangunan 4.10 Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214	Kesehatan	DINKES

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 4.10 1. Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2. Pencegahan dan Penurunan Stunting Dan Bantuan Pangan Bergizi bagi Ibu Hamil dan Balita 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	12,8	per 1000 KH			
	Program Pembangunan 4.11 Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.11 1. Penuntasan TBC 2. Pengendalian Penyakit Menular Lainnya 3. Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta dan Schistosomiasis) 4. Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan Lainnya		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	% maksimal			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa 6. Pembudayaan Hidup Sehat, Penyehatan Lingkungan dan Olahraga							
	Program Pembangunan 4.12 Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.12 1. Penguatan Surveilans, Laboratorium, Pos Pintu Masuk Negara, Pengendalian KLB / wabah dan Penanganan Bencana 2. Pemenuhan dan Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 3. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 4.13 Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola		persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.13 1. Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 2. Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 3. Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 4. Penguatan JKN dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 5. Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Data, Informasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan		persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani		100	%				
	Angka Kematian Neonatal		9,15	per 1.000 KH				
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100	%				
	Angka Kematian Balita		15,6	per 1.000 KH				
	Prevalensi ballita gizi buruk		0,3	%				
	Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0- 24 bulan)		14	% maksimal				
	persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif		82,6	% minimal				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%			
			Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%			
			persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk			
			Presentase imunisasi dasar lengkap pada	85	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			anak usia 12-23 bulan					
			persentase rumah sehat	87,6	%			
			persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98,4	%			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26,9	%	10.000.000		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	445.344.000		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,6	%	7.293.884.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Pesentase Kepesertaan KB Aktif	75,8	%			
			Persenatase Keberhasilan Pemakaian	46,15	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Kontrasepsi Jangka Panjang					
			Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	45,45	%			
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	55,99	%	4.245.900.000		
	Program Pembangunan 4.15 Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	45.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPAPPKB
	Kegiatan Pembangunan 4.15 1. Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak 2. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksplorasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya							
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	100	%	10.000.000		
			Persentase pelayanan ramah anak di rumah	100	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			sakit dan puskesmas					
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	100	%	423.256.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	10,3	%			
			Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	1,85	%			
			Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	13,81	%			
	Program Pembangunan 4.16 Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,5	%	260.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	DINDIKPORA
	Kegiatan Pembangunan 4.16 1. Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, dan Pencegahan Perilaku Berisiko 2. Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam							
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGP OL

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Ketenagakerjaan 3. Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik	Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik						
	Program Pembangunan 4.17 Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,66	%	10.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPAPPKB
	Kegiatan Pembangunan 4.17 1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Perempuan 2. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 3. Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan 4. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%			
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0028	%	42.842.200		
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0028	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kekerasan 5. Penguatan Penyelenggaraan PUG di Proses Pembangunan							
	Program Pembangunan 4.18 Peningkatan Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214	Sosial	DINSOS
	Kegiatan Pembangunan 4.18 1. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia 2. Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Proses Pembangunan		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%			
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%			
	Program Pembangunan 4.19 Peningkatan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	96,5	%	4.094.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	DINDIKPORA

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiat an Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 4.19 1. Pengembangan Budaya Olahraga 2. Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul 3. Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Internasional 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas 5. Peningkatan Partisipasi dan Penyelenggaraan Event/ Festival/Kompetisi Olahraga	Saing Keolahragaan	Persentase prestasi olahraga	62	%			
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	100	%	100.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

5.1.1.1.5 Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Tabel 5.6

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5 :

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	PRIORITAS NASIONAL: 05-MELANJUTKAN DALAM NEGERI	HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN	INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI					
	Program Pembangunan 5.1 Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27,42	%	674.979.613	Perindustrian	DINPERINAKER
	Kegiatan Pembangunan 5.1. 1. Hilirisasi Industri Berbasis Mineral Penting (Nikel, Tembaga, Bauksit) 2. Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, Rumput Laut) 3. Pengembangan Industri Medium-High Technology (Alat Angkut, Elektronik dan Digital, Kimia dan Farmasi) 4. Penguatan Produktivitas Industri Padat Karya Terampil (Makanan Minuman, TPT, dan Alas Kaki) 5. Penguatan Industri Dasar (Kimia Dasar dan Logam Dasar)		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%			
			Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,41	%			
			Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	79,63	%			
	Program Pembangunan 5.2. Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	Program Hubungan Industrial	Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83,37	%	80.000.000		
	Kegiatan Pembangunan 5.2 1. Perencanaan, Perizinan dan Tata Ruang KI/KEK Prioritas 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	dalam dan Luar KI/KEK Prioritas 3. Penyiapan Sumber Daya Manusia untuk KI/KEK Prioritas 4. Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok untuk KI/KEK Prioritas		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%			
			Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%			
		Program penataan bangunan gedung	Persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	200.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	73,97	%	200.000.000		
	Program Pembangunan 5.3. Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional Kegiatan Pembangunan 5.3. 1. Penguatan Layanan Konektivitas Backbone Integrasi Ekonomi 2. Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Sarana Penunjang Logistik 3. Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik 4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	613.000.000	Tenaga Kerja	
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	425.000.000		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%			
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%			
			Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,2	%			
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	1.029.911.600	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
			Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%			
			Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90	%			
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%	22.697.649.250	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%			
			Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	89,51	%			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42,03	%	18.589.072.100	Perhubungan	DINHUB

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	100	%			
			Persentase potensi titik parkir yang tertangani	99,12	%			
			Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%			
			Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%			
			Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,66	%			
			Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,86	%			
			Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64,09	%			
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik	69,34	%	200.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	Program Pembangunan 5.4. Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	7.000.000	Penanaman Modal	DPMPSTP
	Kegiatan Pembangunan 5.4 1. Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi		Persentase perusahaan yang bermitra	60	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	2. Peningkatan Investasi yang Berorientasi Ekspor dan Mendukung Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 3. Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	100	%	7.000.000		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	342.403.510		
			Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%			
			Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%			
			Persentase pengendalian penanaman modal	16	%			
			Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%			
Program Pembangunan 5.5 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	2,31	%	2.000.000	Perdagangan	DINKOPDAG	

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 5.5 1. Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global 2. Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi 3. Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi 4. Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA 5. Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif 6. Peningkatan Ekspor Produk UMKM dan Integrasi UMKM dalam Rantai Nilai Global 7. Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif Termasuk Electric Vehicle (EV) 8. Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 9. Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen							
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78,2	%	343.670.713	Perindustrian	DINPERINAKER
			Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	20,95	%			

JUMLAH

178.971.628.726

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

5.1.1.1.6 Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Tabel 5.7
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6:

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
6	PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN							
	Program Pembangunan 6.1 Pembangunan Wilayah Metropolitan							
	Kegiatan Pembangunan 6.1. 1. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan 2. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang 3. Pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta 4. Pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung 5. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang 6. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya 7. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar 8. Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin 9. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar 10. Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado							
	Program Pembangunan 6.2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 6.2 1. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara 2. Pembangunan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara 3. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia Ibu Kota Nusantara 4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara 5. Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara 6. Pemindahan dan Penyelenggaraan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara 7. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara							
	Program Pembangunan 6.3. Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,89	%	6.113.909.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 6.3.		Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,82	%			
	1. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%			
	2. Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%			
	3. Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan							
	4. Penguatan Ekosistem Perumahan							
	5. Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 6.4. Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	60	%	25.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINPERMADES
	Kegiatan Pembangunan 6.4 1.Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Perdesaan 2.Transformasi dan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan 3. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Perdesaan 4. Penguatan Tata Kelola dan Pendampingan Desa Adaptif 5. Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi 6. Transformasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 7. Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	60	%	3.993.000.000		
			Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80	%			
			Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%			
			Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39	%			
			Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39,47	%			
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	494.917.000		
			Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	%			
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	15.000.000			
	Program Pembangunan 6.5 Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89,73	%	693.500.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 6.5 1. Pengembangan Tata Kelola Registrasi Sosial Ekonomi 2. Penguatan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi 3. Sinkronisasi Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati dengan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,85	%	10.000.000		
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98,5	%	100.848.300		
			Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	1,3	%			
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	73,97	%	82.500.000	Statistik	Dinkominfo
	Program Pembangunan 6.6 Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosal (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	640.000.000	Sosial	DINSOS
Kegiatan Pembangunan 6.6 1. Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara Inklusif 2. Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional								
	Program Pembangunan 6.7 Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di	100	%	20.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 6.1. Pengembangan dan Sinkronisasi Pendanaan yang Berbasis Risiko2. Penerapan Graduasi Bantuan Sosial dan Penguatan Kemandirian Masyarakat melalui Kartu Usaha3. Penyaluran Bantuan Sosial yang Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan4. Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria5. Penguatan Pendamping Pembangunan		Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					
	Program Pembangunan 6.8 Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214		
	Kegiatan Pembangunan 6.8 1. Penyediaan Layanan Pengasuhan bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Rentan Lain 2. Pengembangan Pendanaan Perawatan/ Pengasuhan 3. Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%			
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%			
	Program Pembangunan 6.9 Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Kelompok Rentan	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162		
	Kegiatan Pembangunan 6.9 1. Penjangkauan Pendataan Kelompok Rentan 2. Akses yang Setara terhadap Perekonomian, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Sosial untuk Kelompok Rentan		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%			

JUMLAH

37.261.679.676

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

5.1.1.1.7 Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Tabel 5.8

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7:

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	PRIORITAS NASIONAL: 07-MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN							
	Program Pembangunan 7.1 Reformasi Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335	Kesatuan bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 7.1. 1. Penguatan Kode Etik, Demokrasi Internal, Sistem Kaderisasi, Sistem Rekrutmen, dan Tata Kelola Keuangan pada Partai Politik 2. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemilu dan Partai Politik 3. Penyusunan Pedoman/Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	20.000.000		
	Program Pembangunan 7.2. Reformasi Hukum	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	337.261.200	Pengawasan	INSPEKTORAT
	Kegiatan Pembangunan 7.2 1. Transformasi Tata Kelola Regulasi 2. Penerapan dan Penegakan Hukum 3. Penguatan Budaya Hukum		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%			
	Program Pembangunan 7.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 7.3. 1. Budaya Antikorupsi 2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	%			
	Program Pembangunan 7.4. Penguatan Kelembagaan Hukum	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	31.896.029.325		SETDA
	Kegiatan Pembangunan 7.4 1. Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman 2. Penguatan Lembaga Hukum di Bidang Pelayanan, Penerapan, dan Pembangunan Hukum		Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%			
			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%			
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%			
			Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%			
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%			
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%			
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%			
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	628.546.400	Pengawasan	INSPEKTORAT
			Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%			
			Persentase penanganan aduan masyarakat	100	%			
			Persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%			
	Program Pembangunan 7.5 Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal							
	Kegiatan Pembangunan 7.5 1. Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara 2. Peningkatan Jumlah, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jaksa							
	Program Pembangunan 7.6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Program Penguatan Ideologi	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan	90	%	700.000.000	Kesatuan bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 7.6 1. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Narkoba, dan Pengembangan Keterampilan Hidup Sehat, Terutama Dimulai dari Keluarga dan Sekolah 2. Optimalisasi Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika 3. Meningkatkan Program Deteksi Dini Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa 4. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberantasan Narkoba 5. Memperkuat Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba 6. Meningkatkan Kemampuan Surveillance dan Intelijen P4GN	Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	karakter kebangsaan					
	Program Pembangunan 7.7 Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur			456.750.000	Kepegawaian	BKPSDM
	Kegiatan Pembangunan 7.71.Manajemen Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja SDM Aparatur2.		Cakupan Pengembangan SDM Aparatur					
	Penguatan Manajemen Talenta dan Karier ASN3. Penguatan Kepemimpinan, Budaya Kerja, dan Citra Institusi4. Perluasan		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur					

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Akses Belajar bagi ASN5.Perbaikan Sistem Pelayanan Kepegawaian melalui Platform Tunggal Manajemen ASN6. Penyederhanaan dan Penguatan Proses Bisnis Pemerintah7. Penataan Kelembagaan Program Pembangunan dan Prioritas Nasional9. Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah10. Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan							
	Program Pembangunan 7.8 Inklusivitas dan Transformasi Digital Layanan Publik	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125		DINKOMINFO
	Kegiatan Pembangunan 7.8 1. Menciptakan Pemerintahan yang Berbasis Digitalisasi untuk Menciptakan Pemerintahan yang Transparan, Inklusif, dan Efisien 2. Digitalisasi Pelayanan Publik 3. Pengembangan Talenta Digital Pelayanan Publik 4. Penguatan Ekosistem Digital Pelayanan Publik 5. Perluasan Akses Pelayanan Publik		Persentase layanan publik secara elektronik	55	%			
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	60	%		Kearsipan	DINPUSIP
			Persentase audit internal kearsipan	73,33	%	20.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	16	%	404.961.000	Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Pembangunan 7.9 Peningkatan Produktivitas BUMN							
	Kegiatan Pembangunan 7.9 1. Peningkatan Daya Saing BUMN 2. Efisiensi Peran BUMN dalam Penugasan Pemerintah							
	Program Pembangunan 7.10 Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9	%		Keuangan	BPKPAD
	Kegiatan Pembangunan 7.10 1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan 2. Optimalisasi Local Taxing Power 3. Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu	100	%			
			Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	95,5	%			
			Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	100	%			
	Program Pembangunan 7.11 Optimalisasi Optimalisasi Belanja Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory	100	%	410.851.694.364		BPKPAD

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			spending dalam APBD					
	Kegiatan Pembangunan 7.11 1. Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah Pusat 2. Optimalisasi Kualitas Belanja TKD 3. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%			
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%			
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	%			
			Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%			
	Program Pembangunan 7.12 Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan							
	Kegiatan Pembangunan 7.121. Optimalisasi Sumber-Sumber Pembiayaan Utang yang Menjaga Kestimbangan Fiskal2. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pembiayaan Non-utang yang Inovatif							
	Program Pembangunan 7.13 Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.225.335.800		SETDA
	1. Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%			
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%			
			Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%			
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%			
			Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%			
			Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			dilaksanakan (tender)					
			Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%			
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%			
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	30.000.000	Perdagangan	DINKOPDAG
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	99,41	%	30.000.000		
	Program Pembangunan 7.14 Pelindungan WNI di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia dan Keamanan Insani	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih	6,92	%	946.000.000	Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 7.14 1. Peningkatan Pelindungan Terhadap Seluruh Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Tenaga Kerja Indonesia 2. Penanganan Konflik Sosial		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%			
			Persentase penegakan Perda/Perbup	100	%			
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000	Kesatuan bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
JUMLAH						453.215.735.274		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

5.1.1.1.8 Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Tabel 5.9

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8:

Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
8	PRIORITAS NASIONAL: 08-MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAIPI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR							
	Program Pembangunan 8.1 Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKEBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 8.1. 1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	20.000.000		

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	2. Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis 3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan 5. Transformasi Layanan Kua yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif 6. Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman 7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000		
	Program Pembangunan 8.2. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	8,2	%	7.580.000.000	Kebudayaan	DINBUDPAR
	Kegiatan Pembangunan 8.2		Persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%			
	1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa		Persentase pelestarian Sejarah Lokal	9,25	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Berdasarkan Pancasila 2. Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya 3. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan 4. Jaminan Hak Berkebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 5. Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia 6. Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah 7. Transformasi Layanan Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	13,18	%			
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
								97.500.000
	Program Pembangunan 8.3. Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,3	Angka	250.000.000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 8.3. 1. Peningkatan Ketahanan Pesisir dan		Indeks Kualitas Udara	83,87	Angka			
			persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiata n Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Laut 2. Pembangunan dan Konservasi Sumber Daya Air 3. Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sensitif Iklim 5. Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pengelolaan Keanekaragama n Hayati (Kehati)	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	65	%	380.000.000		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30	%	70.000.000		
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,5	%	3.525.000.000		
			Cakupan layanan persampahan	66,44	%			
		Program Pembangunan 8.4. Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%		
	Kegiatan Pembangunan 8.4 1.Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi 2. Peningkatan Layanan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	%			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana 3. Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 4. Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana 5. Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%			
		Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	330.294.000		SATPOL PP DAMKAR
			Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%			
			Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	%			
			Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6,15	%			
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	167.500.000	Sosial	DINSOS	
JUMLAH						13.909.588.000		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan program daerah dalam RPD 2025-2026 dan dukungan program daerah RKPD 2025 untuk mendukung program prioritas/kegiatan prioritas pada PN RKP Tahun 2025 yang secara rekapitulasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.10
Dukungan Program Daerah dalam RKD Tahun 2025-2026 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2025

No	Jumlah Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2025			Dukungan Program Daerah RPD/RKPD Tahun 2025			
	Prioritas Nasional	Program Pembangunan	Kegiatan Prioritas	RPD Tahun 2024-2026		RKPD Tahun 2025	
				Program Daerah	Persentase	Program Daerah	Persentase
1	PN 1	5	10	13	100%	13	100%
2	PN 2	24	143	24	100%	24	100%
3	PN 3	8	36	9	100%	9	100%
4	PN 4	19	70	18	100%	18	100%
5	PN 5	5	23	15	100%	15	100%
6	PN 6	9	44	14	100%	13	100%
7	PN 7	14	36	17	100%	17	100%
8	PN 8	4	25	21	100%	13	100%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Keterangan : RKP 2025 belum dipublikasikan sehingga sementara memakai RKP 2025

5.1.1.2 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pembangunan berkolaborasi dengan semua unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non-Pemerintah, Akademisi, media massa, perusahaan, komunitas, dan masyarakat.

Kebijakan pembangunan daerah menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan prioritas kegiatan yang berdaya ungkit besar pemantapan reformasi birokrasi, percepatan pengurangan kemiskinan, pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan.

Tabel 5.11
**Rekapitulasi Dan Penjabaran Dukungan Program dan Anggaran
Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung
Tahun 2025**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Perumahan dan Permukiman	1. Program pengelolaan pendidikan	151.865.540.775	DINDIKPORA
		2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	226.145.645.214	DINKES
		3. Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	10.000.000	
		4. Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	445.344.000	
		5. Program kawasan permukiman	6.113.909.000	DPRKPLH
		6. Program Rehabilitasi Sosial	732.671.162	DINAS SOSIAL
		7. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	24.340.334.214	
		8. Program Penanganan Bencana	167.500.000	BPBD
		9. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	9.081.058.000	DPUPR
		JUMLAH	418.902.002.365	
2	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	1. Program perlindungan dan jaminan sosial	24.340.334.214	DINAS SOSIAL
		2. Program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	13.000.000	DISNAKER
		3. Program Penempatan Tenaga Kerja	425.000.000	
		4. Program Hubungan Industrial	80.000.000	
		5. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	10.000.000	DINKOPDAG
		6. Program Pengembangan UMKM	95.000.000	
		7. Program Pengawasan dan	25.000.000	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
		Pemeriksaan Koperasi		
		8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	674.979.613	
		9. Program Pengembangan Ekspor	20.000.000	
		10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	30.000.000	
		11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	30.000.000	
		12. Program pengembangan daya tarik destinasi wisata	190.000.000	DINBUDPAR
		13. Program Pengembangan Kebudayaan	7.580.000.000	
		14. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	30.000.000	DKPPP
		15. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.047.730.900	
		16. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	651.725.000	
		17. Program Penyuluhan Pertanian	260.000.000	
		18. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10.000.000	
		19. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	235.000.000	
		20. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.164.704.000	DPUPR
		21. Program Penyelenggaraan Jalan	22.697.649.250	
		22. Program Peningkatan Kerjasama Desa	15.000.000	Dinpermades
		23. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan	494.917.000	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
		Masyarakat Hukum Adat		
		24. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.589.072.100	Dinhub
		25. Program pengembangan iklim penanaman modal	7.000.000	DPMPTSP
		26. Program Promosi Penanaman Modal	7.000.000	
		JUMLAH	94.066.782.790	
3	Pemantapan Reformasi Birokrasi	1. Program Kepegawaian Daerah	330.762.000	BKPSDM
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	456.750.000	
		3. Program Penyelenggaran Pengawasan	628.546.400	INSPEKTORAT
		4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	337.261.200	
		5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	509.474.400	BAPPEDA
		6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	606.932.500	
		7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	697.772.800	
		8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.723.383.200	BPKPAD
		9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.848.300	DINDUKCAPIL
		10. Program Pendaftaran Penduduk	693.500.000	
		11. Program Pencatatan Sipil	10.000.000	
		12. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.848.300	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
		13. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.528.595.335	BANKESBANGPOL
		14. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.000.000	DPMPTSP
		15. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	404.961.000	
		16. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	946.000.000	SATPOL PP DAMKAR
		17. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.029.911.600	
		18. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	538.568.000	
		19. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.391.297.995	SETDA
		20. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	31.896.029.325	
		21. Program Perekonomian dan Pembangunan	1.225.335.800	
		22. Program Pengelolaan Arsip	20.000.000	
		23. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.680.615.905	SEKRETARIAT DPRD
		24. Program Penanggulangan Bencana	330.294.000	BPBD
		25. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.029.911.600	DINKOMINFO
		JUMLAH	97.530.091.570	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Tabel 5.12

Dukungan Program Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung:
Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DPRKPLH	1	Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	1	Program Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	95.89	%	6.113.909.000
						persentase kawasan kumuh perkotaan	4.82	%	
						persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	
						persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	
2	Dinas Sosial	2	Sosial	2	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
				3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214
						persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
						Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
						persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	
						persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
				4	Program Penanganan bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	167.500.000
4	Dinas Pendidikan	4	Pendidikan	5	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81.72	%	151.865.540.775

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44.55	%	
						persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77.75	%	
						persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90.55	%	
						persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
						persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49.99	%	
						persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
						Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0.03	Angka	
						persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
						persentase APM SD Sederajat	98.7	%	
						persentase APK SD Sederajat	104.69	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0.01	Angka	
						Rasio Siswa/Guru SD	0.0611111	Angka	
						Rasio Siswa/Rombel SD	0.0611111	Angka	
						persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
						persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61.32	%	
						persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
						persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
						Rasio Jumlah Pengawas SD	0.1	Angka	
						persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91.49	%	
						persentase APM SMP Sederajat	89	%	
						persentase APK SMP Sederajat	98.77	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98.9	%	
						Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0.16	Angka	
						Rasio Siswa/Guru SMP	0.0638889	Angka	
						Rasio Siswa/Rombel SMP	0.0638889	Angka	
						persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
						persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	100	%	
						persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
						persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
						Rasio Jumlah Pengawas SMP	0.08	Angka	
						persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96.67	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
						persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
						persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
						persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%	
						persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%	
5	Dinas Kesehatan	5	Kesehatan	6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH	
						Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
						Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal	
						Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
						Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
						persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
						persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
						Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH	
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
						Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH	
						Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
						persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal	
						persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
						Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%	
						persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						(ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
						persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
						persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
						Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk	
						Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
						persentase rumah sehat	87.6	%	
						persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%	
				7	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26.9	%	10.000.000
				8	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	445.344.000
					Program pengelolaan dan pengembangan	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,70	%	9.081.058.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
					sistem penyediaan air minum				
						Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	
Jumlah									418.902.002.365

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Tabel 5.13

Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DPMPTSP	1	Penanaman Modal	1	Program Promosi Penanaman Modal	persentase promosi penanaman modal	50	%	7.000.000
				2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	7.000.000
						persentase perusahaan yang bermitra	60	%	
2	Dinperinaker	2	Perindustrian	4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78	%	343.670.713
						persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	21	%	
		3	Tenaga Kerja	5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan	73	%	13.000.000

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						pelatihan berbasis kompetensi			
						persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
				6	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	425.000.000
						persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%	
						persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%	
						persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%	
				7	Program Hubungan Industrial	persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83	%	80.000.000
						persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%	
						persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%	
						persentase perselisihan hubungan	100	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						industrial yang selesai melalui mediasi			
3	Dinbudpar	4	Kebudayaan	8	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	8	%	7.580.000.000
						persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	
						persentase pelestarian Sejarah Lokal	9	%	
						persentase Pelestarian Cagar Budaya	13	%	
		5	Pariwisata	9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0	%	190.000.000
						Lama Tinggal Wisatawan	1	hari	
						persentase Peningkatan Desa Wisata	15	%	
						persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	
4	Dinkopdag	6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	1	%	95.000.000
				11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	7	%	10.000.000
				12	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persentase koperasi sehat	48	%	25.000.000

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
		7	Perdagangan	13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27	%	674.979.613
						persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	
						persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2	%	
						persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	80	%	
				14	Program Pengembangan Ekspor	cakupan pelaku usaha yang di bina	2	%	20.000.000
				15	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	30.000.000
				16	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	100	%	30.000.000
5	DKPPP	8	Pertanian	17	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	62	Kuintal/ha	30.000.000
						Produktivitas jagung	55	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Produktivitas cabai rawit	51	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai besar	66	Kuintal/ha	
						Produktivitas tembakau	6	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi robusta	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi arabika	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas ternak sapi	178	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak domba	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak kambing	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam ras pedaging	1	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam petelur	11	Kg/Ekor	
						persentase kelahiran pedet	56	%	
				18	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	8.047.730.900
				19	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase penanganan penyakit hewan	87	%	651.725.000
						persentase pengawasan produk hewan dan	77	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat			
				20	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1	%	260.000.000
		9	Kelautan dan Perikanan	21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	23	kg/kapita/tahun	10.000.000
				22	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1	kg/m2	235.000.000
						Produktivitas ikan lele	13	kg/m2	
6	DPUPR	10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase jaringan irigasi kondisi baik	59	%	9.164.704.000
						Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	98	%	
				25	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase Jalan Kondisi Mantap	90	%	22.697.649.250
						persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%	
						persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	20	%	
7	Dinpermades	11	Pemberdayaan Masyarakat Desa	26	Program Peningkatan Kerjasama Desa	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	15.000.000

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				27	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	494.917.000
						persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	%	
8	Dinhub	12	Perhubungan	28	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42	%	18.589.072.100
						persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	35	%	
						persentase potensi titik parkir yang tertangani	99	%	
						persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
						persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
						persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	100	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	34	%	
						persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64	%	
Jumlah									94.066.782.790

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Tabel 5.14

Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung : Reformasi Birokrasi

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	BKPSDM	1	Kepegawaian	1	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	42.36	%	330.762.000
						Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86.58	%	
		2	Pendidikan dan Pelatihan	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pembinaan SDM aparatur	97	%	456.750.000
2	BAPPEDA	3	Penelitian dan Pengembangan	3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	606.932.500
						Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	100	%	
3	Inspektorat	4	Inspektorat Daerah	4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan	75	%	628.546.400

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi			
						persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%	
						persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%	
						persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
						persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%	
				5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%	337.261.200
						Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	
						Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
						Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level	
4	BAPPEDA	5	Perencanaan	6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	509.474.400

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	
				7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	697.772.800
						Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%	
						Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	
						Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%	
5	BPKPAD	7	Keuangan	8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	1.723.383.200
						persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
						persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
						Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
6	Dinkominfo	8	Komunikasi dan Informatika	9	Program Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125
						persentase layanan publik secara elektronik	55	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	35	%	1.029.911.600
						persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
						persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	85	%	
		9	Persandian	10	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	persentase penilaian resiko keamanan informasi	66.7	%	47.000.000
						persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	60	%	
		10	Statistik	11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	82.500.000
7	Dindukcapil	11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99.85	%	10.000.000
8		12		13	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98.5	%	100.848.300
						persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	1.3	%	
					Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89,73	%	693.500.000
					Program Pengelolaan	Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	98,5	%	100.848.300

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
					Informasi Administrasi Kependudukan				
9	Bakesbangpol	13	Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335
10	DPMPTSP	14	Penanaman Modal	17	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	342.403.510
						persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
						persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	
				18	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	16	%	404.961.000
11	Sekretariat Daerah	15	Sekretariat Daerah	19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	33.391.297.995
						Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
						Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	23.9	%	
						Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
				20	Program Pemerintahan dan	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	31.896.029.325

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
					Kesejahteraan Rakyat				
						persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
						persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
						persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
						persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
						persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
						persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
						persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
						persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%	
				21	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.225.335.800
						persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
						persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83.33	%	
						persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	
						persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
						persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	
						persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%	
						persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%	
12	Dinpusip	16	Kearsipan	22	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	60	%	20.000.000
						Persentase audit internal kearsipan	73.33	%	
13	Sekretariat DPRD	17	Sekretariat DPRD	23	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	19.680.615.905
						persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	#N/A	%	
						persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%	
						persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100	%	
14	Satpol PP Damkar	18	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Dungandungan Masyarakat	24	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase Satlinmas yang teratih	6.92	%	946.000.000
						persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
						persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
				25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	538.568.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	
						persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6.15	%	
				26	Program Penanggulangan Bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	330.294.000
						persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
						persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
					Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214
						Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
						Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
						Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	
						Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
						Jumlah			97.530.091.570

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

5.1.2 Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Konsep Tematik

Penerapan konsep tematik telah diterapkan dalam pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2025 adalah : (1) Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, (2) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dan (3) Reformasi Birokrasi

Konsep Holistik

Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain gerakan penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, gerakan penanganan kemiskinan, dan gerakan penanganan stunting.

Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain kegiatan penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berkolaborasi

dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD dan masih banyak lainnya. Penerapan konsep integratif terkait pelibatan *stakeholders* di luar OPD di daerah Kabupaten Temanggung diantaranya aktor non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amil zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJLSP dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula pemanfaatan media informasi kreatif dalam proses perencanaan dengan melibatkan media sosial/media massa.

Konsep Spasial

Penerapan konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur yang dilaksanakan di semua kecamatan dengan salah satu tujuannya tidak ada kesenjangan antar wilayah, dan hasilnya pemetaan juga dapat dilihat dalam bentuk peta/spasial.

Tabel 5.15

Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2025 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatanm Pendidikan, dan Sosial	1. Program Pengembangan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
		2. Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
		3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
		4. Program pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan
		5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUPR
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	DPUPR
2	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	1. Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
		2. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Dinsos
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinsos
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
			Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Potensial	Dinsos
		4. Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos
		5. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Dinperinaker
		6. Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Dinperinaker
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinperinaker

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinperinaker
			Job Fair/Bursa Kerja	Dinperinaker
		7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
		8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinkopdag
			Pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
			Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
		9. Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Dinkopdag
		10. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinkopdag
		11. Program Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota	Dinkopdag
		12. Program Standardisasi dan Perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinkopdag
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinkopdag
		13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinperinaker
		14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		15.Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pengelolaan data tarik wisata kabupaten	Dinbudpar
		16.Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
		17.Program Pengendalian Penduduk	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPPAPPKB
		18.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPPAPPKB
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPPAPPKB
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPPAPPKB
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPPAPPKB
		19.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPPAPPKB
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
		20.Program Pengelolaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	DPUPR

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi/Pemeliharaan /Pembinaan Petani Pemakai Air	DPUPR
			Penyusunan DED Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	DPUPR
			Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	DPUPR
		21.Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
		22.Program Penanggulangan Bencana	Penanganan pasca Bencana Kabupaten	BPBD
		23.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan jamban keluarga	Dinas Kesehatan
			Pembangunan septic tank	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		24.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Lantaijemur	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Rice Milling Unit (RMU)	DKPPP
			Fasilitasi dan distribusi akses pangan	DKPPP
		25.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani pekarangan	DKPPP
			Pemberdayaan lumbung Pangan masyarakat	DKPPP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	DKPPP
			Pengisian gudang cadangan pangan dalam	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			antisipasi kerawanan pangan	
			Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	DKPPP
			Pendampingan P2KP	DKPPP
		26.Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan prasarana pertanian	DKPPP
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian
		28.Program Penataan Desa	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Dinpermades
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin SMP/MTs	Dindikpora
			Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Dindikpora
			Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Dindikpora
			BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dindikpora
		29.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	DPM
		30.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasarandan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinkopdag
		31.Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan <i>matchmaking</i> dan pameran investasi	DPM
		32.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
		33.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinperinaker
		34.Program Peningkatan Daya	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		Tarik Destinasi Pariwisata	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
		35.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan	DKPPP
		36.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Kawasan Hortikultura	DKPPP
			Pengembangan Tanaman Kopi	DKPPP
			Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	DKPPP
			Pengembangan Padi Organik	DKPPP
			Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung	DKPPP
			Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat	DKPPP
			Pengembangan Buah unggulan	DKPPP
			Pengadaan Alat Pertanian Perkebunan dan Pelatihan pendidikan	DKPPP
			Pengembangan Sistem pembenihan Mandiri Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Pengembangan Sistem Pembenihan Buah Unggulan	DKPPP
			Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura (Statistik Pertanian)	DKPPP
			Pengelolaan Database Pertanian	DKPPP
			Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres	DKPPP
			Optimalisasi Kebun Pemda	DKPPP
			Intensifikasi Tanaman Cengkeh	DKPPP
			Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		37.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Fasilitasi DAK Pertanian	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Hortikultura	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Tanaman Pangan	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Hortikultura	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	DKPPP
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	DKPPP
		38.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Hama Tikus	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau	DKPPP
		39.Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	DKPPP
			Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Teknologi Pertanian	DKPPP
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	DKPPP
			Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan	DKPPP
			Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		40. Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Temanggung	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
3	Reformasi Birokrasi	1. Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	BKPSDM
			Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Pelaksanaan Updating Data kepegawaian	BKPSDM

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM
		3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappeda
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappeda
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda
		4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Inspektorat
			Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
		5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
			Prosentase penanganan aduan masyarakat	Inspektorat
		6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Bappeda
			Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Monitoring Program dan Daerah Kegiatan Perangkat Daerah	Bappeda
		7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPAD
			Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	BPKPAD
			Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPAD
			Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	BPKPAD
			Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPAD
		9. Program Aplikasi Informatika	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Pengelolaan Pusat Data	Dinkominfo

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pemerintahan Daerah	
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dinkominfo
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinkominfo
		10.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	Dinkominfo
		11.Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinkominfo
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
		12.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	Dinkominfo
		13.Program Pencatatan Sipil	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dindukcapil
			Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Dindukcapil
		14.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
		15.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksana Koordinasi di bidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Badan Kesbangpol
		16.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan penanaman modal	DPM
			Pengkajian potensi investasi pariwisata	DPM
			Pengkajian potensi investasi UMKM	DPM
			Pengkajian potensi investasi pertanian	DPM
			Pengembangan potensi unggulan daerah	DPM

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		17.Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	DPM
			Sosialisasi kebijakan Penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan	DPM
			Diseminasi promosi investasi	DPM
		18.Program Pelayanan Penanaman Modal	Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan	DPM
			Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu	DPM
			Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	DPM
			Fasilitasi Pengaduan dan advokasi	DPM
		19.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelenggaraan Temu Usaha	DPM
			Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	DPM
			Monev PATEN	DPM
			Monev dan Pelaporan LKPM	DPM
		20.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
			Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP	Bagian Organisasi
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Forkompim
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Pembangunan, Bagian PBJ
		21.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra
		22.Program Pengelolaan Arsip	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinpusip
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinpusip
		23.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Kajian Perundang undangan	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Sekretariat DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD
		24.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Satpol PP Damkar
			Rasio linmas per RT	Satpol PP Damkar
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Satpol PP Damkar
		25.Program Pencegahan Penanggulangan,P enyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	Satpol PP Damkar
			Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	Satpol PP Damkar

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		26.Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	BPBD
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Bagian Perekonomian

Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.

5.1.3 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah

1. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 5.16
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pengelolaan Pendidikan	151.865.540.775	DINDIKPORA
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.145.645.214	DINKES
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.000.000	DINKES
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.081.058.000	DPUPR
5	Program Kawasan Permukiman	6.113.909.000	DPRKPLH
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	946.000.000	SATPOL PP dan DAMKAR
7	Program Penanggulangan Bencana	330.294.000	BPBD
8	Program Pemberdayaan Sosial	640.000.000	DINSOS
9	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000	DINSOS

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
10	Program Rehabilitasi Sosial	732.671.162	DINSOS
11	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	24.340.334.214	DINSOS
12	Program Penanganan Bencana	167.500.000	DINSOS
JUMLAH		420.392.952.365	

Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.

2. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2025

Tabel 5.17

Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Bimtek pendidikan pengasuhan, ketrampilan menjadi orang tua, ketrampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, dan penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga	35.000.000	DPPPAPPKB	Kelurahan Kranggan, Kranggan
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	78.000.000	Dinperinaker	Desa Pingit, Pringsurat
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pelatihan dan pengembangan anggrek di wilayah Kelurahan Jampirejo (Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian)	150.000.000	DKPPP	TEMANGGUNG
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembangunan Gedung UMKM untuk Display dan Pengadaan Sarpras Pendukung UMKM (kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan	320.000.000	DINKOPDAG	BANSARI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
		Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan)			
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (pembelian mebeler buku dan PC)	150.000.000	DINPUSIP	TEMANGGUNG
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Revitalisasi Lapangan Jaten (senderan lapangan sebelah timur dan sebelah selatan)	824.000.000	DINDIKPORA	Kel. Madureso, Temanggung
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan lampu jalan ruas jalan Jumo - Ketitang	460.000.000	DINHUB	Jumo
9	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan RTLH	714.000.000	DPRKPLH	Kaloran
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Kebraman – Gemawang	563.000.000	DPUPR	Gemawang
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan ruas jalan Kacepit-Bumiayu	365.000.000	DPUPR	Selopampang
12	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Ngimbrang - batas Bansari	738.000.000	DPUPR	Bulu
13	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Jurang-Salamsari (lanjutan BanGub)	845.000.000	DPUPR	Ngadirejo
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Kalirejo-Bansari	605.000.000	DPUPR	Kedu
15	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi jalan ruas jalan Bejen – Congkrang	487.000.000	DPUPR	Kledung
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Pingit - Wonokerso (batas kabupaten)	545.000.000	DPUPR	Pringsurat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
17	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyediaan Sarpras Posyandu	700.000.000	DPUPR	Pringsurat
18	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukaan Kalimandang	612.000.000	DPUPR	Kranggan
19	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Wonoboyo - Pringlegi	509.000.000	DPUPR	Wonoboyo
20	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	800.000.000	DPUPR	Kandangan
21	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	693.000.000	DPUPR	Parakan
22	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	616.000.000	DPUPR	Candiroto
23	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	415.000.000	DPUPR	Tretep

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
24	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	360.000.000	DPUPR	Tlogomulyo
25	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Menggoro-Kemloko	495.000.000	DPUPR	Tembarak
JUMLAH		12.079.000.000			

Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.

3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.18
Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81.72	%	151.865.540.775	Dindikpora
		persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44.55	%		
		persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77.75	%		
		persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90.55	%		
		persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/ Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%		
		persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49.99	%		
		persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan	100	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak				
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0.03	Angka		
		persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%		
		persentase APM SD Sederajat	98.7	%		
		persentase APK SD Sederajat	104.69	%		
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0.02	Angka		
		Rasio Siswa/Guru SD	0	Angka		
		Rasio Siswa/Rombel SD	0	Angka		
		persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%		
		persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61.32	%		
		persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0.1	Angka		
		persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91.49	%		
		persentase APM SMP Sederajat	89	%		
		persentase APK SMP Sederajat	98.77	%		
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98.9	%		
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0.16	Angka		
		Rasio Siswa/Guru SMP	0	Angka		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Rasio Siswa/Rombel SMP	0	Angka		
		persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%		
		persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66.25	%		
		persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0.08	Angka		
		persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96.67	%		
		persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%		
		persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%		
		persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH		
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%		
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal		
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%		
		persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%		
		persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%		
		Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%		
		Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH		
		Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%		
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal		
		persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%		
		persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%		
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%		
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%		
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk		
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%		
		persentase rumah sehat	87.6	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95.7	%	9.081.058.000	DPUPR
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%		
4	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88.4	%	316.091.000	DPRKPLH
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95.89	%	6.113.909.000	DPRKPLH
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	4.82	%		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%		
6	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%		
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214	Dinas Sosial
		persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%		
		persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%		
Jumlah					418.595.249.365	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022 Kabupaten Temanggung menjadi kabupaten percontohan penanganan perkawinan anak usia dini dan pencegahan stunting oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 1) Rapat Koordinasi; 2) Sosialisasi dan 3) *Forum Group Discussion* (FGD)

Selain itu juga dilakukan penelitian secara khusus oleh Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc dan tim di Desa Wadas Kecamatan Kandangan sebagai desa dengan kasus stunting tertinggi dan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari sebagai desa dengan kasus stunting rendah. Universitas Diponegoro Semarang juga melakukan penelitian tentang indeks resiko stunting dan determinan penurunan kejadian stunting tahun 2018-2021 di Kabupaten Temanggung. Guna menunjang kegiatan sebagaimana di maksud, maka dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.19
Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting
Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	226.145.645.214	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.245.900.000	DPPPAPPKB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.081.058.000	DPUPR
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.293.884.000	DPPPAPPKB
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.245.900.000	DPPPAPPKB
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	DPPPAPPKB

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	DPPPAPPKB
8	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18.460.436.207	DKPPP
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.340.334.214	Dinas Sosial
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	151.865.540.775	Dindikpora
Jumlah Total			445.733.698.410	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berkelanjutan/SDGs, pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender dan didukung oleh sebagian besar perangkat daerah beserta lembaga non pemerintah. Program daerah yang mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantun dalam tabel berikut:

Tabel 5.20

Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
I	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 4	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
II	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3 tujuan 6 tujuan 13	V	V
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	tujuan 3	V	V
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	tujuan 3	V	V
III	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	tujuan 6	V	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tujuan 1 tujuan 6		V
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tujuan 1	V	
4	Program Pengembangan Permukiman	tujuan 1	V	V
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Tujuan 9	V	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	tujuan 9	V	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tujuan 9 Tujuan 11 Tujuan 13	V	
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tujuan 9	V	
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tujuan 9	V	
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
1	Program Pengembangan Perumahan	tujuan 1 tujuan 6		V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	tujuan 1 tujuan 6 tujuan 11		V
V	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Program Penanggulangan Bencana	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 13	V	
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			V
3	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban Umum			V
VI	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3	V	V
2	Program Rehabilitasi Sosial	tujuan 3	V	
3	Program Pemberdayaan Sosial			V
VII	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	tujuan 1 tujuan 8	V	V
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	tujuan 8	V	V
3	Program Hubungan Industrial	tujuan 8 tujuan 10	V	
VIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tujuan 5 tujuan 16	V	V
2	Program Perlindungan Perempuan	tujuan 16 tujuan 5 tujuan 10	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	tujuan 3		V
4	Program Pemenuhan Hak Anak	tujuan 16	V	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	tujuan 10	V	
IX	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	tujuan 2 tujuan 13	V	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	tujuan 2 tujuan 8 tujuan 13	V	
X	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tujuan 6 tujuan 9 tujuan 12 tujuan 13	V	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	tujuan 13	V	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	tujuan 6 tujuan 11 tujuan 13 tujuan 15	V	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	tujuan 6 tujuan 12 tujuan 13	V	
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tujuan 6	V	
6	Program Pengelolaan Persampahan	tujuan 1 tujuan 12 tujuan 11 tujuan 13	V	V
XI	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
1	Program Pencatatan Sipil	tujuan 1 tujuan 16 tujuan 17	V	V
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tujuan 16	V	V
3	Program Pendaftaran Penduduk	tujuan 16	V	V
XII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
1	Program Penataan Desa	tujuan 10	V	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	tujuan 10	V	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	tujuan 10	V	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	tujuan 10	V	
5	Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			V
6	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			V
XIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
1	Program Pengendalian Penduduk	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
3	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	tujuan 3	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
XIV	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	tujuan 8 tujuan 9	V	
2	Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	tujuan 8	V	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			V
XV	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik			
1	Program nformasi dan Komunikasi Publik	tujuan 16	V	V
2	Program Aplikasi Informatika	tujuan 4 Tujuan 9	V	V
XVI	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuan 3 Tujuan 11	V	
XVII	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi			
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Tujuan 8		V
XVIII	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	tujuan 1 tujuan 4 tujuan 8	V	
XIX	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	tujuan 8	V	
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tujuan 11	V	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
4	Program Pembinaan Perpustakaan			V
XX	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tujuan 2 tujuan 8	V	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tujuan 8	V	
XXI	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	tujuan 8	V	
2	Program Pemasaran Pariwisata	tujuan 8	V	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	tujuan 8	V	
XXII	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	tujuan 2 tujuan 13	V	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tujuan 13	V	
3	Program Pengendalian bencana Pertanian	Tujuan 13	V	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Tujuan 13	V	
XXIII	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
1	Program Pengembangan Ekspor	tujuan 17	V	
2	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Tujuan 12	V	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
XXIV	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	tujuan 8		V
XXV	Sekretariat Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tujuan 1 tujuan 4	V	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tujuan 12 tujuan 16 tujuan 17	V	V
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	tujuan 16 tujuan 8	V	V
4	Program Administrasi Umum	tujuan 16	V	
XXVI	Perencanaan			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tujuan 11	V	V
2	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 17	V	V
3	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			V
XXVII	Keuangan			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	tujuan 16 tujuan 17	V	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tujuan 16	V	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tujuan 16 Tujuan 17	V	
XXVIII	Kepegawaian			
1	Program Kepegawaian Daerah		V	
XXIX	Pendidikan Dan Pelatihan			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	tujuan 5 tujuan 16	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
XXX	Penelitian Dan Pengembangan			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	tujuan 1 tujuan 9	V	
XXXI	Inspektorat Daerah			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		V	V
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		V	
XXXII	Kecamatan			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		V	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		V	
XXXIII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	tujuan 5		V
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Tujuan 3	V	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Berdasarkan pemetaan Indikator SDG's dalam dokumen perencanaan daerah terdapat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, dan indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Beberapa indikator SDG's yang bukan merupakan kewenangan daerah otomatis tidak ada dukungannya di Renja maupun RKPD. Hasil pemetaan indikator SDG's sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.21
Pemetaan Indikator SDG's dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
1	Indikator Kinerja Tujuan	1	4	-	-	5
2	Indikator Kinerja Sasaran	8	4	4	3	19
3	Indikator Kinerja Program	60	7	9	14	90
4	Indikator Pada Renstra PD	4	8	18	6	36
5	Indikator Bukan Kewenangan	6	5	-	4	15
Jumlah		79	28	31	27	165

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsive gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 5.22
*Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender
(PUG) Kabupaten Temanggung*

NO	PROGRAM	Anggaran	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	10.000.000	DPPAPPPKB
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000	DPPAPPPKB
3	Program Perlindungan Perempuan	42.842.200	DPPAPPPKB
4	Program Pengendalian Penduduk	423.256.000	DPPAPPPKB
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana	7.293.884.000	DPPAPPPKB
6	Program Pendaftaran Penduduk	693.500.000	DINDUKCAPIL
7	Program Pencatatan Sipil	10.000.000	DINDUKCAPIL
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	674.979.613	DINKOPDAG
9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	30.000.000	DINKOPDAG
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	330.000.000	DINKOPDAG
11	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	613.000.000	DINPERINAKER
12	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	31.896.029.325	SETDA
13	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.225.335.800	SETDA
14	Program Pembinaan Perpustakaan	1.211.407.950	DINPUSIP
15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	456.750.000	BKPSDM
16	Program Penyelenggaraan Pengawasan	628.546.400	INSPEKTORAT
17	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	509.474.400	BAPPEDA
18	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	509.474.400	BAPPEDA
19	Program Pelayanan Penanaman Modal	342.403.510	DPM
20	Program Pemberdayaan Sosial	640.000.000	DINSOS

NO	PROGRAM	Anggaran	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
21	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.029.911.600	DINKOMINFO
22	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.029.911.600	SATPOL PP DAMKAR
23	Program Pengelolaan Pendidikan	151.865.540.775	DINDIKPORA
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.145.645.214	RSUD
25	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.081.058.000	DPUPR
26	Program Kawasan Permukiman	6.113.909.000	DPUPR
27	Pogram Pengembangan Perumahan	316.091.000	DPRKPLH
	TOTAL	443.132.950.787	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
- Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.23
Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan Iklim

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.145.645.214	Dinas Kesehatan
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.460.436.207	DKPPP
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.047.730.900	DKPPP
4	Program Penyuluhan Pertanian	260.000.000	DKPPP
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	50.000.000	DPRKPLH

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	DPRKPLH
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	380.000.000	DPRKPLH
8	Program Pengelolaan Persampahan	3.525.000.000	DPRKPLH
Jumlah Total		257.118.812.321	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Priwisata Super Prioritas Brobudur
- Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung kegiatan tersebut dan mengalokasikan program kegiatan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5.24
Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur
Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	330.000.000	Dinkopdag
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	7.580.000.000	Dinbudpar

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.274.889.125	Dinkominfo
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan	22.697.649.250	DPUPR
5	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	260.000.000	DKPPP
6	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.525.000.000	DPRKPLH
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan rehabilitasi	250.000.000	DPRKPLH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	697.772.800	Bappeda
JUMLAH				36.615.311.175	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas selain mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga membutuhkan dukungan dari daerah sekitarnya, salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Potensi yang mendukung pengembangan Borobudur yang berada di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah event yang dilaksanakan secara rutin di Kawasan Borobudur yaitu pengambilan air suci, persemayaman air suci di Candi Mendut dan perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Sejumlah Biksu yang berasal dari 11 majelis agama Buddha di Indonesia, mengikuti ritual pengambilan air suci (berkah) untuk perayaan Hari Raya Waisak di Mata Air Jumprit Temanggung persisnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Air berkah tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut dan akan digunakan dalam perayaan detik-detik Waisak di Candi Borobudur.

Air di Umbul Jumprit memang bukan air biasa. Bagi Umat Budha, air Umbul Jumprit dianggap sebagai air suci pembersih jiwa manusia. Harapan pengambilan air suci ini untuk seluruh manusia di dunia agar sadar bahwa jiwa ini bagaikan jiwa Sang Buddha. Penuh cinta kasih tanpa memandang aliran dan agama. Salah seorang Wakil Bhikkhu, Dwi Virya, mengatakan dalam agama Buddha air suci mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi.

9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-

Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.25
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.164.704.000	DPUPR
2	Program Penyelenggaraan Jalan	22.697.649.250	DPUPR
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.460.436.207	DKPPP
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.047.730.900	DKPPP
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	330.000.000	DINKOPDAG
6	Program Pengembangan Umkm	95.000.000	DINKOPDAG
7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	190.000.000	DINBUDPAR
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	613.000.000	DINPERINAKER
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	425.000.000	DINPERINAKER
10	Program Hubungan Industrial	80.000.000	DINPERINAKER
11	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.225.335.800	BAG PEREKONOMIAN, BAG PEMBANGUNAN, BAG PBJ
	TOTAL	61.328.856.157	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun 2025

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan infrastuktur yang direncanakan tidak sebatas bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan tetapi juga bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Tabel 5.26
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Pembangunan
Infrastruktur Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.145.645.214	DINKES
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.164.704.000	DPUPR
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.081.058.000	DPUPR
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	200.000.000	DPUPR
5	Program Penataan Bangunan Gedung	200.000.000	DPUPR
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	200.000.000	DPUPR
7	Program Penyelenggaraan Jalan	22.697.649.250	DPUPR
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	300.000.000	DPUPR
9	Program Pengembangan Perumahan	316.091.000	DPRKPLH
10	Program Kawasan Permukiman	6.113.909.000	DPRKPLH
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.419.879.000	DPRKPLH
12	Program Pengelolaan Persampahan	3.525.000.000	DPRKPLH
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.589.072.100	DINHUB
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.274.889.125	DINKOMINFO
15	Program Pengelolaan Pendidikan	151.865.540.775	DINDIKPORA
16	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.047.730.900	DKPPP
	TOTAL	468.141.168.364	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Pintu Tol Bawen - Yogyakarta

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki agenda pembangunan jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta dengan pintu tol di Desa Soropadan

Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Peluang tersebut ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui kegiatan penataan ruang yaitu peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031 agar keberadaan pintu tol ini memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru serta mendukung pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya Kabupaten Temanggung tidak sebatas dilewati tetapi bisa menjadi daerah tujuan.

5.1.4 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Satu Data Indonesia

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.27
Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.029.911.600	Dinkominfo
2	Program pengelolaan aplikasi informatika	1.274.889.125	Dinkominfo
3	Program penyelenggaraan statistik sektoral	82.500.000	Dinkominfo
4	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	509.474.400	Bappeda
Jumlah total		2.896.775.125	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

5.2 PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran dan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2026 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus

mempedomani tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga berdasarkan permasalahan dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah.

5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

➤ Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diprioritaskan pada beberapa capaian Bidang Pendidikan yang belum sesuai target yang ditetapkan oleh Pusat dan hasil Rakortek Provinsi mengenai arahan Kemendikbud untuk pencapaian SPM Pendidikan yang tertuang dalam Rapor Pendidikan sebagaimana Surat Kemdikbudristekdikti Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota yaitu melalui kegiatan peningkatan angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, angka partisipasi sekolah 7-15 tahun dan angka partisipasi sekolah 7-18 tahun, peningkatan satuan PAUD terakreditasi minimal B, peningkatan kemampuan numerasi dan literasi SD dan SMP. Terkait implementasi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan karakter juga menjadi perhatian semua pihak baik perangkat daerah terkait, sekolah, Lembaga terkait Pendidikan dan masyarakat.

Identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru juga secara berkala dilakukan dan dikoordinasikan dengan BKPSDM terkait formasi dan pengadaannya.

PAUD juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pijakan dasar terkait SDM generasi masa depan, yaitu

melalui peningkatan kualitas dalam perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi. Tidak hanya PAUD, berdasarkan data masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah maka juga diprioritaskan untuk peningkatan kualitas layanan Pendidikan kesetaraan melalui perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Berdasarkan hasil evaluasi, program di bidang Pendidikan juga diarahkan pada kegiatan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, pengurangan angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, peningkatan kondisi fasilitas pendidikan ruang kelas, pencapaian target SMP dengan akreditasi minimal, pencapaian target kelulusan peserta pendidikan kesetaraan, peningkatan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pengurangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dan peningkatan APK PAUD.

2) **Bidang Kesehatan**

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian balita; penurunan angka kematian neonatal,; dan penurunan jumlah rumah tidak sehat.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan akreditasi utama fasilitas kesehatan tingkat pertama

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan keamanan pangan sebagai langkah untuk peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

3) **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman.

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program ini diarahkan pada kegiatan penambahan jalan kabupaten yang dilengkapi dengan drainase agar meminimalisir resiko kerusakan jalan.

- Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung serta rehabilitasi bangunan gedung.

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas trotoar di sejumlah titik di Temanggung.

➤ Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di sejumlah titik di Temanggung.

➤ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), penyusunan dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah serta dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.

4) **Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

➤ Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

➤ Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akses sanitasi layak

5) **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

➤ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; serta penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

➤ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar sesuai dengan jangkauan wilayah.

➤ Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam merespon laporan kejadian bencana pada saat waktu tanggap.

6) **Bidang Sosial**

➤ Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan fasilitasi program-program kegiatan PSM.

➤ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada penjemputan masyarakat yang termasuk warga migrant korban tindak kekerasan dan pemberian stimulan bagi korban.

➤ Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial pada masyarakat yang membutuhkan

➤ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

➤ Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait siap siaga jika terjadi bencana.

➤ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

b. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada kegiatan beberapa pelatihan untuk memperkaya skill bagi tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga mampu bersaing dalam mencari lapangan kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan bimibingan serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja guna ikut serta menekan angka TPT.
- Program Hubungan Industrial
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan mediasi apabila ada perselisihan hubungan industrial dan pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada kegiatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten untuk menggaungkan potensi perempuan dan mengurangi paham atau budaya patriarki, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan dan mediasi bagi perempuan korban kekerasan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelayanan, pengaduan dan penjangkauan korban.

- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga guna meningkatkan ketahanan keluarga.
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak serta pemenuhan hak sesuai dengan kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis.
- Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak dengan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

3) **Bidang Pangan**

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan seperti lumbung pangan, rantai jemur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pemanfaatan teknologi pangan serta diversifikasi pangan
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi terkait kerentanan dan ketahanan pangan, serta dan mencukupi ketersediaan pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kelembagaan keamanan pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

4) **Bidang Pertanahan**

- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara tanah garapan.

5) **Bidang Lingkungan Hidup**

➤ Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

➤ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi media tanah, air dan udara kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen hasil uji yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan arah kebijakan terutama dalam penanganan lahan kritis, mitigasi adanya fenomena perubahan iklim, serta menjaga kualitas lingkungan hidup

➤ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan hutan kota, taman kota, dan terpenuhinya RTH

➤ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 sehingga mencegah pencemaran lingkungan

➤ Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini difokuskan untuk pengawasan terhadap usaha yang harus memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sehingga tidak merusak lingkungan dan mencegah sengketa lingkungan

- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan
Program ini difokuskan pada kegiatan yang penjagaan kelestarian lingkungan hidup oleh berbagai stakeholders serta fasilitasi sarana prasarana kegiatan adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini difokuskan pada kegiatan penilaian terhadap kinerja stakeholders yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini difokuskan pada kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH
- Program Pengelolaan Persampahan
Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja pengelola persampahan, dan pemilahan sampah yang selanjutnya akan diolah.

6) **Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

- Program Pendaftaran Penduduk
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung.
- Program Pencatatan Sipil
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini difokuskan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan catatan sipil.

7) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- Program Penataan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan desa sehingga terwujud desa berpredikat mandiri

➤ Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan meningkatkan kerjasama antar desa untuk pembangunan desa sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah

➤ Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

➤ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola/lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) guna identifikasi potensi desa swasembada dalam rangka pembangunan desa.

8) **Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

➤ Program Pengendalian Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta data-data dan pelayanannya terhadap masyarakat

➤ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB serta batasan PUS melalui pemberian advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta publikasi dan promosi program melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan BIB KIT pada 20 locus stunting serta Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR.

9) **Bidang Perhubungan**

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sosialisasi SOP berkendara dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan terminal tipe C.

10) **Bidang Komunikasi Dan Informatika**

- Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat, fasilitasi akses internet di area publik yang ada, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku PPID.

- Program Aplikasi Informatika

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan jaringan fiber optik antar kecamatan, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, dan pengembangan aplikasi.

11) **Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan koperasi terutama koperasi yang tidak sehat.

- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi.

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi.

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini difokuskan pada kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kelas UMKM melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, pemasaran dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro.

- Program Pengembangan UMKM

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM sehingga terwujud peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

12) **Bidang Penanaman Modal**

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal.

- Program Promosi Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan menginformasikan tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal yang ada pada daerah guna menarik investor.

- Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem yang terintegrasi.

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal

13) **Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan pembinaan pemuda sehingga terwujud peningkatan kapasitas pemuda

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif, pembinaan cabang olah raga dan sistem informasi pendataan keolahragaan dan kepemudaan.

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang adaptif terhadap perkembangan jaman

14) **Bidang Statistik**

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan validitas data produsen, dan fasilitasi koordinasi pemerintah daerah dan BPS guna sinkronisasi data.

15) **Bidang Persandian**

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengamanan sistem informasi supaya terwujud kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah sesuai standar dan meningkatkan jumlah sistem elektronik sudah teruji keamanannya

16) **Bidang Kebudayaan**

- Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya yang produktif melalui

pengembangan kualitas SDM, serta kegiatan pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung melalui penggalian sejarah lokal temanggung melalui narasumber ahli.

17) **Bidang Perpustakaan**

➤ Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan perpustakaan daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan peminjam di perpustakaan.

➤ Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini difokuskan pada kegiatan monitoring dalam rangka pengumpulan naskah kuno penambahan koleksi nasional di wilayah Kabupaten Temanggung.

18) **Bidang Kearsipan**

➤ Program Pengelolaan Arsip

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan indeks manajemen kearsipan.

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**

➤ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum

➤ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada kegiatan swasembada pada ikan konsumsi, pengembangan kapasitas kelompok pembudi daya ikan kecil, dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

➤ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini difokuskan pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di dilayah

sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Temanggung.

➤ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko, penyediaan ikan untuk konsumsi dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

2) Bidang Pariwisata

➤ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan destinasi wisata dan kegiatan pembinaan atau pendampingan desa wisata serta peningkatan kapasitas pelaku wisata

3) Bidang Pertanian

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, penyediaan peta lahan LP2B dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.

➤ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, kegiatan

pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan.

➤ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) penyebab bencana pertanian.

➤ Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan pembentukan sekolah lapang kelompok tani.

4) Bidang Perdagangan

➤ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di pasar daerah, perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan dinas dan penertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan.

➤ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah dan penyusunan laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, kegiatan pengendalian pengawasan pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi bahan pokok di masyarakat serta pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

➤ Program Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha produk ekspor unggulan.

➤ Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini difokuskan pada kegiatan metrologi legal berupa tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan.

5) Bidang Perindustrian

➤ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pembinaan IKM unggulan daerah, pameran produk IKM, dan pembinaan industri penghasil cukai.

d. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

1) **Sekretariat Daerah**

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu dan penyusunan SAKIP.

➤ Program Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pendokumentasian perundangan di JDIH secara tepat waktu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar.

➤ Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan, pengoptimalan dalam penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan, pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, kerjasama yang efektif dengan dewan pengawas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

2) **Sekretariat DPRD**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, serta pemenuhan kegiatan tertib administrasi.

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini difokuskan pada kegiatan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, optimalisasi kegiatan aspirasi DPRD, serta fasilitasi Tugas DPRD.

e. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

1) **Perencanaan**

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi ketercapaian kinerja pembangunan daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di semua perangkat daerah agar terwujud konsistensi perencanaan pembangunan.

2) **Penelitian dan Pengembangan**

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM penelitian dan pengembangan, kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, kegiatan penjangkaran dan fasilitasi serta pemanfaatan hasil kreaativitas dan inovasi, serta kegiatan pemetaan daya saing daerah, serta penguatan kelembagaan kelitbang

3) **Keuangan**

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan IKPD, kegiatan penyusunan dan pengelolaan keuangan serta perbendaharaan daerah sehingga dokumen penganggaran tepat waktu, serta kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan konsistensi penganggaran dengan perencanaan.

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penataan barang milik daerah.

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah.

4) **Kepegawaian**

➤ Program Kepegawaian Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pegawai di semua perangkat daerah, kegiatan fasilitasi dan motivasi pegawai perempuan dalam beberapa jabatan struktural, kegiatan optimalisasi updating pegawai secara mandiri, dan kegiatan fasilitasi sistem merit di lingkungan pegawai.

5) **Pendidikan dan Pelatihan**

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kepesertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajerial dan non manajerial

f. **Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan**

1) **Inspektorat Daerah**

➤ Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah dan kegiatan pencegahan korupsi

➤ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan asistensi terhadap semua pelaksana program pemerintah

g. **Unsur Kewilayahan**

1) **Kecamatan**

➤ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi pelayanan publik di kecamatan, pengadaan sarana dan prasarana

kecamatan, serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM kecamatan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini difokuskan pada kegiatan penguatan kelembagaan desa, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program ini difokuskan pada kegiatan penegakan Perda, dan kegiatan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KPT-Elektronik dan pembayaran PBB.

h. Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan pada masyarakat semua elemen.
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula.
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengaawasan organisasi kemasyarakatan.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan perkembangan aliran sesat, kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kegiatan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan, kegiatan monitoring dan evaluasi

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penanganan konflik sosial.

5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Tabel 5.28
Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.181.067.316.041
1	PENDIDIKAN	686.780.619.473
2	KESEHATAN	388.535.537.367
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.291.892.640
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.430.000.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.105.714.026
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	31.923.552.535
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	233.686.529.181

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
1	TENAGA KERJA	7.818.911.799
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	160.684.400
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	49.410.893.754
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	22.537.379.584
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.341.904.315
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.053.389.258
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.539.501.471
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.792.290.508
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.261.851.489
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.002.407.753
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.553.709.773
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.454.000.000
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	129.500.000
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	12.481.227.229
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.481.227.229
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.622.927.662
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	20.000.000
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	245.000.000
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	190.000.000
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.419.892.107
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.307.387.366
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	343.670.713
III	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	117.715.258.749

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	66.512.663.120
2	SEKRETARIAT DPRD	51.202.595.629
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	450.668.165.655
1	PERENCANAAN	8.144.231.649
2	KEUANGAN	436.611.274.075
3	KEPEGAWAIAN	4.848.977.431
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	456.750.000
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	606.932.500
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.514.916.251
1	INSPEKTORAT DAERAH	8.514.916.251
VI	UNSUR KEWILAYAHAN	71.682.795.575
1	KECAMATAN	71.682.795.575
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.679.911.220
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.679.911.220
Jumlah Total		2.076.390.105.919

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Tabel 5.29
Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.181.067.316.041
A	PENDIDIKAN				686.780.619.473
1	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81.72	%	151.865.540.775
		persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44.55	%	
		persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77.75	%	
		persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90.55	%	
		persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
		persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49.99	%	
		persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0.03	Angka	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
		persentase APM SD Sederajat	98.7	%	
		persentase APK SD Sederajat	104.69	%	
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0.01	Angka	
		Rasio Siswa/Guru SD	0.061111	Angka	
		Rasio Siswa/Rombel SD	0.061111	Angka	
		persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
		persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61.32	%	
		persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0.1	Angka	
		persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91.49	%	
		persentase APM SMP Sederajat	89	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase APK SMP Sederajat	98.77	%	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98.9	%	
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0.16	Angka	
		Rasio Siswa/Guru SMP	0.063889	Angka	
		Rasio Siswa/Rombel SMP	0.063889	Angka	
		persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
		persentase Pendidik SMP yang	66.25	%	
		memiliki sertifikat pendidik	-		
		persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0.08	Angka	
		persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96.67	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
		persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
		persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%	
		persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	534.915.078.698
B	KESEHATAN				388.535.537.367
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal	
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
		persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
		persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
		Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
		Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH	
		Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%	
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal	
		persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%	
		persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk	
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
		persentase rumah sehat	87.6	%	
		persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26.9	%	10.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	162.379.892.153
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				54.291.892.640
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase jaringan irigasi kondisi baik	59.37	%	9.164.704.000
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97.97	%	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95.7	%	9.081.058.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase saluran drainase kondisi baik	69.34	%	200.000.000
5	Program Penataan Bangunan Gedung	persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	200.000.000
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	persentase Trotoar Kondisi Baik	73.97	%	200.000.000
7	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase Jalan Kondisi Mantap	89.5	%	22.697.649.250
		persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%	
		persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	19.61		
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89.51	%	300.000.000
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	12.448.481.390
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.430.000.000
1	Program Pengembangan Perumahan	persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4	%	316.091.000
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88	%	
2	Program Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	96	%	6.113.909.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase kawasan kumuh perkotaan	5	%	
		persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	
		persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.105.714.026
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase Satlinmas yang teratih	7	%	946.000.000
		persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
		persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
2	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	538.568.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	%	
		persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6	%	
3	Program Penanggulangan Bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	330.294.000
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	11.290.852.026
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				31.923.552.535

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	640.000.000
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	20.000.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	
		persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
4	Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	167.500.000
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	97.500.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.925.547.159
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				233.686.529.181
A	TENAGA KERJA				7.818.911.799
1	Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73	%	613.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	425.000.000
		persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%	
		persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%	
		persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%	
3	Program Hubungan Industrial	persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83	%	80.000.000
		persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%	
		persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%	
		persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	6.700.911.799
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				160.684.400

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2.66	%	10.000.000
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%	
2	Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0.0028	%	42.842.200
		persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0.0028	%	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase desa sayang ibu dan bayi	62.63	%	10.000.000
		persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	%	
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	45.000.000
5	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	0.0039	%	52.842.200
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				49.410.893.754
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	-
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	10.000.000
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	20.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	49.380.893.754
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				22.537.379.584
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	50.000.000
		persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53.3	Angka	250.000.000
		Indeks Kualitas Udara	83.87	Angka	
		persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0.067	%	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	65	%	380.000.000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	70.000.000
6	Program Pengelolaan Persampahan	persentase sampah yang tertangani	60.21	%	3.525.000.000
		Cakupan layanan persampahan	64.71	%	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	18.252.379.584
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.341.904.315
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89.73	%	693.500.000
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99.85	%	10.000.000
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98.5	%	100.848.300
		persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	1.3	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.537.556.015
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.053.389.258

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
1	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	60	%	25.000.000
2	Program Peningkatan Kerja sama Desa	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	15.000.000
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	60	%	3.993.000.000
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80	%	
		Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%	
		persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39	%	
		persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39.47	%	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	494.917.000
		persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.525.472.258
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				16.539.501.471
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikrokeluarga	100	%	423.256.000
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB yang Tepenuhi (unmetneed)	10.3	%	
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun	1.85	%	
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	12.5	%	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88.6	%	7.293.884.000
		Pesentase Kepesertaan KB Aktif	75.8	%	
		Persenatase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	46.15	%	
		Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	45.45	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	55.99	%	4.245.900.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.576.461.471
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				25.792.290.508
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42.03	%	18.589.072.100
		persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	35	%	
		persentase potensi titik parkir yang tertangani	99.12	%	
		persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
		persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
		persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99.66	%	
		persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33.86	%	
		persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64.09	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	7.203.218.408
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.261.851.489
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	1.029.911.600
		persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
		persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90	%	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125
		persentase layanan publik secara elektronik	55	%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	6.957.050.764
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.002.407.753
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	persentase koperasi sehat	48	%	25.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6.67	%	330.000.000
3	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	0.96	%	95.000.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	15.552.407.753
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.553.709.773
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	Milyar	7.000.000
		persentase perusahaan yang bermitra	60	%	
2	Program Promosi Penanaman Modal	persentase promosi penanaman modal	50	%	7.000.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	342.403.510
		persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
		persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pengendalian penanaman modal	16	%	404.961.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.792.345.263

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4.454.000.000
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	persentase organisasi pemuda yang aktif	95.5	%	260.000.000
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	persentase pelatih olahraga bersertifikat	96.5	%	4.094.000.000
		persentase prestasi olahraga	62	%	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	persentase gugus depan yang aktif	100	%	100.000.000
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				129.500.000
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	82.500.000
-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	47.000.000			
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	persentase penilaian resiko keamanan informasi	66.7	%	47.000.000
		persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	60		
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.481.227.229
1	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	8.2	%	7.580.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	
		persentase pelestarian Sejarah Lokal	9.25	%	
		persentase Pelestarian Cagar Budaya	13.18	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.901.227.229
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.622.927.662
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0.026	%	1.211.407.950
		persentase pertumbuhan jumlah peminjam di perpustakaan	42	%	
		Persentase perpustakaan yang aktif	35	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.411.519.712
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				20.000.000
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	60	%	20.000.000
		Persentase audit internal kearsipan	73.33	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
S	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				245.000.000
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1.3	kg/m2	235.000.000
		Produktivitas ikan lele	12.7	kg/m2	
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22.52	%	10.000.000
T	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				190.000.000
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0.04	%	190.000.000
		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari	
		persentase Peningkatan Desa Wisata	14.76	%	
		persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	
U	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.419.892.107
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61.5	Kuintal/ha	18.460.436.207
		Produktivitas jagung	54.6	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai rawit	50.5	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai besar	65.5	Kuintal/ha	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		Produktivitas tembakau	6.2	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi robusta	7.15	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi arabika	6.5	Kuintal/ha	
		Produktivitas ternak sapi	177.5	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak domba	13.71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak kambing	13.71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0.75	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam petelur	10.88	Kg/Ekor	
		persentase kelahiran pedet	56	%	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	8.047.730.900
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase penanganan penyakit hewan	87	%	651.725.000
		persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%	
4	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1.3	%	260.000.000
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				16.307.387.366
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27.42	%	674.979.613

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	
		persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2.41	%	
		persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	79.63	%	
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	30.000.000
4	Program Pengembangan Ekspor	cakupan pelaku usaha yang di bina	2.31	%	20.000.000
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	99.41	%	30.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	15.552.407.753
W	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				343.670.713
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78.2	%	343.670.713
		persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	20.95	%	
III	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				117.715.258.749
A	SEKRETARIAT DAERAH				66.512.663.120

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	33.391.297.995
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	23.9	%	
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	31.896.029.325
		persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
		persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
		persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
		persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
		persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
		persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100		
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.225.335.800
		persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
		persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83.33	%	
		persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	
		persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
		persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%	
B	SEKRETARIAT DPRD				51.202.595.629
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	31.521.979.724
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	19.680.615.905
		persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	%	
		persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%	
		persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100		
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				470.668.165.655
A	PERENCANAAN				8.144.231.649
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	509.474.400
		persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	697.772.800
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	6.936.984.449
B	KEUANGAN				436.611.274.075
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	410.851.694.364
		persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	%	
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	1.390.608.125
		persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9	%	619.828.400
		persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%	
		persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95.5	%	
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	23.749.143.186
C	KEPEGAWAIAN				4.848.977.431
1	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	42.36	%	330.762.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86.58	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.518.215.431
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				456.750.000
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	97	%	456.750.000
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	251.932.500			606.932.500
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	606.932.500
		persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%	
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				8.514.916.251
A	INSPEKTORAT DAERAH				8.514.916.251
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	628.546.400
		persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%	
		persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
		persentase tindak lanjut hasil temuan	100		
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	337.261.200
		persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
		persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%	
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	7.549.108.651
VI	UNSUR KEWILAYAHAN				71.682.795.575

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
A	KECAMATAN				71.682.795.575
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	54.471.908.292
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	2.010.980.556
		persentase realisasi penerimaan PBB	95	%	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	100	%	14.381.360.632
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100	%	360.991.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	100	%	457.555.095
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100	%	
		persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	100	%	
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				7.679.911.220

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.679.911.220
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16.67	%	20.000.000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.717.315.885
JUMLAH TOTAL					2.076.390.105.919

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Selain itu, juga terdapat dukungan pembiayaan non APBD yang mendukung program prioritas pemerintah daerah diantaranya USAID IUWASH Tangguh, Baznas, APBN, dll. Sebagai contoh, Kabupaten Temanggung mendapatkan Program USAID IUWASH Tangguh Tahun 2022 - 2027 (5 Tahun). Program tersebut bertujuan untuk mencapai target air minum dan sanitasi aman serta perubahan perilaku hygiene. Untuk mencapai tujuan tersebut sampai dengan Maret 2025 sudah dilakukan beberapa kegiatan antara lain (1) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022-2027, (2) Penyusunan Raperbup Pengelolaan Air Limbah Domestik, (3) Penyusunan Governance Index dan Sanitation Index Tahun 2022-2027, (4) Rangkaian kegiatan bersama masyarakat untuk perubahan perilaku hygiene dan peningkatan akses air minum sanitasi di lokasi percontohan Kabupaten Temanggung, (5) Workshop kesadaran bagi pemangku kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai Adaptasi Perubahan Iklim, (6) Workshop operasional dan pemeliharaan bagi penerima manfaat SPALDS/T, (7) Training enumerator dan survei Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) : Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM, Penyusunan Rencana Bisnis oleh PDAM, Kajian Delineasi Mata Air yang digunakan oleh PDAM baru dilakukan di satu lokasi yaitu mata air Tuk Mulyo, Pandemulyo, Training pemicuan untuk kader di lokasi percontohan dan Training pembuatan jamban untuk KSM yang mendapat DAK.

Selain itu, dalam mendukung pembangunan daerah juga melibatkan stakeholders diluar Perangkat Daerah (OPD) karena dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang terdiri dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Lembaga Sosial lainnya. Khusus untuk TJSLP Kabupaten Temanggung telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. TJSLP dan Lembaga Sosial lainnya sudah mendukung pembangunan daerah dan

perannya dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengapresiasi kebijakan Forum TJSLP dan Lembaga sosial lainnya yang telah berperan aktif mendukung pembangunan di Kabupaten Temanggung di berbagai bidang. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung bersama Forum TJLSP melaksanakan kegiatan pertemuan bersama membahas agenda kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan kerjasama dengan TJSLP secara rutin tiap tiga bulan sekali. TJSLP di Kabupaten Temanggung berkomitmen sebagian laba untuk program pembangunan daerah, dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu dapat menyalurkan sendiri atau dikumpulkan melalui Forum TJSLP. Pemerintah Daerah berfungsi menyediakan *database* baik berupa program/kegiatan, lokus, dan calon penerima manfaat.

Forum TJSLP merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya, melainkan sebagai sarana meraih keuntungan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung, sehingga dapat mewujudkan kesamaan persepsi, komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung serta mampu mewujudkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Temanggung.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang dibentuk untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi yang berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis (Permen PAN, 2007).

IKU berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Kedua fungsi tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dimana aspek akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Temanggung. Pengimplementasian indeks kinerja utama di Kabupaten Temanggung dalam perencanaan akan menghasilkan dampak secara simultan baik positif maupun negatif.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada tahun 2025. Penyajian Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada bab ini meliputi: indikator kinerja, satuan, dan penetapan target kinerja Tahun 2025.

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran. Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah yang menjabarkan indikator kinerja sasaran pembangunan

daerah dan indikator tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjabarkan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,27	Dinkominfo
a	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,95	Dindikpora
b	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	Dindikpora
c	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	4,23	Dindikpora
d	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	3,81	Dindikpora
e	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	4,66	Dinbudpar
f	Indeks Toleransi	Angka	4,51	Bankesbangpol
g	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,72	Dinas Kesehatan
h	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,77	DPPPAPPKB
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,28	Dinkominfo
a	Pendapatan per Kapita	Ribu Rp	33,50	Dinkominfo
b	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	19	BPKPAD
c	Angka Kemiskinan	Angka	8,10	Dinas Sosial
d	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	2,51	Dinkominfo
e	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	75,20	DPUPR
f	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	64,05	DPRKPLH
g	Indeks Rasa Aman	Angka	4,69	Satpol PP & Damkar
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	Sekretariat Daerah
a	IPKD	Angka	66	BPKPAD
b	Indeks <i>Merit System</i>	Angka	0,55	BKPSDM
c	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	B	Sekretariat Daerah
d	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	Kecamatan

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Dalam hal ini, dalam menetapkan indikator kinerja, penggunaan indikator dampak sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah maupun indikator kinerja tujuan pembangunan daerah.

6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama tersebut secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA			
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	57,10
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,39
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	91,57
		Persentase Satuan Pendidikan Non-Formal terakreditasi minimal B	%	36,00
	Meningkatnya Akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	100
		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100
	Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%
Meningkatnya Atlet berprestasi		Persentae atlet berprestasi	%	36,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				
Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	30,2
Meningkatnya pengelolaan kearsipan		Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	70

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase kelompok seni dan budaya yang aktif	Angka	26,10
	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,10
Meningkatnya toleransi masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Menurunnya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	DINAS KESEHATAN			
	Meningkatnya kesehatan keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,15
Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA			
	Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,22
	Pertumbuhan penduduk yang terkendali	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,60
Meningkatnya perekonomian Daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN			
	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	23,30
	Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	78,7
	Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Ribu Rp	349,500
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,80
	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	48
		Persentase UMKM yang difasilitasi	%	0,96
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	Meningkatnya nilai usaha industri	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	%	27,20
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,20
	DINAS PENANAMAN MODAL			
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	%	3
	DINAS SOSIAL			
	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	11,65
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84,64
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,51
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	99,03
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	53,30
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	83,87
	DINAS PERHUBUNGAN			
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	42,03
	Meningkatnya Layanan Perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan	%	68,72
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Indek Resiko Bencana	Angka	141,50
	SATPOL PP DAN DAMKAR			
	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Angka	100
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Angka	100
		Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten	Angka	305
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,55
		Management Resiko Indeks (MRI)	Level	Level 3
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas LPKD	WTP	WTP
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	15,75
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	90,15
	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik	Indeks SPBE	Angka	3,35
Meningkatnya kualitas SDM aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	52,95
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	SEKRETARIAT DAERAH			
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Kategori	Sangat Tinggi
	SEKRETARIAT DPRD			
	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100
	INSPEKTORAT			
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) KPK	%	93,8
		Maturitas SPIP	Nilai	3,10
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,975
		Kapabilitas APIP	Level	3
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	93,70
	20 KECAMATAN			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Angka	B

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

6.3 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

Indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan hasil akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator

kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*). Keberhasilan capaian kinerja program Perangkat Daerah secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
PENDIDIKAN					
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,72	%	Dindikpora
		Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44,55	%	
		Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,75	%	
		Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90,55	%	
		Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,99	%	
		Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,03	%	
		Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
		Persentase APM SD Sederajat	98,70	%	
		Persentase APK SD Sederajat	104,69	%	
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,01	%	
		Rasio Siswa/Guru SD	01:28	%	
		Rasio Siswa/Rombel SD	01:28	%	
		Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,32	%	
		Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak			
		Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	%	
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91,49	%	
		Persentase APM SMP Sederajat	89,00	%	
		Persentase APK SMP Sederajat	98,77	%	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,90	%	
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,16	Angka	
		Rasio Siswa/Guru SMP	01:32	Angka	
		Rasio Siswa/Rombel SMP	01:32	Angka	
		Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,25	%	
		Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,08	%	
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96,67	%	
		Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		bidang ilmu yang diampu			
		Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non-Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90,00	%	
		Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	20,00	%	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,5	%	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	96,5	%	
		Persentase prestasi olahraga	62	%	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	100	%	
KESEHATAN					
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12,80	per 1000 KH	
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	% maksimal	
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		elayanan kesehatan sesuai standar			
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
		Angka Kematian Neonatal	9,15	per 1.000 KH	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
		Angka Kematian Balita	15,60	per 1.000 KH	
		Prevalensi balita gizi buruk	0,30	%	
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,6	% minimal	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	64	%	
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase penderita <i>Diabetes Melitus</i> (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk	
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
		Persentase rumah sehat	87,6	%	
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98,4	%	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26,9	%	
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	84,03	%	
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,37	%	DPUPR
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97,9	%	
11	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,7	%	
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase saluran drainase kondisi baik	69,34	%	
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	73,97	%	
14	Program penataan bangunan gedung	Persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	
15		Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%	
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	19,61	%	
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,51	%	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
17	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,46	%	DPRKPLH
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,4	%	
18	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,89	%	
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,82	%	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	
19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%	
PERTANAHAN					
20	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	100	%	
LINGKUNGAN HIDUP					
21	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%	
22	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,33	Angka	
		Indeks Kualitas Udara	83,87	Angka	
		Persentase Luas Lahan Kritis	0,067	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis			
23	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	63,90	%	
24	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	
25	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	
26	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30,00	%	
27	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	
28	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%	
29	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,50	%	
		Cakupan layanan persampahan	66,44	%	
SOSIAL					
30	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	Dinas Sosial
31	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	
32	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
33	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
34	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	
35	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	
TENAGA KERJA					
36	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	Dinperinaker
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%	
		Persentase pencari kerja yang dilatih	1,2	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		melalui perluasan kesempatan kerja			
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%	
38	Program Hubungan Industrial	Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83,37	%	
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%	
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%	
39	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78,2	%	
		Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	20,95	%	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
40	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,66	%	DPPPAPPKB
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%	
41	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0028	%	
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0028	%	
42	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	62,63	%	
		Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	%	
43	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	kategori	
44	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,0039	%	
45	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	100	%	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak	10,3	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		terpenuhi (unmetneed)			
		Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	1,85	%	
		Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	12,5	%	
46	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,6	%	
		Persentase kepesertaan KB aktif	75,8	%	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,15	%	
		Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	45,45	%	
47	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	55,99	%	
PERHUBUNGAN					
48	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42,03	%	Dinas Perhubungan
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	35	%	
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	99,12	%	
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,66	%	
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,86	%	
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64,09	%	
KEUANGAN					
49	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100	%	BPKPAD

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah	100	%	
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
50	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%	
51	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9	%	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%	
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95,5	%	
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100	%	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
52	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	Dinkominfo
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
		Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90,00	%	
53	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	
		Persentase layanan publik secara elektronik	55,00	%	
STATISTIK					
54	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	Dinkominfo
PERSANDIAN					
55	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	66,7	%	Dinkominfo
		Persentase pelaksanaan prosedur	60	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		pengamanan informasi pada perangkat daerah			
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
56	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi sehat	48	%	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
57	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	2,33	%	
58	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	93,71	%	
59	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	prosentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	100	%	
60	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	prosentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6,67	%	
61	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,96	%	
62	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	prosentase fasilitasi pelaku usaha informal	27,42	%	
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,41	%	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	79,63	%	
63	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	
64	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	2,31	%	
65	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	99,41	%	
66	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	100	%	
PENANAMAN MODAL					
67	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	Dinas Penanaman Modal
		presentase perusahaan yang bermitra	60	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
68	Program Promosi Penanaman Modal	presentase promosi penanaman modal	50	%	
69	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	
		Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	
70	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	presentase pengendalian penanaman modal	16	%	
71	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	presentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%	
KEPEGAWAIAN					
72	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	42,36	%	BKPSDM
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,58	%	
73	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	97	%	
KEBUDAYAAN					
74	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	8,2	%	Dinbudpar
		Persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	
		Persentase pelestarian Sejarah Lokal	9,25	%	
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	13,18	%	
PARIWISATA					
75	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,04	%	Dinbudpar
		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari	
		Persentase Peningkatan Desa Wisata	14,76	%	
		Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
76	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89,73	%	Dindukcapil
77	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,85	%	
78	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan	98,5	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Administrasi Kependudukan			
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	1,3	%	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
79	Program penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangandesa	60	angka	Dinpermades
80	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	
81	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaoran Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	60	%	
		Persentase penyelnggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	100	%	
		Persentase laporan Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80	%	
		Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39	%	
		Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39,47	%	
82	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	Angka	
PERPUSTAKAAN					
83	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0,025	%	Dinpusip
		Persentase peminjam perpustakaan	42	%	
		Persentase perpustakaan yang aktif	35	%	
84	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip konvesional yang dialih mediakan	60	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase audit internal kearsipan	73,33	%	
85	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	100	%	
PANGAN					
85	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	DKPPP
86	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	
87	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
88	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	10	%	DKPPP
89	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,3	kg/m2	
		Produktivitas ikan lele	12,7	kg/m2	
90	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	10	%	
91	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,52	kg/kapita/tahun	
PERTANIAN					
92	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas jagung	54,6	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai rawit	50,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai besar	65,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas tembakau	6,2	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi robusta	7,15	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi arabika	6,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas ternak sapi	177,5	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam petelur	10,88	Kg/Ekor	
			Persentase kelahiran pedet	56	
93	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
94	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	87	%	
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%	
95	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	42	%	
96	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase Kelompok Tani yang naik kelas	1,30	%	
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
97	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%	
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%	
		Persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%	
98	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	
		Persentase tindak lanjut aduan <i>Whistle Blowing</i> , Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang	54	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		dievaluasi Pengelolaan Risikonya			
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	%	
SEKRETARIAT DAERAH					
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	23,9	%	
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	
		Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	86	%	
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
		Persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%	
101	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%	
		Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%	
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%	
PERENCANAAN					
102	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	BAPPEDA
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	100	%	
103	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	98,82	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90,56	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat	91,96	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam			
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	95,76	%	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
104	Program penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	BAPPEDA
		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplemantasikan	100	%	
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
105	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Satlinmas yang teratih	6,92	%	Satpol PP & Damkar
		presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
		persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
106	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tangap (<i>Response Time Rate</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	
		Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	
		Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	%	
		presentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6,15	%	
107	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
		Persentase Warga Negara yang	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
SEKRETARIAT DPRD					
108	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	%	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%	
		Presentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100	%	
KECAMATAN					
109	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	20 Kecamatan
		Persentase realisasi penerimaan PBB	95	%	
110	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	81	%	
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%	
111	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100	%	
112	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	100	%	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	100	%	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	100	%	
113	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	Bankesbangpol
114	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	prosentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
115	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	
116	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	
117	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

6.4 Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah

Indikator kinerja program prioritas daerah memperhatikan penggunaan indikator hasil. Tingkat penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah sebesar 100% dimana semua indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4
Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
PENDIDIKAN					
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,72	%	Dindikpora
		Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44,55	%	
		Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,75	%	
		Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90,55	%	
		Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,99	%	
		Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,03	%	
		Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
		Persentase APM SD Sederajat	98,70	%	
		Persentase APK SD Sederajat	104,69	%	
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,01	%	
		Rasio Siswa/Guru SD	01:28	%	
		Rasio Siswa/Rombel SD	01:28	%	
		Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,32	%	
		Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	%	
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91,49	%	
		Persentase APM SMP Sederajat	89,00	%	
		Persentase APK SMP Sederajat	98,77	%	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,90	%	
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,16	Angka	
		Rasio Siswa/Guru SMP	01:32	Angka	
		Rasio Siswa/Rombel SMP	01:32	Angka	
		Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,25	%	
		Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di SMP	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat			
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,08	%	
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96,67	%	
		Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
		Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non-Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90,00	%	
		Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	20,00	%	
		KESEHATAN			
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12,80	per 1000 KH	
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	% maksimal	
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
		Angka Kematian Neonatal	9,15	per 1.000 KH	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
		Angka Kematian Balita	15,60	per 1.000 KH	
		Prevalensi balita gizi buruk	0,3	%	
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,6	% minimal	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	64	%	
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase penderita <i>Diabetes Melitus</i> (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
		<i>Incident Rate</i> DBD (Demam Berdarah <i>Dengue</i>)	7	Maks per 100.000 penduduk	
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
		Persentase rumah sehat	87,6	%	
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98,4	%	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
3	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,7	%	DPUPR
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%	
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94,00	%	
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	19,61	%	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,89	%	DPRKPLH
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,82	%	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Satlinmas yang teratih	6,92	%	Satpol PP & Damkar
		presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
		persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
SOSIAL					
7	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	Dinas Sosial
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
TENAGA KERJA					
8	Program Pelatihan Kerja dan	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	Dinperinaker

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
9	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0028	%	DPPPAPPKB
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0028	%	
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	kategori	
KEUANGAN					
11	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100	%	BPKPAD
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah	100	%	
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
12	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	Dinkominfo
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
		Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90,00	%	
13	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	
		Persentase layanan publik secara elektronik	55,00	%	
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
14	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	prosentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6,67	%	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
15	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	100	%	
PENANAMAN MODAL					
16	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	Dinas Penanaman Modal
		presentase perusahaan yang bermitra	60	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
KEPEGAWAIAN					
17	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	42,36	%	BKPSDM
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,58	%	
KEBUDAYAAN					
18	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	8,2	%	Dinbudpar
		Persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	
		Persentase pelestarian Sejarah Lokal	9,25	%	
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	13,18	%	
PARIWISATA					
19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,04	%	Dinbudpar
		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari	
		Persentase Peningkatan Desa Wisata	14,76	%	
		Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
20	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98,5	%	Dindukcapil
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	3,3	%	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
21	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	Dinpermades
PERTANIAN					
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas jagung	54,6	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai rawit	50,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai besar	65,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas tembakau	6,2	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi robusta	7,15	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi arabika	6,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas ternak sapi	177,5	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam petelur	10,88	Kg/Ekor	
		Persentase kelahiran pedet	56	%	
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
23	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%	
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%	
		Persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%	
		PERENCANAAN			
24	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	BAPPEDA
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	
KECAMATAN					
25	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	20 Kecamatan
		Persentase realisasi penerimaan PBB	95	%	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
26	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	Bankesbangpol
LINGKUNGAN HIDUP					
27	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,50	%	DPRKPLH
		Cakupan layanan persampahan	66,44	%	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,5	%	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

6.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat, sedangkan pelaporan capaian kinerja setiap tahunnya dikoordinasikan oleh Bagaian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.5
Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah

NO	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	PD Pengampu
1	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	DINDIKPORA
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	DINDIKPORA
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	DINDIKPORA
2	KESEHATAN	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antanental sesuai standar	%	100	DINKES
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	DINKES
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	DINKES
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan	%	100	DINKES

NO	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	PD Pengampu
		skrining kesehatan sesuai standar			
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	100	DINKES
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	DINKES
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100	DPUPR
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	DPRKPLH
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	%	100	DPRKPLH
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	DPRKPLH
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	BPBD
		jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	SATPOL DAMKAR
		jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	BPBD
		jumlah Warga Negara yang memperoleh	%	100	BPBD

NO	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	PD Pengampu
		layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	SATPOL DAMKAR
6	SOSIAL	jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	DINSOS
		jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	DINSOS
		jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	DINSOS
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	DINSOS
		jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	DINSOS

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan Tema Pembangunan Tahun 2025 adalah Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen RKPD nantinya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: (1) menjadi pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2025; (2) sebagai landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2025; (3) menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung dilihat dari capaian 8 indikator kinerja utama tahun 2021 sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mencapai 70,77 meningkat daripada tahun 2021 (69,88). Capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2022.
2. **Angka Kemiskinan** mencapai 9,33% lebih baik pencapaiannya dari Provinsi Jawa Tengah.
3. **Pertumbuhan Ekonomi** mencapai 5,20% menunjukkan geliat perekonomian sudah mulai bangkit kembali pasca pandemi Covid-19, bahkan mampu tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi sebelum

pandemi Covid-19.

4. **Pendapatan per Kapita** meningkat menjadi 30,93 juta rupiah, lebih tinggi daripada dibanding pencapaian tahun 2021 dan target tahun 2022.
5. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** mencapai 2,54% lebih baik dibandingkan pencapaian TPT kawasan Purwomanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.
6. **Ketimpangan Pendapatan** mencapai 18,46%
7. **Indeks Reformasi Birokrasi** mencapai 64,61 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (63,42)
8. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** meningkat menjadi 83,41 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (82,06).

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja program/kegiatan dengan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas pentahelix guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi RKPD tahun 2022 rekapitulasi capaian kinerja indikator sebagai berikut:

1. Capaian **Indikator Tujuan** Kabupaten Temanggung ada 8 indikator dengan status Telah Tercapai sejumlah 6 indikator (75%) dan status Akan Tercapai sejumlah 2 indikator (25%);
2. Capaian **Indikator Sasaran** Kabupaten Temanggung antara lain:
 - a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 10 indikator sasaran, dengan status Telah Tercapai sejumlah 7 indikator (70%) dan 3 indikator dengan status Akan Tercapai (30%);
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 20 indikator sasaran, dengan status telah tercapai sejumlah 12 indikator (60%) dan status Akan Tercapai ada 8 indikator (40%);
 - c. Urusan pemerintahan pilihan ada 7 indikator, terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai (71,43%) dan 2 indikator dengan status akan tercapai (28,57%);
 - d. Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 4 indikator, terdapat

- 1 indikator dengan status telah tercapai (25%) dan 3 indikator dengan status akan tercapai (75%);
- e. Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 8 indikator, terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai (62,50%), 1 indikator dengan status akan tercapai (12,50%) dan 2 indikator dengan status upaya keras (25%);
 - f. Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 1 indikator dengan status akan tercapai (100%);
 - g. Unsur kewilayahan ada 1 indikator dengan status telah tercapai (100%).
 - h. Unsur pemerintahan umum ada 2 indikator dengan status telah tercapai (100%).
3. Capaian **Indikator Program** Kabupaten Temanggung antara lain:
- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 124 indikator program, terdapat 89 indikator dengan status Telah Tercapai (71,77%), 30 indikator dengan status Akan Tercapai (24,919%) dan 5 indikator dengan status perlu Upaya Keras (4,03%);
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 116 indikator program, terdapat 87 indikator program Telah Tercapai (75%), 24 indikator Akan Tercapai (20,69%), dan 5 indikator perlu Upaya Keras (4,31%);
 - c. Urusan pemerintahan pilihan ada 45 indikator program, terdapat 26 indikator telah tercapai (57,78%), 16 indikator akan tercapai (35,56%) dan 1 indikator perlu upaya keras (2,22%);
 - d. Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 24 indikator program, terdapat 22 indikator telah tercapai (91,67%), 1 indikator akan tercapai (4,17%) dan 1 indikator perlu upaya keras (4,17%);
 - e. Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 32 indikator program, terdapat 22 indikator telah tercapai (68,75%), 8 indikator akan tercapai (25%) dan 2 indikator perlu upaya keras (6,25%);
 - f. Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 9 indikator program, terdapat 7 indikator telah tercapai (77,78%) dan 2 indikator akan tercapai (22,22%);
 - g. Unsur kewilayahan ada 9 indikator program, terdapat 5 indikator

- telah tercapai (55,56%) dan 4 indikator akan tercapai (44,44%);
- h. Unsur pemerintahan umum ada 10 indikator program, dengan status telah tercapai (100%).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

**Jl. Jendral Ahmad Yani No 32 Temanggung
Telepon (0293) 491004 Faksimili (0293) 491040 491801**



info@temanggungkab.go.id



Pemkab Temanggung



www.temanggungkab.go.id



pemkabtmg